PEMERINTAH
KOTA BINJAI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA BINJAI

2025-2029

SALINAN

WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

18. Peraturan.....

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan
WALI KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.

5. Dewan.....

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, meliputi urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untu periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhitung sejak Tahun 2025-2029.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.
17. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

20. Program.....

20. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 2

(1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun berdasarkan RPJP Nasional dan RPJP Daerah.
(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program Pemerintah Daerah, yang mencakup gambaran secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 3

(1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Tahun 2025-2029.
(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RKPD yang memuat rencana kerangka ekonomi daerah, prioritas Pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RPJM DAERAH

Pasal 4

(1) Sistematika RPJM Daerah meliputi:
BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Gambaran Umum Daerah;
BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan;
BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
BAB V : Penutup.

(2) Ketentuan mengenai isi dan uraian dari RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III.....

www.jdih.binjaikota.go.id

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengendalian program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
    b. pengendalian pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. evaluasi program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD; dan
    b. evaluasi indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah.
(4) Pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:
    a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
    b. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
    c. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
    d. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJM DAERAH

Pasal 6

(1) Perubahan RPJM Daerah hanya dapat dilakukan apabila:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila masa berlaku RPJM Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB V.....

www.jdih.binjaikota.go.id

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA : (2-77/2025)

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh setiap kota, termasuk Kota Binjai. Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat, penting bagi kita untuk merancang kebijakan pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi daerah. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025-2029 menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi dan misi Kota Binjai sebagai kota yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Dokumen RPJMD ini dirancang untuk menjadi panduan dalam mengarahkan arah pembangunan Kota Binjai dalam lima tahun ke depan. Penyusunan RPJMD ini memperhatikan berbagai aspek penting, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, peningkatan daya saing ekonomi, hingga pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam setiap program dan kebijakan yang digariskan, diperlukan partisipasi aktif masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga pembangunan yang dijalankan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kami berharap bahwa melalui RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 ini, kita dapat bersama-sama membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan Kota Binjai, menjadikannya lebih berdaya saing, adil, dan makmur, serta mampu menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Dengan dukungan dari semua pihak, kami yakin bahwa visi pembangunan Kota Binjai akan tercapai dengan baik.

Binjai, 20 Agustus 2025
Tim Penyusun.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vii
BAB 1 – PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 2
1.3. Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya 4
1.4. Maksud dan Tujuan 7
1.5. Sistematika Penulisan 8
BAB 2 – GAMBARAN UMUM DAERAH 10
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 10
2.1.3. Aspek Geografis dan Demografis 11
2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 42
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah 74
2.1.5. Aspek Pelayanan Umum 93
2.1.5. Standar Pelayanan Minimum 102
2.2. Gambaran Keuangan Daerah 118
2.1.1. Realisasi APBD Kota Binjai 118
Neraca Keuangan Daerah 125
2.2.2. Proyeksi Keuangan Kota Binjai 128
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis 139
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah 139
2.3.2. Isu Strategis Daerah 144
BAB 3 – VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS 162
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 162
3.1.1. Visi dan Misi RPJMD Kota Binjai 162
3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Binjai 169
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 191
3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kota Binjai 191
3.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Binjai 210
3.2.3. Program Prioritas Pembangunan Kota Binjai 239
BAB 4 – PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 302
4.1. Program Perangkat Daerah 302
4.1.1. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar 302

4.1.2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 308
4.1.3. Urusan Pilihan 319
4.1.4. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan 323
4.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 326
4.1.6. Unsur Kewilayahan 327
4.1.7. Unsur Pemerintahan Umum 327
4.2. Indikator Kinerja Utama 431
4.3. Indikator Kinerja Daerah 439
4.4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 486
4.5. Dukungan Pemerintah Kota Binjai terhadap PHTC dan Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara 492
BAB 5 – PENUTUP 572
5.1. Kaidah Pelaksanaan 572
5.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan 572
5.1.2. Kerangka Pengendalian 574
5.1.3. Sistem Insentif 585
5.1.4. Mekanisme Perubahan 585
5.1.5. Komunikasi Publik 586
5.2. Pembiayaan Pembangunan 586
5.3. Kesimpulan 588

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Luas Wilayah Kota Binjai 13
Tabel 2. 2. Kondisi Curah dan Hari Hujan Kota Binjai 13
Tabel 2. 3. Kuantitas Air Permukaan Kota Binjai 14
Tabel 2. 4. Kualitas Air Permukaan Kota Binjai 14
Tabel 2. 5. Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Binjai 17
Tabel 2. 6. Daya Dukung Air Kota Binjai 18
Tabel 2. 7. Proyeksi Daya Dukung Air di Kota Binjai 2025-2029 19
Tabel 2. 8. Daya Dukung Pangan Kota Binjai 20
Tabel 2. 9. Daya Dukung Penyediaan Pangan Kota Binjai Tahun 2025-2029 21
Tabel 2. 10. Ketahanan Energi Kota Binjai 22
Tabel 2. 11. Persentase Rumah Tangga berdasarkan Sumber Air Utama Kota Binjai .. 23
Tabel 2. 12. Indeks Ketahanan Pangan dan Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Binjai 24
Tabel 2. 13. Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2020-2024 24
Tabel 2. 14. Perkembangan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Binjai 25
Tabel 2. 15. Kejadian Bencana di Kota Binjai 27
Tabel 2. 16. Indeks Resiko Bencana Kota Binjai Tahun 2024 27
Tabel 2. 17. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Binjai Tahun 2024 28
Tabel 2. 18. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Binjai 29
Tabel 2. 19. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Binjai Menurut 31
Tabel 2. 20. Jumlah Penduduk Kota Binjai Menurut Kecamatan Tahun 2024 32
Tabel 2. 21. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2029 36
Tabel 2. 22. Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2029 37
Tabel 2. 23. Proyeksi Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2029 Menurut Kelompok Umur dari Jenis Kelamin Laki-Laki 38
Tabel 2. 24. Proyeksi Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2029 Menurut Kelompok Umur dari Jenis Kelamin Perempuan 38
Tabel 2. 25. Proyeksi Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2029 Menurut Kelompok Umur 39
Tabel 2. 26. Proyeksi Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2029 Berdasarkan Rasio Jenis Kelamin 41
Tabel 2. 27. Proyeksi Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2029 Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif 41
Tabel 2. 28. Proyeksi Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2029 42
Tabel 2. 29. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai Berdasarkan 44
Tabel 2. 30. PDRB per Kapita Kota Binjai 49
Tabel 2. 31. Prevalensi Stunting Kota Binjai 58
Tabel 2. 32. Indeks Pembangunan Keluarga Kota Binjai 69
Tabel 2. 33. Dependency Ratio Kota Binjai 74
Tabel 2. 34. PDRB Sektor Industri Pengolahan Kota Binjai 77
Tabel 2. 35. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 78
Tabel 2. 36. PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Akomodasi dan Makan Minum Kota Binjai 79
Tabel 2. 37. Indikator Inovasi Daerah Kota Binjai 82
Tabel 2. 38. Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Binjai 87

Tabel 2. 39. Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Binjai 88
Tabel 2. 40. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kota Binjai..... 90
Tabel 2. 41. Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Binjai Tahun 2020-2024 91
Tabel 2. 42 Tingkat Inflasi di Kota Binjai Tahun 2020-2024 92
Tabel 2. 43. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Binjai 93
Tabel 2. 44. Indeks Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik Kota Binjai..... 94
Tabel 2. 45. Indeks Pelayanan Publik Kota Binjai 95
Tabel 2. 46. Opini BPK Kota Binjai 96
Tabel 2. 47. Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kota Binjai..... 98
Tabel 2. 48. Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah Kota Binjai Tahun 2024.....100
Tabel 2. 49. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Urusan Pendidikan.....104
Tabel 2. 50. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Urusan Kesehatan.....107
Tabel 2. 51. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Urusan Sosial.....111
Tabel 2. 52. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Urusan Pekerjaan Umum 113
Tabel 2. 53. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Urusan Perumahan dan Permukiman Rakyat.....115
Tabel 2. 54. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....117
Tabel 2. 55. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Binjai 119
Tabel 2. 56. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Binjai 119
Tabel 2. 57. Realisasi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Total Penerimaan Daerah Kota Binjai 121
Tabel 2. 58. Realisasi Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 124
Tabel 2. 59. Perkembangan Neraca Daerah Pemerintah Kota Binjai dan Rata-rata Pertumbuhannya 126
Tabel 2. 54. Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Binjai.....127
Tabel 2. 61. Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025-2030.....130
Tabel 2. 62. Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025-2030 132
Tabel 2. 63. Proyeksi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025-2030.....134
Tabel 2. 64. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025-2030 136
Tabel 2. 65. Proyeksi Alokasi Anggaran Pembangunan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025-2030.....138
Tabel 2. 66. Keterkaitan Isu Strategis Daerah Kota Binjai 160
Tabel 3. 1. Keterkaitan Visi dan Kata Kunci RPJMD Binjai dengan RPJPD Binjai dengan RPJMD Sumatera Utara dan RPJMN Indonesia.....163
Tabel 3. 2. Pencapaian Sasaran Utama Pembangunan RPJMD Kota Binjai.....164
Tabel 3. 3. Penyelerasan Sasaran Pembangunan RPJMD Kota Binjai dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 166
Tabel 3. 4. Keterkaitan Misi RPJMD Binjai dengan RPJPD Binjai dan RPJMD Sumatera Utara serta RPJMN Indonesia 168
Tabel 3. 5. Struktur Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Outcome RPJMD Kota Binjai 2025-2029.....173
Tabel 3. 6. Keterkaitan Sasaran RPJMD Kota Binjai dengan RPJMD Sumatera Utara dan RPJMN Indonesia 181
Tabel 3. 7. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029.....184

Tabel 3. 8. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2025-2029 204
Tabel 3. 9. Pentahapan Pembangunan RPJMD Kota Binjai 2025-2029 211
Tabel 3. 10. Strategi dan Tahapan Arah Kebijakan RPJMD Kota Binjai 2025-2029 213
Tabel 3. 11. Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Binjai ... 230
Tabel 3. 12. Perumusan Program Prioritas RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 ... 260
Tabel 4. 1. Program Perangkat Daerah 330
Tabel 4. 2. Dukungan Program Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 382
Tabel 4. 3. Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Kota Binjai dengan Sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD 432
Tabel 4. 4. Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 438
Tabel 4. 5. Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 440
Tabel 4. 6. Dukungan Program Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada Pelayanan Dasar 487
Tabel 4. 7. Dukungan Program Prioritas Daerah RPJMD Kota Binjai terhadap Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara 492
Tabel 4. 8. Dukungan Kota Binjai Terhadap PHTC Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 496
Tabel 4. 9. Dukungan Kota Binjai terhadap Program Prioritas/Proyek Strategis Daerah (PSD) 516

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 5
Gambar 1. 2. Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 5
Gambar 2. 1. Peta Wilayah Kota Binjai..... 11
Gambar 2. 2. Indeks Resiko Bencana Kota Binjai Tahun 2020-2024..... 26
Gambar 2. 3. Perbandingan Jumlah Penduduk Kota Binjai dengan Wilayah Lain di Sumatera Utara Tahun 2024..... 32
Gambar 2. 4. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Binjai 33
Gambar 2. 5. Persebaran Penduduk Kota Binjai Menurut Kecamatan Tahun 2024 34
Gambar 2. 6. Kepadatan Penduduk Kota Binjai Menurut Kecamatan Tahun 2024..... 34
Gambar 2. 7. Total Fertility Rate Kota Binjai Menurut Sensus Penduduk Tahun 2010 dan 2020 35
Gambar 2. 8. Migrasi Risen Kota Binjai..... 36
Gambar 2. 9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai Dibandingkan Kabupaten/ Kota Lain di Sumatera Utara Tahun 2024 43
Gambar 2. 10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai Dibandingkan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional..... 44
Gambar 2. 11. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Binjai 45
Gambar 2. 12. Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Binjai dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional..... 46
Gambar 2. 13. Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2024..... 47
Gambar 2. 14. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Binjai dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional 48
Gambar 2. 15. Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Binjai dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional 48
Gambar 2. 16. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Binjai dengan Sumatera Utara dan Nasional..... 50
Gambar 2. 17. Perbandingan Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2024 51
Gambar 2. 18. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2024 52
Gambar 2. 19. Perbandingan Indeks Gini Kota Binjai, Sumatera Utara..... 53
Gambar 2. 20. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional..... 53
Gambar 2. 21. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2024..... 54
Gambar 2. 22. Perbandingan Umur Harapan Hidup Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional 56
Gambar 2. 23. Perbandingan UHH di Sumatera Utara Tahun 2024 57
Gambar 2. 24. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional..... 59
Gambar 2. 25. Perbandingan RLS di Sumatera Utara Tahun 2024 60
Gambar 2. 26. Perkembangan dan Perbandingan Harapan Lama Sekolah 61
Gambar 2. 27. Perbandingan HLS di Sumatera Utara Tahun 2024 61
Gambar 2. 28. Kemampuan Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan SD/ Sederajat Kota Binjai Tahun 2023 62
Gambar 2. 29. Kemampuan Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan SMP/ Sederajat Kota Binjai Tahun 2023 62

Gambar 2. 30. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Binjai, Sumatera Utara dan Nasional 63
Gambar 2. 31. Indeks Perlindungan Anak Kota Binjai, Sumatera Utara 67
Gambar 2. 32. Indeks Ketimpangan Gender Kota Binjai, Sumatera Utara dan Nasional 70
Gambar 2. 33. Indeks Pembangunan Gender Kota Binjai, Sumatera Utara dan Nasional 71
Gambar 2. 34. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Binjai, Sumatera Utara dan Nasional 72
Gambar 2. 35. Perbandingan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Binjai, Sumatera Utara dan Nasional 73
Gambar 2. 36. Perkembangan Produktivitas Tenaga Kerja Kota Binjai 75
Gambar 2. 37. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Binjai, Sumatera Utara dan Nasional 81
Gambar 2. 38. Indeks Masyarakat Digital Kota Binjai, Sumatera Utara dan Nasional .. 85
Gambar 2. 39. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai dengan Wilayah Sekitar 89
Gambar 2. 40. Perbandingan dan Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Kota Binjai.....101
Gambar 5. 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan pada Skala Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.....573
Gambar 5. 2. Kerangka Kerja MRPN.....576
Gambar 5. 3. Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJMD 577

BAB 1 – PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap kepala daerah wajib menyusun RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun masa jabatannya. Dengan demikian, RPJMD memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen yang menjembatani visi, misi, dan program kepala daerah dengan arah pembangunan jangka panjang.

RPJMD Kota Binjai Tahun 2025–2029 disusun dengan berpedoman pada **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai 2025-2045** dan harus selaras dengan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029**. Keterpaduan ini penting agar pembangunan Kota Binjai dapat berjalan searah dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional, sekaligus memastikan kesinambungan antardokumen perencanaan yang bersifat hierarkis.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kebijakan pembangunan, tetapi juga sebagai sarana pengendali, pengukur, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Melalui RPJMD, pemerintah daerah memiliki acuan yang jelas untuk mengalokasikan sumber daya, menentukan prioritas pembangunan, serta menjawab berbagai permasalahan strategis yang dihadapi daerah. Dengan demikian, RPJMD berperan sebagai alat koordinasi dan konsolidasi pembangunan lintas sektor.

RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 juga merupakan **tahap awal dari pelaksanaan RPJPD Kota Binjai 2025-2045**. Tahap lima tahun pertama ini berperan penting dalam membangun fondasi bagi pencapaian visi jangka panjang Kota Binjai 2045, yaitu *“Kota Binjai yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”* Pada tahap ini, arah pembangunan difokuskan pada penguatan daya saing daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Selain itu, penyusunan RPJMD 2025-2029 juga mempertimbangkan tantangan pembangunan daerah, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan internal meliputi kebutuhan peningkatan kualitas layanan publik, pengelolaan ruang kota yang efisien, serta penguatan ekonomi lokal. Sementara itu, tantangan eksternal mencakup dinamika globalisasi, perubahan iklim, serta tuntutan daya saing regional dan nasional.

Dengan memperhatikan aspek tersebut, RPJMD diharapkan mampu memberikan arah kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan.

Dengan demikian, RPJMD Kota Binjai 2025-2029 tidak hanya dimaksudkan sebagai dokumen normatif semata, melainkan juga **instrumen strategis pembangunan**. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi Pemerintah Kota Binjai dalam menyusun program, kegiatan, dan kebijakan yang efektif dan efisien, serta memastikan pembangunan daerah berjalan berkelanjutan. Melalui RPJMD ini, diharapkan terwujud sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain dalam mewujudkan Kota Binjai yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing menuju tahun 2045.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Nomor 459Tahun 2018);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);
23. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 53).

1.3. Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya

Hubungan antar dokumen perencanaan daerah secara relevan dan kontekstual sangat mendukung dalam upaya membangun keselarasan perencanaan antar dokumen perencanaan dalam lingkup daerah maupun dengan lingkup nasional dan provinsi.

Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Gambar 1. 1. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

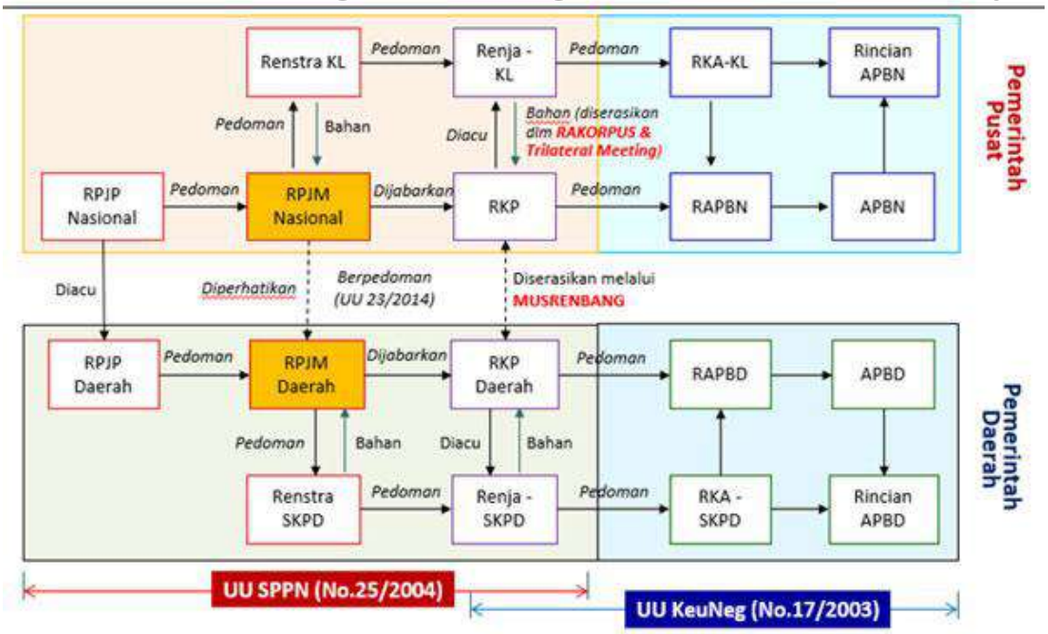

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, RPJMD Kota Binjai harus diselaraskan dengan RPJPD Kota Binjai RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, RPJMD Daerah lain yang berbatasan, dan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Utara, serta RTRW Daerah lain yang berbatasan. Dengan melihat gambar di bawah dalam rangka untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan wilayah dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sehingga RPJMD menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu. Berikut penjabaran keterkaitan antar dokumen perencanaan.

Gambar 1. 2. Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

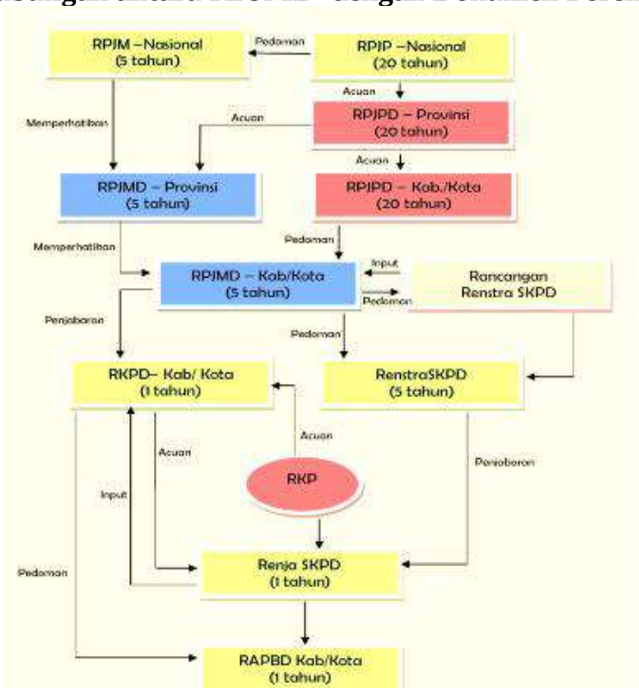

a. Hubungan antara RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045

RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 tahap pertama. Sasaran pokok RPJPD pada tahap Pertama akan dijadikan sebagai pedoman pada penyusunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029. Berbagai evaluasi RPJPD periode sebelumnya juga akan digunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029.

b. Hubungan Antara RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 dengan Renstra OPD Kota Binjai

Renstra OPD adalah penjabaran dari RPJMD dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan. Pada dasarnya RPJMD merupakan gradasi dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra OPD.

c. Hubungan Antara RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kota Binjai

Implementasi RPJMD didasarkan pada RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040 baik dari aspek kebijakan maupun operasionalisasi dan keselarasannya dengan rencana program pembangunan untuk menjamin keselarasannya dengan rencana program pembangunan untuk menjamin kelangsungan dan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan di Kota Binjai. Dengan kata lain, pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kota Binjai dalam RPJMD akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RTRW.

d. Hubungan Antara RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 dan RPJMN

RPJMD harus mempedomani RPJMN terkait sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*. Indikator kinerja sasaran RPJMD dimana harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam penyusunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 melalui penyelarasan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan.

e. Hubungan Antara RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

RPJMD Kota Binjai juga harus mempedomani RPJPD Provinsi Sumatera Utara sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja pada sasaran RPJMD Kota Binjai harus memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memperhatikan isu-isu strategis pembangunan Provinsi Sumatera Utara untuk sinkronisasi kebijakan, dan untuk memastikan dukungan Pemerintah Kota Binjai dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara serta pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.

f. Hubungan Antara RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 dan KLHS Kota Binjai

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Binjai dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Kota Binjai memiliki hubungan yang erat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. RPJMD berfokus pada perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur dalam jangka menengah, sementara KLHS menilai dampak lingkungan dari rencana pembangunan tersebut. KLHS memastikan bahwa program-program dalam RPJMD tidak merusak lingkungan dengan memberikan rekomendasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, KLHS berperan untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dalam RPJMD dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, memastikan bahwa pembangunan Kota Binjai tetap ramah lingkungan dan berkelanjutan.

1.4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyempurnakan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 mencakup gambaran umum daerah; visi dan misi kepala daerah; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program prioritas; program perangkat daerah; serta gambaran keuangan daerah.

b. Tujuan

Penyusunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 memiliki tujuan antara lain sebagai berikut :

a. Untuk mencapai sasaran Pembangunan Nasional yang termuat di dalam RPJM Nasional, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Binjai.
b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Binjai Tahun 2025-2029.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Bab 1 – Pendahuluan

Bagian ini memberikan gambaran umum penyusunan RPJMD Kota Binjai yang meliputi latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab 2 – Gambaran Umum Daerah

Bagian ini memberikan informasi pengolahan data yang diikuti analisis deskriptif dan analisis diagnostik terhadap 4 (empat) aspek pembangunan, yaitu : aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum. Bagian ini juga berisi tentang gambaran singkat kondisi keuangan daerah selama lima tahun terakhir yang juga dilengkapi dengan gambaran proyeksi keuangan daerah untuk lima tahun ke depan. Bagian ini juga mengidentifikasi permasalahan pembangunan maupun isu strategis baik secara global, nasional dan regional yang dapat mempengaruhi pembangunan Kota Binjai baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bab 3 – Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029. Bagian ini juga menjabarkan strategi dan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan Kota Binjai dalam mencapai RPJMD Tahun 2025-2029.

Bab 4 – Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bagian ini memuat daftar program Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan Kota Binjai, serta menjabarkan indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025-2029. Bagian ini juga memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

Bab 5 – Penutup

Bagian ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di Kota Binjai.

BAB 2 – GAMBARAN UMUM DAERAH

Bagian ini menampilkan analisis deskriptif dan analisis diagnostik berupa pengolahan data dan informasi periode 2019-2023 dari pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan, yaitu : aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek layanan umum. Bagian ini juga menampilkan gambaran keuangan daerah Kota Binjai mengenai realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 beserta proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029. Bagian ini juga akan menampilkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah Kota Binjai.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menyajikan data dan informasi 4 (empat) aspek pembangunan seperti aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum yang disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.

Hasil evaluasi capaian pembangunan daerah Kota Binjai selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya beberapa keberhasilan sekaligus tantangan yang perlu menjadi perhatian. Dari sisi capaian, pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga meskipun terdampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar **–2,34%**, namun berhasil bangkit kembali hingga mencapai **4,56% pada tahun 2023**, mendekati kondisi pra-pandemi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan tren peningkatan, dari **77,15 pada tahun 2020** menjadi **78,64 pada tahun 2023**, yang menandakan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan juga terlihat pada rata-rata lama sekolah yang naik dari **10,32 tahun menjadi 10,65 tahun**, serta harapan lama sekolah yang meningkat dari **13,12 tahun menjadi 13,42 tahun**.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang belum sepenuhnya teratasi. Angka kemiskinan Kota Binjai pada tahun 2020 tercatat sebesar **7,86%** dan berhasil turun menjadi **7,02% pada tahun 2023**, tetapi capaian ini masih di atas target RPJMD sebelumnya. Demikian pula, tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang sempat mencapai **7,25% pada tahun 2020** hanya mampu ditekan hingga **6,18% pada tahun 2023**, yang berarti masih ada tantangan dalam penciptaan lapangan kerja. Dari sisi lingkungan, luas ruang terbuka hijau (RTH) baru mencapai **14% dari total wilayah kota**, masih jauh dari target minimal 30% sesuai amanat Undang-Undang Tata Ruang. Sementara itu, volume timbunan sampah yang mencapai rata-rata **350 ton per hari** belum sepenuhnya tertangani dengan baik.

Berdasarkan evaluasi tersebut, saran strategis yang dapat menjadi fokus dalam RPJMD 2025-2029 adalah penguatan ekonomi lokal melalui sektor unggulan berbasis potensi daerah. UMKM perlu diperkuat, mengingat kontribusinya terhadap PDRB

mencapai sekitar **34%**. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi penting dengan menargetkan penurunan angka stunting dari **18,4% pada 2023** menuju **14% pada 2029**. Dalam aspek lingkungan, diperlukan kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R yang lebih intensif, serta percepatan penyediaan RTH hingga minimal **20% pada 2029**. Pemerataan pembangunan juga harus ditekankan, terutama di wilayah perbatasan dan pinggiran kota yang masih tertinggal dalam akses infrastruktur dasar. Dari sisi tata kelola fiskal, pendapatan asli daerah (PAD) yang pada tahun 2023 baru mencapai **Rp198 miliar** perlu terus ditingkatkan melalui inovasi layanan pajak dan retribusi, agar ketergantungan pada transfer pusat dapat dikurangi.

2.1.3. Aspek Geografis dan Demografis

Kota Binjai merupakan sebuah kota yang cukup strategis. Kota ini terletak 21 km di sebelah barat Kota Medan yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara yang terhubung oleh jalan raya Lintas Sumatera yang menghubungkan antara Kota Medan dengan Kota Banda Aceh di Provinsi Aceh. Hal ini semakin didukung dengan adanya pembangunan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.818 km yang direncanakan menghubungkan kota-kota di pulau Sumatra, Lampung hingga Aceh. Pembangunan Tol Trans Sumatera saat ini telah sampai pada pembangunan Tol Binjai-Langsa yang masih dalam tahap pembangunan. Adapun ruas tol baru yang sudah beroperasi adalah tol Kuala Bingai hingga Tanjung Pura. Dengan beroperasinya jalan tol baru ini, jaringan jalan tol di Sumatera Utara semakin dekat ke Aceh. Keberadaan jalan tol di Sumut dan Aceh menjadi motor ekonomi baru untuk kawasan Sumatera bagian utara. Jaringan jalan tol di Sumut dan Aceh yang semakin luas akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Binjai adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Sebelum berstatus kota, Binjai adalah ibukota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Secara geografis, Kota Binjai berada pada 3° 31’ 40’’ – 3° 40’ 2’’ Lintang Utara dan 98° 27’ 3’’ – 98° 32’ 32’’ Bujur Timur dan terletak 30 m di atas permukaan laut. Wilayah Kota Binjai seluas 90,23 km^2 berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat. Batas area di sebelah Utara adalah Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

Gambar 2. 1. Peta Wilayah Kota Binjai

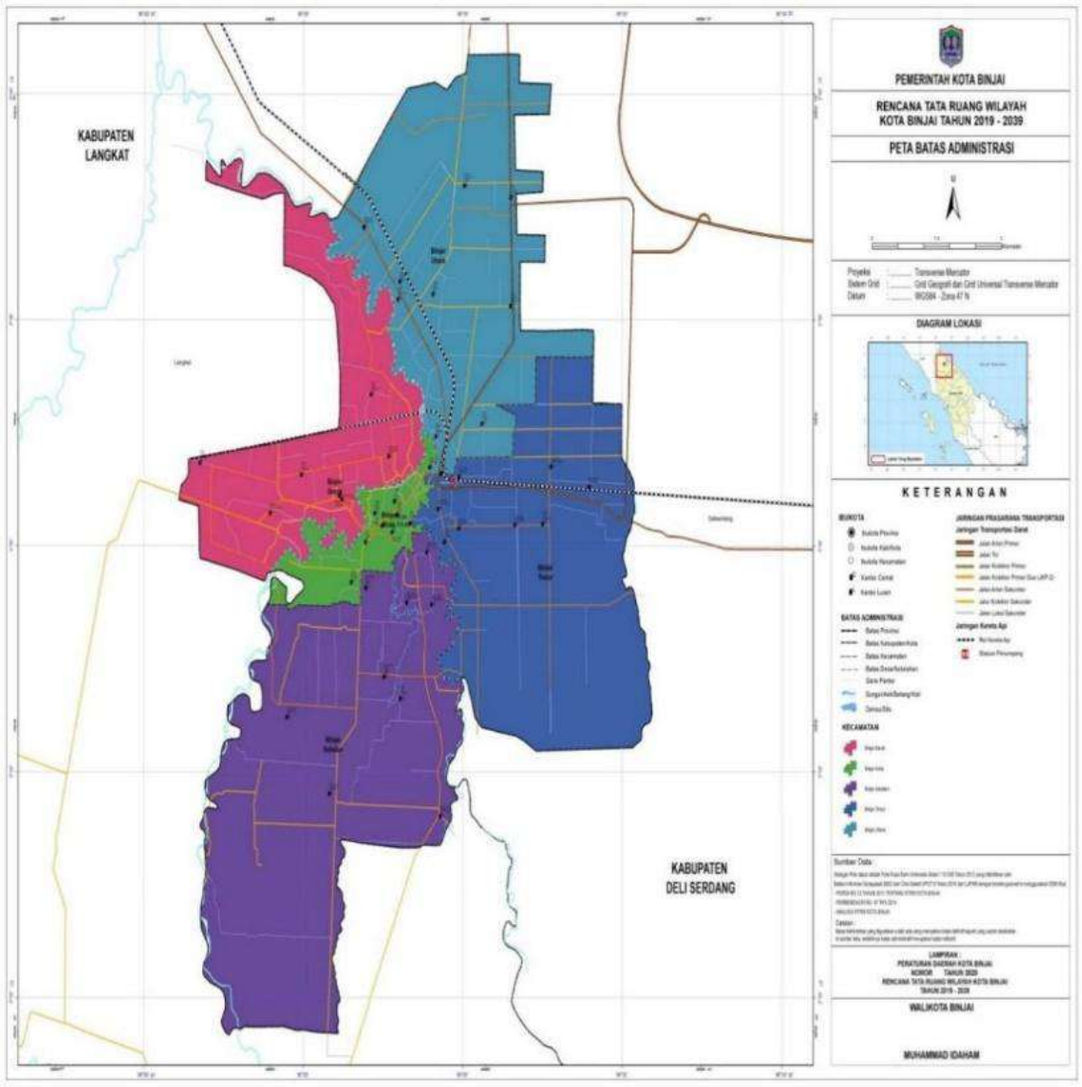

Sumber : RTRW Kota Binjai Tahun 2019-2039

Secara administratif, wilayah Binjai memiliki batas – batas area sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Timur : Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Selatan : Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang;
- Barat : Kecamatan Selesai Kab Langkat.

Kota Binjai merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 30 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Kota Binjai yang berupa daratan seluas 90,45 Km^2, atau hanya sekitar 0,08 % dari luas Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 72.981,23 Km^2. Kota Binjai merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Utara yang paling dekat dengan ibukota yaitu Kota Medan. Jarak dari Kota Medan ke Kota Binjai sekitar 21 km. Berdasarkan data BPS, Wilayah administrasi kota Binjai memiliki luas 90,45 Km^2

terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Binjai Selatan, Binjai Kota, Binjai Timur, Binjai Utara dan Binjai Barat.

Tabel 2. 1. Luas Wilayah Kota Binjai

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	Luas Wilayah Menurut BPS (Km^2)
Binjai Selatan	Binjai Estate	8	61	29,96
Binjai Kota	Kartini	7	51	4,12
Binjai Timur	Timbang Langkat	7	65	21,92
Binjai Utara	Kebun Lada	9	64	23,59
Binjai Barat	Limau Mungkur	6	43	10,86
Jumlah		**37**	**284**	**90,45**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Binjai

Kecamatan Binjai Selatan merupakan wilayah terluas di Kota Binjai dengan luas mencapai 29,96 Km² atau sekitar 33,12 % dari total luas Kota Binjai, sedangkan Kecamatan Binjai Kota merupakan wilayah terkecil di Kota Binjai dengan luas hanya sebesar 4,12 Km² atau sekitar 4,6 % dari total luas Kota Binjai. Kecamatan Binjai Utara merupakan wilayah di Kota Binjai yang memiliki jumlah kelurahan paling banyak dibandingkan wilayah lain di Kota Binjai yaitu sebanyak 9 kelurahan sedangkan Kecamatan Binjai Barat merupakan wilayah di Kota Binjai dengan jumlah kelurahan paling sedikit yaitu sebanyak 6 kelurahan.

Kota Binjai adalah daerah yang beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau biasanya ditandai dengan jumlah hari hujan pada tiap bulan terjadinya musim.

Tabel 2. 2. Kondisi Curah dan Hari Hujan Kota Binjai

Kecamatan	Rata-rata Tahun 2024	
	Hari Hujan	Jumlah Curah Hujan (mm^3)
Binjai Selatan	13	290,00
Binjai Kota	-	-
Binjai Timur	7	144,33
Binjai Utara	11	194,67
Binjai Barat	12	249,83

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Binjai

Kecamatan yang memiliki curah hujan tertinggi di tahun 2024 adalah Kecamatan Binjai Selatan sebesar 290 mm^3/13 hari hujan dan Kecamatan Binjai Barat sebesar 249,83 mm^3/12 hari hujan. Kota Binjai memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS). Dimana sebagian besar wilayah bagian barat termasuk kedalam DAS wampu dan sebagian kecil wilayah daerah timur termasuk kedalam DAS belawan. Kota Binjai dilalui oleh tiga sungai besar yang menjadi sumber air permukaan yaitu Sungai Bingai, Sungai Mencirim dan Sungai Bangkatan.

Sungai Bangkatan merupakan anak Sungai Mencirim yang bertemu di Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota, begitu juga Sungai Mencirim merupakan anak sungai dari Sungai Bingai yang keduanya Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara.

Pada Tahun 2021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) skala regional di Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung layanan air minum perpipaan di Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang (Mebidang). SPAM Regional Mebidang direncanakan akan melayani kebutuhan air minum untuk 80.000 Sambungan Rumah (SR) atau setara 400.000 jiwa.

Tabel 2. 3. Kuantitas Air Permukaan Kota Binjai

Sungai	Panjang (km)	Luas (km2)	Area	Debit Maks (di ambil pada musim penghujan)
S. Bingai	15	150	Binjai Utara	0,7 m^3/det
S. Mencirim	15	150	Binjai Utara	0,3 - 0,5 m^3/det
S. Bangkatan	9	45	Binjai Selatan	0,1 - 0,3 m^3/det

Sumber : RTRW Kota Binjai Tahun 2011-2030

Sumber air baku SPAM Regional Mebidang berasal dari Sungai Bingai yang melintasi wilayah Kabupaten Langkat dan Kota Binjai dengan kapasitas total sebesar 2.200 liter per detik. Total Luas Daerah Aliran Sungai yang berpengaruhi terhadap Kota Binjai khususnya Binjai Kota dan Binjai Utara 422 km². Hal ini dapat dijadikan pertimbangan atas kejadian banjir yang sering terjadi di Kota Binjai.

Tabel 2. 4. Kualitas Air Permukaan Kota Binjai

Parameter	S. Bingai	S. Mencirim	S. Bangkatan
Warna	Jernih	Coklat	Jernih
Bau	Tak berbau	Tidak berbau	Tak berbau
Temperatur (°C)	26.4 – 28.3	28.9 – 29	28.6 – 30.4
Ph	7 – 7.54	7.24 – 7.3	6.96 – 7.11
DHL (Umhos/cm)	0.30 – 256	256	157 – 256
TDS (mg/l)	56 – 227	227	140 – 227
TSS (mg/l)	9 – 7.5	9	3 – 9
DO (mg/l)	2.1 – 4.5	2.1	7.4
BOD (mg/l)	16 – 17.0	17.5	7.5
COD (mg/l)	28	31	12
NO_2 (mg/l)	0.06 – 0.08	0.013	0.05 – 0.15
NO_3 (mg/l)	2.8 – 3.24	0.04 – 0.06	3.15 – 3.24
NH_3 (mg/l)	0.17 – 10.2	0.17	0.03 – 0.15
PO_4 (mg/l)	8.8 – 10.6	17 – 21.6	11.6 – 15.9
Minyak (ug/l)	0.1 - 0.6	0.5	0.2 – 0.5
Lemak (ug/l)	0.6 – 1.10	0.5	0.2 – 0.5
Fe (mg/l)	0.51 – 0.67	1 – 1.36	1.36
Mn (mg/l)	0.001 – 0.003	0.002 – 0.003	0.04
Klorin Bebas	0.09 – 0.12	n.a.	0.3 – 0.45

Sumber : RTRW Kota Binjai Tahun 2011-2030

Dari hasil monitor Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai yang dilakukan setiap setahun sekali kualitas air sungai dapat dilihat dari empat parameter penting berikut:

- DO untuk sungai Bingai hulu dan sungai mencirim memiliki DO dibawah 3 sehingga peruntukannya masuk kedalam kelas IV. Kualitas DO yang masih memenuhi untuk kelas I adalah Sungai Mencirim;

- BOD untuk ketiga sungai sudah melebihi baku mutu karena diatas 12 mg/l yang merupakan standar untuk kelas IV;
- Kadar Phospat sangat tinggi untuk ketiga sungai karena diatas baku mutu 5 mg/l yang merupakan standar untuk kelas IV;
- Kadar Fe cukup tinggi untuk kelas I tetapi masih memenuhi untuk pengolahan air baku air minum secara konvensional dimana baku mutu berada di bawah 5 mg/l.

Penggunaan lahan di Kota Binjai secara umum menampakkan lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Guna lahan masih didominasi oleh penggunaan lahan yang tidak terbangun yaitu sebesar 6.691,14 ha atau 72,70 % dari luas wilayah Kota Binjai dibandingkan lahan terbangun hanya sebesar 27,30 % atau 2.513,07 ha. Penggunaan lahan tidak terbangun, terutama kebun/perkebunan seluas kurang lebih 4.487 ha atau 48,75 %, sawah 1.388,93 ha atau 15,09 % dan ladang 609 ha atau 6,62 %.

Lahan terbangun terbesar berupa perumahan permukiman serta perdagangan dan jasa, dan guna lahan lainnya, seperti perkantoran, fasilitas, gudang, pertambangan dan pertamina, militer dan lainnya. Lahan terbangun terdapat di Kecamatan Binjai Utara dan Binjai Timur dan paling sedikit berada di Kecamatan Binjai Kota. Kondisi besarnya lahan terbangun terkait dengan luas lahan yang ada. Sedangkan, lahan non terbangun berupa kebun, sawah dan ladang kebanyakan pada Kecamatan Binjai Selatan, Binjai Timur dan Binjai Utara. Sejalan dengan itu, dari sebaran guna lahan terlihat bahwa lahan terbangun berpusat di pusat kota (Kecamatan Binjai Kota dan sekitarnya) dan disekitar koridor-koridor jalan utama hingga pada jalan lingkungan akses koridor jalan utama. Terdapat kecenderungan walaupun masih sedikit perkembangan lahan-lahan terbangun meluas ke pinggiran kota secara sporadis (*sprawl*). Memperhatikan kemampuan pengembangan lahan wilayah Kota Binjai dengan guna lahan yang berbentuk menunjukkan korelasi kuat yaitu bagaimana dominasi guna lahan berkembang pada kemampuan lahan pengembangan sangat tinggi.

2. Potensi Sumber Daya Alam

Kota Binjai memiliki keunggulan komparatif dari segi letak geografis yang strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Medan, sebagai pusat perekonomian terbesar di Sumatera Utara. Posisi ini memberikan aksesibilitas yang tinggi terhadap jalur distribusi barang dan jasa, serta mempermudah konektivitas dengan bandara, pelabuhan, dan pusat perdagangan regional. Dengan memanfaatkan posisi ini, Kota Binjai memiliki potensi besar sebagai pusat logistik pendukung wilayah metropolitan Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo).

Sebagai kota dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor perdagangan dan jasa, Binjai memiliki potensi kuat dalam pengembangan UMKM, ritel modern, dan ekonomi kreatif. Dukungan infrastruktur pasar, kawasan perdagangan, serta peningkatan

akses digital dapat semakin memperkuat daya saing sektor ini. Perkembangan sektor jasa di Binjai juga ditopang oleh tingginya permintaan dari wilayah sekitarnya, menjadikan kota ini sebagai pusat layanan ekonomi regional.

Dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah dan akses pendidikan yang cukup baik, Kota Binjai memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat diandalkan. Stabilitas sosial yang terjaga juga mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif. Kombinasi ini menjadi kekuatan penting dalam mendorong pembangunan sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan wirausaha berbasis teknologi.

Meskipun merupakan wilayah perkotaan, Kota Binjai masih memiliki area yang potensial untuk pertanian perkotaan (urban farming), agrowisata, dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi pengembangan kota hijau dan berkelanjutan, sekaligus membuka peluang kerja baru dan meningkatkan kualitas lingkungan. Ekowisata berbasis komunitas juga dapat dikembangkan dengan mengedepankan kearifan lokal dan kekayaan budaya yang dimiliki kota.

Kota Binjai telah memiliki dukungan infrastruktur dasar yang cukup baik, seperti jalan, jaringan listrik, dan sistem air bersih. Selain itu, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan juga terus meningkat, sebagaimana tercermin dalam pengelolaan fiskal dan pelayanan publik. Hal ini menjadi modal penting dalam menjalankan program pembangunan jangka menengah secara lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan pada Perda Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040, Rencana pola ruang wilayah Kota Binjai meliputi peruntukan lindung seluas kurang lebih 1.671 hektar dan kawasan peruntukan budidaya seluas kurang lebih 7.630 hektar.

1) Kawasan Peruntukan Lindung

   Pola ruang kawasan peruntukan lindung di wilayah Kota Binjai secara umum bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dan melestarikan fungsi lindung kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan lindung lainnya, serta menghindari berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan rawan bencana.

   Rencana pola ruang kawasan peruntukan lindung yang terdapat di Kota Binjai terdiri dari:

   a) Kawasan Perlindungan Setempat
   b) Kawasan Cagar Budaya
   c) Ruang Terbuka Hijau

Tabel 2. 5. Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Binjai

No	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas (Ha)	Persentase (persen)
1	RTH Hutan Kota	1.244,00	66,38
2	RTH Taman Kota	29,00	1,54
3	RTH Pemakaman	12,00	0,64
4	RTH Sempadan Jalur Kereta Api	58,00	3,09
5	RTH Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	92,00	4,90
6	RTH Sempadan Sungai	236,00	12,59
7	RTH Taman Lingkungan	203,00	10,83
	Jumlah	**1.874,00**	**100,00**

Sumber : RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040

2) Kawasan Peruntukan Budidaya

Pola ruang kawasan budidaya perkotaan penetapannya didasarkan pada kriteria yang meliputi aspek daya dukung atau kesesuaian lahan yang dapat dikembangkan untuk berbagai kegiatan fungsional perkotaan, serta aspek-aspek yang mempengaruhi sinergi antar kegiatan dan kelestarian lingkungan. Kawasan peruntukan budidaya yang akan dikembangkan di Kota Binjai meliputi:

a) Kawasan Pertanian
b) Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
c) Kawasan Peruntukan Industri
d) Kawasan Pariwisata
e) Kawasan Permukiman
f) Kawasan Perdagangan dan Jasa
g) Kawasan Perkantoran
h) Kawasan Pendidikan
i) Kawasan Kesehatan
j) Kawasan RTNH Kota
k) Kawasan Evakuasi Bencana
l) Kawasan Sektor Informal
m) Kawasan Pertahanan dan Keamanan

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan identifikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Indonesia dengan menggunakan pendekatan jasa ekosistem. Pendekatan ini mengacu pada Millennium Ecosystem Assessment United Nation. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diukur dengan memperhitungkan nilai jasa ekosistem. Semakin tinggi nilai jasa ekosistem, semakin tinggi pula kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Daya Dukung Air

Sumber daya air yang tersedia di suatu wilayah dapat berupa sumber air tanah dan air permukaan. Ketersediaan air tanah yang dimiliki suatu wilayah adalah air tanah pada

aquifer bebas dengan jumlah sebesar kemampuan lahan pada wilayah tersebut menyerap air hujan. Untuk menjaga kelestarian sumberdaya air, air tanah dalam yang merupakan air pada aquifer tertekan tidak diperhitungkan dalam penghitungan ketersediaan air, karena air tanah dalam dikategorikan sebagai non-renewable resources (sumberdaya tidak terbarukan). Sementara sumber air permukaan dapat bersumber dari air sungai, air danau, situ, bendungan yang ada di wilayah tersebut dan atau dipasok/dialirkan dari luar wilayah. Daya dukung air ditinjau dari ketersediaan air (supply air) dan kebutuhan air (demand air) terdapat dihitung melalui ketersediaan air dengan pendekatan limpasan air dan potensi mata air yang dibandingkan dengan kebutuhan air dari total kebutuhan air domestik dan non domestik.

Tabel 2. 6. Daya Dukung Air Kota Binjai

Kecamatan	Ketersediaan Air Limpasan	Kebutuhan Air	Daya Dukung	
Binjai Barat	14.867.569	12.929.054,55	1.938.514,90	Belum Terlampaui
Binjai Kota	4.000.386	4.561.623,41	-561.237,68	Terlampaui
Binjai Selatan	27.488.334	29.611.264,93	-2.122.931,42	Terlampaui
Binjai Timur	17.053.387	23.134.414,26	-6.081.027,26	Terlampaui
Binjai Utara	21.847.544	18.859.659,94	2.987.884,53	Belum Terlampaui
Total	**85.257.220**	**89.096.017**	**-3.838.797**	**Terlampaui**
Ketersediaan Air Sungai	6.937.920			
Kebutuhan SPAM Regional	34.689.600			
Surplus/Defisit	-31.590.477			
Daya Dukung	**Terlampaui**			

Sumber : KLHS RPJMD Kota Binjai 2025-2029

Perhitungan daya dukung air adalah untuk mengetahui apakah potensi ketersediaan air yang ada mampu mencukupi kebutuhan masyarakat baik untuk kebutuhan domestik atau rumah tangga dan kebutuhan non domestik lainnya. Daya dukung air di Kota Binjai pada tahun 2022 Sudah Terlampaui dengan defisit sebesar -31.590.477 m^3. Kondisi defisit terjadi di 3 kecamatan, Binjai Kota, Binjai Selatan, dan Binjai Timur. Proyeksi daya dukung air bersih dengan memperhitungkan proyeksi pertumbuhan penduduk dan perubahan peruntukan pola ruang sebagai alokasi penggunaan lahan di masa depan. Perubahan jenis-jenis penggunan lahan 2022 yang diproyeksikan menjadi alakasi peruntukan pola ruang RTRW akan dikaitkan untuk menghitung perubahan penggunaan lahan di tahun awal (2022) menuju penggunaan lahan di masa depan (2045). Penggunaan lahan dikelompokkan mengikuti pola ruang RTRW, kemudian dicari koefisien tertimbangnya dan kebutuhan rata-rata di setiap kelompok lahan.

Dari tabel proyeksi daya dukung air, dapat dilihat bahwa kondisi daya dukung air bersih Terlampaui dengan defisit sebesar 40.767.572,15 m3 pada tahun 2025 dan akan meningkat hingga tahun 2029, defisit menjadi sebesar 53.817.868,73 m3. Peningkatan defisit ini disebabkan oleh meningkatnya kawasan permukiman dan jumlah penduduk.

Tabel 2. 7. Proyeksi Daya Dukung Air di Kota Binjai 2025-2029

Penggunaan Lahan	2025		2026		2027		2028		2029	
	Ketersediaan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kebutuhan
Badan Air	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00
Ruang Terbuka Hijau	68,58	16.250.531,72	86,82	20.572.459,44	105,06	24.894.387,16	123,30	29.216.314,88	141,54	33.538.242,61
Kawasan Tanaman Pangan	716,71	22.661.824,42	688,97	21.784.740,45	661,23	20.907.656,49	633,49	20.030.572,52	605,75	19.153.488,56
Kawasan Industri	101,24	1.597.405,74	100,78	1.590.178,38	100,32	1.582.951,03	99,86	1.575.723,67	99,41	1.568.496,32
Lahan Terbangun	5,13	8.980,76	5,92	10.359,30	6,70	11.737,84	7,49	13.116,38	8,28	14.494,92
Kawasan Permukiman	2.042,53	7.369.370,55	2.081,28	7.509.177,20	2.120,03	7.648.983,86	2.158,78	7.788.790,51	2.197,53	7.928.597,16
Vegetasi Lain	30,58	0,00	31,01	0,00	31,43	0,00	31,86	0,00	32,28	0,00
Perkebunan	793,07	22.629.157,48	753,42	21.497.699,61	713,77	20.366.241,74	674,11	19.234.783,86	634,46	18.103.325,99
Koefisien tertimbang	0,40		0,40		0,40		0,40		0,40	
Sedia Air Limpasan	84.605.870,39		84.388.753,04		84.171.637,21		83.954.520,62		83.737.404,03	
Air Baku Sungai	6.937.920,00		6.937.920,00		6.937.920,00		6.937.920,00		6.937.920,00	
Pasokan Air Total	91.543.790,39		91.326.673,04		91.109.557,21		90.892.440,62		90.675.324,03	
Kebutuhan GL		70.517.270,66		72.964.614,38		75.411.958,11		77.859.301,83		80.306.645,55
Kebutuhan Domestik		27.104.491,88		27.682.423,54		28.273.595,23		28.878.327,07		29.496.947,21
Kebutuhan SPAM Regional		34.689.600,00		34.689.600,00		34.689.600,00		34.689.600,00		34.689.600,00
Kebutuhan Air Total		**132.311.362,54**		**135.336.637,92**		**138.375.153,34**		**141.427.228,90**		**144.493.192,76**
Surplus-Defisit	**-40.767.572,15**		**-44.009.964,88**		**-47.265.596,12**		**-50.534.788,27**		**-53.817.868,73**	
Daya Dukung	**Terlampaui**		**Terlampaui**		**Terlampaui**		**Terlampaui**		**Terlampaui**	

Sumber : KLHS RPJMD Kota Binjai 2025-2029

Daya Dukung Pangan

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta keseimbangan antar keduanya. Manusia membutuhkan kalori untuk menjalankan aktivitasnya. Kalori/energi tersebut didapatkan dari bahan-bahan pangan. Kebutuhan pangan tersebut disediakan oleh sumber daya alam Kota Binjai berupa pangan nabati seperti padi sawah dan jagung; pangan hewani dari telur, daging unggas, dan ternak yang menghasilkan kalori. Perhitungan kalori dilakukan dengan menggunakan data komoditi pangan dan data kandungan kalori/gizi per 100 gram jenis pangan. Untuk pangan nabati dari padi digunakan juga rasio Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 85,74 persen, dan rasio GKG ke Beras sebesar 63,68 persen, untuk menghitung nilai kalori.

Tabel 2. 8. Daya Dukung Pangan Kota Binjai

No	Kecamatan	Penyediaan Kalori	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Kalori Penduduk	Surplus/Defisit	Daya Dukung
1	Binjai Selatan	17.670.919.093,00	60.150	46.104.975.000,00	-28.434.055.907,00	TERLAMPAUI
2	Binjai Kota	165.208.789,80	32.435	24.861.427.500,00	-24.696.218.710,20	TERLAMPAUI
3	Binjai Timur	10.233.242.456,20	67.505	51.742.582.500,00	-41.509.340.043,80	TERLAMPAUI
4	Binjai Utara	29.894.903.231,40	87.297	66.913.150.500,00	-37.018.247.268,60	TERLAMPAUI
5	Binjai Barat	42.657.787.085,40	52.622	40.334.763.000,00	2.323.024.085,40	BELUM TERLAMPAUI
Kota Binjai		**100.622.060.655,80**	**300.009**	**229.956.898.500,00**	**-129.334.837.844,20**	**TERLAMPAUI**

Sumber : KLHS RPJMD Kota Binjai 2025-2029

Daya dukung pangan dihitung dengan membandingkan ketersediaan kalori pangan dengan kebutuhan kalori. Kebutuhan kalori atau Angka Kecukupan Energi masyarakat Indonesia menurut Kementerian Kesehatan sebesar 2.100 kkal/orang/hari. Dengan jumlah penduduk sebanyak 300.009 jiwa pada tahun 2022, kebutuhan kalori pangan di Kota Binjai adalah sebesar 229.956.898.500,00 kkal per tahun. Kebutuhan kalori terbesar terdapat di Kecamatan Binjai Utara. Kondisi Daya Dukung Penyediaan Pangan di Kota Binjai Tahun 2022 berada dalam status TERLAMPAUI di 4 (empat) kecamatan. Kecamatan Binjai Barat masih berada dalam kondisi surplus. Berikut hasil perhitungan daya dukung pangan di Kota Binjai.

Tabel 2. 9. Daya Dukung Penyediaan Pangan Kota Binjai Tahun 2025-2029

Penggunaan Lahan	**2022 (Ha)**	**2045 (Ha)**	**Perubahan/ tahun**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Kawasan Tanaman Pangan	2.863,27	579,62	-99,29	2.565,40	2.466,11	2.366,82	2.267,53	2.168,24
Produksi Kalori Tahun 2022								
Sawah (Padi Sawah)	100.622.060.655,80							
Produktivitas *(Produksi Kalori/Luas Lahan)*								
Kawasan Tanaman Pangan	35.142.380,84			35.142.380,84	35.142.380,84	35.142.380,84	35.142.380,84	35.142.380,84
Proyeksi Ketersediaan (kkal) *(Luas Lahan x Produktivitas)*								
Kawasan Tanaman Pangan				90.154.295.311,93	86.665.040.197,31	83.175.785.082,69	79.686.529.968,06	76.197.274.853,44
Proyeksi Kebutuhan (kkal) *(Jlh Penduduk x Kebutuhan Kalori)*								
Jumlah Penduduk				313.709	320.398	327.241	334.240	341.400
Kebutuhan Kalori Pangan (2.100 kkal/orang/hari)				240.458.252.629,42	245.585.389.365,88	250.829.985.452,72	256.194.880.746,75	261.682.986.519,77
Surplus/defisit (kkal)				**-240.458.252.629,42**	**-245.585.389.365,88**	**-250.829.985.452,72**	**-256.194.880.746,75**	**-261.682.986.519,77**
Daya Dukung				**Terlampaui**	**Terlampaui**	**Terlampaui**	**Terlampaui**	**Terlampaui**

Sumber : KLHS RPJMD Kota Binjai 2025-2029

4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Dalam menghadapi dinamika perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, serta tekanan terhadap sumber daya alam, Kota Binjai perlu mengembangkan arah pembangunan yang berfokus pada ketahanan sumber daya strategis, khususnya energi, air, dan pangan. Ketiga aspek ini merupakan fondasi utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata. Oleh karena itu, RPJMD Kota Binjai Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat upaya pencapaian ketahanan energi berbasis energi terbarukan, pengelolaan air secara terpadu dan berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas produksi pangan lokal melalui pendekatan inovatif dan partisipatif. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan Binjai sebagai kota yang mandiri, berdaya saing, dan tangguh terhadap tantangan masa depan.

Tabel 2. 10. Ketahanan Energi Kota Binjai

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik	Persen	100	100	100	99,30	99,82
Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Layak	Persen	99,08	99,76	98,79	98,05	99,17

Sumber: PLN, PGN dan Badan Pusat Statistik

Untuk indikator Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik, angka yang stabil pada 100% dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kota Binjai memiliki akses ke sumber penerangan listrik. Ini menandakan bahwa infrastruktur listrik di Kota Binjai sangat baik dan dapat diandalkan untuk mendukung aktivitas sehari-hari warganya. Indikator Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Layak, terdapat sedikit penurunan dari 99,08% pada tahun 2020 menjadi 99,17% pada tahun 2024. Penurunan ini sangat kecil, namun tetap menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar rumah tangga di Kota Binjai sudah memiliki akses ke air minum layak, masih ada sebagian kecil yang belum mendapatkannya. Penurunan ini mungkin mencerminkan tantangan dalam memastikan distribusi air minum layak yang merata, yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Secara keseluruhan, ketahanan energi Kota Binjai menunjukkan kinerja yang baik, terutama dalam hal akses listrik dan air minum layak. Namun, untuk memastikan keberlanjutannya, perlu ada perhatian terhadap pemantauan konsumsi gas serta upaya untuk meningkatkan kualitas dan distribusi air minum yang lebih merata di masa depan.

Untuk Air Kemasan/Isi Ulang/Leding, proporsi penggunaan air kemasan ini menunjukkan penurunan secara bertahap dari 69,73% pada tahun 2020 menjadi 63,62% pada tahun 2024. Meskipun ada penurunan, angka ini masih menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kota Binjai mengandalkan air kemasan atau isi ulang sebagai sumber utama air mereka. Hal ini mungkin mencerminkan ketergantungan pada

sumber air yang lebih praktis dan mudah didapatkan meskipun lebih mahal dibandingkan sumber lainnya.

Tabel 2. 11. Persentase Rumah Tangga berdasarkan Sumber Air Utama Kota Binjai

Jenis	2020	2021	2022	2023	2024
Air Kemasan/Isi Ulang/Leding	69,73	65,04	67,58	67,67	63,62
Sumur Bor/Pompa/ Sumur/Mata Air Terlindung dan Tak Terlindung	30,05	34,96	31,39	32,33	35,80
Lainnya (mata air, air permukaan, air hujan, lainnya)	0,22	0	1,03	0	0,58

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada kategori Sumur Bor/Pompa/Sumur/Mata Air Terlindung dan Tak Terlindung, terdapat tren kenaikan dari 30,05% pada tahun 2020 menjadi 35,80% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya pergeseran ke penggunaan sumur bor atau pompa sebagai sumber air, yang dapat menandakan upaya masyarakat untuk memperoleh air dengan lebih mandiri, meskipun risiko terkait kualitas dan keberlanjutan sumber ini juga harus diperhatikan.

Sementara itu, kategori Lainnya (termasuk mata air, air permukaan, air hujan, dan lainnya) menunjukkan peningkatan yang signifikan, meskipun pada tahun 2020 persentasenya sangat rendah (0,22%) dan meningkat menjadi 0,58% pada tahun 2024. Walaupun masih dalam proporsi yang sangat kecil, peningkatan ini menunjukkan bahwa beberapa rumah tangga mulai memanfaatkan sumber air alternatif selain yang lebih umum.

Secara keseluruhan, meskipun sebagian besar rumah tangga di Kota Binjai masih bergantung pada air kemasan, ada kecenderungan peningkatan pemanfaatan sumur bor dan sumber air alternatif lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk terus memperhatikan kualitas dan ketersediaan sumber air yang lebih berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih yang terus meningkat di masa depan.

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Tabel 2. 12. Indeks Ketahanan Pangan dan Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Binjai

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks ketahanan pangan	Persen	78,16	81,49	74,89	87,25	88,22
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	Persen	8,08	7,62	11,07	11,50	7,63

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan data pada Tabel 2.10, perkembangan indikator ketahanan pangan di Kota Binjai menunjukkan tren positif selama periode 2020 hingga 2024. Indeks Ketahanan Pangan mengalami peningkatan dari 78,16 persen pada tahun 2020 menjadi 88,22 persen pada tahun 2024, yang mencerminkan perbaikan signifikan dalam ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan di daerah. Meskipun terjadi penurunan indeks pada tahun 2022, yakni sebesar 74,89 persen, kondisi tersebut berhasil dipulihkan pada tahun-tahun berikutnya dengan peningkatan konsisten. Sementara itu, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) menunjukkan fluktuasi, dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 11,50 persen, sebelum akhirnya menurun secara signifikan menjadi 7,63 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas program intervensi pangan dan perbaikan distribusi konsumsi masyarakat. Secara keseluruhan, capaian tersebut menggambarkan komitmen Pemerintah Kota Binjai dalam memperkuat ketahanan pangan dan menurunkan tingkat kerentanan terhadap rawan pangan secara berkelanjutan.

5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Binjai. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat menggambarkan kondisi dari hasil pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh pada suatu daerah. IKLH Kota Binjai terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Predikat IKLH terdiri dari 5 predikat, yaitu Sangat Baik (IKLH > 80), Baik (70 < IKLH ≤ 80), Cukup Baik (60 < IKLH ≤ 70), Kurang Baik (50 < IKLH ≤ 60) dan Sangat Kurang Baik (40 < IKLH ≤ 50).

Tabel 2. 13. Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**47,10**	**62,45**	**65,85**	**59,33**	**60,81**
Indeks Kualitas Air	74,00	92,50	70,00	50,00	53,33
Indeks Kualitas Udara	83,00	85,84	85,50	87,96	88,51
Indeks Tutupan Lahan	Kota Binjai belum Memiliki Tutupan Lahan		22,38	22,39	22,40

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

Indeks kualitas lingkungan hidup Kota Binjai cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir, yaitu dari 62,45 di tahun 2021 menjadi 60,81 di tahun 2024. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan yang signifikan untuk indeks kualitas air dari 92,50 di tahun 2021 menjadi 53,33 di tahun 2024. Indeks Kualitas Udara Kota Binjai tahun 2024 termasuk berkategori baik yaitu sebesar 88,51 poin. Kualitas udara tahun 2024 adalah yang paling baik selama lima tahun terakhir. Sementara itu, pelaksanaan perhitungan kulitas lahan dilakukan dengan menggunakan citra satelit yaitu luas tutupan hutan dan luas tutupan vegetasi non hutan. Dari hasil perhitungan diperoleh Indeks Kualitas Lahan tahun 2024 sebesar 22,40 poin, yang mana ada sedikit kenaikan dibanding tahun 2022 (22,38 poin) tetapi masih di bawah target yakni 27,23 poin dikarenakan Kota Binjai tidak memiliki tutupan hutan.

Tabel 2. 14. Perkembangan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Binjai

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Emisi GRK (ribu Ton C02eqv)	n/a	511,93	558,19	584,19	564,62
Timbulan Sampah (ton)	71.361	73.815	79.231	80.630	82,327
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (persen)	95,99	95,21	96,36	96,36	97,10

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

Berdasarkan data di atas, perkembangan kualitas lingkungan hidup di Kota Binjai selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang perlu dicermati secara strategis. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tercatat mengalami peningkatan dari 511,93 ribu ton CO_2eqv pada tahun 2021 menjadi puncaknya sebesar 584,19 ribu ton CO_2eqv pada tahun 2023, sebelum mengalami penurunan menjadi 564,62 ribu ton CO_2eqv pada tahun 2024. Meskipun demikian, angka emisi tersebut masih berada di atas capaian tahun 2021, sehingga perlu diantisipasi dengan kebijakan mitigasi lingkungan yang lebih efektif dan terintegrasi. Sementara itu, volume timbulan sampah juga menunjukkan tren kenaikan, dari 71.361 ton pada tahun 2020 menjadi 82.327 ton pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi, namun sekaligus menjadi tantangan dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengelolaan sampah terpadu, pengurangan timbulan sampah dari sumbernya, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak

negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi Bencana. Resiko Bencana Kota Binjai dari tahun 2020 hingga tahun 2024 tetap pada kategori sedang dengan nilai indeks resiko bencana yang cenderung tetap pada nilai 103,2.

Gambar 2. 2. Indeks Resiko Bencana Kota Binjai Tahun 2020-2024

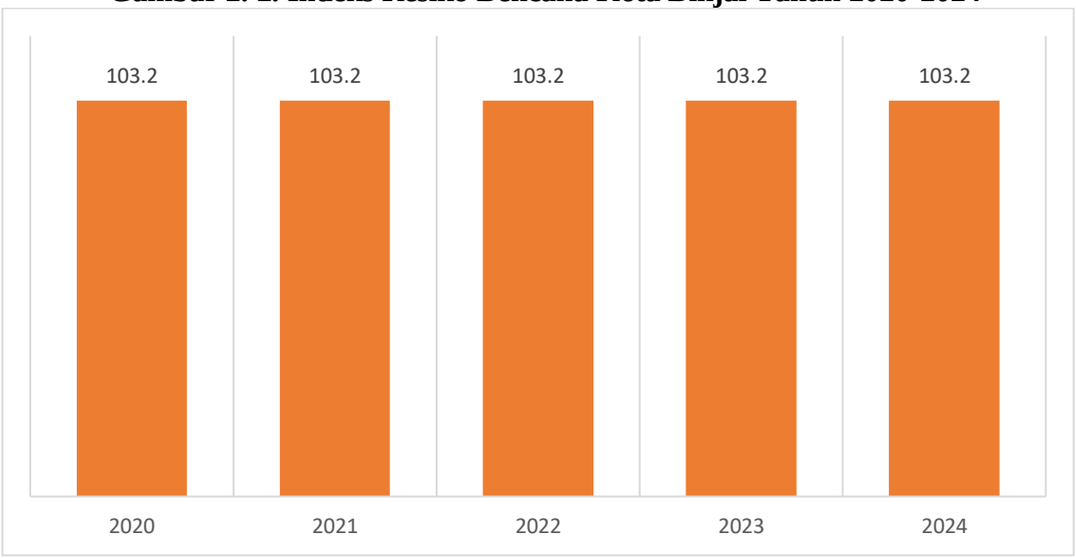

Sumber : inarisk.bnpb.go.id

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan didaerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Bapperida di tataran daerah.

Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini. Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana kebencanaan harus bisa dilakukan dan penyebarannya yang merata sehingga bisa semakin mempersingkat waktu tanggap terhadap kebencanaan, selain itu diperlukan juga penyuluhan kepada masyarakat untuk menjadi pioner tanggap kebencanaan & pengelolaan lingkungan tempat tinggal.

Tabel 2. 15. Kejadian Bencana di Kota Binjai

Bencana	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Banjir	Kejadian	6	-	3	3	5
Kebakaran	Kejadian	27	9	18	42	69
Puting Beliung	Kejadian	1	3	1	2	1
Longsor	Kejadian	-	-	-	-	-
Total	**Kejadian**	**34**	**12**	**22**	**47**	**75**

Sumber : BPBD Kota Binjai

Berdasarkan data di atas, tercatat bahwa jumlah kejadian bencana di Kota Binjai selama periode 2020 hingga 2024 didominasi oleh bencana kebakaran. Pada tahun 2020, terjadi 27 kejadian kebakaran, menurun drastis tahun 2021 menjadi 9 kejadian kebakaran. Dan cenderung meningkat pada tahun 2022 menjadi 18 kejadian, tahun 2023 menjadi 42 kejadian serta pada tahun 2024 menjadi 69 kejadian. Bencana Banjir tercatat terjadi sebanyak 6 kali pada tahun 2020 dan cendurung menurun sehingga pada tahun 2024 tercatat 5 kali kejadian, sedangkan untuk bencana puting beliung pada tahun 2020 sebanyak 1 kejadian, dan meningkat di tahun 2021 menjadi 3 kejadian, menurun pada tahun 2022 menjadi 1 kejadian serta tahun 2023 meningkat menjadi 2 kejadian. Dan pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 1 kejadian. Tidak terdapat data atau kejadian yang tercatat untuk bencana longsor selama lima tahun tersebut. Secara keseluruhan, jumlah total kejadian bencana di Kota Binjai tercatat sebanyak 34 kali pada tahun 2020, menurun menjadi 12 kali pada tahun 2021, dan cenderung meningkat menjadi 22 kali kejadian pada tahun 2022, pada tahun 2023 menjadi 47 kali kejadian dan tahun 2024 menjadi 75 kali kejadian. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi jumlah bencana, terutama kebakaran, yang menjadi perhatian utama dalam upaya mitigasi bencana di wilayah tersebut.

Tabel 2. 16. Indeks Resiko Bencana Kota Binjai Tahun 2024

Bencana	Skor	Kategori Resiko
Banjir	12,00	Sedang
Gempa Bumi	21,60	Tinggi
Kebakaran	33,60	Tinggi
Tanah Longsor	11,20	Tinggi
Gelombang Ekstrim	0,00	Rendah
Kekeringan	11,20	Tinggi
Cuaca Ekstrim	13,60	Tinggi
Indeks Resiko Bencana	**103,2**	**Sedang**

Sumber : inarisk.bnpb.go.id

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi Bencana. Resiko Bencana Kota Binjai tahun 2024

berada pada level sedang dengan nilai skor sebesar 103,2. Namun untuk beberapa risiko bencana masih cukup tinggi seperti Gempa Bumi, Kebakaran, Tanah Longsor, Kekeringan, dan Cuaca Ekstrim.

7. Demografi

Struktur penduduk adalah susunan jumlah penduduk berdasarkan kelompok data tertentu. Dari kelompok umur, susunan penduduk berdasarkan umurnya dapat mudah dipahami dari gambar piramida penduduk. Piramida penduduk tersebut merupakan piramida penduduk muda yang menggambarkan bahwa jumlah penduduk berusia muda lebih banyak dari jumlah penduduk usia tua. Keterkaitan antara struktur penduduk dan perencanaan pembangunan sangatlah penting dalam menentukan arah serta keberhasilan pembangunan suatu daerah. Struktur penduduk yang mencakup distribusi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan dapat memberikan pandangan yang jelas mengenai kebutuhan dan potensi masyarakat. Struktur penduduk Kota Binjai yang disajikan berikut ini didasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin.

Dependency ratio, yang merupakan rasio antara jumlah individu yang berada di usia non produktif (anak-anak dan lansia) dibandingkan dengan individu yang berusia produktif, memiliki dampak signifikan terhadap perencanaan pembangunan suatu negara atau daerah. Dalam satu sudut pandang, beban ketergantungan yang tinggi dapat mengindikasikan beban ekonomi yang berat pada populasi yang bekerja, karena mereka harus menyediakan dukungan finansial untuk populasi yang tidak bekerja. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi sumber daya yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial.

Tabel 2. 17. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Binjai Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	13.415	12.836	26.251
5-10	14.308	13.353	27.661
10-14	12.984	11.990	24.974
15-19	12.229	11.241	23.470
20-24	11.592	11.006	22.598
25-29	12.495	12.209	24.704
30-34	12.381	12.395	24.776
35-39	11.715	11.886	23.601
40-44	11.173	11.461	22.634
45-49	10.189	10.264	20.453
50-54	8.928	9.610	18.538
55-59	7.410	8.077	15.487
60-64	5.936	6.536	12.472
65-69	4.373	4.824	9.197
70-74	2.649	3.239	5.888
75+	1.804	2.662	4.466
Kota Binjai	**153.581**	**153.589**	**307.170**

Sumber : Binjai Dalam Angka 2025

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Binjai tahun 2024, struktur penduduk menunjukkan komposisi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan total masing-masing sebesar 153.581 jiwa dan 153.589 jiwa. Jumlah keseluruhan penduduk Kota Binjai tercatat sebanyak 307.170 jiwa, mencerminkan keseimbangan demografis antara kedua jenis kelamin. Dari sisi kelompok umur, mayoritas penduduk berada pada kelompok usia produktif (15–64 tahun), yang mencakup sekitar 66% dari total populasi. Kelompok usia 25–29 tahun memiliki jumlah penduduk tertinggi dalam rentang usia produktif, yakni 24.704 jiwa, diikuti oleh kelompok usia 30–34 dan 20–24 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Binjai didominasi oleh penduduk usia kerja, yang berpotensi besar menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Sementara itu, kelompok usia anak-anak (0–14 tahun) juga memiliki jumlah yang cukup besar, yaitu sekitar 78.886 jiwa, atau sekitar 25,7% dari total penduduk. Ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap layanan pendidikan, kesehatan anak, dan penyediaan fasilitas publik yang ramah anak. Sebaliknya, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) berjumlah relatif lebih sedikit, yaitu sekitar 19.130 jiwa atau sekitar 6,2% dari total populasi, yang menunjukkan bahwa Kota Binjai masih berada pada tahap struktur penduduk muda (expansive population structure). Secara keseluruhan, struktur penduduk Kota Binjai tahun 2024 mencerminkan potensi demografi yang kuat dengan dominasi usia produktif yang besar. Hal ini merupakan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor ekonomi, pendidikan, dan ketenagakerjaan, sekaligus tantangan dalam memastikan pelayanan publik yang memadai bagi seluruh kelompok usia, termasuk kelompok usia non-produktif seperti anak-anak dan lansia.

Tabel 2. 18. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Binjai

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
0 - 4	24.683	28.362	28.454	27.201	26.251
5 - 9	25.158	25.233	25.352	26.785	27.661
10 - 14	24.813	23.698	23.851	24.623	24.974
15 - 19	25.282	22.356	22.431	23.027	23.470
20 - 24	25.694	24.215	24.096	22.967	22.598
25 - 29	23.125	25.034	25.190	24.891	24.704
30 - 34	20.832	24.174	24.460	24.562	24.776
35 - 39	20.554	23.388	23.759	23.507	23.601
40 - 44	19.086	21.242	21.623	22.213	22.634
45 - 49	17.677	19.731	20.249	20.158	20.453
50 - 54	15.754	16.886	17.383	18.029	18.538
55 - 59	13.280	14.146	14.656	15.017	15.487
60 - 64	9.717	11.089	11.572	12.008	12.472
65 - 69	6.690	7.897	8..336	8.782	9.197
70 -74	3.705	4.356	4.778	5.407	5.888
75+	3.252	3.554	3.819	4.085	4.466
Kota Binjai	**279.302**	**295.361**	**300.009**	**303.272**	**307.170**

Sumber : BPS Kota Binjai

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kota Binjai dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya pertumbuhan penduduk yang konsisten setiap tahunnya. Jumlah penduduk meningkat dari 279.302 jiwa pada tahun 2020 menjadi 307.170 jiwa pada tahun 2024. Ini menunjukkan pertumbuhan populasi yang stabil dan berkelanjutan, dengan rata-rata pertambahan sekitar 7.000 jiwa per tahun. Dilihat dari struktur umur, kelompok usia produktif (15–64 tahun) terus mendominasi komposisi penduduk. Pada tahun 2024, kelompok ini mencakup sebagian besar populasi, dengan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, kelompok usia 25–29 tahun naik dari 21.325 jiwa pada tahun 2020 menjadi 24.704 jiwa pada 2024, sementara kelompok 30–34 tahun meningkat dari 20.822 jiwa menjadi 24.776 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Binjai berada dalam masa bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia kerja lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif.

Kelompok usia anak-anak (0–14 tahun) juga menunjukkan tren yang relatif stabil, meskipun mulai mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024. Total populasi usia 0–14 tahun menurun dari puncaknya di tahun 2021 (77.293 jiwa) menjadi sekitar 78.886 jiwa pada 2024. Ini bisa menjadi indikasi awal dari penurunan angka kelahiran dalam jangka panjang, meskipun secara keseluruhan, proporsinya masih signifikan terhadap total penduduk. Sementara itu, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) juga mengalami pertumbuhan yang perlahan namun pasti. Penduduk usia 65 tahun ke atas meningkat dari 10.442 jiwa pada tahun 2020 menjadi 13.663 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan peningkatan angka harapan hidup dan menandakan bahwa Kota Binjai perlahan menuju struktur penduduk menua. Hal ini perlu diantisipasi dengan kebijakan jangka panjang yang mendukung kebutuhan lansia, seperti layanan kesehatan dan jaminan sosial.

Secara keseluruhan, perkembangan penduduk Kota Binjai dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika demografis yang positif. Pertumbuhan penduduk yang stabil, dominasi usia produktif, dan peningkatan usia harapan hidup menciptakan peluang sekaligus tantangan dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pelayanan sosial.

Berdasarkan data perkembangan jumlah penduduk Kota Binjai menurut jenis kelamin dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan jumlah penduduk yang konsisten setiap tahunnya. Total penduduk meningkat dari 279.302 jiwa pada tahun 2020 menjadi 307.170 jiwa pada tahun 2024. Ini menunjukkan pertumbuhan penduduk yang stabil dengan rata-rata kenaikan sekitar 7.000 jiwa per tahun. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Binjai tergolong seimbang, tanpa perbedaan signifikan antara keduanya. Pada tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 139.284 jiwa dan perempuan sebanyak

140.018 jiwa. Jumlah ini terus bertambah hingga mencapai masing-masing 153.581 jiwa (laki-laki) dan 153.589 jiwa (perempuan) pada tahun 2024. Keseimbangan ini menggambarkan struktur demografis yang stabil dan tidak menunjukkan adanya ketimpangan gender yang signifikan dalam jumlah penduduk.

Tabel 2. 19. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Binjai Menurut Jenis Kelamin

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2020	139.284	140.018	279.302
2021	147.664	147.697	295.361
2022	150.032	149.977	300.009
2023	151.627	151.645	303.272
2024	**153.581**	**153.589**	**307.170**

Sumber : BPS Kota Binjai

Tren ini juga mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk di Kota Binjai berlangsung secara proporsional antara laki-laki dan perempuan. Keseimbangan jumlah penduduk menurut jenis kelamin ini menjadi modal penting dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan layanan publik yang adil dan merata seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Secara keseluruhan, perkembangan jumlah penduduk Kota Binjai berdasarkan jenis kelamin dalam lima tahun terakhir mencerminkan pertumbuhan yang positif dan berimbang. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan tren ini untuk menyusun kebijakan kependudukan dan sosial yang inklusif, serta merencanakan pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

Berdasarkan data jumlah penduduk Kota Binjai tahun 2024 menurut kecamatan, dapat dilihat bahwa sebaran penduduk tidak merata di lima kecamatan yang ada. Total jumlah penduduk Kota Binjai sebanyak 307.170 jiwa, dengan konsentrasi penduduk tertinggi berada di Kecamatan Binjai Utara, yaitu sebanyak 89.617 jiwa atau sekitar 29,18% dari total populasi. Hal ini menjadikan Binjai Utara sebagai wilayah terpadat di antara kecamatan lainnya, yang kemungkinan besar disebabkan oleh luas wilayah, ketersediaan permukiman, dan fasilitas umum yang lebih berkembang. Menyusul setelahnya adalah Kecamatan Binjai Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 69.396 jiwa (22,59%) dan Binjai Selatan dengan 61.766 jiwa (20,11%). Kedua kecamatan ini juga memiliki proporsi penduduk yang cukup besar, menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki peran penting dalam struktur demografis Kota Binjai, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun pembangunan.

Sementara itu, Kecamatan Binjai Barat memiliki penduduk sebanyak 53.859 jiwa atau 17,53%, berada di posisi keempat. Adapun Kecamatan Binjai Kota memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 32.532 jiwa atau hanya sekitar 10,59% dari total penduduk kota. Rendahnya jumlah penduduk di Binjai Kota kemungkinan dipengaruhi oleh luas wilayah yang lebih kecil dan fungsi wilayah yang lebih terfokus pada pusat pemerintahan

dan perdagangan, sehingga tidak menjadi kawasan permukiman utama. Secara keseluruhan, distribusi penduduk di Kota Binjai menunjukkan konsentrasi yang lebih tinggi di wilayah utara dan timur. Hal ini dapat menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, seperti distribusi anggaran, pelayanan publik, perencanaan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan agar lebih merata dan adil.

Tabel 2. 20. Jumlah Penduduk Kota Binjai Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase
Binjai Selatan	61.766	20,11
Binjai Kota	32.532	10,59
Binja Timur	69.396	22,59
Binjai Utara	89.617	29,18
Binjai Barat	53.859	17,53
Kota Binjai	**307.170**	**100**

Sumber : Binjai Dalam Angka 2025

Jika dibandingkan dengan Kota-Kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Utara, maka Kota Binjai merupakan Kota ke dua dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Utara. Namun jika dibandingkan dengan seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, maka Jumlah Penduduk Kota Binjai di tahun 2024 hanya menempati posisi ke delapan belas terbanyak dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 2. 3. Perbandingan Jumlah Penduduk Kota Binjai dengan Wilayah Lain di Sumatera Utara Tahun 2024

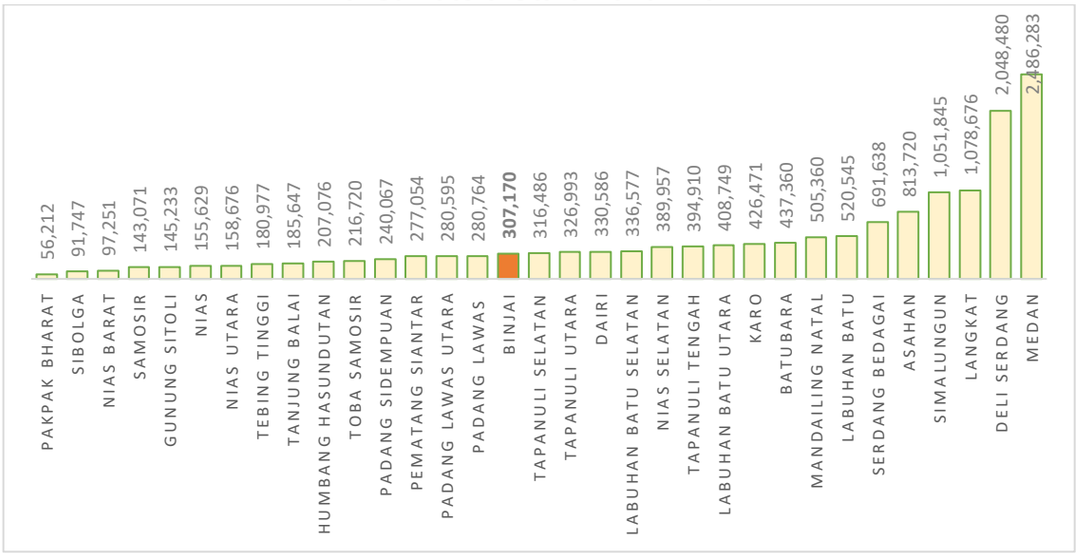

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan data pada Gambar 2.3 mengenai laju pertumbuhan penduduk Kota Binjai tahun 2019 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan selama periode tersebut. Pada tahun 2019 dan 2020, laju pertumbuhan penduduk relatif stabil dan rendah, masing-masing sebesar 0,99% dan 0,98%. Namun, terjadi lonjakan tajam pada tahun 2021, di mana laju pertumbuhan mencapai 5,75%, merupakan angka tertinggi dalam enam tahun terakhir. Kenaikan ekstrem ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor-

faktor luar biasa, seperti penyesuaian data kependudukan, urbanisasi cepat, atau dampak dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pencatatan dan mobilitas penduduk. Setelah puncak pada tahun 2021, laju pertumbuhan kembali menurun drastis menjadi 1,57% di tahun 2022 dan terus melandai menjadi 1,09% pada 2023. Meskipun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2024 sebesar 1,29%, tren ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk kembali ke pola yang lebih moderat dan terkendali.

Gambar 2. 4. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Binjai

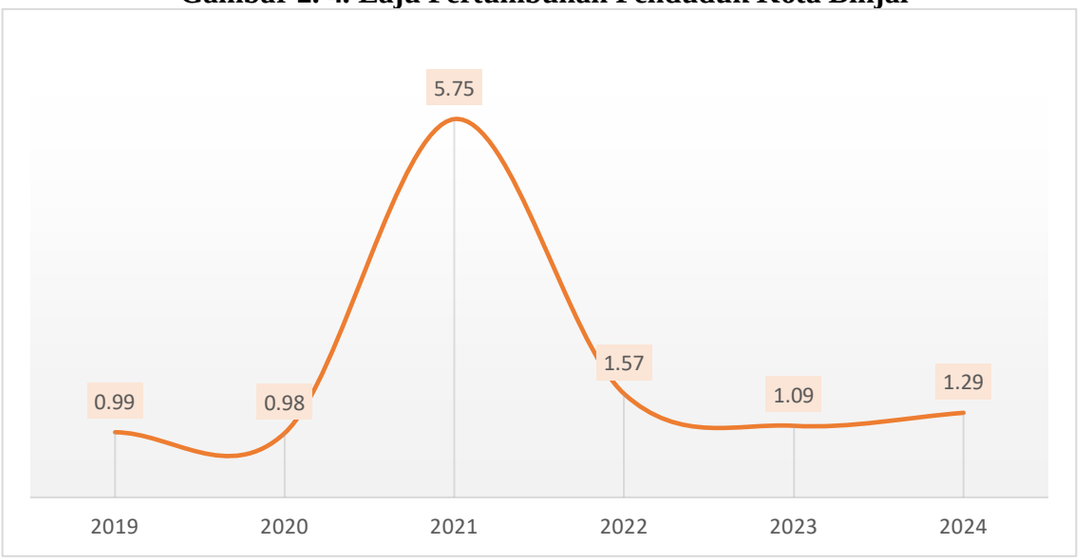

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Perubahan laju pertumbuhan penduduk yang fluktuatif ini perlu dicermati oleh pemerintah daerah, karena memiliki implikasi langsung terhadap kebutuhan perencanaan pembangunan, seperti penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur. Kenaikan mendadak seperti pada tahun 2021 dapat memberikan tekanan terhadap kapasitas pelayanan publik, sedangkan pertumbuhan yang melandai dapat menjadi peluang untuk memperkuat kualitas hidup dan pengelolaan kota secara lebih berkelanjutan. Secara keseluruhan, meskipun laju pertumbuhan penduduk Kota Binjai sempat mengalami lonjakan tajam, tren umum menunjukkan stabilitas menuju pertumbuhan yang lebih seimbang. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengatur kebijakan kependudukan dengan lebih terarah dan adaptif terhadap dinamika sosial yang terjadi.

Distribusi penduduk ditunjukkan dari persebaran jumlah penduduk dan angka kepadatan penduduk di setiap Kecamatan di Kota Binjai. Analisis distribusi penduduk menentukan kesesuaian jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ada. Gambar di bawah menunjukkan bahwa Kecamatan Binjai Utara memiliki jumlah proporsi penduduk paling tinggi di Kota Binjai dengan persebaran penduduk mencapai 29,18 persen, sedangkan Kecamatan Binjai Kota memiliki jumlah proporsi penduduk paling rendah yaitu mencapai 10,59 persen. Secara lebih dalam, persentase penduduk paling banyak berada di Kecamatan Binjai Utara dengan kepadatan penduduknya sebesar 3.799

jiwa/km², dan persentase penduduk paling rendah berada di Kecamatan Binjai Kota dengan kepadatan penduduk 7.896 jiwa/km². Sedangkan secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kota Binjai pada tahun 2024 adalah sebesar 3.396 jiwa/km².

Gambar 2. 5. Persebaran Penduduk Kota Binjai Menurut Kecamatan Tahun 2024

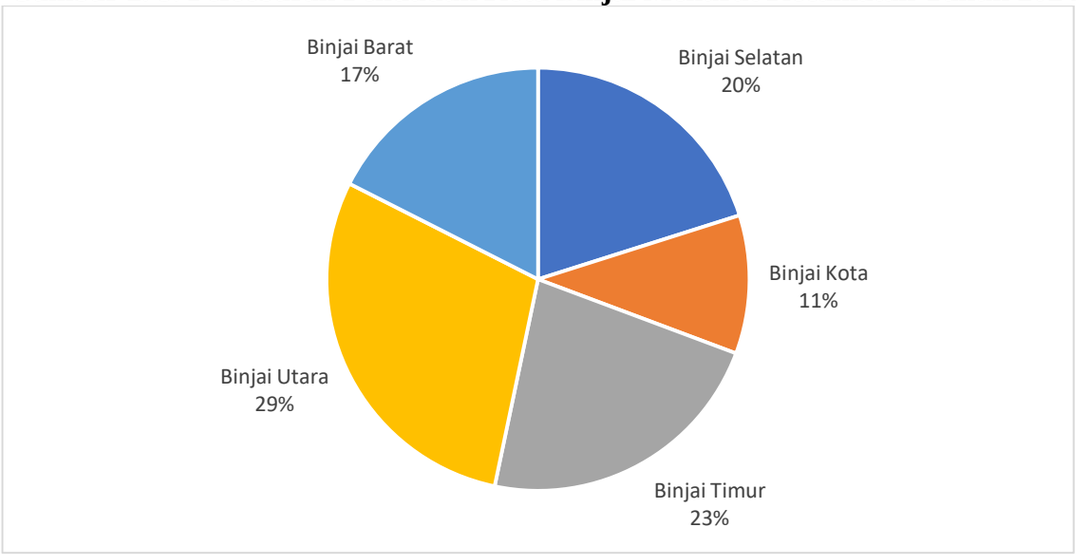

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Kepadatan penduduk membandingkan jumlah penduduk dengan luas wilayah setiap Kecamatan. Angka kepadatan penduduk memperlihatkan kesesuaian jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dimiliki. Sehingga Kecamatan Binjai Selatan dan Kecamatan Binjai Timur merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan terendah dibandingkan Kecamatan lainnya di Kota Binjai, dengan demikian kedua Kecamatan tersebut memiliki potensi dan prospek yang bagus untuk dapat dikembangkan mengingat ketersediaan wilayah yang masih mencukupi dibandingkan Kecamatan lainnya dengan tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi dari dua Kecamatan tersebut.

Gambar 2. 6. Kepadatan Penduduk Kota Binjai Menurut Kecamatan Tahun 2024

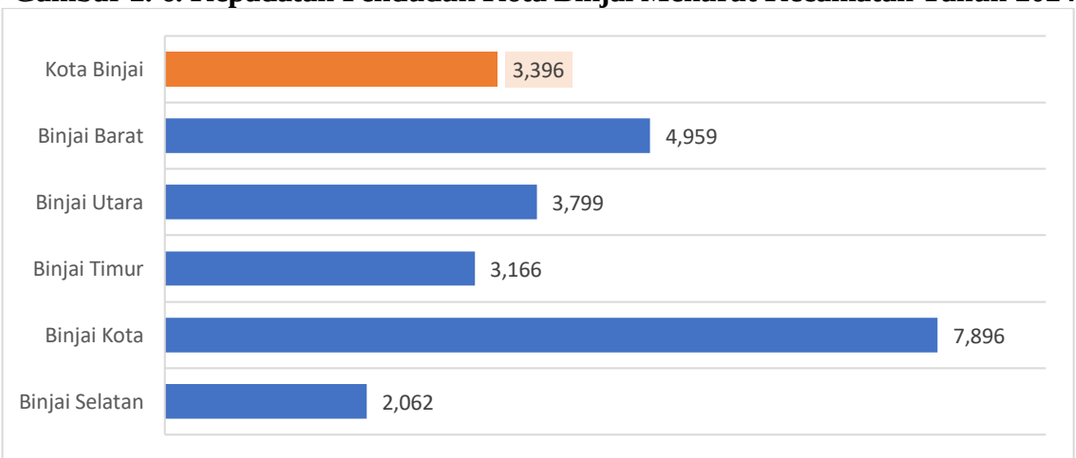

Sumber : Hasil Olahan

Tingginya tingkat kepadatan penduduk menimbulkan berbagai dampak negatif atau permasalahan dalam pembangunan. Permasalahan tersebut mencakup berbagai bidang pembangunan, yakni perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, sanitasi dan

lingkungan hidup, pertanian dan ketahanan pangan, serta ketenagakerjaan. Adapun secara khusus di daerah perkotaan, akan banyak memunculkan *slum area*, atau yang lebih dikenal sebagai pemukiman kumuh.

Dinamika penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari natalitas, mortalitas, serta migrasi. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur natalitas adalah angka kelahiran kasar. Angka kelahiran kasar merupakan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk. Sedangkan *Total Fertility Rate* (TFR) adalah ialah istilah yang digunakan di bidang demografi untuk menggambarkan jumlah rata-rata anak yang akan terlahir dari seorang wanita sepanjang hidupnya bila ia akan mengalami tingkat kesuburan spesifik usia terkini yang pasti dan ia akan selamat dari kelahiran sepanjang usia reproduktifnya.

Fertilitas Kota Binjai terlihat menurun dalam sepuluh tahun terakhir. Sensus penduduk 2010 mencatat angka TFR sebesar 2,42 yang berarti seorang perempuan akan melahirkan sekitar 2 hingga 3 anak selama masa reproduksinya. Sementara Long Farm Sensus Penduduk 2020 mencatat angka TFR sebesar 2,14 yang berarti sekitar 2 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya. Perkembangan angka TFR sejak tahun 2010 hingga 2020 menunjukkan ke arah jumlah penduduk seimbang, dan kondisi ini perlu dipertahankan.

Gambar 2. 7. Total Fertility Rate Kota Binjai Menurut Sensus Penduduk Tahun 2010 dan 2020

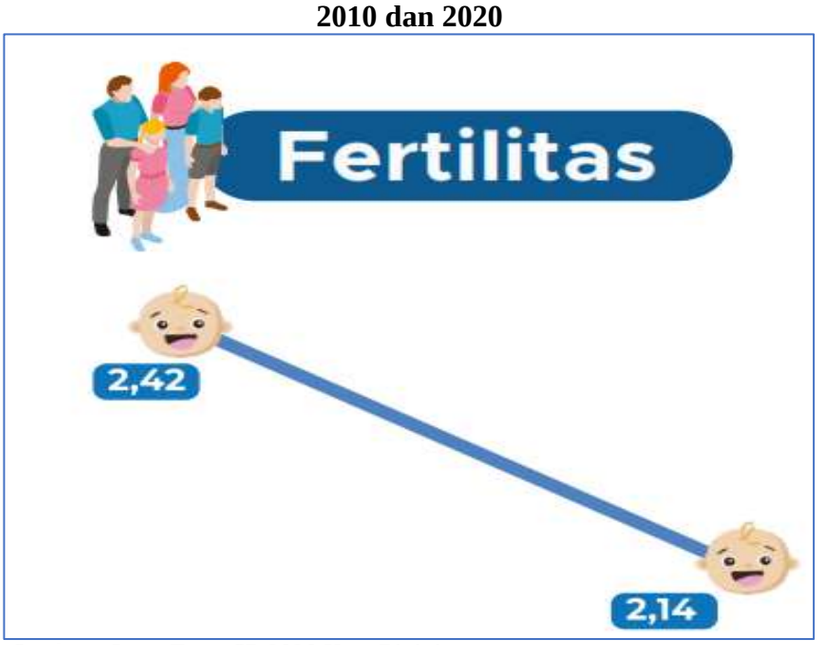

Sumber : Long Farm SP 2020 Kota Binjai

Migrasi menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk di suatu wilayah. Penduduk yang melakukan migrasi disebut migran. Badan Pusat Statistik membagi migran ke dalam dua kelompok, yaitu migran seumur hidup dan migran risen. Migran seumur hidup merupakan penduduk yang tempat tinggal saat pencacahan berbeda wilayah administrasi (provinsi maupun Kabupaten/Kota) dengan tempat lahirnya.

Sementara itu, migran risen merupakan penduduk yang tempat tinggal saat pencacahan berbeda wilayah administrasi dengan tempat tinggalnya pada lima tahun yang lalu.

Gambar 2. 8. Migrasi Risen Kota Binjai

Sumber : Long Farm SP 2020 Kota Binjai

Berdasarkan hasil Long Farm Sensus Penduduk tahun 2020 diperoleh angka migrasi risen Kota Binjai sebesar 5,88 % yang menunjukkan bahwa 6 dari 100 penduduk berumur 5 tahun ke atas di Kota Binjai bertempat tinggal di Kota/Kabupaten lain pada 5 tahun sebelumnya. Kemudian sebanyak 51,59 % penduduk migran risen tersebut berjenis kelamin perempuan dan sisanya sebanyak 48,41 % merupakan penduduk migran risen yang berjenis kelamin laki-laki.

Proyeksi Jumlah Penduduk

Sebagai bagian dari upaya perencanaan dan pengelolaan kota yang efektif, penting untuk memahami tren demografis yang berkembang di Kota Binjai. Analisis proyeksi penduduk memberikan wawasan mendalam mengenai perubahan populasi yang akan terjadi dalam beberapa tahun mendatang. Mengetahui dinamika ini membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus berkembang. Berikut ini adalah analisis data proyeksi penduduk di Kota Binjai berdasarkan jumlah totalnya, tingkat kepadatan penduduknya, struktur penduduk, dan jumlahnya per kecamatan untuk tahun 2025 hingga 2029.

Tabel 2. 21. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2029

Penduduk Tahun 2024 (Orang)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Orang)				
	2025	2026	2027	2028	2029
307.170	310.932	314.552	318.022	321.347	324.522

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Jumlah penduduk di Kota Binjai dari tahun 2025 hingga 2029 diproyeksikan mengalami kenaikan. Penduduk Kota Binjai di tahun 2025 sebanyak 310.932 jiwa, secara

konsisten mengalami kenaikan hingga tahun 2029 menjadi 324.522 jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk di tahun 2025-2026 diproyeksi dengan nilai rasio geometri sekitar 0,012, yang kemudian kenaikannya semakin menyusut hingga periode 2029 dengan rasio sebesar 0,010. Jika dilihat persentasenya, maka pertumbuhan penduduk Kota Binjai sepanjang tahun 2025-2029 diprediksi sekitar 4,37%.

Proyeksi Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk memberikan gambaran jelas mengenai distribusi populasi di wilayah perkotaan dan membantu pemerintah Kota Binjai serta pemangku kepentingan dalam membuat keputusan strategis. Sepanjang tahun 2025-2029, kondisi pertumbuhan penduduk yang positif dengan luas administratif Kota Binjai yang tetap yaitu seluas 93,71 km^2, maka tingkat kepadatan penduduk diprediksi semakin meningkat. Pada tahun 2025, kepadatan penduduk Kota Binjai sebesar 3.438 jiwa/km^2, meningkat menjadi 3.606 jiwa/km^2 di tahun 2029.

Tabel 2. 22. Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2029

Kepadatan Penduduk Tahun 2024 (Jiwa/Km^2)	Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)				
	2025	2026	2027	2028	2029
3.396	3.438	3.480	3.522	3.564	3.606

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Meningkatnya kepadatan penduduk di Kota Binjai sejalan dengan semakin berkembangnya daya tarik kota yang memancing migrasi masuk serta pertumbuhan penduduk yang positif membawa konsekuensi menyempitnya lahan untuk kebutuhan per penduduk. Oleh sebab itu, diperlukan alternatif pembangunan fisik yang lebih efektif dan efisien kedepannya, baik berupa opsi pembangunan gedung bertingkat, serta dengan menggandeng kemajuan teknologi.

Proyeksi Struktur Penduduk

Struktur penduduk adalah susunan jumlah penduduk berdasarkan kelompok data tertentu. Struktur penduduk Kota Binjai yang disajikan berikut ini didasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin. Gambaran umum diawali dengan informasi mengenai kondisi penduduk di awal pengamatan berdasarkan kelompok umur berjenis kelamin laki-laki, beserta proyeksinya hingga tahun 2029. Populasi laki-laki di Kota Binjai diperkirakan akan meningkat secara bertahap dari 155.462 jiwa pada tahun 2025 menjadi 162.195 jiwa pada tahun 2029. Kelompok usia muda (0-14 tahun) menunjukkan peningkatan kecil setiap tahun, dengan populasi usia 0-4 tahun bertambah dari 14.711 jiwa pada tahun 2025 menjadi 14.784 jiwa pada tahun 2029, dan kelompok usia 5-9 tahun naik dari 13.162 jiwa menjadi 13.265 jiwa dalam periode yang sama. Kelompok usia 10-14 tahun meningkat dari 12.476 jiwa menjadi 12.585 jiwa.

Tabel 2. 23. Proyeksi Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2029 Menurut Kelompok Umur dari Jenis Kelamin Laki-Laki

Umur	2025	2026	2027	2028	2029
0–4	14,711	14.731	14.750	14.767	14.784
5–9	13,162	13.191	13.217	13.242	13.265
10–14	12,476	12.506	12.534	12.560	12.585
15–19	11,592	11.613	11.633	11.652	11.670
20–24	12,166	12.126	12.089	12.054	12.022
25–29	12,951	13.018	13.081	13.140	13.195
30–34	12,603	12.711	12.812	12.907	12.996
35–39	12,208	12.345	12.474	12.596	12.709
40–44	11,313	11.468	11.614	11.753	11.882
45–49	10,529	10.740	10.939	11.129	11.307
50–54	9,039	9.243	9.436	9.621	9.794
55–59	7,679	7.881	8.072	8.256	8.429
60–64	6,186	6.378	6.561	6.737	6.904
65–69	4,367	4.536	4.699	4.858	5.008
70–74	2,694	2.888	3.082	3.276	3.466
75+	1,786	1.887	1.986	2.084	2.179
Total	**155.462**	**157.261**	**158.980**	**160.632**	**162.195**

Sumber : Badan Pusat Statistik (SP2020), data diolah

Kelompok usia produktif (15-64 tahun) juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Misalnya, kelompok usia 25-29 tahun naik dari 12.951 jiwa pada tahun 2025 menjadi 13.195 jiwa pada tahun 2029, dan kelompok usia 30-34 tahun meningkat dari 12.603 jiwa menjadi 12.996 jiwa. Penduduk laki-laki lansia (65 tahun ke atas) mengalami peningkatan yang signifikan. Kelompok usia 65-69 tahun bertambah dari 4.367 jiwa pada tahun 2025 menjadi 5.008 jiwa pada tahun 2029, dan kelompok usia 70-74 tahun meningkat dari 2.694 jiwa menjadi 3.466 jiwa.

Tabel 2. 24. Proyeksi Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2029 Menurut Kelompok Umur dari Jenis Kelamin Perempuan

Umur	2025	2026	2027	2028	2029
0–4	13,859	13.885	13.910	13.933	13.954
5–9	12,380	12.419	12.456	12.490	12.523
10–14	11,660	11.726	11.787	11.844	11.899
15–19	10,908	10.919	10.930	10.940	10.949
20–24	11,471	11.397	11.328	11.265	11.205
25–29	12,530	12.559	12.587	12.613	12.637
30–34	12,509	12.604	12.694	12.778	12.857
35–39	12,442	12.580	12.710	12.833	12.949
40–44	11,229	11.359	11.482	11.598	11.707
45–49	11,031	11.230	11.419	11.597	11.767
50–54	9,601	9.792	9.975	10.148	10.313
55–59	8,278	8.493	8.698	8.894	9.082
60–64	6,620	6.830	7.033	7.227	7.414
65–69	5,090	5.297	5.499	5.694	5.883
70–74	3,198	3.411	3.623	3.833	4.041
75+	2,664	2.789	2.911	3.030	3.146
Total	**155.470**	**157.291**	**159.042**	**160.715**	**162.327**

Sumber : Badan Pusat Statistik (SP2020), data diolah

Kemudian, pada jenis kelamin perempuan, di tahun 2025, jumlahnya diperkirakan mencapai 155.470 jiwa, meningkat menjadi 162.327 jiwa pada tahun 2029. Setiap kelompok umur menunjukkan peningkatan yang stabil. Kelompok usia muda (0-14 tahun) bertambah sedikit setiap tahun, dari 37.899 jiwa pada 2025 menjadi 38.376 jiwa pada 2029. Kelompok usia remaja dan dewasa muda (15-29 tahun) juga mengalami pertumbuhan yang konsisten, dari 34.909 jiwa pada 2025 menjadi 34.831 jiwa pada 2029. Kelompok usia dewasa (30-49 tahun) menunjukkan pertumbuhan signifikan, dari 47.211 jiwa pada 2025 menjadi 49.280 jiwa pada 2029. Kelompok usia yang 50 tahun ke atas meningkat dari 35.451 jiwa pada 2025 menjadi 39.840 jiwa pada 2029.

Berdasarkan struktur umur secara umum di tahun 2025, jumlah penduduk Kota Binjai diperkirakan mencapai 310.932 jiwa, dengan distribusi umur sebagai berikut: kelompok usia 0-4 tahun berjumlah 28.570 jiwa, 5-9 tahun berjumlah 25.542 jiwa, dan 10-14 tahun berjumlah 24.136 jiwa. Angka ini terus meningkat sedikit setiap tahun. Pada tahun 2026, jumlah total penduduk diproyeksikan menjadi 314.552 jiwa, dengan peningkatan kecil di setiap kelompok umur, termasuk 28.616 jiwa untuk usia 0-4 tahun, 25.610 jiwa untuk usia 5-9 tahun, dan 24.229 jiwa untuk usia 10-14 tahun.

Tabel 2. 25. Proyeksi Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2029 Menurut Kelompok Umur

Umur	2025	2026	2027	2028	2029
0–4	28,570	28.616	28.659	28.699	28.735
5–9	25,542	25.610	25.672	25.730	25.784
10–14	24,136	24.229	24.317	24.399	24.475
15–19	22,500	22.533	22.564	22.592	22.618
20–24	23,637	23.523	23.419	23.323	23.235
25–29	25,481	25.579	25.669	25.753	25.830
30–34	25,112	25.316	25.505	25.682	25.847
35–39	24,650	24.925	25.183	25.425	25.651
40–44	22,543	22.829	23.097	23.348	23.584
45–49	21,561	21.970	22.358	22.724	23.070
50–54	18,640	19.036	19.411	19.767	20.104
55–59	15,958	16.373	16.770	17.149	17.509
60–64	12,806	13.207	13.594	13.965	14.319
65–69	9,457	9.833	10.198	10.553	10.896
70–74	5,891	6.298	6.709	7.123	7.536
75+	4,450	4.674	4.896	5.115	5.329
Total	**310.932**	**314.552**	**318.022**	**321.347**	**324.522**

Sumber : Badan Pusat Statistik (SP2020), data diolah

Pada tahun 2027, total penduduk diproyeksikan mencapai 318.022 jiwa. Kelompok usia muda tetap mengalami peningkatan, dengan usia 0-4 tahun menjadi 28.659 jiwa, 5-9 tahun menjadi 25.672 jiwa, dan 10-14 tahun menjadi 24.317 jiwa. Angka ini terus naik hingga tahun 2028, dengan total penduduk mencapai 321.347 jiwa, termasuk 28.699 jiwa untuk usia 0-4 tahun, 25.730 jiwa untuk usia 5-9 tahun, dan 24.399 jiwa untuk usia 10-14 tahun.

Pada tahun 2029, total penduduk Kota Binjai diproyeksikan mencapai 324.522 jiwa. Kelompok usia muda juga terus meningkat, dengan usia 0-4 tahun mencapai 28.735 jiwa, 5-9 tahun mencapai 25.784 jiwa, dan 10-14 tahun mencapai 24.475 jiwa. Kelompok usia produktif (15-64 tahun) juga menunjukkan pertumbuhan stabil. Pada tahun 2025, kelompok usia 15-19 tahun berjumlah 22.500 jiwa dan meningkat menjadi 22.618 jiwa pada tahun 2029. Kelompok usia 20-24 tahun berjumlah 23.637 jiwa pada tahun 2025 dan sedikit menurun menjadi 23.235 jiwa pada tahun 2029. Kelompok usia 25-29 tahun meningkat dari 25.481 jiwa pada tahun 2025 menjadi 25.830 jiwa pada tahun 2029, sedangkan kelompok usia 30-34 tahun meningkat dari 25.112 jiwa menjadi 25.847 jiwa pada periode yang sama.

Kelompok usia lebih tua (lebih dari 65 tahun) juga diperkirakan meningkat dari 19.796 jiwa pada tahun 2025 menjadi 23.760 jiwa pada tahun 2029. Kelompok usia 65-69 tahun meningkat dari 9.457 jiwa menjadi 10.896 jiwa, dan kelompok usia 70-74 tahun meningkat dari 5.891 jiwa menjadi 7.536 jiwa. Kelompok usia 75 tahun ke atas juga menunjukkan peningkatan dari 4.450 jiwa pada tahun 2025 menjadi 5.329 jiwa pada tahun 2029. Secara keseluruhan, proyeksi ini menunjukkan peningkatan populasi yang stabil di semua kelompok umur, dengan pertumbuhan yang paling signifikan pada kelompok usia produktif dan lansia.

Dari hasil proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan, pada tahun 2025, jumlah penduduk laki-laki di Kota Binjai diproyeksikan mencapai 155.462 jiwa, meningkat dari 153.581 jiwa pada tahun 2024. Populasi ini terus tumbuh menjadi 157.261 jiwa pada tahun 2026, 158.980 jiwa pada tahun 2027, 160.632 jiwa pada tahun 2028, dan akhirnya mencapai 162.195 jiwa pada tahun 2029. Jumlah penduduk perempuan juga menunjukkan tren peningkatan yang serupa. Pada tahun 2025, diproyeksikan ada 155.470 jiwa perempuan, naik dari 153.589 jiwa pada tahun 2024. Angka ini meningkat menjadi 157.291 jiwa pada tahun 2026, 159.042 jiwa pada tahun 2027, 160.715 jiwa pada tahun 2028, dan mencapai 162.327 jiwa pada tahun 2029.

Rasio jenis kelamin, yang mengukur jumlah laki-laki terhadap jumlah perempuan, menunjukkan sedikit penurunan selama periode tersebut. Pada tahun 2024, rasio ini adalah 99,99, menunjukkan hampir jumlah yang sama antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2025 dan 2026, rasio ini tetap stabil di 99,99, namun mulai menurun menjadi 99,98 pada tahun 2027, 99,96 pada tahun 2028, dan 99,92 pada tahun 2029. Penurunan rasio ini mengindikasikan sedikit peningkatan dalam jumlah perempuan dibandingkan laki-laki selama lima tahun tersebut.

Hasil proyeksi dari tabel di bawah menunjukkan peningkatan populasi yang stabil baik untuk laki-laki maupun perempuan di Kota Binjai dari tahun 2025 hingga 2029. Meskipun peningkatan jumlah penduduk hampir seimbang antara kedua jenis kelamin,

jumlah perempuan menunjukkan sedikit dominasi yang tercermin dalam rasio jenis kelamin yang menurun. Peningkatan populasi ini mengindikasikan kebutuhan akan perencanaan yang baik dalam berbagai sektor seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan untuk mendukung pertumbuhan demografis ini.

Tabel 2. 26. Proyeksi Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2029 Berdasarkan Rasio Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2024 (Orang)	Proyeksi				
		2025	2026	2027	2028	2029
Laki-Laki	153.581	155.462	157.261	158.980	160.632	162.195
Perempuan	153.589	155.470	157.291	159.042	160.715	162.327
Rasio	**99,99**	**99,99**	**99,98**	**99,96**	**99,95**	**99,92**

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Selanjutnya, tabel di bawah menggambarkan kondisi perkiraan dimana pada tahun 2025, jumlah anak-anak berusia 0-14 tahun di Kota Binjai diproyeksikan mencapai 78.246 jiwa. Angka ini diperkirakan terus meningkat sedikit setiap tahun, mencapai 78.455 jiwa pada tahun 2026, 78.648 jiwa pada tahun 2027, 78.828 jiwa pada tahun 2028, dan 78.994 jiwa pada tahun 2029. Untuk kelompok usia produktif, yaitu 15-64 tahun, populasinya diproyeksikan meningkat dari 212.890 jiwa pada tahun 2025 menjadi 215.292 jiwa pada tahun 2026, 217.570 jiwa pada tahun 2027, 219.729 jiwa pada tahun 2028, dan akhirnya 221.767 jiwa pada tahun 2029.

Sementara itu, jumlah penduduk yang berusia lebih dari 65 tahun diperkirakan akan meningkat dari 19.796 jiwa pada tahun 2025 menjadi 20.805 jiwa pada tahun 2026, 21.804 jiwa pada tahun 2027, 22.791 jiwa pada tahun 2028, dan 23.760 jiwa pada tahun 2029. Angka ketergantungan, yang menunjukkan rasio antara populasi non-produktif (0-14 tahun dan lebih dari 65 tahun) terhadap populasi produktif (15-64 tahun), diperkirakan akan sedikit meningkat dari 46,05 pada tahun 2025 menjadi 46,10 pada tahun 2026, 46,17 pada tahun 2027, 46,25 pada tahun 2028, dan 46,33 pada tahun 2029.

Tabel 2. 27. Proyeksi Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2029 Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif

Kelompok Umur	Proyeksi				
	2025	2026	2027	2028	2029
0-14 Tahun	78.246	78.455	78.648	78.828	78.994
15-64 Tahun	212.890	215.292	217.570	219.729	221.767
>65 Tahun	19.796	20.805	21.804	22.791	23.760
Angka Ketergantungan	**46,05**	**46,10**	**46,17**	**46,25**	**46,33**

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Peningkatan populasi di semua kelompok umur dengan pertumbuhan yang paling signifikan terjadi pada kelompok usia produktif dan lansia. Peningkatan angka ketergantungan, meskipun kecil, menunjukkan adanya peningkatan beban ekonomi terhadap populasi produktif. Hal ini mengindikasikan perlunya perencanaan yang matang dalam kebijakan sosial dan ekonomi untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul dari perubahan demografi ini. Termasuk tambahan dari jumlah penduduk lansia, yang

memerlukan perencanaan sejak dini agar sarana prasarana yang mendukung keberadaan lansia di Kota Binjai dapat terfasilitasi dengan lebih baik.

Proyeksi Penduduk Kota Binjai Berdasarkan Kecamatan

Populasi Kota Binjai diproyeksikan mengalami peningkatan yang stabil dari tahun 2025 hingga 2029 di semua kecamatannya. Kecamatan Binjai Selatan diperkirakan akan tumbuh dari 64.347 jiwa pada tahun 2025 menjadi 67.160 jiwa pada tahun 2029, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 703 orang. Binjai Kota, meskipun memiliki populasi terkecil, juga menunjukkan pertumbuhan stabil dari 32.028 jiwa menjadi 33.428 jiwa pada periode yang sama, dengan peningkatan sekitar 350 orang per tahun.

Tabel 2. 28. Proyeksi Penduduk Kota Binjai Tahun 2025-2029 Menurut Kecamatan

Wilayah	2025	2026	2027	2028	2029
Binjai Selatan	64.347	65.096	65.814	66.503	67.160
Binjai Kota	32.028	32.401	32.758	33.101	33.428
Binjai Timur	68.687	69.486	70.253	70.988	71.689
Binjai Utara	88.508	89.538	90.526	91.472	92.376
Binjai Barat	57.362	58.030	58.670	59.284	59.869
Kota Binjai	**310.932**	**314.552**	**318.022**	**321.347**	**324.522**

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Binjai Timur akan mengalami pertumbuhan dari 68.687 jiwa menjadi 71.689 jiwa, dengan rata-rata peningkatan sekitar 751 orang per tahun. Sementara itu, Binjai Utara, sebagai kecamatan dengan populasi terbesar, diproyeksikan tumbuh dari 88.508 jiwa menjadi 92.376 jiwa, menambahkan sekitar 967 orang setiap tahunnya. Binjai Barat juga akan tumbuh dari 57.362 jiwa menjadi 59.869 jiwa, dengan peningkatan sekitar 627 orang per tahun. Secara keseluruhan, populasi Kota Binjai diproyeksikan meningkat dari 310.932 jiwa pada tahun 2025 menjadi 324.522 jiwa pada tahun 2029, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 3.648 orang. Pertumbuhan populasi yang stabil ini menunjukkan potensi positif untuk perkembangan kota, namun juga menuntut perencanaan yang matang dalam infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan lebih merata antar Kecamatan.

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menunjukkan indikator kesejahteraan masyarakat Kota Binjai yang meliputi aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, kebudayaan, keluarga, kesetaraan gender dan inklusifitas.

1. Kesejahteraan Ekonomi

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, PDRB per Kapita Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini dan Indeks Pembangunan Manusia.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro dengan menggunakan perbandingan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) antar periode untuk menjadi gambaran pembangunan suatu wilayah. Berdasarkan gambar di bawah, laju pertumbuhan PDRB Kota Binjai pada tahun 2024 ditandai yang berwana kuning, yaitu sebesar 4,66 %. Pertumbuhan ekonomi Kota Binjai masih lebih rendah dari capaian Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 5,03 %. Pertumbuhan ekonomi Kota Binjai berada di urutan ke-22 tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, atau urutan ke-13 terendah.

Gambar 2. 9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai Dibandingkan Kabupaten/Kota Lain di Sumatera Utara Tahun 2024

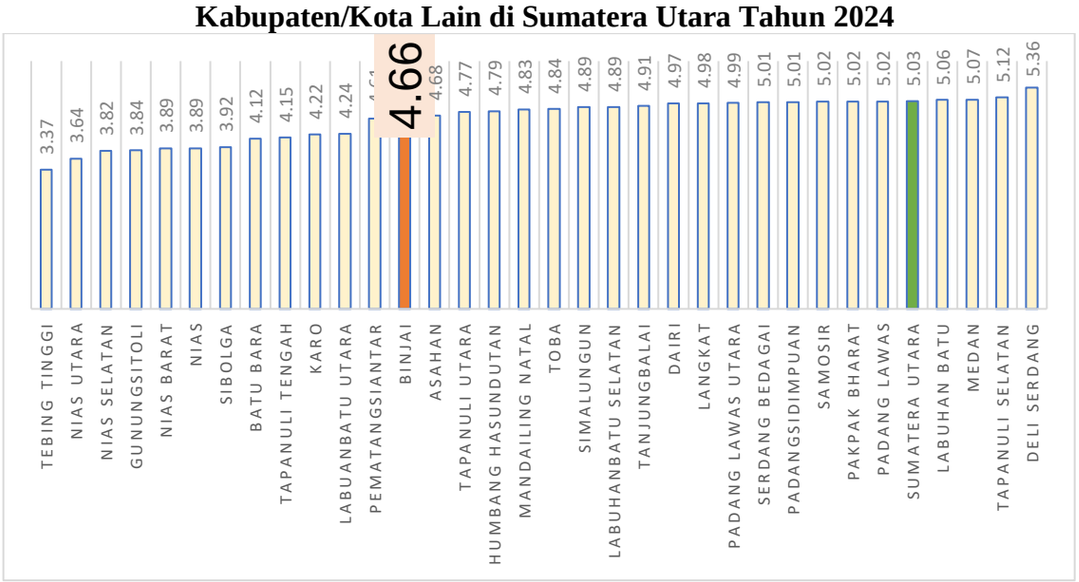

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jika dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional sejak tahun 2019 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Binjai sendiri tampak berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi Kota Binjai tahun 2019 terlihat lebih tinggi dibandingkan capaian provinsi maupun nasional. Pada saat itu, perekonomian Kota Binjai mampu tumbuh hingga 5,51 %, jauh diatas pertumbuhan provinsi dan nasional yang masing-masing sebesar 5,22 % dan 5,02 %. Pada saat pandemi Covid-19, perekonomian Kota Binjai terkontraksi hingga -1,83%. Kondisi pelemahan ini juga dialami dalam lingkup provinsi dan nasional.

Pada tahun 2021, pemulihan ekonomi mulai berlangsung diikuti laju tumbuh yang positif sebesar 2,23 %. Kondisi ini terus berlangsung hingga tahun 2024, namun capaiannya belum pernah menyentuh kondisi di atas 5 % seperti yang terjadi pada tahun 2019. Sejak terjadinya pandemi, laju tumbuh ekonomi Kota Binjai juga terlihat lebih rendah dibandingkan capaian provinsi dan nasional. Kondisi ini memerlukan strategi peningkatan ekonomi yang lebih baik ke depannya, dengan menggali berbagai komoditas potensial yang diharapkan mampu lebih bersaing, disamping meningkatkan daya tawar dari produk-produk unggulan yang sedang berjalan.

Gambar 2. 10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai Dibandingkan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

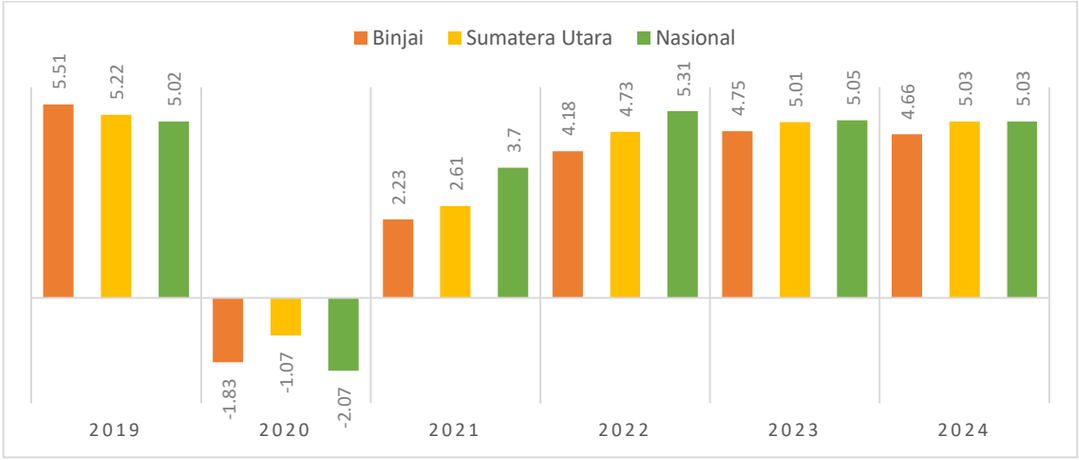

Sumber : Badan Pusat Statistik

Sektor yang memiliki laju pertumbuhan terbesar pada tahun 2024 adalah Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,91 %. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas restoran maupun penginapan di Kota Binjai, yang berlangsung sejak tahun 2022 setelah terjadinya pandemi Covid-19. Kemudian, sektor yang memiliki laju pertumbuhan terbesar berikutnya adalah Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,08 % dan Sektor Informasi dan Komunikasi yang mencapai 7,43 %. Arus digitalisasi yang semakin menguat mendorong sektor ini untuk tumbuh kembang di Kota Binjai.

Tabel 2. 29. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai Berdasarkan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,38	1,03	2,71	2,88	3,94
Pertambangan dan Penggalian	-1,28	2,74	2,32	1,65	-3,41
Industri Pengolahan	-3,18	2,39	2,85	3,26	3,4
Pengadaan Listrik dan Gas	5,67	4,62	6,53	4,50	2,77
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,37	-0,55	0,58	2,69	0,42
Konstruksi	-4,46	2,18	0,44	2,96	3,1
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,02	3,63	5,47	5,53	5,61
Transportasi dan Pergudangan	-6,35	-1,48	5,79	8,20	8,08
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7,88	1,10	9,57	9,45	9,91
Informasi dan Komunikasi	7,34	6,87	7,27	6,05	7,43
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,68	5,10	5,50	4,05	2,31
Real Estate	1,57	0,24	4,94	3,13	2,04
Jasa Perusahaan	-4,71	-0,14	6,82	6,20	4,14
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,66	-0,45	-0,45	1,33	2,32
Jasa Pendidikan	1,52	3,05	2,25	4,77	3,84
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-1,20	0,94	4,25	4,62	4,26
Jasa Lainnya	-1,31	1,43	2,68	3,57	5,31
Kota Binjai	**-1,83**	**2,23**	**4,18**	**4,75**	**4,66**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Binjai

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terlihat mengalami pertumbuhan yang stabil meningkat. Sedangkan sektor industri olahan meningkat stagnan di angka rata-rata

sekitar 3 % sejak tahun 2021. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami pertumbuhan yang cukup baik selama tiga tahun terakhir, dimana mampu lebih tinggi dari perekonomian agregatnya. Sementara itu, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang menjadi cerminan perkembangan ekonomi sirkular terlihat mengalami pertumbuhan yang rendah jika dibandingkan kondisi sebelumnya di tahun 2019. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mulai memainkan peran dalam menopang perekonomian di Kota Binjai, dengan laju tumbuh yang terus meningkat hingga 2,32 %.

Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan yang dirilis oleh BPS berisi gambaran persentase penduduk miskin di suatu wilayah. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Binjai menunjukkan tren penurunan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 15,91 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 5,71%. Angka ini sedikit meningkat pada tahun 2021 menjadi 16,46 ribu jiwa dan tingkat kemiskinan 5,81%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak ekonomi pandemi COVID-19. Namun, sejak 2022, terjadi penurunan yang cukup konsisten baik dalam jumlah penduduk miskin maupun tingkat kemiskinannya. Pada 2022, jumlah penduduk miskin turun menjadi 14,61 ribu jiwa (5,10%), lalu menurun lagi menjadi 13,85 ribu jiwa (4,79%) pada 2023, dan stabil di angka sekitar 13,86 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 4,75% pada 2024.

Gambar 2. 11. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Binjai

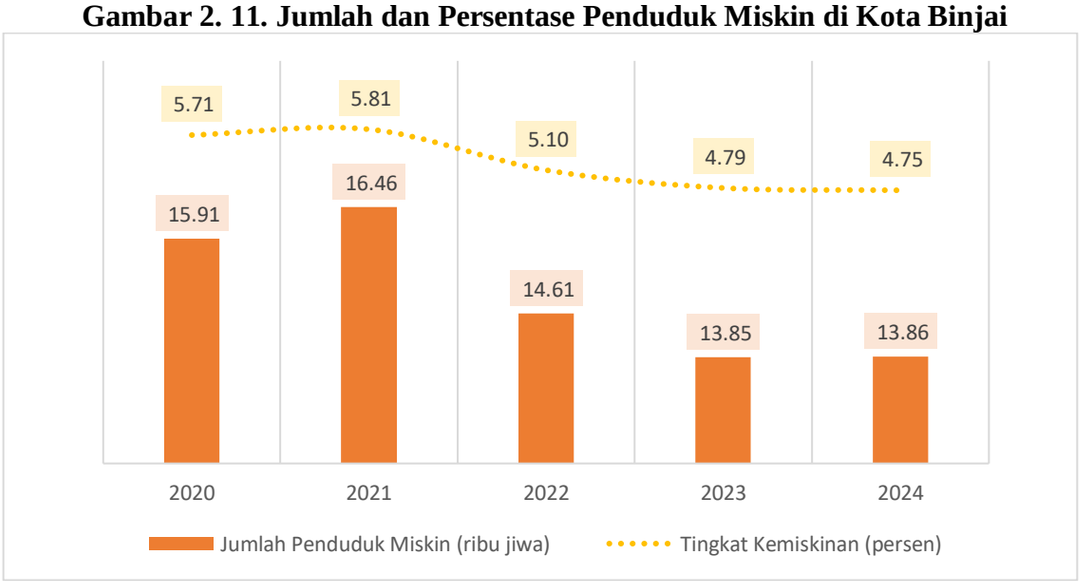

Sumber : Badan Pusat Statistik

Penurunan ini menunjukkan perbaikan kondisi sosial ekonomi di Kota Binjai dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bisa mencerminkan efektivitas program pengentasan kemiskinan, pemulihan ekonomi pasca-pandemi, serta peningkatan akses terhadap layanan sosial dan lapangan pekerjaan. Meskipun demikian, kestabilan angka

pada 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa diperlukan strategi tambahan agar penurunan kemiskinan dapat terus berlanjut secara signifikan.

Angka kemiskinan di Kota Binjai mengalami penurunan secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2020, angka kemiskinan berada di angka 5,71%, kemudian naik sedikit menjadi 5,81% di tahun 2021. Namun setelah itu, tren menurun terlihat cukup jelas: turun menjadi 5,10% pada 2022, kemudian menjadi 4,79% pada 2023, dan kembali turun sedikit ke 4,75% pada 2024.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan tingkat Nasional, angka kemiskinan di Kota Binjai selalu berada di bawah keduanya sepanjang periode 2020–2024. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Binjai relatif lebih berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional. Misalnya, pada 2024, angka kemiskinan nasional masih berada di 8,57%, dan Sumatera Utara di 7,99%, sementara Binjai hanya 4,75%.

Tren ini menunjukkan adanya kemajuan yang positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Binjai. Penurunan yang konsisten ini dapat mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial, peningkatan akses terhadap lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi lokal. Meski demikian, mempertahankan dan mempercepat penurunan ini tetap menjadi tantangan yang perlu dihadapi secara berkelanjutan.

Gambar 2. 12. Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Binjai dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

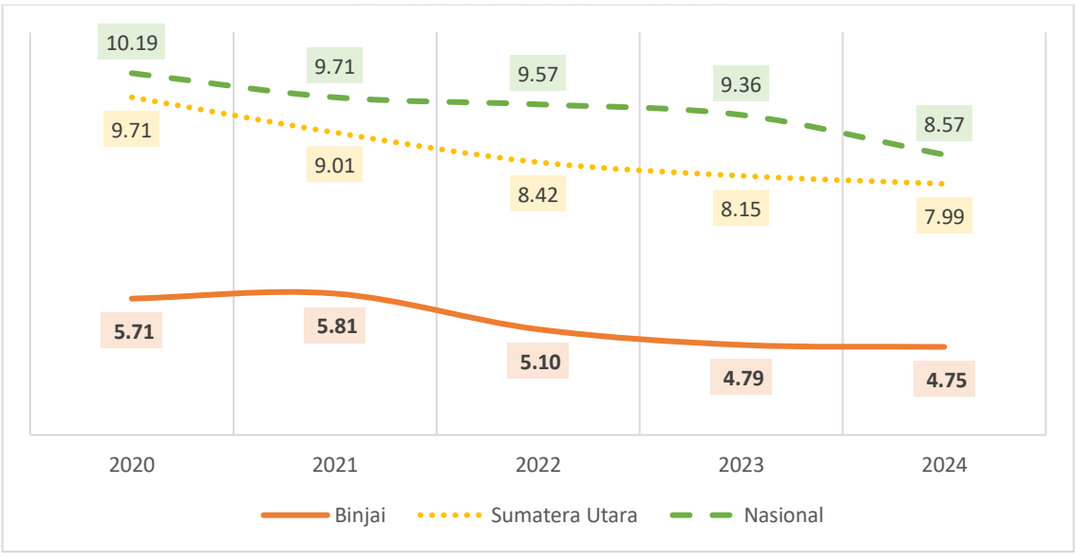

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kota Binjai mencatat angka kemiskinan sebesar 4,75% pada tahun 2024, yang berarti berada jauh di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara sebesar 7,99%. Dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara, Binjai menempati posisi kedua terendah dalam hal angka kemiskinan, hanya sedikit lebih tinggi dari Deli Serdang (3,44%).

Pencapaian ini menunjukkan bahwa Kota Binjai berhasil menjaga kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya relatif lebih baik dibandingkan daerah lain di provinsi tersebut. Angka ini juga memperkuat tren penurunan kemiskinan yang terlihat pada grafik sebelumnya, serta mengindikasikan bahwa program-program pemerintah daerah yang berfokus pada pengentasan kemiskinan cukup efektif.

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa rendahnya angka kemiskinan tidak serta-merta mencerminkan pemerataan kesejahteraan, karena sebelumnya telah terlihat bahwa Indeks Gini Binjai masih di atas rata-rata provinsi, yang berarti ketimpangan pendapatan masih cukup tinggi. Oleh karena itu, tantangan berikutnya bagi Kota Binjai adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bisa lebih merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 2. 13. Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2024

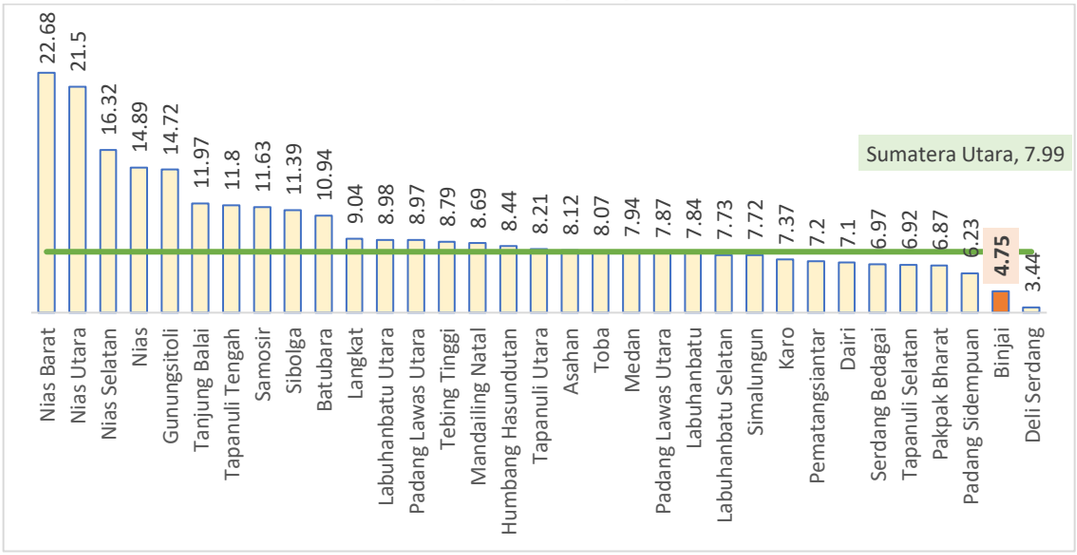

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Persoalan kemiskinan bukan hanya mengenai berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Binjai menunjukkan tren yang relatif stabil dari tahun 2020 hingga 2023, namun mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2024. Pada tahun 2020 dan 2021, nilai indeks berada di angka 0,59, kemudian menurun menjadi 0,49 pada 2022 dan 0,48 pada 2023, yang mengindikasikan perbaikan kondisi kesejahteraan penduduk miskin, terutama dari segi kedekatan pengeluaran mereka terhadap garis kemiskinan. Namun, pada tahun 2024, indeks ini justru meningkat menjadi

0,69, menunjukkan adanya pendalaman kemiskinan, di mana sebagian penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan nasional, Kota Binjai tetap mencatat angka kedalaman kemiskinan yang jauh lebih rendah sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2024, misalnya, indeks kedalaman kemiskinan Sumatera Utara mencapai 1,08 dan nasional 1,36, jauh di atas Binjai yang berada di 0,69. Ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pada 2024, secara umum kondisi kemiskinan di Binjai masih relatif ringan dibandingkan daerah lain.

Gambar 2. 14. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Binjai dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

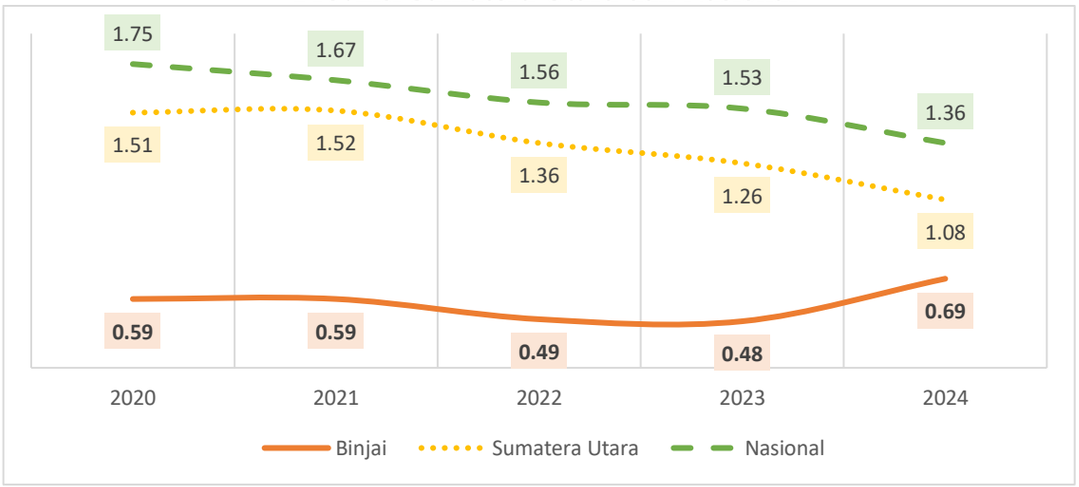

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kenaikan indeks pada tahun 2024 perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi ke depan, terutama dalam memastikan efektivitas program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Upaya-upaya tersebut penting untuk mencegah kemiskinan ekstrem dan menjaga ketahanan sosial masyarakat.

Gambar 2. 15. Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Binjai dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

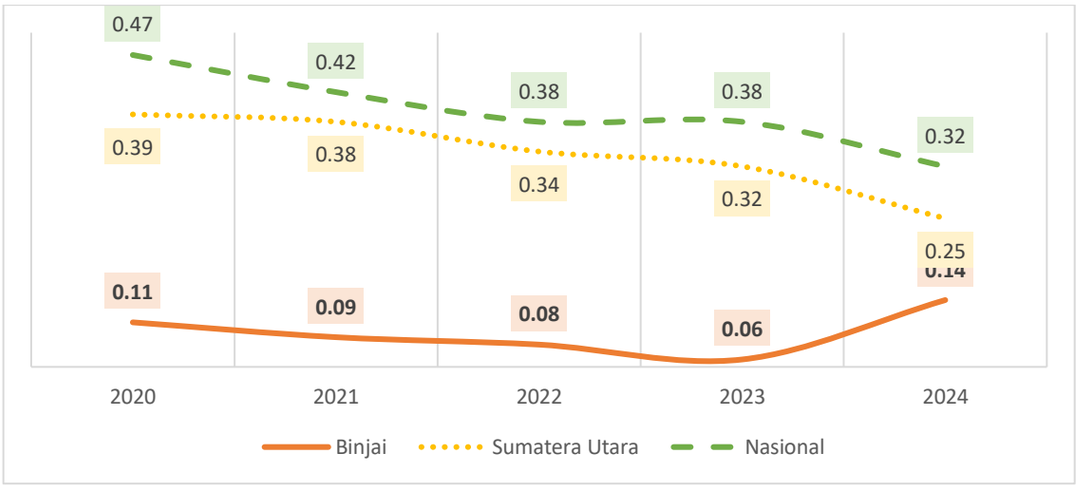

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Binjai menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2023, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024. Pada tahun 2020, indeks keparahan tercatat sebesar 0,11, kemudian menurun secara bertahap menjadi 0,09 pada 2021, 0,08 pada 2022, dan mencapai titik terendah 0,06 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, nilai ini meningkat cukup tajam menjadi 0,14. Indeks keparahan kemiskinan menggambarkan ketimpangan di antara penduduk miskin itu sendiri, atau seberapa jauh tingkat pengeluaran mereka dari garis kemiskinan. Kenaikan indeks pada 2024 mengindikasikan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin mungkin tetap atau menurun, namun ketimpangan di kalangan mereka semakin lebar, sehingga kelompok miskin yang paling parah menjadi lebih tertinggal.

Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Utara (0,25) dan nasional (0,32), nilai indeks Kota Binjai tetap jauh lebih rendah, yang menunjukkan bahwa secara umum keparahan kemiskinan di kota ini masih terkendali. Namun, tren kenaikan di tahun terakhir perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Diperlukan kebijakan yang lebih tajam dalam mengintervensi kelompok masyarakat paling rentan agar tidak semakin tertinggal, seperti program bantuan terarah, pendampingan usaha ultra mikro, serta peningkatan akses layanan dasar.

PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator makro ekonomi yang menunjukkan rata-rata pendapatan penduduk selama kurun waktu tertentu. Tabel berikut menunjukkan PDRB per Kapita ADHB dan ADHK Kota Binjai dari tahun 2020 hingga tahun 2024. perkembangan PDRB per kapita Kota Binjai baik menurut ADHB (harga berlaku) maupun ADHK (harga konstan) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2020 hingga 2024. Dari sisi PDRB per kapita ADHB, nilai meningkat dari Rp40.488,05 pada tahun 2020 menjadi Rp50.414,89 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan nilai ekonomi nominal per orang, termasuk pengaruh inflasi dan perubahan harga. Kenaikan yang cukup signifikan, khususnya dalam dua tahun terakhir, menunjukkan bahwa secara umum aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat mengalami pertumbuhan dalam nilai rupiah yang berlaku.

Tabel 2. 30. PDRB per Kapita Kota Binjai

Tahun	PDRB per Kapita ADHB	PDRB per Kapita ADHK
2020	40.488,05	27.468,20
2021	41.702,01	27.636,61
2022	44.385,18	28.344,41
2023	47.678,59	29.370,13
2024	**50.414,89**	**30.348,27**

Sumber : Badan Pusat Statistik

Sementara itu, PDRB per kapita ADHK—yang mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi—juga mengalami peningkatan dari Rp27.468,20 pada tahun 2020 menjadi Rp30.348,27 pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan bahwa

secara riil, pendapatan masyarakat terus meningkat, meskipun laju pertumbuhannya cenderung lebih moderat dibandingkan ADHB. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan produktivitas dan peningkatan output ekonomi yang cukup stabil dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, peningkatan pada kedua indikator ini menandakan bahwa Kota Binjai berada pada jalur pertumbuhan ekonomi yang positif, baik secara nominal maupun riil. Namun, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini juga diikuti oleh pemerataan kesejahteraan dan peningkatan daya beli masyarakat secara merata.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Binjai menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, TPT Binjai berada di angka 8,67%, angka tertinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara (6,91%) dan nasional (7,07%) pada tahun yang sama. Namun, sepanjang lima tahun terakhir, Kota Binjai berhasil menurunkan tingkat pengangguranya secara konsisten hingga mencapai 5,44% pada tahun 2024.

Gambar 2. 16. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Binjai dengan Sumatera Utara dan Nasional

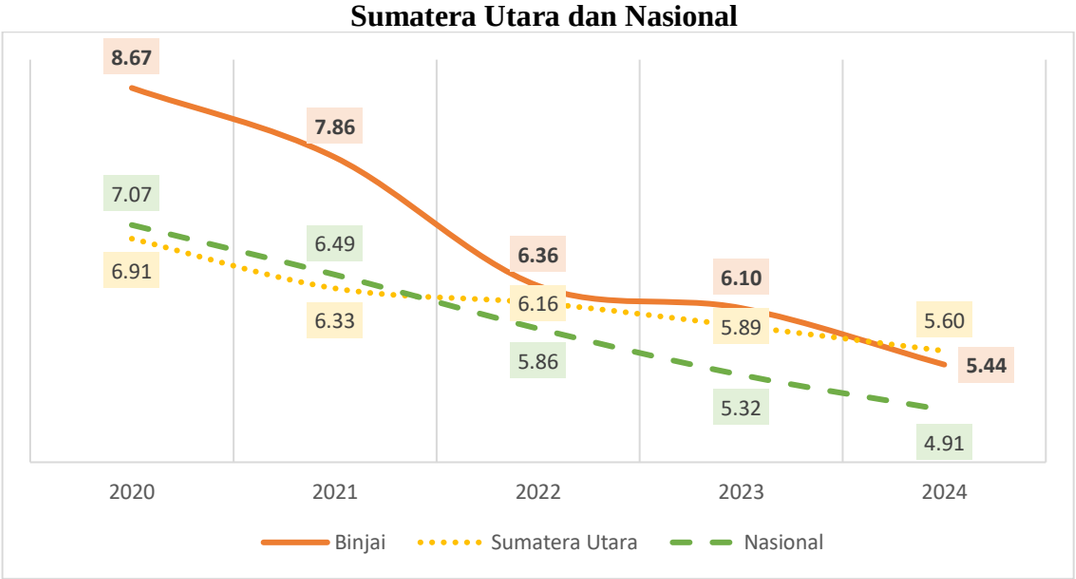

Sumber : Badan Pusat Statistik

Penurunan ini menunjukkan perbaikan dalam sektor ketenagakerjaan dan penyerapan tenaga kerja di Kota Binjai, yang dapat dikaitkan dengan membaiknya kondisi ekonomi pascapandemi, pertumbuhan sektor informal dan UMKM, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pelatihan kerja dan pendidikan vokasi. Meskipun demikian, pada tahun 2024, tingkat pengangguran Binjai masih sedikit di atas rata-rata nasional (4,91%), namun sudah lebih rendah dari rata-rata Provinsi Sumatera Utara (5,60%).

Kondisi ini mencerminkan bahwa Kota Binjai berada di jalur yang baik dalam mengatasi pengangguran, namun masih memerlukan strategi berkelanjutan untuk

memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta menciptakan ekosistem investasi dan wirausaha yang mendukung pertumbuhan lapangan kerja di sektor formal maupun informal.

Gambar 2. 17. Perbandingan Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2024

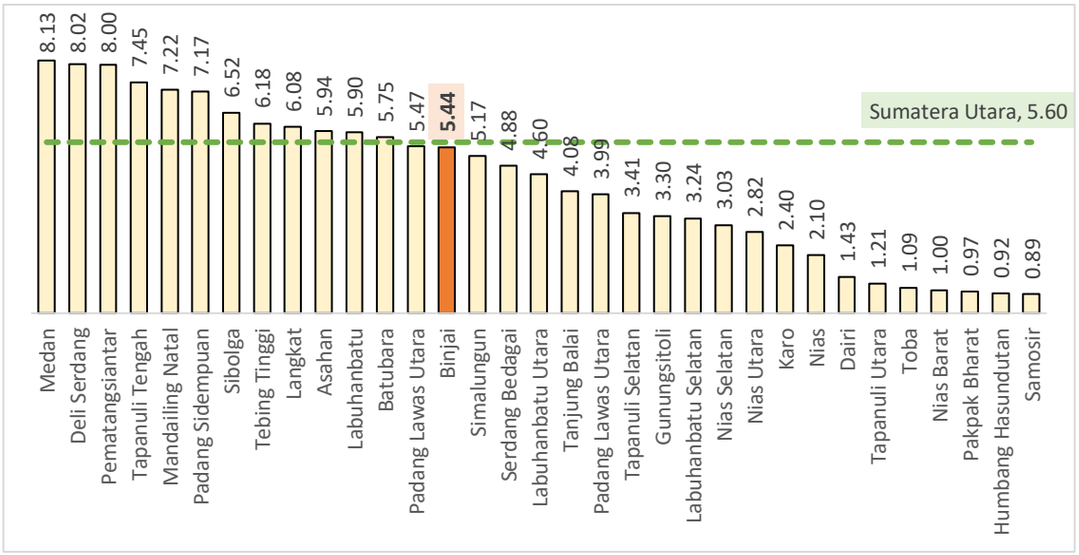

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Binjai pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,44%, yang berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,60%. Dengan posisi ini, Binjai menempati peringkat ke-15 dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara, dan berada di kelompok tengah dalam hal tingkat pengangguran regional. Angka ini menunjukkan bahwa Kota Binjai berhasil menekan tingkat pengangguran lebih baik dibandingkan sebagian besar wilayah lain di provinsi ini, termasuk beberapa daerah besar seperti Medan dan Deli Serdang yang mencatat angka pengangguran di atas 8%. Capaian ini mencerminkan adanya perbaikan dalam ketersediaan lapangan kerja, serta keberhasilan program pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Namun demikian, angka ini juga menunjukkan bahwa pengangguran masih menjadi tantangan serius yang harus diatasi, terutama mengingat posisi Binjai sebagai kota strategis yang berbatasan langsung dengan pusat ekonomi seperti Medan. Diperlukan upaya berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor padat karya, penguatan wirausaha muda, serta penyelarasan pendidikan dan keterampilan kerja dengan kebutuhan industri lokal untuk menciptakan peluang kerja yang lebih luas dan berkelanjutan.

Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator makro ekonomi menggambarkan kesejahteraan suatu wilayah dengan mengukur ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan di suatu wilayah tertentu. Hasil perhitungan berkisar antara 0 sampai 1, semakin mendekati satu maka semakin parah ketimpangan di wilayah tersebut.

Gambar 2. 18. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2024

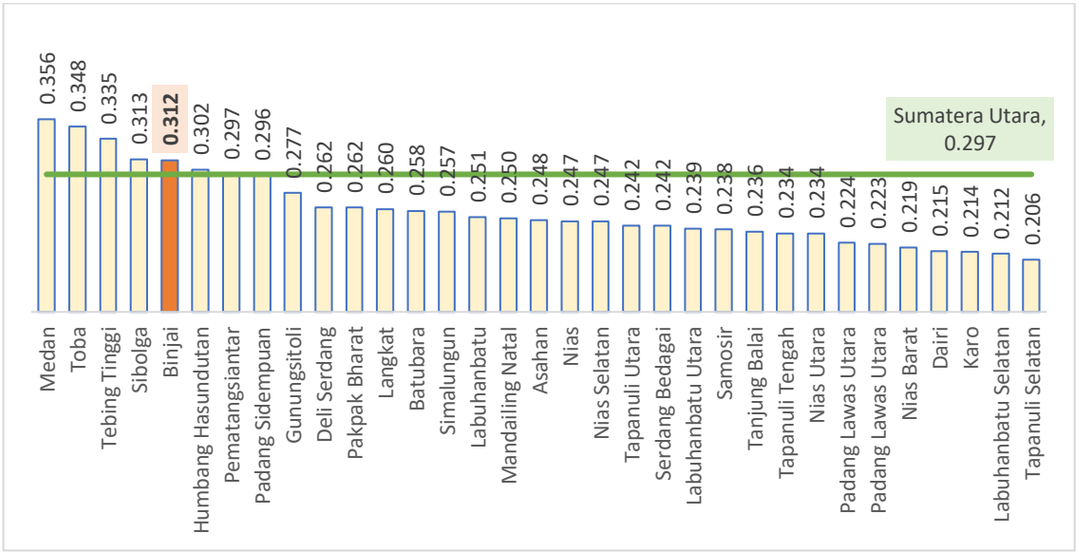

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks Gini Kota Binjai pada tahun 2024 berada di angka 0,312, yang berarti masih berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,297. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Binjai lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota lainnya di provinsi tersebut. Jika dilihat dari peringkat, Binjai termasuk dalam kelompok dengan Indeks Gini tertinggi kelima setelah Medan (0,356), Toba (0,348), Tebing Tinggi (0,335) dan Sibolga (0,313). Artinya, meskipun jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Binjai menunjukkan tren penurunan, ketimpangan antar kelompok pendapatan masih cukup terasa. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kota Binjai untuk tidak hanya fokus pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga memperhatikan upaya untuk memperkecil kesenjangan ekonomi, misalnya melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta kebijakan redistribusi ekonomi yang inklusif.

Indeks Gini Kota Binjai mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai Indeks Gini Binjai sebesar 0,324, yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 0,290, yang mengindikasikan perbaikan dalam distribusi pendapatan. Selanjutnya, nilai indeks ini kembali meningkat secara bertahap menjadi 0,302 pada 2022 dan mencapai 0,318 pada 2023, sebelum menurun kembali menjadi 0,312 pada 2024.

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, nilai Indeks Gini Binjai cenderung lebih fluktuatif. Meskipun pada awal periode (2020) nilai Binjai lebih tinggi dari Sumatera Utara dan sedikit di bawah Nasional, pada 2021 hingga

2022 nilainya berada di bawah keduanya, mencerminkan ketimpangan yang lebih rendah. Namun, peningkatan pada 2023 membuat ketimpangan di Binjai kembali lebih tinggi daripada tingkat provinsi, meskipun masih di bawah nasional.

Gambar 2. 19. Perbandingan Indeks Gini Kota Binjai, Sumatera Utara dan Nasional

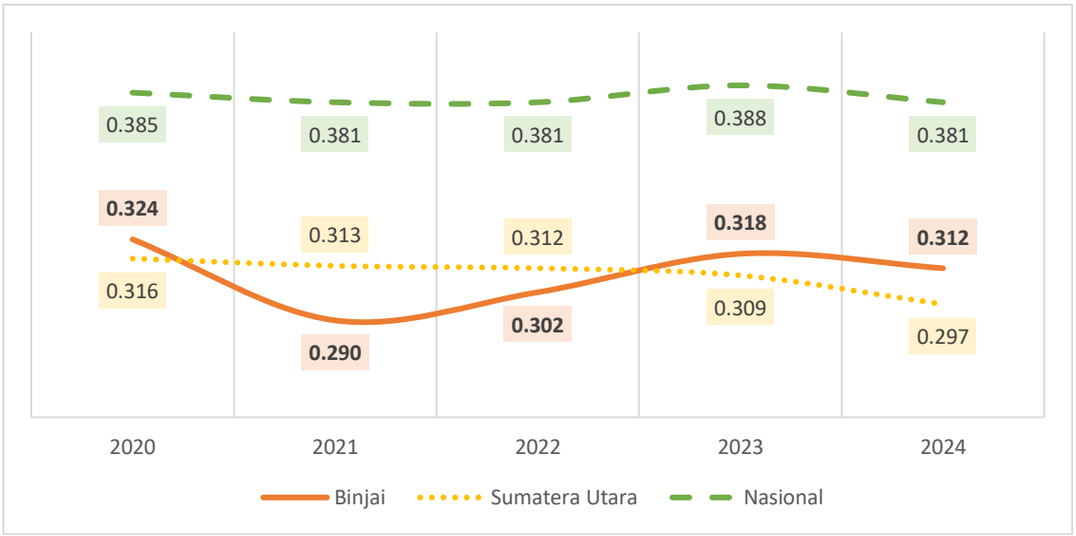

Sumber : Badan Pusat Statistik

Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan adanya dinamika dalam distribusi pendapatan di Kota Binjai yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi lokal, kebijakan sosial, atau perubahan struktur lapangan kerja. Perlu perhatian lebih lanjut agar ketimpangan tidak kembali meningkat dalam jangka panjang.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat berperan penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran rata-rata capaian aspek utama pembangunan manusia yang meliputi umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan standar hidup yang layak.

Gambar 2. 20. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

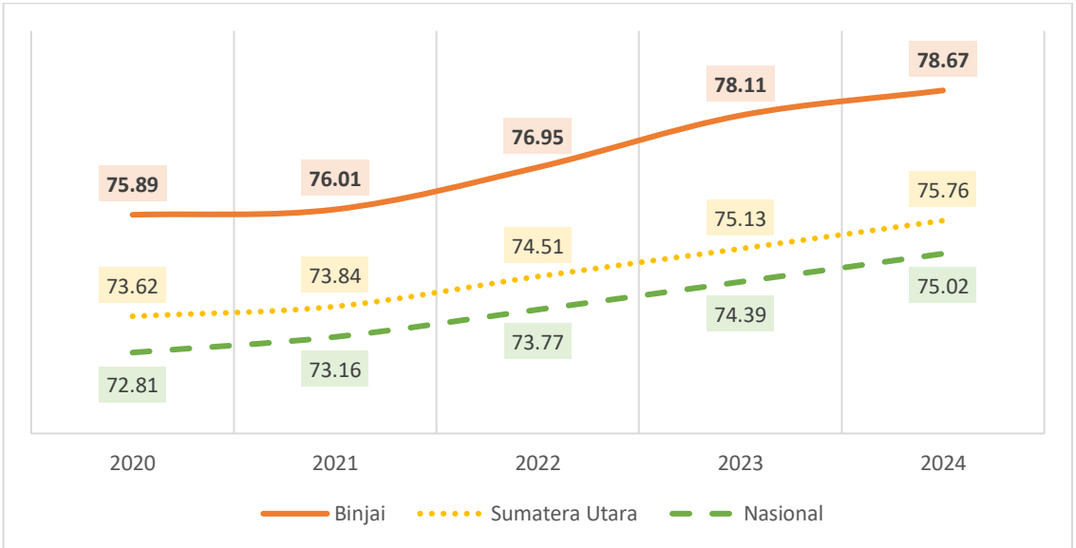

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Binjai menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. IPM Binjai naik dari 75,89 pada tahun 2020 menjadi 78,67 pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan yang berkelanjutan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Pencapaian IPM Kota Binjai terus berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Utara maupun nasional. Pada tahun 2024, IPM Binjai (78,67) lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Sumatera Utara (75,76) maupun nasional (75,02). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Binjai relatif lebih baik, dengan capaian yang stabil dan cenderung meningkat setiap tahunnya.

Kenaikan IPM yang stabil menunjukkan bahwa program-program pembangunan di Kota Binjai berjalan cukup efektif, khususnya dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, dan menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, untuk mempertahankan dan mempercepat pertumbuhan IPM, perlu perhatian lebih pada kelompok masyarakat rentan agar kesenjangan tidak melebar. Peningkatan partisipasi pendidikan menengah dan tinggi, penurunan angka pengangguran terbuka, serta penguatan sistem layanan kesehatan dasar menjadi kunci keberlanjutan pencapaian pembangunan manusia di masa mendatang.

Gambar 2. 21. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2024

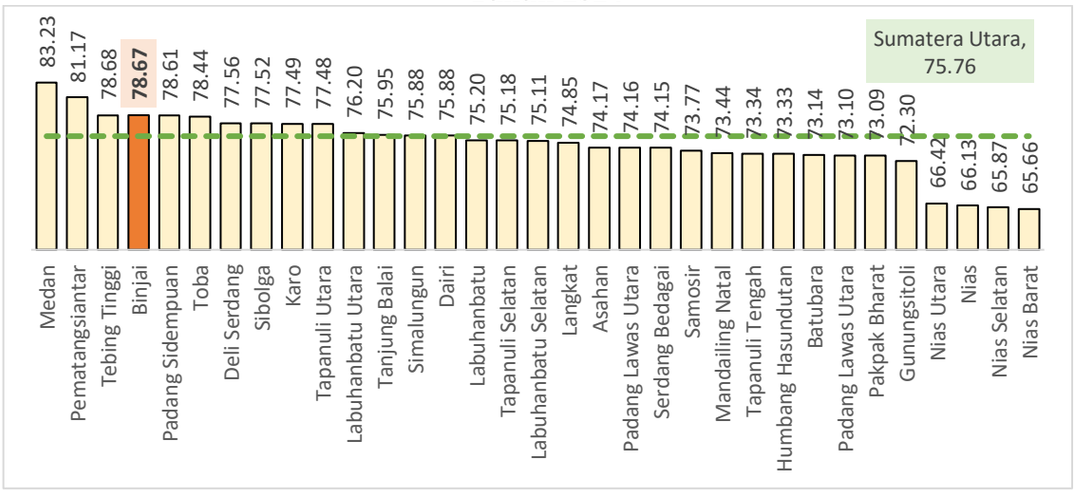

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Binjai pada tahun 2024 tercatat sebesar 78,67, yang menempatkannya di peringkat ke-4 tertinggi dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Nilai ini juga melampaui rata-rata IPM provinsi, yaitu 75,76, yang menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Binjai secara umum berada dalam kategori tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Utara. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan Kota Binjai dalam mengembangkan tiga komponen utama IPM, yaitu: umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang

disesuaikan. Posisi yang tinggi ini juga menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Binjai tidak hanya stabil, tetapi juga kompetitif di tingkat regional.

Capaian ini merupakan hasil dari konsistensi dalam pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam memperkecil kesenjangan antarwilayah dan kelompok sosial di dalam kota itu sendiri. Untuk menjaga tren positif ini, Binjai perlu terus berinovasi dalam pelayanan publik, memperluas akses pendidikan dan pelatihan kerja berkualitas, serta memperkuat jaring pengaman sosial agar hasil pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan data indikator pembangunan Kota Binjai tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya hubungan yang saling berkaitan antara pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), indeks gini, dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita. Secara keseluruhan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita memiliki korelasi positif terhadap peningkatan IPM dan penurunan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Namun, dinamika pada indeks gini mengindikasikan pentingnya intervensi yang lebih inklusif dan berkeadilan agar pertumbuhan yang dicapai dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan kebijakan pembangunan yang berfokus pada keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat upaya pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi di Kota Binjai.

2. Kesehatan untuk Semua

Menjelaskan kondisi kesehatan semua penduduk Kota Binjai pada seluruh siklus hidup dan kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan yang meliputi Umur Harapan Hidup, Indeks Keluarga Sehat dan Prevalensi Stunting.

Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas kesehatan penduduk dan keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah. Indikator ini menggambarkan rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa pola mortalitas yang ada saat ini terus berlaku. Di Kota Binjai, peningkatan umur harapan hidup menjadi cerminan dari membaiknya akses dan kualitas layanan kesehatan, kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, serta efektivitas program-program kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap tren dan determinan UHH menjadi bagian strategis dalam menyusun kebijakan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan dan inklusif.

Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Binjai menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, UHH Binjai berada di angka 72,38 tahun, sedikit di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara (73,00 tahun) dan

nasional (73,37 tahun). Namun, dalam kurun waktu lima tahun, UHH di Binjai meningkat secara tajam hingga mencapai 74,45 tahun pada tahun 2024, yang berarti melampaui rata-rata provinsi (73,90 tahun) maupun nasional (74,15 tahun). Lonjakan umur harapan hidup ini menggambarkan peningkatan signifikan dalam kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Kota Binjai. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh membaiknya akses terhadap layanan kesehatan, peningkatan gizi masyarakat, serta efektivitas program promotif dan preventif di bidang kesehatan.

Gambar 2. 22. Perbandingan Umur Harapan Hidup Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

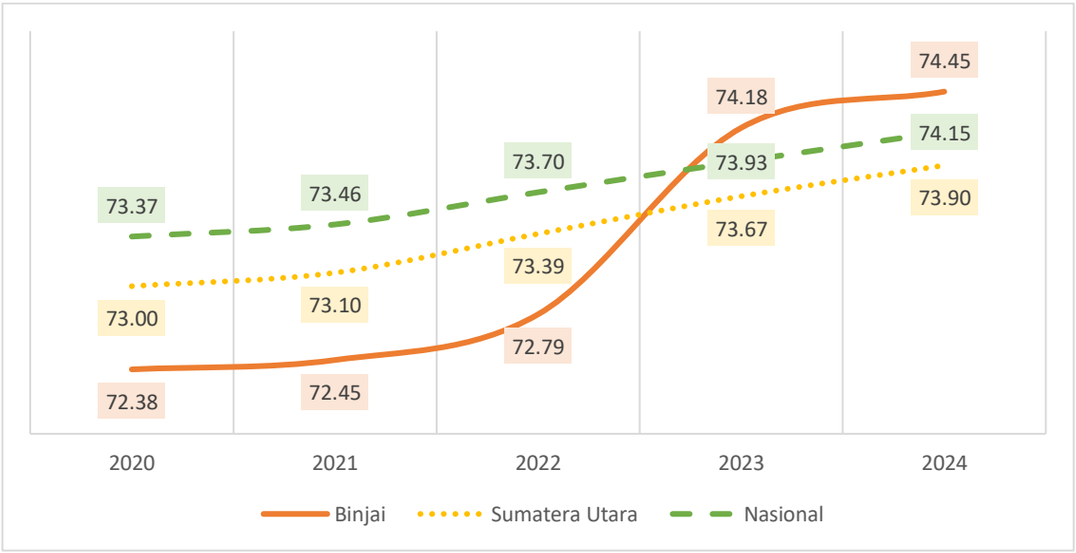

Sumber : Badan Pusat Statistik

Lonjakan tajam antara tahun 2022 dan 2023, dari 72,79 ke 74,18 tahun, menjadi titik kritis yang patut dicermati. Kenaikan ini bisa menjadi indikasi keberhasilan intervensi kebijakan tertentu seperti peningkatan layanan kesehatan primer, vaksinasi, atau pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Namun demikian, untuk menjaga konsistensi dan memperkuat tren ini, Pemerintah Kota Binjai perlu terus memperluas jangkauan layanan kesehatan, meningkatkan kualitas SDM kesehatan, serta mendorong pola hidup sehat di kalangan masyarakat secara lebih masif.

Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Binjai pada tahun 2024 tercatat sebesar 74,45 tahun, yang menempatkan Binjai pada peringkat ke-4 tertinggi dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara. Nilai ini juga berada di atas rata-rata provinsi yang sebesar 73,90 tahun, menunjukkan bahwa kualitas kesehatan dan harapan hidup masyarakat Binjai relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar wilayah lainnya di Sumatera Utara. Posisi ini mencerminkan keberhasilan Kota Binjai dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta efektivitas berbagai intervensi kesehatan masyarakat. Capaian ini juga menggambarkan pola hidup masyarakat yang semakin sehat, serta meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya pencegahan penyakit dan pemanfaatan layanan kesehatan.

Gambar 2. 23. Perbandingan UHH di Sumatera Utara Tahun 2024

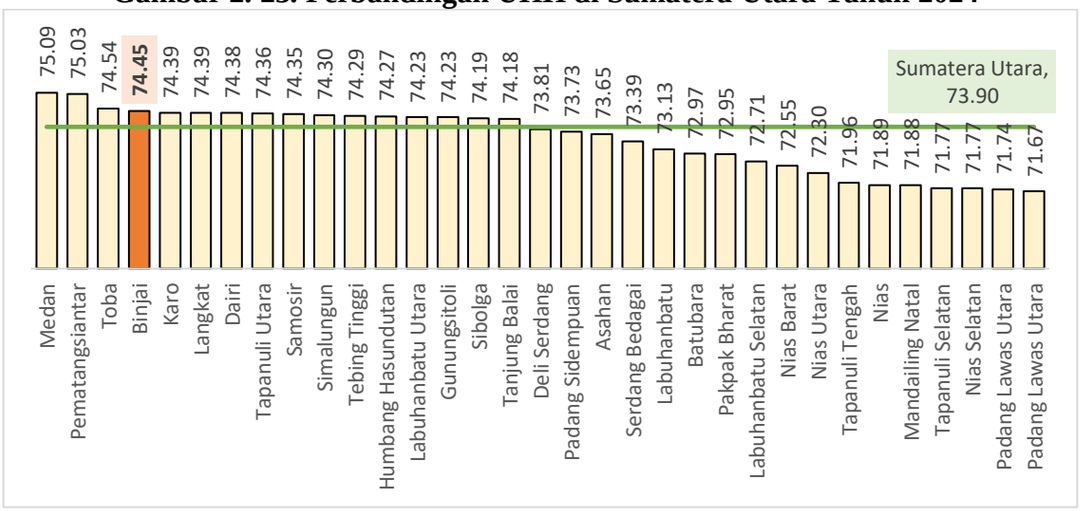

Sumber : Badan Pusat Statistik

Keberhasilan ini dapat ditelusuri ke sejumlah faktor kunci seperti peningkatan cakupan imunisasi, ketersediaan fasilitas kesehatan primer dan rujukan, program pelayanan ibu dan anak, serta promosi kesehatan berbasis komunitas. Namun demikian, tantangan ke depan adalah mempertahankan capaian ini secara berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi risiko penyakit tidak menular, penuaan penduduk, dan ketimpangan akses layanan di kelompok masyarakat rentan. Perlu strategi lintas sektor yang terintegrasi agar peningkatan umur harapan hidup tidak hanya angka, tetapi juga disertai dengan kualitas hidup yang baik di usia lanjut.

Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas kehidupan sebuah keluarga berdasarkan sejumlah indikator yang mencakup berbagai aspek kesehatan dan kesejahteraan. IKS melibatkan faktor-faktor seperti kesehatan fisik anggota keluarga, yang mencakup status gizi, imunisasi, dan akses terhadap layanan kesehatan dasar. Selain itu, pendidikan kesehatan juga menjadi komponen penting, yang mengukur sejauh mana keluarga memahami dan menerapkan pola hidup sehat, sanitasi, serta lingkungan yang sehat. Kondisi perumahan dan lingkungan sekitar juga dinilai, termasuk kualitas tempat tinggal, ventilasi, sumber air bersih, dan sistem pembuangan limbah. Aspek ekonomi keluarga, yang mencakup pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, turut memengaruhi kesehatan keluarga. Selain itu, kesejahteraan mental dan sosial anggota keluarga, serta hubungan sosial yang mendukung, juga menjadi indikator penting. Terakhir, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai turut berperan dalam menentukan indeks ini. IKS bertujuan memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan keluarga dalam hal kesehatan, yang dapat menjadi dasar untuk merencanakan kebijakan atau program yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam hal kesehatan keluarga.

Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merujuk pada persentase anak yang mengalami stunting dalam suatu populasi tertentu, biasanya berdasarkan kelompok usia tertentu seperti balita (0-59 bulan). Stunting diukur dengan perbandingan tinggi badan anak terhadap usia yang lebih rendah dari standar pertumbuhan yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Prevalensi stunting digunakan untuk menggambarkan sejauh mana masalah kekurangan gizi kronis mempengaruhi populasi anak di suatu wilayah atau negara. Angka prevalensi yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak dalam suatu populasi yang terhambat pertumbuhannya akibat kekurangan gizi atau faktor lingkungan lainnya, seperti sanitasi yang buruk atau penyakit infeksi. Menurunkan prevalensi stunting menjadi fokus penting dalam upaya kesehatan masyarakat karena stunting dapat berdampak jangka panjang terhadap kemampuan kognitif, kesehatan, serta kualitas hidup anak di masa depan.

Tabel 2. 31. Prevalensi Stunting Kota Binjai

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting	Persen	n/a	21,7	18,7	19,4	22,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Binjai

Berdasarkan data di atas, prevalensi stunting di Kota Binjai selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam perumusan kebijakan intervensi gizi dan kesehatan masyarakat. Setelah sempat mengalami penurunan dari 21,7 persen pada tahun 2021 menjadi 18,7 persen pada tahun 2022 dan 19,4 persen pada tahun 2023, prevalensi stunting kembali meningkat signifikan menjadi 22,3 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya tantangan struktural dalam kesinambungan program penanggulangan stunting, baik dari sisi ketersediaan layanan kesehatan, pemenuhan gizi anak, maupun koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, upaya percepatan penurunan stunting di Kota Binjai memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan guna memastikan pemenuhan hak anak atas tumbuh kembang yang optimal serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia secara jangka panjang.

3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Menjelaskan kondisi pendidikan masyarakat Kota Binjai yang memiliki peranan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat.

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan Indikator yang didefiniskan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang dimaksud adalah yang berusia 25 tahun ke atas dimana diasumsikan proses pendidikan seseorang yang telah berumur 25 tahun keatas telah berakhir. Pada kondisi normal rata-

rata lama sekolah di suatu wilayah diasumsikan tidak akan turun. Batas nilainya adalah minimum 0 dan maksimum 15 tahun.

Rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Binjai menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, RLS Kota Binjai tercatat sebesar 10,93 tahun, kemudian naik menjadi 11,20 tahun pada tahun 2024. Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Utara (9,93 tahun) dan nasional (8,85 tahun), yang menunjukkan bahwa masyarakat Kota Binjai cenderung menikmati akses pendidikan lebih lama dibandingkan daerah lain. Capaian ini menggambarkan bahwa penduduk Kota Binjai umumnya telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah atas, mendekati standar 12 tahun pendidikan universal. Tren ini juga konsisten dalam lima tahun terakhir, mencerminkan stabilitas dalam penyediaan dan pemanfaatan layanan pendidikan di daerah tersebut.

Gambar 2. 24. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

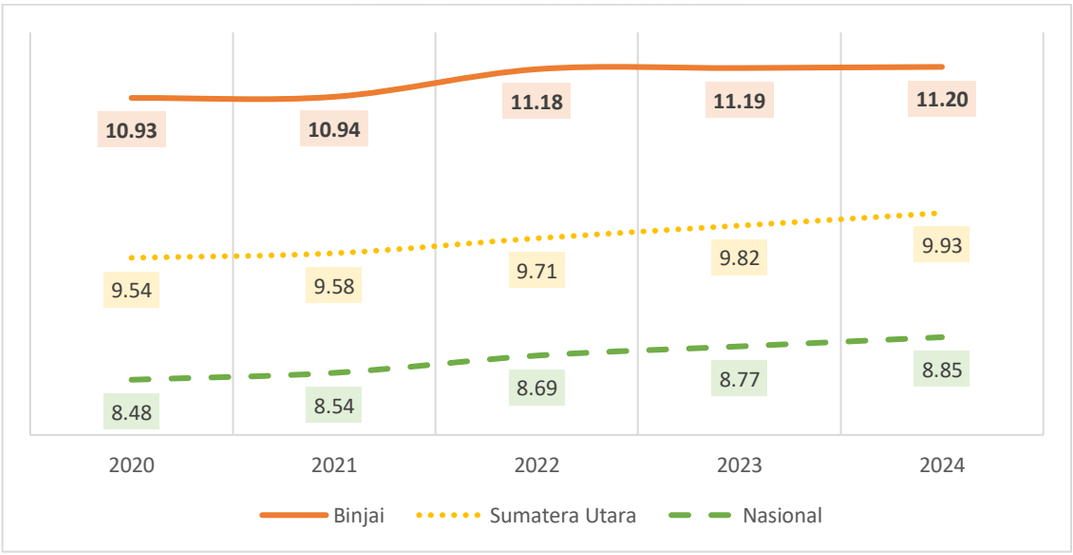

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingginya RLS di Kota Binjai dapat dikaitkan dengan tersedianya infrastruktur pendidikan yang memadai, kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pendidikan inklusif, serta tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Namun, untuk menjaga momentum ini, tantangan yang perlu dihadapi adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengurangi angka putus sekolah, khususnya di tingkat SMA dan pendidikan non-formal. Diperlukan intervensi lanjutan seperti perluasan program beasiswa, pendidikan vokasi, serta pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja agar lama sekolah juga sejalan dengan peningkatan kualitas SDM Kota Binjai.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Binjai pada tahun 2024 tercatat sebesar 11,20 tahun, yang menempatkan Binjai pada peringkat ke-3 tertinggi dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Nilai ini jauh di atas rata-rata provinsi yang berada pada angka 9,93 tahun, serta menunjukkan capaian pendidikan masyarakat Binjai

yang relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar wilayah lainnya di Sumatera Utara. Tingginya RLS Kota Binjai menunjukkan bahwa sebagian besar penduduknya telah menempuh pendidikan hingga jenjang setidaknya tingkat menengah atas (SMA/sederajat). Hal ini menjadi indikator positif dalam pembangunan sumber daya manusia, karena semakin lama seseorang bersekolah, maka semakin besar peluangnya untuk memperoleh keterampilan, akses informasi, serta kesempatan ekonomi yang lebih baik.

Gambar 2. 25. Perbandingan RLS di Sumatera Utara Tahun 2024

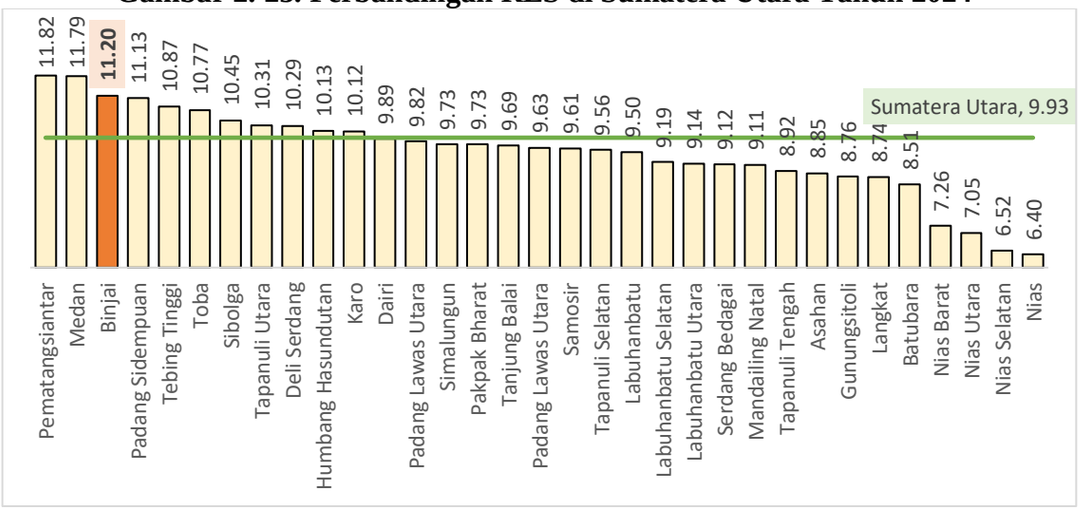

Sumber : Badan Pusat Statistik

Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pendidikan, memperluas akses sekolah, serta membangun kesadaran pentingnya pendidikan di tengah masyarakat. Namun demikian, tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas pendidikan sejalan dengan kuantitas. Pemerintah perlu fokus pada peningkatan mutu guru, kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan zaman, serta penyediaan program vokasi atau pelatihan kerja lanjutan, agar output pendidikan dapat memberi dampak langsung pada peningkatan daya saing tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat Kota Binjai.

Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan indikator penghitungan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka ini menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mendapatkan pendidikan formal pada waktu tertentu.

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Binjai pada tahun 2024 tercatat sebesar 14,18 tahun, menempatkannya di peringkat ke-4 tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Nilai ini juga jauh melampaui rata-rata provinsi yang hanya sebesar 13,49 tahun, yang menandakan bahwa anak-anak di Kota Binjai secara rata-rata memiliki potensi untuk menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Capaian

HLS ini menunjukkan komitmen tinggi Kota Binjai dalam membangun masa depan generasi mudanya melalui peningkatan akses dan harapan terhadap pendidikan jangka panjang. Nilai ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anak usia sekolah di Binjai memiliki peluang besar untuk melanjutkan pendidikan hingga tingkat universitas atau diploma, yang merupakan indikator positif dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Gambar 2. 26. Perkembangan dan Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Binjai

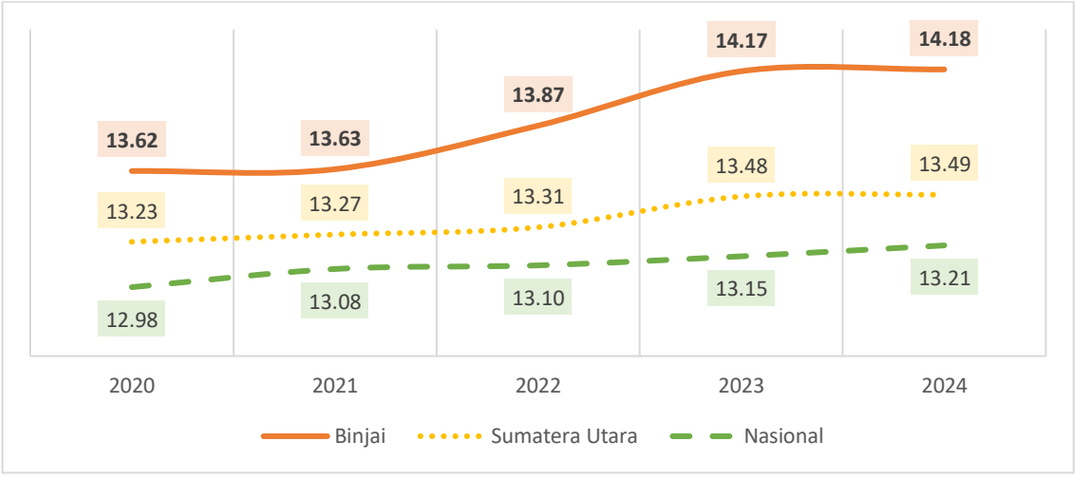

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tingginya angka HLS Kota Binjai dapat dikaitkan dengan berbagai faktor seperti ketersediaan sekolah menengah dan tinggi, dukungan program pendidikan dari pemerintah daerah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi. Meski demikian, tantangan ke depan adalah menjamin akses yang merata dan kualitas pendidikan lanjutan, terutama bagi kelompok masyarakat ekonomi lemah. Dibutuhkan kebijakan afirmatif seperti beasiswa, pengembangan sekolah vokasi, dan kemitraan dengan perguruan tinggi untuk memastikan bahwa harapan bersekolah lebih lama benar-benar dapat terealisasi menjadi capaian nyata.

Gambar 2. 27. Perbandingan HLS di Sumatera Utara Tahun 2024

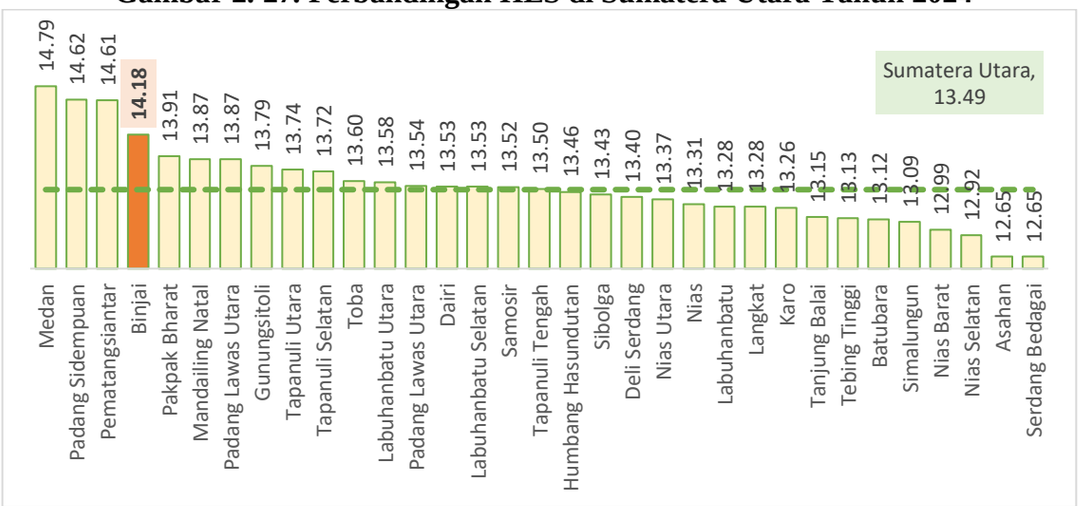

Sumber : Badan Pusat Statistik

Angka Literasi dan Numerasi

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Kemampuan Literasi Kota Binjai untuk jenjang pendidikan SD/sederajat tahun 2023 relatif masih belum baik karena 43,1 persen capaian kemampuan literasi pada kategori sedang dan hanya 34,3 persen capaian kemampuan literasi pada kategori baik dengan masih adanya sekitar 20,6 persen capaian kemampuan literasi pada kategori kurang. Pertumbuhan kemampuan literasi Kota Binjai untuk jenjang pendidikan SD/sederajat tahun 2023 cukup baik, dimana 52,4 persen menunjukkan adanya kenaikan kemampuan literasi dan 47,6 persen menyatakan adanya penurunan kemampuan literasi.

Gambar 2. 28. Kemampuan Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan SD/Sederajat Kota Binjai Tahun 2023

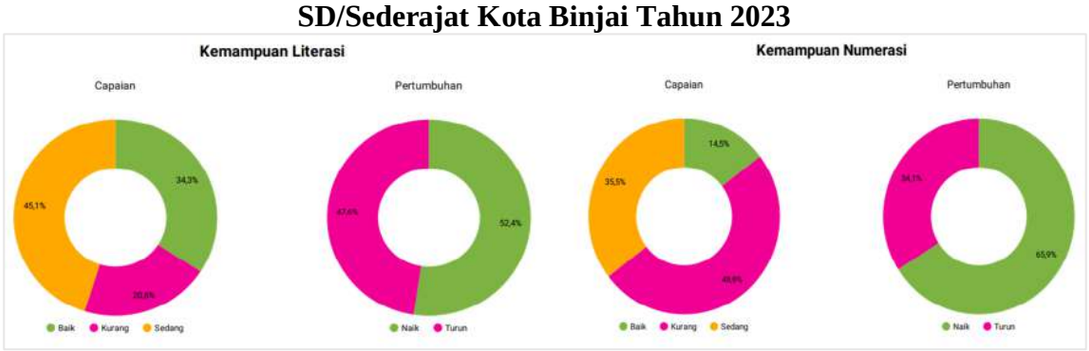

Sumber : BPMP Sumatera Utara

Kemampuan Numerasi Kota Binjai untuk jenjang pendidikan SD/sederajat tahun 2023 relatif masih kurang baik karena 49,9 persen capaian kemampuan numerasi pada kategori kurang dan hanya 14,5 persen capaian kemampuan numerasi pada kategori baik dengan masih adanya sekitar 35,5 persen capaian kemampuan numerasi pada kategori sedang. Pertumbuhan kemampuan numerasi Kota Binjai untuk jenjang pendidikan SD/sederajat tahun 2023 cukup baik, dimana 65,9 persen menunjukkan adanya kenaikan kemampuan numerasi dan 34,1 persen menyatakan adanya penurunan kemampuan numerasi.

Gambar 2. 29. Kemampuan Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat Kota Binjai Tahun 2023

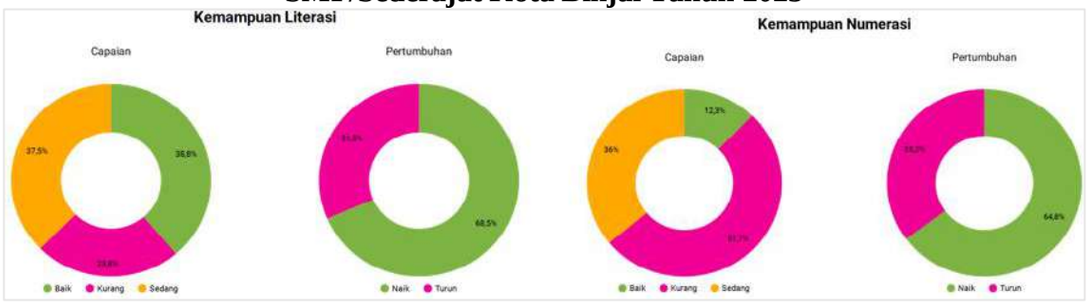

Sumber : BPMP Sumatera Utara

Kemampuan Literasi Kota Binjai untuk jenjang pendidikan SMP/sederajat tahun 2023 relatif masih belum baik karena hanya 38,8 persen capaian kemampuan literasi pada kategori baik dan terdapat 37,5 persen capaian kemampuan literasi pada kategori sedang dengan masih adanya sekitar 23,8 persen capaian kemampuan literasi pada kategori kurang. Pertumbuhan kemampuan literasi Kota Binjai untuk jenjang pendidikan SMP/sederajat tahun 2023 cukup baik, dimana 68,5 persen menunjukkan adanya kenaikan kemampuan literasi dan 31,5 persen menyatakan adanya penurunan kemampuan literasi.

Kemampuan Numerasi Kota Binjai untuk jenjang pendidikan SMP/sederajat tahun 2023 masih kurang baik karena 51,7 persen capaian kemampuan numerasi pada kategori kurang dan hanya 12,3 persen capaian kemampuan numerasi pada kategori baik dengan masih adanya sekitar 36 persen capaian kemampuan numerasi pada kategori sedang. Pertumbuhan kemampuan numerasi Kota Binjai untuk jenjang pendidikan SMP/sederajat tahun 2023 cukup baik, dimana 64,8 persen menunjukkan adanya kenaikan kemampuan numerasi dan 35,2 persen menyatakan adanya penurunan kemampuan numerasi.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Binjai mengalami penurunan tajam dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, indeks ini berada pada angka yang sangat tinggi yaitu 88,34, namun kemudian turun drastis menjadi 57,25 pada 2023 dan kembali turun menjadi 49,90 pada 2024. Penurunan ini membuat capaian Kota Binjai jatuh di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara (62,39) dan nasional (73,52) pada tahun 2024, setelah sebelumnya unggul jauh di atas keduanya.

Gambar 2. 30. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Binjai, Sumatera Utara dan Nasional

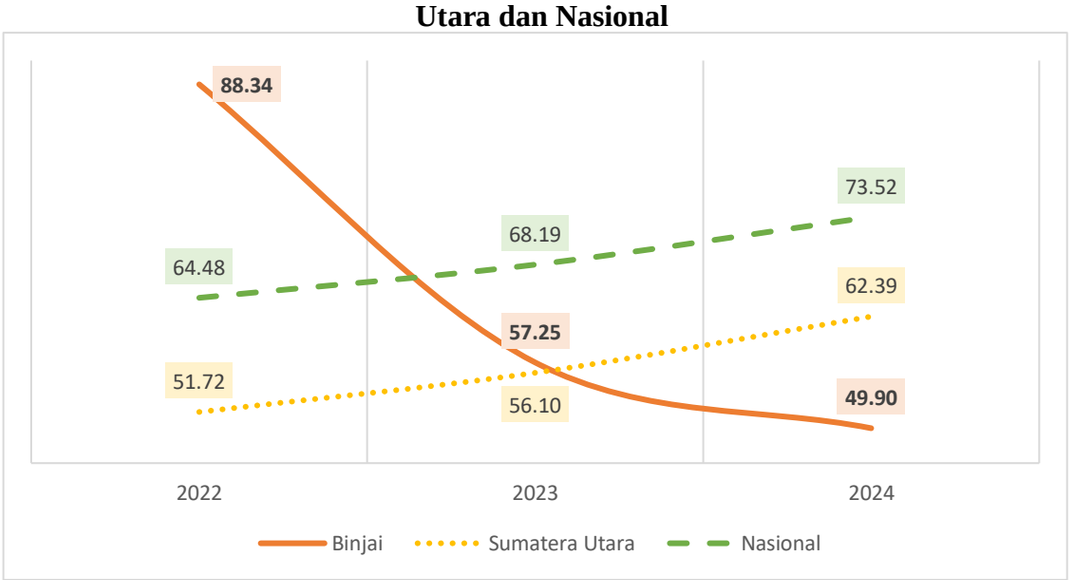

Sumber : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Tren ini menunjukkan kemunduran signifikan dalam pengembangan literasi masyarakat di Kota Binjai. Penurunan hampir 40 poin dalam dua tahun menandakan adanya perubahan besar dalam dinamika akses, partisipasi, atau kualitas layanan literasi, seperti perpustakaan, kegiatan membaca masyarakat, atau infrastruktur pendukung lainnya. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berkurangnya program literasi berbasis komunitas, kurang optimalnya pemanfaatan perpustakaan umum dan sekolah, minimnya kampanye budaya baca, atau lemahnya koordinasi antar lembaga pendidikan dan kebudayaan. Hal ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan literasi yang ada. Diperlukan langkah strategis seperti revitalisasi perpustakaan, digitalisasi literasi, penguatan peran komunitas baca, serta sinergi antara sekolah dan masyarakat agar literasi kembali menjadi kekuatan pembangunan SDM di Kota Binjai.

Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemampuan individu atau kelompok dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan aman. Literasi digital mencakup pemahaman dan keterampilan dalam mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi yang tersedia di dunia digital, serta kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara daring. Selain itu, literasi digital juga mencakup pemahaman tentang aspek keamanan dan etika dalam beraktivitas di dunia maya, seperti perlindungan data pribadi, menghindari penipuan online, serta mengelola dampak negatif dari penggunaan teknologi. Indeks ini penting untuk melihat seberapa siap suatu masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat dan menggunakannya untuk meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, serta partisipasi dalam berbagai bidang, seperti ekonomi dan sosial. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, indeks literasi digital menjadi indikator penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dan memanfaatkan dunia digital secara optimal.

4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Menjelaskan kondisi perlindungan sosial warga Kota Binjai yang menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua warga Kota Binjai memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik.

Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah program yang dirancang untuk memberikan perlindungan sosial kepada tenaga kerja melalui berbagai bentuk jaminan, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Program ini bertujuan untuk memberikan keamanan finansial dan perlindungan terhadap risiko sosial yang dihadapi oleh pekerja, baik yang bekerja di sektor formal

maupun informal. Di Indonesia, program ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang memberikan layanan kepada pekerja untuk mengurangi dampak dari kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, atau masa pensiun yang tidak terjamin. Kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja penting untuk memastikan bahwa pekerja memiliki akses ke manfaat kesehatan dan keuangan di masa depan, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Program ini diwajibkan bagi perusahaan dan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya, serta memberikan kontribusi iuran secara teratur. Meskipun sudah banyak pekerja yang terdaftar dalam program ini, kesadaran tentang pentingnya kepesertaan jaminan sosial masih perlu ditingkatkan, terutama di sektor informal dan pekerja dengan status kontrak.

5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Menjelaskan kondisi penguatan peran agama sebagai landasan spritual, etika, moral dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jadi diri bangsa yang meresap pada warga Kota Binjai.

Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat harmoni dan toleransi antar umat beragama di suatu wilayah. Indeks ini biasanya dihitung berdasarkan beberapa indikator utama seperti toleransi, kerja sama antar umat beragama, dan kesetaraan dalam menjalankan ibadah serta hak-hak keagamaan.

Tingkat kerukunan umat beragama di Kota Binjai hingga tahun 2024 menunjukkan kondisi yang stabil dan kondusif, sebagaimana tercermin dalam berbagai aktivitas lintas iman yang difasilitasi secara aktif oleh Pemerintah Kota bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Keharmonisan antarumat beragama terjaga melalui penyelenggaraan dialog antaragama, perayaan hari besar keagamaan lintas umat, serta dukungan kelembagaan terhadap penguatan nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan. Pemerintah Kota Binjai juga terus memperkuat peran kelembagaan FKUB melalui regulasi dan pembinaan berkelanjutan, guna mendorong terciptanya hubungan sosial yang inklusif, adil, dan saling menghormati antar pemeluk agama. Upaya ini menjadi bagian integral dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kohesi masyarakat sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadaban.

Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana perkembangan kebudayaan di suatu wilayah atau negara. Indeks ini mengukur aspek-aspek kebudayaan yang mencakup pelestarian warisan budaya, penguatan identitas budaya, serta akses dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan. IPK sering kali digunakan untuk menggambarkan kualitas dan keberlanjutan

kebudayaan dalam sebuah masyarakat, yang meliputi berbagai dimensi seperti seni, literasi, tradisi, pendidikan budaya, serta penggunaan media dan teknologi untuk mendukung ekspresi budaya. Pembangunan kebudayaan yang dimaksud tidak hanya berfokus pada pelestarian, tetapi juga pada upaya untuk memfasilitasi perkembangan dan adaptasi kebudayaan terhadap perubahan zaman, tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. IPK penting untuk mengukur keberhasilan kebijakan kebudayaan pemerintah dan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan mereka.

Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat di Indonesia. Indeks ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan perekonomian nasional. Zakat sebagai salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam, memiliki potensi yang sangat besar untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mempercepat pemerataan kesejahteraan. Dengan adanya IZN, diharapkan dapat tercipta pemetaan yang lebih jelas mengenai sejauh mana zakat telah dikelola dan didistribusikan secara efektif, serta sejauh mana masyarakat telah memanfaatkannya dalam membantu sesama. Selain itu, IZN juga menjadi alat evaluasi dalam upaya memperbaiki sistem manajemen zakat, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 2. 32. Indeks Zakat Nasional Kota Binjai

Indikator	Satuan	Estimate Growth	Baseline	
			2024	Interpretasi
Indeks Zakat Nasional	Poin	0,02	0,47	Stable/Stabil

Sumber : Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara

Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur perkembangan dan kontribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di suatu daerah. Di Kota Binjai, hasil pengukuran IZN menunjukkan adanya capaian yang relatif stabil dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari nilai *estimate growth* sebesar **0,02** dan nilai *baseline* tahun 2024 sebesar **0,47**, yang oleh Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dikategorikan sebagai kondisi **stabil**. Dengan kata lain, peran zakat di Binjai sudah memiliki fondasi yang cukup baik meskipun peningkatannya masih terbilang moderat.

Stabilitas Indeks Zakat Nasional di Kota Binjai mengindikasikan bahwa pengelolaan zakat telah berjalan dengan cukup efektif, meskipun ruang untuk peningkatan tetap terbuka. Stabilitas ini dapat mencerminkan beberapa faktor, antara lain kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat yang relatif konsisten, adanya lembaga zakat yang berperan aktif, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung program

zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi syariah. Meski begitu, pertumbuhan yang rendah juga menandakan perlunya inovasi dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat agar manfaatnya lebih terasa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan capaian tersebut, tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan kontribusi zakat agar tidak hanya stabil, tetapi juga tumbuh secara signifikan. Upaya yang dapat dilakukan mencakup penguatan literasi zakat di masyarakat, digitalisasi sistem penghimpunan zakat, serta kolaborasi antara Badan Amil Zakat dengan berbagai sektor, termasuk dunia usaha dan lembaga pendidikan. Jika strategi ini dapat dijalankan dengan baik, maka diharapkan nilai Indeks Zakat Nasional Kota Binjai tidak hanya bertahan pada kondisi stabil, tetapi juga mengalami peningkatan yang mampu memberi dampak lebih besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan umat.

6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Menjelaskan kondisi tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga dan masyarakat Kota Binjai yang bertujuan untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia Kota Binjai yang berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan.

Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah Indikator yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak. IPA disusun berdasarkan 5 klaster hak anak, yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan perlindungan khusus. IPA terdiri dari 27 indikator yang mewakili 5 klaster KHA, yaitu: Klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan); Klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif); Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan); Klaster IV (Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang); dan Klaster V (Perlindungan Khusus). Penghitungan IPA dilakukan dengan tahapan proses seleksi indikator, normalisasi, penentuan bobot, tiap kluster dan tahapan penghitungan indeks, baik untuk setiap klaster maupun keseluruhannya.

Gambar 2. 31. Indeks Perlindungan Anak Kota Binjai, Sumatera Utara dan Nasional

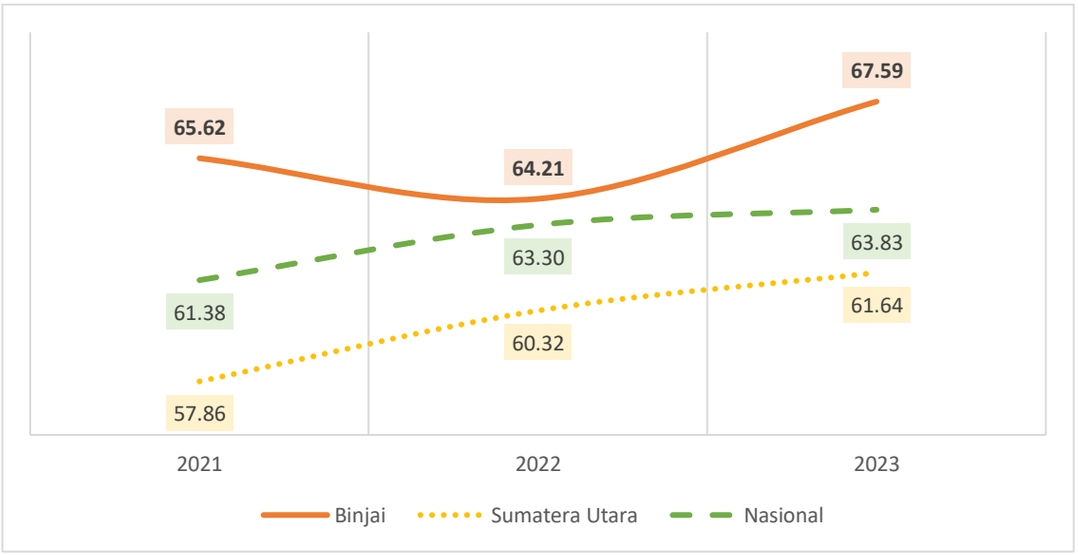

Sumber : siga.kemenpppa.go.id

Indeks Perlindungan Anak Kota Binjai menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, nilai indeks perlindungan anak di Binjai tercatat sebesar 57,86, kemudian meningkat menjadi 64,21 pada tahun 2022, dan mencapai 67,59 pada tahun 2023. Capaian ini menunjukkan kemajuan yang pesat dalam meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak di Kota Binjai. Peningkatan yang stabil ini mencerminkan upaya yang efektif dalam memperkuat kebijakan dan program perlindungan anak di tingkat daerah, termasuk upaya penurunan kekerasan terhadap anak, pemberian akses pendidikan yang layak, serta peningkatan perhatian terhadap hak-hak anak. Meskipun ada lonjakan yang jelas dalam indikator ini, capaian Binjai masih sedikit di bawah rata-rata nasional (61,64) dan Provinsi Sumatera Utara (63,83) pada tahun 2023, tetapi posisi ini menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Peningkatan ini bisa dikaitkan dengan kebijakan daerah yang lebih proaktif dalam melindungi anak melalui berbagai program, seperti layanan kesehatan anak, edukasi tentang hak anak, penguatan lembaga perlindungan anak, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemantauan hak anak. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa kebijakan ini dapat menjangkau seluruh kelompok anak, terutama yang berada di wilayah marginal, serta memastikan keberlanjutan dari program-program perlindungan anak ini dalam menghadapi berbagai tantangan sosial.

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan dan kualitas kehidupan suatu keluarga berdasarkan berbagai aspek. Indeks ini mencakup beberapa dimensi penting, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, serta peran keluarga dalam pembangunan sosial dan budaya. IPKK bertujuan untuk menggambarkan seberapa baik kondisi kehidupan keluarga dalam mencapai standar kualitas hidup yang optimal. Misalnya, aspek kesehatan yang meliputi akses terhadap layanan kesehatan, status gizi, dan perawatan kesehatan

keluarga; aspek pendidikan yang mencakup tingkat partisipasi anak-anak dalam pendidikan; serta aspek ekonomi yang berfokus pada pendapatan keluarga dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, IPKK juga mencakup dimensi sosial, seperti hubungan keluarga yang harmonis dan partisipasi keluarga dalam kegiatan masyarakat. Dengan menggunakan IPKK, pemerintah atau lembaga terkait dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta memantau perubahan dan kemajuan dalam kualitas hidup keluarga dari waktu ke waktu.

Indeks Kualitas Keluarga atau IKK merupakan indikator dalam mengukur peningkatan Kualitas Keluarga yang dapat digunakan sebagai tolak ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Hasil capaian IKK juga dapat digunakan untuk menemukenali permasalahan Kualitas Keluarga dan mengarahkan pada intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Salah satu indikator proksi untuk mengukur capaian kualitas keluarga antara lain dengan menggunakan indeks pembangunan keluarga (IBANGGA). Indeks ini terdiri dari tiga komponen pembentuk, yaitu indeks ketenteraman, kemandirian, dan indeks kebahagiaan.

Tabel 2. 33. Indeks Pembangunan Keluarga Kota Binjai

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	n.a. (berdasrkan Pk21 dan dimulai pendataan di tahun 2022)		60,68	63,35	63.31:63.8

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kota Binjai mulai diukur sejak tahun 2022, seiring dengan implementasi kebijakan nasional Pembangunan Keluarga berbasis data. Nilai awal indeks tercatat 60,68 pada 2022, kemudian mengalami peningkatan menjadi 63,35 pada 2023, namun sedikit menurun menjadi 63,31 pada 2024. Indeks ini mengukur kualitas pembangunan keluarga dari tiga dimensi utama: ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Peningkatan dari 2022 ke 2023 menunjukkan bahwa terdapat perbaikan dalam aspek-aspek tersebut, baik dari sisi kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan keluarga, maupun keterlibatan sosial. Namun, stagnasi bahkan penurunan kecil pada 2024 mencerminkan adanya tantangan atau perlambatan dalam efektivitas intervensi program-program yang mendukung penguatan keluarga.

Nilai indeks yang berada di kisaran 60–63 menandakan bahwa kualitas pembangunan keluarga di Kota Binjai berada pada kategori sedang, sehingga masih terdapat ruang besar untuk ditingkatkan. Penurunan tipis pada 2024 juga bisa menjadi sinyal bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi pembangunan keluarga,

khususnya dalam mengintegrasikan layanan lintas sektor (kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi) secara lebih efektif dan terarah kepada rumah tangga yang rentan. Kota Binjai telah memulai langkah positif dalam pengukuran dan pemantauan pembangunan keluarga melalui iBangga, dengan tren awal yang cukup baik. Untuk meningkatkan skor secara berkelanjutan, diperlukan intervensi yang lebih holistik, partisipatif, dan berbasis data, agar program pembangunan keluarga tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi benar-benar memperkuat ketahanan dan kualitas kehidupan keluarga secara menyeluruh.

Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender mencerminkan secara komposit pencapaian perempuan pada aspek kesehatan dan pendidikan, ekonomi, dan keterlibatan dalam parlemen. Indeks Ketimpangan Gender Kota Binjai cenderung membaik dari 0,386 poin menjadi 0,142 poin dalam kurun waktu 2019-2023. Jika dilihat mulai dari tahun 2021, maka indeks ketimpangan gender Kota Binjai ini sebenarnya mengalami peningkatan 0,08 poin menjadi 0,278 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antar gender secara umum di Kota Binjai berfluktuasi. Ketimpangan Gender Kota Binjai lebih baik kesenjangannya dibandingkan dengan pencapaian Sumatera Utara maupun Nasional.

Gambar 2. 32. Indeks Ketimpangan Gender Kota Binjai, Sumatera Utara dan Nasional

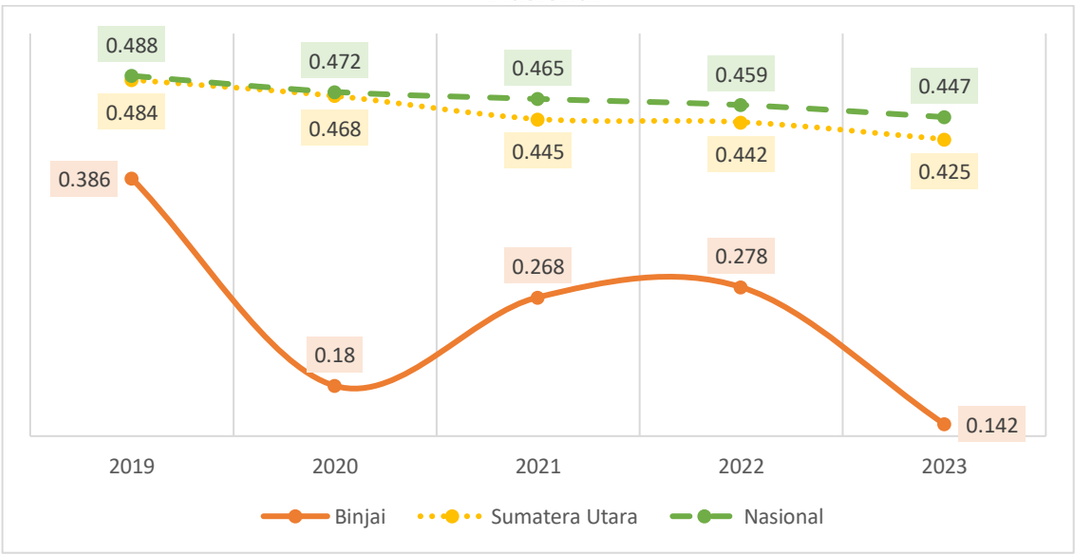

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan perbandingan antara IPM penduduk berjenis kelamin permepuan dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Indeks Pembangunan Gender Kota Binjai menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Binjai tercatat sebesar 90,84, yang kemudian meningkat secara bertahap menjadi 91,85 pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan gender di Kota Binjai

terus mengalami perbaikan, dengan perhatian yang semakin besar terhadap kesetaraan dan pemberdayaan perempuan serta pengurangan kesenjangan gender.

Meskipun terdapat peningkatan yang stabil dalam Indeks Pembangunan Gender, posisi Binjai masih berada di bawah rata-rata nasional yang tercatat sebesar 92,00 pada tahun 2024. Sementara itu, Provinsi Sumatera Utara juga menunjukkan angka yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Binjai, yaitu 91,42 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kota Binjai telah memperlihatkan kemajuan dalam menciptakan kesetaraan gender, masih ada ruang untuk perbaikan agar dapat mengejar ketertinggalan dari rata-rata nasional dan provinsi. Peningkatan Indeks Pembangunan Gender ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh program-program yang mengedepankan pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan keterampilan, akses ke pendidikan, serta pemberian kesempatan kerja yang lebih luas. Namun, untuk memastikan bahwa kesetaraan gender tercapai secara lebih merata, penting bagi pemerintah Kota Binjai untuk terus mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif, memperkuat pengawasan terhadap kesenjangan gender di berbagai sektor, dan memastikan adanya peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan publik serta ekonomi.

Gambar 2. 33. Indeks Pembangunan Gender Kota Binjai, Sumatera Utara dan Nasional

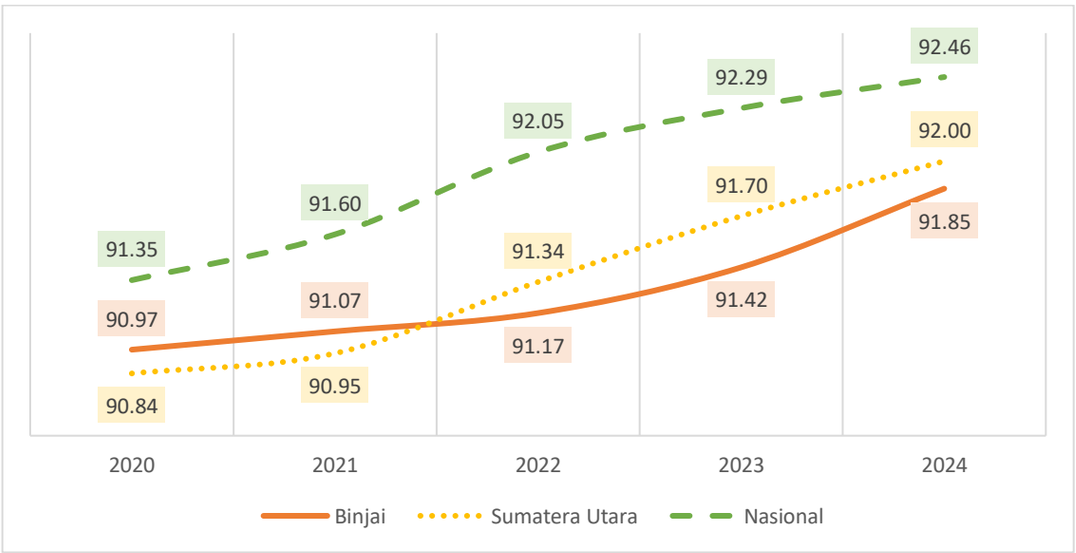

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mencerminkan seberapa besar keterlibatan perempuan dalam pembangunan suatu daerah. Indeks ini mengukur partisipasi wanita dalam parlemen dan ekonomi. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Binjai menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, nilai indeks pemberdayaan gender di Binjai tercatat sebesar 70,26, yang kemudian meningkat menjadi 75,24 pada tahun 2020. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 68,32, indeks kembali mengalami peningkatan dan mencapai 70,65 pada tahun 2022, serta 70,54

pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang terus-menerus untuk memperkuat peran serta perempuan dalam berbagai sektor, baik dalam pendidikan, ekonomi, maupun dalam pengambilan keputusan.

Meskipun terdapat fluktuasi pada tahun 2021, secara keseluruhan, Indeks Pemberdayaan Gender Kota Binjai berada pada angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Utara dan sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional pada tahun 2023. Pada tahun tersebut, rata-rata indeks pemberdayaan gender di Sumatera Utara tercatat sebesar 69,33, sementara di tingkat nasional tercatat sebesar 76,9. Fluktuasi yang terjadi pada tahun 2021 mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal atau kebijakan yang bersifat sementara. Namun, secara umum, tren positif ini menunjukkan bahwa Kota Binjai telah berhasil memperkenalkan dan mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan gender yang lebih inklusif, dengan fokus pada penguatan peran perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa pemberdayaan gender tidak hanya meningkat secara angka, tetapi juga diikuti dengan perubahan struktural dan sosial yang mendalam, agar kesetaraan gender lebih terwujud dalam berbagai aspek kehidupan di kota ini.

Gambar 2. 34. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Binjai, Sumatera Utara dan Nasional

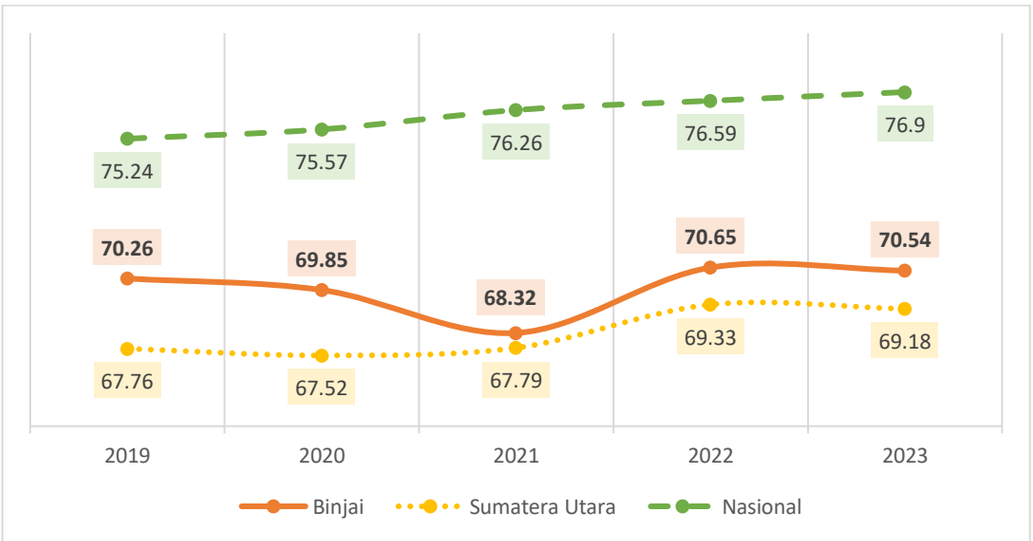

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kondisi pemuda dalam suatu negara atau daerah mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. IPP mengukur aspek-aspek penting dalam kehidupan pemuda, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, partisipasi sosial, serta keterlibatan dalam kegiatan politik dan kebudayaan. Tujuan utama dari IPP adalah untuk memberikan gambaran tentang kualitas hidup pemuda dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Dalam mengukur IPP, biasanya dilihat dari

tingkat pendidikan yang dicapai oleh pemuda, akses terhadap pekerjaan yang layak, keterampilan dan pelatihan yang diperoleh, serta tingkat partisipasi mereka dalam masyarakat, baik dalam hal kegiatan sosial maupun kegiatan politik. Selain itu, kesehatan mental dan fisik pemuda juga menjadi bagian penting dalam penilaian IPP. Indeks ini membantu pemerintah dan lembaga terkait untuk merancang kebijakan yang mendukung pemberdayaan pemuda, sehingga mereka dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan dan mencapai potensi maksimal mereka.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif.

Gambar 2. 35. Perbandingan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Binjai, Sumatera Utara dan Nasional

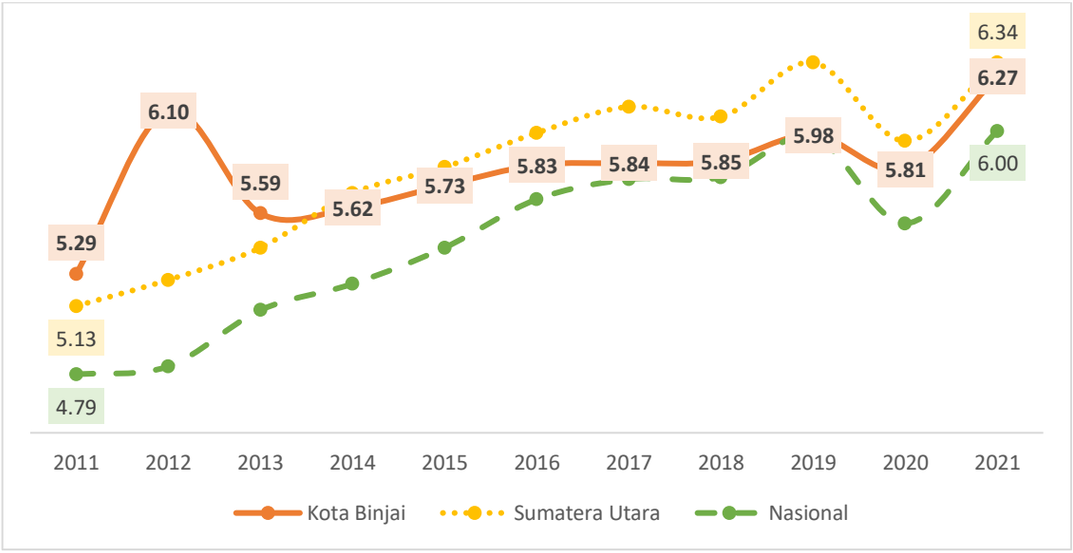

Sumber : inklusif.bappenas.go.id

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Binjai dari tahun 2011 hingga tahun 2021 secara umum menunjukkan peningkatan dari 5,29 poin menjadi 6,27 poin. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Binjai selalu lebih baik dibandingkan pencapaian Nasional, sedangkan jika dibandingkan dengan pencapaian Sumatera Utara maka indeks pembangunan ekonomi inklusif Kota Binjai lebih rendah sejak tahun 2014.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing Kota Binjai menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana kota ini dapat beradaptasi dan berkembang di tengah dinamika global yang terus berubah. Daya saing Binjai mencakup berbagai dimensi, dimulai dari kualitas sumber daya manusia yang menjadi dasar utama dalam pembangunan daerah. Selain itu, penerapan teknologi, inovasi, dan peningkatan produktivitas ekonomi yang mendukung pertumbuhan menjadi kunci utama. Implementasi ekonomi hijau dan biru juga menjadi fokus untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, sementara transformasi digital membuka peluang baru di berbagai sektor di Kota Binjai. Integrasi ekonomi domestik dan global semakin memperkuat posisi Binjai dalam percaturan ekonomi nasional dan internasional. Sebagai kota yang berkembang, Binjai juga berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kualitas hidup warganya. Tak kalah penting, stabilitas ekonomi makro Kota Binjai menjadi landasan yang memberikan rasa aman bagi pelaku ekonomi untuk berinvestasi dan berproduksi. Keberhasilan dalam mengoptimalkan seluruh aspek ini akan meningkatkan daya saing Kota Binjai, menjadikannya lebih tangguh dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) di Kota Binjai sangat dipengaruhi oleh angka ketergantungan dan produktivitas tenaga kerja. Angka ketergantungan di Kota Binjai mencerminkan rasio antara penduduk yang tidak bekerja dengan tenaga kerja aktif, di mana semakin rendah angka ketergantungan, semakin besar potensi tenaga kerja produktif yang tersedia. Sementara itu, produktivitas tenaga kerja menggambarkan efisiensi dan kontribusi tenaga kerja dalam perekonomian daerah, yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, keterampilan, teknologi, serta kualitas lingkungan kerja. Oleh karena itu, meningkatkan produktivitas SDM dan menurunkan angka ketergantungan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing Kota Binjai, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (depencency ratio) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 – 64 tahun). Semakin tingginya prosentase Dependency Ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus di tanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif.

Tabel 2. 34. Dependency Ratio Kota Binjai

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	279.302	295.361	300.009	303.272	240.093
Rasio Ketergantungan Penduduk	**46,03**	**46,39**	**46,68**	**46,94**	**46,94**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Bonus demografi yang sedang berlangsung di satu sisi dapat menjadi peluang perekonomian dalam menghasilkan nilai tambah yang lebih berlipat akibat suplai dari penduduk usia produktif yang lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktifnya. Namun jika penduduk usia produktif ini banyak tidak terakomodir di dalam dunia kerja dan dunia usaha, maka sebaliknya, yang terjadi adalah ancaman pembangunan, yang ditandai dengan meningkatnya pengangguran. Tabel di atas menginformasikan rasio ketergantungan penduduk (dependency ratio) Kota Binjai yang cukup rendah, yaitu berada di rentang 46-47 per 100 penduduk usia produktifnya. Angka ini mengisyaratkan bahwa 100 penduduk usia produktif menanggung sekitsar 46-47 penduduk usia non produktif.

Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Binjai merupakan indikator penting yang mencerminkan efisiensi dan kontribusi tenaga kerja terhadap perekonomian daerah. Produktivitas ini dihitung dengan membandingkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kota Binjai. Perhitungan ini memberikan gambaran tentang seberapa besar kontribusi setiap tenaga kerja yang aktif dalam menghasilkan barang dan jasa, serta tingkat efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia. Dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dan meningkatkan daya saing Kota Binjai di tingkat regional maupun nasional.

Perkembangan produktivitas tenaga kerja Kota Binjai menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, produktivitas tenaga kerja tercatat sebesar Rp92,41 juta per tenaga kerja/tahun, yang kemudian meningkat menjadi Rp98,04 juta pada tahun 2021. Pada tahun 2022, angka ini mengalami lonjakan lebih besar menjadi Rp110,10 juta, meskipun sedikit menurun menjadi Rp108,86 juta pada tahun 2023, sebelum akhirnya kembali meningkat menjadi Rp112,15 juta pada tahun 2024.

Gambar 2. 36. Perkembangan Produktivitas Tenaga Kerja Kota Binjai

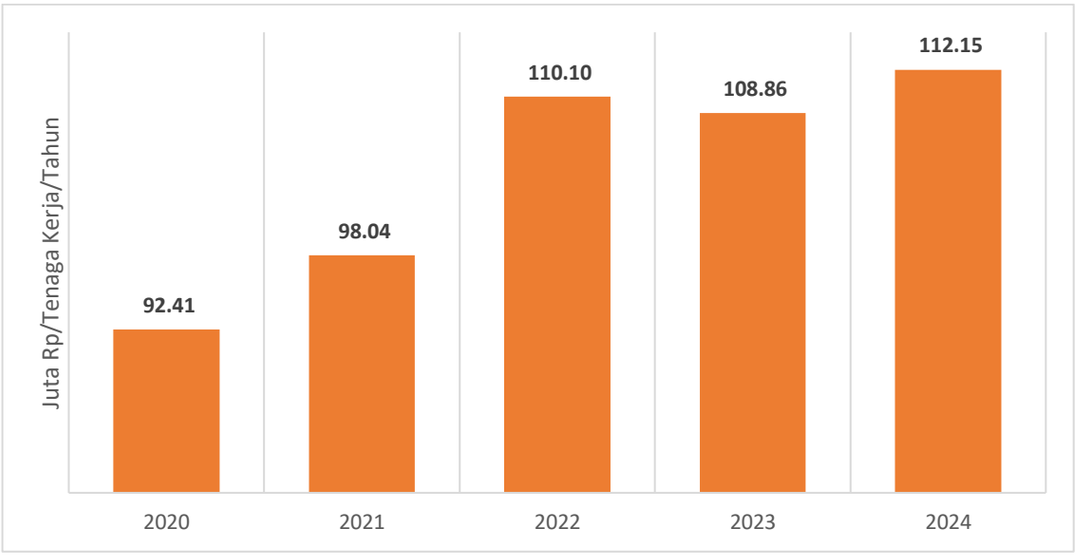

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Angka ini menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja di Kota Binjai mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, mencerminkan efisiensi yang semakin tinggi dalam kontribusi tenaga kerja terhadap perekonomian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam kualitas dan kemampuan tenaga kerja, baik dari sisi pendidikan, keterampilan, maupun penggunaan teknologi yang mendukung peningkatan hasil produksi. Peningkatan produktivitas ini kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perkembangan sektor industri dan perdagangan, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, serta pemanfaatan teknologi yang lebih efisien. Walaupun ada penurunan kecil pada tahun 2023, secara keseluruhan, tren ini mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja di Kota Binjai. Untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas ini, pemerintah daerah perlu terus mendorong kebijakan yang mendukung peningkatan keterampilan, akses teknologi, serta pembukaan lapangan kerja yang berkualitas di sektor-sektor produktif.

2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Menjelaskan pemanfaatan Iptek dan Inovasi untuk menciptakan dorongan untuk peningkatan produktivitas ekonomi daerah yang berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Rasio PDRB Industri Pengolahan

PDRB lapangan usaha industri pengolahan merujuk pada kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Binjai. Sektor ini mencakup berbagai kegiatan yang mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi, seperti industri manufaktur, tekstil, makanan dan minuman, serta elektronik. Industri pengolahan memiliki peran penting dalam perekonomian karena dapat menciptakan nilai tambah, meningkatkan ekspor, serta menyediakan lapangan kerja. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB menggambarkan sejauh mana industri pengolahan

berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saingnya di pasar domestik maupun global.

Tabel 2. 35. PDRB Sektor Industri Pengolahan Kota Binjai

Industri Pengolahan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB	Milyar Rp	1.308,75	1.410,69	1.546,55	1.659,02	1.787,73
PDRB ADHK	Milyar Rp	848,67	868,99	893,79	922,88	954,30
Pertumbuhan	Persen	-3,18	2,39	2,85	3,26	3,40
Rasio	Persen	11,12	11,45	11,61	11,47	11,47

Sumber : Badan Pusat Statistik

PDRB Sektor Industri Pengolahan Kota Binjai menunjukkan tren positif dalam hal Harga Berlaku (ADHB) maupun Harga Konstan (ADHK). Pada tahun 2020, PDRB sektor industri pengolahan Kota Binjai tercatat sebesar Rp1.308,75 milyar (ADHB) dan Rp848,67 milyar (ADHK), dengan pertumbuhan negatif sebesar -3,18%. Namun, pada tahun 2021, PDRB sektor ini menunjukkan pemulihan, dengan PDRB ADHB mencapai Rp1.410,69 milyar dan ADHK Rp868,99 milyar, serta pertumbuhan positif sebesar 2,39%. Di tahun-tahun berikutnya, sektor industri pengolahan terus mengalami pertumbuhan yang stabil. Pada 2024, PDRB sektor ini diperkirakan akan mencapai Rp1.787,73 milyar (ADHB) dan Rp954,30 milyar (ADHK), dengan tingkat pertumbuhan 3,40%.

PDRB sektor industri pengolahan di Kota Binjai mengalami peningkatan yang signifikan, mencerminkan pemulihan ekonomi setelah penurunan pada 2020 akibat pandemi, serta adanya peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam sektor ini. Rasio sektor industri pengolahan terhadap total PDRB Kota Binjai juga menunjukkan konsistensi yang stabil, berada di kisaran 11% dari tahun 2020 hingga 2024, menunjukkan peranan sektor industri yang penting dalam perekonomian daerah.

Pertumbuhan sektor ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti peningkatan investasi di sektor manufaktur, pemanfaatan teknologi yang lebih efisien, dan peningkatan permintaan pasar. Selain itu, kebijakan yang mendukung industri lokal, pengembangan UMKM, serta kebijakan stimulus ekonomi dapat berperan penting dalam mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan. Namun, untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, Kota Binjai perlu meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat infrastruktur, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan agar sektor ini tetap menjadi pendorong utama perekonomian daerah.

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

PDRB Akomodasi, Makan, dan Minum merujuk pada kontribusi sektor yang meliputi jasa penginapan, restoran, kafe, dan layanan makanan serta minuman terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Binjai. Sektor ini sangat penting karena mencerminkan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan konsumsi

masyarakat. Industri akomodasi seperti hotel, penginapan, serta sektor makanan dan minuman seperti restoran dan warung makan berperan dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh wisatawan dan masyarakat lokal. Peningkatan PDRB sektor ini sering kali berhubungan dengan meningkatnya jumlah wisatawan, daya beli masyarakat, serta perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, sektor ini juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong sektor-sektor terkait lainnya, seperti pertanian dan perdagangan. Oleh karena itu, kontribusi PDRB dari akomodasi, makan, dan minum menjadi indikator penting dalam mengukur dinamika ekonomi di Kota Binjai.

PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Kota Binjai menunjukkan tren pemulihan yang signifikan setelah penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2020, sektor ini mencatatkan PDRB sebesar Rp591,13 milyar (ADHB) dan Rp451,90 milyar (ADHK) dengan pertumbuhan negatif sebesar -7,88%. Namun, pada tahun 2021, sektor ini mulai menunjukkan pemulihan dengan PDRB ADHB sebesar Rp597,94 milyar dan ADHK Rp456,90 milyar, serta pertumbuhan positif sebesar 1,10%. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun-tahun berikutnya, dengan PDRB sektor ini mencapai Rp882,17 milyar (ADHB) dan Rp602,25 milyar (ADHK) pada tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil, yaitu 9,91%.

Tabel 2. 36. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kota Binjai

Akomodasi dan Makan Minum	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB	Milyar Rp	591,13	597,94	676,53	776,82	882,17
PDRB ADHK	Milyar Rp	451,90	456,90	500,61	547,94	602,25
Pertumbuhan	Persen	-7,88	1,10	9,57	9,45	9,91
Rasio	Persen	5,02	4,85	5,08	5,37	5,66

Sumber : Badan Pusat Statistik

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kota Binjai menunjukkan pemulihan yang cukup cepat setelah terpuruk pada 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, terutama pada sektor pariwisata dan layanan makanan. Peningkatan sektor ini mencerminkan kembalinya aktivitas ekonomi di sektor perhotelan, restoran, dan kafe di Kota Binjai, serta meningkatnya permintaan terhadap sektor ini seiring dengan normalisasi situasi setelah pandemi. Kenaikan PDRB dan pertumbuhan sektor ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pembukaan kembali sektor pariwisata, peningkatan jumlah wisatawan domestik, dan berlanjutnya sektor makanan dan minuman yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Namun, meskipun sektor ini menunjukkan pertumbuhan, rasio sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap total PDRB Kota Binjai cenderung menurun, yang mengindikasikan bahwa meskipun sektor ini berkontribusi penting, ada sektor-sektor lain yang turut berkembang lebih pesat. Untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang mendorong

diversifikasi layanan dalam sektor ini, peningkatan kualitas pariwisata, serta promosi destinasi wisata lokal untuk menarik lebih banyak pengunjung.

Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mencakup kontribusi dari kegiatan jual beli barang secara grosir maupun eceran, serta layanan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor. Sektor ini sangat penting karena mencerminkan aktivitas konsumsi masyarakat yang berhubungan langsung dengan kebutuhan sehari-hari, serta mobilitas kendaraan. Perdagangan besar dan eceran melibatkan berbagai jenis barang seperti bahan makanan, elektronik, pakaian, dan barang konsumsi lainnya, sementara reparasi mobil dan sepeda motor berperan dalam mendukung kelancaran transportasi. Sektor ini juga menciptakan lapangan kerja yang luas, baik dalam sektor ritel maupun bengkel perawatan kendaraan, serta memiliki dampak signifikan terhadap rantai pasokan dan sektor terkait lainnya seperti manufaktur dan distribusi. Peningkatan PDRB dari sektor ini biasanya menunjukkan daya beli masyarakat yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang baik, serta menjadi indikator penting menganalisis tren konsumsi dan pergerakan ekonomi di Kota Binjai.

Tabel 2. 37. PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Akomodasi dan Makan Minum Kota Binjai

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB	Milyar Rp	3.433,33	3.645,83	4.026,28	4.378,22	4.716,20
PDRB ADHK	Milyar Rp	2.426,81	2.515,01	2.652,55	2.799,23	2.956,15
Pertumbuhan	Persen	-1,02	3,63	5,47	5,53	5,61
Rasio	Persen	29,17	29,60	30,24	30,28	30,25

Sumber : Badan Pusat Statistik

PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Binjai menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, sektor ini mencatatkan PDRB sebesar Rp3.433,33 milyar (ADHB) dan Rp2.426,81 milyar (ADHK) dengan pertumbuhan negatif sebesar -1,02%. Namun, pada tahun 2021, sektor ini mulai pulih dengan pertumbuhan positif sebesar 3,63%, yang berlanjut hingga 2024, dengan PDRB mencapai Rp4.716,20 milyar (ADHB) dan Rp2.956,15 milyar (ADHK) pada tahun 2024. Sektor ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kontribusinya terhadap ekonomi Kota Binjai.

Sektor perdagangan dan reparasi kendaraan menunjukkan peran penting dalam perekonomian Kota Binjai. Hal ini tercermin dari rasio sektor ini terhadap total PDRB yang terus stabil tinggi di atas 29% sepanjang periode 2020 hingga 2024, mengindikasikan bahwa sektor ini adalah salah satu pilar utama dalam perekonomian Kota Binjai. Kenaikan PDRB yang cukup signifikan pada tahun 2022 dan 2023 mengindikasikan kembalinya

permintaan yang kuat dalam sektor perdagangan, khususnya terkait dengan perdagangan kendaraan dan reparasi kendaraan.

Pertumbuhan yang positif ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemulihan ekonomi pasca-pandemi, peningkatan daya beli masyarakat, dan kembali meningkatnya aktivitas sektor transportasi. Kenaikan angka pada tahun 2022 dan 2023 juga mencerminkan optimisme dalam sektor perdagangan dan reparasi kendaraan seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan dan jasa reparasi. Ke depannya, untuk menjaga pertumbuhan ini, Kota Binjai perlu mendukung kebijakan yang memfasilitasi pertumbuhan sektor ini, termasuk peningkatan infrastruktur, akses pasar yang lebih luas, dan pemanfaatan teknologi dalam perdagangan dan layanan reparasi kendaraan.

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif merujuk pada kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Ekonomi kreatif mencakup sektor-sektor yang berfokus pada penciptaan nilai tambah melalui ide, kreativitas, dan inovasi, seperti industri seni, desain, film, musik, periklanan, mode, kuliner, dan teknologi digital. Sektor-sektor ini semakin menjadi pendorong penting dalam pertumbuhan ekonomi, mengingat kemampuannya dalam menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, serta memperkuat identitas budaya. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif menggambarkan seberapa besar kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah dan dapat menjadi indikator penting dalam merencanakan kebijakan yang mendukung perkembangan sektor kreatif. Peningkatan proporsi PDRB dari ekonomi kreatif menunjukkan adanya pemanfaatan potensi kreatif daerah secara optimal, serta keberhasilan dalam mengintegrasikan kreativitas dan teknologi dalam pembangunan ekonomi.

Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana tingkat kewirausahaan dalam suatu wilayah atau negara. Rasio ini menggambarkan proporsi individu atau usaha yang terlibat dalam aktivitas kewirausahaan, baik itu mendirikan, mengelola, atau mengembangkan bisnis baru. Rasio kewirausahaan biasanya dihitung dengan melihat jumlah wirausahawan atau usaha baru yang ada dibandingkan dengan jumlah total penduduk usia produktif atau tenaga kerja. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa ada banyak peluang dan dukungan untuk memulai usaha, serta adanya iklim yang kondusif untuk berwirausaha. Sektor kewirausahaan yang berkembang dengan baik dapat meningkatkan perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan peningkatan daya saing. Sebaliknya, rasio kewirausahaan yang rendah bisa menjadi indikasi adanya hambatan seperti kurangnya akses ke modal, keterbatasan dalam

pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, serta tantangan dalam hal peraturan dan birokrasi yang menyulitkan pendirian usaha baru. Oleh karena itu, rasio kewirausahaan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai dinamika ekonomi dan kemampuan suatu daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis usaha kecil dan menengah (UKM).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah penduduk yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan terhadap total jumlah penduduk usia kerja dalam suatu wilayah. TPAK mengukur seberapa besar proporsi penduduk yang berkontribusi secara aktif dalam pasar tenaga kerja. Indikator ini penting untuk memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Semakin tinggi TPAK, semakin besar proporsi penduduk yang berpartisipasi dalam ekonomi, baik melalui pekerjaan atau pencarian kerja aktif.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Binjai menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, TPAK di Kota Binjai tercatat sebesar 65,14%, yang kemudian meningkat menjadi 69,10% pada tahun 2021. Setelah sempat turun menjadi 58,61% pada tahun 2022, TPAK Kota Binjai kembali mengalami pemulihan dengan angka 62,77% pada tahun 2023 dan diperkirakan akan mencapai 64,22% pada tahun 2024.

Gambar 2. 37. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Binjai, Sumatera Utara dan Nasional

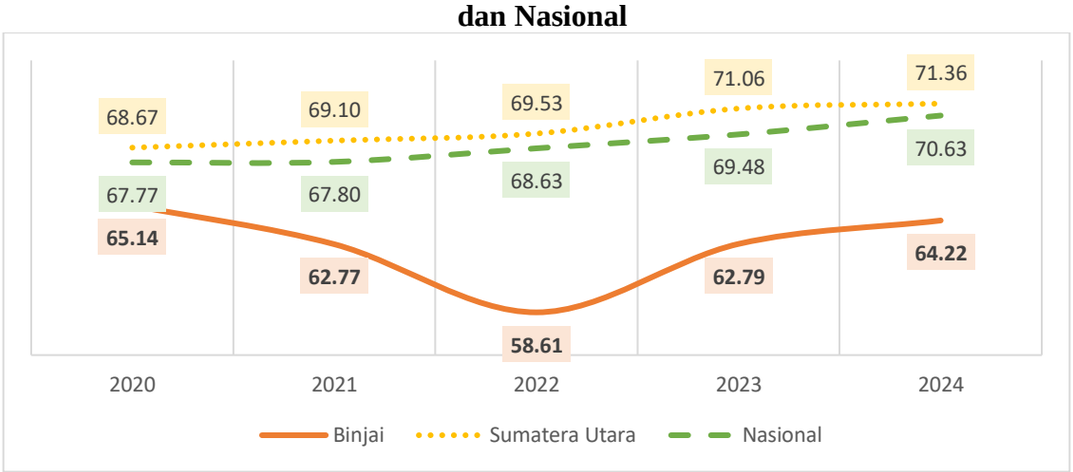

Sumber : Badan Pusat Statistik

Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2022, secara keseluruhan TPAK Kota Binjai menunjukkan tren pemulihan yang cukup baik, mencerminkan peningkatan partisipasi angkatan kerja dalam perekonomian. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan lapangan kerja, dan warga Kota Binjai semakin aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Namun, TPAK Kota Binjai pada tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata TPAK Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 69,53% pada tahun yang sama.

Penurunan yang terjadi pada tahun 2022 mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dampak pandemi COVID-19 atau ketidakpastian ekonomi yang mengurangi kepercayaan diri masyarakat untuk memasuki pasar kerja. Meski demikian, pemulihan yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Binjai mulai stabil, dengan lebih banyak individu yang kembali bergabung dalam angkatan kerja. Untuk terus meningkatkan TPAK, penting bagi Pemerintah Kota Binjai untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan yang berkualitas, meningkatkan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong inovasi dan wirausaha untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu daerah mengembangkan dan menerapkan inovasi dalam berbagai sektor, baik dalam hal teknologi, industri, maupun sektor sosial. Indeks ini mencakup berbagai indikator yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menciptakan ide-ide baru, mengembangkan produk atau layanan yang lebih baik, serta meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi. Beberapa faktor yang biasa dinilai dalam indeks ini meliputi investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D), jumlah paten yang dihasilkan, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta adopsi teknologi baru oleh masyarakat dan pelaku usaha. Daerah dengan indeks inovasi yang tinggi menunjukkan adanya kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi. Sebaliknya, daerah dengan indeks inovasi yang rendah mungkin menghadapi kesulitan dalam menghadapi persaingan global dan memperlambat laju pertumbuhan ekonominya.

Tabel 2. 38. Indikator Inovasi Daerah Kota Binjai

Jenis Penelitian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kajian	Kajian	2	7	42	2	1	2
Jumlah Penelitian	Izin	123	83	113	505	333	238
Indeks Inovasi Daerah	Indeks	-	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, 2023

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Binjai melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai dalam urusan penelitian dan pengembangan telah melaksanakan jumlah kajian sebanyak 2 kajian yaitu Kajian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) dan jumlah izin penelitian sebanyak 238 izin. Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa tantangan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai selama ini adalah hasil penelitian belum banyak dipergunakan untuk menentukan kebijakan Pembangunan Kota Binjai. Dengan demikian, maka penting bagi Pemerintah Kota Binjai ke depan untuk

meningkatkan kualitas hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan kota. Sehingga hasil-hasil penelitian lebih bersifat terapan sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan Kota Binjai. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah serta berdasarkan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Pemberian dan Penghargaan atau Insentif Inovasi Daerah telah mengamanatkan kepada Kemendagri untuk melakukan pengukuran indeks inovasi daerah. Pemerintah Kota Binjai untuk lima tahun perencanaan ke depan memandang perlu untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akan memberi kemudahan bagi masyarakat.

Potensi-potensi pokok yang dapat menjembatani kesenjangan yang terjadi pada kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi terlihat pada cakupan, sebagai berikut:

(a) Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah.
(b) Penataan basis data riset dan inovasi
(c) Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi
(d) Pengelolaan Kebun Raya Daerah
(e) Penyediaan anggaran riset dan inovasi
(f) Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual

Perlu pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah antara lain :

(a) Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah
(b) Penataan Basis Riset dan Inovasi
(c) Penguatan Kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah dengan Pemangku Kepentingan.
(d) Penguatan Kemitraan Antar Kelembagaan dan Peningkatan Praktik dan Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi kepada Pelaku Inovasi
(e) Promosi dan Kampanye Inovasi serta Apresiasi Prestasi Inovasi
(f) Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan di daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah
(g) Penyelenggaraan Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah

3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Menjelaskan kondisi tentang penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi yang ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan.

Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana sebuah negara atau daerah mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dalam perekonomiannya. Indeks ini mengukur kontribusi sektor-sektor ekonomi yang berfokus pada perlindungan lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya alam, pengurangan emisi karbon, serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Sektor yang sering tercakup dalam ekonomi hijau meliputi energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, pengelolaan hutan, dan industri yang ramah lingkungan. Peningkatan indeks ekonomi hijau menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan, serta menunjukkan komitmen suatu wilayah terhadap pengurangan dampak perubahan iklim. Dengan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan, indeks ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana prinsip ekonomi hijau telah diterapkan dalam pembangunan berkelanjutan.

Porsi Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Primer

Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer merujuk pada persentase kontribusi energi yang bersumber dari sumber terbarukan, seperti tenaga surya, angin, biomassa, geotermal, dan energi laut, dalam total konsumsi energi primer suatu negara atau wilayah. Bauran energi primer menggambarkan kombinasi berbagai sumber energi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dasar, termasuk energi fosil (seperti minyak, gas, dan batu bara) serta energi terbarukan. Meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi primer menjadi salah satu prioritas global untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang dapat merusak lingkungan dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Dengan meningkatkan penggunaan EBT, suatu negara dapat mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, mengurangi dampak perubahan iklim, serta menciptakan peluang baru dalam pengembangan teknologi energi terbarukan. Indikator ini menjadi penting dalam menilai kemajuan negara atau daerah dalam upaya pencapaian ketahanan energi dan keberlanjutan lingkungan.

4. Transformasi Digital

Menjelaskan tentang pengarusutamaan transformasi digital meliputi pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana perkembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Kota Binjai. Indeks ini mengukur ketersediaan infrastruktur TIK, kualitas layanan internet, adopsi teknologi oleh masyarakat dan sektor bisnis, serta

kemampuan suatu wilayah dalam memanfaatkan TIK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Beberapa faktor yang biasanya dinilai dalam indeks ini meliputi tingkat penetrasi internet, kecepatan akses data, jumlah pengguna perangkat digital, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan sektor TIK. Peningkatan indeks ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin siap dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup, serta berkontribusi pada daya saing ekonomi global. Sebaliknya, indeks yang rendah dapat mencerminkan tantangan dalam mengakses atau mengembangkan infrastruktur TIK yang memadai, yang dapat menghambat potensi pertumbuhan dan kemajuan dalam sektor-sektor terkait. Indeks Pembangunan TIK menjadi indikator penting untuk menilai kesiapan digital suatu daerah dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan transformasi digital secara umum.

Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupuan terkait pekerjaannya. Pengukuran IMDI telah dilaksanakan sejak tahun 2022 dan dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menilai tingkat kesiapan digital masyarakat. IMDI bertujuan untuk mengetahui tingkat kompetensi digital masyarakat, mendorong inklusivitas dalam ekonomi digital, acuan dalam perencanaan program pengembangan SDM digital di Indonesia. Hasil pengukuran IMDI memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi masyarakat digital di setiap wilayah dan menjadi acuan penting bagi pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat dalam merancang kebijakan dan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital yang tepat sasaran.

Gambar 2. 38. Indeks Masyarakat Digital Kota Binjai, Sumatera Utara dan Nasional

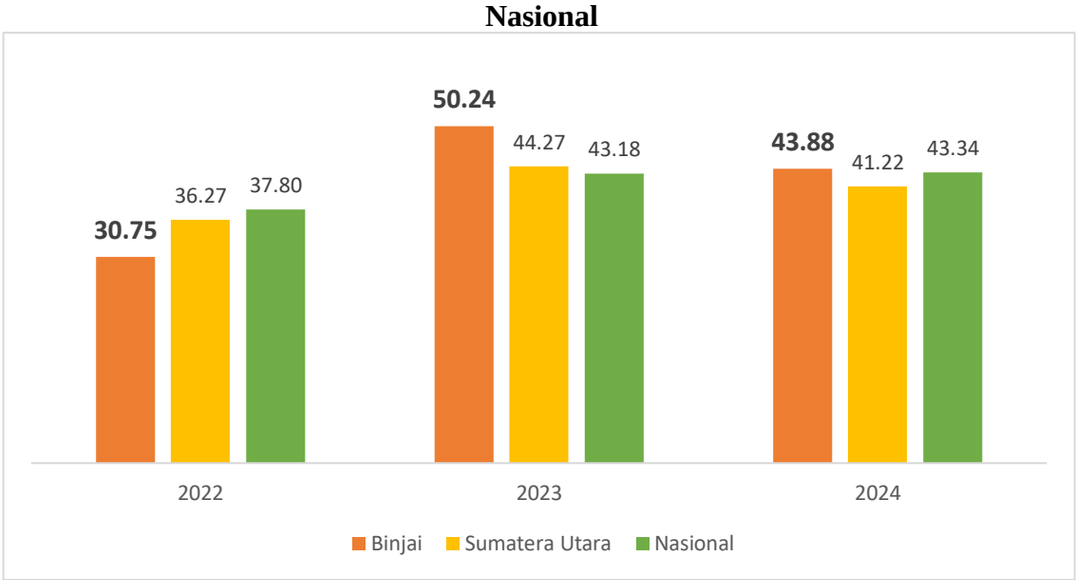

Sumber: imdi.sdmdigital.id

Berdasarkan data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dalam tiga tahun terakhir, Kota Binjai menunjukkan dinamika perkembangan yang signifikan jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional. Pada tahun 2022, IMDI Kota Binjai tercatat sebesar 30,75, tertinggal cukup jauh dari rata-rata provinsi (36,27) dan nasional (37,80). Namun pada tahun 2023, terjadi lonjakan tajam pada indeks Kota Binjai menjadi 50,24, melampaui rata-rata provinsi (44,27) dan nasional (43,18), yang menunjukkan adanya percepatan adopsi digital dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi. Meskipun pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 43,88, posisi Kota Binjai masih tetap berada di atas capaian Provinsi Sumatera Utara (41,22) dan relatif seimbang dengan capaian nasional (43,34). Capaian ini mencerminkan bahwa transformasi digital masyarakat di Kota Binjai telah mengalami kemajuan pesat, meskipun diperlukan upaya konsolidasi dan penguatan infrastruktur serta literasi digital secara berkelanjutan guna menjaga kesinambungan peningkatan kualitas masyarakat digital di masa mendatang.

5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Menjelaskan kondisi tentang integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global.

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung total investasi dalam barang modal yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam perekonomian. PMTB mencakup pembelian dan perbaikan atas aset tetap seperti bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan infrastruktur lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Ini mencakup investasi baik dari sektor publik maupun swasta dan mencerminkan upaya suatu negara atau daerah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing ekonomi. Peningkatan PMTB sering kali menunjukkan adanya pertumbuhan investasi yang mendukung perkembangan sektor-sektor ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat produktivitas. PMTB juga berfungsi sebagai indikator penting dalam melihat potensi ekonomi masa depan, karena investasi dalam aset tetap merupakan kunci untuk memperluas kapasitas ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, penurunan dalam PMTB dapat menjadi sinyal adanya penurunan minat investasi, yang dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi daerah.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kota Binjai menunjukkan pertumbuhan yang positif sejak tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2020, PDRB sektor PMTB tercatat sebesar Rp3.791,70 milyar (ADHB) dan Rp2.637,81 milyar (ADHK), dengan pertumbuhan negatif sebesar -0,49%. Namun, pada tahun 2021, PMTB mulai mengalami

pemulihan dengan pertumbuhan positif sebesar 3,35% dan PDRB ADHB meningkat menjadi Rp4.012,24 milyar. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 dan 2023, dengan PDRB ADHB sektor ini mencapai Rp4.302,46 milyar pada 2022 dan Rp4.798,58 milyar pada 2023. Pada tahun 2024, diperkirakan PDRB sektor ini akan mencapai Rp5.240,41 milyar (ADHB), dengan pertumbuhan yang lebih tinggi mencapai 5,77%.

Tabel 2. 39. Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Binjai

PMTB	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB	Milyar Rp	3.791,70	4.012,24	4.302,46	4.798,58	5.240,41
PDRB ADHK	Milyar Rp	2.637,81	2.726,19	2.916,54	3.127,01	3.307,54
Pertumbuhan	Persen	-0,49	3,35	6,98	7,22	5,77
Rasio	Persen	32,22	32,57	32,31	33,19	33,62

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan yang stabil dan peningkatan signifikan dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto ini menunjukkan bahwa Kota Binjai berhasil meningkatkan investasi dan pembangunan infrastruktur, yang menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Rasio PMTB terhadap PDRB Kota Binjai juga menunjukkan konsistensi yang stabil, berada di kisaran 32% hingga 33% sepanjang periode 2020 hingga 2024, yang mencerminkan pentingnya sektor modal tetap dalam perekonomian daerah.

Peningkatan PMTB ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peningkatan investasi sektor infrastruktur, pembangunan proyek-proyek strategis, dan perbaikan iklim investasi yang lebih kondusif. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang mendukung percepatan pembangunan fisik dan pembukaan sektor industri baru turut berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan yang positif, penting bagi Kota Binjai untuk terus memanfaatkan investasi yang ada, meningkatkan kapasitas produksi, serta memastikan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur yang optimal.

Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa adalah komponen penting dalam perekonomian suatu daerah yang menggambarkan nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri dan dijual ke pasar luar daerah maupun luar negeri. Ekspor berkontribusi langsung terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan pengeluaran, yang mencakup total pengeluaran dalam ekonomi, termasuk konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor neto (ekspor dikurangi impor). Dalam konteks PDRB, ekspor barang dan jasa memainkan peran penting sebagai pendorong permintaan eksternal yang memengaruhi produksi dan lapangan kerja dalam negeri. Peningkatan ekspor akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa domestik, yang pada gilirannya dapat memperkuat sektor produksi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penurunan ekspor dapat menekan pertumbuhan ekonomi karena berkurangnya permintaan eksternal, yang berdampak pada berkurangnya aktivitas

ekonomi di sektor-sektor terkait. Oleh karena itu, sektor ekspor menjadi salah satu pilar yang mendukung stabilitas dan keberlanjutan perekonomian suatu daerah atau negara, serta berkontribusi pada pembentukan PDRB berdasarkan pengeluaran.

Tabel 2. 40. Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Binjai

Net Ekspor Barang dan Jasa	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB	Milyar Rp	89,14	125,59	140,92	-75,17	-18,40
PDRB ADHK	Milyar Rp	28,00	4,50	10,68	10,65	-97,71
Rasio	Persen	0,76	1,02	1,06	-0,52	-0,12

Sumber : Badan Pusat Statistik

Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Binjai menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, net ekspor tercatat sebesar Rp89,14 milyar (ADHB) dan Rp28,00 milyar (ADHK) dengan rasio 0,76%, yang menunjukkan kontribusi positif terhadap perekonomian Kota Binjai. Namun, pada tahun 2021, net ekspor mengalami peningkatan menjadi Rp125,59 milyar (ADHB) dan Rp4,50 milyar (ADHK), dengan rasio 1,02%, meskipun diikuti dengan penurunan yang cukup tajam pada tahun 2022. Pada tahun tersebut, net ekspor Barang dan Jasa tercatat Rp140,92 milyar (ADHB), tetapi PDRB ADHK turun menjadi Rp10,68 milyar dan menghasilkan rasio 1,06%. Namun, mulai tahun 2023 dan 2024, net ekspor mengalami penurunan drastis. Pada tahun 2023, net ekspor tercatat -Rp75,17 milyar (ADHB) dan -Rp97,71 milyar (ADHK), dengan rasio -0,52%. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2024, di mana net ekspor diperkirakan mencapai -Rp18,40 milyar (ADHB) dan -Rp97,71 milyar (ADHK), dengan rasio -0,12%.

Angka ini mencerminkan adanya penurunan tajam dalam kinerja ekspor di Kota Binjai pada tahun 2023 dan 2024, yang menunjukkan bahwa sektor perdagangan internasional dan jasa yang sebelumnya positif mengalami ketidakseimbangan. Ini mencerminkan adanya penurunan ekspor barang dan jasa yang berdampak negatif pada perekonomian Kota Binjai. Penurunan drastis pada net ekspor ini mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti fluktuasi permintaan internasional, penurunan harga komoditas, atau gangguan rantai pasokan yang menghambat ekspor barang dan jasa dari Kota Binjai. Selain itu, kurangnya diversifikasi pasar ekspor dan terbatasnya sektor ekspor yang dapat diandalkan juga dapat menjadi penyebab. Untuk mengatasi penurunan ini, penting bagi Kota Binjai untuk meningkatkan daya saing produk ekspor, memperluas pasar internasional, serta mengoptimalkan kebijakan yang mendukung ekspor barang dan jasa, dengan fokus pada produk unggulan yang memiliki potensi besar di pasar global.

6. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Menjelaskan tentang kondisi pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri yang berkelanjutan.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan Wilayah Sekitar

Dalam rangka memahami posisi strategis dan kinerja ekonomi Kota Binjai dalam konteks regional, analisis perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah sekitar menjadi hal yang penting dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana daya saing dan resiliensi ekonomi Kota Binjai berkembang dalam menghadapi dinamika ekonomi regional dan nasional. Dengan mengamati tren pertumbuhan ekonomi Kota Binjai secara berkelanjutan dan membandingkannya dengan Provinsi Sumatera Utara serta tingkat nasional, Pemerintah Kota Binjai dapat merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang lebih terarah, adaptif, dan berbasis potensi unggulan daerah. Analisis ini juga menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu mengatasi kesenjangan antarwilayah.

Gambar 2. 39. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai dengan Wilayah Sekitar

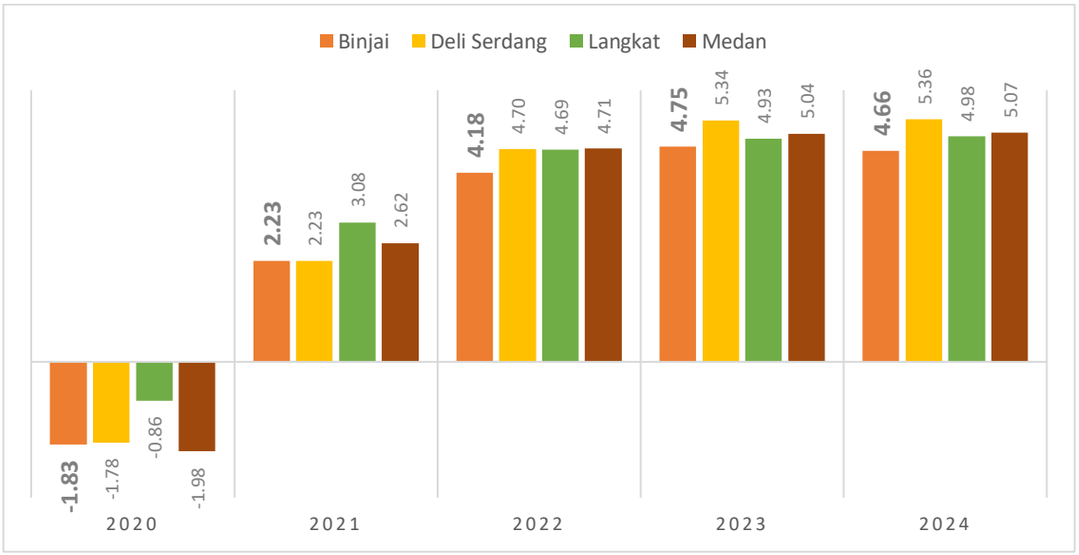

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan informasi di atas, pertumbuhan ekonomi Kota Binjai dalam periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif dan konsisten meningkat setelah mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, seluruh wilayah termasuk Kota Binjai mengalami pertumbuhan negatif, dengan Kota Binjai mencatat kontraksi sebesar -1,83 persen. Namun sejak tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mulai pulih dengan capaian 2,23 persen dan terus meningkat hingga mencapai 4,66 persen pada tahun 2024. Meskipun tingkat pertumbuhan Kota Binjai cenderung lebih rendah dibandingkan beberapa wilayah sekitar seperti Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan, tren pemulihan ekonomi Kota Binjai menunjukkan kinerja yang stabil dan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi pemulihan ekonomi daerah serta potensi yang dimiliki Kota Binjai dalam menopang pertumbuhan ekonomi regional. Ke depan, sinergi

antarwilayah dan optimalisasi sektor unggulan perlu diperkuat guna meningkatkan daya saing dan akselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Binjai secara lebih merata dan inklusif.

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana infrastruktur yang ada di suatu daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti kualitas dan ketersediaan layanan transportasi, air bersih, energi, sanitasi, komunikasi, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan. Infrastruktur yang berkualitas sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mempercepat pembangunan. Indeks ini memberikan gambaran mengenai seberapa baik infrastruktur yang ada dalam menyediakan layanan yang efisien, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Peningkatan kualitas layanan infrastruktur akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas, aksesibilitas, serta kesejahteraan sosial. Sebaliknya, infrastruktur yang buruk dapat menjadi hambatan besar dalam pertumbuhan ekonomi dan mengurangi daya saing suatu daerah. Oleh karena itu, Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur menjadi indikator penting untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan infrastruktur di suatu wilayah.

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Proporsi rumah tangga dengan akses hunian layak adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan dan kualitas hidup. Hunian layak tidak hanya mencakup ketersediaan tempat tinggal yang cukup, tetapi juga melibatkan aspek-aspek seperti sanitasi yang baik, ventilasi yang memadai, pasokan air bersih, serta fasilitas dasar lainnya yang mendukung kenyamanan dan kesehatan penghuni. Proporsi ini mengacu pada persentase rumah tangga yang tinggal di rumah dengan kondisi yang sesuai dengan standar tersebut dibandingkan dengan total rumah tangga dalam suatu wilayah. Semakin tinggi proporsi rumah tangga dengan akses hunian layak, semakin baik kondisi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Indikator ini sangat penting dalam menilai kesejahteraan sosial, karena hunian yang tidak layak dapat berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan produktivitas masyarakat. Peningkatan proporsi rumah tangga dengan akses hunian layak mencerminkan kemajuan dalam pembangunan perumahan yang mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

Tabel 2.41. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kota Binjai

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	95,99	95,21	96,36	96,36	97,10

Sumber: Kota Binjai Dalam Angka 2025

Berdasarkan data dari Tabel 2.36, persentase rumah tangga dengan akses terhadap hunian layak di Kota Binjai menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentasenya sebesar 95,99%, sedikit menurun menjadi 95,21% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, angka tersebut kembali meningkat dan stabil di angka 96,36%, lalu mengalami kenaikan lebih lanjut pada tahun 2024 menjadi 97,10%. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan akses terhadap hunian yang layak di Kota Binjai dari tahun ke tahun.

7. Stabilitas Ekonomi Makro

Menjelaskan kondisi tentang stabilitas ekonomi makro yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan.

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah indikator yang mengukur sejauh mana penerimaan pajak daerah berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Indikator ini memberikan gambaran tentang seberapa besar bagian dari total pendapatan daerah yang berasal dari sektor pajak dibandingkan dengan keseluruhan aktivitas ekonomi daerah. Rasio ini penting karena menunjukkan kapasitas daerah dalam memungut pajak dan ketergantungan ekonomi daerah terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi rasio pajak daerah terhadap PDRB, semakin besar kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Sebaliknya, rasio yang rendah dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut masih bergantung pada sumber pendapatan lain, seperti transfer dari pemerintah pusat, atau kurang optimal dalam pemungutan pajak. Oleh karena itu, rasio ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan fiskal daerah dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.

Tabel 2.42. Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Binjai Tahun 2020-2024

Komponen	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah	Milyar Rp	65,33	54,48	63,71	72,52	72,62
PDRB ADHB	Milyar Rp	11.769,07	12.317,95	13.315,95	14.459,58	15.588,75
Rasio	Persen	0,56	0,44	0,48	0,50	0,47

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tingkat Inflasi

Kondisi harga dapat dikatakan inflasi jika terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi menyebabkan pelemahan pada nilai mata uang setiap penduduk. Perubahan kurs rupiah juga dapat menyebabkan inflasi akibat naiknya harga bahan baku impor.

Tabel 2.43 Tingkat Inflasi di Kota Binjai Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Inflasi	1,50	1,70	5,50	2,61	2,50

Sumber: Kota Binjai Dalam Angka 2025

Berdasarkan data di atas yang bersumber dari *Kota Binjai Dalam Angka 2025*, tingkat inflasi di Kota Binjai menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, inflasi tercatat sebesar 1,50% dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,70% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 5,5%, yang kemungkinan dipengaruhi oleh tekanan harga dan kondisi ekonomi pasca pandemi. Setelah itu, inflasi menurun menjadi 2,61% pada tahun 2023 dan kembali turun menjadi 2,50% pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami lonjakan, laju inflasi di Kota Binjai cenderung kembali stabil dalam dua tahun terakhir.

Dalam penyajian hasil evaluasi capaian pembangunan daerah, khususnya aspek tingkat inflasi, penting untuk menambahkan uraian mengenai kontribusi inflasi menurut kelompok pengeluaran dan komoditas utama penyumbang inflasi selama lima tahun terakhir. Secara umum, tingkat inflasi Kota Binjai sempat relatif rendah pada masa pandemi, yakni **1,68% pada tahun 2020**, kemudian meningkat menjadi **2,12% pada 2021**, melonjak ke **5,31% pada 2022** akibat gejolak harga pangan dan energi, menurun menjadi **3,45% pada 2023**, dan terkendali di kisaran **2,98% pada 2024**. Dari sisi kelompok pengeluaran, penyumbang utama inflasi secara konsisten berasal dari kelompok **makanan, minuman, dan tembakau** dengan andil tahunan rata-rata di atas **50%** dari total inflasi, diikuti oleh kelompok **transportasi** (khususnya tarif angkutan udara dan kenaikan BBM), serta kelompok **perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga**. Sementara itu, kelompok **rekreasi, olahraga, dan budaya** juga memberi andil tambahan meskipun relatif kecil. Dari sisi komoditas, inflasi Kota Binjai sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga **beras, cabai merah, bawang merah, minyak goreng, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar**, sedangkan dari kelompok transportasi, tarif **angkutan udara** dan harga **BBM** menjadi faktor dominan. Dengan menampilkan angka inflasi tahunan berikut andil kelompok pengeluaran serta komoditas penyumbang utamanya, analisis inflasi tidak hanya bersifat agregat tetapi juga lebih mendalam, sehingga dapat dijadikan dasar bagi perumusan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan uraian indikator dan capaian pembangunan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa aspek daya saing daerah Kota Binjai menunjukkan perkembangan yang positif dan menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari peningkatan produktivitas tenaga

kerja, kontribusi sektor industri pengolahan, perdagangan, dan akomodasi yang stabil, serta tren positif pada rasio pembentukan modal tetap bruto sebagai indikator investasi. Meskipun masih terdapat tantangan pada rasio kewirausahaan, indeks inovasi daerah, dan kontribusi ekspor, berbagai upaya strategis telah dilakukan untuk memperkuat integrasi ekonomi domestik dan global melalui reformasi kebijakan, pengembangan sektor kreatif, serta transformasi digital. Selain itu, Kota Binjai juga menunjukkan komitmen dalam penerapan prinsip ekonomi hijau dan peningkatan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, daya saing Kota Binjai ke depan memiliki prospek yang semakin kuat melalui sinergi antara peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekosistem inovasi, transformasi digital, serta pengelolaan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Binjai dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Menjelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum.

Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi diarahkan agar hadirnya birokrasi sebagai jembatan terhadap dampak, yang menyasar pada percepatan penyelesaian masalah-masalah utama pembangunan. Semangatnya, regulasi disusun untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, bukan justru menjadi beban dalam penyelesaian masalah (KemenpanRB RI, 2024). Indeks reformasi birokrasi sebagai alat ukur sejauh mana instansi mampu menerjemahkan visi melalui langkah-langkah strategis tata kelola yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel 2.44. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Binjai

Indeks Reformasi Birokrasi	2020	2021	2022	2023	2024
Kategori	-	C	C	B	B
Nilai	-	42,92	47,55	61,74	66,48

Sumber : BKD Kota Binjai

Berdasarkan data capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Binjai menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021 hingga 2024. Nilai indeks meningkat dari 42,92 pada tahun 2021 dengan kategori “C”, menjadi 47,55 pada tahun 2022, dan mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2023 dengan nilai 61,74 serta

kategori naik menjadi “B”. Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian nilai 66,48 dan tetap berada pada kategori “B”. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Binjai dalam mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan, baik melalui perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kinerja aparatur, penguatan akuntabilitas, maupun penyederhanaan proses layanan publik. Ke depan, konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dijaga dan diperkuat untuk mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani guna mendukung percepatan pembangunan daerah yang responsif dan adaptif terhadap perubahan.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana sebuah pemerintah daerah atau negara telah mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan layanan publik secara elektronik, penggunaan sistem manajemen berbasis digital dalam administrasi pemerintahan, serta integrasi data dan proses antara instansi pemerintah. Penerapan SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik. Indeks ini juga mengukur sejauh mana infrastruktur TIK mendukung operasional pemerintahan, serta sejauh mana kebijakan dan regulasi mendukung pengembangan dan penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. Dengan meningkatnya indeks SPBE, diharapkan pemerintahan akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mempercepat proses administrasi, dan memberikan layanan yang lebih baik serta lebih transparan. Sebaliknya, indeks yang rendah dapat menunjukkan bahwa penerapan teknologi di sektor pemerintahan masih terbatas dan membutuhkan perbaikan dalam hal infrastruktur, kebijakan, dan sumber daya manusia.

Tabel 2.45. Indeks Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik Kota Binjai

Indeks SPBE	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai	2,63	1,67	1,82	2,97	3,12

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

Berdasarkan data capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Binjai menunjukkan tren peningkatan yang positif dalam lima tahun terakhir. Setelah mengalami penurunan dari 2,63 pada tahun 2020 menjadi 1,67 pada tahun 2021, indeks ini kembali meningkat secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya, yaitu sebesar 1,82 pada 2022, 2,97 pada 2023, dan mencapai 3,12 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Binjai dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efisien, akuntabel, dan transparan. Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sistem pelayanan publik

telah mengalami perbaikan baik dari sisi infrastruktur, interoperabilitas sistem, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Meskipun demikian, penguatan regulasi, integrasi layanan digital lintas sektor, serta peningkatan literasi digital masyarakat masih perlu diakselerasi guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Indeks Pelayanan Publik

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas atau prima merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Instansi pemerintah memiliki tugas mendasar untuk memberikan pelayanan prima (excellent service) dan harus memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dalam rangka menjaga pelayanan publik yang berkualitas dan transparan serta memenuhi harapan masyarakat, diperlukan penilaian terhadap instansi pemerintah tersebut.

Tabel 2.46. Indeks Pelayanan Publik Kota Binjai

Indeks Pelayanan Publik	2020	2021	2022	2023	2024
Kategori	-	C	C	C	A
Nilai	-	2,40	2,63	2,22	4,01

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Binjai

Indeks Pelayanan Publik Kota Binjai menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2020, Kota Binjai belum memiliki kategori yang jelas untuk indeks pelayanan publik, namun pada tahun 2021, indeks pelayanan publik tercatat dengan kategori C dan nilai 2,40. Nilai ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 2,63, meskipun sedikit menurun menjadi 2,22 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, Kota Binjai berhasil mencapai kategori A dengan nilai 4,01, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas pelayanan publik.

Peningkatan yang stabil pada nilai indeks pelayanan publik menggambarkan adanya perbaikan dalam sistem administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Pencapaian kategori A pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Kota Binjai berhasil memenuhi standar pelayanan publik yang lebih tinggi dan lebih memuaskan, setelah mengalami kenaikan dari kategori C di awal periode. Hal ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memperbaiki akses, kualitas, dan efisiensi layanan publik di berbagai sektor. Peningkatan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh inovasi dalam penyediaan layanan, seperti digitalisasi layanan publik, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan, dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Meski demikian, tantangan yang perlu diatasi adalah memastikan bahwa perbaikan ini berkelanjutan dan merata di seluruh lini pemerintahan, dengan fokus pada sektor-sektor yang masih membutuhkan perhatian, seperti transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Indeks Integritas

Indeks Integritas adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi atau lembaga, baik di tingkat pemerintah maupun sektor swasta, menjalankan prinsip-prinsip integritas dalam operasional dan kebijakannya. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti transparansi, akuntabilitas, kejujuran, dan kepatuhan terhadap hukum dan etika. Tujuan utama dari Indeks Integritas adalah untuk mengukur sejauh mana sebuah lembaga atau organisasi dapat menjaga dan mempromosikan perilaku yang etis dan profesional, serta mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks pemerintahan, Indeks Integritas sangat penting karena dapat menunjukkan sejauh mana sektor publik dapat dipercaya oleh masyarakat dalam memberikan layanan, mengelola anggaran, serta membuat keputusan yang adil dan transparan. Peningkatan Indeks Integritas sering kali berkaitan dengan reformasi birokrasi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta kebijakan yang mendukung budaya anti-korupsi dan pelayanan publik yang berkualitas. Sebaliknya, Indeks Integritas yang rendah dapat menjadi indikator adanya praktik korupsi, ketidaktransparanan, dan kelemahan dalam sistem pengawasan yang perlu segera ditangani.

Opini BPK

Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah penilaian atau pendapat yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan suatu entitas, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun badan publik lainnya. Opini ini mencerminkan sejauh mana laporan keuangan tersebut mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan prinsip-prinsip transparansi serta akuntabilitas. Terdapat beberapa jenis opini BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini WTP menunjukkan laporan keuangan yang disusun dengan baik, sementara opini WDP dan TW menunjukkan adanya masalah dalam penyusunan laporan keuangan. Opini TMP berarti BPK tidak dapat memberikan penilaian karena keterbatasan dalam informasi yang tersedia. Opini BPK menjadi alat penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan negara atau daerah.

Tabel 2.47. Opini BPK Kota Binjai

Opini BPK	2020	2021	2022	2023	2024
Kategori	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Binjai

Opini BPK Kota Binjai menunjukkan perubahan yang signifikan terkait dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2020 dan 2021, Kota Binjai menerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pada tahun 2022, Kota Binjai mengalami penurunan dengan menerima

opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), yang menunjukkan adanya beberapa kelemahan dalam pengelolaan keuangan yang perlu diperbaiki. Meskipun demikian, pada tahun 2023 dan 2024, Kota Binjai kembali memperoleh opini WTP, yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah memperbaiki dan mengatasi permasalahan yang ada dalam pengelolaan keuangan.

Opini WTP yang konsisten pada tahun 2020, 2021, 2023, dan 2024 menggambarkan adanya peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik. Namun, penurunan menjadi WDP pada tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan risiko kelemahan dalam pengawasan dan pelaporan keuangan, yang menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk segera diperbaiki.

Penurunan opini BPK menjadi WDP pada tahun 2022 kemungkinan disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam beberapa laporan keuangan atau masalah administrasi dan pengawasan yang harus segera dibenahi. Perbaikan yang dilakukan pada tahun 2023 dan 2024, yang kembali mendapatkan opini WTP, menunjukkan bahwa upaya perbaikan sistem pengelolaan keuangan telah berhasil dilakukan. Untuk mempertahankan capaian ini, penting bagi Kota Binjai untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal agar pengelolaan keuangan daerah tetap memenuhi standar yang diharapkan oleh BPK.

2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

Menjelaskan tentang kondisi pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Pembangunan demokrasi yang diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat.

Persentase Penegakan Perda

Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana peraturan daerah yang telah disahkan dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat serta aparat pemerintah. Indikator ini mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam menegakkan aturan yang telah dibuat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Penegakan perda melibatkan pengawasan, tindakan sanksi bagi pelanggaran, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Semakin tinggi persentase penegakan perda, semakin baik pelaksanaan dan kepatuhan terhadap hukum daerah, yang mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sebaliknya, persentase yang rendah bisa menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan, penegakan hukum, atau penerimaan masyarakat terhadap peraturan yang ada. Dengan demikian, persentase

penegakan perda menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas hukum dan ketertiban di suatu daerah.

Tabel 2.48. Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kota Binjai

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Penegakan Peraturan Daerah	Persen	57,14	57,14	57,14	57,14	57,50

Sumber : Satpol PP Kota Binjai

Berdasarkan data tingkat penegakan peraturan daerah di Kota Binjai selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan konsistensi yang relatif stabil, dengan persentase capaian sebesar 57,14 persen dari tahun 2020 hingga 2023, dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 57,50 persen pada tahun 2024. Konsistensi ini mencerminkan adanya upaya yang berkelanjutan dari Pemerintah Kota Binjai, melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam memastikan pelaksanaan peraturan daerah berjalan dengan baik. Meskipun terjadi peningkatan yang masih terbatas, hal ini mengindikasikan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi peran masyarakat dalam mendukung penegakan hukum di daerah. Untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penegakan Perda serta penguatan sistem monitoring dan pelaporan, sehingga tercipta kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan yang lebih optimal di Kota Binjai.

Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas demokrasi di suatu daerah berdasarkan berbagai indikator yang mencakup aspek politik, kebebasan sipil, partisipasi politik, serta fungsi pemerintahan. Indeks ini memberikan gambaran tentang sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan. Indeks Demokrasi sering kali dihitung berdasarkan data tentang pemilu yang bebas dan adil, kebebasan pers, tingkat partisipasi politik masyarakat, serta efektivitas lembaga-lembaga demokrasi dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan hasil pengukuran ini, negara atau daerah dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis sistem demokrasi, mulai dari "demokrasi penuh," "demokrasi cacat," hingga "otoriter." Indeks ini sangat penting karena mencerminkan seberapa baik demokrasi berfungsi dalam menjaga kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan sosial, serta dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan untuk meningkatkan kualitas sistem pemerintahan dan partisipasi masyarakat.

Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan dan kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat di suatu wilayah. Indeks ini mengukur persepsi masyarakat terhadap tingkat ancaman atau bahaya yang ada di sekitarnya, baik

yang berkaitan dengan kejahatan, bencana alam, atau faktor lainnya yang memengaruhi rasa aman. Indeks Rasa Aman sering kali diperoleh melalui survei atau polling yang melibatkan masyarakat setempat, di mana mereka diminta untuk menilai sejauh mana mereka merasa aman dalam aktivitas sehari-hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks ini meliputi tingkat kriminalitas, responsivitas aparat keamanan, keberadaan fasilitas publik yang aman, serta upaya pencegahan dan penanggulangan risiko. Semakin tinggi indeks rasa aman, semakin besar keyakinan masyarakat bahwa mereka dapat hidup dalam lingkungan yang bebas dari ancaman. Sebaliknya, indeks yang rendah menunjukkan adanya ketidaknyamanan atau kecemasan yang tinggi terhadap faktor-faktor yang mengancam keselamatan, yang sering kali berkaitan dengan masalah ketertiban dan efektivitas sistem keamanan. Indeks ini menjadi penting untuk menentukan arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.

Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks Ketentraman dan Ketertiban adalah indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu daerah atau masyarakat dapat menciptakan suasana yang aman, tertib, dan damai. Indeks ini mencakup aspek-aspek terkait dengan pengendalian sosial, pengamanan, penegakan hukum, serta stabilitas politik dan sosial. Faktor yang mempengaruhi indeks ini meliputi tingkat kriminalitas, kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi aturan, serta kemampuan aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban umum. Selain itu, indeks ini juga mencerminkan tingkat toleransi sosial, penyelesaian konflik secara damai, dan keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari ketegangan sosial. Semakin tinggi indeks ketentraman dan ketertiban, semakin besar kemungkinan daerah tersebut untuk memiliki suasana yang kondusif bagi aktivitas sosial dan ekonomi. Sebaliknya, rendahnya indeks ini menunjukkan adanya gangguan dalam stabilitas sosial yang dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Indeks ini menjadi indikator penting dalam merancang kebijakan keamanan dan ketertiban di suatu wilayah, serta untuk menilai keberhasilan upaya pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang aman dan damai.

3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan Menjelaskan tentang ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antarnegara yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan.

Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing, baik di kancah nasional maupun global.

Tabel 2. 49. Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah Kota Binjai Tahun 2024

Wilayah	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM			PASAR			EKONOMI INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Kota Binjai	3,95	4,33	4,78	3,52	4,02	4,25	5,00	3,90	2,52	4,05	3,67	1,93	3,83
Sumatera Utara	4,08	3,92	3,75	4,32	3,75	3,97	1,95	2,81	3,32	4,91	3,87	3,84	3,71
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43

Pilar 1: Institusi
Pilar 2: Infrastruktur
Pilar 3: Adopsi TIK
Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro
Pilar 5: Kesehatan
Pilar 6: Keterampilan
Pilar 7: Pasar produk
Pilar 8: Pasar tenaga kerja
Pilar 9: Sistem keuangan
Pilar 10: Ukuran pasar
Pilar 11: Dinamisme bisnis
Pilar 12: Kapabilitas inovasi

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Binjai tahun 2024 menunjukkan skor keseluruhan sebesar 3,83, sedikit lebih tinggi dari rata-rata Sumatera Utara (3,71) dan di atas rata-rata nasional (3,43). Hal ini menandakan bahwa daya saing Kota Binjai tergolong cukup baik dibandingkan dengan wilayah sekitarnya maupun secara nasional. Dari sisi Lingkungan Pendukung, Kota Binjai memiliki skor relatif kuat, terutama pada Pilar 3 (Adopsi TIK) dengan skor 4,78, jauh di atas rata-rata Sumatera Utara (3,75) dan nasional (3,47). Ini mengindikasikan kemajuan signifikan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi Makro) justru berada di bawah kedua rata-rata, yaitu 3,52, yang mengisyaratkan perlunya penguatan dalam hal kestabilan ekonomi lokal.

Untuk Sumber Daya Manusia (SDM), skor tertinggi terdapat pada Pilar 7 (Pasar tenaga kerja) sebesar 5,00, yang merupakan nilai paling tinggi di antara semua pilar. Hal ini mengindikasikan ketersediaan dan kualitas tenaga kerja di Binjai cukup baik. Namun demikian, Pilar 5 (Kesehatan) dengan skor 4,02 masih bisa ditingkatkan, walaupun masih di atas rata-rata nasional. Pada aspek Pasar, kekuatan terbesar terdapat di Pilar 10 (Ukuran Pasar) dengan skor 4,05, lebih rendah dibandingkan Sumatera Utara (4,91) dan nasional (4,35). Ini mencerminkan peluang pasar yang cukup besar di Binjai. Namun, Pilar 9 (Sistem Keuangan) dengan skor 2,52 menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan masih menjadi tantangan.

Sementara itu, Ekonomi Inovasi merupakan titik lemah utama Kota Binjai. Pilar 11 (Dinamisme Bisnis) dengan skor 3,67, lebih rendah dibandingkan Sumatera Utara (3,87) dan Pilar 12 (Kapabilitas Inovasi) memiliki skor rendah 1,93, skor ini berada jauh di bawah rata-rata Sumatera Utara dan nasional, menunjukkan perlunya intervensi serius dalam mendorong ekosistem inovasi dan kewirausahaan. Kota Binjai memiliki daya saing yang cukup baik secara umum, dengan keunggulan pada aspek adopsi TIK, tenaga kerja, dan ukuran pasar. Namun, tantangan utama berada pada sektor inovasi dan sistem

keuangan, yang perlu diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan. Upaya perbaikan di sektor-sektor ini akan sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan daya saing Kota Binjai ke depannya.

Berdasarkan grafik perkembangan IDSD Kota Binjai dari tahun 2022 hingga 2024, terlihat tren peningkatan signifikan dalam skor daya saing, terutama dari tahun 2023 ke 2024. Skor IDSD Kota Binjai meningkat dari 3,38 pada 2023 menjadi 3,75 pada 2024, melampaui rata-rata nasional yang justru mengalami sedikit penurunan dari 3,44 menjadi 3,43. Sayangnya, data tahun 2022 untuk skor IDSD Kota Binjai tidak tersedia. Analisis per pilar menunjukkan bahwa peningkatan terbesar terjadi pada Pilar 9 (Sistem Keuangan), yang melonjak drastis dari 1,12 pada 2023 menjadi 2,52 pada 2024. Meski masih rendah secara absolut, peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan akses atau stabilitas sistem keuangan lokal. Demikian juga, Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi Makro) mengalami tren kenaikan stabil dari 2,29 (2022) menjadi 3,01 (2023) kemudian 3,52 (2024).

Gambar 2. 40. Perbandingan dan Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Kota Binjai

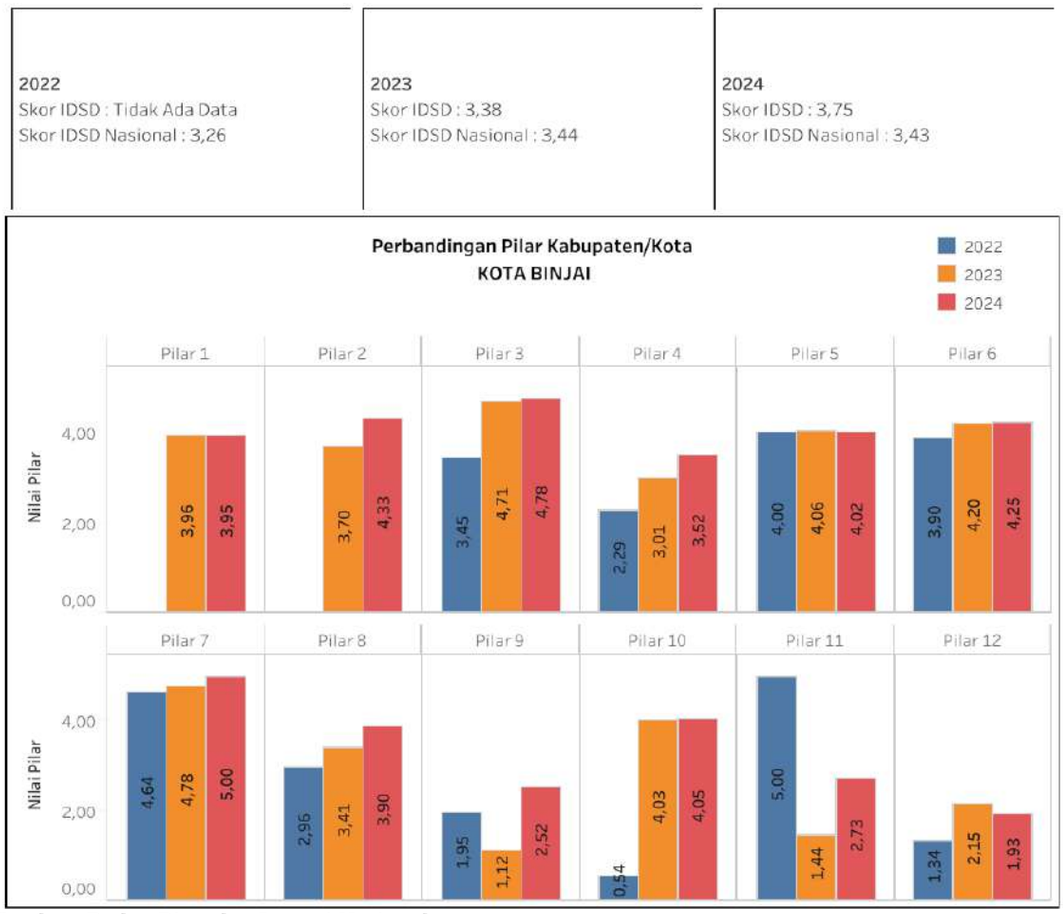

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional

Sementara itu, pilar-pilar seperti Pilar 7 (Pasar Tenaga Kerja) dan Pilar 3 (Adopsi TIK) terus menunjukkan performa unggul dan stabil tinggi. Pilar 7 naik dari 4,64 (2022) menjadi 5,00 (2024), mencerminkan kekuatan Kota Binjai dalam hal sumber daya

manusia yang kompetitif dan pasar kerja yang aktif. Pilar 3 juga menunjukkan performa yang baik dengan peningkatan dari 3,45 (2022) ke 4,78 (2024), menandakan kuatnya penetrasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Namun, terdapat beberapa pilar yang masih menjadi titik lemah dan perlu perhatian serius. Pilar 12 (Kapabilitas Inovasi) menunjukkan penurunan dari 2,15 (2023) ke 1,93 (2024), bahkan lebih rendah dari tahun 2022 (2,15), menunjukkan stagnasi bahkan kemunduran dalam kemampuan berinovasi. Hal serupa juga terjadi pada Pilar 11 (Dinamisme Bisnis) yang menurun dari 5,00 (2022) menjadi 2,73 (2024), yang bisa diartikan bahwa aktivitas dan iklim kewirausahaan mengalami penurunan drastis.

Kota Binjai menunjukkan kemajuan positif dalam daya saing daerah, terutama dari aspek pasar tenaga kerja, adopsi TIK, dan stabilitas ekonomi. Namun, tantangan utama masih terletak pada pilar-pilar inovasi, khususnya dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi. Hal ini menandakan bahwa walaupun pondasi ekonomi dan SDM cukup kuat, dorongan terhadap inovasi dan kewirausahaan masih lemah. Untuk mempertahankan dan meningkatkan skor IDSD ke depan, strategi penguatan ekosistem inovasi dan dukungan terhadap sektor UMKM serta startup lokal menjadi kunci utama.

Berdasarkan berbagai indikator terkait aspek pelayanan umum di Kota Binjai, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan publik menunjukkan arah perbaikan yang signifikan dan progresif. Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Pelayanan Publik yang mencapai kategori “A” pada tahun 2024, setelah tiga tahun berturut-turut berada pada kategori “C”. Capaian ini sejalan dengan perbaikan dalam Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meningkat dari 1,67 pada tahun 2021 menjadi 3,12 pada tahun 2024, mencerminkan akselerasi transformasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik. Peningkatan juga terlihat pada Indeks Reformasi Birokrasi yang naik dari kategori “C” menjadi “B”, menunjukkan penguatan kinerja birokrasi yang lebih efektif dan responsif. Konsistensi dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, kecuali pada tahun 2022, mengindikasikan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Di sisi lain, stabilitas dalam penegakan peraturan daerah perlu ditingkatkan karena persentase realisasinya relatif stagnan. Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Binjai yang berada di atas rata-rata nasional pada tahun 2024 turut menguatkan bahwa aspek pelayanan umum di Kota Binjai telah berada pada jalur yang tepat untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan inklusif.

2.1.5. Standar Pelayanan Minimum

Menjelaskan pencapaian Standar Pelayanan Minimum Pemerintahan Kota Binjai dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1. Urusan Pendidikan

Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan pendidikan di Kota Binjai dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang signifikan, mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar, anak usia dini, dan kesetaraan.

Indikator pencapaian untuk pelayanan PAUD, yakni partisipasi anak usia 5–6 tahun dalam pendidikan, mengalami peningkatan sangat tajam dari 41,80% pada tahun 2021 menjadi 97,20% di tahun 2022, meskipun target tahun 2022 hanya 80%. Capaian ini bahkan terus meningkat hingga mencapai 99,78% pada tahun 2024, melampaui target 100% secara nyaris sempurna. Perkembangan ini mengindikasikan keberhasilan strategi perluasan akses PAUD, seperti penguatan lembaga PAUD, peningkatan kesadaran masyarakat, serta insentif atau dukungan pemerintah daerah terhadap pendidikan anak usia dini.

Partisipasi warga negara usia 7–15 tahun dalam pelayanan pendidikan dasar menunjukkan tren yang relatif stabil. Setelah mencapai 89,90% pada tahun 2021 dan 99,29% pada tahun 2022 (jauh melampaui target 80%), terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 dengan capaian 80%, meskipun sesuai target tahun tersebut. Namun, pada tahun 2024, Kota Binjai berhasil kembali mencapai target maksimal 100%. Ini menunjukkan adanya upaya pemulihan terhadap potensi penurunan partisipasi, yang bisa jadi disebabkan oleh transisi pendidikan atau faktor sosial-ekonomi. Kinerja ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mempertahankan universalitas pendidikan dasar sesuai amanat konstitusi.

Indikator pelayanan pendidikan kesetaraan menunjukkan perkembangan yang paling mencolok. Pada tahun 2021, capaian hanya 0,74% dengan target nol, mencerminkan tahap awal identifikasi kelompok sasaran. Namun, pada tahun 2022, terjadi lonjakan besar ke angka 96,29% dengan target 80%, dan terus membaik hingga mencapai 91,07% pada tahun 2024 dengan target 100%. Ini menunjukkan keberhasilan program-program pendidikan non-formal dalam menjangkau masyarakat usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Peningkatan ini kemungkinan didukung oleh program kejar paket, sinergi dengan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), serta pendekatan yang inklusif terhadap kelompok rentan.

Tabel 2. 50. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Urusan Pendidikan

Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	41,80%	80%	97,20%	80%	93,92%	100%	99,78%
Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTS)	100%	89,90%	80%	99,29%	80%	80,00%	100%	100%
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi kesetaraan.	0%	0,74%	80%	96,29%	80%	87,14%	100%	91,07%

2. Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan kesehatan di Kota Binjai mencakup 12 jenis pelayanan dasar, meliputi kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes mellitus, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, orang terduga tuberculosis (TBC), serta orang dengan risiko terinfeksi HIV. Berdasarkan data tahun 2024, capaian kinerja menunjukkan variasi yang signifikan antarjenis pelayanan. Pelayanan kesehatan ibu hamil mencapai 92,74% dari target, sementara ibu bersalin hanya 84,17%. Pencapaian tinggi terlihat pada pelayanan bayi baru lahir (96,80%) dan TBC (100%), sedangkan capaian terendah terjadi pada pelayanan usia produktif yang hanya 26,41%.

Pelayanan kesehatan balita dan usia pendidikan dasar menunjukkan capaian di bawah target optimal. Pelayanan balita hanya mencapai 49,94%, yang berarti lebih dari separuh sasaran belum mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Demikian pula, pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar berada pada 76,77%, menandakan adanya gap sekitar 23% dari target. Tingkat pelayanan penderita hipertensi (48,09%) dan orang dengan risiko terinfeksi HIV (55,96%) juga masih rendah, mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih kuat dalam deteksi dini, edukasi, dan pengendalian penyakit tidak menular maupun penyakit menular yang berisiko tinggi.

Dari sisi dukungan sumber daya, Dinas Kesehatan Kota Binjai mengerahkan 725 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 99 Tenaga Harian Lepas (THL) untuk pencapaian SPM kesehatan. Anggaran yang dialokasikan untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada tahun 2024 sebesar Rp1,62 miliar, dengan realisasi Rp1,014 miliar atau 62,61%. Rendahnya tingkat serapan anggaran berpotensi memengaruhi optimalisasi layanan, khususnya pada jenis pelayanan yang capaian indikatornya masih rendah.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, terdapat beberapa kemajuan namun juga stagnasi pada indikator tertentu. Misalnya, pelayanan ibu hamil dan bayi baru lahir konsisten menunjukkan capaian tinggi sejak 2022, sementara pelayanan usia produktif dan hipertensi tetap menjadi tantangan. Pada tahun 2022, capaian usia produktif hanya 41,58% dan hipertensi 49,32%, yang ternyata pada 2024 masih belum mencapai 50%. Hal ini mengindikasikan bahwa hambatan utama bukan hanya terkait pendanaan, tetapi juga keterjangkauan layanan, kesadaran masyarakat, serta strategi intervensi yang digunakan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan SPM urusan kesehatan di Kota Binjai telah memenuhi target pada beberapa layanan prioritas seperti TBC dan bayi baru lahir, namun masih terdapat ketimpangan capaian antarjenis pelayanan. Kesenjangan terbesar ditemukan pada layanan usia produktif, balita, hipertensi, dan risiko HIV, yang membutuhkan strategi khusus untuk meningkatkan cakupan, seperti perluasan jangkauan layanan berbasis komunitas, penguatan skrining lapangan, dan kampanye kesehatan yang lebih intensif.

Dengan memperkuat integrasi program, optimalisasi anggaran, serta peningkatan partisipasi masyarakat, diharapkan capaian SPM di bidang kesehatan dapat lebih merata dan mendekati target 100% di seluruh indikator.

Tabel 2. 51. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Urusan Kesehatan

Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%	82,37%	80%	86,08%	80%	94,29%	100%	92,74%
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan	100%	88,20%	80%	83,20%	80%	94,77%	100%	84,17%
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir umur 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%	94,77	80%	97,70%	80%	99,31%	100%	96,80%
Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang berumur 0 – 59 bulan yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	53,64%	80%	75,93%	80%	62,43%	100%	49,94
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatakan pelayanan kesehatan standar	100%	0%	80%	99,26%	80%	96,51%	100%	76,77%
Pelayanan kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang berusia 15 – 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%	1,1%	80%	58,37%	80%	45,12%	100%	26,41%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%	0%	80%	95,70%	80%	87,57%	100%	92,61%
Pelayanan Kesehatan	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita	100%	3,5	80%	49,32%	80%	48.71%	100%	48,09%

Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Penderita Hipertensi	hipertensi yang mendapatkan pelayanan standar								
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan standar	100%	6,62%	80%	100%	80%	90,35%	100%	76,91%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%	34,50%	80%	63,37%	80%	70,44%	100%	62,35%
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%	24,76%	80%	91,87%	80%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga beresiko terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%	5,2%	80%	51,82%	80%	81,26%	100%	55,96%

3. Urusan Sosial

SPM urusan sosial di Kota Binjai mencakup lima jenis pelayanan dasar, yaitu rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial (gelandangan dan pengemis), serta perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana. Secara keseluruhan, target capaian SPM yang ditetapkan daerah pada kelima pelayanan ini adalah 100% setiap tahunnya. Data tahun 2024 menunjukkan seluruh jenis pelayanan dasar mencapai rasio pelayanan 100%, dengan jumlah penerima layanan sesuai target. Namun, meskipun capaian kuantitatif tercapai, data historis tahun 2022 dan 2023 memperlihatkan adanya variasi dalam pencapaian mutu layanan minimal, khususnya pada indikator layanan penunjang seperti bimbingan sosial, pemberian dokumen kependudukan, dan pelayanan reunifikasi keluarga.

Pada tahun 2024, jumlah penerima layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas tercatat 0 orang, anak terlantar 1 orang, lanjut usia terlantar 64 orang, tuna sosial 19 orang, dan korban bencana alam 2.303 orang, dengan seluruh capaian mencapai 100%. Dibandingkan tahun 2023, capaian kuantitas memang konsisten tinggi, namun mutu layanan minimal pada beberapa sub-indikator masih nihil, seperti pelayanan reunifikasi keluarga, layanan rujukan, serta akses pendidikan bagi penerima manfaat. Pada tahun 2022, capaian mutu layanan minimal relatif lebih merata, dengan banyak indikator penunjang mencapai 100%, menunjukkan bahwa penurunan ini lebih bersifat kinerja teknis daripada kendala pada akses penerima layanan.

Dukungan sumber daya manusia untuk urusan sosial tahun 2024 terdiri dari 25 aparatur sipil negara dan 32 tenaga harian lepas. Anggaran program rehabilitasi sosial dialokasikan sebesar Rp639,64 juta dengan realisasi Rp416,67 juta atau 65,14%. Realisasi yang belum optimal ini mengindikasikan adanya ruang perbaikan dalam efisiensi pelaksanaan program. Tren historis menunjukkan bahwa meskipun jumlah SDM relatif stabil, kinerja mutu layanan minimal di tahun 2023 lebih rendah, yang dapat disebabkan oleh keterbatasan realisasi anggaran atau fokus pelaksanaan yang belum merata ke semua indikator pelayanan.

Secara umum, permasalahan utama dalam penerapan SPM urusan sosial mencakup: (a) belum optimalnya realisasi anggaran terhadap target yang direncanakan, (b) capaian mutu layanan minimal yang tidak konsisten antar-tahun, khususnya pada indikator layanan pendukung, dan (c) kemungkinan belum terintegrasinya pencatatan layanan penunjang dalam pelaporan resmi. Jika dibandingkan, tahun 2022 memperlihatkan pola capaian indikator yang lengkap, sementara tahun 2023 menunjukkan beberapa indikator yang sama sekali tidak terisi, meskipun secara kuantitas target penerima layanan dasar terpenuhi.

Berdasarkan diagnosis di atas, beberapa langkah perbaikan dapat diarahkan pada: (1) meningkatkan konsistensi pelaksanaan seluruh sub-indikator mutu layanan minimal, termasuk aspek non-fisik seperti bimbingan sosial dan reunifikasi keluarga; (2) optimalisasi realisasi anggaran agar seluruh program dan sub-kegiatan dapat terlaksana secara proporsional; (3)

memperkuat kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pencatatan data SPM, sehingga setiap indikator terlaporkan secara utuh; dan (4) mengintegrasikan sistem monitoring berbasis digital untuk meminimalkan kehilangan data layanan penunjang. Dengan langkah-langkah ini, capaian SPM urusan sosial diharapkan tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga bermutu dari segi kualitas layanan bagi masyarakat penerima manfaat.

Tabel 2. 52. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Urusan Sosial

Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	0%	80%	100%	80%	80%	100%	100%
Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	0%	80%	100%	80%	82%	100%	100%
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	0%	80%	89,79%	80%	81,82%	100%	100%
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	0%	80%	100%	80%	82%	100%	100%
Penanggulangan tanggap,darurat terhadap korban bencana alam	Jumlah Warga Negara korban bencana alam yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	80%	87,27%	80%	84%	100%	100%

4. Urusan Pekerjaan Umum

SPM Urusan Pekerjaan Umum di Kota Binjai meliputi dua jenis pelayanan dasar, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Kedua pelayanan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan akses air bersih dan pengelolaan limbah yang memadai bagi masyarakat. Target capaian yang ditetapkan oleh daerah untuk kedua program ini adalah 100%, dengan implementasi melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah .

Pada tahun 2024, pelayanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berhasil menjangkau 3.568 dari 4.000 warga yang berhak, dengan capaian 89,20%. Sementara itu, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik mencapai target penuh, melayani 2.244 warga atau 100% dari sasaran . Capaian ini menunjukkan bahwa sektor air limbah telah berjalan optimal, sementara sektor air minum masih memerlukan peningkatan, meskipun terdapat perkembangan signifikan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya (2022–2023) yang berdasarkan laporan indeks pencapaian SPM masih berkisar pada 72–96%.

Dalam pelaksanaan program, dukungan anggaran pada tahun 2024 untuk penyediaan air minum mencapai Rp9,39 miliar dengan realisasi 98,19%, sedangkan pengelolaan air limbah mendapat alokasi Rp5,88 miliar dengan realisasi 97,70%. Tingginya tingkat serapan anggaran menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan SPM di urusan pekerjaan umum. Dari sisi sumber daya manusia, terdapat 51 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 49 Tenaga Harian Lepas yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program ini .

Meskipun pengelolaan air limbah domestik telah mencapai target penuh, capaian pemenuhan kebutuhan pokok air minum masih di bawah target 100%. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan cakupan jaringan perpipaan, kualitas air yang belum memenuhi standar di semua titik layanan, atau kendala teknis lain seperti distribusi yang tidak merata. Data tahun 2022 dan 2023 juga menunjukkan bahwa aspek mutu layanan dasar, khususnya kuantitas dan kualitas air pada jaringan rumah tangga, belum sepenuhnya optimal.

Untuk meningkatkan pencapaian target SPM urusan pekerjaan umum, perlu dilakukan percepatan perluasan jaringan perpipaan air minum, perbaikan kualitas air, dan optimalisasi distribusi ke wilayah yang belum terlayani. Selain itu, peningkatan kapasitas teknis dan manajerial petugas, pemeliharaan infrastruktur secara berkala, serta penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data real-time juga direkomendasikan agar potensi permasalahan dapat diidentifikasi lebih cepat dan respons yang diberikan lebih tepat sasaran.

Tabel 2. 53. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	100%	30%	80%	72,12%	80%	96,75%	100%	89,20%
Penyediaan Pelayanan Pengolahan air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pengolahan air Limbah Domestik	100%	10%	80%	82,38%	80%	54%	100%	100%

5. Urusan Perumahan dan Permukiman Rakyat

Urusan pekerjaan umum pada penerapan SPM di Kota Binjai mencakup dua jenis pelayanan dasar, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Kedua layanan ini menjadi indikator penting dalam menjamin akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang memadai. Target pencapaian yang ditetapkan oleh daerah adalah 100% untuk kedua jenis pelayanan tersebut, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar warga atas air bersih dan pengelolaan limbah yang layak.

Berdasarkan realisasi tahun 2024, pelayanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari menjangkau 3.568 orang dari total 4.000 orang yang berhak mendapatkan layanan, dengan tingkat capaian 89,20%. Sementara itu, pelayanan pengolahan air limbah domestik berhasil mencapai 100% atau 2.244 orang yang terlayani. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan air limbah telah memenuhi target, penyediaan air minum masih menghadapi gap sebesar 10,8% dari target, yang perlu dianalisis lebih lanjut penyebabnya.

Dari sisi dukungan anggaran, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dialokasikan sebesar Rp9,39 miliar dengan realisasi 98,19%, sedangkan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah mendapatkan alokasi Rp5,88 miliar dengan realisasi 97,70%. Tingginya persentase serapan anggaran menunjukkan bahwa secara administratif dan teknis, program ini berjalan efektif. Dukungan sumber daya manusia mencakup 51 aparatur sipil negara serta 49 tenaga harian lepas, yang bertugas melaksanakan program dan kegiatan.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021, terlihat perbedaan signifikan dalam jumlah penerima layanan. Tahun 2021 mencatat capaian hanya 30% untuk penyediaan air minum dan 10% untuk pengolahan air limbah, jauh di bawah target 100%. Peningkatan yang terjadi hingga 2024 menandakan adanya perbaikan strategi, optimalisasi anggaran, serta kemungkinan adanya perbaikan infrastruktur yang signifikan. Meski demikian, capaian air minum belum sepenuhnya menyentuh target, sehingga evaluasi teknis distribusi dan konektivitas layanan menjadi hal penting.

Meskipun kinerja SPM urusan pekerjaan umum tahun 2024 menunjukkan perkembangan positif, terdapat tantangan berupa kesenjangan layanan air minum sebesar 10,8%. Potensi penyebabnya antara lain keterbatasan kapasitas produksi dan distribusi air, hambatan teknis di lapangan, atau kendala administratif dalam pendataan penerima layanan. Rekomendasi perbaikan meliputi penambahan kapasitas instalasi air minum, perencanaan jaringan distribusi yang lebih merata, pelatihan SDM teknis, serta monitoring berkala melalui sistem informasi terintegrasi. Dengan langkah-langkah tersebut, target capaian 100% diharapkan dapat direalisasikan secara konsisten pada periode berikutnya.

Tabel 2. 54. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Urusan Perumahan dan Permukiman Rakyat

Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	0%	100	80%	80%	80%	100%	89,20%
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	0%	100	0%	80%	100%	100%	100%

6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Pekerjaan Umum di Kota Binjai mencakup dua jenis pelayanan dasar utama, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari serta penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Kedua layanan ini bersifat esensial bagi pemenuhan hak dasar masyarakat atas air bersih dan sanitasi layak. Target capaian SPM yang ditetapkan daerah untuk kedua layanan tersebut pada tahun 2024 adalah 100%, sebagaimana tercermin dalam program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Pada tahun 2024, jumlah warga negara yang berhak mendapatkan layanan air minum tercatat 4.000 orang, dengan 3.568 orang telah terlayani, sehingga capaian berada pada level 89,20%, masih di bawah target 100%. Sementara itu, untuk pelayanan pengolahan air limbah domestik, seluruh 2.244 orang yang berhak telah mendapatkan layanan, dengan capaian 100%. Meskipun target belum sepenuhnya tercapai untuk air minum, capaian pada layanan pengolahan limbah menunjukkan kinerja yang optimal.

Pendanaan untuk mendukung penerapan SPM ini dialokasikan melalui dua program utama. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menerima alokasi sebesar Rp9.390.860.000, dengan realisasi Rp9.220.981.374 atau 98,19% dari pagu. Sementara itu, program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah mendapat alokasi Rp5.884.557.000, dengan realisasi Rp5.749.062.015 atau 97,70%. Tingkat serapan anggaran yang tinggi ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung operasional dan pemeliharaan layanan.

Pelaksanaan SPM urusan Pekerjaan Umum didukung oleh 51 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 49 Tenaga Harian Lepas (THL) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Binjai. Ketersediaan personil ini penting untuk memastikan keberlanjutan operasional, pemeliharaan infrastruktur, dan pelayanan masyarakat. Namun, jika dibandingkan dengan skala kebutuhan dan target capaian, khususnya di sektor air minum, optimalisasi kinerja dan distribusi tenaga kerja mungkin masih perlu diperkuat.

Dari sisi target, capaian pelayanan pengolahan air limbah sudah memenuhi 100%, tetapi pemenuhan kebutuhan pokok air minum masih defisit 10,8%. Potensi penyebabnya antara lain keterbatasan cakupan jaringan distribusi, kapasitas instalasi pengolahan air yang belum mencukupi, atau hambatan teknis di lapangan. Ke depan, diperlukan strategi peningkatan kapasitas produksi dan distribusi air bersih, termasuk pemeliharaan berkala infrastruktur, optimalisasi SDM teknis, serta penyusunan rencana pengembangan jaringan yang terintegrasi dengan proyeksi kebutuhan penduduk.

Tabel 2. 55. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	80,3%	80%	79,57%	80%	88,10%	100%	100%
Pelayanan Informasi Rawat Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	80,3%	80%	80%	80%	85%	100%	100%
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	80%	90%	80%	95%	100%	100%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	80%	4,97%	80%	96%	100%	100%
pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	80%	100%	80%	91,67%	100%	100%

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Kemampuan Kota Binjai dalam mewujudkan kesejahteraan warganya melalui peningkatan kualitas hidup yang adil dan berkelanjutan sangat bergantung pada kapasitas fiskalnya. Kapasitas fiskal ini dapat dipantau melalui perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Binjai. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Komponen ini dapat dibagi lebih lanjut menjadi dua bagian, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan mencakup pos pendapatan dan penerimaan pembiayaan, sementara pengeluaran meliputi belanja dan pengeluaran pembiayaan. Dengan memahami dan memantau struktur dan perkembangan APBD, maka Pemerintah Kota Binjai dapat lebih efektif mengelola sumber daya fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Gambaran umum kinerja keuangan daerah Kota Binjai ditampilkan melalui realisasi anggaran dan performa keuangan untuk periode tahun anggaran 2019 hingga 2023, yang berfungsi sebagai dasar penentuan rata-rata pertumbuhan

2.1.1. Realisasi APBD Kota Binjai

Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dengan cara membandingkan antara target yang ditetapkan di dalam APBD dengan realisasinya. Perbandingan yang dilakukan menyangkut komponen pembentuk APBD yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaannya. Perbandingan antara target dengan realisasi ini disebut pula dengan rasio efektivitas. Semakin besar nilai rasio, maka dapat dipandang semakin baik kinerjanya. Nilai yang melewati 100% bermakna realisasi melampaui target yang telah ditetapkan.

1. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pendapatan Daerah merupakan semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kinerja Pendapatan Daerah Kota Binjai dapat dilihat dari berbagai sisi, diantaranya dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasinya. Kinerja yang menggambarkan perbandingan antara target dan realisasinya kerap diistilahkan sebagai rasio efektivitas. Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 56. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Binjai

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	+/-
2020	984.656.093.498	881.734.638.293	89,55%	-102.921.455.205
2021	1.013.247.186.180	869.007.203.202	85,76%	-144.239.982.978
2022	1.040.618.093.303	893.939.087.092	85,90%	-146.679.006.211
2023	1.035.369.934.160	919.227.814.704	88,78%	-116.142.119.456
2024	1.029.420.708.667	966.012.562.697	93,84%	-63.408.145.970

Sumber: BPKPAD Kota Binjai, diolah

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Binjai sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 belum pernah menyentuh angka 100%, yang berarti bahwa selama periode tersebut, realisasinya belum pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 diketahui sebesar 89,55%, dimana besaran realisasi Pendapatan Daerah di tahun tersebut sebesar Rp.881,73 miliar, sementara targetnya adalah Rp.984,65 miliar. Ada selisih sebesar Rp.102,92 miliar yang tidak terpenuhi pada sisi realisasinya. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Binjai mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 93,84%, dengan selisih antara target dengan realisasinya sebesar Rp. 63,41 miliar.

Tabel 2. 57. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Binjai

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Daerah Tahun 2020			
a. PAD	184.836.466.442	112.273.586.102	60,74%
b. Pendapatan Transfer	713.639.673.056	697.970.189.195	97,80%
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	94.143.832.947	39.746.016.974	42,22%
Jumlah	**992.619.972.445**	**849.989.792.271**	**85,63%**
Pendapatan Daerah Tahun 2021			
a. PAD	218.636.775.228	91.986.343.406	42,07%
b. Pendapatan Transfer	727.068.293.337	736.781.460.929	101,34%
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	85.941.936.755	30.192.987.212	35,13%
Jumlah	**1.031.647.005.320**	**858.960.791.547**	**83,26%**
Pendapatan Daerah Tahun 2022			
a. PAD	720.341.245.830	70.711.586.870	9,82%
b. Pendapatan Transfer	776.683.990.365	764.888.950.164	98,48%
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	175.876.108.092	107.706.173.122	61,24%
Jumlah	**1.672.901.344.287**	**943.306.710.156**	**56,39%**
Pendapatan Daerah Tahun 2023			
a. PAD	230.858.054.625	113.119.618.445	49,00%
b. Pendapatan Transfer	790.511.879.535	794.276.672.477	100,48%
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	14.000.000.000	11.831.523.782	84,51%
Jumlah	**1.035.369.934.160**	**919.227.814.704**	**88,78%**
Pendapatan Daerah Tahun 2024			
a. PAD	186.531.948.132	116.272.682.501	62,33%
b. Pendapatan Transfer	832.888.760.535	836.629.757.146	100,45%
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	10.000.000.000	13.110.123.050	131,10%
Jumlah	**1.029.420.708.667**	**966.012.562.697**	**93,84%**

Sumber: BPKPAD Kota Binjai, diolah

Berdasarkan data kinerja pendapatan daerah Kota Binjai selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang cukup fluktuatif, namun dengan kecenderungan perbaikan pada capaian realisasi terhadap target. Pada tahun 2020 hingga 2022, persentase

realisasi total pendapatan daerah belum mencapai 90%, dengan capaian terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 56,39%, yang terutama disebabkan oleh sangat rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 9,82%. Sementara itu, Pendapatan Transfer secara konsisten menunjukkan capaian di atas 97%, bahkan melampaui target pada beberapa tahun seperti 2021 dan 2023. Kinerja PAD mulai menunjukkan perbaikan pada tahun 2023 dan 2024 dengan realisasi masing-masing sebesar 49,00% dan 62,33%, meskipun masih di bawah target yang ditetapkan. Secara umum, tahun 2024 mencatatkan capaian realisasi pendapatan tertinggi selama periode lima tahun terakhir, yaitu sebesar 93,84%. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, terutama dari sisi optimalisasi transfer pusat dan peningkatan kinerja komponen pendapatan lain-lain yang sah. Meskipun demikian, penguatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan PAD masih menjadi tantangan utama yang memerlukan perhatian strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan keuangan daerah ke depan.

Komponen pembiayaan terdiri dari dua bagian utama, yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Opsi yang seing digunakan untuk menutup defisit anggaran yaitu melalui Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun anggaran sebelumnya, yang tercatat dalam pos penerimaan pembiayaan. Beberapa komponen lain yang dapat mengisi pos penerimaan pembiaya yaitu pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, penerimaan kembali pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Penjumlahan dari pendapatan total dengan penerimaan pembiayaan disebut juga total penerimaan daerah. Dilihat dari realisasinya pada tahun 2020 dan 2021, total penerimaan daerah mengalami penurunan, hal ini sejalan dengan kondisi pandemi yang mengganggu aktivitas perekonomian dan berimbas kepada penerimaan daerah Kota Binjai. Penerimaan total Kota Binjai pada tahun tersebut masing-masing sebesar Rp. 890,40 miliar lalu turun kembali menjadi Rp. 878,42 miliar. Pada tahun 2022, total penerimaan daerah Kota Binjai mengalami peningkatan, menjadi Rp. 897,78 miliar. Peningkatan ini disumbangkan dari meningkatnya total pendapatan dari Rp. 869 miliar menjadi Rp. 893,94 miliar. Sedangkan penerimaan pembiayaan pada tahun tersebut mengalami penurunan. Penerimaan daerah kembali meningkat di tahun 2023, menjadi Rp. 925,58 miliar, sejalan dengan meningkatnya total pendapatan dan penerimaan pembiayaannya. Tahun 2024 total penerimaan Kota Binjai menjadi Rp 970.41 milyar yang terdiri dari Rp 966,01 milyar Pendapatan Daerah dan Rp 4,39 merupakan Penerimaan Pembiayaan.

Tabel 2. 58. Realisasi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Total Penerimaan Daerah Kota Binjai

Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Total Pendapatan Daerah	**881.734.638.293**	**869.007.203.202**	**893.939.087.092**	**919.227.814.704**	**966.012.562.697**
Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan	**8.660.624.998**	**9.415.476.485**	**3.834.008.210**	**6.352.383.258**	**4.392.484.407**
Penggunaan SiLPA	8.660.624.998	9.415.476.485	3.834.008.210	6.352.383.258	4.392.484.407
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	
Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-	
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	
Total Penerimaan Daerah	**890.395.263.290**	**878.422.679.687**	**897.773.095.301**	**925.580.197.962**	**970.405.047.104**

Sumber: BPKPAD Kota Binjai, diolah

2. Realisasi Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah yang dimaksud meliputi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan. Realisasi belanja daerah yang lebih besar dari pendapatannya, akan menghasilkan defisit anggaran. Defisit ini kemudian ditutup dari komponen pengeluaran pembiayaan, yang jika menghasilkan nilai selisih yang positif, maka akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan (SILPA), dan pada APBD berikutnya dikategorikan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Analisis mengenai belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan Kota Binjai selama lima tahun terakhir, beserta proyeksi untuk lima tahun mendatang, akan disajikan dalam sub bahasan yang berbeda.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dijelaskan bahwa Belanja Daerah mencakup semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah serta pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 diklasifikasikan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan klasifikasi ini, penganggaran ke depan akan memiliki klasifikasi yang sama dengan pelaporannya, sehingga memungkinkan perbandingan dan peningkatan kualitas informasi yang disajikan.

Berdasarkan data Realisasi Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa struktur belanja daerah didominasi oleh belanja operasi yang terus mengalami peningkatan signifikan dari Rp750,46 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp848,78 miliar pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan prioritas Pemerintah Kota Binjai dalam pemenuhan kebutuhan rutin dan operasional pemerintahan, termasuk belanja pegawai serta barang dan jasa. Di sisi lain, realisasi belanja modal menunjukkan fluktuasi dari Rp102,21 miliar pada tahun 2020, meningkat menjadi Rp134,55 miliar pada tahun 2021, namun kemudian mengalami penurunan hingga mencapai Rp81,84 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap alokasi belanja untuk pembangunan infrastruktur dan aset strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Sementara itu, belanja tak terduga yang sebelumnya tidak terealisasi pada tahun 2020 hingga 2021, mulai tercatat pada tahun 2022 dan 2024 masing-masing sebesar Rp301,8 juta dan Rp200 juta, yang mencerminkan kesiapan fiskal terhadap kebutuhan mendesak dan kondisi darurat. Secara keseluruhan, total belanja daerah menunjukkan tren kenaikan dari Rp879,25 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp930,82 miliar pada tahun 2024, yang mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Binjai

dalam menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 2. 59. Realisasi Belanja Daerah Kota Binjai Tahun

Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
BELANJA DAERAH					
Belanja Operasi	**750.457.716.902**	**738.823.635.638**	**781.881.787.737**	**790.902.077.346**	**848.783.654.059**
Belanja Pegawai	444.008.991.166	449.459.086.864	451.497.920.306	456.750.690.078	
Belanja Barang dan Jasa	276.378.621.836	282.578.702.472	307.871.561.952	299.065.018.749	
Belanja Bunga	-	-	-	-	
Belanja Subsidi	263.734.200	-	-	-	
Belanja Hibah	29.806.369.700	6.785.846.302	22.512.305.479	35.086.368.519	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	
Belanja Modal	**102.215.809.259**	**134.550.395.878**	**107.706.173.122**	**128.718.974.876**	**81.838.359.230**
Belanja Tanah	1.398.532.200	313.706.053	6.755.279.000	-	
Belanja Peralatan dan Mesin	43.542.811.800	28.904.358.048	55.947.012.725	41.379.094.769	
Belanja Gedung dan Bangunan	18.785.371.151	58.618.994.718	16.867.150.341	44.063.366.689	
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	19.312.299.618	39.845.043.888	23.064.643.821	37.719.486.927	
Belanja Aset Tetap Lainnya	19.176.794.491	6.868.293.171	5.072.087.235	5.557.026.491	
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	222.018.000	
Belanja Tak Terduga	**26.571.642.487**	**-**	**301.799.994**	**-**	**200.000.000**
Belanja Tak Terduga	26.571.642.487	-	301.799.994	-	
Transfer	-	-	-	-	
Transfer Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	
Transfer Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	
TOTAL BELANJA DAERAH	**879.245.168.648**	**873.374.031.515**	**889.889.760.853**	**919.843.070.222**	**930.822.013.289**

Sumber: BPKPAD Kota Binjai, diolah

Neraca Keuangan Daerah

Neraca Daerah adalah salah satu laporan keuangan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya untuk memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Neraca Daerah menyajikan informasi tentang posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal laporan dikeluarkan. Informasi ini memberikan gambaran kepada manajemen pemerintah daerah tentang likuiditas keuangan dan fleksibilitas keuangan, serta merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan mempertanggungjawabkan posisi kekayaan daerah. Menurut ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, analisis kinerja Neraca Daerah yang diperlukan untuk merumuskan perencanaan keuangan daerah meliputi analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas.

Berdasarkan Perkembangan Neraca Daerah Pemerintah Kota Binjai Tahun 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan daerah menunjukkan pertumbuhan positif yang ditandai dengan peningkatan total aset dari Rp1,32 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,42 triliun pada tahun 2024. Komponen utama aset didominasi oleh aset tetap yang konsisten meningkat, menandakan adanya penambahan nilai aset-aset infrastruktur dan barang milik daerah yang strategis. Aset lancar dan investasi jangka panjang menunjukkan kestabilan nilai dalam dua tahun terakhir, sedangkan aset lainnya mengalami peningkatan signifikan dari Rp18,9 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp38,9 miliar pada tahun 2024. Di sisi kewajiban, seluruh komponen terdiri dari kewajiban jangka pendek tanpa adanya kewajiban jangka panjang, dengan nilai tertinggi tercatat pada tahun 2023 sebesar Rp75,8 miliar dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi Rp72,9 miliar. Hal ini menunjukkan manajemen kewajiban yang relatif terkendali. Ekuitas daerah juga mengalami tren peningkatan, dari Rp1,30 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,34 triliun pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan nilai bersih yang dimiliki Pemerintah Kota Binjai. Secara keseluruhan, neraca keuangan Pemerintah Kota Binjai menggambarkan kondisi fiskal yang stabil dan positif, dengan penguatan struktur aset serta ekuitas yang berkelanjutan.

Tabel 2. 60. Perkembangan Neraca Daerah Pemerintah Kota Binjai dan Rata-rata Pertumbuhannya

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
ASET					
A. Aset Lancar	69.873.497.323,09	85.437.679.165,08	90.143.860.396,17	90.506.906.051,31	90.506.906.051,31
B. Investasi Jangka Panjang	27.554.467.171,89	27.908.999.910,98	27.766.255.152,50	28.684.780.748,03	28.684.780.748,03
C. Aset Tetap	1.173.187.194.374,97	1.205.456.168.658,95	1.231.987.625.627,20	1.262.418.736.267,05	1.344.257.095.497,05
D. Aset Lainnya	49.739.094.610,72	18.937.392.363,27	22.147.202.644,74	38.983.988.773,43	38.983.988.773,43
JUMLAH ASET	**1.320.354.253.480,67**	**1.337.740.240.098,28**	**1.372.044.943.820,61**	**1.420.594.411.839,82**	**1.502.432.771.069,82**
KEWAJIBAN					
A. Kewajiban Jangka Pendek	14.923.656.164,14	38.225.909.482,76	71.072.279.210,47	75.800.866.352,39	72.894.481.086,39
B. Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	**14.923.656.164,14**	**38.225.909.482,76**	**71.072.279.210,47**	**75.800.866.352,39**	**72.894.481.086,39**
EKUITAS					
Ekuitas	1.305.430.597.316,53	1.299.514.330.615,52	1.300.972.664.610,14	1.344.793.545.487,43	1.344.793.545.487,43
JUMLAH EKUITAS	**1.305.430.597.316,53**	**1.299.514.330.615,52**	**1.300.972.664.610,14**	**1.344.793.545.487,43**	**1.344.793.545.487,43**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1.320.354.253.480,67**	**1.337.740.240.098,28**	**1.372.044.943.820,61**	**1.420.594.411.839,82**	**1.555.193.581.307,47**

Sumber: BPKPAD Kota Binjai, diolah

Tabel 2. 61. Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Binjai

Uraian	2020 Rp	2021 Rp	2022 Rp	2023 Rp	2024 Rp
Rasio Likuiditas					
Aset Lancar	69.873.497.323	85.437.679.165	90.143.860.396	90.506.906.051	90.506.906.051
Persediaan	10.130.313.118	13.317.857.228	10.757.898.520	9.478.746.667	9.478.746.667
Kewajiban Jangka Pendek	14.923.656.164	38.225.909.483	71.072.279.210	75.800.866.352	87.645.549.938
Rasio Lancar	**4,68**	**2,24**	**1,27**	**1,19**	**1,03**
Rasio Quick	**4,00**	**1,89**	**1,12**	**1,07**	**0,92**
Rasio Solvabilitas					
Total Aset Lainnya	74.227.522.990	18.937.392.363	22.147.202.645	38.983.988.773	36.374.157.381
Total Hutang	14.923.656.164	38.225.909.483	71.072.279.210	75.800.866.352	87.645.549.938
Total Ekuitas	1.305.430.597.317	1.299.514.330.616	1.300.972.664.610	1.344.793.545.487	1.325.050.877.768
DAR	**0,20**	**2,02**	**3,21**	**1,94**	**2,41**
DER	**0,01**	**0,03**	**0,05**	**0,06**	**0,07**

Sumber: BPKPAD Kota Binjai, diolah

Berdasarkan hasil analisis terhadap rasio keuangan Pemerintah Kota Binjai selama periode tahun 2020 hingga 2024, terdapat tren yang menunjukkan penurunan kapasitas likuiditas daerah. Rasio lancar mengalami penurunan signifikan dari 4,68 pada tahun 2020 menjadi 1,03 pada tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar semakin melemah. Penurunan serupa juga tercermin pada rasio quick, yang turun dari 4,00 pada tahun 2020 menjadi 0,92 pada tahun 2024, menunjukkan bahwa likuiditas tanpa memperhitungkan persediaan juga berada dalam kondisi yang semakin terbatas. Dari sisi solvabilitas, rasio Debt to Asset Ratio (DAR) meningkat dari 0,20 menjadi 2,41 dalam lima tahun terakhir, yang mengindikasikan peningkatan proporsi kewajiban terhadap total aset dan menunjukkan kecenderungan penggunaan utang yang lebih besar dalam struktur pembiayaan. Sementara itu, rasio Debt to Equity Ratio (DER) juga mengalami kenaikan dari 0,01 menjadi 0,07 pada periode yang sama, walaupun masih dalam batas aman, namun mengindikasikan peningkatan tekanan terhadap ekuitas daerah akibat kewajiban yang terus meningkat. Temuan ini menuntut perhatian khusus dalam pengelolaan risiko fiskal dan penguatan kapasitas fiskal daerah ke depan.

2.2.2. Proyeksi Keuangan Kota Binjai

Proyeksi keuangan Kota Binjai Tahun 2025-2030 yang terdiri dari pendapatan daerah dan belanja daerah disusun berdasarkan kinerja realisais keuangan Tahun 2020-2024.

1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Berdasarkan proyeksi pendapatan daerah Pemerintah Kota Binjai tahun 2025 hingga 2030, total pendapatan daerah Pemerintah Kota Binjai diproyeksikan mengalami tren peningkatan dari Rp997,84 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp1.167,09 triliun pada tahun 2030. Rata-rata pertumbuhan tahunan dari keseluruhan pendapatan daerah dalam kurun waktu tersebut mencapai 3,20%. Capaian ini mencerminkan adanya optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kapasitas fiskal yang diharapkan mampu mendukung keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik.

Pendapatan Asli Daerah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, dari Rp119,94 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp134,13 miliar pada tahun 2030. Rata-rata pertumbuhan PAD per tahun mencapai 2,28%, yang terutama berasal dari kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Meskipun pertumbuhannya tergolong moderat, kemandirian fiskal daerah tetap perlu ditingkatkan dengan optimalisasi potensi pendapatan lokal dan perbaikan sistem intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak dan retribusi.

Pendapatan transfer masih menjadi sumber utama pendanaan Pemerintah Kota Binjai, dengan nilai yang meningkat dari Rp864,53 miliar pada tahun 2025 menjadi

Rp1.019,02 triliun pada tahun 2030. Komponen ini mencatat rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 3,34%, yang sebagian besar didukung oleh dana transfer dari pemerintah pusat, seperti dana perimbangan dan dana insentif daerah. Kinerja pendapatan transfer menunjukkan adanya ketergantungan yang masih cukup tinggi terhadap pemerintah pusat, sehingga penguatan kapasitas fiskal daerah tetap menjadi perhatian strategis.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga menunjukkan tren positif, dari Rp13,37 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp14,76 miliar pada tahun 2030. Rata-rata pertumbuhan tahunannya tercatat sebesar 1,96%. Meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan relatif kecil, peningkatan yang terjadi mencerminkan pengelolaan yang lebih baik terhadap pendapatan dari sumber-sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Optimalisasi pengelolaan dan transparansi atas pendapatan kategori ini perlu terus ditingkatkan guna mendukung keberlanjutan fiskal daerah.

Tabel 2. 62. Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025-2030

Uraian	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)
Pendapatan Daerah	**997.837.758.225**	**1.029.565.243.194**	**1.062.395.835.498**	**1.096.369.142.506**	**1.131.526.225.762**	**1.167.909.655.587**
Pendapatan Asli Daerah	**119.935.880.415**	**122.542.057.772**	**125.258.931.635**	**128.091.858.988**	**131.046.461.383**	**134.128.638.080**
Pajak Daerah	72.983.233.334	73.348.149.501	73.714.890.249	74.083.464.700	74.453.882.023	74.826.151.433
Retribusi Daerah	5.318.558.175	5.478.114.921	5.642.458.368	5.811.732.119	5.986.084.083	6.165.666.605
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.523.054.145	4.749.206.852	4.986.667.195	5.236.000.554	5.497.800.582	5.772.690.611
Lain-Lain PAD yang Sah	37.111.034.760	38.966.586.498	40.914.915.823	42.960.661.615	45.108.694.695	47.364.129.430
Pendapatan Transfer	**864.529.552.299**	**893.383.413.400**	**923.224.336.402**	**954.086.464.707**	**986.005.129.192**	**1.019.016.889.616**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**806.019.510.076**	**833.703.170.333**	**862.350.488.473**	**891.995.139.820**	**922.671.977.807**	**954.417.075.204**
Dana Perimbangan	784.938.606.256	812.411.457.475	840.845.858.486	870.275.463.533	900.735.104.757	932.260.833.424
Dana Insentif Daerah	21.080.903.820	21.291.712.858	21.504.629.987	21.719.676.287	21.936.873.050	22.156.241.780
Transfer Pemerintah Provinsi	**58.510.042.223**	**59.680.243.067**	**60.873.847.929**	**62.091.324.887**	**63.333.151.385**	**64.599.814.413**
Pendapatan Bagi Hasil	55.624.756.242	56.737.251.367	57.871.996.394	59.029.436.322	60.210.025.048	61.414.225.549
Bantuan Keuangan	2.885.285.981	2.942.991.701	3.001.851.535	3.061.888.565	3.123.126.337	3.185.588.863
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**13.372.325.511**	**13.639.772.021**	**13.912.567.462**	**14.190.818.811**	**14.474.635.187**	**14.764.127.891**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.372.325.511	13.639.772.021	13.912.567.462	14.190.818.811	14.474.635.187	14.764.127.891

Sumber: BPKPAD Kota Binjai, diolah

2. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja operasi Pemerintah Kota Binjai diproyeksikan mengalami tren peningkatan selama periode 2025 hingga 2030, dari Rp906,21 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp1.060,16 miliar pada tahun 2030. Komponen ini mencerminkan kebutuhan rutin penyelenggaraan pemerintahan, termasuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta hibah. Rata-rata pertumbuhan belanja operasi dalam kurun waktu ini sebesar 3,21% per tahun, yang menunjukkan peningkatan kebutuhan rutin seiring dengan peningkatan pelayanan publik, beban kerja birokrasi, dan komitmen terhadap efisiensi operasional.

Belanja modal menunjukkan arah pertumbuhan positif, dari Rp94,49 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp107,56 miliar pada tahun 2030, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 2,64%. Alokasi belanja modal ini difokuskan pada pengembangan infrastruktur dan aset tetap seperti gedung, jalan, irigasi, dan peralatan serta mesin, yang merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kapasitas ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Belanja tak terduga juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari Rp100 juta pada tahun 2025 menjadi Rp189,35 juta pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan antisipasi Pemerintah Kota Binjai terhadap risiko fiskal dan kebutuhan mendesak yang tidak terduga. Dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 13,90%, alokasi ini dinilai cukup strategis untuk memperkuat respons pemerintah terhadap kejadian luar biasa tanpa mengganggu struktur belanja utama.

Tabel 2. 63. Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025-2030

Uraian	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)
Belanja Daerah	**1.000.795.830.483**	**1.034.298.158.807**	**1.066.537.136.660**	**1.096.369.142.506**	**1.131.526.225.762**	**1.167.909.655.587**
Belanja Operasi	**906.206.684.894**	**936.675.546.887**	**967.395.734.640**	**996.238.417.402**	**1.027.308.266.214**	**1.060.158.235.910**
Belanja Pegawai	535.169.878.609	561.928.372.540	588.900.934.422	613.958.669.181	638.517.015.949	664.057.696.586
Belanja Barang dan Jasa	326.203.618.818	329.465.655.007	332.760.465.684	336.088.070.341	342.137.655.607	348.980.408.719
Belanja Hibah	44.833.187.466	45.281.519.341	45.734.334.534	46.191.677.880	46.653.594.658	47.120.130.605
Belanja Modal	**94.489.145.589**	**97.522.611.920**	**99.041.402.020**	**100.030.725.105**	**104.023.845.175**	**107.562.065.478**
Belanja Tanah	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0
Belanja Peralatan dan Mesin	22.689.271.293	22.916.164.006	23.145.325.646	23.376.778.903	23.610.546.692	23.846.652.159
Belanja Gedung dan Bangunan	33.561.778.961	33.897.396.751	34.236.370.718	34.578.734.426	34.924.521.770	35.273.766.987
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31.455.220.551	33.708.347.631	34.590.495.089	34.936.809.103	38.430.490.014	41.312.776.765
Belanja Aset Tetap Lainnya	6.782.874.784	6.850.703.532	6.919.210.567	6.988.402.673	7.058.286.700	7.128.869.567
Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0	0	0
Belanja Tak Terduga	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**	**194.114.373**	**189.354.199**
Belanja Tak Terduga	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	194.114.373	189.354.199

Sumber: BPKPAD Kota Binjai, diolah

3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Selama periode 2025 hingga 2027, Pemerintah Kota Binjai mengalami kondisi defisit anggaran, masing-masing sebesar Rp2,96 miliar (2025), Rp4,73 miliar (2026), dan Rp4,14 miliar (2027). Rata-rata pertumbuhan nilai defisit dalam tiga tahun tersebut menunjukkan penurunan sebesar -22,55% per tahun, yang mencerminkan upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan antara pendapatan dan belanja daerah. Pada tahun 2028 hingga 2030, pendekatan kebijakan anggaran berimbang mulai diterapkan secara konsisten, ditunjukkan dengan kondisi surplus/defisit sebesar nol. Hal ini menandakan pergeseran kebijakan fiskal yang lebih hati-hati dan terkendali, dengan penyesuaian belanja berdasarkan kapasitas pendapatan yang tersedia.

Pembiayaan daerah digunakan secara aktif selama periode defisit, yakni tahun 2025 hingga 2027, dengan total pembiayaan yang sama besar dengan jumlah defisit pada masing-masing tahun, menunjukkan fungsi pembiayaan sebagai penyeimbang fiskal. Nilai pembiayaan daerah pada tahun 2025 sebesar Rp2,96 miliar, meningkat menjadi Rp4,73 miliar pada tahun 2026, dan sedikit menurun menjadi Rp4,14 miliar pada tahun 2027. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan selama tiga tahun tersebut tercatat sebesar 18,38% per tahun, menunjukkan adanya kebutuhan pendanaan yang cukup dinamis untuk menutup defisit anggaran. Seiring dengan diterapkannya kebijakan anggaran berimbang sejak tahun 2028, pembiayaan daerah tidak lagi dianggarkan, sehingga mencerminkan penguatan disiplin fiskal dan perencanaan anggaran yang semakin berorientasi pada keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Tabel 2. 64. Proyeksi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025-2030

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pendapatan Daerah	997.837.758.225	1.029.565.243.194	1.062.395.835.498	1.096.369.142.506	1.131.526.225.762	1.167.909.655.587
Belanja Daerah	1.000.795.830.483	1.034.298.158.807	1.066.537.136.660	1.096.369.142.506	1.131.526.225.762	1.167.909.655.587
Surplus/Defisit	-2.958.072.259	-4.732.915.614	-4.141.301.162	0	0	0
Pembiayaan Daerah	**2.958.072.259**	**4.732.915.614**	**4.141.301.162**	**0**	**0**	**0**
Penerimaan Pembiayaan	2.958.072.259	4.732.915.614	4.141.301.162	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPKPAD Kota Binjai, diol

4. Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah diperoleh dari pengurangan antara penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah. Kapasitas riil keuangan daerah menunjukkan ruang fiskal yang bisa dugunakan untuk program prioritas pembangunan Kota Binjai. Berdasarkan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025–2030, dapat disimpulkan bahwa kemampuan fiskal riil Pemerintah Kota Binjai menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Total penerimaan daerah, yang merupakan gabungan dari proyeksi pendapatan daerah dan proyeksi penerimaan SiLPA, meningkat dari Rp1.000,79 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp1.167,91 miliar pada tahun 2030. Meskipun proyeksi penerimaan SiLPA hanya digunakan hingga tahun 2027, total penerimaan tetap menunjukkan peningkatan yang konsisten berkat kenaikan pendapatan daerah secara umum.

Di sisi lain, total pengeluaran juga mengalami peningkatan dari Rp906,31 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp1.060,35 miliar pada tahun 2030, seiring dengan meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja tidak terduga. Namun demikian, belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, dan pengeluaran pembiayaan masih belum diproyeksikan secara eksplisit dalam tabel ini, yang dapat menjadi indikasi perlunya perhatian terhadap perencanaan pengeluaran yang lebih komprehensif di masa mendatang. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, yang merupakan selisih antara total penerimaan dan total pengeluaran, menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan tahunan yang cukup stabil. Nilai kapasitas riil meningkat dari Rp94,49 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp107,56 miliar pada tahun 2030. Kecenderungan peningkatan ini mencerminkan ruang fiskal yang semakin membaik dan dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan program prioritas pembangunan secara lebih leluasa dan berkelanjutan.

Dengan demikian, kapasitas fiskal riil Kota Binjai dalam kurun waktu 2025–2030 diproyeksikan cukup kondusif untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah, asalkan tetap dijaga melalui optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi dalam belanja pemerintah. Perlu diantisipasi bahwa seiring bertambahnya kebutuhan pelayanan publik dan dinamika ekonomi, penguatan tata kelola keuangan dan pengendalian belanja menjadi sangat krusial dalam menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah.

Tabel 2. 65. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025-2030

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan Daerah	997.837.758.224,64	1.029.565.243.193,66	1.062.395.835.498,28	1.096.369.142.506,17	1.131.526.225.762,19	1.167.909.655.587,09
Proyeksi Penerimaan SiLPA	2.958.072.259	4.732.915.614	4.141.301.162	-	-	-
Total Penerimaan	**1.000.795.830.483,14**	**1.034.298.158.807,26**	**1.066.537.136.660,18**	**1.096.369.142.506,17**	**1.131.526.225.762,19**	**1.167.909.655.587,09**
Belanja Pegawai	535.169.878.609,26	561.928.372.539,72	588.900.934.421,63	613.958.669.181,27	638.517.015.948,52	664.057.696.586,46
Belanja Hibah	44.833.187.466	45.281.519.341	45.734.334.534	46.191.677.880	46.653.594.658	47.120.130.605
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	326.203.618.818,44	329.465.655.006,63	332.760.465.683,84	336.088.070.340,67	342.137.655.606,81	348.980.408.718,94
Belanja Tidak Terduga	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	194.114.373	189.354.199
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
Total Pengeluaran	**906.306.684.893,91**	**936.775.546.887,22**	**967.495.734.639,75**	**996.338.417.401,57**	**1.027.502.380.587,24**	**1.060.347.590.109,50**
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**94.489.145.589,23**	**97.522.611.920,04**	**99.041.402.020,44**	**100.030.725.104,60**	**104.023.845.174,95**	**107.562.065.477,59**

Sumber: BPKPAD Kota Binjai, diolah

5. Proyeksi Alokasi Anggaran Pembangunan Daerah

Dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah perlu dialokasikan secara proporsional berdasarkan skala prioritas. Dari proyeksi kapasitas keuangan riil Provinsi Sumatera Utara selama periode 2026-2029, terlihat bahwa alokasi anggaran dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu Prioritas I dan Prioritas II. Berdasarkan Proyeksi Alokasi Anggaran Pembangunan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025–2030, terlihat bahwa proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Dimulai dari sebesar Rp94,49 miliar pada tahun 2025, kapasitas tersebut diproyeksikan meningkat hingga mencapai Rp107,56 miliar pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan adanya potensi fiskal yang membaik dan memberikan ruang fiskal yang lebih luas dalam pengalokasian anggaran pembangunan.

Selaras dengan kapasitas fiskal yang tersedia, Pemerintah Kota Binjai menetapkan kebijakan alokasi anggaran pembangunan berdasarkan dua prioritas utama, yakni Prioritas I sebesar 70% dan Prioritas II sebesar 30% dari total kapasitas riil kemampuan keuangan. Alokasi anggaran untuk Prioritas I meningkat dari Rp66,14 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp75,29 miliar pada tahun 2030, sementara alokasi untuk Prioritas II naik dari Rp28,34 miliar menjadi Rp32,27 miliar pada periode yang sama. Kenaikan alokasi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Binjai untuk mendanai program dan kegiatan prioritas secara proporsional dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tren alokasi anggaran pembangunan menunjukkan kesinambungan dalam pembiayaan pembangunan yang diarahkan secara strategis pada program-program prioritas, baik jangka pendek maupun menengah. Dengan tetap mempertahankan komposisi alokasi sebesar 70:30 antara Prioritas I dan Prioritas II, Pemerintah Kota Binjai dapat memastikan bahwa sumber daya fiskal yang terbatas dimanfaatkan secara optimal untuk menjawab permasalahan pembangunan yang paling mendesak, tanpa mengabaikan kebutuhan pendukung yang juga penting. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas belanja daerah serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara menyeluruh hingga tahun 2030.

Tabel 2. 66. Proyeksi Alokasi Anggaran Pembangunan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025-2030

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	94.489.145.589	97.522.611.920	99.041.402.020	100.030.725.105	104.023.845.175	107.562.065.478
Prioritas I (70%)	66.142.401.912	68.265.828.344	69.328.981.414	70.021.507.573	72.816.691.622	75.293.445.834
Prioritas II (30%)	28.346.743.677	29.256.783.576	29.712.420.606	30.009.217.531	31.207.153.552	32.268.619.643

Sumber: BPKPAD Kota Binjai, diolah

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Mengidentifikasi permasalahan pembangunan isu strategis Kota Binjai yang disajkkan secara ringkas tanpa menuangkan data berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data yang sudah disajikan pada bagoan sebelumnya. Kemudian mengidentifikasi isu strategis Kota Binjai sesuai lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi Kota Binjai baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan gap kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

1. Permasalahan Kondisi Geografis dan Demografis

Kota Binjai memiliki luas wilayah yang relatif terbatas, yakni sekitar ±90,23 km², yang menjadi salah satu kendala dalam pengembangan wilayah dan ekspansi fungsi-fungsi perkotaan secara optimal. Luas wilayah yang sempit ini menimbulkan tantangan dalam penyediaan ruang untuk pembangunan infrastruktur, permukiman, kawasan industri, dan ruang terbuka hijau yang berkelanjutan. Selanjutnya, tingginya kepadatan penduduk yang tersebar di wilayah perkotaan menimbulkan tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta menuntut pengelolaan tata ruang yang lebih efisien dan adaptif. Selain itu, letak geografis Kota Binjai yang berbatasan langsung dengan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang juga menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam hal integrasi kawasan, penyelarasan tata ruang, serta pengendalian konversi lahan yang tidak terkoordinasi antar wilayah administratif. Perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi lainnya yang terus berlangsung tanpa pengendalian yang memadai turut mengancam ketahanan lingkungan serta keseimbangan ekosistem perkotaan.

Dari sisi demografis, pertumbuhan penduduk Kota Binjai menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, sehingga menimbulkan tekanan terhadap kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi publik. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan perencanaan kependudukan yang lebih adaptif dan berbasis bukti. Distribusi penduduk antar kecamatan yang tidak merata turut menimbulkan kesenjangan dalam akses terhadap infrastruktur dan pelayanan publik. Konsentrasi penduduk yang tinggi di beberapa kecamatan tertentu berpotensi menimbulkan kepadatan berlebih, kemacetan, dan penurunan kualitas lingkungan permukiman. Selain itu, struktur angkatan kerja yang didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan menengah mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui

penguatan akses dan mutu pendidikan tinggi serta pelatihan vokasional. Sementara itu, tingginya arus migrasi masuk dari wilayah sekitar, terutama dari kawasan pinggiran Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, turut meningkatkan beban pelayanan dan infrastruktur dasar serta mempercepat tekanan terhadap keterbatasan ruang dan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Binjai.

2. Permasalahan Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat di Kota Binjai menunjukkan berbagai capaian positif, namun masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan ke depan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah masih adanya angka kemiskinan yang relatif tinggi di wilayah-wilayah tertentu. Meskipun secara agregat terjadi penurunan tingkat kemiskinan, ketimpangan antar wilayah masih terjadi, khususnya di kecamatan-kecamatan dengan konsentrasi penduduk miskin yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata dan perlu penanganan berbasis kewilayahan yang lebih spesifik. Selain itu, kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat masih menjadi isu yang mencolok, yang mencerminkan belum optimalnya pemerataan hasil pembangunan. Ketimpangan ini dapat memicu eksklusi sosial dan memperlemah kohesi sosial di tingkat lokal. Ketergantungan masyarakat terhadap sektor informal juga menjadi indikator lemahnya struktur ekonomi lokal, mengingat sektor ini umumnya tidak memberikan perlindungan sosial yang memadai dan memiliki tingkat produktivitas yang relatif rendah. Keadaan ini berimplikasi pada tingkat kesejahteraan yang tidak stabil serta rentan terhadap guncangan ekonomi.

Tingkat pengangguran terbuka yang masih fluktuatif turut menjadi tantangan dalam pencapaian kesejahteraan. Terutama di kalangan usia produktif dan lulusan muda, tingginya angka pengangguran menunjukkan ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi tenaga kerja lokal. Hal ini menjadi pertanda perlunya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha dan industri. Pada saat yang sama, kualitas dan cakupan layanan pendidikan juga menghadapi kendala, termasuk keterbatasan tenaga pendidik berkualitas dan infrastruktur pendidikan yang belum merata, khususnya di daerah padat dan pinggiran kota.

Dalam sektor kesehatan, beberapa indikator menunjukkan capaian yang belum optimal. Prevalensi stunting, cakupan imunisasi, serta akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar masih memerlukan peningkatan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Tantangan ini diperparah oleh belum optimalnya jangkauan program perlindungan sosial terhadap kelompok-kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan rumah tangga miskin. Masih terbatasnya intervensi yang bersifat berkelanjutan dan menyeluruh menyebabkan kelompok ini berisiko tertinggal dari arus utama pembangunan. Dengan demikian, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Binjai perlu diarahkan pada penguatan inklusivitas pembangunan, peningkatan kualitas

sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja yang produktif, serta penguatan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin. Pendekatan lintas sektor dan berbasis data spasial menjadi penting dalam memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan dapat menjangkau masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan.

3. Permasalahan Kondisi Daya Saing

Daya saing daerah merupakan elemen krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kota Binjai, sebagai bagian dari wilayah strategis di Provinsi Sumatera Utara, memiliki potensi daya saing yang cukup baik. Namun demikian, terdapat berbagai permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam optimalisasi potensi tersebut. Salah satu isu utama adalah belum meratanya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Meskipun capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah tergolong baik, namun tantangan dalam penyelarasan kompetensi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri masih cukup signifikan.

Selain itu, tingkat produktivitas tenaga kerja masih terbatas akibat dominasi sektor informal dan rendahnya adopsi teknologi dalam proses produksi. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan akses terhadap pelatihan vokasional dan minimnya investasi pada sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi. Keterbatasan ini menghambat penciptaan lapangan kerja yang berkualitas serta memperlambat proses transformasi ekonomi daerah. Di sisi lain, meskipun iklim usaha di Kota Binjai menunjukkan perbaikan, namun masih terdapat tantangan dalam hal kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan dukungan infrastruktur dasar, terutama di kawasan industri dan perdagangan.

Infrastruktur penunjang daya saing seperti jalan, transportasi publik, dan sistem logistik masih perlu ditingkatkan kualitas dan keterpaduannya. Konektivitas intra dan antar wilayah belum sepenuhnya mendukung mobilitas barang dan jasa secara efisien, yang pada akhirnya berdampak terhadap efisiensi biaya produksi dan distribusi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung pelayanan publik dan sektor usaha juga belum optimal, meskipun indeks masyarakat digital menunjukkan peningkatan. Penguatan digitalisasi di sektor pemerintahan dan pelaku usaha masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur jaringan, literasi digital, dan keterjangkauan perangkat teknologi.

Dari sisi kelembagaan dan inovasi, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi masih belum terbangun secara sistematis dan berkelanjutan. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat inovasi daerah serta keterbatasan dalam pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Oleh karena itu, untuk memperkuat daya saing Kota Binjai ke depan, diperlukan intervensi strategis yang mencakup penguatan kualitas SDM, percepatan digitalisasi, perbaikan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi perizinan, serta pengembangan ekosistem inovasi yang inklusif dan kolaboratif. Upaya-upaya ini perlu dilaksanakan secara terpadu dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah

dan panjang, guna menjadikan Kota Binjai sebagai kota yang kompetitif, produktif, dan berkelanjutan.

4. Permasalahan Kondisi Pelayanan Umum

Meskipun Kota Binjai menunjukkan sejumlah kemajuan dalam peningkatan kualitas layanan publik, berbagai permasalahan masih mewarnai aspek layanan umum yang memerlukan perhatian dan penanganan serius secara terpadu. Salah satu permasalahan utama yang masih terjadi adalah stagnasi dalam penegakan peraturan daerah. Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, persentase penegakan perda belum mengalami peningkatan signifikan, tetap berada di kisaran 57%, yang mencerminkan lemahnya efektivitas pelaksanaan regulasi, kurangnya pengawasan yang konsisten, serta belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum di tingkat lokal.

Selain itu, capaian opini keuangan Pemerintah Kota Binjai yang sempat menurun dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2022 menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan. Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan bahwa tata kelola keuangan daerah masih memerlukan penguatan dari sisi akuntabilitas dan transparansi agar keberlanjutan opini WTP dapat dijaga pada tahun-tahun berikutnya. Dalam aspek reformasi birokrasi, meskipun terjadi peningkatan kategori dari “C” menjadi “B”, hal ini menandakan masih adanya ruang perbaikan dalam hal efisiensi kelembagaan, penyederhanaan prosedur layanan, serta penerapan sistem merit yang konsisten. Manajemen kinerja berbasis indikator dan budaya kerja aparatur yang berorientasi pada pelayanan prima belum sepenuhnya terimplementasi secara merata di seluruh perangkat daerah.

Di sisi lain, meskipun nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tantangan masih ditemukan dalam hal integrasi sistem antar unit kerja, literasi digital aparatur, dan infrastruktur TIK yang belum merata. Hal ini berdampak pada belum optimalnya penerapan digitalisasi layanan publik yang andal dan aman di seluruh sektor pelayanan. Lebih lanjut, inovasi layanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat masih terbatas, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Peningkatan nilai Indeks Pelayanan Publik memang mencerminkan perbaikan kualitas, namun belum sepenuhnya disertai oleh terobosan inovatif yang bersifat sistemik dan dapat memperluas akses, efisiensi, serta kepuasan layanan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan demikian, diperlukan upaya penguatan pada aspek regulasi, kelembagaan, teknologi, serta inovasi layanan agar kinerja pelayanan umum Kota Binjai dapat semakin adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.

Berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi dari masing-masing aspek pembangunan, mulai dari aspek geografis dan demografis, kesejahteraan masyarakat, daya

saing daerah, hingga kualitas pelayanan umum, mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi Kota Binjai dalam menyelenggarakan pembangunan secara berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya berdampak secara sektoral, namun juga saling terkait dan berimplikasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan perumusan isu-isu strategis pembangunan daerah yang bersifat lintas sektor dan mampu merespons dinamika kebutuhan masyarakat secara komprehensif. Isu-isu pembangunan yang dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kota Binjai Tahun 2025–2029 menjadi fondasi utama untuk merancang arah kebijakan, strategi, serta program prioritas daerah yang berbasis pada kondisi riil, tantangan aktual, serta potensi unggulan yang dimiliki Kota Binjai demi mewujudkan visi daerah menuju kota yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

1. Keterbatasan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan

Permasalahan keterbatasan akses dan kualitas layanan kesehatan di Kota Binjai merupakan masalah yang mendesak untuk ditangani. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang belum merata, keterbatasan tenaga kesehatan, serta kualitas layanan yang masih beragam menyebabkan sebagian masyarakat tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan tepat waktu. Kondisi ini berpotensi memperlemah ketahanan kesehatan masyarakat, terutama dalam menghadapi risiko penyakit menular dan tidak menular yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penguatan sistem layanan kesehatan perlu menjadi prioritas untuk menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dalam bidang kesehatan.

2. Tingginya Angka Stunting dan Kesehatan Masyarakat yang belum Inklusif

Angka stunting yang masih tergolong tinggi mencerminkan permasalahan gizi kronis yang dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Selain itu, kelompok rentan seperti balita, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan kesehatan yang memadai. Ketidakterjangkauan layanan kesehatan yang inklusif berpotensi meningkatkan ketimpangan sosial dan memperdalam kemiskinan struktural. Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting dan perluasan akses layanan kesehatan yang inklusif perlu menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesehatan daerah.

3. Pendidikan dan Pengembangan SDM yang Terbatas

Keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas dan belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sebagian besar angkatan kerja belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sedangkan akses terhadap pendidikan kejuruan dan pelatihan vokasional masih terbatas. Permasalahan ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan tingginya tingkat pengangguran, khususnya di kalangan usia produktif. Oleh karena itu, penguatan sistem pendidikan dan pelatihan kerja perlu diprioritaskan guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan adaptif terhadap dinamika pembangunan.

4. Pembangunan Infrastruktur yang Tidak Merata

Ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur antarwilayah di Kota Binjai masih menjadi kendala dalam pemerataan hasil pembangunan. Beberapa wilayah belum memperoleh akses yang memadai terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, air bersih, dan jaringan listrik. Ketidakmerataan ini menghambat konektivitas wilayah, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan perlu ditempatkan sebagai prioritas guna mendukung pertumbuhan wilayah secara inklusif dan berkelanjutan.

5. Pengelolaan Ekonomi dan Pengurangan Ketimpangan

Struktur ekonomi Kota Binjai yang masih didominasi oleh sektor informal serta belum optimalnya kontribusi sektor produktif menyebabkan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Ketimpangan ini berdampak pada keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, layanan publik, dan kesempatan kerja yang layak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengelolaan ekonomi daerah melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan kapasitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta perluasan kesempatan kerja untuk menurunkan ketimpangan sosial-ekonomi secara sistemik.

6. Ketahanan Pangan dan Penyediaan Infrastruktur yang belum Merata

Ketahanan pangan menjadi isu penting meskipun Kota Binjai bukan wilayah agraris utama. Akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau masih menjadi tantangan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi lain, infrastruktur pendukung sistem pangan seperti pasar rakyat, sistem distribusi logistik, dan fasilitas penyimpanan pangan masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan dan pemerataan infrastruktur pendukungnya menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

7. Tantangan Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Peningkatan aktivitas perkotaan dan pertumbuhan penduduk yang cepat memberikan tekanan terhadap lingkungan hidup, termasuk berkurangnya ruang terbuka hijau, peningkatan volume sampah, serta risiko banjir dan pencemaran lingkungan. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya dilakukan secara berkelanjutan. Permasalahan ini, apabila tidak ditangani dengan baik, akan mengancam daya dukung dan daya tampung lingkungan kota. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan lingkungan dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim harus menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan Kota Binjai.

2.3.2. Isu Strategis Daerah

1. Isu Strategis Global

Kondisi perekonomian global saat ini menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi banyak negara, termasuk dampaknya terhadap sektor-sektor ekonomi yang

berfokus pada ekspor. Salah satu isu utama yang perlu diperhatikan adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi akan terus berlanjut pada tahun 2024. Menurut laporan terbaru dari PBB, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat menjadi 2,4 persen pada 2024, yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan pra-pandemi yang mencapai 3 persen.

Beberapa faktor utama yang berkontribusi pada perlambatan ini antara lain tingginya suku bunga global, ketegangan geopolitik yang semakin meningkat, serta kondisi perdagangan internasional yang lebih lesu. Selain itu, perubahan iklim yang semakin sering terjadi juga menambah ketidakpastian di banyak sektor ekonomi. Isu-isu ini mempengaruhi perdagangan internasional, produksi industri, serta ketahanan ekonomi beberapa negara. Ketidakstabilan geopolitik, misalnya, dapat menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan global yang berdampak pada harga barang dan biaya produksi. Sementara itu, perubahan iklim yang semakin parah menambah tantangan bagi sektor-sektor yang bergantung pada sumber daya alam dan produksi pertanian. Di sisi lain, kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, membuka peluang baru, tetapi juga menambah kesenjangan ekonomi dan sosial, memperburuk ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Dengan tantangan global ini, negara-negara di seluruh dunia perlu melakukan penyesuaian strategi ekonomi untuk menjaga daya saing mereka di pasar global.

Pariwisata global menunjukkan pemulihan yang signifikan setelah pandemi, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Berdasarkan laporan terbaru dari Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), pada akhir tahun 2024, jumlah wisatawan internasional tercatat mencapai sekitar 1,4 miliar orang, yang mencerminkan peningkatan 11% dibandingkan tahun 2023. Pemulihan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk permintaan yang kuat setelah pandemi, peningkatan konektivitas udara, serta kebijakan visa yang lebih longgar di berbagai negara. Beberapa wilayah bahkan mengalami pertumbuhan yang melebihi tingkat pariwisata sebelum pandemi, seperti Timur Tengah dan Afrika yang masing-masing mencatatkan peningkatan sebesar 32% dan 7% dibandingkan tahun 2019. Namun, meskipun ada pemulihan yang positif di beberapa kawasan, masih ada ketimpangan dalam tingkat pemulihan ini. Eropa hanya mengalami sedikit kenaikan (1% lebih tinggi dibandingkan 2019), sementara Asia dan Pasifik baru pulih hingga 87% dari tingkat sebelum pandemi, meskipun mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan pariwisata global juga mengalami lonjakan, mencapai USD 1,9 triliun, yang 3% lebih tinggi dari tahun 2019. Di sisi lain, belanja wisatawan meningkat lebih cepat daripada jumlah kunjungan, memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal dan sektor usaha kecil di berbagai negara.

Populasi dunia saat ini telah mencapai lebih dari 8,2 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat, mencapai 10,2 miliar jiwa pada tahun 2080. Lonjakan jumlah penduduk ini menimbulkan tantangan besar, terutama dalam hal penyesuaian antara

kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam serta lahan. Kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi yang pesat, yang tentu saja menuntut perubahan besar dalam sektor produksi untuk mendukung kehidupan yang lebih panjang. Meskipun jumlah penduduk terus meningkat, laju pertumbuhannya cenderung melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa pada tahun 2045, jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai 9,5 miliar. Hal ini disebabkan oleh penurunan tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup. Namun, penurunan angka kelahiran yang signifikan di banyak negara, terutama negara maju, memunculkan tantangan baru dalam hal struktur demografi. Sementara itu, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia serta tingginya jumlah penduduk usia muda menuntut perhatian pada kebutuhan perlindungan sosial yang memadai dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Fenomena sosial yang terjadi, seperti meningkatnya jumlah individu yang memilih untuk tidak memiliki anak (childfree), menunda pernikahan, atau bahkan pergeseran nilai terkait perilaku seksual yang lebih beragam, turut mempengaruhi angka kelahiran. Sementara itu, perkawinan dini masih menjadi masalah yang signifikan di negara berkembang. Selain itu, perubahan dalam struktur dan bentuk keluarga, serta mobilitas penduduk yang tinggi, membawa dampak pada cara keluarga menjalankan fungsinya. Akses yang semakin terbuka terhadap media digital, meskipun memberikan banyak manfaat, juga membawa risiko besar, seperti meningkatnya kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap konten negatif, serta perilaku menyimpang yang memengaruhi dinamika keluarga. Oleh karena itu, tantangan bagi keluarga dalam menjalankan fungsinya sebagai unit sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat menjadi semakin kompleks dan memerlukan perhatian serta kebijakan yang tepat untuk menghadapinya.

Berdasarkan laporan World Urbanization Prospects, The 2018 Revision yang dirilis oleh PBB, diproyeksikan bahwa populasi dunia akan mencapai 8,5 miliar pada tahun 2030 dan 9,7 miliar pada tahun 2050. Selama periode 2015 hingga 2050, diperkirakan setengah dari pertumbuhan penduduk dunia akan terkonsentrasi di sembilan negara, yaitu India, Nigeria, Pakistan, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Tanzania, Amerika Serikat, Indonesia, dan Uganda. Selain itu, pada tahun 2018, sekitar 55% dari populasi dunia tinggal di perkotaan, dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 68% pada tahun 2050. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja menjadi isu yang semakin penting di banyak negara. Untuk itu, diperlukan upaya untuk memaksimalkan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, serta promosi peluang kerja yang produktif dan layak. Selain itu, pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih tua juga menjadi perhatian. Diperkirakan bahwa populasi lanjut usia di seluruh dunia akan terus meningkat, sehingga negara-negara dengan populasi lanjut usia harus menyesuaikan sistem kesehatan

mereka, memperkuat sistem perawatan jangka panjang, dan memastikan keberlanjutan sistem jaminan sosial serta pensiun.

Cuaca ekstrem, sebagai isu strategis jangka menengah, juga menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh Kota Binjai. Fenomena seperti badai hebat, banjir, kekeringan, dan gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim global, memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, ekosistem, dan perekonomian lokal. Di Kota Binjai, dampak cuaca ekstrem ini antara lain mencakup kerusakan infrastruktur, gangguan pada produksi pangan terutama pertanian di daerah sekitar, serta meningkatnya risiko kesehatan bagi populasi yang rentan, seperti anak-anak, lansia, dan mereka yang tinggal di daerah rawan bencana.

Dampak buruk teknologi AI, sebagai isu strategis jangka menengah, juga perlu menjadi perhatian serius di Kota Binjai, mengingat potensi disrupsi yang dapat ditimbulkan oleh penerapan teknologi ini. Meskipun teknologi AI menawarkan peluang besar untuk inovasi dan efisiensi di berbagai sektor, penerapannya yang tidak terkendali dapat membawa dampak negatif yang signifikan bagi kota ini. Salah satunya adalah pengangguran massal yang disebabkan oleh otomatisasi pekerjaan, di mana banyak pekerjaan tradisional berisiko tergantikan oleh teknologi AI, seperti di sektor manufaktur, transportasi, dan layanan publik. Selain itu, risiko bias algoritma yang memperkuat diskriminasi juga perlu diwaspadai, terutama dalam hal pelayanan publik atau sistem yang mengandalkan data dalam pengambilan keputusan. Bias ini bisa memperburuk ketimpangan sosial di Kota Binjai, mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan yang adil dan setara. Pelanggaran privasi juga menjadi isu yang penting, mengingat penggunaan data pribadi dalam pengembangan dan implementasi AI yang dapat mengekspos informasi sensitif tanpa kontrol yang memadai.

Polusi telah muncul sebagai isu strategis global jangka menengah yang berdampak signifikan pada kesehatan manusia, ekosistem, dan ekonomi. Peningkatan emisi gas rumah kaca, limbah industri, serta polusi plastik di lautan telah menyebabkan degradasi lingkungan yang parah, mempengaruhi kualitas udara, air, dan tanah. Akibatnya, jutaan orang di seluruh dunia mengalami masalah kesehatan serius seperti penyakit pernapasan dan kardiovaskular, sementara biodiversitas terancam dan produktivitas pertanian menurun. Untuk mengatasi krisis polusi ini, diperlukan tindakan tegas melalui kebijakan lingkungan yang lebih ketat, pengembangan teknologi bersih, dan peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Dengan komitmen global yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, kita dapat mengurangi dampak polusi dan melindungi planet ini bagi generasi mendatang.

Samudera Hindia memainkan peran yang sangat krusial dalam geopolitik dan geoekonomi negara-negara pesisir serta kekuatan global di luar kawasan tersebut. Sebagai jalur pelayaran utama untuk kapal kontainer, penumpang, dan angkatan laut, Samudera Hindia menghubungkan rute perdagangan yang melintasi benua, dari Afrika hingga Timur

Tengah, Asia, dan Australia. Kawasan ini merupakan titik pertemuan berbagai kekuatan besar dunia, menjadikannya salah satu pusat perdagangan dan geopolitik yang paling bernilai di dunia, dengan lebih dari 80% pasokan minyak dunia melintasi perairan Samudera Hindia.

2. Isu Strategis Nasional

Aging population adalah tren demografis yang terjadi di banyak negara maju di seluruh dunia. Fenomena ini ditandai oleh peningkatan proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) dan penurunan tingkat kelahiran. Peningkatan harapan hidup dan rendahnya tingkat kelahiran menyebabkan struktur demografi yang lebih tua. Dampak dari penuaan populasi ini sangat luas, mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Indonesia, dengan populasi yang masih muda, memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor pariwisata kesehatan bagi lansia dari negara maju. Dengan biaya layanan kesehatan yang lebih rendah dan budaya pelayanan yang ramah, Indonesia dapat menawarkan layanan medis, perawatan rehabilitatif, dan fasilitas wellness yang menarik bagi lansia. Keunggulan komparatif ini, didukung oleh peningkatan infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang berstandar internasional, dapat menjadikan Indonesia destinasi pilihan untuk pariwisata kesehatan. Untuk mengoptimalkan potensi ini, Indonesia perlu meningkatkan infrastruktur kesehatan dan fasilitas akomodasi yang nyaman, serta menerapkan strategi pemasaran yang efektif. Kerjasama internasional dan promosi aktif dapat menarik wisatawan lansia, meningkatkan devisa negara, dan menciptakan lapangan kerja baru. Pengembangan pariwisata kesehatan tidak hanya berdampak positif pada ekonomi tetapi juga memperkuat pertukaran budaya dan meningkatkan citra Indonesia di mata internasional.

Hilirisasi industri di Indonesia mulai menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Hilirisasi, yang merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi, telah meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor Indonesia. Sektor-sektor seperti pertambangan, perkebunan, dan perikanan yang sebelumnya berfokus pada ekspor bahan mentah kini mulai memproduksi barang dengan nilai tambah lebih tinggi. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan dari ekspor tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari hilirisasi, Indonesia perlu melanjutkan dan memperluas strategi ini. Peningkatan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia menjadi kunci untuk mendukung hilirisasi yang berkelanjutan. Investasi dalam teknologi pengolahan dan inovasi akan memungkinkan Indonesia untuk memproduksi barang dengan kualitas dan nilai tambah yang lebih tinggi, sehingga lebih kompetitif di pasar global. Selain itu, pengembangan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan juga penting untuk memastikan bahwa industri hilir memiliki tenaga kerja yang kompeten dan produktif. Keberlanjutan hilirisasi akan memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, Indonesia akan lebih tahan terhadap

fluktuasi harga komoditas global dan memiliki struktur ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Hilirisasi juga akan mendorong diversifikasi ekonomi, memperkuat industri manufaktur, dan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan pendapatan ekspor yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, hilirisasi yang berkelanjutan akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi global.

Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dapat memberikan dampak yang optimal dan saling mendukung. Kebijakan makroekonomi, seperti kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan, harus sejalan dengan kebijakan sektoral yang mencakup berbagai industri seperti pertanian, manufaktur, dan jasa. Sinkronisasi ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan mengurangi inefisiensi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan koordinasi yang baik, kebijakan makro dapat memberikan landasan yang stabil dan kondusif bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi, sementara kebijakan sektoral dapat mendetailkan langkah-langkah spesifik untuk mendorong pertumbuhan dalam berbagai industri. Untuk mencapai sinkronisasi yang efektif, kebijakan harus dirancang dengan memperhatikan kepentingan nasional secara menyeluruh. Ini berarti mempertimbangkan aspek keberlanjutan, inklusivitas, dan kemandirian ekonomi dalam setiap kebijakan yang dibuat. Misalnya, dalam kebijakan fiskal, alokasi anggaran harus mendukung sektor-sektor yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, kebijakan sektoral harus disusun dengan memperhatikan kebijakan makro yang sudah ada, sehingga kebijakan tersebut saling melengkapi dan mendukung. Dengan memperhatikan kepentingan nasional, sinkronisasi kebijakan dapat membantu mencapai tujuan pembangunan jangka panjang, memperkuat struktur ekonomi, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Di tengah meningkatnya kesadaran global akan pentingnya keberlanjutan, standar sustainability yang tinggi telah menjadi keharusan bagi produk-produk yang ingin bersaing di pasar internasional. Negara-negara maju dan organisasi global terus memperketat regulasi dan persyaratan terkait dampak lingkungan dari produk-produk yang diimpor. Hal ini mencakup aspek seperti emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam. Bagi Indonesia, penerapan standar sustainability yang tinggi ini merupakan tantangan besar namun juga peluang untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Dengan memenuhi standar keberlanjutan, produk-produk Indonesia dapat mengakses pasar global yang lebih luas dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen internasional yang semakin peduli terhadap isu lingkungan. Agar produk Indonesia tetap kompetitif di pasar global, orientasi ramah lingkungan harus menjadi prioritas dalam proses produksi. Ini mencakup adopsi praktik-praktik produksi yang lebih hijau, seperti efisiensi energi, penggunaan bahan baku yang berkelanjutan, dan pengurangan emisi serta limbah.

Pemerintah dan sektor swasta harus berkolaborasi dalam menerapkan dan mempromosikan standar keberlanjutan ini. Insentif fiskal, pelatihan, dan dukungan teknologi dapat diberikan untuk mendorong industri-industri di Indonesia menerapkan praktik ramah lingkungan. Selain itu, edukasi kepada produsen dan konsumen mengenai pentingnya keberlanjutan dan manfaat jangka panjangnya juga penting. Dengan pendekatan ini, produk-produk Indonesia tidak hanya memenuhi persyaratan global tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan, memperkuat citra positif Indonesia di pasar internasional, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk membangun national grid yang mampu mendistribusikan pasokan listrik secara merata ke seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau terluar. Saat ini, distribusi listrik yang tidak merata menghambat pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup di daerah terpencil. Pembangunan national grid yang andal dan terintegrasi akan memungkinkan pemanfaatan sumber energi terbarukan secara optimal dan memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan akses yang sama terhadap listrik. Ini memerlukan investasi besar dalam infrastruktur jaringan dan teknologi, serta kebijakan yang mendukung integrasi energi terbarukan ke dalam grid nasional. Transisi energi juga membuka peluang besar untuk pemerataan pembangunan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru dan Terbarukan (PLT EBT) di luar Pulau Jawa. Pulau-pulau di luar Jawa memiliki potensi besar untuk energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan hidro. Pembangunan PLT EBT di daerah-daerah ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi dan sosial. Dengan membangun infrastruktur energi terbarukan di luar Jawa, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan akses listrik di daerah terpencil, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai target energi bersih, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

3. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dihadapkan pada pembangunan dan Pembentukan modal manusia. Modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi dari berbagai risiko siklus hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan Transformasi Sosial yang menitikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi Sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan dan pemerataan

kapasitas ketahanan kesehatan, serta responsiveness/ketanggapan sistem kesehatan di seluruh wilayah.

Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang sedangkan Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Selanjutnya sistem demokrasi masih prosedural ditandai dengan kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; informasi dan komunikasi publik belum merata; permasalahan politik elektoral seperti politik uang, politisasi isu SARA; nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi serta sistem kaderisasi partai politik belum maksimal. Selain hal di atas nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan kualitas sumber daya manusia. Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu. Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Nias, dan Bukit Lawang. Untuk meningkatkan daya tarik wisata, diperlukan pembangunan dan perbaikan jalan, bandara, serta transportasi publik yang lebih terintegrasi. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan pusat informasi wisata yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperpanjang durasi kunjungan mereka. Selain infrastruktur, penguatan ekonomi kreatif juga menjadi kunci dalam mendukung sektor pariwisata. Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kerajinan tangan, kuliner khas, serta seni pertunjukan perlu mendapatkan pembinaan dan akses permodalan yang lebih baik. Digitalisasi usaha ekonomi kreatif, seperti pemasaran berbasis e-commerce dan promosi melalui platform media sosial, juga harus diperkuat agar produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya mendukung industri pariwisata tetapi juga memberikan peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya harus menjadi fokus dalam pengembangan sektor ini. Pariwisata berbasis alam dan budaya perlu dikembangkan dengan tetap menjaga ekosistem dan kearifan lokal agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka

panjang. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku wisata mengenai pentingnya ekowisata serta pengelolaan sampah di kawasan wisata harus ditingkatkan. Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspons ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspons dalam jangka panjang ke depan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (urban sprawl). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara.

Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatra masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimum terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatra dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga.

Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan.

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Kota Binjai, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut. Permasalahan dari pelayanan dasar mencakup tiga aspek, yakni aspek perumahan dan permukiman, aspek kesehatan dan aspek ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Aspek perumahan dan permukiman mencakup akses terhadap layanan sumber air minum, sanitasi dan pengolahan air limbah dan lumpur tinja. Aspek kesehatan mencakup Jaminan Kesehatan Sosial, ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dan distribusi tenaga kesehatan. Sedangkan aspek kasus kejahatan, rasa aman dan penyalahgunaan narkoba.

Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri belum memenuhi target, hal ini mempengaruhi akses terhadap layanan air minum dan sanitasi. Pada sisi lain ketersediaan air di Provinsi Sumatera Utara secara total masih surplus, termasuk pada daerah kabupaten/kota. Namun pada lokasi-lokasi tertentu terjadi defisit air seperti pada sebagian wilayah Kota Tanjungbalai, Kota Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Batubara, Serdang Bedagai dst. Kondisi defisit dipengaruhi oleh ketersediaan dan tingkat konsumsi. Ketersediaan air cenderung menurun dari waktu ke waktu, selain karena dampak perubahan iklim juga karena makin terdegradasinya daerah hulu baik karena deforestasi, maupun karena alih fungsi hutan dan lahan. Luasan hutan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana kota-kota utama di Sumatera Utara berada, pada umumnya sudah berada di bawah 30%. Hal ini akan menambah ancaman keberlanjutan ketersediaan air pada masa yang akan datang. Kekurangtersediaan air akan menyebabkan ketidaktercapaian target sanitasi dan akan mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh sampah yang belum tertangani, juga disebabkan oleh sanitasi, air peningkatan kualitas lingkungan juga belum memadai, yang tercermin dari belum tercapainya jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik (sertifikasi SNI ISO 14001) serta masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai. Penurunan kualitas air permukaan cenderung meningkat seiring waktu, mengingat pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Timbulan sampah akan meningkat, juga limbah cair dan lumpur tinja serta limbah B3. Peningkatan beban lingkungan ini harus dibarengi dengan peningkatan pengelolaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

Pembangunan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan tidak bisa mengabaikan rantai pasok, sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi pull factor manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya

Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan keberadaan pangan. Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan. Secara umum ketersediaan air di Sumatera Utara melebihi kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, Sumatera Utara juga masih surplus, hal ini turut ditopang oleh keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Utara. Kondisi kekurangan pangan di beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyediaan pangan yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah yang terdapat pada wilayah barat Sumatera Utara. Kerentanan wilayah yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan.

Perubahan iklim dan pencegahan serta penanggulangan bencana juga merupakan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara. Aspek perubahan iklim menyangkut jumlah emisi gas rumah kaca yang masih tinggi, intensitas energi primer yang masih tinggi serta upaya penyerapan emisi gas rumah kaca terutama pada wilayah perkotaan yang masih minim yang terlihat dari belum terpenuhinya penerapan green waste dan ruang terbuka hijau. Perubahan iklim ini akan menimbulkan dampak yang semakin parah mengingat 73% wilayah Sumatera Utara cukup rentan terhadap perubahan iklim terlebih pada 2% wilayah yang sangat rentan perubahan iklim. Pada sisi lain jasa lingkungan pengatur iklim juga dominan bernilai rendah hingga sangat rendah pada wilayah Pesisir Timur Sumatera.

Aspek pencegahan serta penanggulangan bencana mencakup jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung karena bencana, jumlah daerah bencana alam yang diperlengkapi secara khusus, dan penurunan indeks risiko bencana yang belum mencapai target. Aspek-aspek ini belum mencapai target juga dipengaruhi oleh wilayah Sumatera Utara yang memiliki potensi bencana tinggi pada beberapa wilayah seperti potensi banjir tinggi pada pantai utara Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Labuhanbatu Selatan, potensi kekeringan kelas tinggi pada beberapa kabupaten. Keberadaan potensi bencana yang tinggi ini belum dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana. Pada sisi lain jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam juga sangat rendah terutama pada sisi timur Sumatera Utara dan kepulauan Nias. Mengingat dominan bencana alam di Sumatera Utara adalah bencana hidrometeorologi, bencana yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim serta

ketidakmampuan alam menampung dampak perubahan iklim, maka upaya penurunan faktor penyebab perubahan iklim mutlak dilakukan disertai dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana alam.

Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi dua persoalan utama yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang fokus pada kapabilitas dan integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Kapabilitas tata pemerintahan berfokus pada penguatan transisi reformasi birokrasi menuju reformasi Birokrasi tematik, memperbaiki proses bisnis adaptif dengan dukungan teknologi informasi, meningkatkan profesionalisme ASN melalui meritokrasi dan penguatan core value. Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah pemanfaatan kehadiran teknologi informasi dalam area deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, penguatan profesionalisme ASN, penguatan kualitas pengawasan, penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik. Ketersediaan dan keterjangkauan teknologi pada masyarakat sipil diharapkan mampu mentransformasi posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan.

4. Isu Strategis KLHS Kota Binjai

Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kota Binjai 2025-2029 diperoleh isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Binjai sebagai berikut :

a. Peningkatan nilai tambah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, atraktif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam prinsip Ekonomi Hijau
b. Beban peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin berat (penduduk miskin kota, migrasi, ketimpangan ekonomi, kesehatan dan pangan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat)
c. Perlindungan dan pemulihan daya dukung dan daya tampung ekosistem dan sumber daya alam serta penanganan risiko bencana alam
d. Perlindungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup (kualitas air dan udara, energi bersih)

e. Jangkauan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan Kota yang Lebih Merata, Inklusif, dan Modern
f. Peningkatan Kapasitas Kapabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Partisipatif dan Modern

5. Isu Strategis Kota Binjai

Berikut adalah identifikasi isu strategis secara lebih mendalam dan jelas terkait dengan pembangunan Kota Binjai pada periode RPJMD 2025-2029:

a. Akses Layanan Kesehatan yang berkualitas dan inklusif

Meskipun Kota Binjai telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan, masih terdapat ketimpangan yang signifikan antara daerah pusat dan daerah pinggiran kota. Keterbatasan tenaga medis, sarana dan prasarana yang tidak merata, serta kesenjangan dalam teknologi layanan kesehatan menjadi hambatan utama. Sebagian besar wilayah pinggiran dan pedesaan di Kota Binjai masih kekurangan fasilitas kesehatan yang memadai, yang menyebabkan kurangnya akses layanan dasar, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lansia. Untuk itu, isu ini memerlukan kebijakan yang memastikan pemerataan fasilitas dan tenaga medis di seluruh wilayah, serta peningkatan digitalisasi layanan kesehatan untuk mempermudah akses masyarakat, termasuk penggunaan sistem telemedicine dan rekam medis elektronik yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil.

b. Peningkatan Kesehatan Anak dan Gizi Masyarakat

Angka stunting yang tinggi di Kota Binjai, terutama pada balita dan ibu hamil, menjadi salah satu masalah kesehatan yang sangat krusial. Meskipun terdapat program pemberian makanan bergizi dan edukasi tentang pola makan sehat, realitasnya adalah kurangnya akses terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan yang memadai di daerah tertentu. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola hidup sehat masih rendah, terutama di kalangan keluarga miskin. Untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan status gizi masyarakat, diperlukan intervensi berbasis data yang mencakup pemberian makanan bergizi yang terarah kepada keluarga berisiko, peningkatan kualitas posyandu sebagai garda terdepan dalam deteksi dini stunting, serta penguatan sistem layanan kesehatan preventif dan promotif yang terintegrasi dengan komunitas.

c. Pendidikan yang Merata dan Berkualitas

Ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan masih menjadi masalah utama di Kota Binjai. Daerah-daerah pinggiran kota seringkali kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai, serta kualitas guru yang bervariasi. Sebagian besar sekolah di daerah ini juga kekurangan sumber daya pengajaran yang berkualitas, dan banyak yang belum terintegrasi dengan teknologi pendidikan yang dapat meningkatkan proses belajar mengajar. Untuk itu, perlu ada peningkatan dalam kualitas pendidikan dasar dan menengah, khususnya melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih

inklusif, serta penguatan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja. Selain itu, perlu diperkenalkan program pelatihan keterampilan teknis dan vokasi yang lebih relevan dengan kebutuhan industri untuk mempersiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan global.

d. Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Merata

Infrastruktur di Kota Binjai, terutama di daerah-daerah pinggiran, masih belum memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur ini menyebabkan ketimpangan akses terhadap fasilitas publik, seperti transportasi, air bersih, sanitasi, dan listrik. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan harus diprioritaskan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperbaiki akses ke layanan dasar, dan mendukung mobilitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur ini harus disertai dengan pendekatan yang berbasis pada keberlanjutan lingkungan, seperti penerapan arsitektur hijau, sistem pengelolaan air yang efisien, serta pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, agar Kota Binjai dapat berkembang tanpa mengorbankan kualitas lingkungan hidup.

e. Pemberdayaan Ekonomi melalui UMKM dan Kewirausahaan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Binjai berperan penting dalam perekonomian lokal, tetapi masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, seperti akses permodalan, keterbatasan keterampilan, dan kesulitan dalam memasarkan produk mereka. Ketimpangan dalam akses terhadap pelatihan keterampilan, teknologi, serta pasar yang lebih luas menjadi hambatan utama bagi mereka. Oleh karena itu, isu ini memerlukan intervensi yang lebih terarah melalui pemberian akses permodalan yang lebih mudah dan efisien, pelatihan kewirausahaan berbasis teknologi, serta memperkuat jaringan pemasaran digital untuk UMKM. Pemerintah juga perlu menyederhanakan proses perizinan dan memberikan insentif bagi usaha yang sudah memiliki legalitas untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar.

f. Ketahanan Pangan dan Peningkatan Infrastruktur Pasar

Isu ketahanan pangan menjadi perhatian serius di Kota Binjai, mengingat ketergantungan pada distribusi pangan dari luar daerah. Infrastruktur pasar yang tidak memadai serta sistem distribusi pangan yang belum efisien menjadi penghalang dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan. Di sisi lain, sektor pertanian lokal belum sepenuhnya dioptimalkan untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketahanan pangan, perlu ada pengembangan infrastruktur pasar yang lebih baik, dukungan kepada petani lokal, serta kemitraan antara pemerintah, petani, dan sektor swasta untuk mengoptimalkan produksi pangan lokal dan distribusinya. Kebijakan yang mendorong penggunaan teknologi pertanian modern dan pengelolaan cadangan pangan daerah juga harus diprioritaskan untuk menjaga kestabilan pasokan pangan.

g. Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan di Kota Binjai, khususnya dalam hal pengelolaan sampah, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem, membutuhkan perhatian yang serius. Meskipun sudah ada kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sampah dan limbah, namun implementasinya masih terbatas dan belum sepenuhnya efektif. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. Isu ini juga terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, seperti pengelolaan air dan lahan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dalam pengelolaan sampah, penerapan sistem daur ulang yang efektif, serta pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pengembangan infrastruktur hijau dan teknologi ramah lingkungan juga harus didorong untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Isu-isu strategis ini menggarisbawahi perlunya kebijakan dan program yang terintegrasi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Kota Binjai dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata. Pemerintah daerah perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, untuk memastikan keberhasilan implementasi RPJMD yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua lapisan masyarakat.

Dalam menjawab berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Binjai, potensi daerah yang dimiliki menjadi modal utama untuk mendorong solusi yang adaptif dan berkelanjutan. Sebagai contoh, keterbatasan akses dan kualitas layanan kesehatan dapat diatasi dengan memanfaatkan posisi geografis Kota Binjai yang strategis dan kedekatannya dengan Kota Medan, didukung oleh infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan air bersih, serta SPAM regional. Demikian pula, tingginya angka stunting dan masalah kesehatan masyarakat yang belum inklusif dijawab dengan tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) untuk kampanye gizi, penguatan partisipasi kader kesehatan, dan peningkatan akses air bersih. Dalam konteks pendidikan dan pengembangan SDM, potensi demografi usia produktif, akses pendidikan yang cukup merata, serta peluang pengembangan pendidikan vokasi menjadi solusi nyata. Ketimpangan pembangunan infrastruktur dapat ditekan melalui ketersediaan lahan pengembangan di wilayah pinggiran dan konektivitas antarkawasan yang semakin baik. Sektor perdagangan dan UMKM yang kuat di Binjai juga menjadi kunci dalam menjawab tantangan pengelolaan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Di sisi lain, potensi pertanian kota dan urban farming menjadi jalan keluar terhadap isu ketahanan pangan dan penyediaan infrastruktur yang belum merata. Untuk mengatasi tantangan lingkungan, Kota Binjai memiliki kawasan lindung, sistem DAS, dan potensi ekowisata yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Seluruh potensi ini, ketika dihadapkan dengan isu-isu strategis yang muncul dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), seperti beban peningkatan kualitas sumber daya manusia, tekanan terhadap daya dukung lingkungan, serta kebutuhan akan pembangunan

yang rendah emisi dan berketahanan iklim, menghasilkan serangkaian pertimbangan kebijakan yang harus diarusutamakan dalam perencanaan pembangunan daerah. Lebih lanjut, isu lingkungan dinamis global seperti disrupsi teknologi, urbanisasi, perubahan iklim, transisi energi, dan ketidakpastian geoekonomi; isu nasional seperti hilirisasi industri, sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral, serta penguatan layanan publik; dan isu regional seperti integrasi kawasan Mebidangro, konektivitas antarwilayah, dan perlindungan ekosistem DAS, semuanya membentuk tekanan dan peluang bagi Kota Binjai untuk menetapkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang kontekstual dan relevan. Hasil dari interaksi antara potensi daerah, permasalahan aktual, isu KLHS, dan dinamika lingkungan tersebut dirumuskan dalam bentuk isu strategis Kota Binjai, seperti peningkatan daya saing SDM, pemerataan akses layanan dasar, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM dan ekonomi hijau, serta perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang terintegrasi. Dengan demikian, strategi pembangunan Kota Binjai diarahkan untuk tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan ketangguhan daerah dalam menghadapi tantangan jangka menengah dan panjang.

Tabel 2. 67. Keterkaitan Isu Strategis Daerah Kota Binjai

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Letak strategis dekat Medan yang memudahkan kolaborasi layanan rujukan regional; infrastruktur dasar cukup baik; dukungan SPAM dan jaringan jalan	Keterbatasan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Beban peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin berat (penduduk miskin kota, migrasi, ketimpangan ekonomi, kesehatan dan pangan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat)	Bonus Demografi	infrastruktur kesehatan dan fasilitas akomodasi yang nyaman, serta menerapkan strategi pemasaran yang efektif	Kualitas dan Daya Saing SDM	Akses Layanan Kesehatan yang berkualitas dan inklusif
Tersedia RTH untuk kampanye gizi dan kesehatan; akses air bersih terus ditingkatkan; partisipasi kader dan program pemberdayaan keluarga	Tingginya Angka Stunting dan Kesehatan Masyarakat yang belum Inklusif					Peningkatan Kesehatan Anak dan Gizi Masyarakat
Akses pendidikan cukup baik; potensi pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja; SDM muda produktif cukup besar	Pendidikan dan Pengembangan SDM yang Terbatas			Aging Populasi		Pendidikan yang Merata dan Berkualitas
			Disrupsi Teknologi AI			
Posisi strategis di jalur tol dan lintas Sumatera; luas lahan di kecamatan pinggiran tersedia untuk pengembangan; dukungan konektivitas antarwilayah	Pembangunan Infrastruktur yang Tidak Merata	Jangkauan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan Kota yang Lebih Merata, Inklusif, dan Modern	Peningkatan Urbanisasi Global	Peningkatan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia	Pembangunan Antar Daerah Serta Desa-Kota	Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Merata
		Peningkatan Kapasitas Kapabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Partisipatif dan Modern	Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Global		Infrastruktur Penghubung Konektivitas	
			Ketidakstabilan Geopolitik dan Geoekonomi		Pembangunan Sarana dan Prasarana	
Sektor perdagangan dan jasa dominan; potensi UMKM dan ekonomi kreatif tinggi; akses pasar luas karena dekat Medan	Pengelolaan Ekonomi dan Pengurangan Ketimpangan	Peningkatan nilai tambah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, atraktif, berdaya saing dan	Pariwisata Global	Hilirisasi Industri	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pemberdayaan Ekonomi melalui UMKM dan Kewirausahaan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
		berkelanjutan dalam prinsip Ekonomi Hijau				
Masih tersedia lahan pertanian dan kebun; potensi pengembangan urban farming dan agrowisata; penguatan SPAM dan irigasi	Ketahanan Pangan dan Penyediaan Infrastruktur yang belum Merata	Beban peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin berat (penduduk miskin kota, migrasi, ketimpangan ekonomi, kesehatan dan pangan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat)	Cuaca Ekstrem dan polusi	Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik	Ketahanan Pangan dan Peningkatan Infrastruktur Pasar
Memiliki kawasan lindung dan RTH cukup luas; sungai dan DAS masih dapat dikendalikan; potensi ekowisata berbasis komunitas	Tantangan Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Perlindungan dan pemulihan daya dukung dan daya tampung ekosistem dan sumber daya alam serta penanganan risiko bencana alam		Transisi energi Terbaharukan	Pengelolaan SDA Berkelanjutan	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
		Perlindungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup (kualitas air dan udara, energi bersih)		Daya Saing Produk yang kompetitif dan ramah lingkungan		

BAB 3 – VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS

Visi dan Misi di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2025-2029 (RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029) secara substansi mengacu pada visi misi hasil proses politik terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai secara langsung pada pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024. Penetapan Visi dan Misi sebagai landasan untuk merumuskan tujuan dan sasaran yang telah disesuaikan dengan prinsip perencanaan dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (RPJPD Tahun 2025-2045).

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi RPJMD Kota Binjai

Visi Pemerintah Kota Binjai tahun 2025-2029 merupakan pandangan dan langkah-langkah ke depan menuju bagaimana mewujudkan Kota Binjai yang maju dan sejahtera. Pandangan tersebut adalah suatu gambaran yang akan dituju tentang keadaan masa depan yang cita-citakan melalui penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan di Kota Binjai serta menjadi gambaran tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan selama 5 (lima) tahun. Adapun pernyataan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Binjai tahun 2025 – 2029 adalah:

“BINJAI MAJU, SEJAHTERA dan BERKELANJUTAN”

Pembangunan dalam memacu kemajuan Kota Binjai secara terus menerus akan dilaksanakan tidak hanya terkonsentrasi pada fisik seperti infrastruktur, modernisasi teknologi dan informasi serta sarana prasarana umum, tetapi juga peningkatan kualitas masyarakatnya melalui perbaikan mutu layanan kesehatan, pendidikan, merangsang terciptanya lapangan kerja baru melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif serta mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan berpedoman pada nilai-nilai budaya dan religi dengan melibatkan peran serta dan partisipatif masyarakat sehingga tujuan kesejahteraan umum dapat tercapai.

Sedangkan makna dari visi Pemerintah Kota Binjai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **MAJU** mengandung makna untuk mewujudkan Kota Binjai yang berkembang pesat melalui inovasi, modernisasi infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketahanan kota dalam menghadapi tantangan masa depan.
2. **SEJAHTERA** mengandung makna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas hidup warga.

3. **BERKELANJUTAN** mengandung makna untuk membangun Kota Binjai yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.

Visi Pembangunan Pemerintah Kota Binjai 2025-2029, mencerminkan komitmen untuk membangun kota yang inovatif, sejahtera, dan ramah lingkungan. Dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, kualitas hidup masyarakat, serta keberlanjutan, visi ini bertujuan untuk menciptakan kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta partisipasi masyarakat, Kota Binjai diharapkan dapat mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya.

Tabel 3. 1. Keterkaitan Visi dan Kata Kunci RPJMD Binjai dengan RPJPD Binjai dengan RPJMD Sumatera Utara dan RPJMN

KETERKAITAN VISI			
RPJPD BINJAI	**RPJMD BINJAI**	**RPJMD SUMUT**	**RPJMN**
Kota Binjai yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Binjai Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045
KETERKAITAN KATA KUNCI			
		Kolaborasi	Bersama
		Sumut Berkah	Indonesia Emas
Maju	Maju	Maju	Maju
Sejahtera	Sejahtera	Unggul	
Berkelanjutan	Berkelanjutan	Berkelanjutan	

Dalam rangka mewujudkan visi RPJMD Kota Binjai Tahun 2025–2029 yaitu “Binjai Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”, Pemerintah Kota Binjai menetapkan sejumlah indikator sasaran utama pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta kebutuhan lokal. Visi ini tercermin dalam upaya peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan oleh target peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dari 4,70–5,10% pada tahun 2025 menjadi 6,80–7,20% pada tahun 2029, serta peningkatan PDRB per kapita dari Rp51,50 juta menjadi Rp86,29 juta dalam periode yang sama. Guna memastikan kontribusi daerah terhadap pembangunan provinsi, proporsi kontribusi PDRB Kota Binjai terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara juga diarahkan untuk tetap terjaga dan meningkat, dari 1,30% pada tahun 2025 menjadi 1,32% pada tahun 2029.

Pembangunan manusia yang berkelanjutan menjadi pilar penting dalam visi ini, tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditargetkan mencapai 80,50–82,90 pada tahun 2029, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditingkatkan dari 63,62 menjadi 74,87. Penurunan

ketimpangan sosial-ekonomi juga menjadi fokus utama, sebagaimana terlihat dari penurunan angka kemiskinan dari 4,26–4,66% menjadi 3,90–4,30%, penurunan Gini Rasio dari 0,316-0,314 menjadi 0,306-0,304, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,16–5,40% menjadi 4,05–4,30% pada tahun 2029.

Selanjutnya, sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, intensitas emisi gas rumah kaca ditargetkan mengalami penurunan yang signifikan, dari 85.611,89 ton CO_2 eq pada tahun 2025 menjadi 147.524,88 ton CO_2 eq pada tahun 2029, mencerminkan strategi mitigasi perubahan iklim yang terintegrasi. Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien diwujudkan melalui peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dari 70,00 menjadi 74,00 pada tahun 2029. Dengan demikian, seluruh indikator sasaran utama tersebut saling terkait dan menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi visi RPJMD Kota Binjai yang berorientasi pada kemajuan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.

Adapun pencapaian indikator sasaran utama pembangunan RPJMD Kota Binjai 2025-2029 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 2. Pencapaian Sasaran Utama Pembangunan RPJMD Kota Binjai

No	Indikator Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	Persen	4,66	4,70-5,10	5,23-5,63	5,75-6,15	6,28-6,68	6,80-7,20	7,33-7,73
2	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Nilai (Rp. Juta)	50,75	51,50	60,20	68,90	77,59	86,29	94,99
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Persen	1,16	1,30	1,,31	1,31	1,32	1,32	1,33
4	Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	4,75	4,26-4,66	4,17-4,57	4,08-4,48	3,99-4,39	3,90-4,30	3,81-4,21
5	Rasio Gini	Angka	0,318	0,312-0,311	0,311-0,310	0,310-0,309	0,308-0,306	0,306-0,304	0,304-0,302
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	78,67	79,52-79,12	80,36-79,96	81,21-80,81	82,05-81,65	82,90-82,50	83,75-83,35
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Ton/Co2 Eq	NA	85.611,88	101.090,13	116.568,38	132.046,63	147.524,88	163.003,13
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	60,81	74,19	74,36	74,53	74,7	74,88	75,05
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	5,44	5,07-5,40	4,88-5,14	4,61-4,86	4,33-4,60	4,05-4,30	3,77-4,00

Indikator sasaran pembangunan dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 telah disusun secara terintegrasi dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 serta pembangunan daerah melalui RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan Kota Binjai berkontribusi langsung terhadap pencapaian

target pembangunan di tingkat provinsi dan nasional, sekaligus menjawab kebutuhan spesifik pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari kesesuaian indikator dan target pembangunan Kota Binjai dengan target pembangunan provinsi dan nasional, antara lain pada indikator laju pertumbuhan ekonomi (LPE), PDRB per kapita, kontribusi terhadap PDRB provinsi, tingkat kemiskinan, rasio gini, indeks pembangunan manusia, penurunan emisi gas rumah kaca, indeks kualitas lingkungan hidup, serta tingkat pengangguran terbuka.

Sejalan dengan visi pembangunan Kota Binjai yang telah dirumuskan, diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk sasaran utama pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar visi yang bersifat umum dapat diterjemahkan ke dalam arah pembangunan yang lebih operasional, terukur, serta dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap tahapan pembangunan memiliki tolok ukur yang jelas, serta dapat dievaluasi secara periodik sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sasaran utama pembangunan pada dasarnya merupakan instrumen strategis yang menghubungkan visi dengan pelaksanaan pembangunan nyata di lapangan. Visi memberikan arah ideal jangka menengah, sedangkan sasaran utama berfungsi sebagai indikator keberhasilan yang lebih konkret. Melalui sasaran utama tersebut, kesinambungan antara tujuan dan capaian dapat terjamin, sehingga arah pembangunan Kota Binjai berjalan secara konsisten, sistematis, dan terarah.

Atas dasar itu, **Tabel 3.2** disajikan untuk memperlihatkan Pencapaian Sasaran Utama Pembangunan RPJMD Kota Binjai. Penyajian tabel ini ditempatkan setelah pembahasan visi untuk menegaskan keterkaitan langsung antara visi yang telah ditetapkan dengan capaian pembangunan yang hendak diwujudkan. Dengan demikian, Tabel 3.2 tidak hanya memuat indikator capaian, tetapi juga berfungsi sebagai penegasan konsistensi logis antara visi pembangunan Kota Binjai dengan ukuran keberhasilan pembangunan yang dapat dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, seluruh indikator sasaran pembangunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 telah dirancang secara harmonis dan konsisten dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan “Binjai Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” secara terarah, terukur, dan berdaya saing tinggi.

Tabel 3. 3. Penyelerasan Sasaran Pembangunan RPJMD Kota Binjai dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran Per Provinsi)			RPJMD Sumatera Utara Tahun 2025-2029			RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029		
	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	7,6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	7,6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,70-5,10	6,80-7,20
2	PDRB per Kapita (Rp Juta)	78,4	115,3	PDRB per Kapita (Rp Juta)	78,4	115,3	PDRB per Kapita (Rp Juta)	51,5	86,29
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	5,3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	5,3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,30	1,32
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	4,26-4,66	3,90-4,30
5	Rasio Gini	0,303-0,305	0,287-0,291	Rasio Gini	0,303-0,305	0,287-0,291	Rasio Gini	0,312-0,311	0,306-0,304
6	Indeks Modal Manusia	0,54	0,57	Indeks Modal Manusia	0,54	0,57	Indeks Pembangunan Manusia	79,12-79,52	82,50-82,90
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	16,88	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	16,88	Penurunan Emisi GRK (ton CO2Eq)	85.611,88	147.524,88
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	74,19	74,88
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27-5,56	4,74-5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27-5,56	4,74-5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,07-5,40	4,05-4,30

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan visi yang baik membantu memperjelas perwujudan visi yang ingin dicapai dan membantu upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan perubahan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan **"Binjai Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan"**, maka dirumuskan 4 (empat) Misi dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kota Binjai tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan serta mendukung Makan Bergizi Gratis bagi anak didik TK, SD dan SMP.

Misi pertama bertujuan untuk mempermudah akses dan kualitas layanan kesehatan serta menyediakan makanan bergizi secara gratis untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan siswa, **sejalan dengan Asta Cita 4 pada RPJMN 2025-2029** dan **Misi 1 RPJMD Sumatera Utara** serta **Misi 1 pada RPJPD Binjai**.

Misi 2 : Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan Misi Kedua, meningkatkan ketahanan ekonomi dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi motor penggerak pemberantasan kemiskinan dengan pola sinergi, **sejalan dengan Asta Cita 2, 4, 5 dan 8 pada RPJMN 2025-2029** dan **Misi 2 dan 5 RPJMD Sumatera Utara** serta **Misi 1, 2 dan 5 pada RPJPD Binjai**.

Misi 3 : Meningkatkan pembangunan Infrastruktur berbasis Teknologi dan berwawasan Lingkungan.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan, **sejalan dengan Asta Cita 3 pada RPJMN 2025-2029** dan **Misi 4 RPJMD Sumatera Utara** serta **Misi 6 dan 7 pada RPJPD Binjai**.

Misi 4 : Mewujudkan penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kreatif.

Perwujudan penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dilakukan untk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi dan transparansi pemerintahan dengan menerapkan E-Government, **sejalan dengan Asta Cita 1 dan 7 pada RPJMN 2025-2029** dan **Misi 3 RPJMD Sumatera Utara** serta **Misi 3, 4 dan 8 pada RPJPD Binjai**.

Misi RPJMD Kota Binjai 2024-2029 disusun sebagai upaya untuk mewujudkan visi RPJMD Kota Binjai, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan sosial,

ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kota Binjai. Dalam penyusunannya, misi RPJMD Kota Binjai ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam misi RPJPD Kota Binjai, RPJMD Sumatera Utara, serta RPJMN. Proses penyusunan misi ini mengacu pada kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan prioritas pembangunan daerah dengan strategi pembangunan nasional dan provinsi, guna memastikan keselarasan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, RPJMD Kota Binjai 2024-2029 bertujuan untuk tidak hanya mendukung pembangunan daerah yang adaptif terhadap perubahan, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat provinsi dan nasional.

Tabel 3. 4. Keterkaitan Misi RPJMD Binjai dengan RPJPD Binjai dan RPJMD Sumatera Utara serta RPJMN Indonesia

<table>
<tr><th colspan="4">KETERKAITAN MISI</th></tr>
<tr><th>RPJPD BINJAI</th><th>RPJMD BINJAI</th><th>RPJMD SUMUT</th><th>RPJMN</th></tr>
<tr><td>Misi 1. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul, Berdaya Saing, dan Mendapatkan Perlindungan Sosial yang Menyeluruh</td><td>Misi 1. Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan Serta Mendukung Program Makan Bergizi Gratis Bagi Anak Didik TK, SD dan SMP</td><td>Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</td><td>Asta Cita 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Genegarsi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas</td></tr>
<tr><td>Misi 1. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul, Berdaya Saing, dan Mendapatkan Perlindungan Sosial yang Menyeluruh</td><td rowspan="3">Misi 2. Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan</td><td rowspan="2">Misi 2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah</td><td>Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru</td></tr>
<tr><td>Misi 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi untuk Mendukung Perekonomian yang Maju, Terintegrasi, dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan</td><td>Asta Cita 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Genegarsi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas</td></tr>
<tr><td>Misi 5. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi yang Kuat dengan Menciptakan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, Pembangunan Inklusif serta Pembangunan Karakter dan Lingkungan</td><td rowspan="2">Misi 5. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh</td><td>Asta Cita 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri</td></tr>
<tr><td>Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan</td></tr>
</table>

KETERKAITAN MISI			
RPJPD BINJAI	**RPJMD BINJAI**	**RPJMD SUMUT**	**RPJMN**
			toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Adil dan Merata Berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah	**Misi 3.** Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan	**Misi 4.** Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	**Asta Cita 3.** Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
Misi 7. Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan			
Misi 3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas serta Pelayanan Publik Berkualitas dan Inovatif	**Misi 4.** Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kreatif	**Misi 3.** Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	**Asta Cita 1.** Memperkokoh Idiologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Misi 4. Mewujudkan Stabilitas Daerah Melalui Penciptaan Lingkungan yang Aman, Tertib dan Nyaman, Stabilitas Ekonomi, serta Kebebasan Demokrasi yang Terjamin			**Asta Cita 7**. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
Misi 8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan Melalui Perencanaan Pembangunan yang Selaras, Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah dan Pengembangan Pembiayaan Inovatif			

3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Binjai

Tujuan pembangunan Kota Binjai tahun 2025-2029 dirancang untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Setiap tujuan yang dirumuskan bertujuan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan yang ada, serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Kota Binjai. Melalui program-program yang berfokus pada sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan, diharapkan Kota Binjai dapat berkembang menjadi kota yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Setiap tujuan pembangunan ini akan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan

berbagai pemangku kepentingan, guna memastikan tercapainya hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi seluruh warga kota.

Adapun tujuan pembangunan Kota Binjai tahun 2025 – 2029, antara lain:

1. **Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar** (Misi 1)

   Tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Binjai. Melalui perbaikan fasilitas kesehatan, peningkatan jumlah tenaga medis, serta penyediaan layanan kesehatan yang lebih merata, diharapkan warga dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih cepat. Program ini juga mencakup peningkatan upaya pencegahan dan penanganan penyakit, serta memastikan bahwa setiap orang, khususnya kelompok rentan, mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. **Terwujudnya SDM unggul** (Misi 1)

   Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, terampil, dan kompetitif. Hal ini dapat dicapai melalui program pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, serta peningkatan akses pendidikan formal dan non-formal bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan mencetak SDM yang unggul, Kota Binjai dapat memastikan generasi muda siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

3. **Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan** (Misi 2)

   Tujuan ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga pangan yang berdampak langsung pada inflasi daerah. Ketika pasokan pangan tersedia secara cukup dan merata, harga cenderung lebih stabil dan terjangkau, sehingga tekanan inflasi, terutama dari komponen makanan, dapat dikendalikan. Stabilitas harga ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat dan iklim usaha di sektor riil. Dalam konteks tersebut, pengendalian inflasi melalui penguatan ketahanan pangan akan mendorong aktivitas ekonomi lokal, membuka peluang kerja, dan menurunkan angka pengangguran. Oleh karena itu, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka digunakan untuk mencerminkan keberhasilan program ini, karena meningkatnya akses pangan yang berkualitas dan terjangkau secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di Kota Binjai..

4. **Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan** (Misi 2)

   Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Pemerintah Kota Binjai akan berfokus pada pengembangan sektor ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini termasuk pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan merata. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan memastikan bahwa kesejahteraan warga

meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi, tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Adapun pencapaian atas tujuan ini dideteksi melalui indikator pertumbuhan ekonomi, PDRB per Kapita, dan Kontribusi PDRB Kota Binjai terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara.

5. **Peningkatan perlindungan sosial dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk rentan** (Misi 2)

   Tujuan ini diarahkan untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat miskin, lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya memperoleh jaminan hidup yang layak, perlindungan dari risiko sosial, serta akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Ketika kelompok rentan tidak mendapatkan intervensi yang memadai, risiko keterpurukan ekonomi akan semakin tinggi dan memperparah tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, melalui berbagai program perlindungan sosial yang tepat sasaran, pemerintah Kota Binjai berupaya memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. *Tingkat Kemiskinan* dijadikan indikator utama untuk mengukur efektivitas kebijakan ini, sebagai gambaran dalam memberikan perlindungan nyata dan inklusif kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

6. **Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan keluarga** (Misi 2)

   Tujuan ini diarahkan untuk menciptakan masyarakat Kota Binjai yang inklusif, harmonis, dan berdaya tahan terhadap berbagai tekanan sosial maupun budaya. Ketahanan keluarga menjadi fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang sehat secara fisik, mental, dan sosial. Melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kerukunan antarumat beragama, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak, tujuan ini juga menjawab tantangan kesenjangan gender dan potensi disintegrasi sosial. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) digunakan sebagai indikator utama karena mencerminkan tiga dimensi penting keluarga: ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Semakin tinggi nilai iBangga, semakin kuat pula pondasi sosial masyarakat yang menopang pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

7. **Terwujudnya sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan berkelanjutan** (Misi 3)

   Tujuan *Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan* menekankan pentingnya infrastruktur yang ramah lingkungan, tangguh terhadap bencana, dan mendukung kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Penurunan emisi gas rumah kaca dan indeks ketahanan lingkungan hidup (IKLH) menjadi indikator utama yang mencerminkan sejauh mana pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tujuan ini secara langsung berkaitan dengan pengelolaan sampah yang terintegrasi, penyediaan sanitasi yang aman, ketahanan terhadap krisis energi dan air, serta infrastruktur adaptif terhadap risiko

bencana. Upaya ini juga mendukung komitmen global terhadap pengendalian perubahan iklim dan pelestarian lingkungan, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kota tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem serta keselamatan generasi mendatang.

8. **Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** (Misi 4)

   Tujuan ini mencerminkan komitmen Kota Binjai dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, responsif, dan akuntabel. Indeks Reformasi Birokrasi digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur kemajuan dalam pembenahan sistem administrasi pemerintahan yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Tujuan ini mencakup penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengembangan tata kelola yang demokratis dan partisipatif, serta penguatan kerja sama antarkota dan lembaga sebagai strategi memperluas kapasitas pelayanan. Selain itu, peningkatan kapasitas fiskal dan keuangan daerah menjadi pondasi penting dalam memastikan keberlanjutan program-program prioritas dan memperkuat daya saing kota. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan berdaya saing tinggi di era digital dan keterbukaan informasi.

9. **Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat** (Misi 4)

   Tujuan ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia bagi seluruh warga Kota Binjai. Persentase penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas kebijakan dan ketegasan aparat dalam menegakkan aturan secara adil dan konsisten. Upaya ini tidak hanya mencakup aspek penindakan, tetapi juga edukasi hukum kepada masyarakat untuk menumbuhkan budaya taat aturan dan partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban. Selain itu, tujuan ini mencakup peningkatan perlindungan terhadap hak-hak warga, pencegahan kriminalitas, serta koordinasi intensif dengan aparat keamanan dan lembaga hukum dalam menjaga stabilitas sosial. Dengan demikian, terciptanya rasa aman dan nyaman bagi seluruh penduduk menjadi fondasi penting dalam mendorong kegiatan sosial-ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Tujuan pembangunan Kota Binjai 2025-2029 mencerminkan komitmen untuk menciptakan perubahan positif yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta infrastruktur yang ramah lingkungan, tujuan-tujuan ini bertujuan untuk menciptakan kota yang lebih inklusif, sejahtera, dan berkelanjutan. Setiap langkah yang diambil akan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi dengan berbagai pihak, untuk memastikan bahwa pembangunan Kota Binjai dapat berjalan secara efektif, adil, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Tabel 3. 5. Struktur Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Outcome RPJMD Kota Binjai 2025-2029

Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan			
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Outcome**
1. Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan Serta Mendukung Makan Bergizi Gratis Bagi Anak Didik TK, SD dan SMP	1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar	1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan masyarakat
	2. Terwujudnya SDM Unggul	2. Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing SDM	Meningkatnya kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat secara merata
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan	3. Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan	3. Terwujudnya Ketercukupan dan Stabilitas Harga Pangan	Terkendalinya stok pangan untuk kestabilan harga
	4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan	4. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi yang Inklusif	Meningkatnya produktivitas dan daya beli masyarakat
		5. Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Yang Ramah Lingkungan Dan Berketahanan	Berkembangnya ekonomi hijau dan wisata kota yang efisien dan tangguh terhadap perubahan
	5. Peningkatan Perlindungan Sosial dan Pemenuhan Hak Dasar Bagi Penduduk Rentan	6. Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Perlindungan Sosial	Tepatnya penyaluran bantuan sosial berbasis data yang akurat
	6. Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga	7. Menguatnya Peran Keluarga dan Kesetaraan	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga dan perlindungan penduduk rentan
		8. Menguatnya Pemanfaatan Nilai-Nilai Keagamaan, Sosial dan Budaya Lokal dalam Pembangunan	Meningkatnya integrasi nilai keagamaan, sosial, dan budaya lokal dalam pembangunan
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan	7. Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	9. Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pendukung Pembangunan Berkelanjutan	Tersedianya sarana prasarana yang layak, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap perubahan iklim
		10. Meningkatnya Ketahanan Lingkungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan	Meningkatnya efisiensi energi, akses air bersih, dan kualitas pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan
4. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kreatif	8. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan	11. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terpercaya	Terwujudnya layanan publik yang efisien, mudah diakses,

Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan			
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Outcome**
	Pemerintahan dan Pelayanan Publik		akuntabel, dan responsif
		12. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Meningkatnya kemudahan dan jangkauan layanan pemerintahan yang inklusif dan berkualitas
		13. Meningkatnya Kapasitas Perencanaan dan Keuangan Daerah	Meningkatnya kemampuan perencanaan dan keuangan daerah
	9. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	14. Meningkatnya Keamanan, Ketertiban, dan Kenyamanan Masyarakat	Terwujudnya rasa aman dan tegaknya keadilan atas kasus pidana secara cepat

Sasaran pembangunan Kota Binjai 2025-2029 merupakan langkah konkret yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Sasaran-sasaran ini dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan responsif. Setiap sasaran akan menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi progres pembangunan dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak yang nyata bagi kemajuan Kota Binjai. Melalui sasaran yang terukur dan terarah, diharapkan Kota Binjai dapat mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan, menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya.

Adapun sasaran pembangunan Kota Binjai tahun 2025 - 2029, antara lain:

1. **Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat** (Tujuan 1)

   Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan mengurangi angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan harapan hidup di Kota Binjai. Melalui upaya perbaikan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan, serta akses yang lebih mudah terhadap pelayanan kesehatan, diharapkan masyarakat akan memperoleh pelayanan yang lebih baik dan kondisi kesehatan yang semakin membaik. Penurunan prevalensi penyakit menular dan tidak menular juga akan menjadi indikator pencapaian sasaran ini.

2. **Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM** (Tujuan 2)

   Sasaran ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia Kota Binjai yang unggul, adaptif, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi pada anak SD dan SMP menjadi fondasi utama dalam membangun kecakapan kognitif generasi muda. Di tingkat lanjutan, peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

mencerminkan kemajuan akses dan kesinambungan pendidikan yang lebih merata dan inklusif.

Selain itu, fokus pada peningkatan proporsi angkatan kerja yang berpendidikan tinggi menunjukkan komitmen untuk mendorong pengembangan keterampilan teknis dan profesional masyarakat, terutama dalam menghadapi transformasi ekonomi yang menuntut kompetensi tinggi. Indikator lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja sesuai bidang keahliannya atau menjadi wirausaha juga menekankan pentingnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja dan penguatan jiwa kewirausahaan. Sasaran ini secara keseluruhan berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan dan inovasi.

3. **Terwujudnya ketercukupan dan stabilitas harga pangan** (Tujuan 3)

   Sasaran ini menekankan pentingnya upaya Pemerintah Kota Binjai dalam menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, serta memastikan harga pangan tidak mengalami fluktuasi yang ekstrem antar waktu dan wilayah. Indikator seperti tingkat inflasi dan koefisien variasi harga antar wilayah menjadi alat penting untuk menilai sejauh mana harga pangan terkendali dan merata. Tingginya variasi harga antar wilayah menandakan adanya ketimpangan distribusi dan akses pangan yang dapat memicu ketidakstabilan sosial dan ekonomi, terutama di daerah yang lebih sulit dijangkau. Dengan menjaga ketercukupan dan kestabilan harga pangan, Pemerintah Kota Binjai tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, tetapi juga turut menjaga stabilitas ekonomi daerah. Langkah ini mendukung upaya pengendalian kemiskinan, menjaga ketertiban sosial, serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

4. **Meningkatnya daya saing ekonomi yang inklusif** (Tujuan 4)

   Sasaran ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Binjai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga merata dan berkeadilan. Daya saing ekonomi diukur dari berbagai indikator seperti kontribusi sektor industri pengolahan, ekonomi kreatif, peran UKM dan IKM, rasio kewirausahaan daerah, serta proporsi volume usaha koperasi terhadap PDRB. Semakin besar kontribusi sektor-sektor tersebut, semakin kuat pula fondasi ekonomi lokal yang mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah terhadap gejolak eksternal.

   Peningkatan indeks inovasi daerah serta proporsi pembentukan modal tetap bruto terhadap PDRB menunjukkan kapasitas Kota Binjai dalam menciptakan nilai tambah dan investasi jangka panjang, baik dari sektor publik maupun swasta. Selain itu, inklusivitas ekonomi juga diukur dari akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Upaya ini untuk menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi

tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat.

5. **Meningkatnya aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan dan berketahanan** (Tujuan 4)

   Sasaran ini Sasaran *Meningkatnya Aktivitas Ekonomi yang Ramah Lingkungan dan Berketahanan* bertujuan untuk mendorong transformasi struktur ekonomi Kota Binjai ke arah yang lebih hijau, inovatif, dan tangguh terhadap perubahan lingkungan dan dinamika global. Melalui indikator seperti Indeks Ekonomi Hijau dan proporsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer, pemerintah kota menargetkan terbangunnya sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga rendah karbon dan berorientasi jangka panjang. Hal ini mendukung upaya pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru dalam sektor energi bersih dan teknologi hijau.

   Peningkatan proporsi PDRB dari sektor akomodasi dan makan minum serta jumlah wisatawan juga mencerminkan dorongan untuk mengembangkan sektor pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada kekayaan budaya dan alam lokal. Wisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif berbasis budaya menjadi motor penggerak pertumbuhan yang memperhatikan kelestarian sumber daya dan partisipasi masyarakat lokal. Hal ini memperkuat daya saing daerah sekaligus memperluas lapangan kerja dan pendapatan.

6. **Meningkatnya akses dan kualitas layanan perlindungan sosial** (Tujuan 5)

   Sasaran ini mencerminkan komitmen Kota Binjai untuk memastikan bahwa setiap warga, terutama kelompok rentan seperti pekerja informal dan penyandang disabilitas, memperoleh perlindungan sosial yang layak dan berkelanjutan. Melalui indikator seperti cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal, pemerintah daerah menargetkan peningkatan inklusi sosial dan pengurangan risiko kerentanan ekonomi akibat kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, atau ketidakmampuan bekerja.

   Penguatan perlindungan sosial tidak hanya bertumpu pada perluasan cakupan kepesertaan, tetapi juga peningkatan kualitas layanan, kemudahan akses, dan literasi masyarakat terhadap manfaat program jaminan sosial. Hal ini penting untuk memperkuat jaring pengaman sosial di tengah dinamika pasar tenaga kerja dan tantangan sosial-ekonomi lainnya. Dengan demikian, perlindungan sosial diorientasikan tidak hanya sebagai respons terhadap kondisi darurat, tetapi sebagai bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan yang menyejahterakan.

   Selain itu, perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas dalam indikator sasaran ini menunjukkan arah kebijakan Kota Binjai yang inklusif dan berkeadilan. Upaya membuka akses sektor formal bagi penyandang disabilitas tidak hanya berdampak pada peningkatan kemandirian ekonomi mereka, tetapi juga memperkuat nilai kesetaraan,

integrasi sosial, serta pemanfaatan potensi seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan.

7. **Menguatnya peran keluarga dan kesetaraan** (Tujuan 6)

   Sasaran ini asaran *Menguatnya Peran Keluarga dan Kesetaraan* dengan indikator Indeks Perlindungan Khusus Anak, Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Binjai untuk memperkuat peran keluarga sebagai unit dasar pembangunan sosial serta mewujudkan kesetaraan dalam akses, partisipasi, dan perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Indikator-indikator ini menunjukkan fokus pada dua hal penting: terjaminnya hak dan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi; dan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang strategis pembangunan, termasuk di bidang ekonomi.

   Dengan meningkatnya Indeks Perlindungan Khusus Anak, diharapkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka secara optimal. Pada saat yang sama, peningkatan IPG dan partisipasi kerja perempuan menunjukkan bahwa perempuan memiliki ruang lebih luas untuk berkontribusi secara produktif, sementara penurunan IKG menunjukkan berkurangnya kesenjangan dalam kesempatan antara laki-laki dan perempuan.

   Secara praktis, penguatan peran keluarga dan kesetaraan akan menciptakan efek berantai terhadap peningkatan kualitas SDM, pengurangan beban sosial, dan terbentuknya masyarakat yang lebih adil dan seimbang. Langkah ini sejalan dengan nilai-nilai pembangunan inklusif dan berkelanjutan yang tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dalam lingkup keluarga dan komunitas.

8. **Menguatnya pemanfaatan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya lokal dalam pembangunan** (Tujuan 6)

   Sasaran ini mencerminkan upaya Kota Binjai untuk menjadikan kekayaan nilai-nilai lokal sebagai fondasi moral dan sosial dalam proses pembangunan. Indikator seperti Persentase Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar budaya (Benda dan Tak Benda), Indeks Kerukunan Umat Beragama, serta Indeks Zakat Nasional menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya dilihat dari sisi fisik dan ekonomi, tetapi juga dari kualitas kehidupan sosial dan identitas budaya masyarakat.

   Melalui penguatan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal, pemerintah mendorong terciptanya harmoni sosial yang menjadi landasan penting bagi stabilitas dan kemajuan daerah. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi antarumat beragama, serta pelestarian budaya lokal turut memperkuat kohesi sosial dan kebanggaan terhadap identitas Kota Binjai.

Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif diterjemahkan setidaknya melalui capaian dua indikator, yaitu meningkatnya Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan menjadi 99% di tahun 2029, dan meningkatnya Indeks Zakat Nasional dari 0,49 poin di tahun 2025 menjadi 0,57 poin pada tahun 2029. Kedua indikator ini diharapkan berkontribusi besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan, sebagai alat ukur kinerja dari peningkatan kesejahteraan masyarakat.

9. **Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendukung pembangunan berkelanjutan** (Tujuan 7)

   Sasaran ini menekankan pentingnya infrastruktur dasar yang mendukung kehidupan masyarakat yang sehat, aman, dan tangguh terhadap perubahan lingkungan maupun risiko bencana. Indikator seperti proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah, akses terhadap sanitasi aman, serta indeks risiko bencana, menjadi tolok ukur nyata dalam menilai kualitas dukungan infrastruktur terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan.

   Akses yang lebih merata terhadap layanan kebersihan dan sanitasi akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mencegah timbulnya berbagai penyakit berbasis lingkungan. Sementara itu, peningkatan sistem mitigasi bencana akan memperkuat ketahanan kota dalam menghadapi ancaman alam dan perubahan iklim.

   Dengan memperbaiki dan memperluas cakupan layanan sarana-prasarana dasar, Kota Binjai dapat mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), terutama yang berkaitan dengan kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta kota dan permukiman yang inklusif dan aman. Pendekatan ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup warga serta menciptakan kota yang layak huni dan berketahanan di masa depan.

10. **Meningkatnya ketahanan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan** (Tujuan 7)

    Sasaran ini berupaya memastikan bahwa pembangunan di Kota Binjai berjalan seiring dengan pelestarian alam dan efisiensi penggunaan sumber daya. Indikator seperti konsumsi listrik per kapita, kapasitas air baku, akses air minum perpipaan, intensitas energi primer, serta indeks pengelolaan keanekaragaman hayati mencerminkan dimensi penting dari ketahanan lingkungan, yaitu ketersediaan energi dan air, serta perlindungan terhadap ekosistem.

    Melalui pengelolaan energi yang hemat dan ramah lingkungan, serta peningkatan akses terhadap air bersih, Kota Binjai dapat mengurangi tekanan terhadap lingkungan sekaligus menjamin kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan.

    Lebih jauh, dengan memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati dan meningkatkan efisiensi energi, kota ini berperan aktif dalam agenda perubahan iklim dan ketahanan ekologi. Hal ini juga menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan

pembangunan ekonomi dan sosial di masa depan, serta mendukung target nasional dalam pengurangan emisi dan pelestarian lingkungan hidup.

11. **Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya** (Tujuan 8)

    Sasaran ini mencerminkan upaya Kota Binjai untuk membangun birokrasi yang responsif, efisien, dan akuntabel, yang menjadi fondasi tata kelola pemerintahan modern. Indikator seperti Indeks Pelayanan Publik, Indeks Reformasi Hukum, dan Indeks Integritas Nasional digunakan untuk menilai sejauh mana layanan pemerintah mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dengan cara yang adil, transparan, dan bebas dari praktik koruptif. Dengan pelayanan publik yang baik, masyarakat dapat merasakan kehadiran negara secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pelayanan administrasi dasar hingga perlindungan hukum yang inklusif.

    Peningkatan kualitas pelayanan ini juga akan mendorong partisipasi publik dalam pembangunan serta memperkuat legitimasi pemerintah daerah. Dalam jangka panjang, hal ini mendukung transformasi birokrasi ke arah digital, adaptif terhadap perubahan, dan selaras dengan semangat reformasi serta prinsip *good governance*.

12. **Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintahan** (Tujuan 8)

    Sasaran ini menekankan pentingnya transformasi digital dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam meningkatkan keterjangkauan, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Melalui indikator seperti Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Indeks Masyarakat Digital Indonesia, serta Indeks Demokrasi Indonesia dan jumlah kerja sama Kota Binjai, sasaran ini menggambarkan komitmen untuk memperluas kanal interaksi antara pemerintah dan warga melalui pemanfaatan teknologi digital dan pendekatan kolaboratif lintas sektor.

    Masyarakat akan semakin dimudahkan dalam mengakses layanan administratif, memberikan aspirasi, hingga terlibat dalam pengambilan keputusan publik melalui platform daring maupun layanan langsung yang adaptif dan partisipatif. Dengan peningkatan aksesibilitas ini, pemerintah daerah tidak hanya memperpendek jarak antara layanan dan masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi lokal serta memperluas jejaring kerja sama dengan pihak lain, baik nasional maupun internasional, untuk mendukung inovasi dan efisiensi pelayanan publik.

13. **Meningkatnya kapasitas perencanaan dan keuangan daerah** (Tujuan 8)

    Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat perencanaan pembangunan dan kemandirian fiskal Kota Binjai dengan mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) serta meningkatkan kinerja keuangan badan usaha milik daerah (BUMD). Indikator seperti Return on Asset (ROA) BUMD dan rasio pajak daerah terhadap PDRB mencerminkan efektivitas pengelolaan aset daerah serta sejauh mana pemerintah daerah mampu

menggalang pendapatan dari potensi ekonomi lokal yang tersedia. Dengan kapasitas keuangan yang meningkat, Kota Binjai dapat memperkuat daya saing fiskalnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong investasi strategis yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

14. **Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat** (Tujuan 9)

    Sasaran ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Binjai dalam menciptakan ruang hidup yang aman, tertib, dan mendukung kesejahteraan warga. Indikator seperti persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM, proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di lingkungan tempat tinggal, rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, dan angka kriminalitas, menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas perlindungan hak-hak warga serta keberhasilan tata kelola ketertiban umum. Masyarakat yang merasa terlindungi dari ancaman kekerasan dan pelanggaran hukum akan lebih leluasa berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya.

    Peningkatan keamanan dan kenyamanan juga mendukung iklim investasi dan pariwisata, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan aparat penegak hukum, Satpol PP, tokoh masyarakat, dan elemen sipil, Kota Binjai diharapkan mampu membangun lingkungan perkotaan yang inklusif, responsif terhadap hak asasi manusia, dan adaptif terhadap tantangan sosial di era modern.

Tabel 3. 6. Keterkaitan Sasaran RPJMD Kota Binjai dengan RPJMD Sumatera Utara dan RPJMN Indonesia

RPJMD Kota Binjai		RPJMD Sumatera Utara		RPJMN	
1	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Inklusif	IE1	Kesehatan untuk semua
2	Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM	2	Meratanya Pendidikan Berkualitas	IE2	Pendidikan unggul dan merata
3	Terwujudnya ketercukupan dan stabilitas harga pangan	6	Terciptanya Stabilitas Harga	IE11	Stabilitas Ekonomi Makro
				IE16	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
4	Meningkatnya daya saing ekonomi yang inklusif	4	Meningkatnya Hilirisasi Produk Unggulan Daerah	IE4	IPTEK, inovasi dan produktivitas ekonomi
		7	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi	IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan global
5	Meningkatnya aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan dan berketahanan	5	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan	IE5	Penerapan ekonomi hijau melalui industri hijau
				IE6	Investasi unggul bernilai tinggi yang didukung oleh transformasi digital
6	Meningkatnya akses dan kualitas layanan perlindungan sosial	3	Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif	IE3	Perlindungan sosial yang adaptif
7	Menguatnya peran keluarga dan kesetaraan	14	Menguatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya Lokal sebagai Identitas Daerah	IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif
8	Menguatnya pemanfaatan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya lokal dalam pembangunan			IE13	Beragama maslahat dan berkebudayan maju
		13	Menguatnya Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Kehidupan Sosial		
9	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendukung pembangunan berkelanjutan	11	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Ramah Lingkungan	IE17	Resiliensi terhadap Benacana dan Perubahan Iklim
10	Meningkatnya ketahanan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	12	Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	IE15	Lingkungan hidup yang berkualitas

RPJMD Kota Binjai		RPJMD Sumatera Utara		RPJMN	
11	Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya	8	Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas	IE8	Pertumbuhan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat ekonomi
12	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintahan			IE9	Penguatan kapabilitas tata kelola berintegritas dan regulasi adaptif
13	Meningkatnya perencanaan dan kapasitas keuangan daerah	9	Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah		
14	Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat	10	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	IE10	Masyarakat demokratis dan penciptaan lingkungan aman
				IE12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Sasaran RPJMD Kota Binjai 2025-2029 disusun dengan memperhatikan keselarasan dan keterkaitannya dengan sasaran RPJMD Sumatera Utara serta sasaran pada RPJMN. Penyusunan sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan Kota Binjai dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, provinsi, dan nasional secara terpadu. Dalam hal ini, sasaran RPJMD Kota Binjai mengakomodasi berbagai isu strategis yang juga menjadi prioritas dalam RPJMD Sumatera Utara dan RPJMN, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, stabilitas ekonomi, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kota Binjai 2025-2029 diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran provinsi dan nasional, serta menciptakan sinergi yang efektif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Binjai 2025-2029, diperlukan pemantauan dan evaluasi yang jelas melalui indikator-indikator kinerja yang terukur. Indikator-indikator tersebut disusun dengan memperhatikan target pencapaian yang realistis dan dapat tercapai hingga tahun 2029. Setiap indikator dirancang untuk menggambarkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, kestabilan ekonomi, penguatan infrastruktur, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya target pencapaian yang terukur dan berbasis waktu, pelaksanaan program dan kegiatan dalam RPJMD Kota Binjai dapat dilaksanakan secara terarah dan terukur, serta memungkinkan evaluasi yang sistematis guna memastikan pencapaian yang optimal. Oleh karena itu, pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Binjai 2025-2029 akan senantiasa mengacu pada indikator-indikator yang telah ditetapkan dan dipantau secara berkelanjutan hingga tahun 2029.

Adapun indikator-indikator kinerja pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Binjai tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 7. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi		Target					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi : Binjai Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan											
Misi 1 : Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan Serta Mendukung Program Makan Bergizi Gratis Bagi Anak Didik TK, SD dan SMP											
1.	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.18	74.45	74.75	75.00	75.35	75.70	76.00	76.25
	1. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	88.94	95,76	98,6	98,6	98,6	99	99	99
		Cakupan UHC	Persen	n/a	n/a	87,41	88,07	88,73	89,39	90,05	90,71
		Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	n/a	n/a	90	90	90	90	90	90
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	n/a	87	90	90	90	90	90	90
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	11,50	7,63	7,48	7,33	7,18	7,03	6,88	6,73
2.	Terwujudnya SDM unggul	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	78.11	78.67	79,52-79,12	80,36-79,96	81,21-80,81	82,05-81,65	82,90-82,50	83,75-83,35
	2. Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM	Kemampuan Literasi Berkategori Baik Tingkat SD	persen	n/a	n/a	59.16	60.25	61.34	62.44	63.54	64.63
		Kemampuan Literasi Berkategori Baik Tingkat SMP	persen								
		Kemampuan Numerasi Berkategori Baik Tingkat SD	persen	n/a	n/a	48.23	49.26	50.29	51.33	52.37	53.40
		Kemampuan Numerasi Berkategori Baik Tingkat SMP	persen								

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi		Target					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas (angkatan kerja) yang berkualifikasi pendidikan tinggi	persen	n/a	10	11	12,5	14,5	16,5	19	21
		Persentase lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi atau menjadi wirausaha	persen	n/a	n/a	10,0	12,5	15,0	17,5	20,0	22,5
		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11.19	11.2	11.49	11.64	11.8	11.97	12.13	12.28
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.17	14.18	14.27	14.35	14.43	14.52	14.61	14.69
Misi 2 : Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan											
3.	Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan	Tingkat Inflasi	Persen	2,19	2,12	2,00-4,00	2,00-4,00	2,00-4,00	2,00-4,00	2,00-4,00	2,00-4,00
	3. Terwujudnya ketercukupan dan stabilitas harga pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	87,25	88,22	89,22	90,32	91,52	92,82	94,22	95,72
		Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah	Persen	n/a	n/a	10	10	10	10	10	10
4.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,75	4,66	4,70-5,10	5,23-5,63	5,75-6,15	6,28-6,68	6,80-7,20	7,33-7,73
		PDRB per Kapita	Rp Juta	47.68	50,75	51,50	60,20	68,90	77,59	86,29	94,99
		Kontribusi PDRB Kota Binjai terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara	Persen	1.39	1,16	1,30	1,,31	1,31	1,32	1,32	1,33
		Rasio Gini	Indeks	0,318	0,318	0,312-0,311	0,311-0,310	0,310-0,309	0,308-0,306	0,306-0,304	0,304-0,302
		Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Poin	n/a	n/a	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00
	4. Meningkatnya daya saing ekonomi yang inklusif	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	11.47	11,47	11.70	12.00	12.30	12.63	12.93	13.23
		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	n/a	n/a	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi		Target					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Persen	n/a	96,51	96,40	96,30	96,20	96,10	96,00	95,90
		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian pada Level Kota Binjai	Persen	n/a	n/a	10.66	10.79	10.93	11.07	11.21	11.34
		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Level Kota Binjai	Persen	n/a	n/a	5.04	5.33	5.62	5.91	6.20	6.49
		Rasio kewirausahaan daerah	Persen	2.33	4.43	4.68	4.93	5.18	5.43	5.68	5.93
		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Persen	n/a	n/a	0.61	0.65	0.68	0.72	0.75	0.79
		Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Memiliki HAKI	Jumlah	n/a	n/a	1	2	3	5	7	9
		Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	n/	54.69	54.89	55.09	55.29	55.49	55.69	55.89
		Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	Persen	33.19	33.62	33.62	33.62	33.62	33.62	33.62	33.62
		Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persen	27,40	26,96	27,25	27,50	27,75	28,10	28,50	28,90
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp/Tenaga Kerja/Tahun	108,86	112,15	113,85	115,55	117,25	118,95	120,65	122,35
		Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	n/a	n/a	10	11	12	14	17	20
		Persentase Peningkatan Investasi	Persen	n/a	n/a	2,5	2,6	2,8	3,0	3,5	3,5

Tujuan	Sasaran		Indikator	Satuan	Realisasi		Target					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	5.	Meningkatnya aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan dan berketahanan	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	5.37	5.66	5.76	5.86	5.96	6.06	6.16	6.26
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	2	3	3	3	3	3	3	3
			Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	2.88	3.94	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5
			Belanja Riset	Rp. Milyar	n/a	0.47	0.51	0.55	0.58	0.61	0.65	0.68
			Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	n/a	n/a	58,00	59,00	60,00	62,00	65,00	68,00
			Nilai Tukar Petani	Poin	n/a	n/a	90,00	90,10	90,25	90,45	90,80	91,20
			Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	30,28	30,25	30,22	30,23	30,24	30,25	30,27	30,3
5.	Peningkatan perlindungan sosial dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk rentan		Tingkat Kemiskinan	Persen	4.79	4.75	4,26-4,66	4,17-4,57	4,08-4,48	3,99-4,39	3,90-4,30	3,81-4,21
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,10	5,44	5,07-5,40	4,88-5,14	4,61-4,86	4,33-4,60	4,05-4,30	3,77-4,00
		6. Meningkatnya akses dan kualitas layanan perlindungan sosial	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Binjai	persen	n/a	n/a	68.00	69.93	71.87	73.81	75.75	77.68
			Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	Persen	n/a	n/a	18.25	20.27	22.3	24.33	26.36	28.38
			Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	n/a	n/a	60,00	61,00	63,00	65,00	67,00	70,00
6.	Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	poin	63,35	63.31:63.8	63.8:64.2	64.2:64.6	64.6:65	65:65.2	65.2:66	66:66.2
		7. Menguatnya peran	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	poin	90,99	91,38	91,40	91,42	91,44	91,45	91,7	91,48

Tujuan	Sasaran		Indikator	Satuan	Realisasi		Target					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		keluarga dan kesetaraan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	n/a	n/a	49,30	49,40	49,50	49,60	49,70	49,80
			Indeks Perlindungan Anak	Poin	67,59	n/a	69,59	70,59	71,59	72,59	73,59	74,59
	8.	Menguatnya pemanfaatan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya lokal dalam pembangunan	Persentase Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar budaya (Benda dan Tak Benda)	Persen	n/a	96.77	96.77	96.77	98.38	98.38	98.38	100
			Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	n/a	n/a	70	70	72	72	73	73
			Indeks Zakat Nasional	Poin	n/a	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59
Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan												
7.	Terwujudnya sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan berkelanjutan		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	ton CO2Eq	n/a	85.611,88	101.090,13	116.568,38	132.046,63	147.524,88	163.003,13	85.611,88
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59.33	60,81	74,19	74,36	74,53	74,7	74,88	75,05
		9.	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendukung pembangunan berkelanjutan	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	n/a	n/a	72	73.75	75.5	77.25	79	80.75
				Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	n/a	n/a	5	7.5	10	12.5	15	17.5
				Indeks Risiko Bencana	Poin	103,2	103,2	103,0	102,7	102,4	102,0	101,5	101,0
				Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	n/a	n/a	91.59	92.11	92.63	93.16	93.69	94.21
				Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Poin	n/a	83,3	84	84,5	85	85,5	86	86,5
				Rasio Konektivitas	persen	n/a	n/a	90	91	92	93	94	95
		10.	Meningkatnya ketahanan	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh	n/a	n/a	800	850	900	1.000	1.102	1.200

Tujuan	Sasaran		Indikator	Satuan	Realisasi		Target					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	Kapasitas Air Baku / Kapasitas Tampungan Air	M3/Detik	n/a	n/a	315,80	315,80	315,80	315,80	315,80	315,80
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	n/a	n/a	0	2.5	5	7.5	10	12.5
Misi 4 : Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kreatif												
8.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	Persen	61,74	66,48	70	71	72	73	74	75
	11.	Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya	Indeks Pelayanan Publik	Poin	2,22	4,01	4,01	4,01	4,10	4,15	4,25	4,55
			Indeks Reformasi Hukum	Poin	n/a	98,98	70,00	71,25	72,50	73,75	75,00	76,25
			Indeks Integritas Nasional	Poin	n/a	n/a	66.78	67.63	68.48	69.34	70.20	71.05
			Indeks Inovasi Daerah	Poin/Skor	42,04	37,93	52.35	53.07	53.79	54.50	55.22	55.94
			Tingkat kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Ombudsman)	Poin	90,72	93,15	93,15	93,15	93,15	93,50	93,75	94,00
			Indeks Profesionalisme ASN	Poin	n/a	n/a	80	82	84	86	88	90
	12.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintahan	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	n/a	n/a	6.79	6.91	7.03	7.15	7.27	7.39
			Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Poin	50,24	43,88	49.50	52.12	54.74	57.37	60.00	62.62
			Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	n/a	n/a	70	74	78	82	86	90
			Jumlah Kerjasama Kota Binjai/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister City)	Jumlah Kerjasama	1	1	1	1	1	1	1	1
	13.	Meningkatnya kapasitas	Return on Asset (ROA) BUMD	Persen	n/a	n/a	-10.23	-9.24	-8.25	-7.26	-6.27	-5.28

Tujuan	Sasaran			Indikator	Satuan	Realisasi		Target					
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			perencanaan dan keuangan daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,50	0,47	0.50	0.53	0,56	0,59	0,62	0,65
				Opini BPK atas Laporan Keuangan	skala	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	n/a	n/a	90	92	94	95	97	99
		14.	Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen	n/a	n/a	70.00	71.25	72.50	73.75	75.00	76.25
				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Poin	n/a	n/a	80	82	84	86	88	90
				Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen	57,14	57,50	58.00	59.00	60.00	61.00	62.00	63.00

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mengarahkan pembangunan selama lima tahun ke depan menuju Kota Binjai yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan, diperlukan penjabaran perencanaan yang lebih mendalam. Rangkaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah digariskan perlu diurai dalam bentuk strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah. Penjabaran lebih lanjut berguna untuk merangkai keseluruhan muatan perencanaan ke dalam satu nafas sehingga seluruh gerak pembangunan daerah dapat berdampak terhadap perwujudan visi Kota Binjai Tahun 2025-2029.

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan Kota Binjai. Rumusan strategi mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai melalui serangkaian arah kebijakan. Selain itu, pentahapan pembangunan juga disampaikan dalam bentuk pernyataan yang memberi pesan langkah setiap tahunnya menuju terwujudnya visi Kota Binjai di akhir periodesasi RPJMD.

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kota Binjai

Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Binjai Tahun 2025–2029 didasarkan pada misi pembangunan kota dengan mempertimbangkan permasalahan daerah serta isu-isu strategis yang relevan. Strategi pembangunan daerah dirancang melalui serangkaian kajian, analisis, dan evaluasi terhadap pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya. Dalam menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kota Binjai, beberapa langkah yang dilakukan meliputi:

1. Menganalisis sasaran pembangunan pada periode sebelumnya serta menyusun proyeksi pembangunan untuk periode lima tahun ke depan;
2. Mengkaji kondisi umum daerah, capaian pembangunan hingga awal periode perencanaan, serta mengidentifikasi permasalahan utama dan isu strategis daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal guna menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh daerah, khususnya pemerintah daerah;
4. Menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factors*) serta mengembangkan berbagai kerangka kebijakan berdasarkan hasil analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia serta dinamika eksternal yang berpengaruh; dan

6. Memilih strategi yang paling optimal guna mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, dengan memastikan efektivitas arah kebijakan yang ditetapkan.

Visi Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan diterjemahkan ke dalam 4 misi lalu diturunkan ke dalam 6 tujuan, yang memiliki 10 sasaran, dan 53 strategi pembangunan. Pada Misi 1, terdapat 3 tujuan, yang pertama yaitu "Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar". Tujuan ini memiliki sasaran yaitu meningkatnya kualitas dan akses kesehatan masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka dilakukan 8 strategi pembangunan antara lain:

1. Melakukan perluasan akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
2. Memperluas jangkauan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
3. Meningkatkan Gizi Masyarakat dan Penurunan Stunting.
4. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi ibu, anak, dan lansia.
5. Memperkuat pencegahan, deteksi dini, dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.
6. Memperkuat Gerakan Hidup Sehat dan Deteksi Dini Penyakit.
7. Meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi tenaga kesehatan.
8. Memperkuat Ketahanan Sosial dan Psikologis Keluarga.

Tujuan kedua dari Misi 1 adalah "Menciptakan SDM unggul". Tujuan ini memiliki 2 sasaran, yaitu (1) meningkatnya kemampuan berproduksi masyarakat, dan (2) Meningkatnya integritas individu. Untuk mencapai sasaran yang pertama, maka disusun 5 strategi pembangunan antara lain:

1. Meningkatkan Akses Pendidikan / Sekolah Gratis.
2. Meningkatkan literasi dan numerasi siswa.
3. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidikan.
4. Meningkatkan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan.
5. Meningkatkan layanan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang selaras dengan kebutuhan industri.

Selanjutnya, untuk mencapai sasaran kedua dari Tujuan "Menciptakan SDM unggul", maka disusun 3 strategi pembangunan antara lain:

1. Memperkuat pendidikan karakter.
2. Meningkatkan kesejahteraan guru.
3. Memperkuat pendidikan inklusif dan akses bagi kelompok miskin, rentan, dan disabel.

Tujuan ketiga dari Misi 1 adalah "Meningkatkan status gizi anak sekolah TK, SD, SMP". Tujuan ini memiliki sasaran yakni Meningkatnya asupan gizi anak sekolah,TK, SD dan SMP. Sasaran ini dapat dicapai melalui 3 strategi sebagai berikut:

1. Memperkuat program makanan bergizi di sekolah.
2. Meningkatkan Edukasi Gizi untuk Siswa, Guru, dan Orang Tua.
3. Menyediakan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Kesehatan di Sekolah.

Kemudian, Misi 2 memiliki tujuan "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan", yang dapat dicapai melalui 2 sasaran. Sasaran pertama adalah berkurangnya Ketimpangan. Sasaran ini dapat dicapai melalui 8 strategi sebagai berikut:

1. Memperkuat Program Bantuan Sosial.
2. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan lansia, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas.
3. Memperkuat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4. Memperkuat Ekonomi Keluarga.
5. Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Pasar Tenaga Kerja.
6. Mencegah dan menangani Kekerasan Berbasis Gender.
7. Memperkuat Kolaborasi Antar Umat Beragama.
8. Memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sasaran kedua dari Misi 2 adalah meningkatnya daya saing perekonomian. Sasaran ini dapat dicapai melalui 11 strategi pembangunan antara lain:

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Ketenagakerjaan.
2. Mengembangkan Industri Kreatif Berbasis Inovasi.
3. Memperkuat Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Mengembangkan Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Dukungan Pemerataan.
5. Memperkuat Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok.
6. Memperkuat Peran BUMD dalam Pembangunan dan Penerimaan Daerah.
7. Mengembangkan Teknologi Pertanian Perkotaan.
8. Memperkuat Investasi yang Mendukung Penyerapan Tenaga Kerja dan Berorientasi Ekspor.
9. Mengendalikan Inflasi dan Stabilitas Harga.
10. Melakukan Efisiensi Belanja Operasional dan Peningkatan Alokasi untuk Pembangunan.
11. Mengidentifikasi dan Inventarisasi Cagar Budaya.

Misi 3 memiliki tujuan "Menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman serta mendukung keberlanjutan pembangunan". Tujuan ini memiliki sasaran (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dan (2) Meningkatkan pengelolaan sampah, sanitasi dan air bersih berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran yang pertama, maka ditetapkan 3 strategi sebagai berikut:

1. Memperkuat Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati.
2. Menganggulangi Perubahan Iklim dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca.
3. Mengembangkan Infrastruktur Energi Terbarukan di Perkotaan.

Selanjutnya, untuk mencapai sasaran kedua dari Misi 3 ditetapkan sebanyak 3 strategi, antara lain:

1. Mengelola Sampah dan Limbah yang Berkelanjutan.
2. Memulihkan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
3. Memperkuat Sanitasi dan Pengelolaan Limbah untuk Menjaga Kualitas Air.

Kemudian, Misi 4 memiliki tujuan "Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik". Tujuan ini memiliki 2 sasaran yaitu (1) meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, dan (2) meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintahan. Untuk mencapai sasaran pertama, maka strateginya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi sistem dan layanan.
2. Mengembangkan Infrastruktur Digital untuk Pemerintahan Terpadu.
3. Meningkatkan Kapasitas SDM Pelayanan Publik.
4. Menyelesaikan Tindak Pidana yang Cepat dan Adil.
5. Meningkatkan Kerja Sama Pemerintah Daerah.
6. Meningkatkan Kepemimpinan Daerah.

Lalu, untuk mencapai sasaran yang kedua, maka ditetapkan sebanyak 3 strategi, antara lain:

1. Memperkuat Integritas melalui Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Transparan.
2. Meningkatkan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan.
3. Memperkuat Kualitas Kebijakan Publik.

I. Misi 1 **Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan Serta Mendukung Makan Bergizi Gratis Bagi Anak Didik TK, SD dan SMP** memiliki 2 tujuan yang ingin dicapai yaitu **Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar**, dan **Terwujudnya SDM Unggul.** Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran pembangunan sebagai berikut:
   a. Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat
   b. Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing SDM

   Dalam rangka mewujudkan **visi Kota Binjai yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan**, **Misi 1** difokuskan pada upaya *meningkatkan kesehatan dan pendidikan serta mendukung makanan bergizi gratis bagi anak didik TK, SD, dan*

SMP. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kota Binjai menetapkan strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara terintegrasi. Arah kebijakan diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan, melalui penguatan sarana dan prasarana layanan, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC), pengendalian penyakit berbasis surveilans, serta penguatan intervensi gizi dalam menurunkan angka stunting. Di bidang pendidikan, fokus diarahkan pada pemerataan layanan pendidikan dasar-menengah secara gratis dan inklusif, pemenuhan sarana-prasarana sesuai standar nasional, penguatan pendidikan karakter dan kompetensi guru, serta pengembangan keterampilan kerja dan vokasi yang adaptif terhadap kebutuhan industri. Program makan bergizi gratis menjadi bagian dari upaya peningkatan gizi anak didik, sekaligus memperkuat daya tahan belajar dan pertumbuhan generasi muda. Keberhasilan misi ini diukur dari peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, tumbuhnya SDM unggul, serta tercapainya target-target indikator outcome seperti menurunnya prevalensi stunting, meningkatnya angka harapan hidup, dan meningkatnya capaian pendidikan yang merata di seluruh wilayah Kota Binjai.

Dalam kerangka tersebut, ditetapkan dua sasaran pembangunan yang saling melengkapi. Pertama *meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat*, kedua *Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing SDM*. Kedua Sasaran tersebut dicapai melalui strategi dan arah kebijakan yaitu:

1. **Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat**
    a. **Meningkatkan sarana, prasarana, dan kualitas layanan kesehatan**. Strategi dalam kerangka **Misi 1** diarahkan untuk memperkuat sistem layanan kesehatan dasar yang mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan wilayah dengan keterbatasan fasilitas. Arah kebijakan yang mendukung strategi ini mencakup perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC), peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan rumah sakit, serta penyediaan tenaga medis yang proporsional di setiap wilayah. Pendekatan promotif dan preventif juga diperkuat melalui edukasi kesehatan dan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat, dengan tujuan akhir menurunkan angka kesakitan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjamin layanan kesehatan yang adil dan berkualitas di seluruh Kota Binjai.
    b. **Penguatan sistem kesehatan masyarakat yang preventif dan berkelanjutan.** Strategi dalam mendukung **Misi 1** diarahkan untuk membangun ketahanan kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif

dan preventif yang terintegrasi sejak dini. Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, penguatan surveilans penyakit menular dan tidak menular, serta intervensi gizi seimbang untuk pencegahan stunting dan gangguan tumbuh kembang anak. Selain itu, pembangunan sistem layanan kesehatan yang adaptif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim juga diperkuat agar upaya kesehatan tetap berjalan secara berkelanjutan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar kesehatan dan tangguh terhadap berbagai ancaman kesehatan di masa depan.

Tujuan kedua dari Misi 1 **Terwujudnya SDM Unggul**, yang akan dilaksanakan dengan sasaran **Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing SDM** arah kebijakan, yaitu:

a. **Memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan.** Memastikan setiap anak usia sekolah di Kota Binjai memperoleh layanan pendidikan yang setara, inklusif, dan bermutu. Arah kebijakan mencakup penyediaan sekolah gratis jenjang SD dan SMP, pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta penguatan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Upaya ini juga didukung dengan pengembangan sistem pembelajaran digital dan pemberian bantuan bagi siswa kurang mampu, guna mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas hasil belajar secara merata di seluruh wilayah.
b. **Memperkuat kapasitas pendidikan yang berorientasi karakter dan dunia kerja.** Diarahkan untuk membangun sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Arah kebijakan difokuskan pada penguatan pendidikan karakter, pengembangan kurikulum berbasis profil pelajar Pancasila, serta integrasi keterampilan vokasional dan kewirausahaan sejak jenjang pendidikan dasar. Pemerintah Kota Binjai juga mendorong kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam penyelarasan program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penguatan program vokasi yang relevan dan aplikatif bagi peserta didik.
c. **Meningkatkan keterampilan kerja yang memenuhi kebutuhan industri dan dunia usaha**. Menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan siap diserap oleh pasar kerja. Arah kebijakan difokuskan pada pengembangan program pelatihan vokasional, sertifikasi kompetensi, serta peningkatan akses pendidikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia industri. Pemerintah Kota Binjai juga memperkuat kemitraan dengan

lembaga pelatihan, sektor swasta, dan dunia usaha melalui program magang, inkubasi wirausaha, serta pembentukan Komite Ekonomi Kreatif, guna menciptakan tenaga kerja yang terampil, adaptif, berdaya saing di tingkat lokal maupun nasional.

2. Misi 2 **Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan** diturunkan ke dalam 4 tujuan pembangunan, yaitu:
   a. Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan.
   b. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan.
   c. Peningkatan Perlindungan Sosial dan Pemenuhan Hak Dasar Bagi Penduduk Rentan.
   d. Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga

      Tujuan pertama dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran pembangunan, yaitu Terwujudnya ketercukupan dan stabilitas harga pangan.

      Dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing, **Misi 2** difokuskan pada *Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi Dan Sosial Serta Pemberantasan Kemiskinan*. Misi ini dijalankan melalui penguatan sektor-sektor ekonomi lokal yang menjadi keunggulan daerah, seperti perdagangan, jasa, pertanian perkotaan, dan industri kecil menengah, dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil. Pemerintah Kota Binjai mendorong tumbuhnya ekosistem kewirausahaan dengan membentuk Komite Ekonomi Kreatif, mengembangkan pusat-pusat inovasi dan pelatihan digital, serta meningkatkan akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku UMKM. Sejalan dengan arah transformasi ekonomi hijau, pemanfaatan sumber daya lokal didorong secara berkelanjutan melalui penerapan prinsip ramah lingkungan dan efisiensi energi dalam kegiatan usaha. Digitalisasi proses bisnis, pengembangan ekonomi berbasis platform, dan kemitraan strategis lintas sektor juga diperkuat untuk memastikan daya saing ekonomi kota di era industri 4.0. Dengan pendekatan ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi Kota Binjai tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas, inklusif, serta mampu menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

I. Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan

a. **Meningkatkan aksesibilitas pangan melalui distribusi dan kemitraan dengan wilayah sentra pangan**. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang merata bagi masyarakat Kota Binjai. Arah

kebijakan difokuskan pada penguatan kerja sama antarwilayah dengan daerah penghasil pangan, pengembangan sistem distribusi yang efisien, serta pemanfaatan teknologi logistik untuk mempercepat rantai pasok pangan. Pemerintah juga mendorong peran pelaku usaha lokal dan UMKM dalam memperluas jaringan distribusi serta memastikan stabilitas harga bahan pokok. Upaya ini diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan daerah sekaligus memperkuat struktur ekonomi lokal secara berkelanjutan.

II. Tujuan kedua dari Misi 2 **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan**, yang akan dilaksanakan dengan 2 sasaran dan arah kebijakan, sasaran pertama **Meningkatnya Daya Saing Ekonomi yang Inklusif** sebagai berikut:

a. **Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja**. Memperluas kesempatan kerja yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia lokal. Arah kebijakan difokuskan pada pengembangan pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri, perluasan akses sertifikasi kompetensi, serta peningkatan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dan pusat karier daerah. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk menciptakan ekosistem kerja yang adaptif dan inklusif. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan memperkuat daya saing ekonomi Kota Binjai secara berkelanjutan.

Sasaran kedua dari tujuan kedua dari Misi 2 yaitu, **Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Yang Ramah Lingkungan dan Berketahanan** sebagai berikut:

a. **Mendorong ekonomi berkelanjutan dan berketahanan daerah**. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tangguh terhadap risiko krisis, ramah lingkungan, dan berbasis potensi lokal. Arah kebijakan difokuskan pada pengembangan ekonomi hijau, pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam secara lestari, serta penguatan pelaku usaha lokal dalam menerapkan praktik bisnis berkelanjutan. Pemerintah Kota Binjai juga mendorong inovasi dalam sektor pertanian perkotaan, ekonomi sirkular, dan adaptasi terhadap perubahan iklim sebagai bagian dari transformasi ekonomi jangka panjang. Melalui pendekatan ini, diharapkan struktur ekonomi daerah menjadi lebih resilien, inklusif, dan selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Tujuan ketiga dari Misi 2 **Peningkatan Perlindungan Sosial dan Pemenuhan Hak Dasar Bagi Penduduk Rentan**, yang akan dilaksanakan dengan 1 sasaran dan arah kebijakan, **Meningkatnya Akses Dan Kualitas Layanan Perlindungan Sosial** sebagai berikut:

a. **Memperluas jangkauan dan efektivitas perlindungan sosial.** Selaras dengan Misi 2 diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan melalui sistem perlindungan sosial yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan responsif terhadap kondisi krisis. Arah kebijakan difokuskan pada penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial, penguatan mekanisme penyaluran bantuan sosial, serta peningkatan kapasitas layanan dasar bagi kelompok miskin, lansia, disabilitas, dan anak. Pemerintah Kota Binjai juga memperkuat sinergi antarprogram dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan jangkauan perlindungan yang lebih luas, efektif, dan berkeadilan dalam menjaga ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Tujuan keempat dari Misi 2 **Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga**, yang akan dilaksanakan dengan 2 sasaran dan arah kebijakan, **Menguatnya Peran Keluarga dan Kesetaraan** sebagai berikut:

a. **Mendorong ketahanan keluarga dan keadilan gender**. Memperkuat peran keluarga sebagai unit dasar pembangunan sosial dan ekonomi yang tangguh serta mendorong kesetaraan akses antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi keluarga berbasis komunitas, serta penguatan layanan konseling keluarga, pendidikan pengasuhan, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah Kota Binjai juga mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan pengembangan UMKM, guna menciptakan lingkungan sosial yang inklusif, adil, dan sejahtera bagi seluruh anggota keluarga.

Sasaran kedua dari tujuan keempat dari Misi 2 yaitu, **Menguatnya pemanfaatan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya lokal dalam pembangunan** sebagai berikut:

a. **Menguatnya pemanfaatan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya lokal.** Memperkokoh identitas dan kohesi sosial masyarakat sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan difokuskan pada pelestarian budaya lokal, penguatan peran lembaga keagamaan dan adat dalam pemberdayaan masyarakat, serta integrasi nilai-nilai

moral dan etika dalam program pembangunan. Pemerintah Kota Binjai juga mendorong kolaborasi dengan tokoh agama, budayawan, dan komunitas lokal guna membangun karakter masyarakat yang berintegritas, toleran, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat modal sosial dalam mendukung agenda pembangunan daerah.

3. Dalam rangka pencapaian Misi 3 **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan**, dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai **Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan**. Tujuannya memiliki 2 sasaran antara lain: 1) **Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pendukung Pembangunan Berkelanjutan**, dan 2) **Meningkatnya Ketahanan Lingkungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan**. Untuk mencapai sasaran pertama, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:
   a. **Memperkuat infrastruktur lingkungan yang adaptif dan berkelanjutan**. Meningkatkan ketahanan kota terhadap dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan melalui pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan tahan bencana. Arah kebijakan difokuskan pada pengendalian banjir, pengelolaan sampah terpadu, rehabilitasi daerah aliran sungai, serta penyediaan ruang terbuka hijau yang merata. Pemerintah Kota Binjai juga mendorong penggunaan teknologi hijau dan pendekatan berbasis ekosistem dalam perencanaan infrastruktur, guna menjamin kualitas lingkungan hidup yang sehat, aman, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

   Sasaran kedua dari tujuan pertama dari Misi 3 yaitu, **Meningkatnya Ketahanan Lingkungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan** sebagai berikut:
   a. **Mendorong pelestarian ekosistem dan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan**. Menjaga keseimbangan alam dan memastikan keberlanjutan fungsi lingkungan dalam mendukung kehidupan masyarakat Kota Binjai. Arah kebijakan difokuskan pada perlindungan kawasan lindung, rehabilitasi lahan kritis, pengendalian pencemaran, serta penerapan prinsip ekonomi hijau dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam konservasi lingkungan melalui edukasi, insentif lingkungan, dan penguatan kelembagaan berbasis komunitas, guna mewujudkan pembangunan yang harmonis antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam.

4. Misi 4 yaitu **Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kreatif**, diturunkan ke dalam 2 tujuan pembangunan yaitu 1) **Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, dan 2) **Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**. Tujuan tersebut kemudian diturunkan ke dalam 4 sasaran yang harus dicapai, yaitu 1) **Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya**, 2) **Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintahan**, 3) **Meningkatnya kapasitas keuangan daerah**, dan 4) **Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat**. Untuk mencapai sasaran yang pertama, maka strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

   I. **Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

      a. **Mendorong transformasi pelayanan publik melalui digitalisasi dan peningkatan kapasitas aparatur**. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan difokuskan pada pengembangan sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE), integrasi data antarinstansi, serta penguatan kompetensi ASN dalam pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah Kota Binjai juga mempercepat pembangunan Mal Pelayanan Publik dan pusat komando digital (command center) guna memastikan pelayanan yang cepat, efisien, dan dapat diakses oleh seluruh warga, sekaligus memperkuat budaya kerja birokrasi yang adaptif dan profesional.

   Sasaran kedua dari tujuan pertama dari Misi 4 yaitu, **Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan** sebagai berikut:

   a. Strategi **Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintahan**. Memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan terpencil, dapat mengakses layanan publik secara mudah, cepat, dan setara. Arah kebijakan difokuskan pada penyediaan layanan terpadu melalui Mal Pelayanan Publik, pengembangan layanan daring berbasis aplikasi, serta penyederhanaan prosedur administrasi yang ramah pengguna. Pemerintah Kota Binjai juga memperluas titik layanan hingga tingkat kelurahan dan memperkuat sistem pengaduan masyarakat yang responsif, guna meningkatkan kepercayaan publik serta mewujudkan pelayanan pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan.

Sasaran ketiga dari tujuan pertama dari Misi 4 yaitu, **Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah** sebagai berikut:

a. Strategi **Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.** Menciptakan tata kelola fiskal yang efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi belanja publik. Pemerintah Kota Binjai juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem keuangan daerah guna memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

II. Tujuan kedua dari Misi 4 **Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**, yang akan dilaksanakan dengan sasaran **Meningkatnya Keamanan, Ketertiban, dan Kenyamanan Masyarakat** arah kebijakan, yaitu:

a. **Memperkuat sistem hukum dan kepemimpinan yang responsif.** Mewujudkan pemerintahan yang taat hukum, berintegritas, dan mampu merespons aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Arah kebijakan difokuskan pada penguatan peraturan daerah yang partisipatif, pengembangan sistem pengawasan yang transparan, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam menjalankan fungsi kepemimpinan yang inklusif dan adaptif. Pemerintah Kota Binjai juga mendorong penerapan prinsip *restorative justice*, mediasi sosial, dan kolaborasi antar lembaga guna memperkuat kepercayaan publik dan stabilitas sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Strategi **Mencegah dan menanggulangi ancaman keamanan berbasis kolaborasi dan teknologi**. Menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif melalui sinergi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi informasi. Arah kebijakan difokuskan pada penguatan sistem deteksi dini, pengawasan berbasis data dan CCTV, peningkatan kapasitas aparatur keamanan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Pemerintah Kota Binjai juga mendorong integrasi pusat kendali keamanan digital dan penyusunan protokol penanggulangan konflik sosial untuk memastikan respons yang cepat dan terukur terhadap potensi gangguan ketertiban umum.

Arah kebijakan pembangunan disusun sebagai langkah strategis untuk mewujudkan strategi yang telah dirancang serta menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah. Implementasi arah kebijakan setiap tahunnya akan membentuk fokus atau tema pembangunan yang lebih terarah. Dengan demikian, strategi dan kebijakan yang dipilih dirumuskan secara sistematis guna mencapai tujuan serta sasaran pembangunan jangka menengah Kota Binjai secara optimal. Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Binjai ditabulasi sebagai berikut :

Tabel 3. 8. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan			
Misi 1: Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan Serta Mendukung Makan Bergizi Gratis Bagi Anak Didik TK, SD dan SMP			
1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar	1. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan	Meningkatkan sarana, prasarana, dan kualitas layanan kesehatan
			Memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC) berbasis sistem rujukan yang efisien dan inklusif
			Memperkuat intervensi gizi dan penurunan stunting secara terintegrasi
			Meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak berbasis keluarga dan komunitas
			Mengendalikan penyakit menular dan tidak menular berbasis surveilans dan respons cepat
		Penguatan sistem kesehatan masyarakat yang preventif dan berkelanjutan	Memperkuat promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
			Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi, dan distribusi tenaga kesehatan yang merata
			Memperkuat intervensi gizi terpadu di lingkungan sekolah
			Perluasan akses dan pembudayaan olahraga di masyarakat
2. Terwujudnya SDM unggul	2. Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM	Memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan	Memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar dan menengah secara gratis dan inklusif
			Mengembangkan kurikulum yang adaptif untuk meningkatkan literasi, numerasi, dan keterampilan
			Memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan
			Memperluas pendidikan inklusif bagi kelompok miskin, rentan, dan penyandang disabilitas
			Peningkatan kualitas pembelajaran literasi dan numerasi di jenjang SD dan SMP secara merata
			Perluasan akses dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi
		Memperkuat kapasitas pendidikan yang berorientasi karakter dan dunia kerja	Meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik guru
			Memperkuat pendidikan karakter melalui pembelajaran kontekstual dan keteladanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru secara berkelanjutan
		Meningkatkan keterampilan kerja yang memenuhi kebutuhan industri dan dunia usaha	Memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri dan dunia usaha
			Meningkatkan keterampilan usaha secara teknis dan manajerial
			Penguatan ekosistem literasi melalui pengembangan perpustakaan, komunitas baca, dan akses bahan bacaan yang inklusif
Misi 2 : Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan			
3. Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan	3. Terwujudnya ketercukupan dan stabilitas harga pangan	Meningkatkan Aksesibilitas Pangan Melalui Distribusi dan Kemitraan dengan Wilayah Sentra Pangan	Meningkatkan kerjasama antar daerah sentra pangan untuk distribusi pangan
			Mengendalikan stok pangan untuk kestabilan harga
			Menstabilkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah
			Penguatan sistem pangan lokal yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh terhadap krisis
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan	4. Meningkatnya daya saing ekonomi yang inklusif	Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Memperkuat Kapasitas dan Pendampingan Berkelanjutan
			Menyusun Kebijakan Daerah yang Mendukung Ekosistem Ekonomi Kreatif
			Meningkatkan Literasi Digital bagi Pelaku UMKM
			Memperkuat Promosi dan Branding Even Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Memperkuat Kemitraan Strategis antara Pemerintah dan Dunia Usaha Dalam Penyediaan Kesempatan Kerja
			Memperkuat Ekosistem Investasi yang Ramah bagi Investasi
			Meningkatkan Akses UMKM terhadap Pasar Ekspor
			Peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
			Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM
			Perluasan akses layanan keuangan formal dan penguatan literasi keuangan masyarakat
			Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi berbasis potensi ekonomi lokal
			Penguatan dan pemberdayaan IKM berbasis potensi lokal melalui dukungan infrastruktur, akses pasar, pembiayaan, dan pelatihan kewirausahaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	5. Meningkatnya aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan dan berketahanan	Mendorong ekonomi berkelanjutan dan berketahanan daerah	Mengembangkan pertanian ramah lingkungan yang terintegrasi dengan sistem pangan perkotaan
			Meningkatkan Distribusi Benih dan Bibit Berkualitas
			Memperkuat Promosi dan Peningkatan SDM Pariwisata
			Peningkatan kapasitas, partisipasi, dan kesejahteraan pemuda di berbagai bidang pembangunan
			Peningkatan pendapatan dan daya beli pelaku usaha tani dan perikanan melalui penguatan produksi, akses pasar, dan efisiensi biaya usaha
			Pengembangan sektor perdagangan yang berdaya saing dan berkelanjutan
5. Peningkatan perlindungan sosial dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk rentan	6. Meningkatnya akses dan kualitas layanan perlindungan sosial	Memperluas jangkauan dan efektivitas perlindungan sosial	Memperkuat ketepatan sasaran, kesinambungan, dan integrasi bantuan sosial
			Memperkuat aksesibilitas dan keberlanjutan jaminan sosial bagi kelompok rentan dan disabilitas
			Mendorong kepesertaan aktif dan perlindungan menyeluruh bagi pekerja informal
			Penguatan pemberdayaan sosial masyarakat rentan melalui peningkatan kapasitas, akses layanan, dan kemandirian ekonomi
6. Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan keluarga	7. Menguatnya peran keluarga dan kesetaraan	Mendorong ketahanan keluarga dan keadilan gender	Meningkatkan layanan dan edukasi kesehatan mental berbasis keluarga
			Mendorong kemandirian ekonomi keluarga melalui akses usaha dan pelatihan
			Memperkuat sistem perlindungan dan layanan terpadu untuk korban kekerasan keluarga
			Mengimplementasikan Kebijakan Tenaga Kerja Disabilitas
			Penguatan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi untuk mewujudkan jumlah kelahiran yang ideal
	8. Menguatnya pemanfaatan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya lokal dalam pembangunan	Mengarusutamakan nilai keagamaan, sosial dan budaya dalam pembangunan	Perlindungan dan Pelestarian Seni Budaya
			Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya
			Pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal sebagai sumber daya pembangunan
			Memperkuat Suasana Kekeluargaan dan Gotong Royong Antarwarga Binjai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Memperkuat Kerukunan Antar Umat Beragama
			Meningkatkan peran sarana keagamaan dalam mendorong kerukunan umat beragama
			Memperkuat Peran Keluarga dalam Menghindari Pemakaian Narkoba dan Kenakalan Remaja
Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan			
7. Terwujudnya sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan berkelanjutan	9. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendukung pembangunan berkelanjutan	Memperkuat infrastruktur lingkungan yang adaptif dan berkelanjutan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Adaptif terhadap Perubahan Iklim
			Memanfaatkan Teknologi Sistem pengelolaan limbah yang terintegrasi dan ramah lingkungan
			Meningkatkan konektivitas perkotaan
			Mengembangkan Sistem Drainase Perkotaan yang Terintegrasi
			Meningkatkan cakupan dan kualitas sarana sanitasi
			Menyediakan Sarana Transportasi Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
			Meningkatkan Penyediaan Air Bersih Perkotaan
			Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
			Memperkuat Infrastruktur Pendukung Pariwisata
			Meningkatkan Kenyamanan, Kebersihan, dan Kesehatan Lingkungan Pasar
			Meningkatkan Akses Internet di Ruang Publik
			Dukungan terhadap pengembangan Wilayah Metropolitan Medan serta Kawasan Industri Medan–Binjai–Deli Serdang
			Penguatan jaringan konektivitas transportasi antarwilayah
	10. Meningkatnya ketahanan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	Mendorong pelestarian ekosistem dan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi berbasis ekosistem
			Mendorong pemanfaatan energi terbarukan dalam infrastruktur dan layanan perkotaan
			Mendorong adopsi energi baru terbarukan dan kendaraan rendah emisi
			Perlindungan dan rehabilitasi kawasan lindung serta peningkatan tutupan lahan hijau secara berkelanjutan
			Perluasan akses energi listrik yang merata, andal, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Penguatan sistem penyediaan air bersih melalui peningkatan kapasitas sumber dan jaringan layanan air minum perpipaan
Misi 4 : Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kreatif			
8. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	11. Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya	Mendorong transformasi pelayanan publik melalui digitalisasi dan peningkatan kapasitas aparatur	Meningkatkan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik untuk transparansi dan efisiensi
			Meningkatkan kompetensi aparatur untuk memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat
			Penguatan sistem statistik daerah melalui peningkatan kualitas, koordinasi, dan pemanfaatan data sektoral berbasis evidence
			Memperkuat Fungsi Pengawasan Internal secara Preventif dan Responsif
			Meningkatkan proses perumusan kebijakan berbasis data
			Memperkuat disiplin ASN melalui pengawasan ketat dan pembinaan berkelanjutan
			Memperkuat Good Corporate Governance (GCG) dalam Mendukung Kinerja ASN
			Mempercepat Layanan Perizinan dan Nonperizinan Dalam Mendukung Iklim Investasi
			Peningkatan tata kelola kearsipan yang tertib dan akuntabel
			Peningkatan kualitas layanan administrasi dan pendukung kerja legislatif secara profesional dan responsif
			Penguatan implementasi SPIP secara terintegrasi
			Penguatan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, dan replikasi praktik cerdas
	12. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintahan	Memperluas jangkauan dan integrasi layanan pemerintah	Peningkatan kualitas, kecepatan, dan kemudahan layanan administrasi kependudukan berbasis digital dan ramah masyarakat
			Membangun dan memperluas jaringan infrastruktur digital untuk layanan terpadu

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Memperkuat sinergi antar daerah untuk meningkatkan akses dan efektivitas layanan.
			Memperluas keterlibatan publik dan sektor non-pemerintah dalam pelayanan publik
			Peningkatan kepastian hukum dan keteraturan administrasi pertanahan melalui digitalisasi dan pemutakhiran data tanah
	13. Meningkatnya kapasitas Perencanaan dan keuangan daerah	Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah	Memperluas kontribusi BUMD dalam pembangunan ekonomi dan PAD
			Mengurangi belanja tidak produktif dan meningkatkan proporsi belanja pembangunan
			Meningkatkan edukasi dan pelayanan perpajakan daerah secara inklusif
			Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan
			Penguatan tata kelola aset dan barang milik daerah secara transparan, akuntabel, dan optimal
			Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, berbasis data dan riset
9. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	14. Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat	Memperkuat sistem hukum dan kepemimpinan yang responsif	Meningkatkan efektivitas sistem hukum dan peradilan untuk menjamin keadilan.
			Membangun sistem pengawasan internal dan eksternal yang akuntabel.
			Menyelesaikan konflik hukum dengan pendekatan keadilan yang humanis dan inklusif.
			Membangun sinergi Ormas dengan Program Pemerintah Kota Binjai.
		Mencegah dan Menanggulangi Ancaman Keamanan Berbasis Kolaborasi dan Teknologi	Meningkatkan sistem keamanan Berbasis Teknologi
			Peningkatan kerjasama seluruh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
			Strategi preventif terhadap aktivitas perjudian daring.
			Penguatan kapasitas dan sinergi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat berbasis partisipasi dan pencegahan
			Membangun Kampung Bebas Narkoba dalam Mendukung Program Penghentian Peredaran Narkoba.

3.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Binjai

Rumusan strategi yang diturunkan ke dalam beberapa arah kebijakan memudahkan proses perencanaan dalam menentukan tahapan-tahapan untuk menuju arah yang ditetapkan. Pentahapan ini juga merupakan kompromi atas keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk menunaikan seluruh arah kebijakan dalam satu periode waktu. Pencapaian tujuan yang juga membutuhkan waktu tunggu untuk naik ke level berikutnya menuju *outcome* yang berdampak juga menjadi dasar atas rasionalisasi pentahapan yang dibangun.

Sesuai amanah yang tertuang dalam RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045, bahwa arah kebijakan pada Periodesasi Tahap I RPJPD telah ditetapkan sebagai tahap penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang disertai dengan penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Kondisi terkini Pembangunan Kota Binjai yang telah memulai dan menjalankan proses transformasi tersebut, membutuhkan penguatan lebih mendalam.

Pada RPJMD Tahap I tahun 2026, Pembangunan Kota Binjai diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan. Berbagai program yang diimplementasikan harus bergerak menuju perbaikan indikator-indikator yang mendukung tercapainya kinerja pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola secara sejajar. Tidak ada dikotomi level kepentingan di antara keempat aspek tersebut, yang dengan kata lain, keempat pilar sama pentingnya untuk diperkuat. Setiap orientasi kegiatan-kegiatan yang berjalan didesain untuk mempertimbangkan keempat aspek tersebut hingga menjadi habit dari setiap kegiatan, termasuk penentuan penerima manfaat atas kegiatan yang mendukung kesetaraan hingga keputusan-keputusan atas konsumsi barang dan jasa yang ramah lingkungan. Pada tahap ini, identifikasi dan penyediaan hutan kota dan pengembangan taman kota menjadi fokus, termasuk pemanfaatan lahan menganggur seperti eks perkebunan, serta perencanaan revitalisasi sungai sebagai langkah awal menuju pembangunan yang lebih hijau. Selain itu, dukungan atas meningkatnya produktivitas ekonomi kota dan potensi pengembangan ekonomi kreatif digalakkan, agar dapat menjadi basis bagi strategi pertumbuhan di tahap berikutnya.

Memasuki Tahap II pada tahun 2027, pembangunan Kota Binjai diarahkan untuk mengoptimalkan kebijakan dan infrastruktur yang inklusif. Segenap langkah yang diambil mencakup penyempurnaan regulasi yang mendukung keberlanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada tahap ini, adanya hutan kota dan taman kota diiringi dengan revitalisasi sungai

di beberapa titik untuk mendukung ekosistem yang lebih sehat. Selain itu, integrasi sektor wisata kota mulai diperkuat dengan mengembangkan ragam aktivitas di tengah ruang terbuka hijau yang dapat menarik kunjungan wisatawan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat. Produktivitas ekonomi semakin ditingkatkan dengan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, serta implementasi kebijakan yang lebih mendukung ekonomi kreatif berbasis lokal. Penguatan pangan kota juga menjadi perhatian dengan mendorong pertanian perkotaan dan sistem distribusi yang lebih efisien guna memastikan ketahanan pangan bagi masyarakat Binjai.

Tabel 3. 9. Pentahapan Pembangunan RPJMD Kota Binjai 2025-2029

TAHAP I (2025-2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan	Mengoptimalkan kebijakan dan infrastruktur inklusif	Memperluas akses dan partisipasi masyarakat	Meningkatkan daya saing dan kesejahteraan ekonomi	**Mewujudkan Kota Binjai yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan**

Pada Tahap III di tahun 2028, fokus pembangunan bergeser ke upaya memperluas akses dan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan. Pemerintah Kota Binjai berupaya memberdayakan masyarakat melalui peningkatan keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Program-program inklusif semakin diperkuat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Infrastruktur digital juga dikembangkan guna mempercepat akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik, sehingga tercipta ekosistem yang lebih transparan dan partisipatif.

Penguatan *Smart City* mulai diterapkan secara lebih luas dalam sistem pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan data perkotaan untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Revitalisasi sungai semakin diperluas dengan sistem pengelolaan air yang lebih modern, dan upaya integrasi wisata dengan ekosistem lingkungan kota mulai menunjukkan hasil yang lebih nyata. Pada tahap ini, ekonomi kreatif semakin berkembang dengan adanya dukungan infrastruktur dan fasilitas publik yang menunjang pelaku usaha lokal. Efisiensi dalam belanja operasi pemerintah mulai dioptimalkan guna meningkatkan efektivitas belanja dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memastikan setiap alokasi anggaran memberikan dampak yang lebih besar bagi pembangunan.

Tahap IV yang berlangsung pada tahun 2029 menitikberatkan pada peningkatan daya saing dan kesejahteraan ekonomi. Pemerintah Kota Binjai mendorong

pengembangan sektor unggulan yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi dalam inovasi, teknologi hijau, serta industri kreatif menjadi prioritas guna memperkuat daya saing ekonomi daerah. Pada tahap ini, dilakukan perluasan wilayah ekonomi agar tidak hanya terpusat di beberapa kecamatan tertentu, melainkan tersebar lebih merata guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Ketersediaan pangan semakin diperhatikan melalui penguatan sektor pertanian perkotaan dan sistem distribusi yang lebih efisien.

Produktivitas ekonomi terus didorong melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja serta diversifikasi ekonomi yang mengakomodasi perkembangan industri kreatif dan teknologi. Selain itu, efisiensi belanja operasi semakin diperketat, memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki dampak maksimal terhadap pembangunan daerah dan peningkatan PAD. Infrastruktur drainase dan jalan kota mendapatkan perhatian lebih besar guna menunjang aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pada tahap V di tahun 2030, seluruh upaya yang telah dilakukan di tahap-tahap sebelumnya berujung pada terwujudnya Kota Binjai yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Kota ini telah berkembang menjadi wilayah dengan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta kelestarian lingkungan. Keempat pilar pembangunan telah terintegrasi secara lebih optimal dalam setiap kebijakan dan kegiatan, menciptakan tata kelola yang efektif dan inklusif. Infrastruktur drainase dan jalan kota semakin dimantapkan guna memastikan kelancaran mobilitas penduduk serta ketahanan kota terhadap risiko banjir. Sektor wisata kota yang telah terintegrasi dengan revitalisasi sungai dan ruang terbuka hijau semakin berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi lokal. Produktivitas ekonomi bergulir dengan sistem ekonomi kreatif yang mapan dan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh kecamatan. Dengan efisiensi belanja operasi yang telah berhasil dioptimalkan, pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Gambaran dari pentahapan pembangunan RPJMD Kota Binjai diatas kemudian diurai dalam bentuk arah kebijakan di setiap tahunnya. Tahapan dari arah kebijakan merupakan rangkaian yang menjadi simpul dari tercapainya sasaran yang diinginkan. Adapun konektivitas antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 10. Strategi dan Tahapan Arah Kebijakan RPJMD Kota Binjai 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Tahapan Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan								
Misi 1: Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan Serta Mendukung Makan Bergizi Gratis Bagi Anak Didik TK, SD dan SMP								
1.1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar	1.1.1. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan	Penguatan infrastruktur dasar fasilitas kesehatan, termasuk peningkatan sarana dan prasarana di puskesmas dan klinik daerah.	Perluasan cakupan layanan kesehatan dengan memastikan ketersediaan tenaga medis yang kompeten dan distribusi yang merata.	Digitalisasi layanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar.	Peningkatan program kesehatan preventif dan promotif, termasuk kampanye kesehatan masyarakat dan pemeriksaan kesehatan rutin.	Optimalisasi sistem rujukan dan koordinasi antar fasilitas kesehatan untuk memastikan pelayanan yang lebih cepat dan efektif.	Penguatan keberlanjutan layanan kesehatan melalui kebijakan berbasis data, peningkatan kualitas SDM kesehatan, dan integrasi layanan berbasis teknologi.
			Menguatkan pendanaan dan tata kelola Binjai UHC untuk memastikan keberlanjutan program.	Memperluas kepesertaan dan memastikan akses kesehatan bagi kelompok rentan.	Memperluas kepesertaan dan memastikan akses kesehatan bagi kelompok rentan.	Mendorong peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan JKN	Meningkatkan kualitas layanan, pemerataan tenaga medis, dan digitalisasi layanan kesehatan.	Membangun pusat layanan informasi dan pengaduan terkait JKN untuk meningkatkan transparansi dan kepuasan peserta.
			Melaksanakan edukasi gizi Seimbang untuk keluarga dan pemberian makanan tambahan (PMT) bergizi bagi balita dan ibu hamil.	Pemberian makanan tambahan (PMT) bergizi bagi balita dan ibu hamil.	Peningkatan kualitas layanan posyandu dalam mendeteksi dini stunting dan memberikan penyuluhan gizi kepada masyarakat	Peningkatan kualitas layanan posyandu dalam mendeteksi dini stunting dan memberikan penyuluhan gizi kepada masyarakat	Mengoptimalkan intervensi berbasis komunitas dan kolaborasi lintas sektor.	Memastikan keberlanjutan program melalui evaluasi dan penguatan kebijakan berbasis data.
			Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan serta penyediaan fasilitas	Meningkatkan cakupan layanan kesehatan preventif dan pemeriksaan	Mengembangkan program promotif dan preventif, seperti edukasi	Pengembangan layanan kesehatan terpadu yang komprehensif	Pengembangan layanan kesehatan terpadu yang komprehensif	Mengintegrasikan layanan kesehatan ibu, anak, dan lansia dengan teknologi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Tahapan Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			yang ramah ibu, anak, dan lansia.	berkala bagi ibu hamil, anak, dan lansia di puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.	kesehatan ibu dan anak, deteksi dini penyakit lansia, serta intervensi gizi seimbang.	dengan menyediakan layanan kesehatan ibu, anak, dan lansia	dengan menyediakan layanan kesehatan ibu, anak, dan lansia	digital, termasuk rekam medis elektronik dan telemedicine untuk akses yang lebih luas.
		2. Penguatan sistem kesehatan masyarakat yang preventif dan berkelanjutan	Memperkuat sistem surveilans dan respons cepat untuk deteksi dini penyakit menular dan tidak menular.	Meningkatkan cakupan imunisasi, skrining kesehatan, dan edukasi pencegahan di masyarakat.	Memperkuat infrastruktur rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk respons cepat terhadap wabah penyakit menular atau bencana alam	Mengembangkan layanan kesehatan berbasis komunitas untuk pemantauan dan pengendalian faktor risiko.	Memperluas akses pengobatan, rehabilitasi, serta integrasi layanan kesehatan primer dan rujukan.	Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan data kesehatan untuk pengendalian penyakit yang lebih efektif dan berkelanjutan.
			Mengadakan kampanye dan edukasi kesehatan secara berkala melalui media sosial, seminar, dan kegiatan komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat.	Menyediakan fasilitas olahraga publik yang mudah diakses masyarakat untuk mendorong aktivitas fisik secara rutin	Mengembangkan program pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala bagi masyarakat guna mendeteksi penyakit sejak dini.	Meningkatkan kerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan sektor swasta dalam penyelenggaraan program kesehatan preventif.	Mendorong kebijakan tempat kerja sehat dengan penyediaan layanan kesehatan bagi pekerja dan promosi gaya hidup sehat di lingkungan kerja.	Mendorong kebijakan tempat kerja sehat dengan penyediaan layanan kesehatan bagi pekerja dan promosi gaya hidup sehat di lingkungan kerja.
			Meningkatkan insentif, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan.	Memperluas pemerataan distribusi tenaga kesehatan di seluruh fasilitas layanan.	Mengembangkan pelatihan, beasiswa, dan sertifikasi berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi.	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan kerja bagi tenaga kesehatan, termasuk dengan penyediaan	Memperkuat sistem digitalisasi dalam administrasi layanan kesehatan guna mengurangi beban administratif	Memperkuat sistem digitalisasi dalam administrasi layanan kesehatan guna mengurangi beban administratif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Tahapan Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
						fasilitas yang layak dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas.	tenaga kesehatan dan meningkatkan efisiensi kerja.	tenaga kesehatan dan meningkatkan efisiensi kerja.
			Menyediakan layanan penyuluhan dan konseling tentang kesehatan mental bagi keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi dan sosial.	Melatih tenaga pendamping keluarga dan kader kesehatan dalam memberikan dukungan psikososial di masyarakat.	Membangun mekanisme deteksi dini dan intervensi dini bagi keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan ketidakstabilan emosional.	Mengembangkan platform digital untuk konsultasi psikologis bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan akses layanan kesehatan mental.	Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan akademisi dalam penguatan ketahanan sosial keluarga.	Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan akademisi dalam penguatan ketahanan sosial keluarga.
1.2. Terwujudnya SDM unggul	1.2.1. Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM	1. Memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendidikan PAUD dan Dasar.	Meningkatkan akses keluarga terhadap PAUD	Memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan dasar untuk siswa dari keluarga kurang mampu	Meningkatkan jumlah beasiswa pendidikan tinggi, terutama bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan berprestasi.	Meningkatkan jumlah beasiswa pendidikan tinggi, terutama bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan berprestasi.	Mengembangkan kurikulum inklusif dan layanan pendukung bagi anak berkebutuhan khusus serta daerah terpencil.
			Menyediakan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan metode pengajaran yang efektif.	Meningkatkan kompetensi siswa melalui program pembelajaran berbasis literasi, matematika, dan sains.	Menyediakan bahan ajar dan metode pengajaran yang fokus pada pemahaman konsep dasar yang kuat dalam bidang tersebut	Memperluas akses terhadap bahan ajar digital tentang literasi dan numerasi yang terintegrasi	Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa.	Mengoptimalkan evaluasi dan intervensi berbasis data untuk memastikan peningkatan literasi dan numerasi secara berkelanjutan.
			Menyediakan program pelatihan berkala bagi guru, terutama di bidang	Meningkatkan kualitas metode pengajaran melalui program pelatihan	Memperkuat sistem insentif dan apresiasi bagi guru berprestasi untuk	Menyediakan insentif dan peluang beasiswa untuk	Mengembangkan komunitas belajar dan pendampingan bagi guru untuk	Mengoptimalkan evaluasi dan sistem pengembangan karier untuk

Tujuan	Sasaran	Strategi	Tahapan Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			pedagogi modern, literasi digital, dan metode pembelajaran kreatif.	berbasis teknologi dan inovasi.	mendorong profesionalisme.	pendidikan lanjutan bagi guru	meningkatkan kolaborasi dan inovasi pembelajaran.	keberlanjutan kompetensi tenaga pendidikan.
			Memetakan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar nasional.	Menyediakan fasilitas pendidikan yang ramah anak, inklusif, dan mendukung kebutuhan siswa dengan disabilitas.	Menyediakan fasilitas pendidikan yang ramah anak, inklusif, dan mendukung kebutuhan siswa dengan disabilitas.	Memastikan ketersediaan alat dan bahan pembelajaran yang memadai, termasuk laboratorium, perpustakaan, serta akses ke teknologi digital.	Mengembangkan sistem pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur pendidikan agar tetap dalam kondisi baik dan berkelanjutan.	Mengembangkan sistem pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur pendidikan agar tetap dalam kondisi baik dan berkelanjutan.
			Pemberian makan bergizi gratis bagi siswa PAUD, SD dan SMP.	Meningkatkan pengawasan terhadap kualitas makanan yang dikonsumsi anak di sekolah.	Mengembangkan program bantuan makanan bergizi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.	Mengembangkan program bantuan makanan bergizi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.	Meningkatkan keterlibatan orang tua dan komunitas dalam edukasi gizi anak.	Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi dampak program terhadap kesehatan siswa.
			Mengintegrasikan edukasi gizi dalam kurikulum sekolah.	Melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi guru dan orang tua tentang pentingnya gizi seimbang bagi anak.	Memperkuat keterlibatan orang tua melalui program sosialisasi dan kampanye gizi seimbang.	Mengembangkan kampanye "Gizi Seimbang" di lingkungan sekolah dengan melibatkan siswa secara aktif	Mengembangkan kampanye "Gizi Seimbang" di lingkungan sekolah dengan melibatkan siswa secara aktif	Mengembangkan kampanye "Gizi Seimbang" di lingkungan sekolah dengan melibatkan siswa secara aktif
			Memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai di sekolah.	Meningkatkan akses air bersih, toilet layak, dan fasilitas cuci tangan di sekolah.	Melakukan skrining kesehatan dan pemantauan gizi anak secara berkala.	Melakukan skrining kesehatan dan pemantauan gizi anak secara berkala	Mengembangkan program kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah secara berkelanjutan.	Mengoptimalkan pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas kesehatan sekolah untuk keberlanjutan layanan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Tahapan Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		2. Memperkuat kapasitas pendidikan yang berorientasi karakter dan dunia kerja	Menyediakan insentif dan tunjangan berbasis kinerja bagi guru	Memastikan adanya program perlindungan sosial bagi guru, termasuk jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan tunjangan profesi.	Memberikan akses kredit atau bantuan perumahan bagi guru	Memastikan adanya mekanisme pengaduan dan advokasi bagi guru dalam menghadapi masalah kesejahteraan dan ketenagakerjaan.	Membangun sistem penghargaan dan apresiasi bagi guru yang berprestasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah	Membangun sistem penghargaan dan apresiasi bagi guru yang berprestasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah
			Meningkatkan jumlah dan kualitas sekolah inklusif yang menyediakan layanan pendidikan bagi anak dengan disabilitas.	Memberikan pelatihan kepada guru dalam mengelola kelas inklusif dan memahami kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus.	Menyediakan beasiswa penuh bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin, rentan, dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kerja sama dengan organisasi non-pemerintah dalam penyediaan beasiswa dan program peningkatan kapasitas bagi siswa penerima beasiswa	Meningkatkan kerja sama dengan organisasi non-pemerintah dalam penyediaan beasiswa dan program peningkatan kapasitas bagi siswa penerima beasiswa	Meningkatkan kerja sama dengan organisasi non-pemerintah dalam penyediaan beasiswa dan program peningkatan kapasitas bagi siswa penerima beasiswa
		3. Meningkatkan keterampilan kerja yang memenuhi kebutuhan industri dan dunia usaha	Mengembangkan kurikulum vokasi dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri.	Menjalin kerja sama dengan industri lokal dan nasional untuk menyediakan program magang bagi siswa dari Balai Latihan Kerja	Memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk program magang dan sertifikasi.	Mengadakan sertifikasi keahlian bagi generasi muda untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja	Mengadakan sertifikasi keahlian bagi generasi muda untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja	Mengoptimalkan sistem pemantauan dan evaluasi ketercocokan lulusan dengan pasar kerja.
			Mengintegrasikan pendidikan karakter dan kewarganegaraan ke dalam semua jenjang pendidikan, termasuk aspek	Meningkatkan peran guru dan tenaga pendidik dalam pembinaan karakter siswa.	Mendorong kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan karakter positif seperti kejujuran,	Mengembangkan program kemitraan dengan keluarga dan komunitas untuk memperkuat pendidikan karakter	Mendorong keterlibatan keluarga dan komunitas dalam penguatan pendidikan karakter.	Mengoptimalkan evaluasi dan inovasi metode pendidikan karakter untuk keberlanjutan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Tahapan Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			disiplin, tanggung jawab, etika, dan moral		tanggung jawab, toleransi, dan kepemimpinan	di luar lingkungan sekolah		
Misi 2: Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi, dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan								
2.1. Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan	2.1.1. Terwujudnya ketercukupan dan stabilitas harga pangan	1. Meningkatkan Aksesibilitas Pangan Melalui Distribusi dan Kemitraan dengan Wilayah Sentra Pangan	Mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam memonitor dan mengendalikan harga di pasar.	Penguatan cadangan pangan dan sistem distribusi untuk menjaga stabilitas harga barang pokok, terutama selama periode krisis.	Menerapkan kebijakan subsidi yang tepat sasaran produk pangan.	Menerapkan kebijakan subsidi yang tepat sasaran produk pangan.	Menerapkan kebijakan subsidi yang tepat sasaran produk pangan.	Menerapkan kebijakan subsidi yang tepat sasaran produk pangan.
			Mengoptimalkan anggaran dengan mengurangi belanja yang kurang produktif dan meningkatkan efisiensi birokrasi.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.	Memprioritaskan belanja pada program pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.	Mendorong penggunaan instrumen pembiayaan kreatif, seperti obligasi daerah dan kemitraan publik-swasta (PPP) untuk proyek-proyek infrastruktur.	Memperkuat digitalisasi dalam sistem keuangan daerah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.	Mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan peran BUMD dan inovasi dalam pengelolaan aset daerah.
			Meningkatkan koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani dalam pengelolaan stok dan distribusi bahan pokok.	Memperkuat cadangan pangan daerah dan memperluas jaringan distribusi untuk menjaga kestabilan harga.	Mengoptimalkan kekuatan produksi lokal dan mengurangi ketergantungan bahan pokok melalui kemitraan petani dan dukungan teknologi pertanian.	Pengembangan dan revitalisasi pasar untuk mendukung distribusi barang dari wilayah produksi ke wilayah konsumsi	Mempermudah akses permodalan dan subsidi bagi petani serta peternak untuk meningkatkan produksi dan efisiensi usaha.	Memanfaatkan teknologi digital dalam pemantauan harga dan distribusi guna mencegah spekulasi serta kelangkaan barang.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Tahapan Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan	2.2.1. Meningkatnya daya saing ekonomi yang inklusif	1. Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Memperluas akses pelatihan vokasi dan sertifikasi berbasis industri untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.	Mendorong kerja sama dengan dunia usaha dan akademisi dalam pengembangan tenaga kerja yang siap industri.	Insentif bagi perusahaan yang berpartisipasi dalam program pengembangan keterampilan pekerja.	Mempermudah akses informasi pasar kerja dan penyaluran tenaga kerja melalui platform digital.	Revitalisasi balai latihan kerja (BLK) dengan menambahkan program pelatihan kewirausahaan berbasis teknologi dan inovasi	Mengembangkan program magang dan inkubasi usaha guna meningkatkan pengalaman kerja dan kewirausahaan.
			Mendorong pelaku industri kreatif untuk memanfaatkan teknologi dan digitalisasi dalam produksi serta pemasaran.	Menyediakan ruang kreatif, inkubasi bisnis, dan pelatihan untuk meningkatkan daya saing industri kreatif.	Peningkatan akses pembiayaan untuk startup dan UMKM di sektor ekonomi kreatif	Peningkatan produktivitas dan daya saing melalui pemanfaatan teknologi digital bagi industri kreatif.	Memperkuat promosi produk kreatif lokal melalui platform digital dan jaringan kemitraan nasional maupun internasional.	Membangun ekosistem industri kreatif yang kolaboratif melalui kerja sama dengan akademisi, komunitas, dan sektor swasta.
			Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang mendukung investasi dan aktivitas ekonomi.	Mendorong pengembangan kawasan perdagangan, jasa, dan industri kreatif untuk memperluas peluang usaha.	Mengurangi ketimpangan ekonomi dengan membangun pusat ekonomi baru di seluruh kecamatan	Mempermudah perizinan usaha dan investasi guna menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.	Memperkuat konektivitas antarwilayah melalui transportasi yang efisien untuk mendukung mobilitas tenaga kerja dan distribusi barang.	Memperkuat konektivitas antarwilayah melalui transportasi yang efisien untuk mendukung mobilitas tenaga kerja dan distribusi barang.
			Meningkatkan tata kelola dan profesionalisme BUMD agar lebih	Memfasilitasi kerja sama antara BUMD dan UMKM untuk memperluas rantai	Memperkuat kerja sama antara BUMD, swasta, dan masyarakat dalam	Mendorong kerjasama dengan lembaga keuangan dan investor untuk	Mendorong kerjasama dengan lembaga keuangan dan investor untuk	Memanfaatkan teknologi digital dalam transparansi, efisiensi, dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Tahapan Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			kompetitif dan berkontribusi optimal pada pendapatan daerah.	pasokan lokal dan memaksimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar	pengelolaan aset daerah yang produktif.	menyediakan skema pembiayaan yang mendukung ekspansi BUMD.	menyediakan skema pembiayaan yang mendukung ekspansi BUMD.	pengembangan layanan BUMD agar lebih modern dan berdaya saing.
			Mempermudah akses kredit dan modal usaha bagi keluarga pelaku UMKM serta menyediakan pendampingan bisnis untuk meningkatkan daya saing.	Menyelenggarakan pelatihan keterampilan usaha, manajemen keuangan, dan digitalisasi bisnis bagi keluarga pelaku usaha mikro dan kecil.	Meningkatkan promosi produk UMKM melalui marketplace digital, pameran nasional, dan kemitraan dengan ritel modern untuk memperluas akses pasar.	Menyederhanakan proses perizinan usaha bagi UMKM serta memberikan insentif bagi usaha yang telah memiliki legalitas resmi.	Memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan platform digital guna menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.	Memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan platform digital guna menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.
			Meningkatkan pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi bisnis bagi pelaku UMKM.	Mempermudah akses permodalan dan insentif bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan daya saing.	Memperluas akses pasar melalui promosi produk lokal di marketplace digital dan kemitraan dengan ritel modern.	Mengembangkan pusat ekonomi baru di seluruh kecamatan untuk meningkatkan daya sebar putaran ekonomi.	Mendorong kolaborasi koperasi, UMKM, dan pemerintah dalam membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan dan merata.	Mendorong kolaborasi koperasi, UMKM, dan pemerintah dalam membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan dan merata.
	2.2.2. Meningkatnya aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan dan berketahanan	2. Mendorong ekonomi berkelanjutan dan berketahanan daerah	Penerapan sistem pertanian hidroponik, aeroponik, dan vertikultur di perkotaan.	Penerapan sistem pertanian hidroponik, aeroponik, dan vertikultur di perkotaan.	Mengintegrasikan pertanian perkotaan dalam tata ruang kota untuk memanfaatkan ruang kosong, dan atap gedung.	Membangun ekosistem agribisnis perkotaan melalui kemitraan dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas petani.	Mengembangkan pemasaran digital dan rantai distribusi yang efisien untuk memastikan hasil pertanian urban terserap dengan baik di pasar lokal.	Meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pengembangan usaha pertanian perkotaan melalui investasi dan kemitraan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Tahapan Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi dan percepatan perizinan usaha.	Mendorong investasi di sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.	Mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan fasilitas logistik guna mendukung ekspor.	Memberikan insentif bagi investor yang berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan , kesejahteraan pekerja, serta beroirentasi ekspor.	Pemberian insentif dan kemudahan dalam investasi pada industri yang padat tenaga kerja dan berorientasi ekspor	Memperluas akses pasar internasional bagi produk lokal melalui kerja sama dagang dan promosi ekspor digital.
			Mengembangkan destinasi wisata unggulan dengan infrastruktur yang mendukung kenyamanan pengunjung.	Mengembangkan destinasi wisata unggulan dengan infrastruktur yang mendukung kenyamanan pengunjung.	Meningkatkan promosi wisata dan ekonomi kreatif melalui digital marketing dan event berskala nasional.	Mendorong kolaborasi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memperkaya atraksi serta produk lokal.	Mengembangkan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan pelibatan masyarakat lokal dan penerapan standar ramah lingkungan.	Mengembangkan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan pelibatan masyarakat lokal dan penerapan standar ramah lingkungan.
2.3. Peningkatan perlindungan sosial dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk rentan	2.3.1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan perlindungan sosial	1. Memperluas jangkauan dan efektivitas perlindungan sosial	Meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial melalui digitalisasi data dan verifikasi penerima manfaat.	Mengoptimalkan alokasi anggaran bantuan sosial agar lebih efisien dan berkelanjutan.	Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi.	Pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan penerima bantuan benar-benar adalah mereka yang paling membutuhkan, melalui pemutakhiran data secara berkala	Pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan penerima bantuan benar-benar adalah mereka yang paling membutuhkan, melalui pemutakhiran data secara berkala	Pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan penerima bantuan benar-benar adalah mereka yang paling membutuhkan, melalui pemutakhiran data secara berkala
			Memperbaiki sistem pendataan	Meningkatkan akses layanan	Mengembangkan program pelatihan	Mengintegrasikan sistem bantuan	Meningkatkan kerja sama dengan sektor	Meningkatkan kerja sama dengan sektor

Tujuan	Sasaran	Strategi	Tahapan Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			penerima manfaat dengan teknologi digital untuk memastikan bantuan tepat sasaran.	kesehatan, pendidikan, dan bantuan ekonomi bagi lansia, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas.	keterampilan dan peluang kerja bagi kelompok rentan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.	sosial berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.	swasta, akademisi, dan komunitas guna memastikan keberlanjutan program jaminan sosial.	swasta, akademisi, dan komunitas guna memastikan keberlanjutan program jaminan sosial.
			Memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja formal, informal, dan rentan/lepas.	Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perusahaan serta pekerja terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.	Menyediakan program pelatihan keterampilan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) untuk membantu tenaga kerja masuk kembali ke pasar kerja	Menyediakan program pelatihan keterampilan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) untuk membantu tenaga kerja masuk kembali ke pasar kerja	Memperkuat kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan, dan sektor swasta untuk memastikan keberlanjutan program.	Memperkuat kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan, dan sektor swasta untuk memastikan keberlanjutan program.
2.4. Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan keluarga	2.4.1. Menguatnya peran keluarga dan kesetaraan	1. Mendorong ketahanan keluarga dan keadilan gender	Mendorong kebijakan rekrutmen yang inklusif dan menghilangkan diskriminasi gender dalam dunia kerja.	Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Gender dengan menyediakan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.	Memberikan dukungan dan akses modal bagi perempuan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dipimpin oleh perempuan.	Mengintegrasikan program padat karya yang melibatkan perempuan, khususnya di sektor pertanian, industri kreatif, dan kriya.	Mengembangkan layanan penitipan anak, kebijakan cuti yang mendukung perempuan, serta fleksibilitas kerja untuk keseimbangan kehidupan dan pekerjaan.	Mengembangkan layanan penitipan anak, kebijakan cuti yang mendukung perempuan, serta fleksibilitas kerja untuk keseimbangan kehidupan dan pekerjaan.
			Memperkuat regulasi dan penegakan hukum untuk perlindungan korban.	Meningkatkan edukasi dan kampanye pencegahan di masyarakat.	Memperluas layanan pengaduan, pendampingan, dan rumah aman.	Memberdayakan penyintas melalui pelatihan dan dukungan usaha.	Pemberian bantuan pemulihan psikologis, dan kesehatan bagi	Menguatkan kolaborasi dengan LSM, dunia usaha, dan komunitas.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Tahapan Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
							korban kekerasan berbasis gender.	
	2.4.2. Menguatnya pemanfaatan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya lokal dalam pembangunan	1. Mengarusutamakan nilai keagamaan, sosial dan budaya dalam pembangunan	Fasilitasi forum dialog antar umat beragama secara berkala untuk memperkuat toleransi dan kolaborasi antar pemeluk agama	Fasilitasi forum dialog antar umat beragama secara berkala untuk memperkuat toleransi dan kolaborasi antar pemeluk agama	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya toleransi dan saling menghormati antar umat beragama melalui program pendidikan dan kampanye publik.	Membentuk sistem deteksi dini dan penyelesaian konflik berbasis agama di wilayah yang memiliki potensi tinggi untuk terjadi ketegangan antar agama.	Membentuk sistem deteksi dini dan penyelesaian konflik berbasis agama di wilayah yang memiliki potensi tinggi untuk terjadi ketegangan antar agama.	Membentuk sistem deteksi dini dan penyelesaian konflik berbasis agama di wilayah yang memiliki potensi tinggi untuk terjadi ketegangan antar agama.
			Pemetaan, Pendaftaran dan Penetapan Status Cagar Budaya.	Revitalisasi dan rehabilitasi bangunan serta benda bersejarah yang terancam rusak atau hilang.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian cagar budaya melalui program edukasi, penyuluhan, dan pelibatan komunitas.	Pembinaan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan situs serta bangunan cagar budaya.	Pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan dengan fokus pada pelestarian situs dan bangunan bersejarah.	Pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan dengan fokus pada pelestarian situs dan bangunan bersejarah.
Misi 3: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan								
3.1. Terwujudnya sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan berkelanjutan	3.1.1. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendukung pembangunan berkelanjutan	1. Memperkuat infrastruktur lingkungan yang adaptif dan berkelanjutan	Memperluas kawasan ruang terbuka hjau seperti taman kota, hutan kota dan jalur hijau serta memperkuat pengelolaan taman kota.	1. Memperluas kawasan ruang terbuka hjau seperti taman kota, hutan kota dan jalur hijau serta memperkuat pengelolaan taman kota.	Menerapkan arsitektur hijau pada bangunan-bangunan baru di perkotaan, seperti gedung dengan atap hijau (green roofs) dan penggunaan	Menerapkan arsitektur hijau pada bangunan-bangunan baru di perkotaan, seperti gedung dengan atap hijau (green roofs) dan penggunaan	Penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk pelestarian keanekaragaman hayati.	Penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk pelestarian keanekaragaman hayati.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Tahapan Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
					material ramah lingkungan.	material ramah lingkungan.		
			Mendorong penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi dalam sektor industri, transportasi, dan rumah tangga.	Membangun kapasitas daerah dalam mitigasi risiko iklim dan kebencanaan.	Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan sistem drainase yang lebih adaptif terhadap curah hujan ekstrem.	Memperluas ruang hijau perkotaan serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis untuk menyerap emisi karbon.	Menerapkan kebijakan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan melalui sistem daur ulang dan pengurangan sampah plastik.	Mengembangkan transportasi publik berkelanjutan serta mendorong penggunaan kendaraan rendah emisi.
			Mengembangkan regulasi dan kebijakan yang mendukung transisi energi hijau di wilayah perkotaan.	Mendorong pemanfaatan energi surya, biomassa, dan sumber energi terbarukan lainnya di sektor rumah tangga, industri, dan transportasi.	Memfasilitasi investasi dan insentif bagi pengembangan infrastruktur energi ramah lingkungan.	Mengintegrasikan teknologi pintar dalam pengelolaan energi untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan.	Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha dalam penerapan teknologi energi terbarukan.	Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha dalam penerapan teknologi energi terbarukan.
	3.1.2. Meningkatnya ketahanan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	1. Mendorong pelestarian ekosistem dan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan	Pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah terpadu termasuk fasilitas pengolahan sampah organik dan daur ulang plastik.	Mendorong implementasi program daur ulang dan waste-to-energy.	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui perubahan perilaku masyarakat.	Peningkatan akses sanitasi aman dan pengelolaan sampah.	Peningkatan akses sanitasi aman dan pengelolaan sampah.	Peningkatan akses sanitasi aman dan pengelolaan sampah.
			Melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis di daerah aliran sungai untuk mengurangi erosi dan banjir.	Membangun infrastruktur konservasi air seperti embung, bendungan kecil, dan sumur resapan untuk	Peningkatan kapasitas dan teknologi pengolahan air bersih untuk mendukung	Menerapkan sistem pengelolaan limbah yang ketat guna mencegah pencemaran sungai dan sumber air.	Menguatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian DAS melalui edukasi dan	Peningkatan kapasitas dan teknologi pengolahan air bersih untuk mendukung

Tujuan	Sasaran	Strategi	Tahapan Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
				meningkatkan ketahanan air.	keberlanjutan pemanfaatan air.		program penghijauan.	keberlanjutan pemanfaatan air.
			Meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan sistem pengolahan air limbah yang efektif.	Membangun dan mengoptimalkan infrastruktur pengolahan limbah domestik dan industri untuk mencegah pencemaran air.	Mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah dan daur ulang.	Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah yang baik untuk menjaga kebersihan sumber air.	Memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pembuangan limbah agar kualitas air tetap terjaga.	Memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pembuangan limbah agar kualitas air tetap terjaga.
Misi 4: Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kreatif								
4.1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	4.1.1. Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya	1. Mendorong transformasi pelayanan publik melalui digitalisasi dan peningkatan kapasitas aparatur	Mengembangkan platform e-government yang menyatukan berbagai aplikasi pemerintahan, termasuk perizinan, administrasi, dan layanan publik (smart city).	Mengembangkan platform e-government yang menyatukan berbagai aplikasi pemerintahan, termasuk perizinan, administrasi, dan layanan publik (smart city).	Meningkatkan kapasitas SDM pemerintahan dalam menggunakan teknologi digital untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan.	Melatih aparatur dalam pemanfaatan teknologi, memperkuat keamanan siber, dan mendorong kolaborasi dengan sektor swasta.	Menggunakan Big Data dan AI untuk pengambilan keputusan, pemantauan real-time, dan optimalisasi anggaran daerah.	Mewujudkan Binjai sebagai kota pintar yang berkelanjutan dengan layanan publik berbasis teknologi terintegrasi.
			Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan layanan publik.	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan layanan publik.	Mengembangkan forum dialog rutin antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil.	Mendorong partisipasi aktif dunia usaha dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui program kemitraan.	Memfasilitasi forum komunikasi dan kerja sama lintas sektor guna mempercepat inovasi dan solusi terhadap isu-isu daerah.	Memfasilitasi forum komunikasi dan kerja sama lintas sektor guna mempercepat inovasi dan solusi terhadap isu-isu daerah.
	4.1.2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintahan	1. Memperluas jangkauan dan integrasi layanan pemerintah	Membangun dan meningkatkan infrastruktur TIK serta pusat data	Mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu platform	Memperkuat keamanan data dan jaringan guna memastikan	Peningkatan literasi digital di kalangan aparatur pemerintahan.	Peningkatan literasi digital di kalangan aparatur pemerintahan.	Mengoptimalkan teknologi cerdas dan Big Data untuk meningkatkan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Tahapan Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			daerah untuk mendukung sistem pemerintahan digital.	digital yang terpadu dan efisien.	perlindungan informasi pemerintahan dan publik.			transparansi dan efisiensi layanan publik.
			Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi aparatur untuk meningkatkan kompetensi di bidang pelayanan publik berbasis digital.	Mengembangkan sistem pembelajaran berkelanjutan guna memperbarui keterampilan dan pengetahuan aparatur sesuai dengan perkembangan teknologi.	Meningkatkan budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan prima.	Memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung efisiensi kerja dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik.	Mendorong kolaborasi dengan akademisi, sektor swasta, dan komunitas digital dalam pengembangan kapasitas SDM pemerintahan.	Mendorong kolaborasi dengan akademisi, sektor swasta, dan komunitas digital dalam pengembangan kapasitas SDM pemerintahan.
	4.1.3. Meningkatnya kapasitas Perencanaan dan keuangan daerah	1. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah	Mendorong kerja sama dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam perumusan serta implementasi kebijakan daerah.	Memperkuat kerja sama antardaerah dalam pengelolaan sumber daya dan program pembangunan lintas batas wilayah, terutama dalam pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi.	Memperkuat kerja sama antardaerah dalam pengelolaan sumber daya dan program pembangunan lintas batas wilayah, terutama dalam pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi.	Memperkuat perjanjian kerja sama regional guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan merata.	Melakukan diplomasi internasional untuk mendukung transfer investasi asing, kesempatan kerja dan kota kembar (sister city).	Melakukan diplomasi internasional untuk mendukung transfer investasi asing, kesempatan kerja dan kota kembar (sister city).
			Mengembangkan sistem yang menilai kinerja perangkat daerah berdasarkan pencapaian sasaran pembangunan daerah.	Mengikuti pelatihan dalam bidang manajemen publik, pengambilan keputusan berbasis data, dan tata kelola yang baik.	Mengembangkan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) yang jelas untuk	Melakukan audit kinerja untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan dan	Melakukan audit kinerja untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan dan	Melakukan audit kinerja untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Tahapan Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
					seluruh perangkat daerah.	program pembangunan.	program pembangunan.	program pembangunan.
			Memperkuat peran lembaga pengawas internal dalam memantau dan mencegah kasus korupsi di pemerintahan.	Menerapkan sistem whistleblowing yang aman dan efektif untuk melaporkan tindak korupsi dan pelanggaran etika pemerintahan.	Meningkatkan transparansi proses pengadaan barang dan jasa melalui platform digital yang dapat diakses publik.	Meningkatkan transparansi proses pengadaan barang dan jasa melalui platform digital yang dapat diakses publik.	Meningkatkan transparansi proses pengadaan barang dan jasa melalui platform digital yang dapat diakses publik.	Meningkatkan transparansi proses pengadaan barang dan jasa melalui platform digital yang dapat diakses publik.
4.2. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	4.2.1. Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat	1. Memperkuat sistem hukum dan kepemimpinan yang responsif	Implementasi sistem peradilan elektronik (e-court) untuk mempercepat proses penyelesaian perkara.	Implementasi sistem peradilan elektronik (e-court) untuk mempercepat proses penyelesaian perkara .	Penyederhanaan prosedur penyelesaian tindak pidana ringan dengan mekanisme mediasi atau penyelesaian non-litigasi.	Penyederhanaan prosedur penyelesaian tindak pidana ringan dengan mekanisme mediasi atau penyelesaian non-litigasi.	Penyederhanaan prosedur penyelesaian tindak pidana ringan dengan mekanisme mediasi atau penyelesaian non-litigasi.	Penyederhanaan prosedur penyelesaian tindak pidana ringan dengan mekanisme mediasi atau penyelesaian non-litigasi.
		2. Mencegah dan Menanggulangi Ancaman Keamanan Berbasis Kolaborasi dan Teknologi	Penguatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan melalui forum dialog publik dan mekanisme pengaduan daring.	Mengembangkan inovasi kebijakan publik yang dampak terhadap pencapaian target secara optimal.	Mengembangkan platform digital yang interaktif untuk menerima masukan masyarakat terkait kebijakan publik.	Membangun sistem pengaduan daring yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat dan menjamin tindak lanjutnya.	Meningkatkan survei dan riset partisipatif untuk memahami kebutuhan serta ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan.	Meningkatkan survei dan riset partisipatif untuk memahami kebutuhan serta ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan.

Arah kebijakan yang ditetapkan juga bersinggungan dengan kebijakan kewilayahan yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Kota Binjai Tahun 2020-2040. Peran RTRW Kota Binjai disusun sebagai alat operasional pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Binjai, termasuk dalam penyusunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029. Adapun tujuan lahirnya Tata Ruang adalah untuk mewujudkan Kota Binjai sebagai pusat permukiman, perdagangan, dan jasa serta industri yang berkelanjutan.

Arah pengembangan kewilayahan Kota Binjai menekankan konektivitas dan keseimbangan antarwilayah dengan mengacu pada highlight intervensi prioritas. Secara spasial, kawasan pusat kota diarahkan menjadi simpul utama pelayanan jasa, perdagangan, dan pemerintahan, yang diperkuat dengan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan digitalisasi layanan publik. Hal ini selaras dengan peran Binjai sebagai kota penyangga yang strategis dalam Kawasan Metropolitan Mebidangro, sehingga diperlukan penguatan tata ruang yang adaptif, integrasi transportasi, serta peningkatan kapasitas layanan pendidikan dan kesehatan.

Pada wilayah pinggiran dan perbatasan, intervensi diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi lokal melalui pengembangan kawasan agropolitan, revitalisasi pertanian perkotaan, dan pengelolaan sumber daya berbasis lingkungan. Peningkatan konektivitas jalan dan transportasi publik ke wilayah perbatasan menjadi strategi penting untuk menekan disparitas pembangunan, sehingga integrasi antara pusat kota dengan kecamatan penyangga dapat berjalan optimal. Di sisi lain, intervensi juga mencakup perlindungan kawasan lindung, pengendalian banjir, serta pemanfaatan ruang terbuka hijau yang mendukung ketahanan iklim dan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, arah pengembangan kewilayahan Binjai menekankan pembangunan berbasis inklusi sosial dan ekonomi kreatif. Kawasan dengan potensi UMKM dan industri kecil diarahkan untuk mendapat intervensi berupa fasilitasi pembiayaan, pendampingan inovasi, serta digitalisasi pemasaran. Highlight intervensi juga menyasar penguatan destinasi wisata kota berbasis budaya dan ekowisata, sehingga mampu meningkatkan daya tarik investasi dan kunjungan. Dengan demikian, pengembangan kewilayahan Binjai tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan pemerataan kesejahteraan antarwilayah.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Binjai meliputi kawasan peruntukan lindung dengan luas lebih kurang 1.670 (seribu enam ratus tujuh puluh) hektar, dan kawasan peruntukan budi daya dengan luas lebih kurang 7.627 (tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh) hektar. Kawasan peruntukan lindung terdiri dari (a) kawasan perlindungan setempat; (b) ruang terbuka hijau kota (RTH); dan (c) kawasan cagar budaya. Sedangkan kawasan peruntukan budi daya meliputi (a) kawasan pertanian; (b)

kawasan peruntukan industri; (c) kawasan pariwisata; (d) kawasan permukiman; dan (e) kawasan pertahanan dan keamanan.

1) Kawasan Peruntukan Lindung

Pola ruang kawasan peruntukan lindung di wilayah Kota Binjai secara umum bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dan melestarikan fungsi lindung kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan lindung lainnya, serta menghindari berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan rawan bencana. Sasarannya adalah untuk:

a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai budaya dan sejarah bangsa; dan
b. Mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Rencana pola ruang kawasan peruntukan lindung yang terdapat di Kota Binjai terdiri dari:

a) Kawasan Perlindungan Setempat

Bertujuan untuk melindungi keberlangsungan sumber air baku, ekosistem daratan, keseimbangan lingkungan kawasan, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman segar, indah dan bersih. Rencana kawasan perlindungan setempat di wilayah Kota Binjai meliputi sempadan sungai yang merupakan garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

b) Kawasan Cagar Budaya

Merupakan kawasan pelestarian bangunan fisik serta pelestarian lingkungan alami yang memiliki nilai historis dan budaya Kota Binjai. Berdasarkan kriteria tersebut bangunan kawasan cagar budaya di Kota Binjai adalah sebagai berikut:

- Stasiun Kereta Api Kota Binjai;
- Kantor Walikota Binjai;
- Pengadilan Agama Kota Binjai;
- Mesjid Raya Kota Binjai;
- Kelenteng Setia Budha dan Kuil Hindu; dan
- Kawasan bangunan rumah-rumah tua di sekitar Pasar Tavip dan Jalan Kapten Muslim.

Rencana pengelolaan bangunan bersejarah direkomendasikan untuk tetap memfungsikan kondisi awal bangunan tersebut, namun perlu ditetapkan

peraturan bangunan untuk tidak merubah kondisi arsitektur bangunan dan untuk selalu melakukan pemeliharaan agar kondisi bangunan tidak rusak.

Tabel 3. 11. Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Binjai

No	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas (Ha)	Persentase (persen)
1	RTH Hutan Kota	1.244,00	66,38
2	RTH Taman Kota	29,00	1,54
3	RTH Pemakaman	12,00	0,64
4	RTH Sempadan Jalur Kereta Api	58,00	3,09
5	RTH Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	92,00	4,90
6	RTH Sempadan Sungai	236,00	12,59
7	RTH Taman Lingkungan	203,00	10,83
	Jumlah	**1.874,00**	**100,00**

Sumber : RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040

c) Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, bahwa proporsi ruang terbuka hijau (RTH) pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, 20 (dua puluh) persen diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat.

2) Kawasan Peruntukan Budidaya

Pola ruang kawasan budidaya perkotaan penetapannya didasarkan pada kriteria yang meliputi aspek daya dukung atau kesesuaian lahan yang dapat dikembangkan untuk berbagai kegiatan fungsional perkotaan, serta aspek-aspek yang mempengaruhi sinergi antar kegiatan dan kelestarian lingkungan. Pengembangan kawasan budidaya di Wilayah Kota Binjai pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang, sumberdaya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia untuk menyerasikan pemanfaatan ruang dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kawasan peruntukan budidaya yang akan dikembangkan di Kota Binjai meliputi:

a) Kawasan Pertanian

Pengembangan kawasan pertanian di Kota Binjai ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan pangan, pelestarian komoditas khas lokal, pengembangan pasar produk dan hasil produk pertanian kota, pengembangan kontribusi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, penyaring polusi air dan tanah, dan keberlanjutan iklim mikro Kota Binjai yang sejuk dan nyaman. Kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Kota Binjai ditetapkan pada lahan-lahan pertanian yang beririgasi, meliputi:

- Daerah irigasi pada Kecamatan Binjai Selatan meliputi Kelurahan Tanah Merah, Kelurahan Tanah Seribu, Kelurahan Pujidadi dan Kelurahan Bhakti Karya seluas kurang lebih 614 Ha;
- Daerah irigasi pada Kecamatan Binjai Timur meliputi Kelurahan Sumber Mulyo Rejo seluas lebih kurang 36 Ha.

b) Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Pertambangan di wilayah Kota Binjai meliputi:

- Kawasan Depo LPG Pertamina Tandem di Kecamatan Binjai Utara, Kelurahan Jati Utomo;
- Kawasan Pengeboran Gas di Kecamatan Binjai Utara Kelurahan Cengkeh Turi;
- Kawasan Gardu Induk Listrik di Kecamatan Binjai Utara Kelurahan Jati Karya.

Rencana pengembangan kawasan minyak dan gas bumi, berupa:

- Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana terhadap bencana kecelakaan ledakan dan kebakaran di Depo LPG, Gardu Induk listrik dan Kawasan Pengeboran gas;
- Pengendalian kegiatan pada radius 50 Meter dari batas Depo LPG, Gardu Induk Listrik maupun pengeboran gas sebagai batas daerah rawan kecelakaan ledakan dan kebakaran sebagai kawasan penyangga;
- Pengembangan Prasarana dan Ruang Terbuka Hijau pada Bagian Pinggir Kawasan.

c) Kawasan Peruntukan Industri

Merupakan kawasan yang diperuntukkan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Kawasan Peruntukan Industri memiliki fungsi antara lain:

- Memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien;
- Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;
- Meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan Produk Dosmetik Regional Bruto (PDRB) di Wilayah yang bersangkutan;
- Mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Rencana Kawasan Peruntukan industri yang akan dikembangkan di Kota Binjai diperuntukkan bagi:

- Industri besar dan menengah dikembangkan pada Kawasan Peruntukan Industri Binjai yang berada di Kecamatan Binjai Timur Kelurahan Tunggurono pada lahan seluas lebih kurang 132 hektar;
- Industri kecil dan rumah tangga makanan dan minuman berbasis kebutuhan wisata dan berbahan baku komoditas hasil pertanian yang tidak menimbulkan polusi dapat berlokasi di kawasan peruntukan industri ini, kawasan permukiman dan diarahkan berbentuk kluster;
- Pergudangan regional baik kebutuhan distribusi dan koleksi bahan baku atau produksi industri maupun kebutuhan transportasi barang regional bagi Kota Binjai berada pada kawasan peruntukan industri.

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan sentra industri di Kota Binjai meliputi:

- Industri-industri besar dan menengah yang telah memiliki izin dan beroperasi di Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Selatan dan Kecamatan Binjai Barat tidak boleh melakukan pengembangan kapasitas produksi, penambahan volume produksi dan perluasan lahan, dan secara bertahap diarahkan pada kawasan industri di Kecamatan Binjai Timur;
- Industri kecil dan rumah tangga yang menimbulkan polusi diarahkan relokasi ke Kawasan Industri Binjai dan berdekatan dengan Kawasan permukiman dan kawasan wisata di Kecamatan Binjai Selatan dengan mempertimbangkan pengurangan dampaknya terhadap lingkungan;
- Pengendalian pembangunan kegiatan industri pada kawasan industri di luar kawasan industri Binjai dengan Peraturan zonasi;
- Pengembangan ruang terbuka hijau di pinggiran kawasan industri Binjai sebagai kawasan penyangga;
- Pengembangan Sarana dan Prasarana bagi kawasan industri mendukung operasional pergerakan barang dan penumpang yang lancar serta mendukung meminimalisasi pencemaran lingkungan (suara, udara, air dan tanah).

d) Kawasan Pariwisata

Rencana pengembangan kegiatan pariwisata dan rekreasi yang direncanakan mencakup obyek wisata dan rekreasi, serta sarana pariwisata dan rekreasi. Obyek wisata dan rekreasi yang dikembangkan meliputi wisata bangunan bersejarah, wisata belanja dan kuliner, dan wisata alam dan argowisata. Kawasan pariwisata di Kota Binjai berupa:

- Kawasan Pariwisata Alam ditetapkan pada:
  - Kawasan pariwisata sungai bingai (Pantai SB) yang terdapat di Kecamatan Binjai Selatan Kelurahan Tanah Merah;
  - Kawasan Botanical Garden di Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Tanah Merah berupa lahan pertanian dan kebun rambutan Binjai yang dapat difungsikan sebagai RTH, wisata, penelitian, pengembangan pertanian.

    Pengembangan kawasan wisata pertanian Botanical Garden ditujukan bagi: pelestarian komoditas khas lokal, pengembangan pasar produk dan hasil produk pertanian kota dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan, pengembangan kontribusi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, penyaring polusi air dan tanah, dan keberlanjutan iklim mikro Kota Binjai yang sejuk dan nyaman; dan
  - Sungai Bingai yang membelah Kota Binjai berpotensi dikembangkan menjadi wisata air dan *river front*.
- Kawasan wisata budaya mencakup:
  - Kompleks bersejarah Stasiun Kereta Api Binjai;
  - Masjid Raya Kota Binjai Jl. Wahid Hasyim, Kecamatan Binjai Kota;
  - Kelenteng Setia Budha dan Kuil Hindu Kecamatan Binjai Kota;
  - Kantor Walikota Binjai Kecamatan Binjai Kota;
  - Bangunan-Bangunan tua di sekitar Pasar Tavip dan Jalan Kapten Muslim;
  - Bangunan sejarah Gedung Pengadilan Agama Kota Binjai di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Kartini;
  - Bangunan-Bangunan bersejarah sebagai hunian penduduk yang tersebar di berbagai lokasi Kota Binjai.

e) Kawasan Permukiman

merupakan kawasan tempat tinggal dengan dominasi utama pemanfaatan berupa perumahan, yang di dalamnya sesuai kebutuhan bisa dilengkapi dengan fasilitas pelayanan umum penunjang lingkungan berupa perdagangan dan jasa, serta fasilitas sosial-budaya.

Adapun perhitungan kebutuhan lahan perumahan untuk Kota Binjai adalah untuk jangka 20 tahun. Sebagai dasar perhitungan untuk perencanaan perumahan di Kota Binjai, luas kavling perumahan dibagi berdasarkan proporsi 1 : 2 : 3 dengan luas masing- masing 500 m² : 300 m² : 150 m² untuk kavling rumah besar, sedang dan kecil. Diasumsikan setiap keluarga menempati satu rumah dengan rata-rata jumlah anggota keluarga 5 jiwa/KK. Berdasarkan hasil

analisis dapat diperkirakan kebutuhan lahan bagi perumahan sampai akhir tahun perencanaan yaitu berjumlah 2.008, 23 Ha yang terdiri dari 583 Ha Kavling rumah kecil (38.869 unit), 777 Ha Kavling rumah sedang (25.913 unit), serta 648 Ha kavling rumah besar (12.956 unit). Fasilitas perumahan tersebut menyebar diseluruh Kecamatan dan Kota dengan memanfaatkan kawasan budidaya permukiman yang ada.

Kawasan peruntukan permukiman memiliki fungsi antara lain:

1) Sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial;
2) Sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga.

f) Kawasan Perdagangan dan Jasa

Didefinisikan sebagai ruang yang didominasi kawasan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya. Penetapan kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Binjai didasarkan pada fungsi dan skala pelayanan sebagaimana Kota Binjai merupakan salah satu pusat pelayanan regional dan pelayanan kota pada kawasan metropolitan Mebidangro.

Arahan pengembangan pola ruang untuk kegiatan perdagangan dan Jasa di Kota Binjai secara umum adalah sebagai berikut:

- Kawasan perdagangan dan jasa untuk pelayanan seluruh wilayah Kota Binjai dialokasikan di Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan Kawasan TOD, serta dikoridor jalan-jalan utama kota;
- Kawasan pusat kondisi eksisting merupakan kawasan perdagangan dan Jasa Kota Binjai dan merupakan pusat perkembangan Kota Binjai selama ini dan terintegrasi dengan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di kawasan TOD;
- Kawasan perdagangan dan jasa skala kota (sekunder) maupun skala kecamatan dikembangkan pada masing Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) dan koridor jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder;
- Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan regional dikembangkan pada Jl. Soekarno Hatta, Jl. Ahmad Yani, Jl. Gatot Subroto, Jl. Perintis Kemerdekaan, rencana jalan arteri sekunder terusan Simpang Megawati ke arah selatan, serta SPPK Binjai Timur dan Binjai Utara;
- Perdagangan untuk pelayanan setingkat wilayah kelurahan dan lingkungan permukiman/perumahan yang tidak terjangkau oleh kawasan perdagangan

dan jasa dapat dikembangkan menurut kebutuhan di pusat-pusat kelurahan dan di lingkungan-lingkungan permukiman/perumahan yang terpadu dengan pengembangan pasar-pasar tradisional;

- Perdagangan informal dialokasikan di pusat-pusat perdagangan pada kawasan perdagangan skala kota dan SPPK di pusat-pusat perdagangan kecamatan secara terencana dan terintegrasi dengan lokasi perdagangan sektor formal, yang ditata dengan mempertimbangkan aspek keteraturan, ketertiban, estetika lingkungan, kenyamanan, dan keamanan bagi pergerakan lalu lintas dengan mengedepankan norma-norma pemanfaatan ruang publik secara rasional dan adil.

g) Kawasan Perkantoran

Merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya untuk menyediakan lahan menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pemerintah dan/atau swasta. Rencana kawasan perkantoran pemerintah Kota Binjai meliputi:

1) Kantor Pemerintahan Kota Lama di Kecamatan Binjai Kota Kelurahan Kartini di Jalan Sudirman
2) Kawasan Kantor Pemerintahan Kota Baru di Kecamatan Binjai Timur Kelurahan Tunggurono, Kelurahan Dataran Tinggi Jalan Bejomuna.

Sedangkan perkantoran swasta diarahkan di pusat kota Kecamatan Binjai Kota berlokasi pada kawasan perdagangan dan jasa di kawasan pusat kota, kawasan TOD, serta kawasan peruntukan industri berupa kegiatan perkantoran pendukung kegiatan industri.

h) Kawasan Pendidikan

Kawasan Pendidikan terdiri dari SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Untuk rencana peruntukan kawasan pendidikan SD, SMP dan SMA dialokasikan sesuai kebutuhan pada setiap SPK. Untuk kawasan pendidikan setingkat perguruan tinggi perlu dilakukan pengaturan terkait dengan cara sebagai berikut:

- Membatasi lokasi pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal yang ada di wilayah pusat Kota Binjai;
- Membatasi pengembangan perguruan tinggi di wilayah pusat Kota Binjai pada lokasi-lokasi yang telah berkembang dengan mewajibkan memenuhi penyediaan prasarana dan parkir yang memadai;

- Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tinggi di Kecamatan Binjai Utara dan Kecamatan Binjai Timur yang juga untuk menarik arah perkembangan kota ke luar dari pusat kota;
- Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan tinggi dengan mewajibkan memenuhi penyediaan prasarana dan parkir yang memadai.

i) Kawasan Kesehatan

Rencana fasilitas kesehatan terdiri dari rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas dan praktek dokter. Rencana fasilitas kesehatan untuk rumah sakit selain mempertahankan pada lokasi yang ada adalah perlu dikembangkannya rumah sakit di Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) (kecuali di pusat kota), dikarenakan untuk menjaga sebaran fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut arahan rencana pengembangan fasilitas kesehatan adalah:

- Mengarahkan pengembangan fasilitas kesehatan di Wilayah Binjai Timur, Binjai Utara, Binjai Barat dan Binjai Selatan;
- Mempertahankan dan meningkatkan prasarana dan sarana pendukung fasilitas kesehatan yang ada agar tingkat pelayanan setiap jenis fasilitas kesehatan dapat lebih optimal. Sarana dan Prasarana pendukung disini diantaranya adalah sekolah keperawatan yang lokasinya direncanakan berdekatan dengan rumah sakit dan prasarana pengolahan limbahnya perlu mendapat perhatian khusus karena sifat limbahnya yang sangat berbahaya bagi penduduk kota.
- Mewujudkan keseimbangan penyebaran prasarana dan sarana pendukung fasilitas kesehatan.

j) Kawasan RTNH Kota

Bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap fungsi kegiatan-kegiatan kepemerintahan, komersial, rekreasi dan kegiatan permukiman, serta terselenggaranya keserasian kehidupan lingkungan dan sosial. Defini dari RTNH adalah “Ruang terbuka di bagian perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori” (Permen PU No. 12/PRT/M/2009). Penyediaan RTNH di Kota Binjai diatur sebagai berikut:

- RTNH Pekarangan

  Penyediaan RTNH pekarangan dilakukan pada masing-masing pekarangan (lahan di luar bangunan) baik untuk pekarangan permukiman ataupun non permukiman.

- RTNH Wilayah Kota, meliputi:
  - RTNH berupa alun-alun kawasan pemerintahan dan plasa Kawasan pusat pemerintahan baru;
  - RTNH plasa pada kawasan komersial TOD;
  - RTNH berupa plasa bangunan ibadah;
  - RTNH berupa plasa monumen;
  - RTNH lapangan GOR;
  - RTNH ruang plasa tempat ibadah (masjid, gereja, klenteng, dan vihara), dan
  - RTNH tempat wisata.

k) Kawasan Evakuasi Bencana

Merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan evakuasi bencana agar memberikan ruang terbuka yang aman dari bencana alam sebagai tempat berlindung dan penampungan penduduk sementara dari suatu bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan letusan gunung api. Kawasan ruang evakuasi bencana diarahkan dengan memanfaatkan ruang-ruang terbuka yang memiliki kriteria:

- Ruangan-ruangan yang bersifat publik seperti lapangan-lapangan terbuka, kawasan parkir, tegalan ataupun area pertanian kering;
- Terletak tidak lebih dari 1 km dari konsentrasi penduduk yang harus diselamatkan;
- Tidak terletak pada daerah permukiman padat ataupun kawasan terbangun yang padat;
- Terletak pada jaringan jalan yang aksesibel/mudah dicapai dari semua arah dengan berlari/berjalan kaki;
- Tidak terletak pada daerah yang diperkirakan memiliki ketentuan terhadap bahaya lebih lanjut;
- Diperkirakan setiap orang akan membutuhkan ruang minimum 2 m^2, sehingga daya tampung ruang penyelamatan dapat dihitung; dan
- Lokasi untuk evakuasi bencana dapat dikembangkan sebagai multilayer space, dimana pada waktu terjadi bencana alam dapat berfungsi sebagai ruang evakuasi dan pada waktu tidak terjadi bencana berfungsi sebagai ruang terbuka publik (baik berupa ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka non hijau).

Kawasan ruang evakuasi bencana di Kota Binjai meliputi:

- Lapangan Merdeka Kecamatan Binjai Kota;

- Stadion Olahraga Kota Binjai dan Lapangan-lapangan olahraga pada SPK dan PL;
- RTH Taman Kecamatan di setiap SPK;
- RTH Kawasan Wisata Botanical Garden di Kecamatan Binjai Selatan;
- Jalan-jalan utama pada jalan Perintis Kemerdekaan, jalan Ahmad Yani dan jalan Samanhudi dan jalan Soekarno Hatta.

l) Kawasan Sektor Informal

Rencana pengaturan pedagang sektor informal dilakukan melalui:

- Penyediaan ruang khusus bagi pedagang sektor informal sehingga tidak menguasai ruang-ruang publik;
- Mengintegrasikan pedagang sektor informal dengan rencana pengembangan perdagangan dan jasa formal. Pola pengaturannya dilakukan sebagai berikut:
  - Pengaturan kegiatan golongan usaha skala kecil/informal merupakan kewajiban pada kegiatan perdagangan dan jasa yang dikelola pihak swasta yang berada pada peruntukan tanah bangunan umum dalam bentuk pusat perdagangan/pusat perbelanjaan, plaza yang luas lantai bangunannya lebih besar dari 5.000 Meter persegi tidak termasuk lantai untuk parkir;
  - Kewajiban tersebut besarnya minimal 10 % dari luas lantai bangunan, yang lokasi dan besaran kewajibannya tersebut ini tidak dapat dialihkan atau diganti dalam bentuk apapun;
  - Penyelenggaraan kegiatan perdagangan dan jasa yang dikelola pihak swasta yang menyediakan ruang untuk kegiatan golongan usaha kecil/informal mendapat insentif dalam bentuk pembebasan KLB dan pemenuhan kebutuhan parkir sesuai kewajiban.
  - Penataan kegiatan golongan usaha skala kecil direncanakan sebagai berikut:
    a. Besaran ruang untuk golongan usaha skala kecil/informal ditetapkan dalam izin pemanfaatan lahan;
    b. Penyediaan ruang tersebut ditetapkan dalam gambar arsitektur bangunan skala 1 : 200 yang merupakan lampiran perizinan.
  - Persyaratan dan tata cara penempatan golongan usaha skala kecil/ informal diatur sebagai berikut:
    a. Usaha kecil/informal yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada disekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut;

b. Apabila disekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil/informal, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut;
c. Penempatan dan pengelolaan terhadap penempatan usaha bagi usaha kecil/informal diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Jenis barang dagangan harus saling melengkapi dengan jenis perdagangan utamanya;
e. Mengendalikan penempatan sektor informal di ruas jalan arteri primer dan arteri sekunder.

- Pengaturan waktu operasional pedagang kaki lima dengan model *time sharing* dapat dilakukan pada tempat-tempat tertentu dengan komoditas yang memiliki ciri tertentu sehingga dapat membentuk image ruang melalui pengembangan kegiatan yang spesifik, dengan demikian maka pada ruang yang sama dapat dikembangkan 2 fungsi yang berbeda dengan pengaturan waktu yang berbeda (*multilayer space*).
- Penertiban pedagang kaki lima yang menguasai ruang-ruang publik sehingga menyebabkan berkurangnya fungsi ruang tersebut atau mengganggu kelancaran lalu-lintas.

m) Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Rencana kawasan pertahanan perlu dipikirkan untuk direncanakan dengan:

- Mempertahankan Markas Batalyon Artileri Pertahanan Udara Sedang 11/Wira Bhuana Yudha di Kecamatan Binjai Timur Kelurahan Tanah Tinggi;
- Mempertahankan kawasan pertahanan Brimob di Binjai Timur dan menterpadukan pengembangan dengan rencana pengembangan kawasan pusat pemerintahan di Kecamatan Binjai Timur Kelurahan Tunggurono;
- Penyebaran lokasi Kantor Polisi Sektor (Polsek) diarahkan pada setiap SPK dan pos-pos Polisi ditempatkan di jalan-jalan utama kota;

Merelokasi aset-aset militer yang ada di pusat kota seperti asrama polisi dekat kantor DPRD dan beberapa kantor militer ke pinggir kota.

3.2.3. Program Prioritas Pembangunan Kota Binjai

Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJMD harus dapat diimplementasikan dalam perencanaan operasional. Dalam penyusunan RPJMD saat ini, keselarasan antara visi dan misi daerah dengan sasaran utama serta arah kebijakan dielaborasi melalui visi dan misi kepala daerah, beserta strategi serta arah kebijakan yang ditetapkan.

Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Binjai adalah pendekatan perencanaan pembangunaan Tematik, Holistik, Integratif, dan spasial (THIS). Pendekatan THIS pada dasarnya adalah pendekatan yang memberi penekanan pada keterpaduan, bukan pendekatan yang berangkat dari sektor atau tugas dan fungsi semata tetapi tugas dan fungsi mendukung keterpaduan. Karena penekanannya pada keterpaduan, perencanaan ini, berangkat dari tema pembangunan yang menjadi dasar atau starting pointnya dalam lingkup daerah, tema bisa bersumber dari isu-isu strategis dan/atau prioritas prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Untuk mempercepat dampak pembangunan, dirumuskan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai *quick wins* pembangunan yang merupakan program-program strategis yang secara langsung menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan sekaligus merepresentasikan implementasi dari kelima misi pembangunan. Setiap program prioritas didesain untuk memberikan dampak jangka pendek dan menengah yang terukur, sebagai fondasi menuju transformasi jangka panjang. Dengan kata lain, PHTC menjadi pengungkit awal yang mendekatkan Kota Binjai pada kondisi ideal sebagaimana dicita-citakan dalam visi dan misi RPJMD.

Berikut adalah 6 (enam) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/Q*uick Wins*) beserta tujuan, dampak yang diharapkan dan ruang lingkup yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029:

1. **Makan Bergizi Gratis Bagi Anak Didik TK, SD, dan SMP Serta Pemberian Edukasi Gizi Bagi Guru dan Orang Tua**

   Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak usia sekolah di Kota Binjai memperoleh asupan makanan bergizi yang cukup serta pendidikan gizi yang tepat sejak dini. Tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan sehat di lingkungan sekolah, program ini juga menekankan pentingnya edukasi gizi kepada guru dan orang tua sebagai aktor utama yang berperan dalam membentuk kebiasaan makan anak. Dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi seimbang, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang mendukung tumbuh kembang optimal anak secara fisik dan kognitif.

   Program ini selaras dengan kebijakan nasional seperti Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Intervensi Gizi Terintegrasi yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Upaya ini juga sejalan dengan arahan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG), yang menempatkan satuan pendidikan sebagai tempat strategis untuk intervensi gizi secara berkelanjutan. Melalui edukasi

yang menyasar lingkungan rumah dan sekolah secara bersamaan, program ini memperkuat ekosistem gizi anak secara holistik.

Manfaat langsung dari program ini adalah menurunnya prevalensi gizi buruk di kalangan anak usia sekolah, meningkatnya konsentrasi dan prestasi belajar siswa, serta terbentuknya kebiasaan makan sehat yang berkelanjutan. Dengan melibatkan guru dan orang tua sebagai mitra aktif, program ini tidak hanya menjadi intervensi kesehatan, tetapi juga investasi sosial dalam menciptakan generasi muda Kota Binjai yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan.

2. **Peningkatan Kualitas Layanan Akses Kesehatan (Stunting, UHC, Pengobatan Gratis) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis**

   Program peningkatan kualitas layanan akses kesehatan di Kota Binjai menjadi salah satu prioritas strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Pemerintah Kota Binjai secara konsisten berkomitmen untuk memperluas cakupan dan mutu layanan kesehatan melalui berbagai upaya yang terintegrasi, seperti penurunan angka stunting, pencapaian Universal Health Coverage (UHC), penyediaan pengobatan gratis, serta penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala. Strategi ini dirancang untuk menjamin akses yang merata terhadap layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan.

   Dalam rangka menurunkan angka stunting, Pemko Binjai melaksanakan program intervensi gizi terpadu mulai dari masa kehamilan hingga usia balita, termasuk pemberian makanan tambahan bergizi, edukasi pola asuh, dan pemantauan pertumbuhan anak secara rutin di posyandu. Pendekatan multisektor juga dilibatkan, dengan dukungan dari sektor pendidikan, sanitasi, dan pemberdayaan keluarga, untuk memastikan faktor-faktor penyebab stunting ditangani secara menyeluruh. Pelibatan aktif kader kesehatan di tingkat kelurahan dan desa menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan program ini.

   Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kota Binjai menunjukkan komitmen daerah dalam menjamin seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami kesulitan finansial. Dengan mengintegrasikan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, pemerintah daerah menanggung iuran bagi warga kurang mampu, serta memperkuat fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan. Ini menjadi langkah konkret dalam menjamin hak kesehatan warga sekaligus memperkuat sistem kesehatan daerah secara berkelanjutan.

   Selain itu, program pengobatan gratis yang dijalankan melalui fasilitas kesehatan pemerintah seperti puskesmas dan rumah sakit daerah, sangat

membantu meringankan beban masyarakat. Mekanisme pelayanan dibuat sederhana dan transparan, dengan pelayanan yang mencakup pengobatan penyakit umum, pengelolaan penyakit kronis, hingga layanan farmasi dasar. Upaya ini bukan hanya meningkatkan akses, tetapi juga mendorong masyarakat lebih proaktif dalam menjaga kesehatannya sejak dini.

Pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala, baik melalui puskesmas keliling, kegiatan bakti sosial, maupun layanan terpadu di kelurahan, merupakan bentuk pendekatan promotif dan preventif yang sangat penting. Pemerintah Kota Binjai berupaya menjadikan layanan ini sebagai program berkelanjutan dengan dukungan anggaran daerah dan kolaborasi lintas sektor. Melalui strategi ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit dapat meningkat, sehingga kualitas hidup warga Kota Binjai dapat terus terjaga dalam jangka panjang.

3. **Meningkatkan Mutu Pendidikan Formal dan Non-Formal Dengan Menyediakan Fasilitas dan Guru yang Berkualitas**

   Program peningkatan mutu pendidikan formal dan non-formal di Kota Binjai merupakan bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang holistik dan berkelanjutan. Pemerintah daerah menyadari bahwa pendidikan yang bermutu menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi unggul dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, berbagai langkah strategis telah dirancang dan diimplementasikan, baik pada jenjang pendidikan formal seperti sekolah dasar hingga menengah, maupun pada pendidikan non-formal seperti kursus, pelatihan keterampilan, dan pendidikan kesetaraan. Fokus utamanya adalah pemerataan akses, peningkatan kualitas pengajaran, dan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai.

   Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah pengadaan dan perbaikan fasilitas pendidikan. Pemerintah Kota Binjai secara bertahap melakukan pembangunan dan renovasi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas sanitasi yang layak dan ramah anak. Selain itu, pengadaan perangkat pembelajaran berbasis teknologi juga mulai diperluas guna mendukung transformasi digital di lingkungan sekolah. Di sisi pendidikan non-formal, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan lembaga pelatihan diberikan bantuan sarana penunjang agar mampu memberikan layanan pendidikan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

   Aspek peningkatan kualitas guru menjadi prioritas utama dalam mendukung keberhasilan program ini. Pemerintah daerah secara aktif mendorong pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi para pendidik, baik melalui program

pelatihan berkelanjutan, workshop, maupun kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi. Selain itu, insentif dan penghargaan bagi guru berprestasi diberikan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme. Di sektor non-formal, fasilitator dan tutor juga dilibatkan dalam pelatihan yang relevan agar dapat mendampingi peserta didik secara optimal.

Keberlanjutan program ini dijaga melalui integrasi perencanaan pendidikan dengan kebijakan pembangunan daerah jangka menengah dan panjang. Pemerintah Kota Binjai menetapkan anggaran pendidikan secara proporsional dan berkomitmen menjaga kesinambungan program melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi. Pemanfaatan data dan evaluasi berkala juga dilakukan guna memastikan setiap program pendidikan tepat sasaran dan berdampak positif bagi peningkatan mutu pembelajaran.

Dengan strategi yang menyeluruh dan berkesinambungan ini, diharapkan Kota Binjai mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkualitas, baik di jalur formal maupun non-formal. Masyarakat akan mendapatkan kesempatan belajar sepanjang hayat, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah secara umum. Upaya ini tidak hanya menyiapkan generasi muda yang cakap secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan hidup yang relevan dengan tantangan zaman.

4. **Melanjutkan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis UMKM Dengan Membentuk Komite Ekonomi Kreatif Daerah, dan Memberikan Bantuan Sosial Bagi Keluarga yang Kemalangan**

   Program pemberdayaan ekonomi berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Binjai merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi perekonomian lokal yang inklusif dan berdaya tahan. Melalui pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Daerah, pemerintah berupaya mendorong transformasi UMKM agar mampu berinovasi dan bersaing di era digital. Komite ini berfungsi sebagai wadah koordinasi, fasilitasi, dan inkubasi ide-ide kreatif yang lahir dari pelaku usaha lokal, dengan fokus pada subsektor ekonomi kreatif seperti kuliner, fesyen, kerajinan, dan digitalisasi produk.

   Upaya penguatan UMKM juga dilakukan melalui pelatihan, pendampingan usaha, serta kemudahan akses terhadap pembiayaan dan pasar. Pemerintah Kota Binjai aktif menjalin kerja sama dengan perbankan, lembaga keuangan mikro, dan platform digital untuk membantu pelaku UMKM memperoleh permodalan dan memperluas jaringan pemasaran. Selain itu, penyelenggaraan bazar

UMKM, pameran produk lokal, serta promosi berbasis media sosial turut digencarkan sebagai sarana memperkenalkan potensi ekonomi kreatif daerah kepada masyarakat luas, termasuk pembeli dari luar kota.

Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam merumuskan kebijakan, mengidentifikasi potensi unggulan daerah, serta menjembatani kepentingan pelaku usaha dengan pemerintah. Komite ini diisi oleh perwakilan dari akademisi, pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan birokrat yang berpengalaman, sehingga keputusan dan arah program yang diambil dapat tepat sasaran dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, keberadaan komite ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang dinamis dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain pemberdayaan ekonomi, Pemerintah Kota Binjai juga tetap menjaga aspek keadilan sosial dengan memberikan bantuan sosial bagi keluarga yang mengalami kemalangan, seperti kehilangan anggota keluarga, bencana, atau kesulitan ekonomi mendesak. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai, paket kebutuhan pokok, atau layanan kesehatan dan psikososial, serta didistribusikan secara cepat dan transparan melalui mekanisme berbasis data terpadu kesejahteraan sosial. Program ini menjadi bentuk respons cepat pemerintah dalam memastikan tidak ada warga yang terpinggirkan dalam proses pembangunan ekonomi.

Keberlanjutan program ini dijamin melalui integrasi kebijakan pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah juga melibatkan peran aktif masyarakat, swasta, dan lembaga sosial untuk mendukung pendanaan serta pengawasan pelaksanaan program. Dengan sinergi lintas sektor dan komitmen yang kuat, Kota Binjai diharapkan mampu menjadi daerah yang tangguh secara ekonomi, kreatif dalam inovasi, dan humanis dalam menghadapi krisis sosial masyarakatnya.

5. **Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Drainase yang Mendukung Konektivitas dan Estetika Kota**

   Program peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan drainase di Kota Binjai merupakan salah satu prioritas strategis pemerintah daerah dalam mendorong konektivitas wilayah, mendukung mobilitas masyarakat, serta memperkuat estetika dan daya tarik kota. Jalan dan sistem drainase yang baik bukan hanya menunjang kelancaran transportasi, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, pariwisata, serta kualitas lingkungan perkotaan. Oleh

karena itu, Pemerintah Kota Binjai secara bertahap melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan saluran air dengan perencanaan yang matang dan berorientasi pada keberlanjutan.

Strategi utama yang diterapkan mencakup identifikasi prioritas ruas jalan yang rusak, padat lalu lintas, atau rawan genangan air, serta penyesuaian desain infrastruktur dengan kondisi geografis dan pertumbuhan kawasan. Untuk sistem drainase, pemerintah fokus pada perbaikan saluran yang tersumbat, normalisasi aliran air, dan pembangunan drainase baru di kawasan rawan banjir. Teknologi ramah lingkungan seperti drainase berwawasan ekologis (eco-drain) mulai diperkenalkan untuk meningkatkan kapasitas resapan air dan mengurangi beban pada sistem saluran kota.

Upaya peningkatan kualitas jalan juga diikuti dengan penerapan standar teknis pembangunan yang memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan pengguna, dan estetika visual. Trotoar bagi pejalan kaki diperbaiki, lampu jalan ditingkatkan, dan marka jalan diperjelas guna menciptakan lingkungan kota yang ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, penghijauan dan penataan taman di sepanjang jalur utama kota juga menjadi bagian integral dari program ini untuk memperindah wajah kota dan meningkatkan kualitas udara.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi antar perangkat daerah, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, serta partisipasi aktif sektor swasta dalam pendanaan dan pelaksanaan. Pemerintah Kota Binjai juga memanfaatkan sistem informasi geografis (GIS) dan teknologi pemantauan digital untuk memetakan kondisi infrastruktur secara real-time dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset daerah. Transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan turut mendukung akuntabilitas program.

Untuk menjaga keberlanjutannya, program peningkatan infrastruktur jalan dan drainase telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen teknis perencanaan lainnya. Pemerintah berkomitmen mengalokasikan anggaran secara berkelanjutan, serta terus mengevaluasi kualitas pelaksanaan dan dampak dari proyek yang berjalan. Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki konektivitas antarwilayah, tetapi juga menciptakan lingkungan kota yang tertib, nyaman, dan layak huni bagi seluruh warga Kota Binjai.

6. **Membangun Tata Kelola yang Inovatif dan Kreatif Melalui Pendirian Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Penguatan Smart City**

Program membangun tata kelola yang inovatif dan kreatif melalui pendirian Mall Pelayanan Publik (MPP) dan penguatan Smart City merupakan langkah progresif Pemerintah Kota Binjai dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses birokrasi, dan menghadirkan kenyamanan dalam akses layanan oleh warga kota. Pendirian MPP menjadi simbol transformasi pelayanan menjadi lebih terpusat, mudah dijangkau, dan berbasis teknologi digital yang terintegrasi.

Strategi utama yang diterapkan adalah menggabungkan berbagai jenis layanan publik dari berbagai instansi dalam satu lokasi terpadu, yakni MPP, sehingga masyarakat dapat mengurus administrasi kependudukan, perizinan, perpajakan daerah, layanan BPJS, dan kebutuhan lainnya secara cepat dan efisien. Pemerintah Kota Binjai bekerja sama dengan instansi vertikal, BUMN, dan lembaga non-pemerintah untuk menghadirkan berbagai jenis layanan dalam satu atap, yang tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan kepuasan publik terhadap birokrasi pemerintah.

Penguatan konsep Smart City dijalankan secara paralel dengan pendekatan berbasis data dan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih akurat dan pelayanan yang lebih responsif. Sistem informasi kota, aplikasi layanan digital, command center, serta pemanfaatan CCTV dan IoT (Internet of Things) diterapkan untuk mendukung sektor-sektor penting seperti transportasi, keamanan, kebersihan, dan pengelolaan bencana. Pelibatan masyarakat juga diperkuat melalui platform aduan publik, survei kepuasan layanan digital, dan media sosial resmi pemerintah sebagai saluran komunikasi dua arah yang terbuka.

Upaya ini diperkuat dengan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pelatihan di bidang teknologi, manajemen pelayanan publik, dan inovasi kebijakan. Pemerintah Kota Binjai juga mendorong budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Penghargaan terhadap unit kerja atau pegawai yang menghadirkan inovasi pelayanan publik turut diberikan untuk membangun semangat inovatif secara berkelanjutan di lingkungan birokrasi.

Keberlanjutan program ini dijaga melalui integrasi tata kelola MPP dan Smart City ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan panjang. Pemerintah Kota Binjai berkomitmen mengalokasikan anggaran

secara proporsional serta menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta dan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi dan inovasi pelayanan. Dengan pendekatan ini, Kota Binjai diharapkan menjadi kota modern yang tidak hanya efisien dalam pelayanan, tetapi juga mampu membangun kepercayaan publik melalui transparansi, akuntabilitas, dan inovasi yang berkelanjutan.

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) diharapkan mampu dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat Kota Binjai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun pertama yang disusun selaras dan terintegrasi dengan Program Prioritas pembangunan jangka menengah Kota Binjai periode 2025-2029. Adapun penjabaran 16 (enam belas) Program Prioritas RPJMD Kota Binjai 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. **Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar yang Inklusif dan Berkarakter**

   Program prioritas "Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar yang Inklusif dan Berkarakter" bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan pemerataan pendidikan dasar di Indonesia melalui berbagai strategi yang mencakup peningkatan akses pendidikan, kesejahteraan guru, pengembangan kurikulum, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, serta penguatan pendidikan karakter. Dalam upaya ini, pemerintah menargetkan adanya peningkatan dalam berbagai indikator kinerja pendidikan, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemampuan literasi, numerasi, rata-rata lama sekolah, serta harapan lama sekolah, yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan yang lebih baik dan inklusif.

   Peningkatan akses pendidikan dasar melalui program sekolah gratis untuk tingkat SD dan SMP menjadi langkah utama dalam memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, dapat menikmati pendidikan yang layak. Selain itu, peningkatan kesejahteraan guru juga menjadi perhatian penting, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan mendukung keberhasilan pendidikan. Pengembangan kurikulum yang menekankan pada peningkatan literasi dan numerasi siswa, termasuk bagi mereka yang berasal dari kelompok rentan seperti masyarakat miskin, serta penyandang disabilitas, diharapkan dapat mengatasi ketimpangan pendidikan dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dari kalangan masyarakat miskin, rentan, dan disabilitas menjadi salah satu bentuk konkret dari upaya ini untuk memberikan dukungan lebih kepada mereka yang memiliki potensi namun terbatas oleh faktor ekonomi dan sosial. Selain itu, penguatan pendidikan karakter menjadi prioritas untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan etika yang baik dalam kehidupan sosial.

Target-target yang telah ditetapkan untuk indikator kinerja tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan jangka panjang untuk memajukan pendidikan dasar yang inklusif dan berkarakter. Melalui program ini, diharapkan dapat tercipta generasi yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik yang baik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia.

2. **Perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan melalui jaminan sosial inklusif, dukungan pekerjaan, dan penanganan kekerasan**

   Program prioritas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada kelompok rentan melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis pada jaminan sosial. Fokus utama dari program ini adalah untuk memastikan akses yang lebih besar bagi Lansia, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas terhadap layanan sosial dan pekerjaan yang layak, serta penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu strategi utama yang diusung adalah jaminan sosial inklusif, yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan kelompok-kelompok tersebut.

   Melalui strategi perlindungan pekerja informal, pemerintah berusaha memberikan dukungan dalam hal perlindungan ketenagakerjaan dan akses ke layanan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pengembangan usaha rumah tangga produktif juga merupakan bagian dari program ini, dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat di level rumah tangga guna meningkatkan pendapatan keluarga. Langkah selanjutnya adalah upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga, yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung kesejahteraan keluarga.

   Dukungan lebih lanjut diberikan melalui peningkatan kuota pekerjaan bagi penyandang disabilitas di sektor formal, yang menjadi salah satu indikator kinerja utama program ini. Terakhir, pemulihan psikologis dan kesehatan mental bagi korban kekerasan keluarga menjadi prioritas penting, dengan

tujuan untuk memberikan dampak jangka panjang dalam kesejahteraan mental masyarakat. Melalui program ini, diharapkan kelompok rentan memperoleh perlindungan sosial yang lebih inklusif dan dukungan yang lebih besar dalam mengakses berbagai layanan sosial dan pekerjaan yang layak.

3. **Peningkatan layanan kesehatan terpadu melalui infrastruktur, tenaga kesehatan, pencegahan penyakit, dan gerakan hidup sehat**

   Program prioritas "Peningkatan layanan kesehatan terpadu melalui infrastruktur, tenaga kesehatan, pencegahan penyakit, dan gerakan hidup sehat" merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui berbagai pendekatan yang komprehensif. Program ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur dan mutu layanan kesehatan (PIMULKES), yang akan memastikan fasilitas kesehatan yang lebih memadai dan pelayanan yang lebih efektif. Selain itu, gerakan sinergi lintas lembaga dan masyarakat (GESIT LINMAS) menjadi bagian dari usaha untuk membangun kolaborasi antar sektor dalam menghadapi tantangan kesehatan yang ada.

   Dalam hal pencegahan penyakit, fokus utama adalah pada pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dengan penekanan pada deteksi dini dan pemenuhan ketepatan serta kompetensi tenaga kesehatan. Peningkatan kualitas tenaga medis, melalui program pelatihan dan pemenuhan kekurangan tenaga kesehatan, akan sangat mendukung efektivitas pelayanan kesehatan. Indikator pencapaian yang ditetapkan untuk tahun 2025 dan 2029, seperti peningkatan angka harapan hidup dan cakupan jaminan kesehatan nasional, menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan program ini. Keberhasilan ini juga tercermin dari pengurangan prevalensi stunting, peningkatan cakupan pengobatan dan penemuan penyakit menular, serta angka keberhasilan pengobatan tuberculosis. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan produktif dengan dukungan sistem kesehatan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

4. **Penguatan ekonomi daerah melalui investasi, penyerapan tenaga kerja, efisiensi anggaran, dan optimalisasi penerimaan daerah**

   Program prioritas "Penguatan Ekonomi Daerah melalui Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja, Efisiensi Anggaran, dan Optimalisasi Penerimaan Daerah" bertujuan untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah melalui serangkaian langkah strategis yang komprehensif dan terarah. Salah satu pendekatan utama dalam program ini adalah pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal asing dan domestik yang bertujuan menarik investasi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) juga menjadi salah satu strategi kunci, di mana BUMD diharapkan mampu berkontribusi lebih besar dalam pembangunan serta peningkatan penerimaan daerah. Selain itu, untuk mengatasi tantangan pengangguran, strategi perekrutan tenaga kerja melalui penyelenggaraan job fair dan kerja sama dengan dunia usaha menjadi hal yang krusial. Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat penyerapan tenaga kerja, serta mengurangi angka pengangguran dengan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan formal.

Program ini juga menekankan pentingnya efisiensi dalam belanja operasional dan peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan yang lebih efektif. Pengelolaan anggaran yang efisien diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan yang lebih optimal dan tepat sasaran. Tidak kalah penting, optimalisasi penerimaan daerah melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah menjadi strategi vital untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas program ini meliputi persentase peningkatan investasi, proporsi penciptaan lapangan kerja formal, serta rasio pajak daerah terhadap PDRB. Dengan pelaksanaan yang tepat dan terukur, program ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam penguatan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5. **Pembentukan kota berkelanjutan melalui infrastruktur hijau, pengelolaan sampah, rehabilitasi lingkungan, dan transisi energi bersih**

   Program prioritas yang diusung oleh Pemerintah Kota Binjai, yaitu "Pembentukan Kota Berkelanjutan melalui Infrastruktur Hijau, Pengelolaan Sampah, Rehabilitasi Lingkungan, dan Transisi Energi Bersih", bertujuan untuk menciptakan kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pencapaian tujuan ini dijabarkan dalam empat program strategis yang memiliki fokus utama pada pengembangan infrastruktur hijau perkotaan, pengelolaan sampah yang terorganisir, rehabilitasi lingkungan, serta implementasi transisi energi bersih.

   Program pertama, yakni pengembangan infrastruktur hijau perkotaan, berfokus pada pemanfaatan ruang terbuka hijau yang tidak hanya berfungsi sebagai area resapan air, tetapi juga sebagai sarana mitigasi perubahan iklim di kawasan perkotaan. Selain itu, program ini juga diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan yang menganggur seperti eks area perkebunan agar dapat diubah menjadi infrastruktur hijau atau yang bernilai ekonomis agar bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, program kedua berupaya

memperbaiki sistem pengelolaan sampah perkotaan melalui pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), yang dirancang untuk mengelola sampah secara efisien dan terintegrasi, serta mendukung keberlanjutan lingkungan.

Program ketiga berkaitan dengan penghijauan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalami kerusakan, dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan memperkuat daya dukung ekosistem. Terakhir, kampanye pemanfaatan kendaraan listrik dan energi baru terbarukan sebagai bagian dari transisi energi bersih diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mempercepat proses pengurangan emisi gas rumah kaca.

Indikator kinerja dari program ini mencakup peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, penurunan emisi gas rumah kaca, konsumsi listrik per kapita yang lebih efisien, serta peningkatan proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer. Dengan target-target yang telah ditetapkan hingga tahun 2029, diharapkan program-program tersebut dapat memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan dan kualitas hidup masyarakat Kota Binjai.

6. Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga

Program prioritas "Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga" bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang cukup serta mengendalikan fluktuasi harga bahan pokok yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, tiga program strategis telah dirumuskan, yaitu (1) Kerjasama Antar Daerah untuk Ketersediaan Pangan, yang bertujuan memperkuat kerjasama antara daerah guna memastikan distribusi pangan yang merata dan terjangkau, (2) Pengendalian Inflasi Harga Bahan Pokok, yang bertujuan menekan lonjakan harga kebutuhan pokok yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi, dan (3) Pasar Murah Bergerak, yang menyediakan akses pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Dalam upaya pencapaian program ini, sejumlah indikator kinerja telah ditetapkan sebagai acuan. Indeks Ketahanan Pangan yang mencerminkan upaya peningkatan ketersediaan dan akses pangan secara keseluruhan. Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan harga pangan antar wilayah. Sedangkan tingkat inflasi diharapkan dapat tetap terjaga guna menjaga stabilitas harga yang dapat mendukung daya beli masyarakat. Dengan berbagai program strategis dan indikator kinerja yang jelas, diharapkan ketahanan pangan dan stabilitas harga dapat tercapai untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

7. **Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui dukungan destinasi, serta promosi seni dan budaya lokal**

   Program prioritas "Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui dukungan destinasi, serta promosi seni dan budaya lokal" berfokus pada pemajuan sektor pariwisata Kota Binjai dengan pendekatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung pengembangan destinasi pariwisata, pemerintah daerah akan memprioritaskan peningkatan kualitas dan kuantitas objek wisata yang ada, sambil memperkenalkan konsep wisata yang mengedepankan pelestarian alam dan budaya lokal. Seiring dengan itu, upaya pengembangan pekerja pariwisata juga menjadi bagian integral dari program ini guna memastikan bahwa tenaga kerja di sektor pariwisata memiliki keterampilan yang memadai dan siap bersaing dalam industri global.

   Kegiatan seperti Pekan Seni dan Budaya Kota Binjai menjadi platform penting untuk mengenalkan dan mempromosikan nilai-nilai budaya lokal yang kaya kepada masyarakat luas, sekaligus meningkatkan daya tarik wisatawan. Revitalisasi dan pelestarian situs-situs budaya juga akan mendapatkan perhatian besar, dengan tujuan untuk melestarikan warisan budaya yang menjadi identitas kota, serta memastikan keberlanjutannya bagi generasi mendatang. Selain itu, pembangunan kawasan Waterfront City Sungai Bingai yang mendukung pariwisata diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan destinasi wisata baru yang berpotensi menjadi ikon pariwisata di kawasan ini.

   Dengan target kinerja yang terukur, seperti peningkatan jumlah wisatawan mancanegara, rasio PDRB sektor pariwisata, dan per, program ini bertujuan untuk mengangkat sektor pariwisata Kota Binjai menjadi lebih berkembang, berdaya saing, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

8. **Penguatan Koperasi dan UMKM melalui pendampingan terpadu, dan berbasis digital**

   Program prioritas "Penguatan Koperasi dan UMKM melalui pendampingan terpadu, dan berbasis digital" bertujuan untuk meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian, terutama di Kota Binjai. Program ini mencakup tiga strategi utama yang saling mendukung, yakni revitalisasi koperasi dan UMKM dengan pendekatan yang mencakup pendampingan, inovasi, networking, teknologi, serta peningkatan akses dan ketahanan. Selain itu, pengembangan UMKM melalui platform digital (UMKM Go Digital) juga diutamakan, agar para pelaku usaha dapat mengakses pasar lebih luas dan meningkatkan daya saing. Tak kalah penting, program ini juga

fokus pada pengembangan pasar UMKM dan pertunjukkan seni budaya yang diharapkan dapat meningkatkan visibility serta menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan program, ditetapkan berbagai indikator kinerja yang memiliki target yang jelas. Misalnya, kontribusi UMKM terhadap PDRB, serta peningkatan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB. Tidak hanya itu, penguatan sektor ekonomi kreatif juga menjadi perhatian dengan target jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual (HAKI). Untuk mendukung pencapaian tersebut, program ini juga memprioritaskan pengembangan sektor pariwisata. Implementasi strategi ini diharapkan mampu mengakselerasi perkembangan sektor UMKM di Kota Binjai, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta memperkuat daya saing daerah secara keseluruhan.

9. Pemberantasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat

Program prioritas "Pemberantasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat" yang diusung oleh Pemerintah Kota Binjai merupakan langkah strategis untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerah melalui pengembangan potensi sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi. Dalam upaya ini, terdapat dua program strategis utama, yaitu sinergi antara pendidikan vokasi dan dunia usaha (Sivosa) serta peningkatan keterampilan wirausaha mandiri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan sektor wirausaha yang berkelanjutan di tingkat lokal. Indikator kinerja utama yang menjadi acuan dalam pengukuran pencapaian program ini meliputi peningkatan produktivitas pekerja terhadap PDRB, proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan tinggi, serta persentase lulusan pendidikan tinggi yang bekerja di bidang keahlian mereka. Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada pengembangan kewirausahaan daerah, yang diharapkan dapat menciptakan peluang kerja dan mengurangi angka pengangguran terbuka serta tingkat kemiskinan yang ada.

Sebagai bagian dari target jangka memengah, program ini menetapkan peningkatan signifikan pada indikator-indikator tersebut serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka melalui peningkatan keterampilan dan penyediaan peluang wirausaha yang lebih luas. Melalui implementasi program ini, diharapkan dapat tercipta kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Kota Binjai.

10. **Tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kompetensi ASN**

    Program prioritas "Tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kompetensi ASN" bertujuan untuk memperkuat kualitas layanan publik melalui peningkatan integritas, profesionalisme, serta kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dilaksanakan melalui berbagai langkah strategis yang mencakup pelatihan dan sertifikasi kompetensi ASN, kolaborasi antar lembaga dalam penegakan hukum, serta upaya untuk memastikan ASN bebas dari narkoba dan judi online. Selain itu, program ini juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang melibatkan manajemen talenta dan perekrutan P3K tanpa pungli, serta peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

    Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, indikator kinerja yang telah ditetapkan mencakup peningkatan indeks profesionalisme ASN, persentase penegakan hukum peraturan daerah, serta indeks reformasi birokrasi. Target kinerja yang ditetapkan menunjukkan upaya yang terukur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan efisien. Adapun sasaran pada tahun 2029 diharapkan dapat tercapai dengan peningkatan indeks profesionalisme ASN, persentase penegakan hukum, dan indeks reformasi birokrasi. Pencapaian ini diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik dan membangun pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

11. **Transformasi digital kota melalui layanan publik berbasis internet, dan smart city**

    Program prioritas "Transformasi digital kota melalui layanan publik berbasis internet, dan smart city" bertujuan untuk memajukan Kota Binjai dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pendorong utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat aspek pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Dalam mencapai tujuan tersebut, program ini menitikberatkan pada tiga strategi utama, yakni penyediaan layanan Wi-Fi gratis di ruang publik, penguatan sistem data terintegrasi kota Binjai melalui inisiatif Binjai Satu Data, serta pengembangan platform e-government.

    Penyediaan layanan Wi-Fi gratis di ruang publik merupakan langkah strategis untuk memastikan akses informasi yang lebih merata bagi masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam menggunakan layanan digital. Selanjutnya, penguatan sistem data terintegrasi

melalui Binjai Satu Data diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah serta memberikan akses yang lebih cepat dan akurat terhadap data yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Terakhir, pengembangan platform e-government bertujuan untuk mempermudah proses administrasi pemerintah, mempercepat pelayanan publik, dan mendukung transparansi dalam pelaporan kegiatan pemerintah.

Untuk mengukur keberhasilan program ini, sejumlah indikator kinerja telah ditetapkan, seperti persentase area publik yang memanfaatkan akses internet, indeks masyarakat digital Indonesia, dan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik. Target-target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2029 menunjukkan ambisi besar dalam mencapai transformasi digital yang merata dan efektif, dengan indikator-indikator yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kota Binjai dapat menjadi kota yang lebih cerdas, terhubung, dan siap menghadapi tantangan di era digital.

12. **Pembangunan infrastruktur perkotaan berkelanjutan yang mendukung konektivitas, dan inklusif**

Program prioritas "Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan yang Mendukung Konektivitas dan Inklusif" bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di kota-kota, dengan fokus pada keberlanjutan, konektivitas, dan pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ini meliputi berbagai aspek, antara lain konektivitas infrastruktur jalan perkotaan yang lebih baik, pengendalian banjir yang adaptif terhadap curah hujan ekstrem, peningkatan akses sanitasi aman, serta penyediaan transportasi ramah lingkungan. Selain itu, program ini juga mencakup perluasan jaringan distribusi air bersih, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan pengembangan infrastruktur energi terbarukan.

Dalam upaya mencapai tujuan ini, pemerintah menargetkan sejumlah indikator kinerja yang jelas, seperti rasio konektivitas, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman, serta jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum bersih. Selain itu, terdapat pula target dalam hal penurunan risiko bencana, peningkatan kualitas layanan infrastruktur, serta ketersediaan hunian layak yang terjangkau dan berkelanjutan. Melalui program ini, diharapkan dapat terwujud kota-kota yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya.

13. **Pemberdayaan UMKM melalui pelatihan ekspor, akses pembiayaan, dan dukungan perluasan pasar**

    Program prioritas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor UMKM melalui tiga pilar utama, yakni pelatihan ekspor, akses pembiayaan, dan dukungan perluasan pasar. Sebagai langkah strategis, program ini mengedepankan pelatihan ekspor yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam menjangkau pasar internasional, membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal. Selain itu, fasilitasi akses pembiayaan menjadi faktor kunci untuk memastikan kelangsungan dan pengembangan usaha, dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi UMKM untuk memperluas kapasitas produksi serta meningkatkan kualitas produk. Terakhir, perbaikan tata kelola pasar juga menjadi prioritas, yang bertujuan untuk menciptakan pasar yang nyaman, bersih, dan sehat, guna mendukung keberlanjutan usaha serta menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

    Program ini diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi UMKM terhadap PDRB, meningkatkan angka kewirausahaan daerah, dan memperluas sektor ekonomi kreatif. Target-target yang telah ditetapkan mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor UMKM, dengan proporsi PDRB ekonomi kreatif, sementara rasio kewirausahaan daerah diperkirakan meningkat. Melalui peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDRB serta rasio penyediaan akomodasi makan dan minum yang lebih baik, program ini berpotensi memperkuat perekonomian daerah secara berkelanjutan.

14. **Pengembangan ekonomi hijau melalui pertanian perkotaan berbasis teknologi**

    Program prioritas "Pengembangan ekonomi hijau melalui pertanian perkotaan berbasis teknologi" merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mendorong keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di wilayah perkotaan. Melalui pemanfaatan teknologi pertanian modern, program ini berfokus pada penerapan teknik pertanian yang efisien dan ramah lingkungan, seperti hidroponik, yang memungkinkan produksi tanaman tanpa tanah, mengurangi penggunaan pestisida, dan meningkatkan hasil pertanian di ruang terbatas. Salah satu langkah strategis utama dari program ini adalah pemanfaatan teknologi pertanian perkotaan, yang memungkinkan pemanfaatan ruang di daerah perkotaan untuk kegiatan pertanian yang lebih produktif.

Selain itu, program ini juga mencakup penyediaan bibit dan varietas unggul yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Penggunaan bibit unggul diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk pertanian lokal, serta mempercepat adopsi pertanian berbasis teknologi. Selain itu, pengembangan ekonomi sirkular menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung keberlanjutan sistem pertanian perkotaan, dengan memanfaatkan limbah pertanian dan organik untuk mendukung keberlanjutan pertanian dan pengelolaan sampah.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, indikator kinerja program ini antara lain adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, persentase sampah yang berhasil diolah di fasilitas pengolahan sampah, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, serta indeks ketahanan pangan. Target-target yang ditetapkan, seperti peningkatan PDRB sektor pertanian, menunjukkan komitmen untuk memajukan sektor ini, serta mendukung pencapaian ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dalam jangka panjang.

15. **Penguatan inklusi sosial, serta penguatan solidaritas dan toleransi antar umat beragama**

Program prioritas "Penguatan inklusi sosial, serta penguatan solidaritas dan toleransi antarumat beragama" merupakan salah satu fokus utama dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Dalam rangka mencapai tujuan ini, Pemerintah Kota Binjai telah merumuskan berbagai strategi yang melibatkan pemberdayaan sosial serta peningkatan kerukunan antarumat beragama. Salah satu program utama dalam strategi ini adalah penyediaan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan generasi muda. Ini bertujuan untuk memastikan akses yang lebih baik terhadap hunian yang layak dan terjangkau, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, program bantuan sosial berbasis data juga menjadi pilar penting dalam memperkuat jaringan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran, berdasarkan data yang akurat, sehingga mengurangi potensi ketimpangan sosial. Tidak hanya itu, program SAGA (Semangat Gotong Royong Antarwarga) juga dihadirkan untuk meningkatkan solidaritas antarwarga, dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan gotong royong. Dengan demikian, program ini dapat mempererat ikatan sosial di kalangan warga Binjai, terlepas dari latar belakang agama atau suku.

Selanjutnya, Program Binjai Rumah Bersama untuk Semua Umat Beragama menjadi salah satu upaya strategis dalam mempromosikan kehidupan beragama yang lebih inklusif dan harmonis. Melalui program ini, diharapkan tercipta ruang-ruang sosial yang mendukung toleransi dan saling pengertian antarumat beragama. Sebagai tambahan, fasilitasi pengembangan dan pemeliharaan sarana keagamaan juga menjadi fokus agar setiap umat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan khusyuk, tanpa adanya hambatan atau diskriminasi.

Secara keseluruhan, program prioritas ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis, dengan menjadikan inklusi sosial dan toleransi antarumat beragama sebagai landasan utama dalam pembangunan daerah. Target indikator kinerja yang ditetapkan, seperti peningkatan akses hunian layak, pengurangan tingkat kemiskinan, dan penguatan kerukunan antarumat beragama, diharapkan dapat terwujud pada tahun 2029 dengan pencapaian yang signifikan.

16. **Kehidupan yang Lebih Tertib, Aman dan Nyaman**

Program prioritas "Kehidupan yang Lebih Tertib, Aman dan Nyaman" bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih kondusif, aman, dan nyaman melalui serangkaian strategi yang terintegrasi. Salah satu strategi utama yang dilaksanakan adalah Program "GENTAR" (Generasi Tanpa Narkoba dan Kenakalan Remaja), yang berfokus pada pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Program ini diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi narkoba dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika. Selain itu, penyelesaian tindak pidana yang cepat dan adil juga menjadi fokus utama dalam menciptakan ketertiban hukum yang lebih baik.

Untuk memperkuat integritas dan kepercayaan publik, program ini juga mengedepankan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang transparan, serta implementasi Restorative Justice yang melalui mediasi untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Peningkatan sistem keamanan berbasis teknologi juga menjadi langkah strategis dalam menjaga ketertiban dan mencegah tindak kriminalitas, terutama dengan melibatkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan teratur.

Program ini juga mengembangkan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi masyarakat (Ormas) serta menjalankan inisiatif penindakan dan pencegahan terintegrasi terhadap judi online. Salah satu fokus utama yang menjadi prioritas adalah membangun kampung bebas narkoba sebagai bagian dari mendukung program pengentian peredaran narkoba. Semua langkah ini,

yang disertai dengan target yang jelas dalam hal indikator kinerja, diharapkan dapat mencapai tujuan mewujudkan kehidupan yang lebih tertib, aman, dan nyaman untuk masyarakat.

Program pembangunan daerah dirancang untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, sekaligus menjadi solusi bagi permasalahan strategis daerah. Program ini diturunkan ke dalam tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang jelas dan terukur. Rincian program prioritas pembangunan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 12. Perumusan Program Prioritas RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
Misi 1: Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan Serta Mendukung Makan Bergizi Gratis Bagi Anak Didik TK, SD dan SMP						
1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar			Usia Harapan Hidup			Dinas Kesehatan
	1. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional			Dinas Kesehatan
			Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis (treatment coverage)			Dinas Kesehatan
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)			Dinas Kesehatan
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan			Disketapangtan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Jumlah Kematian Ibu (Kasus)	Penguatan Infrastruktur dan Mutu Layanan Kesehatan (PIMULKES)	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			2. Prevalensi Stunting			Dinkes, KB, PUPR, Ketapang, Dinsos, PKP
		Meningkatnya kualitas kesehatan	1. Jumlah Kematian Ibu (Kasus)	Gerakan Sinergi Terpadu Lintas Lembaga dan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
		perorangan dan masyarakat	2. Prevalensi Stunting	Masyarakat (GESIT LINMAS)	dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes, KB, PUPR, Ketapang, Dinsos, PKP
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)		Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
			2. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)			
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)		Kawasan Permukiman	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Jumlah Kematian Ibu (Kasus)	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			2. Prevalensi Stunting			

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Jumlah Kematian Ibu (Kasus)	Penguatan Gerakan Hidup Sehat dan Deteksi Dini Penyakit	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			2. Prevalensi Stunting			
		Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Pemenuhan Ketercukupan dan Kompetensi Tenaga Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Jumlah Kematian Ibu (Kasus)	Dukungan Program Makanan Bergizi di Sekolah	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Pendidikan
			2. Prevalensi Stunting			
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)		Pengelolaan Pendidikan	
			2. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)			

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
2. Terwujudnya SDM unggul			Indeks Pembangunan Manusia			Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan
	2. Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM		Kemampuan Literasi Berkategori Baik Tingkat SD			Dinas Pendidikan
			Kemampuan Literasi Berkategori Baik Tingkat SMP			
			Kemampuan Numerasi Berkategori Baik Tingkat SD			Dinas Pendidikan
			Kemampuan Numerasi Berkategori Baik Tingkat SMP			Dinas Pendidikan
			Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas (angkatan kerja) yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)			Dinas Pendidikan
			Persentase lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi atau menjadi wirausaha (%)			Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
			Rata-Rata Lama Sekolah (%)			Dinas Pendidikan
			Harapan Lama Sekolah (%)			Dinas Pendidikan
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Peningkatan Akses Pendidikan / Sekolah Gratis SD dan SMP	Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			2. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)			
		Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Pengembangan Kurikulum Pendidikan untuk peningkatan literasi dan numerasi siswa	Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)		Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
			2. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)			
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi dari Masyarakat Miskin, Rentan dan Disabel	Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial
			2. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)			
		Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Penguatan Pendidikan Karakter	Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)		Pengelolaan Pendidikan	
			2. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)			
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Peningkatan Kesejahteraan Guru	Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			2. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)			

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Sinergi Vokasi-Usaha (Sivosa)	Pengelolaan Pendidikan	Disnakerperindag dan Dinas Pendidikan
			2. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)			
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya		Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
		Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Peningkatan keterampilan wirausaha mandiri	Pengembangan UMKM	Dinas Ketenagakerjan, Perindustrian dan Perdagangan / Dinas Koperasi dan UKM
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya		Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
Misi 2 : Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan						
3. Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan			Tingkat Inflasi			Bagian Perekonomian, Disnakerperindag, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3. Terwujudnya ketercukupan dan stabilitas harga pangan		Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah			Disnakerperindag
			Indeks Ketahanan Pangan			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Kerjasama Antar Daerah untuk Ketercukupan Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Pengendalian Inflasi Harga Bahan Pokok	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Bagian Perekonomian, Disnakerperindag, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Pasar Murah Bergerak	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian/ Disnakerperindag
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan			Pertumbuhan Ekonomi			Bagian Perekonomian
			PDRB per Kapita			Bapperida, Dinas Ketenagakerja, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UMKM
			Kontribusi PDRB Kota Binjai terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara			Bapperida

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
			Rasio Gini			Bapperida, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerja, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat
			Indeks Ekonomi Hijau Daerah			Dinas Lingkungan Hidup
			Tingkat Pengangguran Terbuka			Disnakerperindag
	5. Meningkatnya daya saing ekonomi yang inklusif		Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan			Dinas Ketenagakerja, Perindustrian dan Perdagangan
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif			Dinas Pariwisata
			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)			Dinas Koperasi dan UMKM
			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan			Dinas Koperasi dan UMKM

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
			Menengah (UKM) Non Pertanian pada Level Kota Binjai			Dinas Koperasi dan UMKM
			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Level Kota Binjai			Dinas Koperasi dan UMKM
			Rasio kewirausahaan daerah			Dinas Ketenagakerja, Perindustrian dan Perdagangan
			Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB			Dinas Koperasi dan UMKM
			Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi			
			Kreatif yang Memiliki HAKI			Dispar, Disnaker, Diskop, Bapperida
			Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal			Dinas Ketenagakerja, Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB			Bagian Perekonomian

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
			Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB			
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			Dinas Ketenagakerja, Perindustrian dan Perdagangan
			Kontribusi UMKM terhadap PDRB			Dinas Koperasi dan UKM dan Bagian Perekonomian
			Persentase Peningkatan Investasi			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Revitalisasi Koperasi dan UMKM PINTAR (Pendampingan, Inovasi, Networking, Teknologi, Akses dan Resiliensi)	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
			2. Pertumbuhan Wirausaha			
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	UMKM Go Digital	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan UKM
			2. Pertumbuhan Wirausaha			

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Pasar UMKM dan Pertunjukkan Seni Budaya	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Pariwisata
			2. Pertumbuhan Wirausaha			
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan		Pengembangan Kebudayaan	
		Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi kreatif	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Rekrutmen Tenaga Kerja melalui Job Fair dan Kerjasama Dunia Usaha	Penempatan Tenaga Kerja	Disnakerperindag
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Penanaman Modal Asing dan Domestik	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Pelatihan Ekspor UMKM	Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Dukungan Penyediaan Rumah Murah bagi MBR, dan Generasi Muda	Pengembangan Perumahan	Dinas Perkim
		Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Fasilitasi Akses Pembiayaan UMKM	Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM
	5. Meningkatnya aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan dan berketahanan		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum			Dinas Pariwisata
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara			Dinas Pariwisata
			Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Belanja Riset			Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Indeks Pembangunan Pemuda			Dinas Pendidikan dan Olahraga
			Nilai Tukar Petani			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
			Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB			Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Pemanfaatan Teknologi Pertanian Perkotaan	Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi			
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Penyediaan Bibit dan Varietas Unggul	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			2. Peningkatan Produksi Hortikultura			
			3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan			
		Meningkatnya tata kelola persampahan	1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Pengembangan ekonomi sirkular	Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
			2. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah			

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Dukungan Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Pekerja Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi kreatif	
5. Peningkatan perlindungan sosial dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk rentan			Tingkat Kemiskinan			Dinas Sosial
	6. Meningkatnya akses dan kualitas layanan perlindungan sosial		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Binjai			Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerja, Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal			Dinas Ketenagakerja, Perindustrian dan Perdagangan
			Indeks Kesejahteraan Sosial			Dinas Sosial
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Bantuan Sosial Berbasis Data	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat			

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
			Kemandirian Ekonomi			
			3. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelotaan dan Pendataan Data Fakir Miskin			
			4. Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar			
			5. Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi			
			6. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dani Kemiskinan			
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Jaminan Sosial Inklusif Terintegrasi untuk Lansia, Kelompok Rentan dan Disabilitas	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat			

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
			Kemandirian Ekonomi			
			3. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelotaan dan Pendataan Data Fakir Miskin			
			4. Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar			
			5. Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi			
			6. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dani Kemiskinan			
		Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Perlindungan Pekerja Informal	Hubungan Industrial	Disnakerperindag
6. Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan keluarga			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluaga Berencana

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
	7. Menguatnya peran keluarga dan kesetaraan		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)*			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)*			
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan			
			Indeks Perlindungan Anak			
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Pemulihan psikologis, dan kesehatan mental bagi korban kekerasan keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Wirausaha Rumah Tangga Produktif	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan UKM
			2. Pertumbuhan Wirausaha			

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga		Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Dukungan Kuota Pekerjaan Disabilitas di Sektor Formal	Penempatan Tenaga Kerja	Disnakerperindag
	8. Menguatnya pemanfaatan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya lokal dalam pembangunan		Persentase Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar budaya (Benda dan Tak Benda)			Dinas Pariwisata
			Indeks Kerukunan Umat Beragama			Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui dukungan destinasi, serta promosi seni dan budaya lokal	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual		Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan		Pengembangan Kebudayaan	
		Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Pekan Seni dan Budaya Kota Binjai	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan		Pengembangan Kebudayaan	
		Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Revitalisasi dan Pelestarian Cagar Budaya	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
			2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan			
		Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalarn pembangunan	1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat an Desa (LKD)	Program SAGA (Semangat Gotong Royong Antarwarga)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DP3AM / Kecamatan
			. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat			
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	Program Binjai Rumah Bersama bagi Semua Umat Beragama	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
			Daerah yang Dilaksanakan			
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Fasilitasi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Keagamaan	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Program "GENTAR" (Generasi Tanpa Narkoba dan Kenakalan Remaja)	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik / Bagian Kesra
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Kesejahteraan Rakyat	
Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan						
7. Terwujudnya sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan berkelanjutan			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca			Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
	9. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendukung pembangunan berkelanjutan		Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah			Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
			Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah			Dinas Lingkungan Hidup
			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman			Dinas PUTR
			Indeks Risiko Bencana			BPBD
			Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan			Dinas Perkim
			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)			Dinas PUTR
			Rasio Konektivitas			Dinas Perhubungan
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan mang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Pembentukan kota berkelanjutan melalui infrastruktur hijau, pengelolaan sampah, rehabilitasi lingkungan, dan transisi energi bersih	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya tata kelola persampahan	1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah		Pengelolaan Persampahan	
			2. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah			

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	1. Persentase RTH		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
			2. Indeks Kualitas Lahan			
			3. Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS			
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	1. Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			2. Porsi EBT dalam Bauran Energi			
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	1. Persentase RTH	Pengembangan Infrastruktur Hijau Perkotaan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup
			2. Indeks Kualitas Lahan			

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
			3. Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS			
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan mang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		Penyelenggaraan Penataan Ruang	
		Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Pengelolaan Sampah Perkotaan melalui Pembangunan TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu)	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas PUTR
		Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang jalan dalam kondisi Baik	Konektivitas Infrastruktur Jalan Perkotaan	Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUTR / Dinas Perhubungan
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Konektivitas Darat		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
			2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal			
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan	Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir yang lebih Adaptif	Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PUTR

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
			Permukiman Rawan Banjir	terhadap Curah Hujan Ekstrem		
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Peningkatan Akses Sanitasi Aman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUTR
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Konektivitas Darat	Penyediaan Transportasi Kota Ramah Lingkungan	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal			
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Perluasan Jaringan Distribusi Air Bersih Perkotaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUTR

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	Kawasan Permukiman	Dinas Perkim
		Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pembangunan Water Front City Sungai Bingai yang Mendukung Pariwisata	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Perbaikan Tata Kelola Pasar yang dapat mewujudkan Pasar yang Nyaman, Bersih dan Sehat	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Disnakerperindag
		Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan		Penataan Bangunan dan Lingkungan	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Penyediaan Layanan Wi-Fi Gratis di Ruang Publik	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo
	10. Meningkatnya ketahanan lingkungan		Konsumsi Listrik per Kapita			Bag. Perekonomian dan Dinas Perkim

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
	dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan		Kapasitas Air Baku / Kapasitas Tampungan Air			Dinas PUTR
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan			Dinas Perkim
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	1. Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Pengembangan Infrastruktur Energi Terbarukan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Disnakerperindag
			2. Porsi EBT dalam Bauran Energi			
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	1. Persentase RTH	Penghijauan DAS yang Mengalami Kerusakan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
			2. Indeks Kualitas Lahan			
			3. Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS			

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	1. Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Kampanye pemanfaatan kendaraan listrik dan energi baru terbarukan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Disnakerperindag
			2. Porsi EBT dalam Bauran Energi			
Misi 4 : Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kreatif						
8. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Indeks Reformasi Birokrasi			Bagian Organisasi Setdako Binjai dan BKPSDM
	11. Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya		Indeks Pelayanan Publik			Seluruh Dinas
			Indeks Reformasi Hukum			Bagian Hukum
			Indeks Integritas Nasional			Inspektorat
			Indeks Inovasi Daerah			Bapperida
			Indeks Profesionalitas ASN			BKPSDM
			Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Ombudsman)			Setda

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	1. Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi ASN	Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
		Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	2. Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan			
		Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	3. Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi			
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	4. Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis			
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	1. Persentase Perencanaan Kebutuhan yang		Kepegawaian Daerah	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
			sesuai dengan Formasi			
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	2. Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya			
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	3. Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik			
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	4. Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya			
		Meningkatnya jangkauan dan lcualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Penguatan Sistem Data Terpadu Kota Binjai (Binjai Satu Data)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE		Pengelolaan Aplikasi Informatika	
		Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Kolaborasi Antar Lembaga dalam Penegakan Hukum	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bagian Hukum

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	ASN Bebas Narkoba dan Judi Online	Penyelenggaraan pengawasan	Inspektorat
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	1. Maturitas Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)		Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
			2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)			
		Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi	Reformasi Birokrasi dengan Manajemen Talenta, dan Rekrutment P3K Tanpa Pungli	Penataan Organisasi	Bagian Organisasi, BKPSDM, Inspektorat
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1		Penyelenggaraan pengawasan	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
	12. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintahan		Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik			Dinas Kominfo
			Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi			Dinas Kominfo
			Indeks Masyarakat Digital Indonesia			Dinas Kominfo
			Indeks Demokrasi Indonesia			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Kerjasama Kota Binjai/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister City)			Bagian Pemerintahan Setdako Binjai
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Pengembangan platform e-government	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	1. Efektivitas Kerja Sama Daerah	Peningkatan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Bapperida
			2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan			

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD		Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD			
	13. Meningkatnya kapasitas perencanaan dan keuangan daerah		Return on Asset (ROA) BUMD			Bagian Perekonomian
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB			BPKPD
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan			BPKPD
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Penguatan ekonomi daerah melalui investasi, penyerapan tenaga kerja, efisiensi anggaran, dan optimalisasi penerimaan daerah	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	2. Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan			

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
		meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	3. Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital			BPKPD
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	1. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Penguatan Peran BUMD dalam Pembangunan dan Penerimaan Daerah	Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Perekonomian
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	2. Tingkat Kematangan UKPBJ			Bagian PBJ
		Meningkatnya tata kelola anggaran	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Efisiensi dalam Belanja Operasional dan Peningkatan Alokasi untuk Pembangunan	Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD
			2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik			

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	1. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
			2. Persentase Penurunan SILPA			
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Optimalisasi Penerimaan Berkelanjutan melalui Kesadaran Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	BKPPD
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan			
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital			
9. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya			
	14. Meningkatnya keamanan, ketertiban,		Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM			Bagian Hukum Setdako Binjai dan Bapperida

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
	dan kenyamanan masyarakat		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas			Satpol PP dan BPBD
			Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah			Satpol PP
		Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang melibatkan ASN	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bagian Hukum Setdako Binjai
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Penguatan Integritas melalui Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Transparan	Penyelenggaraan pengawasan	Inspektorat
		Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Implementasi Restorative Justice melalui Mediasi, dan Pemulihan Hubungan antara Pelaku, Korban, dan Masyarakat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bagian Hukum Setdako Binjai
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Pembinaan dan Pengawasan Ormas	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Peningkatan Sistem Keamanan Berbasis Teknologi	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dinas Kominfo
		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat			
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE		Pengelolaan Aplikasi Informatika	
		Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Kerjasama Seluruh Pemangku Kepentingan dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas			
		Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Penindakan dan Pencegahan Terpadu Judi Online	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
		Meningkatnya penanganan gangguan	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas			

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program OPD	Perangkat Daerah
Visi : Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan						
		ketenteraman dan ketertiban umum				
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Membangun Kampung Bebas Narkoba dalam Mendukung Program Penghentian Peredaran Narkoba	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB 4 – PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Pada bagian ini akan diuraikan secara komprehensif mengenai perencanaan program yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah guna mendukung pencapaian visi, misi, sasaran, tujuan, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025-2029. Setiap program dirancang untuk memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Binjai, sekaligus memastikan terwujudnya pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan inklusif. Selain itu, berbagai program tersebut juga memuat inisiatif untuk menghasilkan capaian cepat yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dalam jangka waktu relatif singkat. Dengan pelaksanaan yang terintegrasi dan kolaboratif, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat berperan aktif dan optimal dalam mewujudkan Kota Binjai yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

4.1.1. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Pendidikan, program ini diarahkan pada perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, serta peningkatan partisipasi pendidikan. Outcome dari program ini adalah meningkatnya partisipasi anak usia sekolah.
b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, program ini diarahkan pada perluasan akses pemerataan layanan pendidikan. Outcome dari program ini yaitu meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan.
c. Program Pengembangan Kurikulum, program ini memiliki outcome agar meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan.
d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, outcome dari program ini agar meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan.
e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra, dengan outcome program yaitu agar Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah.

Pelaksanaan urusan pendidikan ditujukan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan.

b. Urusan Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program ini diarahkan pada Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan, Peningkatan penyediaan layanan kesehatan rujukan dan pengelolaan pelayanan kesehatan Puskesmas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Jumlah Kematian Ibu (Kasus), dan Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita.
b. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, Program ini diarahkan pada Upaya pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber daya manusia kesehatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan.
c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program ini diarahkan pada pengendalian dan pengawasan perijinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program ini diarahkan pada Peningkatan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang di Berdayakan.

Pelaksanaan urusan kesehatan ditujukan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan Tata Ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program ini diarahkan pada Pembangunan dan pemeliharaan Polder/Koam Retensi, Operasi dan pemeliharaan Pompa Banjir, pembangunan sumur air tanah untuk air baku. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota melalui pengembangan SPAM regional, pembangunan jaringan sistem perpipaan air minum (SPAM) di kawasan perkotaan. Indikator program ini adalah Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan.
c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Regional, serta peningkatan prasarana sarana sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat.
d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program ini diarahkan pada Revitalisasi Saluran Drainase kawasan Perkotaan, penyediaan sarana sistem Drainase Perkotaan dan operasi dan pemeliharaan sistem Drainase. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Drainase dalam kondisi baik.
e. Program Penataan Bangunan Gedung, Program ini diarahkan pada upaya pengendalian bangunan sesuai dengan fungsi bangunan, Pembangunan Gedung fasilitas publik serta pemeliharaan Gedung cagar budaya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik.
f. Program Penyelenggaraan Jalan, program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan meliputi peningkatan jalan mantap pada Kota, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan jembatan serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin, pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan banjir; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar; serta pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan.
g. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program ini diarahkan pada pelatihan tenaga trampil konstruksi, Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi pada pelaksanaan kegiatan.
h. Program Penyelenggaraan Tata Ruang, Program ini diarahkan pada peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang; dan peningkatan

peran serta masyarakat dalam Tata Ruang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan Tata Ruang ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Tersedianya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
2. Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang;
3. Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman;
5. Meningkatnya penyediaan Infrastruktur layanan dasar;
6. Meningkatnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
7. Meningkatnya konektivitas wilayah; dan
8. Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung secara tertib dan andal;

d. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan, Program in diarahkan pada Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus dan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di perkotaan.
b. Program Kawasan Permukiman, program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.
c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Program ini diarahkan pada Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU); Pengelolaan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau dan penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum perumahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum).

Pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman ditujukan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat; Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani; dan Meningkatnya Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

e. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Program ini diarahkan pada Peningkatan pencegahan dan penindakan ganggunan ketentraman dan ketertiban umum, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamongpraja dan Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan perda dan perkada.
b. Program Penanggulangan Bencana Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui kelurahan tangguh bencana, pemasangan sistem peringatan dini (*Early Warning System/EWS*) di daerah rawan bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), Unit Layanan Inklusi Disabilitas (Unit LIDi), penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), penyusunan rencana kontijensi (renkon); evakuasi dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penghitungan kajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna), serta Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).
c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Program ini diarahkan pada Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kota, Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Investigasi Kejadian Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi; Persentase Pelayanan, Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia; Persentase Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Perangkat Daerah yang mengampu urusan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat; Persentase Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran; dan Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Pelaksanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ditujukan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

f. Urusan Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial, Program ini diarahkan pada Peningkatan penanganan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); Peningkatan kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial; dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial, dan Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial.
b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program ini diarahkan pada upaya peningkatan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan, dan Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani.
c. Program Rehabilitasi Sosial, Program ini diarahkan pada penyediaan permakanan, sandang dan alat bantu, pemberian pelayanan reunifikasi, pemberian akses layanan Pendidikan dan kesehatan dasar, dan bimbingan fisik, mental spiritual dan social bagi penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya, Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya, Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya, Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya, Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya, Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, dan Indeks Peranan Sosial.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program ini diarahkan pada Pemberian perlindungan jaminan social kepada anak-anak terlantar, Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Pengembangan Ekonomi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar, Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi, Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelotaan dan Pendataan Data Fakir Miskin, Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar, Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi, Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan.
e. Program Penanganan Bencana, Program ini diarahkan pada upaya Peningkatan perlindungan sosial bagi Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) Korban Bencana alam dan sosial; dan Peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana, Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya, dan Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial.

Pelaksanaan urusan sosial ditujukan untuk pelaksanaan kinerja :

1. Tersedianya Data Fakir Miskin
2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
3. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
4. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana
5. Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana
6. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

4.1.2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja dan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan tenaga kerja baik secara makro maupun mikro. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase program/kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program ini diarahkan pada Peningkatan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klister kompetensi, penyediaan sarana pelatihan kerja, pembinaan Lembaga pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja pada perusahaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.
c. Program Penempatan Tenaga Kerja, Program ini diarahkan pada peningkatan layanan antar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja, peningkatan pelayanan disabilitas ketenagakerjaan dan peningkatan pelatihan bagi wirausaha baru, Job Fair/Bursa Kerja dan peningkatan pelayanan informasi Pasar Kerja. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase tenaga kerja yang ditempatkan.
d. Program Hubungan Industrial, Program ini diarahkan pada upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak - Hak Pekerja dan Dialog Sosial.
e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan, program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan penarikan pekerja anak, pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak, penanganan kasus ketenagakerjaan, pemeriksaan dan pengujian objek K3 di perusahaan, serta pembinaan dan pemeriksaan norma K3 di perusahaan.

Pelaksanaan urusan tenaga kerja ditujukan untuk pelaksanaan:

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
2. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan
3. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindung hak-haknya

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kegiatan pengarustamaan gender (PUG); Peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, social dan

ekonomi pada organisasi kemasyarakatan; dan Penguatan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

b. Program Perlindungan Perempuan, Program ini diarahkan pada upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, peningkatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan Penguatan /pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan.
c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak; Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Gak Anak; dan Penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak.
d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program ini diarahkan pada Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan penyajian data Gender dan Anak dalam suatu Kelembagaan Data. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase).
e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Program ini diarahkan pada Peningkatan jejaring kemitraan Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Penguatan/pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Nilai dalam Kabupaten/ Kota Layak Anak (Nilai).
f. Program Perlindungan Khusus Anak, Program ini diarahkan pada upaya pencegahan kekerasan terhadap anak; dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA).
g. Program Pengendalian Penduduk, program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
h. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana; pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kesertaan KB

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditujukan untuk pelaksanaan :

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;

2. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
3. Meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga;
4. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana

c. Pangan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program ini diarahkan pada Penyediaan infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan.
b. Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan; Peningkatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan; dan Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka kecukupan Gizi.
c. Program Kerawanan Pangan, Program ini diarahkan pada Ketersediaan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan; dan Penanganan Kerawanan Penganan.
d. Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program ini diarahkan pada Peningkatan pengawasan keamanan pangan Segar dan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan. Pelaksanaan urusan pangan ditujukan untuk pelaksanaan :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan strategis
2. Meningkatnya Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan
3. Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi

d. Urusan Pertanahan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Program ini diarahkan pada Upaya Penyeselesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

e. Urusan Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup dan kehutanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti.
b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program ini diarahkan pada Peningkatan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; Peningkatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program ini diarahkan pada Peningkatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman hayati di luar Kawasan hutan dan Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati.
d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program ini diarahkan pada Peningkatan kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpangan sementara limbah B3.
e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program ini diarahkan pada Peningkatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan.
f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program ini diarahkan pada upaya peningkatan peran serta masyarakat dan Lembaga dalam pengelolaan lingkungan hidup.
g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program ini diarahkan pada pemberian apresiasi masyarakat/dunia usaha/dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPPLH).
i. Program Pengelolaan Persampahan Program ini diarahkan pada Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA; dan Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1)

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah; 2) Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah .

Pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup ditujukan untuk pelaksanaan :

1. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan
3. Meningkatnya Pengelolaan Sampah
4. Penyusunan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

f. Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Catatan Sipil

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk, Program ini diarahkan pada Peningkatan Pendaftaran Penduduk; Penataan Pendaftaran Penduduk; Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Cakupan Pendaftaran Penduduk.
b. Program Pencatatan Sipil, Program ini diarahkan pada Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil; Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.
c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Program ini diarahkan pada Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan; Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Program ini diarahkan pada Penyediaan Data dan informasi Kependudukan untuk kebutuhan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah.

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Catatan Sipil ditujukan untuk pelaksanaan:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Adminduk,

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif
3. Berkembangnya status pembangunan
4. Meningkatnya status Perkembangan Kawasan

g. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk Program ini diarahkan pada Peningkatan kuantitas penduduk melalui penguatan kerjasama pelaksanaan Pendidikan kependudukan jalur Pendidikan formal/non formal dan penyediaan dan pengembangan materi Pendidikan kependudukan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase laju pertumbuhan penduduk dan Rasio ketergantungan penduduk.
b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program ini diarahkan pada Peningkatan Advokasi, komunikasi, informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local; Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB; Pengendalian pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB; dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (unmet need), Persentase Jumlah Akseptor KB Aktif, Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR), dan Angka Kelahiran Remaja umur 15- 19 Tahun (ASFR).
c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program ini diarahkan pada Peningkatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Rata-rata 0 usia kawin pertama wanita.

h. Urusan Perhubungan

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program ini diarahkan pada Penyediaan perlengkapan jalan; peningkatan pengelolaan terminal penumpang tipe C; Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas; penyedian angkutan umum orang dan/atau barang; dan Peningkatan pengelolaan penyelenggaraan fasilitas parkir. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Konektivitas darat.

Pelaksanaan urusan Perhubungan ditujukan untuk pelaksanaan ;

1. Terwujudnya Konektivitas Transportasi Regional
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan
3. Meningkatnya Keselamatan transportasi

i. Urusan Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika dan urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program ini diarahkan pada Peningkatan pengelolaan media komunikasi publik; Peningkatan pelayanan informasi publik; dan peningkatan kapasitas sumber daya komunikasi publik. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat.
b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program ini diarahkan pada Peningkatan pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai penunjang pelayanan public dan pemerintahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Tingkat Kepuasan Masyarkat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan urusan Perhubungan ditujukan untuk pelaksanaan ;

1. Tersedianya Infrastruktur Digital Satu Data
2. Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital
3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pertumbuhan Ekonomi
4. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital
5. Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)

j. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program ini diarahkan pada Peningkatan fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjan untuk koperasi; dan peningkatan fasilitasi pengajuan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.
b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program ini diarahkan pada peningkatan kepatuhan koperasi pada peraturan perundang-undangan.

c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek kesehatan koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam.
d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro.
e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program ini diarahkan pada Peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manjemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi.
f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Program ini diarahkan pada upaya peningkatan pemberdayaan usaha mikro melalui kemitraan usaha, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan peran serta para pemangku kepentingan.
g. Program Pengembangan UMKM. Program ini diarahkan pada Pengembaggan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditujukan untuk pelaksanaan Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern; Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif.

k. Urusan Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program ini diarahkan pada Pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan dalam perizinan berinvesasi; dan penyediaan data informasi potensi peluang investasi di Kota Binjai. Indikator program ini adalah Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase).
b. Program Promosi Penanaman Modal, Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelenggaraan promosi investasi baik melalui media cetak maupun elektronik.
c. Program Pelayanan Penanaman Modal Program ini diarahkan pada Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu sesuai SP.
d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program ini diarahkan pada Peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Program ini diarahkan pada Peningkatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan

informasi perizinan dan non perizian berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi. Program.

Pelaksanaan urusan Penanaman Modal ditujukan untuk pelaksanaan Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal dengan indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu: Nilai Realisasi Penanaman Modal.

l. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas sumberdaya kepemudaan yang berdaya saing; Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi kepemudaan. Indikator program ini adalah Rasio Wirausaha pemuda.
b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program ini diarahkan pada Peningkatan pembinaan olahraga dan organisasi olahraga; Penyediaan sarana dan prasarana olahraga; pengembangan olahraga berprestasi dan olahraga rekreasi; dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Program ini diarahkan pada Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.

Pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga ditujukan untuk pelaksanaan:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi di tingkat Nasional dan Internasional
2. Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila

m. Urusan Persandian

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, yang diarahkan pada ketangguhan layanan keamanan informasi pemerintah daerah melalui Assesmen aplikasi, digital forensik, pemantapan kinerja tim *Computer Security Response Team* (CSRT), dan layanan penetration testing sertifikasi elektronik, kontra penginderaan, dan jamming. Pelaksanaan urusan Persandian ditujukan untuk pelaksanaan Menguatnya keamanan siber lingkungan Pemerintah Daerah. Indikato program ini adalah Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.

n. Urusan Statistik

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program ini diarahkan pada Peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Indeks Pembangunan Statistik.

o. Urusan Persandian

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Program ini diarahkan pada Peningkatan pengamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah.

p. Urusan Kebudayaan

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan, Program ini diarahkan pada upaya peningkatan apresiasi terhadap kegiatan budaya dan pelaku seni budaya Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan.
b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program ini diarahkan pada Pembinaan kelompok/Sanggar dan peningkatan tata kelola Lembaga seni budaya tradisional. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan.
c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program ini diarahkan pada Peningkatan pelestarian dan perlindungan cagar budaya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Pelestarian Warisan Budaya.
d. Program Pembinaan Sejarah, indikator program ini yaitu Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal.

Pelaksanaan urusan Kebudayaan ditujukan untuk Kelestarian Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan.

q. Urusan Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan perpustakaan dan Arsip yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan, Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan; Pengembangan layanan perpustakaan elektronik; Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan; Pengembangan literasi berbasis inklusi social; dan Gerakan Budaya Gemar

Membaca. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang diarahkan pada Program ini diarahkan pada Peningkatan pelestarian naskah kuni milik daerah; dan pengembangan koleksi budaya etnis. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki.

Pelaksanaan urusan Perpustakaan ditujukan untuk Peningkatan kegemaran membaca masyarakat dan Pembangunan literasi masyarakat meningkat.

r. Urusan Kearsipan

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip, Program ini diarahkan pada Peningkatan pengelolaan arsip dinamis dan statis; dan Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Tingkat Ketersediaan Arsip.
b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, Program ini diarahkan pada Perlindungan dan penyelematan arsip akibat bencana; dan Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.
c. Program Perizinan Penggunaan Arsip. Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan izin penggunaan arisp yang bersifat tertutup. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup.

Pelaksanaan urusan Kearsipan ditujukan untuk pelaksanaan:

1. Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal
2. Penerapan e-Arsip terintegrasi
3. Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Daerah
4. Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti

4.1.3. Urusan Pilihan

a. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program ini diarahkan pada Pemberdayaan pembudi daya ikan tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan dan peningkatan prasarana pembudidaya ikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Jumlah Produksi Perikanan Budidaya.

b. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program ini diarahkan pada Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolah dan pemasaran skala mikro dan kecil; dan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan ikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Produksi ikan olahan.

Pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan ditujukan untuk pelaksanaan:

1. Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing
2. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif

b. Urusan Pariwisata

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program ini diarahkan pada Peningkatan pengelolaan daya Tarik wisata; dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota.
b. Program Pemasaran Pariwisata, Program ini diarahkan pada Penguatan promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik dan media; Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwsata dan peningkatan kerjasama kemirataan pariwisata. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program Persentase Peningkatan Media Pemasaran Parawisata.
c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Program ini diarahkan pada Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual.

Pelaksanaan urusan pariwisata ditujukan untuk pelaksanaan Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional.

c. Urusan Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program ini diarahkan pada Penyediaan sarana pertanian, dengan indikator yaitu Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan indikator yaitu Cakupa Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B.
c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, serta fasilitasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, diarahkan pada kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak

Pelaksanaan urusan Pertanian ditujukan untuk pelaksanaan:

1. Meningkatnya produktivitas pertanian (khususnya peternakan hewan kecil)
2. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan.

d. Urusan Perdagangan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program ini diarahkan pada Peningkatan pelayanan pengurusan izin pedagang pasar, PKL, Tanda Daftar Gudang dan Surat Tanda Pendaftaran Wiralaba (STPW); Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi.
b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program ini diarahkan pada Peningkatan sarana distribusi perdagangan dan Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya.
c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program ini diarahkan pada Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
d. Program Pengembangan Ekspor Program ini diarahkan pada Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan.
e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Program ini diarahkan pada Peningkatan pengawasan dan pembinaan Metrologi Legal.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program ini diarahkan pada Peningkatan promosi dan pemasaran penggunaan produk dalam negeri; dan peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan.

Pelaksanaan urusan Perdagangan ditujukan untuk pelaksanaan:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi
2. Meningkatnya Keberdayaan dan Kepercayaan Konsumen
3. Meningkatnya Jaminan Mutu Komoditas Potensial Daerah
4. Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif
5. Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu, dan tempat
6. Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat
   Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan

e. Urusan Perindustrian

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program ini diarahkan pada Pembangunan sumberdaya dan sarana prasarana industri; dan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan industri. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri.
b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Program ini diarahkan pada Peningkatan pengendalian dan pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan.
c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Program ini diarahkan pada Penyediaan data dan informasi industri. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini.

Pelaksanaan urusan Perindustrian ditujukan untuk pelaksanaan:

1. Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
2. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB
3. Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas
4. Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas
5. Tercapainya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas

f. Urusan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program prioritas urusan energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, Program ini diarahkan untuk meningkatkan konsumsi tenaga listrik per kapita melalui kegiatan penerbitan rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan disertai pengawasan, pengendalian dan pembinaan, peningkatan keselamatan ketenagalistrikan, serta peningkatan kompetensi bagi tenaga teknis ketenagalistrikan. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk terwujudnya keandalan pasokan listrik, peningkatan peran energi listrik dalam perekonomian daerah, dan pemenuhan akses listrik terhadap masyarakat miskin.

Pelaksanaan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan untuk pelaksanaan:

1. Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik
2. Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan

4.1.4. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program ini diarahkan pada Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan; Peningkatan fasilitasi kegiatan social kemasyarakatan; Peningkatan komunikasi dan publikasi kegiatan KDH; dan penigkatan kerjasama daerah dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan pembangunan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah; 2) Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan; 3) Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Binjai dan Kepala Daerah; 4) Indeks Pelayanan Publik.
b. Program Perekonomian dan Pembangunan Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas manajemen Badan Usaha Milik Daeah dan BLUD; Peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan; dan Peningkatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah; 2) Tersedianya pranata

standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD; 3) Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa.

b. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota, program ini diarahkan pada kegiatan penunjang pelayanan umum kepegawaian dan keuangan, serta perencanaan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD.
b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, Program ini diarahkan pada upaya Peningkatan kapasitas tugas dan fungsi DPRD. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Jumlah Ranperda yang disetujui DPRD.

c. Urusan Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah; Peningkatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan peningkatan pengendalian evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD.
b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; 2) Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA; 3) Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan 4) Persentase Capaian Aksi HAM.

d. Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran penyusunan APBD; Peningkatan penatasusahaan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD; dan peningkatan kualitas pelaporan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD; 2) Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, 3) Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar, dan beberapa indikator lainnya.
b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Program ini diarahkan pada Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan Peningkatan pelaporan barang milik daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap, Persentase Tanah Milik Pemko Binjai yang Disertifikasi, Return on Asset (ROA) BUMD.
c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Program ini diarahkan pada Peningkatan optimalisasi penggalian potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah.

e. Kepegawaian

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program Kepegawaian Daerah, Program ini diarahkan pada Peningkatan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN); dan Peningkatan pengelolaan data dan informasi kepegawaian daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1. Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi , 2. Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya, 3. Persentase Pengembangaan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya, 4. Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik.

f. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program ini diarahkan pada Pengembangan kompetensi teknis ASN; dan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional ASN. Program ini dilaksanakan untuk mencapai

indikator kinerja program yaitu 1. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional, 2. Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan, 3. Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi, 4. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis.

g. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Program ini diarahkan pada Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, social dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan; dan pengembangan inovasi dan teknologi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan, Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah, Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah, dan Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah.
b. Program Riset dan Inovasi Daerah, Program ini menggunakan indikator kinerja Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan, Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah, Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah, dan Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah.

4.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Inspektorat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program ini diarahkan pada Peningkatan pengawasan internal dan peningkatan penyelesaian kasus-kasus pengaduan masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas perumusan kebijakan teknis bidang

pengawasan dan fasilitas pengawasan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Nilai Maturitas SPIP.

4.1.6. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program ini diarahkan pada Peningkatan efektifitas penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan berbasis teknologi informasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE).
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program ini diarahkan pada Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan Lembaga mayarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Program ini diarahkan pada Peningkatan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum.
d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program ini diarahkan pada Peningkatan pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

4.1.7. Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program ini diarahkan pada Peningkatan pemantapan pelaksanaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program ini diarahkan pada Peningkatan pemantapan pelaksanaan bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai-partai politik, pemilihan umum/pemilihan KDH serta pemantauan situasi politik di daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik.
c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program ini diarahkan pada Peningkatan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaa dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif.
d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Program ini diarahkan pada Peningkatan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan.
e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Program ini diarahkan pada Peningkatan pemantapan kewasdaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, dan penanganan konflik di daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan daerah yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan.

Tabel berikut menyajikan rangkuman program perangkat daerah berdasarkan urusan, perangkat daerah penanggung jawab, indikator outcome yang digunakan untuk mengukur keberhasilan, capaian awal (*baseline*) tahun 2024, serta target tahunan beserta pagu indikatif untuk periode 2026–2030. Penyajian ini dimaksudkan untuk memperlihatkan keterpaduan antara program, indikator, target, dan pembiayaan, sekaligus

menjadi instrumen akuntabilitas dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Binjai lima tahun ke depan.

Program pada tahun 2030 juga berperan sebagai bagian dari kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan dilaksanakan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai terpilih pada periode berikutnya. Rincian program perangkat daerah beserta pagu indikatifnya ditampilkan menurut urusan pada tabel 4.1. berikut:

Tabel 4. 1. Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					260.047.679.566,000		283.930.858.762,000		307.925.117.397,000		332.036.009.440,000		356.269.366.566,000	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					214.115.904.366,000		235.527.494.802,000		256.939.085.239,000		278.350.675.675,000		299.762.266.112,000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	100	100	100	214.115.904.366,000	100	235.527.494.802,000	100	256.939.085.239,000	100	278.350.675.675,000	100	299.762.266.112,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Kota Binjai
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					39.231.775.200,000		41.193.363.960,000		43.253.032.158,000		45.415.683.765,000		47.686.467.954,000	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	100	100	100	39.231.775.200,000	100	41.193.363.960,000	100	43.253.032.158,000	100	45.415.683.765,000	100	47.686.467.954,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Kota Binjai
	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)	100	79,86	79,88		79,90		79,92		79,94		79,96		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Kota Binjai
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					1.200.000.000,000		1.260.000.000,000		1.323.000.000,000		1.389.150.000,000		1.458.607.500,000	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100	99,02	99,04	1.200.000.000,000	99,06	1.260.000.000,000	99,08	1.323.000.000,000	99,1	1.389.150.000,000	99,12	1.458.607.500,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Kota Binjai
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					4.000.000.000,000		4.200.000.000,000		4.410.000.000,000		4.630.500.000,000		4.862.025.000,000	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	100	0,056	0,056	4.000.000.000,000	0,056	4.200.000.000,000	0,056	4.410.000.000,000	0,056	4.630.500.000,000	0,056	4.862.025.000,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	100	87,70	88,80		89,90		90,00		91,10		92,20		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Kota Binjai
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					500.000.000,000		550.000.000,000		600.000.000,000		650.000.000,000		700.000.000,000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	100	90,11	90,22	500.000.000,000	90,33	550.000.000,000	90,44	600.000.000,000	90,55	650.000.000,000	90,66	700.000.000,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Kota Binjai
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					1.000.000.000,000		1.200.000.000,000		1.400.000.000,000		1.600.000.000,000		1.800.000.000,000	
Telestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	100	70,52	70,54	1.000.000.000,000	70,56	1.200.000.000,000	70,58	1.400.000.000,000	70,60	1.600.000.000,000	70,02	1.800.000.000,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Kota Binjai
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					291.183.804.182,000		313.763.410.574,000		339.104.410.739,000		365.674.716.780,000		393.094.613.838,000	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					186.977.090.990,000		203.367.085.475,000		221.035.038.239,000		240.289.335.617,000		261.275.828.508,000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	77,61	78	78	93.359.730.708,000	79	100.387.989.165,000	80	107.758.032.298,000	81	115.684.629.082,000	81	124.210.651.319,000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan Kota Binjai
Meningkatnya layanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70	72	73	93.617.360.282,000	74	102.979.096.310,000	76	113.277.005.941,000	80	124.604.706.535,000	81	137.065.177.189,000	1.02.0.00.0.00.03.0000 - RSUD DR.RM. Djoelham Kota Binjai
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					98.910.878.904,000		104.112.240.782,000		111.252.791.370,000		117.987.849.121,000		123.787.242.644,000	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Kematian Ibu (Kasus)	1	3	3	61.313.331.779,000	2	62.754.938.944,000	2	65.759.759.349,000	2	67.945.513.898,000	1	68.740.673.898,000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	22,3	18,2	17,2		16,2		15,2		14,4		14		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan Kota Binjai
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	80	80	80	37.597.547.125,000	80	41.357.301.838,000	80	45.493.032.021,000	80	50.042.335.223,000	80	55.046.568.746,000	1.02.0.00.0.00.03.0000 - RSUD DR.RM. Djoelham Kota Binjai
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					3.988.000.000,000		4.882.400.000,000		5.313.520.000,000		5.784.896.000,000		6.300.410.800,000	
meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	85	90	90	1.088.000.000,000	95	1.142.400.000,000	95	1.199.520.000,000	100	1.259.496.000,000	100	1.322.470.800,000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan Kota Binjai
meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	0	80	80	2.900.000.000,000	80	3.740.000.000,000	82	4.114.000.000,000	84	4.525.400.000,000	85	4.977.940.000,000	1.02.0.00.0.00.03.0000 - RSUD DR.RM. Djoelham Kota Binjai
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					568.956.300,000		625.851.930,000		688.437.123,000		757.280.835,000		833.008.919,000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	95	95	95	568.956.300,000	95	625.851.930,000	95	688.437.123,000	95	757.280.835,000	95	833.008.919,000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					738.877.988,000		775.832.387,000		814.624.007,000		855.355.207,000		898.122.967,000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	40	45	738.877.988,000	55	775.832.387,000	60	814.624.007,000	65	855.355.207,000	70	898.122.967,000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					69.073.989.098,000		62.273.989.098,000		62.273.989.098,000		61.473.989.098,000		62.673.989.098,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.423.989.098,000		7.423.989.098,000		7.423.989.098,000		7.423.989.098,000		7.423.989.098,000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah	56,11		61	7.423.989.098,000	65	7.423.989.098,000	71	7.423.989.098,000	72	7.423.989.098,000	73	7.423.989.098,000	1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Binjai
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					12.000.000.000,000		12.000.000.000,000		12.000.000.000,000		12.000.000.000,000		12.000.000.000,000	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	45		78	12.000.000.000,000	80	12.000.000.000,000	83	12.000.000.000,000	85	12.000.000.000,000	90	12.000.000.000,000	1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Binjai
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					6.000.000.000,000		6.100.000.000,000		6.000.000.000,000		6.000.000.000,000		6.000.000.000,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	27		30	6.000.000.000,000	35	6.100.000.000,000	40	6.000.000.000,000	45	6.000.000.000,000	50	6.000.000.000,000	1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Binjai
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					500.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000	
meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional			5	500.000.000,000	10	500.000.000,000	15	500.000.000,000	20	500.000.000,000	25	500.000.000,000	1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Binjai
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					6.300.000.000,000		4.800.000.000,000		6.400.000.000,000		4.800.000.000,000		6.400.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air limbah Domestik Layak dan aman)	50		52	6.300.000.000,000	53	4.800.000.000,000	54	6.400.000.000,000	55	4.800.000.000,000	56	6.400.000.000,000	1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Binjai
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					5.000.000.000,000		5.100.000.000,000		5.000.000.000,000		5.100.000.000,000		5.000.000.000,000	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Drainase dalam kondisi baik	85		86	5.000.000.000,000	87	5.100.000.000,000	88	5.000.000.000,000	89	5.100.000.000,000	90	5.000.000.000,000	1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Binjai
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					3.500.000.000,000		3.500.000.000,000		3.500.000.000,000		3.500.000.000,000		3.500.000.000,000	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman					3.500.000.000,000		3.500.000.000,000		3.500.000.000,000		3.500.000.000,000		3.500.000.000,000	1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Binjai
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					14.500.000.000,000		9.000.000.000,000		7.600.000.000,000		8.300.000.000,000		8.000.000.000,000	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	90		92	14.500.000.000,000	93	9.000.000.000,000	94	7.600.000.000,000	95	8.300.000.000,000	96	8.000.000.000,000	1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Binjai
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					500.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000	
meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata					500.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000	1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Binjai
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					12.100.000.000,000		12.100.000.000,000		12.100.000.000,000		12.100.000.000,000		12.100.000.000,000	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang jalan dalam kondisi Baik	92		92,5	12.100.000.000,000	93	12.100.000.000,000	93,5	12.100.000.000,000	94	12.100.000.000,000	94,5	12.100.000.000,000	1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Binjai
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					500.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi pada pelaksanaan kegiatan			100	500.000.000,000	100	500.000.000,000	100	500.000.000,000	100	500.000.000,000	100	500.000.000,000	1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Binjai
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					750.000.000,000		750.000.000,000		750.000.000,000		750.000.000,000		750.000.000,000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	32,87		37,37	750.000.000,000	41,87	750.000.000,000	46,37	750.000.000,000	50,87	750.000.000,000	55,37	750.000.000,000	1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Binjai
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					41.638.116.723,000		41.815.852.723,000		42.089.214.163,000		42.350.814.061,000		42.597.877.954,000	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.008.116.723,000		29.185.852.723,000		29.459.214.163,000		29.720.814.061,000		29.967.877.954,000	
Meningkatnya layanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80	80	80	29.008.116.723,000	80	29.185.852.723,000	80	29.459.214.163,000	80	29.720.814.061,000	80	29.967.877.954,000	1.04.2.10.0.00.05.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					1.500.000.000,000		1.500.000.000,000		1.500.000.000,000		1.500.000.000,000		1.500.000.000,000	
Terpenuhinya rumah layak huni	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	0	0	12	1.500.000.000,000	15	1.500.000.000,000	18	1.500.000.000,000	20	1.500.000.000,000	25	1.500.000.000,000	1.04.2.10.0.00.05.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.000.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	32,58	33,10	33,62	1.000.000.000,000	34,15	1.000.000.000,000	34,68	1.000.000.000,000	35,20	1.000.000.000,000	35,73	1.000.000.000,000	1.04.2.10.0.00.05.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					10.130.000.000,000		10.130.000.000,000		10.130.000.000,000		10.130.000.000,000		10.130.000.000,000	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	29,04	29,59	30,11	10.130.000.000,000	30,65	10.130.000.000,000	31,17	10.130.000.000,000	31,75	10.130.000.000,000	32,31	10.130.000.000,000	1.04.2.10.0.00.05.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					58.690.406.019,000		24.207.436.621,000		25.742.370.284,000		27.389.885.312,000		29.060.515.242,000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.267.104.578,000		12.387.245.036,000		13.625.099.540,000		14.987.827.494,000		16.493.191.642,000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	61,41	62	65	5.542.902.289,000	67	6.091.622.518,000	69	6.699.914.770,000	71	7.370.124.247,000	75	8.113.718.071,000	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	66,06	67,06	68,06	5.724.202.289,000	69,06	6.295.622.518,000	70,06	6.925.184.770,000	71,06	7.617.703.247,000	72,06	8.379.473.571,000	1.05.0.00.0.00.07.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.518.901.441,000		2.770.791.585,000		3.047.870.744,000		3.352.657.818,000		3.687.923.600,000	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	100	897.351.784,000	100	987.086.962,000	100	1.085.795.659,000	100	1.194.375.225,000	100	1.313.812.747,000	1.05.0.00.0.00.07.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai
Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat					117.670.859,000		129.437.945,000		142.381.739,000		156.619.913,000		172.281.905,000	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.07.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai
Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan					1.093.378.798,000		1.202.716.678,000		1.322.988.346,000		1.455.287.180,000		1.600.815.898,000	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.07.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai
Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya					410.500.000,000		451.550.000,000		496.705.000,000		546.375.500,000		601.013.050,000	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.07.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					43.535.400.000,000		7.750.400.000,000		7.805.400.000,000		7.805.400.000,000		7.615.400.000,000	
meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	0	100	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	0	100	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	0	100	100	43.535.400.000,000	100	7.750.400.000,000	100	7.805.400.000,000	100	7.805.400.000,000	100	7.615.400.000,000	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.369.000.000,000		1.299.000.000,000		1.264.000.000,000		1.244.000.000,000		1.264.000.000,000	
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	0	100	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	0	100	100	1.369.000.000,000	100	1.299.000.000,000	100	1.264.000.000,000	100	1.244.000.000,000	100	1.264.000.000,000	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					9.982.235.101,000		11.079.393.003,000		13.061.972.281,000		14.531.420.892,000		16.366.775.392,000	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.319.235.101,000		4.546.593.003,000		5.326.892.281,000		5.879.832.892,000		6.286.528.592,000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	55,11	60	65	4.319.235.101,000	68	4.546.593.003,000	70	5.326.892.281,000	72	5.879.832.892,000	75	6.286.528.592,000	1.06.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Sosial Kota Binjai
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					2.738.000.000,000		2.952.800.000,000		3.233.080.000,000		3.570.388.000,000		3.937.426.800,000	
meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	-	65	68,5	2.738.000.000,000	71,4	2.952.800.000,000	82,2	3.233.080.000,000	89	3.570.388.000,000	91	3.937.426.800,000	1.06.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Sosial Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	-	80	80		85		90		95		100		1.06.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Sosial Kota Binjai
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					90.000.000,000		150.000.000,000		210.000.000,000		255.000.000,000		270.000.000,000	
meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (Orang)	0	0	10	90.000.000,000	15	150.000.000,000	20	210.000.000,000	25	255.000.000,000	30	270.000.000,000	1.06.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Sosial Kota Binjai
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	0	0	70		73		80		85		90		1.06.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Sosial Kota Binjai
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					505.000.000,000		520.000.000,000		535.000.000,000		545.000.000,000		560.000.000,000	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	0	60	60	505.000.000,000	60	520.000.000,000	65	535.000.000,000	70	545.000.000,000	75	560.000.000,000	1.06.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Sosial Kota Binjai
	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	80	80	80		80		80		80		80		1.06.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Sosial Kota Binjai
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	84	85	85		85		85		85		85		1.06.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Sosial Kota Binjai
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	80	85	85		85		85		85		85		1.06.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Sosial Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	84	84	85		85		85		85		85		1.06.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Sosial Kota Binjai
	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Poin)	0	60	60		65		65		70		75		1.06.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Sosial Kota Binjai
	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Poin)	0	85	85		85		85		85		85		1.06.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Sosial Kota Binjai
	Indeks Peranan Sosial (Poin)	0	85	65		70		75		80		85		1.06.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Sosial Kota Binjai
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					690.000.000,000		850.000.000,000		1.200.000.000,000		1.305.000.000,000		1.870.000.000,000	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	99	80	80	690.000.000,000	80	850.000.000,000	80	1.200.000.000,000	80	1.305.000.000,000	80	1.870.000.000,000	1.06.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Sosial Kota Binjai
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	99,03	99	99		99		99		100		100		1.06.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Sosial Kota Binjai
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelotaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	99.	99	99		99		99		100		100		1.06.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Sosial Kota Binjai
	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (%)	0	62	65		70		70		75		80		1.06.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Sosial Kota Binjai
	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi (%)	0	74	75		78		80		85		85		1.06.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Sosial Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase keluarga miskin dan rentan peneriman perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	0,4	1	1		1,2		1,5		1,8		2		1.06.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Sosial Kota Binjai
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.440.000.000,000		1.840.000.000,000		2.315.000.000,000		2.710.000.000,000		3.150.000.000,000	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	99,08	100	100	1.440.000.000,000	100	1.840.000.000,000	100	2.315.000.000,000	100	2.710.000.000,000	100	3.150.000.000,000	1.06.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Sosial Kota Binjai
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)	0	60	60		65		70		75		80		1.06.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Sosial Kota Binjai
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	0	60	60		65		70		75		80		1.06.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Sosial Kota Binjai
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					200.000.000,000		220.000.000,000		242.000.000,000		266.200.000,000		292.820.000,000	
Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	200.000.000,000	100	220.000.000,000	100	242.000.000,000	100	266.200.000,000	100	292.820.000,000	1.06.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Sosial Kota Binjai
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					9.448.200.000,000		9.519.200.000,000		9.640.800.000,000		10.544.500.000,000		10.737.000.000,000	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.179.020.000,000		7.157.020.000,000		7.200.620.000,000		8.027.320.000,000		8.144.820.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	63,66	64,41	65,53	7.179.020.000,000	67,68	7.157.020.000,000	68,73	7.200.620.000,000	69,74	8.027.320.000,000	70,28	8.144.820.000,000	2.07.3.31.3.30.09.0000 - Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					110.000.000,000		115.000.000,000		120.000.000,000		125.000.000,000		130.000.000,000	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	100	100	100	110.000.000,000	100	115.000.000,000	100	120.000.000,000	100	125.000.000,000	100	130.000.000,000	2.07.3.31.3.30.09.0000 - Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					462.000.000,000		484.000.000,000		502.000.000,000		520.000.000,000		539.000.000,000	
meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	-	1,50	1,57	462.000.000,000	1,67	484.000.000,000	1,78	502.000.000,000	1,84	520.000.000,000	1,95	539.000.000,000	2.07.3.31.3.30.09.0000 - Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					585.000.000,000		644.000.000,000		692.000.000,000		738.000.000,000		784.000.000,000	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	73,75	73,80	73,86	585.000.000,000	73,94	644.000.000,000	74,23	692.000.000,000	74,39	738.000.000,000	74,55	784.000.000,000	2.07.3.31.3.30.09.0000 - Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1.112.180.000,000		1.119.180.000,000		1.126.180.000,000		1.134.180.000,000		1.139.180.000,000	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	8.240	8.260	8.290	1.112.180.000,000	8.315	1.119.180.000,000	8.340	1.126.180.000,000	8.365	1.134.180.000,000	8.390	1.139.180.000,000	2.07.3.31.3.30.09.0000 - Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5.513.524.194,000		5.778.255.403,000		6.459.151.973,000		6.788.114.571,000		7.120.619.348,000	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.066.000.000,000		4.269.300.000,000		4.557.140.000,000		4.784.997.000,000		5.024.246.850,000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	64,16	70	70	4.066.000.000,000	70	4.269.300.000,000	71	4.557.140.000,000	71	4.784.997.000,000	72	5.024.246.850,000	2.08.2.13.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					28.000.000,000		29.400.000,000		30.870.000,000		32.413.500,000		34.034.175,000	
meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,299	0,295	0,291	28.000.000,000	0,288	29.400.000,000	0,285	30.870.000,000	0,282	32.413.500,000	0,280	34.034.175,000	2.08.2.13.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	0	49,30	49,40		49,50		49,60		49,70		49,80		2.08.2.13.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					547.300.000,000		574.665.000,000		926.903.250,000		973.248.411,000		1.021.910.531,000	
menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. ((%))	0,019	0,016	0,015	547.300.000,000	0,014	574.665.000,000	0,013	926.903.250,000	0,012	973.248.411,000	0,011	1.021.910.531,000	2.08.2.13.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					322.044.194,000		338.146.403,000		355.053.723,000		372.806.410,000		391.446.730,000	
meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	100	100	100	322.044.194,000	100	338.146.403,000	100	355.053.723,000	100	372.806.410,000	100	391.446.730,000	2.08.2.13.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					10.000.000,000		10.500.000,000		11.025.000,000		11.576.250,000		12.155.062,000	
meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	80	82	82	10.000.000,000	85	10.500.000,000	85	11.025.000,000	90	11.576.250,000	90	12.155.062,000	2.08.2.13.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					277.500.000,000		291.375.000,000		305.943.000,000		321.240.000,000		337.302.000,000	
terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	0	63,20	63,25	277.500.000,000	63,28	291.375.000,000	63,30	305.943.000,000	63,37	321.240.000,000	63,40	337.302.000,000	2.08.2.13.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					262.680.000,000		264.869.000,000		272.217.000,000		291.833.000,000		299.524.000,000	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100	262.680.000,000	100	264.869.000,000	100	272.217.000,000	100	291.833.000,000	100	299.524.000,000	2.08.2.13.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	0	67,62	67,65		67,67		67,69		67,70		67,71		2.08.2.13.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					17.816.000.000,000		17.921.000.000,000		18.231.000.000,000		19.140.000.000,000		19.345.000.000,000	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.100.000.000,000		9.200.000.000,000		9.300.000.000,000		9.400.000.000,000		9.500.000.000,000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	67,91	68	69	9.100.000.000,000	70	9.200.000.000,000	71	9.300.000.000,000	73	9.400.000.000,000	75	9.500.000.000,000	2.09.3.27.3.25.11.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.500.000.000,000		2.500.000.000,000	
meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	5	5	10	2.000.000.000,000	10	2.000.000.000,000	10	2.000.000.000,000	10	2.500.000.000,000	10	2.500.000.000,000	2.09.3.27.3.25.11.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					2.300.000.000,000		2.300.000.000,000		2.400.000.000,000		2.400.000.000,000		2.500.000.000,000	
meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	90,4	92,4	93,6	2.300.000.000,000	95,2	2.300.000.000,000	96,08	2.400.000.000,000	98,4	2.400.000.000,000	100	2.500.000.000,000	2.09.3.27.3.25.11.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					2.261.000.000,000		2.261.000.000,000		2.266.000.000,000		2.670.000.000,000		2.670.000.000,000	
meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	56,75	51,35	45,94	2.261.000.000,000	40,54	2.261.000.000,000	35,13	2.266.000.000,000	29,72	2.670.000.000,000	24,32	2.670.000.000,000	2.09.3.27.3.25.11.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					2.155.000.000,000		2.160.000.000,000		2.265.000.000,000		2.170.000.000,000		2.175.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	24	43,31	52,5	2.155.000.000,000	52,5	2.160.000.000,000	53,23	2.265.000.000,000	53,23	2.170.000.000,000	60	2.175.000.000,000	2.09.3.27.3.25.11.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					20.000.000.000,000		20.000.000.000,000		20.000.000.000,000		20.000.000.000,000		20.000.000.000,000	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					20.000.000.000,000		20.000.000.000,000		20.000.000.000,000		20.000.000.000,000		20.000.000.000,000	
meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	0	0	0	20.000.000.000,000	100	20.000.000.000,000	0	20.000.000.000,000	0	20.000.000.000,000	0	20.000.000.000,000	1.04.2.10.0.00.05.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					22.699.829.977,000		22.911.611.876,000		23.076.217.232,000		23.620.880.749,000		23.694.844.171,000	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.184.829.977,000		10.461.611.876,000		10.701.217.232,000		10.995.880.749,000		11.299.844.171,000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	66,71	70	73	10.184.829.977,000	75	10.461.611.876,000	77	10.701.217.232,000	79	10.995.880.749,000	81	11.299.844.171,000	2.11.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					190.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		300.000.000,000		70.000.000,000	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	-	66,66	0	190.000.000,000	0	50.000.000,000	0	50.000.000,000	33,33	300.000.000,000	0	70.000.000,000	2.11.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					425.000.000,000		425.000.000,000		425.000.000,000		425.000.000,000		425.000.000,000	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	53,33	82,89	83,09	425.000.000,000	83,29	425.000.000,000	83,49	425.000.000,000	83,69	425.000.000,000	83,89	425.000.000,000	2.11.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	88,51	80,82	81,02		81,22		81,42		81,62		81,82		2.11.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					2.500.000.000,000		2.500.000.000,000		2.500.000.000,000		2.500.000.000,000		2.500.000.000,000	
meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	14,25	15,25	16,25	2.500.000.000,000	17,25	2.500.000.000,000	18,25	2.500.000.000,000	19,25	2.500.000.000,000	20,25	2.500.000.000,000	2.11.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	22,4	46,99	47,06		47,13		47,2		47,27		47,34		2.11.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS (Persentase)	-	100	100		100		100		100		100		2.11.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000	
meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	-	45,45	63,64	50.000.000,000	72,73	50.000.000,000	81,82	50.000.000,000	90,91	50.000.000,000	100	50.000.000,000	2.11.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					310.000.000,000		310.000.000,000		310.000.000,000		310.000.000,000		310.000.000,000	
meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	-	100	100	310.000.000,000	100	310.000.000,000	100	310.000.000,000	100	310.000.000,000	100	310.000.000,000	2.11.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					110.000.000,000		110.000.000,000		110.000.000,000		110.000.000,000		110.000.000,000	
meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	-	100	100	110.000.000,000	100	110.000.000,000	100	110.000.000,000	100	110.000.000,000	100	110.000.000,000	2.11.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	-	1	2		3		5		7		10		2.11.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					70.000.000,000		70.000.000,000		70.000.000,000		70.000.000,000		70.000.000,000	
meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	-	100	100	70.000.000,000	100	70.000.000,000	100	70.000.000,000	100	70.000.000,000	100	70.000.000,000	2.11.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					60.000.000,000		60.000.000,000		60.000.000,000		60.000.000,000		60.000.000,000	
meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	-	100	100	60.000.000,000	100	60.000.000,000	100	60.000.000,000	100	60.000.000,000	100	60.000.000,000	2.11.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					8.800.000.000,000		8.875.000.000,000		8.800.000.000,000		8.800.000.000,000		8.800.000.000,000	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	-	30	30,5	8.800.000.000,000	31	8.875.000.000,000	31,5	8.800.000.000,000	32	8.800.000.000,000	32,5	8.800.000.000,000	2.11.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	-	60	65		70		75		80		85		2.11.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					6.860.251.990,000		7.466.797.890,000		7.840.137.783,000		8.232.144.671,000		8.643.751.903,000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.797.732.640,000		6.351.152.573,000		6.668.710.201,000		7.002.145.711,000		7.352.252.996,000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	97	100	100	5.797.732.640,000	100	6.351.152.573,000	100	6.668.710.201,000	100	7.002.145.711,000	100	7.352.252.996,000	2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					700.119.350,000		735.125.317,000		771.881.582,000		810.475.661,000		850.999.444,000	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	4,34	5	5,5	700.119.350,000	6,2	735.125.317,000	6,8	771.881.582,000	7,5	810.475.661,000	8,15	850.999.444,000	2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	58,75	69,25	75,20		80		85		85,5		90,5		2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
	Rate Nett Recent Migrasi (Nilai)	0,94	0,95	0,96		0,97		0,98		0,99		1		2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					226.100.000,000		237.405.000,000		249.275.250,000		261.739.012,000		274.825.962,000	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	99,87	99,88	99,89	226.100.000,000	99,90	237.405.000,000	99,91	249.275.250,000	99,92	261.739.012,000	99,93	274.825.962,000	2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	48,25	70,15	75,25		75,35		75,45		75,65		76		2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	78	85,85	85,85		86		86,05		86,15		86,20		2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	78,21	78,23	78,25		78,27		78.30.78		78,32		78,33		2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					103.500.000,000		108.675.000,000		114.108.750,000		119.814.187,000		125.804.896,000	
meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100	100	100	103.500.000,000	100	108.675.000,000	100	114.108.750,000	100	119.814.187,000	100	125.804.896,000	2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					32.800.000,000		34.440.000,000		36.162.000,000		37.970.100,000		39.868.605,000	
meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	1	1	1	32.800.000,000	1	34.440.000,000	1	36.162.000,000	1	37.970.100,000	1	39.868.605,000	2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					2.248.000.000,000		2.287.000.000,000		2.303.000.000,000		2.315.500.000,000		2.335.000.000,000	
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					2.248.000.000,000		2.287.000.000,000		2.303.000.000,000		2.315.500.000,000		2.335.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	90	92	95	2.248.000.000,000	98	2.287.000.000,000	98	2.303.000.000,000	98	2.315.500.000,000	100	2.335.000.000,000	2.08.2.13.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	0	15	20		21		25		27		30		2.08.2.13.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					13.604.627.340,000		15.049.177.140,000		16.130.461.697,000		16.716.572.306,000		17.758.670.214,000	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.648.329.111,000		8.348.329.111,000		8.548.329.111,000		8.489.329.111,000		9.048.329.111,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	61,56	65,00	68,00	7.648.329.111,000	70,00	8.348.329.111,000	73,00	8.548.329.111,000	75,00	8.489.329.111,000	78,00	9.048.329.111,000	2.14.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					1.065.285.429,000		1.565.285.429,000		2.065.285.429,000		2.565.285.429,000		2.765.285.429,000	
terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (Jiwa)	2,14	2,1	2,1	1.065.285.429,000	2,1	1.565.285.429,000	2,1	2.065.285.429,000	2,1	2.565.285.429,000	2,1	2.765.285.429,000	2.14.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	13.3-12.5	12.5-12	12-11.5		11.5-11		10.5-10		9.5-9		9-8.5		2.14.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					2.632.392.800,000		2.764.011.600,000		2.902.212.180,000		3.047.322.789,000		3.199.688.928,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	9,9	9	8,5	2.632.392.800,000	8	2.764.011.600,000	7,5	2.902.212.180,000	7	3.047.322.789,000	6,5	3.199.688.928,000	2.14.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	64,9	65,5	66		66,5		67		67,5		68		2.14.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					2.258.620.000,000		2.371.551.000,000		2.614.634.977,000		2.614.634.977,000		2.745.366.746,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	46,6	47	47,5	2.258.620.000,000	48	2.371.551.000,000	48,5	2.614.634.977,000	49	2.614.634.977,000	49,5	2.745.366.746,000	2.14.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					11.860.547.498,000		12.100.000.000,000		12.450.000.000,000		12.700.000.000,000		13.000.000.000,000	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.056.400.370,000		7.100.000.000,000		7.250.000.000,000		7.300.000.000,000		7.400.000.000,000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	61,01	63	65	7.056.400.370,000	67	7.100.000.000,000	69	7.250.000.000,000	71	7.300.000.000,000	73	7.400.000.000,000	2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan Kota Binjai
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					4.804.147.128,000		5.000.000.000,000		5.200.000.000,000		5.400.000.000,000		5.600.000.000,000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	363	365	365	4.804.147.128,000	365	5.000.000.000,000	365	5.200.000.000,000	366	5.400.000.000,000	367	5.600.000.000,000	2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan Kota Binjai
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	86,15	86,15	87		87,20		87,55		88		88,40		2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan Kota Binjai
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					8.976.565.680,000		11.094.978.816,000		12.785.184.579,200		15.584.672.495,040		18.335.803.094,050	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.040.964.000,000		5.199.156.800,000		5.739.788.160,000		7.162.745.792,000		8.265.294.950,000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,66	70,78	70,82	4.040.964.000,000	70,91	5.199.156.800,000	70,99	5.739.788.160,000	80,10	7.162.745.792,000	80,15	8.265.294.950,000	2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					2.231.190.680,000		2.677.428.816,000		3.212.914.579,200		3.855.497.495,040		4.626.596.994,050	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	-	-	70,45	2.231.190.680,000	72,25	2.677.428.816,000	75	3.212.914.579,200	80	3.855.497.495,040	83,24	4.626.596.994,050	2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.704.411.000,000		3.218.393.200,000		3.832.481.840,000		4.566.429.208,000		5.443.911.150,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3,12	3,14	1,8	2.704.411.000,000	1,8	3.218.393.200,000	1,9	3.832.481.840,000	1,9	4.566.429.208,000	2	5.443.911.150,000	2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					18.287.410.000,000		18.787.410.000,000		19.690.549.935,000		19.890.549.935,000		20.278.330.782,000	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.500.000.000,000		4.000.000.000,000		4.500.000.000,000		4.700.000.000,000		5.000.000.000,000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	66,91	66,92	66,93	3.500.000.000,000	66,94	4.000.000.000,000	66,95	4.500.000.000,000	66,96	4.700.000.000,000	66,97	5.000.000.000,000	2.17.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					351.384.000,000		351.384.000,000		365.439.360,000		365.439.360,000		365.439.360,000	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	10	15	15	351.384.000,000	15	351.384.000,000	15	365.439.360,000	15	365.439.360,000	15	365.439.360,000	2.17.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					6.515.245.000,000		6.515.245.000,000		6.775.854.800,000		6.775.854.800,000		6.775.854.800,000	
meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	52	60	65	6.515.245.000,000	67	6.515.245.000,000	71	6.775.854.800,000	73	6.775.854.800,000	75	6.775.854.800,000	2.17.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					1.266.446.500,000		1.266.446.500,000		1.317.104.360,000		1.317.104.360,000		1.317.104.360,000	
meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	72	72	75	1.266.446.500,000	75	1.266.446.500,000	78	1.317.104.360,000	78	1.317.104.360,000	80	1.317.104.360,000	2.17.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					878.460.000,000		878.460.000,000		896.029.200,000		896.029.200,000		922.910.076,000	
meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	58	58	60	878.460.000,000	62	878.460.000,000	62	896.029.200,000	65	896.029.200,000	68	922.910.076,000	2.17.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					248.897.000,000		248.897.000,000		253.874.940,000		253.874.940,000		258.952.439,000	
meningkatnya produktivitas koperasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	69	70	72	248.897.000,000	72	248.897.000,000	73	253.874.940,000	75	253.874.940,000	75	258.952.439,000	2.17.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					3.857.903.500,000		3.857.903.500,000		3.896.482.535,000		3.896.482.535,000		3.935.447.360,000	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	0,17	0,18	0,19	3.857.903.500,000	0,20	3.857.903.500,000	0,21	3.896.482.535,000	0,22	3.896.482.535,000	0,23	3.935.447.360,000	2.17.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai
	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	0,011	0,016	0,021		0,026		0,031		0,036		0,041		2.17.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					1.669.074.000,000		1.669.074.000,000		1.685.764.740,000		1.685.764.740,000		1.702.622.387,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0,016	0,021	0,026	1.669.074.000,000	0,031	1.669.074.000,000	0,036	1.685.764.740,000	0,041	1.685.764.740,000	0,046	1.702.622.387,000	2.17.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					10.565.093.249,000		7.269.977.767,000		8.020.143.893,000		8.790.612.496,000		9.680.821.559,000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.779.798.416,000		5.355.417.192,000		5.964.605.289,000		6.640.271.962,000		7.302.536.499,000	
Meningkatnya layanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	65,81	69,10	72,56	8.779.798.416,000	76,19	5.355.417.192,000	79,99	5.964.605.289,000	83,99	6.640.271.962,000	88,19	7.302.536.499,000	2.18.0.00.0.00.18.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					900.000.000,000		965.000.000,000		1.036.500.000,000		1.116.150.000,000		1.202.765.000,000	
meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	97	97	98	900.000.000,000	98	965.000.000,000	99	1.036.500.000,000	99	1.116.150.000,000	99	1.202.765.000,000	2.18.0.00.0.00.18.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					250.000.000,000		275.000.000,000		302.500.000,000		332.750.000,000		366.025.000,000	
meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	61,44	66,44	71,44	250.000.000,000	76,44	275.000.000,000	81,44	302.500.000,000	86,44	332.750.000,000	91,44	366.025.000,000	2.18.0.00.0.00.18.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					55.158.383,000		57.916.302,000		60.812.117,000		63.852.723,000		67.045.359,000	
meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	65,67	72,23	79,45	55.158.383,000	87,40	57.916.302,000	87,40	60.812.117,000	87,40	63.852.723,000	96,14	67.045.359,000	2.18.0.00.0.00.18.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN					430.136.450,000		451.644.273,000		474.226.487,000		437.937.811,000		522.834.701,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL														
terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	51,4	100	100	430.136.450,000	100	451.644.273,000	100	474.226.487,000	100	437.937.811,000	100	522.834.701,000	2.18.0.00.0.00.18.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					150.000.000,000		165.000.000,000		181.500.000,000		199.650.000,000		219.615.000,000	
meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	70	75	75	150.000.000,000	75	165.000.000,000	75	181.500.000,000	75	199.650.000,000	75	219.615.000,000	2.18.0.00.0.00.18.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					19.414.652.778,000		19.064.066.346,000		20.327.066.346,000		19.923.066.346,000		21.384.066.346,000	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.050.066.346,000		7.071.066.346,000		7.092.066.346,000		7.113.066.346,000		7.134.066.346,000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	95	97	97	7.050.066.346,000	98	7.071.066.346,000	99	7.092.066.346,000	99	7.113.066.346,000	100	7.134.066.346,000	2.19.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.149.586.432,000		1.193.000.000,000		1.245.000.000,000		1.295.000.000,000		1.350.000.000,000	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	10,66	10,66	10,66	1.149.586.432,000	10,66	1.193.000.000,000	10,66	1.245.000.000,000	10,66	1.295.000.000,000	10,66	1.350.000.000,000	2.19.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					10.215.000.000,000		9.650.000.000,000		10.790.000.000,000		10.165.000.000,000		11.500.000.000,000	
meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga (% Indeks)	22	22	22	10.215.000.000,000	22	9.650.000.000,000	22	10.790.000.000,000	22	10.165.000.000,000	22	11.500.000.000,000	2.19.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					1.000.000.000,000		1.150.000.000,000		1.200.000.000,000		1.350.000.000,000		1.400.000.000,000	
meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	10,66	10,66	10,66	1.000.000.000,000	10,66	1.150.000.000,000	10,66	1.200.000.000,000	10,66	1.350.000.000,000	10,66	1.400.000.000,000	2.19.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					232.958.500,000		279.550.200,000		335.460.240,000		402.552.288,000		483.062.745,600	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					232.958.500,000		279.550.200,000		335.460.240,000		402.552.288,000		483.062.745,600	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	-	1,85	2	232.958.500,000	2,25	279.550.200,000	2,4	335.460.240,000	2,5	402.552.288,000	2,6	483.062.745,600	2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					145.790.000,000		174.948.000,000		209.937.600,000		251.925.120,000		302.310.144,000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					145.790.000,000		174.948.000,000		209.937.600,000		251.925.120,000		302.310.144,000	
meningkatnya keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	-	-	1,6	145.790.000,000	1,8	174.948.000,000	2	209.937.600,000	2,3	251.925.120,000	2,6	302.310.144,000	2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					490.000.000,000		579.000.000,000		661.600.000,000		719.000.000,000		717.800.000,000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					420.000.000,000		462.000.000,000		506.800.000,000		602.000.000,000		607.800.000,000	
meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	-	0,16	0,16	420.000.000,000	0,17	462.000.000,000	0,17	506.800.000,000	0,17	602.000.000,000	0,18	607.800.000,000	3.26.2.22.0.00.21.0000 - Dinas Pariwisata Kota Binjai
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					70.000.000,000		72.000.000,000		54.800.000,000		97.000.000,000		60.000.000,000	
meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	77,27	77,27	77,27	70.000.000,000	77,27	72.000.000,000	77,27	54.800.000,000	80,30	97.000.000,000	80,30	60.000.000,000	3.26.2.22.0.00.21.0000 - Dinas Pariwisata Kota Binjai
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					0,000		25.000.000,000		0,000		0,000		0,000	
meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	-	0,0001	0,0001	0,000	0,0001	25.000.000,000	0,0001	0,000	0,0001	0,000	0,0001	0,000	3.26.2.22.0.00.21.0000 - Dinas Pariwisata Kota Binjai
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					0,000		20.000.000,000		100.000.000,000		20.000.000,000		50.000.000,000	
Meningkatnya warisan budaya yang di lestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	96,77	96,77	96,77	0,000	98,38	20.000.000,000	98,38	100.000.000,000	98,38	20.000.000,000	100	50.000.000,000	3.26.2.22.0.00.21.0000 - Dinas Pariwisata Kota Binjai
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	-	3	-		1		-		-		1		3.26.2.22.0.00.21.0000 - Dinas Pariwisata Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4.262.132.498,000		4.693.482.000,000		4.897.000.000,000		4.943.000.000,000		5.015.420.000,000	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.327.743.488,000		3.673.482.000,000		3.750.000.000,000		3.750.000.000,000		3.775.420.000,000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70	72	75	3.327.743.488,000	77	3.673.482.000,000	79	3.750.000.000,000	81	3.750.000.000,000	82	3.775.420.000,000	2.23.2.24.0.00.20.0000 - Dinas Perpustakaan Kota Binjai
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					902.000.000,000		985.000.000,000		1.110.000.000,000		1.155.000.000,000		1.200.000.000,000	
meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	88,98	88,98	88,98	902.000.000,000	88,98	985.000.000,000	88,98	1.110.000.000,000	88,98	1.155.000.000,000	88,98	1.200.000.000,000	2.23.2.24.0.00.20.0000 - Dinas Perpustakaan Kota Binjai
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					32.389.010,000		35.000.000,000		37.000.000,000		38.000.000,000		40.000.000,000	
meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	10	10	32.389.010,000	10	35.000.000,000	10	37.000.000,000	10	38.000.000,000	10	40.000.000,000	2.23.2.24.0.00.20.0000 - Dinas Perpustakaan Kota Binjai
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					215.000.000,000		230.500.000,000		247.500.000,000		253.500.000,000		257.500.000,000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					172.000.000,000		183.500.000,000		198.500.000,000		198.500.000,000		198.500.000,000	
meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	0	50	50	172.000.000,000	50	183.500.000,000	50	198.500.000,000	50	198.500.000,000	50	198.500.000,000	2.23.2.24.0.00.20.0000 - Dinas Perpustakaan Kota Binjai
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					33.000.000,000		37.000.000,000		37.000.000,000		40.000.000,000		42.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	0	20	20	33.000.000,000	20	37.000.000,000	20	37.000.000,000	20	40.000.000,000	20	42.000.000,000	2.23.2.24.0.00.20.0000 - Dinas Perpustakaan Kota Binjai
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					10.000.000,000		10.000.000,000		12.000.000,000		15.000.000,000		17.000.000,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	0	5	5	10.000.000,000	5	10.000.000,000	5	12.000.000,000	5	15.000.000,000	5	17.000.000,000	2.23.2.24.0.00.20.0000 - Dinas Perpustakaan Kota Binjai
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					2.895.000.000,000		3.010.000.000,000		3.125.000.000,000		3.240.000.000,000		3.255.000.000,000	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.415.000.000,000		1.520.000.000,000		1.625.000.000,000		1.730.000.000,000		1.735.000.000,000	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.800	3.900	4.000	1.415.000.000,000	4.050	1.520.000.000,000	4.100	1.625.000.000,000	4.150	1.730.000.000,000	4.200	1.735.000.000,000	2.09.3.27.3.25.11.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					1.480.000.000,000		1.490.000.000,000		1.500.000.000,000		1.510.000.000,000		1.520.000.000,000	
meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	29,4	28,4	27,5	1.480.000.000,000	26,5	1.490.000.000,000	25,6	1.500.000.000,000	24,7	1.510.000.000,000	23,7	1.520.000.000,000	2.09.3.27.3.25.11.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					5.546.500.000,000		4.681.350.000,000		4.433.350.000,000		4.555.360.000,000		4.599.200.000,000	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.566.500.000,000		3.977.550.000,000		3.780.550.000,000		3.830.600.000,000		3.920.600.000,000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	65,96	65,97	65,98	3.566.500.000,000	65,99	3.977.550.000,000	66,00	3.780.550.000,000	66,10	3.830.600.000,000	66,15	3.920.600.000,000	3.26.2.22.0.00.21.0000 - Dinas Pariwisata Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.070.000.000,000		182.800.000,000		180.000.000,000		196.760.000,000		193.800.000,000	
meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	4,55	4,56	4,57	1.070.000.000,000	4,58	182.800.000,000	4,59	180.000.000,000	4,60	196.760.000,000	4,61	193.800.000,000	3.26.2.22.0.00.21.0000 - Dinas Pariwisata Kota Binjai
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					730.000.000,000		234.000.000,000		288.000.000,000		241.000.000,000		295.000.000,000	
meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	75	14,28	5	730.000.000,000	5,5	234.000.000,000	6,5	288.000.000,000	6,8	241.000.000,000	7	295.000.000,000	3.26.2.22.0.00.21.0000 - Dinas Pariwisata Kota Binjai
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					130.000.000,000		137.000.000,000		134.800.000,000		137.000.000,000		139.800.000,000	
meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	1	2	130.000.000,000	3	137.000.000,000	5	134.800.000,000	7	137.000.000,000	9	139.800.000,000	3.26.2.22.0.00.21.0000 - Dinas Pariwisata Kota Binjai
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					50.000.000,000		150.000.000,000		50.000.000,000		150.000.000,000		50.000.000,000	
meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	1,15	1,18	1,2	50.000.000,000	1,25	150.000.000,000	1,3	50.000.000,000	1,35	150.000.000,000	1,4	50.000.000,000	3.26.2.22.0.00.21.0000 - Dinas Pariwisata Kota Binjai
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					8.192.000.000,000		8.337.000.000,000		8.527.000.000,000		8.687.000.000,000		8.857.000.000,000	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.025.000.000,000		1.090.000.000,000		1.175.000.000,000		1.240.000.000,000		1.305.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	5,92	6,2	6,2	1.025.000.000,000	6,2	1.090.000.000,000	6,2	1.175.000.000,000	6,2	1.240.000.000,000	6,2	1.305.000.000,000	2.09.3.27.3.25.11.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	0,98	1,9	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2.09.3.27.3.25.11.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	0,96	1,92	2,1		2,2		2,3		2,4		2,5		2.09.3.27.3.25.11.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					1.072.000.000,000		1.092.000.000,000		1.112.000.000,000		1.132.000.000,000		1.152.000.000,000	
meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	-	-	90,1	1.072.000.000,000	90,25	1.092.000.000,000	90,45	1.112.000.000,000	90,8	1.132.000.000,000	91,2	1.152.000.000,000	2.09.3.27.3.25.11.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					2.480.000.000,000		2.525.000.000,000		2.590.000.000,000		2.650.000.000,000		2.720.000.000,000	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	0	0	50	2.480.000.000,000	50	2.525.000.000,000	70	2.590.000.000,000	80	2.650.000.000,000	100	2.720.000.000,000	2.09.3.27.3.25.11.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	90	90	90		90		90		90		90		2.09.3.27.3.25.11.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					1.050.000.000,000		1.050.000.000,000		1.050.000.000,000		1.050.000.000,000		1.050.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	0	0	90	1.050.000.000,000	90	1.050.000.000,000	90	1.050.000.000,000	90	1.050.000.000,000	90	1.050.000.000,000	2.09.3.27.3.25.11.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	0	0	90		90		90		90		90		2.09.3.27.3.25.11.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					1.115.000.000,000		1.125.000.000,000		1.140.000.000,000		1.150.000.000,000		1.160.000.000,000	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	90	90	90	1.115.000.000,000	90	1.125.000.000,000	90	1.140.000.000,000	90	1.150.000.000,000	90	1.160.000.000,000	2.09.3.27.3.25.11.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.450.000.000,000		1.455.000.000,000		1.460.000.000,000		1.465.000.000,000		1.470.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100	100	100	1.450.000.000,000	100	1.455.000.000,000	100	1.460.000.000,000	100	1.465.000.000,000	100	1.470.000.000,000	2.09.3.27.3.25.11.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	0	50	55		60		65		70		75		2.09.3.27.3.25.11.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					2.368.500.000,000		2.482.600.000,000		2.575.200.000,000		2.673.800.000,000		2.770.000.000,000	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					18.000.000,000		20.600.000,000		22.500.000,000		24.300.000,000		27.000.000,000	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	100	18.000.000,000	100	20.600.000,000	100	22.500.000,000	100	24.300.000,000	100	27.000.000,000	2.07.3.31.3.30.09.0000 - Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					1.808.500.000,000		1.868.000.000,000		1.927.000.000,000		1.987.500.000,000		2.048.000.000,000	
meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	10	10	10	1.808.500.000,000	10	1.868.000.000,000	10	1.927.000.000,000	10	1.987.500.000,000	10	2.048.000.000,000	2.07.3.31.3.30.09.0000 - Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					79.000.000,000		82.000.000,000		85.700.000,000		90.000.000,000		94.000.000,000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	6,68	6,55	6,55	79.000.000,000	6,47	82.000.000,000	6,42	85.700.000,000	6,38	90.000.000,000	6,33	94.000.000,000	2.07.3.31.3.30.09.0000 - Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					50.000.000,000		60.000.000,000		65.000.000,000		70.000.000,000		75.000.000,000	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	-	145	150	50.000.000,000	160	60.000.000,000	170	65.000.000,000	180	70.000.000,000	190	75.000.000,000	2.07.3.31.3.30.09.0000 - Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					293.000.000,000		323.000.000,000		345.000.000,000		371.000.000,000		391.000.000,000	
meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	-	40	50	293.000.000,000	60	323.000.000,000	70	345.000.000,000	85	371.000.000,000	100	391.000.000,000	2.07.3.31.3.30.09.0000 - Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					120.000.000,000		129.000.000,000		130.000.000,000		131.000.000,000		135.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	120.000.000,000	100	129.000.000,000	100	130.000.000,000	100	131.000.000,000	100	135.000.000,000	2.07.3.31.3.30.09.0000 - Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					620.000.000,000		792.000.000,000		822.000.000,000		842.000.000,000		858.000.000,000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					545.000.000,000		705.000.000,000		732.000.000,000		750.000.000,000		761.000.000,000	
meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	-	6	7	545.000.000,000	7,2	705.000.000,000	7,3	732.000.000,000	7,4	750.000.000,000	7,5	761.000.000,000	2.07.3.31.3.30.09.0000 - Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					5.000.000,000		16.000.000,000		17.000.000,000		18.000.000,000		19.000.000,000	
meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	5.000.000,000	100	16.000.000,000	100	17.000.000,000	100	18.000.000,000	100	19.000.000,000	2.07.3.31.3.30.09.0000 - Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					70.000.000,000		71.000.000,000		73.000.000,000		74.000.000,000		78.000.000,000	
meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	12,31	15,00	18,57	70.000.000,000	22,5	71.000.000,000	22,55	73.000.000,000	28	74.000.000,000	30	78.000.000,000	2.07.3.31.3.30.09.0000 - Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					73.673.921.156,000		80.292.273.959,000		87.337.821.980,000		94.668.397.883,000		102.627.202.751,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					60.847.546.645,000		66.800.321.964,000		73.108.899.254,000		80.123.101.492,000		87.824.188.777,000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73,56	75	76	748.438.000,000	77	836.038.000,000	78	815.338.000,000	79	825.294.000,000	80	825.294.000,000	4.01.0.00.0.00.22.0006 - Bagian Organisasi Setda Kota Binjai
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran					567.782.653,000		621.037.166,000		642.905.197,000		659.418.325,000		676.706.971,000	4.01.0.00.0.00.22.0002 - Bagian Hukum Setda Kota Binjai
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran					3.686.005.118,000		4.054.605.629,000		4.460.066.192,000		4.906.072.811,000		5.396.680.093,000	4.01.0.00.0.00.22.0010 - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Setda Kota Binjai
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73,56	75	76	613.376.615,000	77	674.714.277,000	78	742.185.705,000	79	816.404.276,000	80	897.944.700,000	4.01.0.00.0.00.22.0007 - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Binjai
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73,56	75	76	52.851.997.143,000	77	58.060.378.263,000	78	63.789.597.494,000	79	70.091.738.648,000	80	77.024.093.916,000	4.01.0.00.0.00.22.0001 - Bagian Umum Setda Kota Binjai
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73,56	75	76	864.734.653,000	77	951.908.119,000	78	1.047.798.930,000	79	1.152.478.824,000	80	1.266.516.706,000	4.01.0.00.0.00.22.0009 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Binjai
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73,56	75	76	632.638.821,000	77	691.638.471,000	78	672.798.518,000	79	707.074.569,000	80	744.778.226,000	4.01.0.00.0.00.22.0003 - Bagian Pemerintahan Setda Kota Binjai
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73,56	75	76	588.481.857,000	77	604.146.582,000	78	620.119.543,000	79	633.806.777,000	80	648.178.373,000	4.01.0.00.0.00.22.0008 - Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Binjai
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran					294.091.785,000		305.855.457,000		318.089.675,000		330.813.262,000		343.995.792,000	4.01.0.00.0.00.22.0005 - Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Binjai
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					11.353.043.920,000		11.937.242.247,000		12.585.254.062,000		12.734.353.400,000		12.885.672.926,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	83	100	100	9.937.557.706,000	100	10.434.435.591,000	100	10.956.157.371,000	100	10.956.157.371,000	100	10.956.157.371,000	4.01.0.00.0.00.22.0008 - Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Binjai
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan					533.462.992,000		532.581.112,000		561.848.592,000		604.223.121,000		638.145.356,000	4.01.0.00.0.00.22.0002 - Bagian Hukum Setda Kota Binjai
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	0	2,7767	2,7815	882.023.222,000	2,7905	970.225.544,000	2,8105	1.067.248.099,000	2,8217	1.173.972.908,000	2,8267	1.291.370.199,000	4.01.0.00.0.00.22.0003 - Bagian Pemerintahan Setda Kota Binjai
	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	70	70	75		75		80		80		80		4.01.0.00.0.00.22.0003 - Bagian Pemerintahan Setda Kota Binjai
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.473.330.591,000		1.554.709.748,000		1.643.668.664,000		1.810.942.991,000		1.917.341.048,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	35,56	35,56	40	520.000.000,000	40	520.000.000,000	40	520.000.000,000	40	590.000.000,000	40	590.000.000,000	4.01.0.00.0.00.22.0009 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Binjai
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan					232.565.018,000		241.867.619,000		251.542.323,000		261.604.016,000		272.068.177,000	4.01.0.00.0.00.22.0005 - Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Binjai
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	80	100	100	720.765.573,000	100	792.842.129,000	100	872.126.341,000	100	959.338.975,000	100	1.055.272.871,000	4.01.0.00.0.00.22.0007 - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Binjai
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					57.244.000.000,000		57.339.000.000,000		57.714.000.000,000		57.863.000.000,000		57.932.000.000,000	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.994.000.000,000		28.089.000.000,000		28.464.000.000,000		28.613.000.000,000		28.682.000.000,000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	64,61	65,50	67,50	27.994.000.000,000	68,50	28.089.000.000,000	69,50	28.464.000.000,000	70,50	28.613.000.000,000	80,00	28.682.000.000,000	4.02.0.00.0.00.23.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					29.250.000.000,000		29.250.000.000,000		29.250.000.000,000		29.250.000.000,000		29.250.000.000,000	
Meningkatnya kualitas persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	26.485.000.000,000	100	26.485.000.000,000	100	26.485.000.000,000	100	26.485.000.000,000	100	26.485.000.000,000	4.02.0.00.0.00.23.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	50	100	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.23.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	2.765.000.000,000	100	2.765.000.000,000	100	2.765.000.000,000	100	2.765.000.000,000	100	2.765.000.000,000	4.02.0.00.0.00.23.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai
5.01 - PERENCANAAN					15.825.023.186,000		16.485.274.346,000		17.192.621.387,000		17.977.752.457,000		18.778.640.080,000	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.203.131.730,000		10.713.288.317,000		11.241.886.057,000		11.803.980.360,000		12.394.179.378,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	0	2,7767	2,7815	10.203.131.730,000	2,7905	10.713.288.317,000	2,8105	11.241.886.057,000	2,8217	11.803.980.360,000	2,8267	12.394.179.378,000	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					2.786.891.456,000		2.914.986.029,000		3.060.735.330,000		3.213.772.097,000		3.374.460.702,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	95,1	95,90	96	2.786.891.456,000	96,20	2.914.986.029,000	96,80	3.060.735.330,000	97	3.213.772.097,000	97,20	3.374.460.702,000	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					2.835.000.000,000		2.857.000.000,000		2.890.000.000,000		2.960.000.000,000		3.010.000.000,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	95,29	95,80	96	850.000.000,000	96,20	850.000.000,000	96,80	850.000.000,000	97	865.000.000,000	97,20	900.000.000,000	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai
	Persentase Capaian Aksi HAM (%)	0	70,00	71,25		72,50		73,75		75,00		76,25		5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	95,29	95,80	96	650.000.000,000	96,20	650.000.000,000	96,80	650.000.000,000	97	650.000.000,000	97,20	650.000.000,000	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	95,29	95,8	96	1.335.000.000,000	96,20	1.357.000.000,000	96,80	1.390.000.000,000	97	1.445.000.000,000	97,20	1.460.000.000,000	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai
5.02 - KEUANGAN					50.300.000.000,000		52.395.000.000,000		55.165.000.000,000		57.327.500.000,000		60.240.000.000,000	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.300.000.000,000		17.745.000.000,000		18.865.000.000,000		19.377.500.000,000		20.640.000.000,000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	71,41	80	80	17.300.000.000,000	80	17.745.000.000,000	90	18.865.000.000,000	90	19.377.500.000,000	100	20.640.000.000,000	5.02.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					25.700.000.000,000		26.985.000.000,000		28.270.000.000,000		29.555.000.000,000		30.840.000.000,000	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	42,90	40,00	35,00	22.350.000.000,000	30,00	23.467.500.000,000	30,00	24.585.000.000,000	30,00	25.702.500.000,000	30,00	26.820.000.000,000	5.02.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	11,57	26,75	35		40		40		40		40		5.02.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	89,9	100	100	1.650.000.000,000	100	1.732.500.000,000	100	1.815.000.000,000	100	1.897.500.000,000	100	1.980.000.000,000	5.02.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	-.169,38	1,10	1,00		0,90		0,80		0,70		0,60		5.02.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	1.700.000.000,000	100	1.785.000.000,000	100	1.870.000.000,000	100	1.955.000.000,000	100	2.040.000.000,000	5.02.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					900.000.000,000		945.000.000,000		990.000.000,000		1.035.000.000,000		1.080.000.000,000	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	-2,16	-1,75	-1,50	900.000.000,000	-0,50	945.000.000,000	0,50	990.000.000,000	1,00	1.035.000.000,000	2,00	1.080.000.000,000	5.02.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					6.400.000.000,000		6.720.000.000,000		7.040.000.000,000		7.360.000.000,000		7.680.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	12,14	12,25	12,50	6.200.000.000,000	13,00	6.510.000.000,000	13,50	6.820.000.000,000	14,00	7.130.000.000,000	14,50	7.440.000.000,000	5.02.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	99,96	100	100	100.000.000,000	100	105.000.000,000	100	110.000.000,000	100	115.000.000,000	100	120.000.000,000	5.02.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai
meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100	100	100	100.000.000,000	100	105.000.000,000	100	110.000.000,000	100	115.000.000,000	100	120.000.000,000	5.02.0.00.0.00.25.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai
5.03 - KEPEGAWAIAN					9.120.415.026,000		10.648.039.528,000		11.642.543.480,000		12.442.872.829,000		13.726.960.112,000	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.883.860.969,000		8.069.247.066,000		8.548.171.772,000		9.152.488.950,000		10.079.737.845,000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73,20	74	75	6.883.860.969,000	76	8.069.247.066,000	77	8.548.171.772,000	78	9.152.488.950,000	79	10.079.737.845,000	5.03.5.04.0.00.26.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					2.236.554.057,000		2.578.792.462,000		3.094.371.708,000		3.290.383.879,000		3.647.222.267,000	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	77,03	87	87	1.474.176.345,000	87	1.621.593.977,000	87	1.783.753.375,000	87	1.962.128.712,000	87	2.158.341.583,000	5.03.5.04.0.00.26.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	16,10	17	17	266.381.127,000	18	411.622.234,000	18	710.672.468,000	19	668.414.716,000	19	763.156.188,000	5.03.5.04.0.00.26.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	91	93	94	347.095.578,000	95	381.885.145,000	96	419.985.647,000	96	461.984.212,000	100	508.182.633,000	5.03.5.04.0.00.26.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	13,08	14	15	148.901.007,000	16	163.691.106,000	17	179.960.218,000	18	197.856.239,000	19	217.541.863,000	5.03.5.04.0.00.26.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					2.182.315.000,000		2.061.746.500,000		2.245.921.150,000		2.448.513.265,000		2.959.364.591,000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					2.182.315.000,000		2.061.746.500,000		2.245.921.150,000		2.448.513.265,000		2.959.364.591,000	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	22,04	23	23	1.672.315.000,000	23	1.436.746.500,000	23	1.565.921.150,000	23	1.708.013.265,000	23	2.152.314.591,000	5.03.5.04.0.00.26.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	25	25	25	2.000.000,000	25	32.200.000,000	25	32.420.000,000	25	32.662.000,000	25	32.928.200,000	5.03.5.04.0.00.26.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	5,07	6	6	10.000.000,000	6	45.000.000,000	6	45.000.000,000	6	45.000.000,000	6	45.000.000,000	5.03.5.04.0.00.26.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	5,01	6	6	498.000.000,000	6	547.800.000,000	6	602.580.000,000	6	662.838.000,000	6	729.121.800,000	5.03.5.04.0.00.26.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					8.470.000.000,000		8.965.000.000,000		9.110.000.000,000		9.440.000.000,000		9.393.000.000,000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					5.000.000.000,000		5.350.000.000,000		5.450.000.000,000		5.750.000.000,000		5.650.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	21	50	50	750.000.000,000	55	800.000.000,000	57	1.100.000.000,000	60	1.200.000.000,000	65	1.100.000.000,000	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	55	60	65	900.000.000,000	70	900.000.000,000	75	900.000.000,000	80	900.000.000,000	85	900.000.000,000	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai
meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	80	90	95	1.150.000.000,000	95	1.150.000.000,000	97	1.150.000.000,000	98	1.150.000.000,000	100	1.150.000.000,000	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	60	65	2.200.000.000,000	70	2.500.000.000,000	75	2.300.000.000,000	80	2.500.000.000,000	85	2.500.000.000,000	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					3.470.000.000,000		3.615.000.000,000		3.660.000.000,000		3.690.000.000,000		3.743.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	50	60	1.400.000.000,000	65	1.545.000.000,000	70	1.590.000.000,000	75	1.620.000.000,000	80	1.673.000.000,000	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	0	50	60	520.000.000,000	65	520.000.000,000	70	520.000.000,000	75	520.000.000,000	80	520.000.000,000	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	50	60	350.000.000,000	65	350.000.000,000	70	350.000.000,000	75	350.000.000,000	80	350.000.000,000	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	80	90	95	1.200.000.000,000	95	1.200.000.000,000	97	1.200.000.000,000	98	1.200.000.000,000	100	1.200.000.000,000	5.01.5.05.0.00.24.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					16.685.184.139,000		17.352.591.505,000		18.046.695.166,000		18.768.562.972,000		19.519.305.491,000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.899.277.933,000		15.495.249.051,000		16.115.059.013,000		16.759.661.373,000		17.430.047.828,000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	71,91	71,91	71,91	14.899.277.933,000	71,95	15.495.249.051,000	71,95	16.115.059.013,000	72,00	16.759.661.373,000	72,00	17.430.047.828,000	6.01.6.01.6.01.27.0000 - Inspektorat Kota Binjai
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.187.323.991,000		1.234.816.951,000		1.284.209.629,000		1.335.578.014,000		1.389.001.135,000	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	74,92	78	80	1.187.323.991,000	81	1.234.816.951,000	82	1.284.209.629,000	83	1.335.578.014,000	84	1.389.001.135,000	6.01.6.01.6.01.27.0000 - Inspektorat Kota Binjai
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					598.582.215,000		622.525.503,000		647.426.524,000		673.323.585,000		700.256.528,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3,048	3,05	3,06	598.582.215,000	3,07	622.525.503,000	3,08	647.426.524,000	3,09	673.323.585,000	3,1	700.256.528,000	6.01.6.01.6.01.27.0000 - Inspektorat Kota Binjai
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3,00	3,02	3,04		3,06		3,08		3,10		3,12		6.01.6.01.6.01.27.0000 - Inspektorat Kota Binjai
7.01 - KECAMATAN					60.825.963.671,000		64.089.893.527,000		67.703.225.800,000		71.711.332.212,000		76.168.727.226,000	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					50.227.144.852,000		52.481.497.144,000		54.953.607.893,000		57.673.445.464,000		60.675.412.436,000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	60	65	65	8.301.105.796,000	65	8.469.127.912,000	70	8.640.510.471,000	75	8.815.320.680,000	80	8.993.627.094,000	7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran					7.387.937.916,000		7.535.696.674,000		7.686.410.608,000		7.840.138.810,000		7.996.941.596,000	7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	61,01	63	65	9.200.000.000,000	66	9.430.000.000,000	67	9.665.750.000,000	68	9.907.393.750,000	69	10.155.078.594,000	7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	57,96	59	60	8.401.105.796,000	62	8.569.127.912,000	65	8.740.510.471,000	68	8.915.320.680,000	70	9.093.627.094,000	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	62,75	63,50	64,50	7.736.995.344,000	65,50	9.047.544.646,000	66,50	10.554.676.343,000	68,50	12.287.877.794,000	70	14.281.059.464,000	7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	69,51	70,00	70,50	9.200.000.000,000	71,00	9.430.000.000,000	71,50	9.665.750.000,000	72,00	9.907.393.750,000	72,50	10.155.078.594,000	7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.133.358.651,000		1.313.811.464,000		1.520.879.649,000		1.758.532.885,000		2.031.335.172,000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Kesesuaian Layanan dengan SOP (Persentase)	60	60	60	115.000.000,000	60	132.250.000,000	70	152.087.500,000	75	174.900.625,000	80	201.135.719,000	7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	0	80	80	10.509.851,000	82	11.035.344,000	85	11.587.111,000	87	12.166.466,000	90	12.774.790,000	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai
														7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	0	80	80	100.000.000,000	82	115.000.000,000	85	132.250.000,000	87	152.087.500,000	90	174.900.625,000	7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	0	80	80	80.000.000,000	82	84.000.000,000	85	88.200.000,000	87	92.610.000,000	90	97.240.500,000	7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	80	80	80	827.848.800,000	82	971.526.120,000	85	1.136.755.038,000	87	1.326.768.294,000	90	1.545.283.538,000	7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					9.094.359.258,000		9.889.971.906,000		10.784.749.387,000		11.792.557.577,000		12.929.291.785,000	
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	60	60	60	1.886.000.000,000	60	2.168.900.000,000	70	2.494.235.000,000	75	2.868.370.250,000	80	3.298.625.788,000	7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	70	70	1.865.412.414,000	73	1.958.683.035,000	75	2.056.617.186,000	77	2.159.448.046,000	80	2.267.420.448,000	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	70	70	1.900.000.000,000	73	2.185.000.000,000	75	2.512.750.000,000	77	2.889.662.500,000	80	3.323.111.875,000	7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	70	70	2.170.000.000,000	73	2.278.500.000,000	75	2.392.425.000,000	77	2.512.046.250,000	80	2.637.648.563,000	7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat					1.272.946.844,000		1.298.888.871,000		1.328.722.201,000		1.363.030.531,000		1.402.485.111,000	7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai
	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	70	70	70		73		75		77		80		7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					242.303.910,000		268.880.073,000		299.277.272,000		334.062.355,000		373.886.920,000	
Mewujudkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	60	60	60	92.000.000,000	60	105.800.000,000	70	121.670.000,000	75	139.920.500,000	80	160.908.575,000	7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai
Mewujudkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	100	25.149.410,000	100	25.652.398,000	100	26.165.446,000	100	26.688.755,000	100	27.222.530,000	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai
Mewujudkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	100	65.000.000,000	100	74.750.000,000	100	85.962.500,000	100	98.856.875,000	100	113.685.406,000	7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai
Mewujudkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	100	20.000.000,000	100	21.000.000,000	100	22.050.000,000	100	23.152.500,000	100	24.310.125,000	7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai
Mewujudkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat					40.154.500,000		41.677.675,000		43.429.326,000		45.443.725,000		47.760.284,000	7.01.0.00.0.00.31.0000 - Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai
	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.32.0000 - Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					128.797.000,000		135.732.940,000		144.711.599,000		152.733.931,000		158.800.913,000	
-					40.000.000,000		45.000.000,000		52.000.000,000		58.000.000,000		62.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	100	25.000.000,000	100	25.500.000,000	100	26.010.000,000	100	26.530.200,000	100	27.060.804,000	7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai
-					32.000.000,000		32.800.000,000		33.620.000,000		34.460.500,000		35.322.013,000	7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai
-	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	100	31.797.000,000	100	32.432.940,000	100	33.081.599,000	100	33.743.231,000	100	34.418.096,000	7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					10.723.823.292,000		11.700.190.053,000		11.860.653.772,000		12.355.552.541,000		13.370.955.298,000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.798.573.292,000		7.734.190.053,000		7.857.903.772,000		8.314.052.541,000		9.294.705.298,000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	68,66	68	69	6.798.573.292,000	70	7.734.190.053,000	71	7.857.903.772,000	72	8.314.052.541,000	73	9.294.705.298,000	8.01.0.00.0.00.33.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.765.000.000,000		1.778.500.000,000		1.791.000.000,000		1.803.500.000,000		1.814.000.000,000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	-	65	67	1.765.000.000,000	70	1.778.500.000,000	72	1.791.000.000,000	75	1.803.500.000,000	77	1.814.000.000,000	8.01.0.00.0.00.33.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.271.500.000,000		1.281.250.000,000		1.289.500.000,000		1.299.250.000,000		1.307.500.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	-	50	55	1.271.500.000,000	60	1.281.250.000,000	65	1.289.500.000,000	70	1.299.250.000,000	75	1.307.500.000,000	8.01.0.00.0.00.33.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					167.500.000,000		172.750.000,000		177.500.000,000		182.750.000,000		187.500.000,000	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	-	65	67	167.500.000,000	70	172.750.000,000	72	177.500.000,000	75	182.750.000,000	77	187.500.000,000	8.01.0.00.0.00.33.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					406.500.000,000		412.500.000,000		417.500.000,000		422.500.000,000		427.500.000,000	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	-	100	100	406.500.000,000	100	412.500.000,000	100	417.500.000,000	100	422.500.000,000	100	427.500.000,000	8.01.0.00.0.00.33.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					314.750.000,000		321.000.000,000		327.250.000,000		333.500.000,000		339.750.000,000	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	314.750.000,000	100	321.000.000,000	100	327.250.000,000	100	333.500.000,000	100	339.750.000,000	8.01.0.00.0.00.33.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
TOTAL KESELURUHAN					1.227.929.459.863		1.252.909.855.637		1.331.003.317.975		1.409.275.070.719		1.494.208.493.946	

Program perangkat daerah Pemerintah Kota Binjai menjadi katalisator pelaksanaan misi RPJMD, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sejumlah program bersenyawa dengan Program Prioritas RPJMD, yang mengantarkan janji kampanye ke tahap operasionalisasi pelaksanaannya. Keterkaitan program perangkat daerah dalam pencapaian setiap misi, tujuan, dan sasaran telah dipetakan. Pelaksanaan sejumlah program nomenklatur seperti Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pembinaan Perpustakaan, dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan diarahkan untuk mencapai Tujuan 1 RPJMD, yaitu terwujudnya SDM unggul, yang mendukung tercapainya sasaran 1 yaitu meningkatnya kualitas dan daya saing SDM. Beberapa program lainnya seperti Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, hingga Program Pengawasan Keamanan Pangan ditujukan untuk mencapai peningkatan mutu pelayanan kesehatan (Tujuan 2). Matriks dukungan program perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran selengkapnya disajikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 4. 2. Dukungan Program Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Misi 1: Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan Serta Mendukung Program Makan Bergizi Gratis Bagi Anak Didik TK, SD dan SMP															
	1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar														
		1. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat													
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Jumlah Kematian Ibu (Kasus)	1	3	61.313.331.779,000	2	62.754.938.944,000	2	65.759.759.349,000	2	67.945.513.898,000	1	68.740.673.898,000	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	22,3	17,2		16,2		15,2		14,4		14		
			Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	80	80	37.597.547.125,000	80	41.357.301.838,000	80	45.493.032.021,000	80	50.042.335.223,000	80	55.046.568.746,000	RSUD DR.RM. Djoelham Kota Binjai
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	85	90	1.088.000.000,000	95	1.142.400.000,000	95	1.199.520.000,000	100	1.259.496.000,000	100	1.322.470.800,000	Dinas Kesehatan
			Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	0	80	2.900.000.000,000	80	3.740.000.000,000	82	4.114.000.000,000	84	4.525.400.000,000	85	4.977.940.000,000	RSUD DR.RM. Djoelham Kota Binjai
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	95	95	568.956.300,000	95	625.851.930,000	95	688.437.123,000	95	757.280.835,000	95	833.008.919,000	Dinas Kesehatan

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	45	738.877.988,000	55	775.832.387,000	60	814.624.007,000	65	855.355.207,000	70	898.122.967,000	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga (% Indeks)	22	22	10.215.000.000,000	22	9.650.000.000,000	22	10.790.000.000,000	22	10.165.000.000,000	22	11.500.000.000,000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	27	30	6.000.000.000,000	35	6.100.000.000,000	40	6.000.000.000,000	45	6.000.000.000,000	50	6.000.000.000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air limbah Domestik Layak dan aman)	50	52	6.300.000.000,000	53	4.800.000.000,000	54	6.400.000.000,000	55	4.800.000.000,000	56	6.400.000.000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	0	12	1.500.000.000,000	15	1.500.000.000,000	18	1.500.000.000,000	20	1.500.000.000,000	25	1.500.000.000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh di bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Ditangani	32,58	33,62	1.000.000.000	34,15	1.000.000.000	34,68	1.000.000.000	35,2	1.000.000.000	35,73	1.000.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	32,58	33,62	1.000.000.000,000	34,15	1.000.000.000,000	34,68	1.000.000.000,000	35,20	1.000.000.000,000	35,73	1.000.000.000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	5	10	2.000.000.000,000	10	2.000.000.000,000	10	2.000.000.000,000	10	2.500.000.000,000	10	2.500.000.000,000	Disketapangtan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	90,4	93,6	2.300.000.000,000	95,2	2.300.000.000,000	96,08	2.400.000.000,000	98,4	2.400.000.000,000	100	2.500.000.000,000	Disketapangtan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	56,75	45,94	2.261.000.000,000	40,54	2.261.000.000,000	35,13	2.266.000.000,000	29,72	2.670.000.000,000	24,32	2.670.000.000,000	Disketapangtan

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	24	52,5	2.155.000.000,000	52,5	2.160.000.000,000	53,23	2.265.000.000,000	53,23	2.170.000.000,000	60	2.175.000.000,000	Disketapangtan
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	0	50	2.480.000.000,000	50	2.525.000.000,000	70	2.590.000.000,000	80	2.650.000.000,000	100	2.720.000.000,000	Disketapangtan
			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	90	90		90		90		90		90		
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	53,33	83,09	425.000.000,000	83,29	425.000.000,000	83,49	425.000.000,000	83,69	425.000.000,000	83,89	425.000.000,000	DLH
			Indeks Kualitas Udara (Indeks)	88,51	81,02		81,22		81,42		81,62		81,82		DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH (Persentase)	14,25	16,25	2.500.000.000,000	17,25	2.500.000.000,000	18,25	2.500.000.000,000	19,25	2.500.000.000,000	20,25	2.500.000.000,000	DLH
			Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	22,4	47,06		47,13		47,2		47,27		47,34		DLH
			Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS (Persentase)	-	100		100		100		100		100		DLH
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	-	100	310.000.000,000	100	310.000.000,000	100	310.000.000,000	100	310.000.000,000	100	310.000.000,000	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	-	63,64	50.000.000,000	72,73	50.000.000,000	81,82	50.000.000,000	90,91	50.000.000,000	100	50.000.000,000	DLH
		Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	-	30,5	8.800.000.000,000	31	8.875.000.000,000	31,5	8.800.000.000,000	32	8.800.000.000,000	32,5	8.800.000.000,000	DLH
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	-	65		70		75		80		85		DLH

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Peningkatan kualitas keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	100	100	322.044.194,000	100	338.146.403,000	100	355.053.723,000	100	372.806.410,000	100	391.446.730,000	Dinas P3AM
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	46,6	47,5	2.258.620.000,000	48	2.371.551.000,000	48,5	2.614.634.977,000	49	2.614.634.977,000	49,5	2.745.366.746,000	Dinas PPKB
	2. Terwujudnya SDM unggul														
		2. Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM													
		Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	100	100	39.231.775.200,000	100	41.193.363.960,000	100	43.253.032.158,000	100	45.415.683.765,000	100	47.686.467.954,000	Dinas Pendidikan
			Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)	100	79,88		79,90		79,92		79,94		79,96		
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100	99,04	1.200.000.000,000	99,06	1.260.000.000,000	99,08	1.323.000.000,000	99,1	1.389.150.000,000	99,12	1.458.607.500,000	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	100	0,056	4.000.000.000,000	0,056	4.200.000.000,000	0,056	4.410.000.000,000	0,056	4.630.500.000,000	0,056	4.862.025.000,000	Dinas Pendidikan
			Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	100	88,80		89,90		90,00		91,10		92,20		
		Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	100	90,22	500.000.000,000	90,33	550.000.000,000	90,44	600.000.000,000	90,55	650.000.000,000	90,66	700.000.000,000	Dinas Pendidikan
		Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	100	70,54	1.000.000.000,000	70,56	1.200.000.000,000	70,58	1.400.000.000,000	70,60	1.600.000.000,000	70,02	1.800.000.000,000	Dinas Pendidikan

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Jumlah Kematian Ibu (Kasus)	1	3	61.313.331.779,000	2	62.754.938.944,000	2	65.759.759.349,000	2	67.945.513.898,000	1	68.740.673.898,000	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	22,3	17,2		16,2		15,2		14,4		14		
			Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	80	80	37.597.547.125,000	80	41.357.301.838,000	80	45.493.032.021,000	80	50.042.335.223,000	80	55.046.568.746,000	RSUD DR.RM. Djoelham Kota Binjai
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	85	90	1.088.000.000,000	95	1.142.400.000,000	95	1.199.520.000,000	100	1.259.496.000,000	100	1.322.470.800,000	Dinas Kesehatan
			Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	0	80	2.900.000.000,000	80	3.740.000.000,000	82	4.114.000.000,000	84	4.525.400.000,000	85	4.977.940.000,000	RSUD DR.RM. Djoelham Kota Binjai
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi pada pelaksanaan kegiatan		100	500.000.000,000	100	500.000.000,000	100	500.000.000,000	100	500.000.000,000	100	500.000.000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	-	1,57	462.000.000,000	1,67	484.000.000,000	1,78	502.000.000,000	1,84	520.000.000,000	1,95	539.000.000,000	Disnakerperindag
		Program Peningkatan kualitas keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	100	100	322.044.194,000	100	338.146.403,000	100	355.053.723,000	100	372.806.410,000	100	391.446.730,000	Dinas P3AM
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	46,6	47,5	2.258.620.000,000	48	2.371.551.000,000	48,5	2.614.634.977,000	49	2.614.634.977,000	49,5	2.745.366.746,000	Dinas PPKB
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	0,17	0,19	3.857.903.500,000	0,20	3.857.903.500,000	0,21	3.896.482.535,000	0,22	3.896.482.535,000	0,23	3.935.447.360,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	0,011	0,021		0,026		0,031		0,036		0,041		

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0,016	0,026	1.669.074.000,000	0,031	1.669.074.000,000	0,036	1.685.764.740,000	0,041	1.685.764.740,000	0,046	1.702.622.387,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	58	60	878.460.000,000	62	878.460.000,000	62	896.029.200,000	65	896.029.200,000	68	922.910.076,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	10,66	10,66	1.149.586.432,000	10,66	1.193.000.000,000	10,66	1.245.000.000,000	10,66	1.295.000.000,000	10,66	1.350.000.000,000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	10,66	10,66	1.000.000.000,000	10,66	1.150.000.000,000	10,66	1.200.000.000,000	10,66	1.350.000.000,000	10,66	1.400.000.000,000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
		Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	-	0,16	420.000.000,000	0,17	462.000.000,000	0,17	506.800.000,000	0,17	602.000.000,000	0,18	607.800.000,000	Dinas Pariwisata
		Program Pembinaan Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	-	0,0001	0,000	0,0001	25.000.000,000	0,0001	0,000	0,0001	0,000	0,0001	0,000	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	2	130.000.000,000	3	137.000.000,000	5	134.800.000,000	7	137.000.000,000	9	139.800.000,000	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	1,15	1,2	50.000.000,000	1,25	150.000.000,000	1,3	50.000.000,000	1,35	150.000.000,000	1,4	50.000.000,000	Dinas Pariwisata
		Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	88,98	88,98	902.000.000,000	88,98	985.000.000,000	88,98	1.110.000.000,000	88,98	1.155.000.000,000	88,98	1.200.000.000,000	Dinas Perpustakaan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	10	32.389.010,000	10	35.000.000,000	10	37.000.000,000	10	38.000.000,000	10	40.000.000,000	Dinas Perpustakaan

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	21	50	750.000.000,000	55	800.000.000,000	57	1.100.000.000,000	60	1.200.000.000,000	65	1.100.000.000,000	Bapperida
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	55	65	900.000.000,000	70	900.000.000,000	75	900.000.000,000	80	900.000.000,000	85	900.000.000,000	
			Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	80	95	1.150.000.000,000	95	1.150.000.000,000	97	1.150.000.000,000	98	1.150.000.000,000	100	1.150.000.000,000	
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	65	2.200.000.000,000	70	2.500.000.000,000	75	2.300.000.000,000	80	2.500.000.000,000	85	2.500.000.000,000	
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	60	1.400.000.000,000	65	1.545.000.000,000	70	1.590.000.000,000	75	1.620.000.000,000	80	1.673.000.000,000	Bapperida
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	0	60	520.000.000,000	65	520.000.000,000	70	520.000.000,000	75	520.000.000,000	80	520.000.000,000	
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	60	350.000.000,000	65	350.000.000,000	70	350.000.000,000	75	350.000.000,000	80	350.000.000,000	

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	80	95	1.200.000.000,000	95	1.200.000.000,000	97	1.200.000.000,000	98	1.200.000.000,000	100	1.200.000.000,000	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	22,04	23	1.672.315.000,000	23	1.436.746.500,000	23	1.565.921.150,000	23	1.708.013.265,000	23	2.152.314.591,000	BKPSDM
			Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	25	25	2.000.000,000	25	32.200.000,000	25	32.420.000,000	25	32.662.000,000	25	32.928.200,000	
			Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	5,07	6	10.000.000,000	6	45.000.000,000	6	45.000.000,000	6	45.000.000,000	6	45.000.000,000	
			Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	5,01	6	498.000.000,000	6	547.800.000,000	6	602.580.000,000	6	662.838.000,000	6	729.121.800,000	
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	77,03	87	1.474.176.345,000	87	1.621.593.977,000	87	1.783.753.375,000	87	1.962.128.712,000	87	2.158.341.583,000	BKPSDM
			Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	16,10	17	266.381.127,000	18	411.622.234,000	18	710.672.468,000	19	668.414.716,000	19	763.156.188,000	
			Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	91	94	347.095.578,000	95	381.885.145,000	96	419.985.647,000	96	461.984.212,000	100	508.182.633,000	
			Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	13,08	15	148.901.007,000	16	163.691.106,000	17	179.960.218,000	18	197.856.239,000	19	217.541.863,000	

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Misi 2: Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi, dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan															
	3. Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan														
		3. Terwujudnya ketercukupan dan stabilitas harga pangan													
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	5	10	2.000.000.000,000	10	2.000.000.000,000	10	2.000.000.000,000	10	2.500.000.000,000	10	2.500.000.000,000	Disketapangtan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	90,4	93,6	2.300.000.000,000	95,2	2.300.000.000,000	96,08	2.400.000.000,000	98,4	2.400.000.000,000	100	2.500.000.000,000	Disketapangtan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	56,75	45,94	2.261.000.000,000	40,54	2.261.000.000,000	35,13	2.266.000.000,000	29,72	2.670.000.000,000	24,32	2.670.000.000,000	Disketapangtan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	24	52,5	2.155.000.000,000	52,5	2.160.000.000,000	53,23	2.265.000.000,000	53,23	2.170.000.000,000	60	2.175.000.000,000	Disketapangtan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.800	4.000	1.415.000.000,000	4.050	1.520.000.000,000	4.100	1.625.000.000,000	4.150	1.730.000.000,000	4.200	1.735.000.000,000	Disketapangtan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	29,4	27,5	1.480.000.000,000	26,5	1.490.000.000,000	25,6	1.500.000.000,000	24,7	1.510.000.000,000	23,7	1.520.000.000,000	Disketapangtan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	5,92	6,2	1.025.000.000,000	6,2	1.090.000.000,000	6,2	1.175.000.000,000	6,2	1.240.000.000,000	6,2	1.305.000.000,000	Disketapangtan

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	0,98	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	0,96	2,1		2,2		2,3		2,4		2,5		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	-	90,1	1.072.000.000,000	90,25	1.092.000.000,000	90,45	1.112.000.000,000	90,8	1.132.000.000,000	91,2	1.152.000.000,000	Disketapangtan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	0	90	1.050.000.000,000	90	1.050.000.000,000	90	1.050.000.000,000	90	1.050.000.000,000	90	1.050.000.000,000	Disketapangtan
			Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	0	90		90		90		90		90		
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	90	90	1.115.000.000,000	90	1.125.000.000,000	90	1.140.000.000,000	90	1.150.000.000,000	90	1.160.000.000,000	Disketapangtan
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100	100	1.450.000.000,000	100	1.455.000.000,000	100	1.460.000.000,000	100	1.465.000.000,000	100	1.470.000.000,000	Disketapangtan
			Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	0	55		60		65		70		75		
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	0	50	2.480.000.000,000	50	2.525.000.000,000	70	2.590.000.000,000	80	2.650.000.000,000	100	2.720.000.000,000	Disketapangtan
			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	90	90		90		90		90		90		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	45	78	12.000.000.000,000	80	12.000.000.000,000	83	12.000.000.000,000	85	12.000.000.000,000	90	12.000.000.000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	6,68	6,55	79.000.000,000	6,47	82.000.000,000	6,42	85.700.000,000	6,38	90.000.000,000	6,33	94.000.000,000	Disnakerperindag
		Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (Jiwa)	2,14	2,1	1.065.285.429,000	2,1	1.565.285.429,000	2,1	2.065.285.429,000	2,1	2.565.285.429,000	2,1	2.765.285.429,000	Dinas PPKB
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	13.3-12.5	12-11.5		11.5-11		10.5-10		9.5-9		9-8.5		
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	-	0	190.000.000,000	0	50.000.000,000	0	50.000.000,000	33,33	300.000.000,000	0	70.000.000,000	DLH
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	53,33	83,09	425.000.000,000	83,29	425.000.000,000	83,49	425.000.000,000	83,69	425.000.000,000	83,89	425.000.000,000	DLH
			Indeks Kualitas Udara (Indeks)	88,51	81,02		81,22		81,42		81,62		81,82		DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH (Persentase)	14,25	16,25	2.500.000.000,000	17,25	2.500.000.000,000	18,25	2.500.000.000,000	19,25	2.500.000.000,000	20,25	2.500.000.000,000	DLH
			Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	22,4	47,06		47,13		47,2		47,27		47,34		DLH
			Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS (Persentase)	-	100		100		100		100		100		DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	-	63,64	50.000.000,000	72,73	50.000.000,000	81,82	50.000.000,000	90,91	50.000.000,000	100	50.000.000,000	DLH
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	69	72	248.897.000,000	72	248.897.000,000	73	253.874.940,000	75	253.874.940,000	75	258.952.439,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan														
		4. Meningkatnya daya saing ekonomi yang inklusif													

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	100	100	110.000.000,000	100	115.000.000,000	100	120.000.000,000	100	125.000.000,000	100	130.000.000,000	Disnakerperindag
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	-	1,57	462.000.000,000	1,67	484.000.000,000	1,78	502.000.000,000	1,84	520.000.000,000	1,95	539.000.000,000	Disnakerperindag
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	73,75	73,86	585.000.000,000	73,94	644.000.000,000	74,23	692.000.000,000	74,39	738.000.000,000	74,55	784.000.000,000	Disnakerperindag
		Program Hubungan Industrial	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	8.240	8.290	1.112.180.000,000	8.315	1.119.180.000,000	8.340	1.126.180.000,000	8.365	1.134.180.000,000	8.390	1.139.180.000,000	Disnakerperindag
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	-	7	545.000.000,000	7,2	705.000.000,000	7,3	732.000.000,000	7,4	750.000.000,000	7,5	761.000.000,000	Disnakerperindag
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	10	10	1.808.500.000,000	10	1.868.000.000,000	10	1.927.000.000,000	10	1.987.500.000,000	10	2.048.000.000,000	Disnakerperindag
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	6,68	6,55	79.000.000,000	6,47	82.000.000,000	6,42	85.700.000,000	6,38	90.000.000,000	6,33	94.000.000,000	Disnakerperindag
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	-	50	293.000.000,000	60	323.000.000,000	70	345.000.000,000	85	371.000.000,000	100	391.000.000,000	Disnakerperindag
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	100	100	120.000.000,000	100	129.000.000,000	100	130.000.000,000	100	131.000.000,000	100	135.000.000,000	Disnakerperindag
		Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	-	150	50.000.000,000	160	60.000.000,000	170	65.000.000,000	180	70.000.000,000	190	75.000.000,000	Disnakerperindag
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	5	10	2.000.000.000,000	10	2.000.000.000,000	10	2.000.000.000,000	10	2.500.000.000,000	10	2.500.000.000,000	Disketapangtan

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	90,4	93,6	2.300.000.000,000	95,2	2.300.000.000,000	96,08	2.400.000.000,000	98,4	2.400.000.000,000	100	2.500.000.000,000	Disketapangtan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	56,75	45,94	2.261.000.000,000	40,54	2.261.000.000,000	35,13	2.266.000.000,000	29,72	2.670.000.000,000	24,32	2.670.000.000,000	Disketapangtan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.800	4.000	1.415.000.000,000	4.050	1.520.000.000,000	4.100	1.625.000.000,000	4.150	1.730.000.000,000	4.200	1.735.000.000,000	Disketapangtan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	29,4	27,5	1.480.000.000,000	26,5	1.490.000.000,000	25,6	1.500.000.000,000	24,7	1.510.000.000,000	23,7	1.520.000.000,000	Disketapangtan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	5,92	6,2	1.025.000.000,000	6,2	1.090.000.000,000	6,2	1.175.000.000,000	6,2	1.240.000.000,000	6,2	1.305.000.000,000	Disketapangtan
			Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	0,98	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	0,96	2,1		2,2		2,3		2,4		2,5		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	-	90,1	1.072.000.000,000	90,25	1.092.000.000,000	90,45	1.112.000.000,000	90,8	1.132.000.000,000	91,2	1.152.000.000,000	Disketapangtan
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	90	90	1.115.000.000,000	90	1.125.000.000,000	90	1.140.000.000,000	90	1.150.000.000,000	90	1.160.000.000,000	Disketapangtan
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100	100	1.450.000.000,000	100	1.455.000.000,000	100	1.460.000.000,000	100	1.465.000.000,000	100	1.470.000.000,000	Disketapangtan
			Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	0	55		60		65		70		75		
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	0	50	2.480.000.000,000	50	2.525.000.000,000	70	2.590.000.000,000	80	2.650.000.000,000	100	2.720.000.000,000	Disketapangtan

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	90	90		90		90		90		90		
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	-	0	190.000.000,000	0	50.000.000,000	0	50.000.000,000	33,33	300.000.000,000	0	70.000.000,000	DLH
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	53,33	83,09	425.000.000,000	83,29	425.000.000,000	83,49	425.000.000,000	83,69	425.000.000,000	83,89	425.000.000,000	DLH
			Indeks Kualitas Udara (Indeks)	88,51	81,02		81,22		81,42		81,62		81,82		DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH (Persentase)	14,25	16,25	2.500.000.000,000	17,25	2.500.000.000,000	18,25	2.500.000.000,000	19,25	2.500.000.000,000	20,25	2.500.000.000,000	DLH
			Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	22,4	47,06		47,13		47,2		47,27		47,34		DLH
			Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS (Persentase)	-	100		100		100		100		100		DLH
		Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	-	30,5	8.800.000.000,000	31	8.875.000.000,000	31,5	8.800.000.000,000	32	8.800.000.000,000	32,5	8.800.000.000,000	DLH
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	-	65		70		75		80		85		DLH
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	72	75	1.266.446.500,000	75	1.266.446.500,000	78	1.317.104.360,000	78	1.317.104.360,000	80	1.317.104.360,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	69	72	248.897.000,000	72	248.897.000,000	73	253.874.940,000	75	253.874.940,000	75	258.952.439,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	0,17	0,19	3.857.903.500,000	0,20	3.857.903.500,000	0,21	3.896.482.535,000	0,22	3.896.482.535,000	0,23	3.935.447.360,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	0,011	0,021		0,026		0,031		0,036		0,041		
		Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0,016	0,026	1.669.074.000,000	0,031	1.669.074.000,000	0,036	1.685.764.740,000	0,041	1.685.764.740,000	0,046	1.702.622.387,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	58	60	878.460.000,000	62	878.460.000,000	62	896.029.200,000	65	896.029.200,000	68	922.910.076,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	10	15	351.384.000,000	15	351.384.000,000	15	365.439.360,000	15	365.439.360,000	15	365.439.360,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	52	65	6.515.245.000,000	67	6.515.245.000,000	71	6.775.854.800,000	73	6.775.854.800,000	75	6.775.854.800,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	97	98	900.000.000,000	98	965.000.000,000	99	1.036.500.000,000	99	1.116.150.000,000	99	1.202.765.000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	61,44	71,44	250.000.000,000	76,44	275.000.000,000	81,44	302.500.000,000	86,44	332.750.000,000	91,44	366.025.000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	65,67	79,45	55.158.383,000	87,40	57.916.302,000	87,40	60.812.117,000	87,40	63.852.723,000	96,14	67.045.359,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	51,4	100	430.136.450,000	100	451.644.273,000	100	474.226.487,000	100	437.937.811,000	100	522.834.701,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	70	75	150.000.000,000	75	165.000.000,000	75	181.500.000,000	75	199.650.000,000	75	219.615.000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	96,77	96,77	0,000	98,38	20.000.000,000	98,38	100.000.000,000	98,38	20.000.000,000	100	50.000.000,000	Dinas Pariwisata
			Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	-	-		1		-		-		1		
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	4,55	4,57	1.070.000.000,000	4,58	182.800.000,000	4,59	180.000.000,000	4,60	196.760.000,000	4,61	193.800.000,000	Dinas Pariwisata

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	75	5	730.000.000,000	5,5	234.000.000,000	6,5	288.000.000,000	6,8	241.000.000,000	7	295.000.000,000	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	2	130.000.000,000	3	137.000.000,000	5	134.800.000,000	7	137.000.000,000	9	139.800.000,000	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	1,15	1,2	50.000.000,000	1,25	150.000.000,000	1,3	50.000.000,000	1,35	150.000.000,000	1,4	50.000.000,000	Dinas Pariwisata
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	21	50	750.000.000,000	55	800.000.000,000	57	1.100.000.000,000	60	1.200.000.000,000	65	1.100.000.000,000	Bapperida
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	55	65	900.000.000,000	70	900.000.000,000	75	900.000.000,000	80	900.000.000,000	85	900.000.000,000	
			Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	80	95	1.150.000.000,000	95	1.150.000.000,000	97	1.150.000.000,000	98	1.150.000.000,000	100	1.150.000.000,000	
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	65	2.200.000.000,000	70	2.500.000.000,000	75	2.300.000.000,000	80	2.500.000.000,000	85	2.500.000.000,000	
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang	0	60	1.400.000.000,000	65	1.545.000.000,000	70	1.590.000.000,000	75	1.620.000.000,000	80	1.673.000.000,000	Bapperida

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			Dimanfaatkan (Persentase)												
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	0	60	520.000.000,000	65	520.000.000,000	70	520.000.000,000	75	520.000.000,000	80	520.000.000,000	
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	60	350.000.000,000	65	350.000.000,000	70	350.000.000,000	75	350.000.000,000	80	350.000.000,000	
			Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	80	95	1.200.000.000,000	95	1.200.000.000,000	97	1.200.000.000,000	98	1.200.000.000,000	100	1.200.000.000,000	
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	35,56	40	520.000.000,000	40	520.000.000,000	40	520.000.000,000	40	590.000.000,000	40	590.000.000,000	Bagian Perekonomian
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang jalan dalam kondisi Baik	92	92,5	12.100.000.000,000	93	12.100.000.000,000	93,5	12.100.000.000,000	94	12.100.000.000,000	94,5	12.100.000.000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	897.351.784,000	100	987.086.962,000	100	1.085.795.659,000	100	1.194.375.225,000	100	1.313.812.747,000	Satpol PP
						117.670.859,000		129.437.945,000		142.381.739,000		156.619.913,000		172.281.905,000	
			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	100		100		100		100		100		
						1.093.378.798,000		1.202.716.678,000		1.322.988.346,000		1.455.287.180,000		1.600.815.898,000	
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100		100		100		100		100		
						410.500.000,000		451.550.000,000		496.705.000,000		546.375.500,000		601.013.050,000	
			Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100		100		100		100		100		

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat (Persentase)	363	365	4.804.147.128,000	365	5.000.000.000,000	365	5.200.000.000,000	366	5.400.000.000,000	367	5.600.000.000,000	Dinas Perhubungan
			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	86,15	87		87,20		87,55		88		88,40		Dinas Perhubungan
		5. Meningkatnya aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan dan berketahanan													
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	-	0	190.000.000,000	0	50.000.000,000	0	50.000.000,000	33,33	300.000.000,000	0	70.000.000,000	DLH
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	53,33	83,09	425.000.000	83,29	425.000.000	83,49	425.000.000	83,69	425.000.000	83,89	425.000.000	DLH
			Indeks Kualitas Udara	88,51	81,02		81,22		81,42		81,62		81,82		DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH	14,25	16,25	2.500.000.000	17,25	2.500.000.000	18,25	2.500.000.000	19,25	2.500.000.000	20,25	2.500.000.000	DLH
			Indeks Kualitas Lahan	22,4	47,06		47,06		47,2		47,27		47,34		DLH
			Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		DLH
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	n/a	100%	310.000.000	100%	310.000.000	100%	310.000.000	100%	310.000.000	100%	310.000.000	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	n/a	63,64	50.000.000	72,73	50.000.000	81,82	50.000.000	90,91	50.000.000	100	50.000.000	DLH
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	n/a	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	DLH
			Porsi EBT dalam Bauran Energi	n/a	2		3		5		7		10		DLH

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	n/a	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	DLH
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	n/a	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	DLH
		Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	n/a	30,5	8.800.000.000	31	8.875.000.000	31,5	8.800.000.000	32%	8.800.000.000	32,5	8.800.000.000	DLH
			Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	n/a	65		70		75		80		85		DLH
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	24,82	23,84	2.000.000.000	24,84	2.000.000.000	25,84	2.000.000.000	26,84	2.500.000.000	27,84	2.500.000.000	Disketapangtan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	90,4	93,6	2.300.000.000	95,2	2.300.000.000	96,08	2.400.000.000	98,4	2.400.000.000	100	2.500.000.000	Disketapangtan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	56,75	45,94	2.261.000.000	40,54	2.261.000.000	35,13	2.266.000.000	29,72	2.670.000.000	24,32	2.670.000.000	Disketapangtan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	24	52,5	2.155.000.000	52,5	2.160.000.000	53,23	2.265.000.000	53,23	2.170.000.000	60,00	2.175.000.000	Disketapangtan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.800	4.000	1.415.000.000,000	4.050	1.520.000.000,000	4.100	1.625.000.000,000	4.150	1.730.000.000,000	4.200	1.735.000.000,000	Disketapangtan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	29,4	27,5	1.480.000.000,000	26,5	1.490.000.000,000	25,6	1.500.000.000,000	24,7	1.510.000.000,000	23,7	1.520.000.000,000	Disketapangtan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	5,92	6,2	1.025.000.000,000	6,2	1.090.000.000,000	6,2	1.175.000.000,000	6,2	1.240.000.000,000	6,2	1.305.000.000,000	Disketapangtan
			Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	0,98	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	0,96	2,1		2,2		2,3		2,4		2,5		

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	-	90,1	1.072.000.000,000	90,25	1.092.000.000,000	90,45	1.112.000.000,000	90,8	1.132.000.000,000	91,2	1.152.000.000,000	Disketapangtan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	0	90	1.050.000.000,000	90	1.050.000.000,000	90	1.050.000.000,000	90	1.050.000.000,000	90	1.050.000.000,000	Disketapangtan
			Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	0	90		90		90		90		90		
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	90	90	1.115.000.000,000	90	1.125.000.000,000	90	1.140.000.000,000	90	1.150.000.000,000	90	1.160.000.000,000	Disketapangtan
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100	100	1.450.000.000,000	100	1.455.000.000,000	100	1.460.000.000,000	100	1.465.000.000,000	100	1.470.000.000,000	Disketapangtan
			Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	0	55		60		65		70		75		
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	0	50	2.480.000.000,000	50	2.525.000.000,000	70	2.590.000.000,000	80	2.650.000.000,000	100	2.720.000.000,000	Disketapangtan
			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	90	90		90		90		90		90		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas darat	363	365	Rp4.804.147.128	365	Rp5.000.000.000	365	Rp5.200.000.000	366	Rp5.400.000.000	367	Rp5.600.000.000	Dinas Perhubungan
			Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,79	0,80		0,80		0,80		0,80		0,80		Dinas Perhubungan
		Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	0	0,026	1.669.074.000	0,031	1.669.074.000	0,036	1.685.764.740	0,041	1.685.764.740	0,046	1.702.622.387	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	69	72	248.897.000	72	248.897.000	73	253.874.940	75	253.874.940	75	258.952.439	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	3780 izin	4.100 izin	Rp 55.158.383	4200 Izin	Rp57.916.302	4250 Izin	Rp60.812.117	4300 Izin	Rp63.852.723	4350 Izin	Rp67.045.359	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	4,55	4,57	1.070.000.000	4,58	182.800.000	4,59	180.000.000	4,6	196.760.000	4,61	193.800.000	Dinas Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Parawisata	75	12,5	730.000.000	11,11	234.000.000	10	288.000.000	9,9	241.000.000	8,33	295.000.000	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	0,9	1,1	130.000.000	1,2	137.000.000	1,25	134.800.000	1,28	137.000.000	1,3	139.800.000	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	1,15	1,2	50.000.000	1,25	150.000.000	1,3	50.000.000	1,35	150.000.000	1,4	50.000.000	Dinas Pariwisata
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	21	50	750.000.000,000	55	800.000.000,000	57	1.100.000.000,000	60	1.200.000.000,000	65	1.100.000.000,000	Bapperida
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	55	65	900.000.000,000	70	900.000.000,000	75	900.000.000,000	80	900.000.000,000	85	900.000.000,000	
			Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	80	95	1.150.000.000,000	95	1.150.000.000,000	97	1.150.000.000,000	98	1.150.000.000,000	100	1.150.000.000,000	

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	65	2.200.000.000,000	70	2.500.000.000,000	75	2.300.000.000,000	80	2.500.000.000,000	85	2.500.000.000,000	
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	60	1.400.000.000,000	65	1.545.000.000,000	70	1.590.000.000,000	75	1.620.000.000,000	80	1.673.000.000,000	Bapperida
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	0	60	520.000.000,000	65	520.000.000,000	70	520.000.000,000	75	520.000.000,000	80	520.000.000,000	
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	60	350.000.000,000	65	350.000.000,000	70	350.000.000,000	75	350.000.000,000	80	350.000.000,000	
			Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	80	95	1.200.000.000,000	95	1.200.000.000,000	97	1.200.000.000,000	98	1.200.000.000,000	100	1.200.000.000,000	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	42,90	35,00	22.350.000.000,000	30,00	23.467.500.000,000	30,00	24.585.000.000,000	30,00	25.702.500.000,000	30,00	26.820.000.000,000	BPKPD
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	11,57	35		40		40		40		40		
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	89,9	100	1.650.000.000,000	100	1.732.500.000,000	100	1.815.000.000,000	100	1.897.500.000,000	100	1.980.000.000,000	
			Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	-.169,38	1,00		0,90		0,80		0,70		0,60		
			Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	1.700.000.000,000	100	1.785.000.000,000	100	1.870.000.000,000	100	1.955.000.000,000	100	2.040.000.000,000	

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	-2,16	-1,50	900.000.000,000	-0,50	945.000.000,000	0,50	990.000.000,000	1,00	1.035.000.000,000	2,00	1.080.000.000,000	BPKPD
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	35,56	40	520.000.000,000	40	520.000.000,000	40	520.000.000,000	40	590.000.000,000	40	590.000.000,000	Bagian Perekonomian
			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	80	100	720.765.573,000	100	792.842.129,000	100	872.126.341,000	100	959.338.975,000	100	1.055.272.871,000	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang jalan dalam kondisi Baik	92 %	92,5 %	12.100.000.000	93 %	12.100.000.000	93,5 %	12.100.000.000	94 %	12.100.000.000	94,5 %	12.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	32,87%	37,37%	750.000.000	41,87 %	750.000.000	46,37 %	750.000.000	50,87 %	750.000.000	55,37 %	750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	n/a	5 %	500.000.000	10 %	500.000.000	15 %	500.000.000	20 %	500.000.000	25 %	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	10,66	10,66	1.149.586.432,000	10,66	1.193.000.000,000	10,66	1.245.000.000,000	10,66	1.295.000.000,000	10,66	1.350.000.000,000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
	5. Peningkatan perlindungan sosial dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk rentan														
		6. Meningkatnya akses dan kualitas layanan perlindungan sosial													
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	-	68,5	2.738.000.000,000	71,4	2.952.800.000,000	82,2	3.233.080.000,000	89	3.570.388.000,000	91	3.937.426.800,000	Dinas Sosial

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	-	80		85		90		95		100		
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	0	60	505.000.000,000	60	520.000.000,000	65	535.000.000,000	70	545.000.000,000	75	560.000.000,000	Dinas Sosial
			Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	80	80		80		80		80		80		
			Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	84	85		85		85		85		85		
			Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	80	85		85		85		85		85		
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	84	85		85		85		85		85		
			Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Poin)	0	60		65		65		70		75		
			Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Poin)	0	85		85		85		85		85		
			Indeks Peranan Sosial (Poin)	0	65		70		75		80		85		
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	99	80	690.000.000,000	80	850.000.000,000	80	1.200.000.000,000	80	1.305.000.000,000	80	1.870.000.000,000	Dinas Sosial
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	99,03	99		99		99		100		100		

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelotaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	99.	99		99		99		100		100		
			Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (%)	0	65		70		70		75		80		
			Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi (%)	0	75		78		80		85		85		
			Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	0,4	1		1,2		1,5		1,8		2		
		Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	99,08	100	1.440.000.000,000	100	1.840.000.000,000	100	2.315.000.000,000	100	2.710.000.000,000	100	3.150.000.000,000	Dinas Sosial
			Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)	0	60		65		70		75		80		
			Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	0	60		65		70		75		80		
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	100	200.000.000,000	100	220.000.000,000	100	242.000.000,000	100	266.200.000,000	100	292.820.000,000	Dinas Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (Orang)	0	10	90.000.000,000	15	150.000.000,000	20	210.000.000,000	25	255.000.000,000	30	270.000.000,000	Dinas Sosial
			Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	0	70		73		80		85		90		

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Hubungan Industrial	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	8.240	8.290	1.112.180.000,000	8.315	1.119.180.000,000	8.340	1.126.180.000,000	8.365	1.134.180.000,000	8.390	1.139.180.000,000	Disnaker Perindag
		Program Perlindungan Perempuan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. ((%))	0,019	0,015	547.300.000,000	0,014	574.665.000,000	0,013	926.903.250,000	0,012	973.248.411,000	0,011	1.021.910.531,000	Dinas P3AM
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	262.680.000,000	100	264.869.000,000	100	272.217.000,000	100	291.833.000,000	100	299.524.000,000	Dinas P3AM
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	0	67,65		67,67		67,69		67,70		67,71		
		Program Peningkatan kualitas keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	100	100	322.044.194,000	100	338.146.403,000	100	355.053.723,000	100	372.806.410,000	100	391.446.730,000	Dinas P3AM
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	0	63,25	277.500.000,000	63,28	291.375.000,000	63,30	305.943.000,000	63,37	321.240.000,000	63,40	337.302.000,000	Dinas P3AM
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	80	82	10.000.000,000	85	10.500.000,000	85	11.025.000,000	90	11.576.250,000	90	12.155.062,000	Dinas P3AM
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	46,6	47,5	2.258.620.000,000	48	2.371.551.000,000	48,5	2.614.634.977,000	49	2.614.634.977,000	49,5	2.745.366.746,000	Dinas PPKB
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	83	100	9.937.557.706,000	100	10.434.435.591,000	100	10.956.157.371,000	100	10.956.157.371,000	100	10.956.157.371,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Binjai
						533.462.992,000		532.581.112,000		561.848.592,000		604.223.121,000		638.145.356,000	Bagian Hukum Setda Kota Binjai

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	0	2,7815	882.023.222,000	2,7905	970.225.544,000	2,8105	1.067.248.099,000	2,8217	1.173.972.908,000	2,8267	1.291.370.199,000	Bagian Pemerintahan Setda Kota Binjai
			Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	70	75		75		80		80		80		Bagian Pemerintahan Setda Kota Binjai
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	-	100	406.500.000,000	100	412.500.000,000	100	417.500.000,000	100	422.500.000,000	100	427.500.000,000	Bakesbangpol
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu (Kasus)	1	3	61.313.331.779,000	2	62.754.938.944,000	2	65.759.759.349,000	2	67.945.513.898,000	1	68.740.673.898,000	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	22,3	17,2		16,2		15,2		14,4		14		
			Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	80	80	37.597.547.125,000	80	41.357.301.838,000	80	45.493.032.021,000	80	50.042.335.223,000	80	55.046.568.746,000	RSUD DR.RM. Djoelham Kota Binjai
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	0	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	BPBD
			Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	0	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	
			Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	0	100	43.535.400.000,000	100	7.750.400.000,000	100	7.805.400.000,000	100	7.805.400.000,000	100	7.615.400.000,000	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	0	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	BPBD
			Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	0	100	1.369.000.000,000	100	1.299.000.000,000	100	1.264.000.000,000	100	1.244.000.000,000	100	1.264.000.000,000	

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	6. Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan keluarga														
		7. Menguatnya peran keluarga dan kesetaraan													
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	9,9	8,5	2.632.392.800,000	8	2.764.011.600,000	7,5	2.902.212.180,000	7	3.047.322.789,000	6,5	3.199.688.928,000	Dinas PPKB
			Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	64,9	66		66,5		67		67,5		68		
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	46,6	47,5	2.258.620.000,000	48	2.371.551.000,000	48,5	2.614.634.977,000	49	2.614.634.977,000	49,5	2.745.366.746,000	Dinas PPKB
		Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (Jiwa)	2,14	2,1	1.065.285.429,000	2,1	1.565.285.429,000	2,1	2.065.285.429,000	2,1	2.565.285.429,000	2,1	2.765.285.429,000	Dinas PPKB
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	13.3-12.5	12-11.5		11.5-11		10.5-10		9.5-9		9-8.5		
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,299	0,291	28.000.000,000	0,288	29.400.000,000	0,285	30.870.000,000	0,282	32.413.500,000	0,280	34.034.175,000	Dinas P3AM
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	0	49,40		49,50		49,60		49,70		49,80		

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Perlindungan Perempuan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. ((%))	0,019	0,015	547.300.000,000	0,014	574.665.000,000	0,013	926.903.250,000	0,012	973.248.411,000	0,011	1.021.910.531,000	Dinas P3AM
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	262.680.000,000	100	264.869.000,000	100	272.217.000,000	100	291.833.000,000	100	299.524.000,000	Dinas P3AM
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	0	67,65		67,67		67,69		67,70		67,71		
		Program Peningkatan kualitas keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	100	100	322.044.194,000	100	338.146.403,000	100	355.053.723,000	100	372.806.410,000	100	391.446.730,000	Dinas P3AM
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	0	63,25	277.500.000,000	63,28	291.375.000,000	63,30	305.943.000,000	63,37	321.240.000,000	63,40	337.302.000,000	Dinas P3AM
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	80	82	10.000.000,000	85	10.500.000,000	85	11.025.000,000	90	11.576.250,000	90	12.155.062,000	Dinas P3AM
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	90	95	2.248.000.000,000	98	2.287.000.000,000	98	2.303.000.000,000	98	2.315.500.000,000	100	2.335.000.000,000	Dinas P3AM
			Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	0	20		21		25		27		30		
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	83	100	9.937.557.706,000	100	10.434.435.591,000	100	10.956.157.371,000	100	10.956.157.371,000	100	10.956.157.371,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	0	2,7815	882.023.222,000	2,7905	970.225.544,000	2,8105	1.067.248.099,000	2,8217	1.173.972.908,000	2,8267	1.291.370.199,000	
			Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	70	75		75		80		80		80		
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	-	100	406.500.000,000	100	412.500.000,000	100	417.500.000,000	100	422.500.000,000	100	427.500.000,000	Bakesbangpol
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	-	67	1.765.000.000,000	70	1.778.500.000,000	72	1.791.000.000,000	75	1.803.500.000,000	77	1.814.000.000,000	Bakesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	-	55	1.271.500.000,000	60	1.281.250.000,000	65	1.289.500.000,000	70	1.299.250.000,000	75	1.307.500.000,000	Bakesbangpol
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	60	60	1.886.000.000,000	60	2.168.900.000,000	70	2.494.235.000,000	75	2.868.370.250,000	80	3.298.625.788,000	Kecamatan Binjai Selatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	70	1.865.412.414,000	73	1.958.683.035,000	75	2.056.617.186,000	77	2.159.448.046,000	80	2.267.420.448,000	Kecamatan Binjai Kota
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	70	1.900.000.000,000	73	2.185.000.000,000	75	2.512.750.000,000	77	2.889.662.500,000	80	3.323.111.875,000	Kecamatan Binjai Timur

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	70	2.170.000.000,000	73	2.278.500.000,000	75	2.392.425.000,000	77	2.512.046.250,000	80	2.637.648.563,000	Kecamatan Binjai Utara
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.272.946.844,000		1.298.888.871,000		1.328.722.201,000		1.363.030.531,000		1.402.485.111,000	Kecamatan Binjai Selatan
			Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	70	70		73		75		77		80		Kecamatan Binjai Barat
		8. Menguatnya pemanfaatan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya lokal dalam pembangunan													
		Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	-	0,16	420.000.000,000	0,17	462.000.000,000	0,17	506.800.000,000	0,17	602.000.000,000	0,18	607.800.000,000	Dinas Pariwisata
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	96,77	96,77	0,000	98,38	20.000.000,000	98,38	100.000.000,000	98,38	20.000.000,000	100	50.000.000,000	Dinas Pariwisata
			Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	-	-		1		-		-		1		
		Program Pembinaan Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	-	0,0001	0,000	0,0001	25.000.000,000	0,0001	0,000	0,0001	0,000	0,0001	0,000	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	77,27	77,27	70.000.000,000	77,27	72.000.000,000	77,27	54.800.000,000	80,30	97.000.000,000	80,30	60.000.000,000	Dinas Pariwisata
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	4,55	4,57	1.070.000.000,000	4,58	182.800.000,000	4,59	180.000.000,000	4,60	196.760.000,000	4,61	193.800.000,000	Dinas Pariwisata

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	75	5	730.000.000,000	5,5	234.000.000,000	6,5	288.000.000,000	6,8	241.000.000,000	7	295.000.000,000	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	2	130.000.000,000	3	137.000.000,000	5	134.800.000,000	7	137.000.000,000	9	139.800.000,000	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	1,15	1,2	50.000.000,000	1,25	150.000.000,000	1,3	50.000.000,000	1,35	150.000.000,000	1,4	50.000.000,000	Dinas Pariwisata
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	-	100	406.500.000,000	100	412.500.000,000	100	417.500.000,000	100	422.500.000,000	100	427.500.000,000	Bakesbangpol
		Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	100	70,54	1.000.000.000,000	70,56	1.200.000.000,000	70,58	1.400.000.000,000	70,60	1.600.000.000,000	70,02	1.800.000.000,000	Dinas Pendidikan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	100	100	39.231.775.200,000	100	41.193.363.960,000	100	43.253.032.158,000	100	45.415.683.765,000	100	47.686.467.954,000	Dinas Pendidikan
			Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)	100	79,88		79,90		79,92		79,94		79,96		Dinas Pendidikan

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	7. Terwujudnya sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan berkelanjutan														
		9. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendukung pembangunan berkelanjutan													
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	45	78	12.000.000.000,000	80	12.000.000.000,000	83	12.000.000.000,000	85	12.000.000.000,000	90	12.000.000.000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	27	30	6.000.000.000,000	35	6.100.000.000,000	40	6.000.000.000,000	45	6.000.000.000,000	50	6.000.000.000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air limbah Domestik Layak dan aman)	50	52	6.300.000.000,000	53	4.800.000.000,000	54	6.400.000.000,000	55	4.800.000.000,000	56	6.400.000.000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	90	92	14.500.000.000,000	93	9.000.000.000,000	94	7.600.000.000,000	95	8.300.000.000,000	96	8.000.000.000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang jalan dalam kondisi Baik	92	92,5	12.100.000.000,000	93	12.100.000.000,000	93,5	12.100.000.000,000	94	12.100.000.000,000	94,5	12.100.000.000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi pada pelaksanaan kegiatan		100	500.000.000,000	100	500.000.000,000	100	500.000.000,000	100	500.000.000,000	100	500.000.000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	32,87	37,37	750.000.000,000	41,87	750.000.000,000	46,37	750.000.000,000	50,87	750.000.000,000	55,37	750.000.000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam kondisi baik	85	86	5.000.000.000,000	87	5.100.000.000,000	88	5.000.000.000,000	89	5.100.000.000,000	90	5.000.000.000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional		5	500.000.000,000	10	500.000.000,000	15	500.000.000,000	20	500.000.000,000	25	500.000.000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	0	12	1.500.000.000,000	15	1.500.000.000,000	18	1.500.000.000,000	20	1.500.000.000,000	25	1.500.000.000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	32,58	33,62	1.000.000.000,000	34,15	1.000.000.000,000	34,68	1.000.000.000,000	35,20	1.000.000.000,000	35,73	1.000.000.000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	29,04	30,11	10.130.000.000,000	30,65	10.130.000.000,000	31,17	10.130.000.000,000	31,75	10.130.000.000,000	32,31	10.130.000.000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	100	100	39.231.775.200,000	100	41.193.363.960,000	100	43.253.032.158,000	100	45.415.683.765,000	100	47.686.467.954,000	Dinas Pendidikan
			Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)	100	79,88		79,90		79,92		79,94		79,96		Dinas Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Jumlah Kematian Ibu (Kasus)	1	3	61.313.331.779,000	2	62.754.938.944,000	2	65.759.759.349,000	2	67.945.513.898,000	1	68.740.673.898,000	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	22,3	17,2		16,2		15,2		14,4		14		
			Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	80	80	37.597.547.125,000	80	41.357.301.838,000	80	45.493.032.021,000	80	50.042.335.223,000	80	55.046.568.746,000	RSUD DR.RM. Djoelham Kota Binjai

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	10	10	1.808.500.000,000	10	1.868.000.000,000	10	1.927.000.000,000	10	1.987.500.000,000	10	2.048.000.000,000	Disnakerperindag
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	5,92	6,2	1.025.000.000,000	6,2	1.090.000.000,000	6,2	1.175.000.000,000	6,2	1.240.000.000,000	6,2	1.305.000.000,000	Disketapangtan
			Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	0,98	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	0,96	2,1		2,2		2,3		2,4		2,5		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	-	90,1	1.072.000.000,000	90,25	1.092.000.000,000	90,45	1.112.000.000,000	90,8	1.132.000.000,000	91,2	1.152.000.000,000	Disketapangtan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas darat	363	365	Rp4.804.147.128	365	Rp5.000.000.000	365	Rp5.200.000.000	366	Rp5.400.000.000	367	Rp5.600.000.000	Dinas Perhubungan
			Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,79	0,80		0,80		0,80		0,80		0,80		Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	-	70,45	2.231.190.680,000	72,25	2.677.428.816,000	75	3.212.914.579,200	80	3.855.497.495,040	83,24	4.626.596.994,050	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3,12	1,8	2.704.411.000,000	1,8	3.218.393.200,000	1,9	3.832.481.840,000	1,9	4.566.429.208,000	2	5.443.911.150,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		10. Meningkatnya ketahanan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan													
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	n/a	0	190.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	33,33	300.000.000	0	70.000.000	DLH
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	53,33	83,09	425.000.000	83,29	425.000.000	83,49	425.000.000	83,69	425.000.000	83,89	425.000.000	DLH
			Indeks Kualitas Udara	88,51	81,02		81,22		81,42		81,62		81,82		DLH
			Persentase RTH	14,25	16,25	2.500.000.000	17,25	2.500.000.000	18,25	2.500.000.000	19,25	2.500.000.000	20,25	2.500.000.000	DLH

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Indeks Kualitas Lahan	22,4	47,06		47,06		47,2		47,27		47,34		DLH
			Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		DLH
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	n/a	100%	310.000.000	100%	310.000.000	100%	310.000.000	100%	310.000.000	100%	310.000.000	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	n/a	63,64	50.000.000	72,73	50.000.000	81,82	50.000.000	90,91	50.000.000	100	50.000.000	DLH
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	n/a	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	DLH
			Porsi EBT dalam Bauran Energi	n/a	2		3		5		7		10		DLH
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	n/a	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	DLH
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	n/a	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	DLH
		Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	n/a	30,5	8.800.000.000	31	8.875.000.000	31,5	8.800.000.000	32%	8.800.000.000	32,5	8.800.000.000	DLH
			Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	n/a	65		70		75		80		85		DLH
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	5,92	6,2	1.025.000.000,000	6,2	1.090.000.000,000	6,2	1.175.000.000,000	6,2	1.240.000.000,000	6,2	1.305.000.000,000	Disketapangtan
			Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	0,98	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	0,96	2,1		2,2		2,3		2,4		2,5		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	-	90,1	1.072.000.000,000	90,25	1.092.000.000,000	90,45	1.112.000.000,000	90,8	1.132.000.000,000	91,2	1.152.000.000,000	Disketapangtan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	0	90	1.050.000.000,000	90	1.050.000.000,000	90	1.050.000.000,000	90	1.050.000.000,000	90	1.050.000.000,000	Disketapangtan
			Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	0	90		90		90		90		90		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	45	78	12.000.000.000,000	80	12.000.000.000,000	83	12.000.000.000,000	85	12.000.000.000,000	90	12.000.000.000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air limbah Domestik Layak dan aman)	50	52	6.300.000.000,000	53	4.800.000.000,000	54	6.400.000.000,000	55	4.800.000.000,000	56	6.400.000.000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	32,87	37,37	750.000.000,000	41,87	750.000.000,000	46,37	750.000.000,000	50,87	750.000.000,000	55,37	750.000.000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam kondisi baik	85	86	5.000.000.000,000	87	5.100.000.000,000	88	5.000.000.000,000	89	5.100.000.000,000	90	5.000.000.000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional		5	500.000.000,000	10	500.000.000,000	15	500.000.000,000	20	500.000.000,000	25	500.000.000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	-	7	545.000.000,000	7,2	705.000.000,000	7,3	732.000.000,000	7,4	750.000.000,000	7,5	761.000.000,000	Disnakerperindag
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	5.000.000,000	100	16.000.000,000	100	17.000.000,000	100	18.000.000,000	100	19.000.000,000	Disnakerperindag

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	8. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik														
		11. Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya													
		Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	95,1	96	2.786.891.456,000	96,20	2.914.986.029,000	96,80	3.060.735.330,000	97	3.213.772.097,000	97,20	3.374.460.702,000	Bapperida
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100		100		100		100		100		
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	22,04	23	1.672.315.000,000	23	1.436.746.500,000	23	1.565.921.150,000	23	1.708.013.265,000	23	2.152.314.591,000	BKPSDM
			Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	25	25	2.000.000,000	25	32.200.000,000	25	32.420.000,000	25	32.662.000,000	25	32.928.200,000	
			Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	5,07	6	10.000.000,000	6	45.000.000,000	6	45.000.000,000	6	45.000.000,000	6	45.000.000,000	
			Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	5,01	6	498.000.000,000	6	547.800.000,000	6	602.580.000,000	6	662.838.000,000	6	729.121.800,000	
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	77,03	87	1.474.176.345,000	87	1.621.593.977,000	87	1.783.753.375,000	87	1.962.128.712,000	87	2.158.341.583,000	BKPSDM
			Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	16,10	17	266.381.127,000	18	411.622.234,000	18	710.672.468,000	19	668.414.716,000	19	763.156.188,000	

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	91	94	347.095.578,000	95	381.885.145,000	96	419.985.647,000	96	461.984.212,000	100	508.182.633,000	
			Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	13,08	15	148.901.007,000	16	163.691.106,000	17	179.960.218,000	18	197.856.239,000	19	217.541.863,000	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	74,92	80	1.187.323.991,000	81	1.234.816.951,000	82	1.284.209.629,000	83	1.335.578.014,000	84	1.389.001.135,000	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3,048	3,06	598.582.215,000	3,07	622.525.503,000	3,08	647.426.524,000	3,09	673.323.585,000	3,1	700.256.528,000	Inspektorat
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3,00	3,04		3,06		3,08		3,10		3,12		
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	26.485.000.000,000	100	26.485.000.000,000	100	26.485.000.000,000	100	26.485.000.000,000	100	26.485.000.000,000	Sekretariat DPRD
			Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	50	100		100		100		100		100		
			Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	2.765.000.000,000	100	2.765.000.000,000	100	2.765.000.000,000	100	2.765.000.000,000	100	2.765.000.000,000	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	83	100	9.937.557.706,000	100	10.434.435.591,000	100	10.956.157.371,000	100	10.956.157.371,000	100	10.956.157.371,000	Bagian Pemerintahan
						533.462.992,000		532.581.112,000		561.848.592,000		604.223.121,000		638.145.356,000	
			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	0	2,7815	882.023.222,000	2,7905	970.225.544,000	2,8105	1.067.248.099,000	2,8217	1.173.972.908,000	2,8267	1.291.370.199,000	
			Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	70	75		75		80		80		80		
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	35,56	40	520.000.000,000	40	520.000.000,000	40	520.000.000,000	40	590.000.000,000	40	590.000.000,000	Bagian Perekonomian
						232.565.018,000		241.867.619,000		251.542.323,000		261.604.016,000		272.068.177,000	

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	80	100	720.765.573,000	100	792.842.129,000	100	872.126.341,000	100	959.338.975,000	100	1.055.272.871,000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	10.509.851	100	10.720.048	100	10.934.449	100	11.153.138	100	11.376.201	Kecamatan Binjai Kota
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KECAMATAN	100.000.000	12	115.000.000	12	132.250.000	12	152.087.500	12	174.900.625	12	201.135.719	Kecamatan Binjai Selatan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELESAIAN MASALAH DI BIDANG PEMERINTAHAN		71	100.000.000	72	115.000.000	73	132.250.000	74	152.087.500	75	174.900.625	Kecamatan Binjai Timur
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	80.000.000	100	81.600.000	100	83.232.000	100	84.896.640	100	86.594.573	Kecamatan Binjai Utara
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Masalah di Bidang Pemerintahan	812.912.000	82	827.848.800	82	971.526.120	83	1.136.755.038	83	1.326.768.294	84	1.545.283.538	Kecamatan Binjai Barat
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	10	32.389.010,000	10	35.000.000,000	10	37.000.000,000	10	38.000.000,000	10	40.000.000,000	Dinas Perpustakaan
		Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	0	50	172.000.000,000	50	183.500.000,000	50	198.500.000,000	50	198.500.000,000	50	198.500.000,000	Dinas Perpustakaan
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	0	20	33.000.000,000	20	37.000.000,000	20	37.000.000,000	20	40.000.000,000	20	42.000.000,000	Dinas Perpustakaan

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	0	5	10.000.000,000	5	10.000.000,000	5	12.000.000,000	5	15.000.000,000	5	17.000.000,000	Dinas Perpustakaan
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	4,34	5,5	700.119.350,000	6,2	735.125.317,000	6,8	771.881.582,000	7,5	810.475.661,000	8,15	850.999.444,000	Disdukcapil
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	58,75	75,20		80		85		85,5		90,5		
			Rate Nett Recent Migrasi (Nilai)	0,94	0,96		0,97		0,98		0,99		1		
		Program Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	99,87	99,89	226.100.000,000	99,90	237.405.000,000	99,91	249.275.250,000	99,92	261.739.012,000	99,93	274.825.962,000	Disdukcapil
			Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	48,25	75,25		75,35		75,45		75,65		76		
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	78	85,85		86		86,05		86,15		86,20		
			Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	78,21	78,25		78,27		78.30.78		78,32		78,33		
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100	100	103.500.000,000	100	108.675.000,000	100	114.108.750,000	100	119.814.187,000	100	125.804.896,000	Disdukcapil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	1	1	32.800.000,000	1	34.440.000,000	1	36.162.000,000	1	37.970.100,000	1	39.868.605,000	Disdukcapil
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	-	70,45	2.231.190.680,000	72,25	2.677.428.816,000	75	3.212.914.579,200	80	3.855.497.495,040	83,24	4.626.596.994,050	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3,12	1,8	2.704.411.000,000	1,8	3.218.393.200,000	1,9	3.832.481.840,000	1,9	4.566.429.208,000	2	5.443.911.150,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	-	2	232.958.500,000	2,25	279.550.200,000	2,4	335.460.240,000	2,5	402.552.288,000	2,6	483.062.745,600	Dinas Komunikasi dan Informatika

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	-	1,6	145.790.000,000	1,8	174.948.000,000	2	209.937.600,000	2,3	251.925.120,000	2,6	302.310.144,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	0	0	20.000.000.000,000	100	20.000.000.000,000	0	20.000.000.000,000	0	20.000.000.000,000	0	20.000.000.000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		12. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintahan													
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	60	60	1.886.000.000,000	60	2.168.900.000,000	70	2.494.235.000,000	75	2.868.370.250,000	80	3.298.625.788,000	Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai
			Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	70	1.865.412.414,000	73	1.958.683.035,000	75	2.056.617.186,000	77	2.159.448.046,000	80	2.267.420.448,000	Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai
			Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	70	1.900.000.000,000	73	2.185.000.000,000	75	2.512.750.000,000	77	2.889.662.500,000	80	3.323.111.875,000	Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai
			Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	70	2.170.000.000,000	73	2.278.500.000,000	75	2.392.425.000,000	77	2.512.046.250,000	80	2.637.648.563,000	Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai
						1.272.946.844,000		1.298.888.871,000		1.328.722.201,000		1.363.030.531,000		1.402.485.111,000	Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai
			Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	70	70		73		75		77		80		Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	60	60	92.000.000,000	60	105.800.000,000	70	121.670.000,000	75	139.920.500,000	80	160.908.575,000	Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai
			Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	25.149.410,000	100	25.652.398,000	100	26.165.446,000	100	26.688.755,000	100	27.222.530,000	Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai
			Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	65.000.000,000	100	74.750.000,000	100	85.962.500,000	100	98.856.875,000	100	113.685.406,000	Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai
			Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	20.000.000,000	100	21.000.000,000	100	22.050.000,000	100	23.152.500,000	100	24.310.125,000	Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai
						40.154.500,000		41.677.675,000		43.429.326,000		45.443.725,000		47.760.284,000	Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	4,34	5,5	700.119.350,000	6,2	735.125.317,000	6,8	771.881.582,000	7,5	810.475.661,000	8,15	850.999.444,000	Disdukcapil
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	58,75	75,20		80		85		85,5		90,5		
			Rate Nett Recent Migrasi (Nilai)	0,94	0,96		0,97		0,98		0,99		1		
		Program Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	99,87	99,89	226.100.000,000	99,90	237.405.000,000	99,91	249.275.250,000	99,92	261.739.012,000	99,93	274.825.962,000	Disdukcapil
			Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	48,25	75,25		75,35		75,45		75,65		76		
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	78	85,85		86		86,05		86,15		86,20		
			Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	78,21	78,25		78,27		78.30. 78		78,32		78,33		
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100	100	103.500.000,000	100	108.675.000,000	100	114.108.750,000	100	119.814.187,000	100	125.804.896,000	Disdukcapil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	1	1	32.800.000,000	1	34.440.000,000	1	36.162.000,000	1	37.970.100,000	1	39.868.605,000	Disdukcapil
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	-	70,45	2.231.190.680,000	72,25	2.677.428.816,000	75	3.212.914.579,200	80	3.855.497.495,040	83,24	4.626.596.994,050	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	61,44	71,44	250.000.000,000	76,44	275.000.000,000	81,44	302.500.000,000	86,44	332.750.000,000	91,44	366.025.000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	70	75	150.000.000,000	75	165.000.000,000	75	181.500.000,000	75	199.650.000,000	75	219.615.000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	-	67	167.500.000,000	70	172.750.000,000	72	177.500.000,000	75	182.750.000,000	77	187.500.000,000	Bakesbangpol
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	-	100	406.500.000,000	100	412.500.000,000	100	417.500.000,000	100	422.500.000,000	100	427.500.000,000	Bakesbangpol
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	83	100	9.937.557.706,000	100	10.434.435.591,000	100	10.956.157.371,000	100	10.956.157.371,000	100	10.956.157.371,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Binjai
						533.462.992,000		532.581.112,000		561.848.592,000		604.223.121,000		638.145.356,000	Bagian Hukum Setda Kota Binjai
			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	0	2,7815	882.023.222,000	2,7905	970.225.544,000	2,8105	1.067.248.099,000	2,8217	1.173.972.908,000	2,8267	1.291.370.199,000	Bagian Pemerintahan Setda Kota Binjai
			Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	70	75		75		80		80		80		Bagian Pemerintahan Setda Kota Binjai
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat		100%	9.937.557.706	100%	10.434.435.591	100%	10.956.157.371	100%	10.956.157.371	100%	10.956.157.371	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		13. Meningkatnya kapasitas perencanaan dan keuangan daerah													
		Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	95,1	96	2.786.891.456,000	96,20	2.914.986.029,000	96,80	3.060.735.330,000	97	3.213.772.097,000	97,20	3.374.460.702,000	Bapperida
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100		100		100		100		100		
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	95,29	96	850.000.000,000	96,20	850.000.000,000	96,80	850.000.000,000	97	865.000.000,000	97,20	900.000.000,000	Bapperida

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			Persentase Capaian Aksi HAM (%)	0	71,25		72,50		73,75		75,00		76,25		Bapperida
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	21	50	750.000.000,000	55	800.000.000,000	57	1.100.000.000,000	60	1.200.000.000,000	65	1.100.000.000,000	Bapperida
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	55	65	900.000.000,000	70	900.000.000,000	75	900.000.000,000	80	900.000.000,000	85	900.000.000,000	
			Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	80	95	1.150.000.000,000	95	1.150.000.000,000	97	1.150.000.000,000	98	1.150.000.000,000	100	1.150.000.000,000	
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	65	2.200.000.000,000	70	2.500.000.000,000	75	2.300.000.000,000	80	2.500.000.000,000	85	2.500.000.000,000	
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	60	1.400.000.000,000	65	1.545.000.000,000	70	1.590.000.000,000	75	1.620.000.000,000	80	1.673.000.000,000	Bapperida
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	0	60	520.000.000,000	65	520.000.000,000	70	520.000.000,000	75	520.000.000,000	80	520.000.000,000	
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	60	350.000.000,000	65	350.000.000,000	70	350.000.000,000	75	350.000.000,000	80	350.000.000,000	

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	80	95	1.200.000.000,000	95	1.200.000.000,000	97	1.200.000.000,000	98	1.200.000.000,000	100	1.200.000.000,000	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	42,90	35,00	22.350.000.000,000	30,00	23.467.500.000,000	30,00	24.585.000.000,000	30,00	25.702.500.000,000	30,00	26.820.000.000,000	BPKPD
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	11,57	35		40		40		40		40		
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	89,9	100	1.650.000.000,000	100	1.732.500.000,000	100	1.815.000.000,000	100	1.897.500.000,000	100	1.980.000.000,000	
			Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	-.169,38	1,00		0,90		0,80		0,70		0,60		
			Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	1.700.000.000,000	100	1.785.000.000,000	100	1.870.000.000,000	100	1.955.000.000,000	100	2.040.000.000,000	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	-2,16	-1,50	900.000.000,000	-0,50	945.000.000,000	0,50	990.000.000,000	1,00	1.035.000.000,000	2,00	1.080.000.000,000	BPKPD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	12,14	12,50	6.200.000.000,000	13,00	6.510.000.000,000	13,50	6.820.000.000,000	14,00	7.130.000.000,000	14,50	7.440.000.000,000	BPKPD
			Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	99,96	100	100.000.000,000	100	105.000.000,000	100	110.000.000,000	100	115.000.000,000	100	120.000.000,000	
			Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100	100	100.000.000,000	100	105.000.000,000	100	110.000.000,000	100	115.000.000,000	100	120.000.000,000	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	22,04	23	1.672.315.000,000	23	1.436.746.500,000	23	1.565.921.150,000	23	1.708.013.265,000	23	2.152.314.591,000	BKPSDM
			Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	25	25	2.000.000,000	25	32.200.000,000	25	32.420.000,000	25	32.662.000,000	25	32.928.200,000	

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	5,07	6	10.000.000,000	6	45.000.000,000	6	45.000.000,000	6	45.000.000,000	6	45.000.000,000	
			Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	5,01	6	498.000.000,000	6	547.800.000,000	6	602.580.000,000	6	662.838.000,000	6	729.121.800,000	
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	77,03	87	1.474.176.345,000	87	1.621.593.977,000	87	1.783.753.375,000	87	1.962.128.712,000	87	2.158.341.583,000	BKPSDM
			Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	16,10	17	266.381.127,000	18	411.622.234,000	18	710.672.468,000	19	668.414.716,000	19	763.156.188,000	
			Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	91	94	347.095.578,000	95	381.885.145,000	96	419.985.647,000	96	461.984.212,000	100	508.182.633,000	
			Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	13,08	15	148.901.007,000	16	163.691.106,000	17	179.960.218,000	18	197.856.239,000	19	217.541.863,000	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	74,92	80	1.187.323.991,000	81	1.234.816.951,000	82	1.284.209.629,000	83	1.335.578.014,000	84	1.389.001.135,000	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3,048	3,06	598.582.215,000	3,07	622.525.503,000	3,08	647.426.524,000	3,09	673.323.585,000	3,1	700.256.528,000	Inspektorat
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3,00	3,04		3,06		3,08		3,10		3,12		
	9. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat														
		14. Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat													

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	897.351.784,000	100	987.086.962,000	100	1.085.795.659,000	100	1.194.375.225,000	100	1.313.812.747,000	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai
						117.670.859,000		129.437.945,000		142.381.739,000		156.619.913,000		172.281.905,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai
						1.093.378.798,000		1.202.716.678,000		1.322.988.346,000		1.455.287.180,000		1.600.815.898,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai
						410.500.000,000		451.550.000,000		496.705.000,000		546.375.500,000		601.013.050,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
			Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	0	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	BPBD
			Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	0	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	
			Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	0	100	43.535.400.000,000	100	7.750.400.000,000	100	7.805.400.000,000	100	7.805.400.000,000	100	7.615.400.000,000	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	0	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	BPBD
			Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	0	100	1.369.000.000,000	100	1.299.000.000,000	100	1.264.000.000,000	100	1.244.000.000,000	100	1.264.000.000,000	

Misi	Tujuan	Sasaran / Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat (Persentase)	363	365	4.804.147.128,000	365	5.000.000.000,000	365	5.200.000.000,000	366	5.400.000.000,000	367	5.600.000.000,000	Dinas Perhubungan
			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	86,15	87		87,20		87,55		88		88,40		Dinas Perhubungan
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			533.462.992,000		532.581.112,000		561.848.592,000		604.223.121,000		638.145.356,000	648.427.601	Bagian Hukum

4.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) di Kota Binjai dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kota Binjai 2025-2029, yang telah memperhatikan RPJPD Kota Binjai 2025-2045 serta memperhitungkan permasalahan dan isu-isu strategis yang ada di daerah. Visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut mencerminkan capaian strategis yang diinginkan, yang menunjukkan tingkat keberhasilan tertinggi dalam pembangunan Kota Binjai. Ini menjadi dasar bagi penyusunan struktur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pengukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Binjai selama periode 2025-2029 dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, yang mencerminkan sejauh mana rencana pembangunan daerah tersebut berhasil dijalankan.

Penentuan target atas indikator-indikator terpilih, baik indikator yang menjadi sasaran utama pembangunan maupun indikator utama pembangunan (Indikator Emas) perlu dilakukan penyelarasan atas target yang ditetapkan RPJMN maupun RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sebagai upaya untuk berada di dalam satu garis yang sama, dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Selain itu, RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 merupakan penterjemahan tahap I dari RPJPD Kota Binjai, sehingga indikator kinerja yang tertuang di dalam dokumen RPJPD dapat diintervensi secara terukur dan kontinyu. Adapun penyelarasan atas indikator sasaran utama dan indikator utama pembangunan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 3. Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Kota Binjai dengan Sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

NO	RPJM NASIONAL (sasaran per provinsi)	TARGET		RPJMD PROVINSI	TARGET		RPJMD BINJAI	TARGET	
	TAHUN 2025-2029	2025	2029	TAHUN 2025-2029	2025	2029	TAHUN 2025-2029	2025	2029
	TRANSFORMASI SOSIAL								
	Kesehatan untuk Semua								
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	74,54	Usia Harapan Hidup (tahun)	73,73	74,54	Usia Harapan Hidup (tahun)	75,14	76,00
2.a	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	94	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	94	Jumlah Kasus Kematian Ibu (kasus)	3	2
2.b	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,4	12,3	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,4	12,3	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,2	14,4
3.a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	90	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	90	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	90
3.b	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	90	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	90	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	90
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	98,6	99
	Pendidikan Berkualitas yang Merata								
5.a.1	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	i. Literasi Membaca	6,06-12,12	27,27-30,30	i. Literasi Membaca	6,06-12,12	27,27-30,30	i. Literasi Membaca	59,16	63,54
	ii. Numerasi	0,00-3,03	6,06-9,09	ii. Numerasi	0,00-3,03	6,06-9,09	ii. Numerasi	48,23	52,37
5.b	b) Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			b) Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			b) Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	i. Literasi Membaca	35,99-38,49	41,53-44,03	i. Literasi Membaca	35,99-38,49	41,53-44,03	i. Literasi Membaca	59,16	63,54
	ii. Numerasi	33,70-36,20	37,70-40,20	ii. Numerasi	33,70-36,20	37,70-40,20	ii. Numerasi	48,23	52,37
5.c	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,3 - 10,33	10,83 - 10,84	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,3 - 10,33	10,83 - 10,84	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,49	12,13
5.d	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,61 - 13,63	13,86 - 13,87	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,61 - 13,63	13,86 - 13,87	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,27	14,61

NO	RPJM NASIONAL (sasaran per provinsi)	TARGET		RPJMD PROVINSI	TARGET		RPJMD BINJAI	TARGET	
	TAHUN 2025-2029	2025	2029	TAHUN 2025-2029	2025	2029	TAHUN 2025-2029	2025	2029
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,12	11,12-11,40	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,12	11,12-11,40	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11	19
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	71,1	76,59	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	71,1	76,59	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	10	20
	Perlindungan Sosial yang Adaptif								
8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,16	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,16	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	4,26-4,66	3,90-4,30
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,27	40,61	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,27	40,61	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	68,00	75,75
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	27	27,8	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	27	27,8	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	18,25	26,36
	TRANSFORMASI EKONOMI								
	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi								
11.a	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	19,00-19,50	20,41-21,00	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	19,00-19,50	20,41-21,00	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11,70	12,93
11.b	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,2	7,8	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,2	7,8	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,0	4,8
12.a	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	2,73	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	2,73	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	5,76	6,16
12.b	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang)	300-350	421	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang)	300-350	421	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)	3	3
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	5,45	5,65	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	5,45	5,65	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	6,0	14,0
14.a	Proporsi jumlah UKM (%)	3,20	3,51	Proporsi jumlah UKM (%)	3,20	3,51	Proporsi jumlah UKM (%)	96,40	96,00
14.b	Rasio Kewirausahaan	3,63	4,06	Rasio Kewirausahaan	3,63	4,06	Rasio Kewirausahaan	4,68	5,68
14.c	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)	0,79	0,81	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)	0,79	0,81	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)	0,61	0,75
14.d	ROA BUMD	1,24	1,97	ROA BUMD	1,24	1,97	ROA BUMD	-10,23	-6,27
15.a	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27-5,56	4,74-5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27-5,56	4,74-5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,07-5,40	4,05-4,30
15.b	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	43	50,4	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	43	50,4	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	54,89	55,69

NO	RPJM NASIONAL (sasaran per provinsi)	TARGET		RPJMD PROVINSI	TARGET		RPJMD BINJAI	TARGET	
	TAHUN 2025-2029	2025	2029	TAHUN 2025-2029	2025	2029	TAHUN 2025-2029	2025	2029
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29-61,67	59,48-63,87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29-61,67	59,48-63,87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	49,30	49,70
17	Indeks Inovasi Daerah	57,50-60,01	62,26-63,01	Indeks Inovasi Daerah	57,50-60,01	62,26-63,01	Indeks Inovasi Daerah	52,35	55,22
	Penerapan Ekonomi Hijau								
18.a	Indeks Ekonomi Hijau	51,12	51,18	Indeks Ekonomi Hijau	51,12	51,18	Indeks Ekonomi Hijau	51,15	51,19
							Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,94	4,6
18.b	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	21,49	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	21,49	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,00	22,00
	Transformasi Digital								
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	6,9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	6,9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,79	7,27
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global								
20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	10,1	9,5	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	10,1	9,5	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	10	10
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	29,76-30,04	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	29,76-30,04	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	33,62	33,62
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45-16,54	17,13-17,41	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45-16,54	17,13-17,41	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	27,25	28,50
	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi								
23.a	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	2,26	2,33	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	2,26	2,33	Kontribusi PDRB Kota Binjai terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara	1,30	1,32
23.b	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	81,01	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	81,01	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	91,59	93,69
23.c	Persentase Desa Mandiri (%)	8,44	8,93	Persentase Desa Mandiri (%)	8,44	8,93			
	TRANSFORMASI TATA KELOLA								
	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif								
24	Indeks Reformasi Hukum	70	71,5	Indeks Reformasi Hukum	70	71,5	Indeks Reformasi Hukum	70,00	75,00
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	3,71	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	3,71	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,24	3,68
26	Indeks Pelayanan Publik	3,57	3,69	Indeks Pelayanan Publik	3,57	3,69	Indeks Pelayanan Publik	2,35	2,71
27	Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51	Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51	Indeks Integritas Nasional	66,78	70,20

NO	RPJM NASIONAL (sasaran per provinsi)	TARGET		RPJMD PROVINSI	TARGET		RPJMD BINJAI	TARGET	
	TAHUN 2025-2029	2025	2029	TAHUN 2025-2029	2025	2029	TAHUN 2025-2029	2025	2029
	SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA								
	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial								
28	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	75,7	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	75,7	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	58,00	62,00
	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60	70	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60	70	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	70,00	75,00
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	58,5	62	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	58,5	62	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	90	97
30	Indeks Demokrasi Indonesia	82,58-85,83	86,83-90,08	Indeks Demokrasi Indonesia	82,58-85,83	86,83-90,08	Indeks Demokrasi Indonesia	70	86
	Stabilitas Ekonomi Makro								
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,37	1,55	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,37	1,55	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,50	0,62
32	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	1,4-3,7	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	1,4-3,7	Tingkat Inflasi (%)	2,00-4,00	2,00-4,00
33.a	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	28,77	33,92	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	28,77	33,92	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	40,05	40,25
33.b	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	0,13	0,14	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	0,13	0,14	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	10	21
33.d	Nilai Transaksi Saham Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	8.103.064,03	10.402.072,39	Nilai Transaksi Saham Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	8.103.064,03	10.402.072,39			
33.e	Total Kredit/PDRB (%)	25,7	31,49	Total Kredit/PDRB (%)	25,7	31,49			
34	Inklusi Keuangan (%)	97,52	97,88	Inklusi Keuangan (%)	97,52	97,88	Inklusi Keuangan (%)	3,54	3,70
	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan								
35	Jumlah Kerja Sama Provinsi Kembar/Bersaudara (Sister Province)	20	22	Jumlah Kerja Sama Provinsi Kembar/Bersaudara (Sister Province)	20	22	Jumlah Kerjasama Kota Binjai/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister City)	1	1
36	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	82	90	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	82	90			
	KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI								
	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju								
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44-55,48	57,56-57,67	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44-55,48	57,56-57,67	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54	54,8
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17-81,2	82,62-82,79	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17-81,2	82,62-82,79	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	70	73
	Keluarga Bekualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif								
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	73,67	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	73,67	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	63,8	65,2
40.a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	0,370	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	0,370	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,295	0,282

NO	RPJM NASIONAL (sasaran per provinsi)	TARGET		RPJMD PROVINSI	TARGET		RPJMD BINJAI	TARGET	
	TAHUN 2025-2029	2025	2029	TAHUN 2025-2029	2025	2029	TAHUN 2025-2029	2025	2029
	Lingkungan Hidup Berkualitas								
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,562	0,581	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,562	0,581			
42.a.i.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,2	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,2	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,19	74,88
42.b	RT dengan Akses Sanitasi Aman	10	15	RT dengan Akses Sanitasi Aman	10	15	RT dengan Akses Sanitasi Aman	5	15
42.c.1	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16	28	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16	28	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	60	80
42.c.2	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62	100	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62	100	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	72	79
	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan								
43.i.1	Konsumsi listrik per kapita	850	1282	Konsumsi listrik per kapita	850	1282	Konsumsi listrik per kapita	800	1.102
43.i.2	Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)	170,57	141,175	Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)	170,57	141,175			
43.ii.	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	7,35	4,48	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	7,35	4,48	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	7,48	6,88
43.iii.1	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,64		Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,64		Kapasitas Air Baku (m3/detik)	315,80	315,80
43.iii.2	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	40,95	53	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	40,95	53	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	0	10
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim								
44	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	157,53	152,55-147,69	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	157,53	152,55-147,69	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	103,0	101,5
45.a	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	10,06	12,92	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	10,06	12,92	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	85.611,89	163.003,13
45.b	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	19,04	25,38	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	19,04	25,38			

Indikator Kinerja Utama (IKU) merefleksikan tingkat pencapaian terhadap tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Binjai. IKU bersifat dependen, karena nilainya dipengaruhi oleh kinerja dari berbagai indikator makro lainnya yang berkontribusi terhadap pencapaian *ultimate outcome* pembangunan daerah. Sebagai indikator makro terpilih, IKU digunakan sebagai alat ukur utama dalam menilai kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga bersifat lintas perangkat daerah dan mencerminkan hasil kolaboratif seluruh OPD.

RPJMD Kota Binjai tahun 2025-2029 menetapkan sebanyak 14 indikator sebagai IKU Kota Binjai. Dari 14 indikator ini, ada sebanyak dua indikator (Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia) yang kinerjanya diharapkan dapat mendorong pencapaian misi 1. Kemudian, kinerja dari sembilan indikator (Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita, Kontribusi PDRB Kota Binjai terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, TPT, Indeks Pembangunan Keluarga, dan Indeks Ekonomi Hijau Daerah) sebagai manifestasi pencapaian Misi 2. Selanjutnya, pencapaian atas Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca ditetapkan sebagai gambaran tercapainya Misi 3, dan dua indikator (Indeks Reformasi Birokrasi, Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya) menjadi fokus untuk mencapai Misi 4. Adapun IKU RPJMD Kota Binjai beserta targetnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 4. Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Visi : Binjai Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan										
Misi 1 : Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan Serta Mendukung Program Makan Bergizi Gratis Bagi Anak Didik TK, SD dan SMP										
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,45	74,75	75,00	75,35	75,70	76,00	76,25	Seluruh OPD
2	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	78,67	79,52-79,12	80,36-79,96	81,21-80,81	82,05-81,65	82,90-82,50	83,75-83,35	Seluruh OPD
Misi 2 : Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan										
3	Tingkat Inflasi	Persen	2,12	2,00-4,00	2,00-4,00	2,00-4,00	2,00-4,00	2,00-4,00	2,00-4,00	Seluruh OPD
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,66	4,70-5,10	5,23-5,63	5,75-6,15	6,28-6,68	6,80-7,20	7,33-7,73	Seluruh OPD
5	PDRB per Kapita	Rp Juta	50,75	51,50	60,20	68,90	77,59	86,29	94,99	Seluruh OPD
6	Kontribusi PDRB Kota Binjai terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara	Persen	1,16	1,30	1,,31	1,31	1,32	1,32	1,33	Seluruh OPD
7	Rasio Gini	Indeks	0,318	0,316-0,314	0,313-0,311	0,311-0,309	0,308-0,306	0,306-0,304	0,304-0,302	Seluruh OPD
8	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,75	4,26-4,66	4,17-4,57	4,08-4,48	3,99-4,39	3,90-4,30	3,81-4,21	Seluruh OPD
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,44	5,07-5,40	4,88-5,14	4,61-4,86	4,33-4,60	4,05-4,30	3,77-4,00	Seluruh OPD
10	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	63,31:63.8	63,8:64,2	64,2:64,6	64,6:65	65:65,2	65,2:66	66:66,2	Seluruh OPD
11	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Poin	n/a	n/a	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	Seluruh OPD
Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan										
12	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	ton CO2eq	n/a	85.611,88	101.090,13	116.568,38	132.046,63	147.524,88	163.003,13	Seluruh OPD
Misi 4 : Mewujudkan penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kreatif.										
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Persen	66,48	70	71	72	73	74	75	Seluruh OPD
14	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	n/a	90	92	94	95	97	99	Seluruh OPD

4.3. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah indikator kinerja yang terdiri dari indikator kinerja makro dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada Permendagri nomor 18 tahun 2020. Indikator Kinerja Daerah (IKD) dibagi menjadi 4 aspek yaitu: 1. Geografi dan Demografi, 2. Aspek kesejahteraan Masyarakat; 3. Aspek daya saing daerah; dan 4. Aspek Pelayanan Umum.

Dalam rangka penyempurnaan dokumen evaluasi capaian pembangunan daerah, perlu ditambahkan ulasan kinerja setiap urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Secara umum, pada **urusan pendidikan**, capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah terus meningkat, meskipun masih ada kesenjangan kualitas antarwilayah; pada **urusan kesehatan**, indikator IPM dan angka harapan hidup mengalami perbaikan, tetapi prevalensi stunting masih memerlukan perhatian serius; pada **urusan pekerjaan umum dan Tata Ruang**, persentase jalan dalam kondisi mantap meningkat, meskipun keterbatasan anggaran masih menjadi kendala; pada **urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman**, pembangunan rumah layak huni dan akses air minum layak menunjukkan kemajuan, namun backlog perumahan tetap menjadi tantangan; pada **urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat**, sinergi antara aparat dan masyarakat cukup baik, tetapi masih perlu penguatan dalam mitigasi bencana; pada **urusan lingkungan hidup**, pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau terus ditingkatkan, meski target 30% RTH belum tercapai; pada **urusan perhubungan**, pelayanan transportasi publik dan infrastruktur pendukung mengalami peningkatan meskipun keterhubungan antarkawasan masih terbatas; pada **urusan tenaga kerja**, TPT menunjukkan tren menurun, tetapi penciptaan lapangan kerja baru harus lebih dipercepat; pada **urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**, capaian Indeks Pembangunan Gender dan partisipasi perempuan dalam pembangunan meningkat, walau masih perlu perbaikan pada aspek perlindungan anak; sementara untuk **urusan pilihan** seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, serta pariwisata, kontribusi terhadap PDRB daerah terus tumbuh, namun masih memerlukan penguatan daya saing dan hilirisasi produk. Ulasan komprehensif ini akan membuat evaluasi lebih utuh, akuntabel, serta menjadi pijakan yang lebih kuat dalam penyusunan RPJMD selanjutnya.

Tabel 4. 5. Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	**Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca**	**ton CO2eq**	**n/a**	**85.611,88**	**101.090,13**	**116.568,38**	**132.046,63**	**147.524,88**	**163.003,13**	**Seluruh OPD**
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	60,81	74,19	74,36	74,53	74,7	74,88	75,05	DLH
3	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	7,63	7,48	7,33	7,18	7,03	6,88	6,73	Dinas Ketapang dan Pertanian
4	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	87,25	88,22	89,22	90,32	91,52	92,82	94,22	Dinas Ketapang dan Pertanian
5	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh	n/a	800	850	900	1.000	1.102	1.200	Bag.Perekonomian
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	n/a	0	2,5	5	7,5	10	12,5	Dinas PUTR
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	n/a	5	7,5	10	12,5	15	17,5	Dinas PUTR
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	n/a	72	73,75	75,5	77,25	79	80,75	DLH
9	Indeks Risiko Bencana	Poin	103,2	103,18	103,16	103,14	103,12	103,1	103,08	BPBD
10	Kapasitas Air Baku / Kapasitas Tampungan Air	M3/Detik	n/a	315,8	315,8	315,8	315,8	315,8	315,8	Dinas PUTR
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	**Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**4,66**	**4,70-5,10**	**5,23-5,63**	**5,75-6,15**	**6,28-6,68**	**6,80-7,20**	**7,33-7,73**	**Seluruh OPD**
2	**Tingkat Kemiskinan**	**Persen**	**4,75**	**4,26-4,66**	**4,17-4,57**	**4,08-4,48**	**3,99-4,39**	**3,90-4,30**	**3,81-4,21**	**Seluruh OPD**
3	**PDRB per Kapita**	**Rp Juta**	**50,75**	**51,5**	**60,2**	**68,9**	**77,59**	**86,29**	**94,99**	**Seluruh OPD**

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	**Kontribusi PDRB Kota Binjai terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara**	**Persen**	**1,16**	**1,19**	**1,22**	**1,25**	**1,28**	**1,32**	**1,35**	**Seluruh OPD**
5	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**persen**	**5,44**	**5,07-5,40**	**4,88-5,14**	**4,61-4,86**	**4,33-4,60**	**4,05-4,30**	**3,77-4,00**	**Seluruh OPD**
6	**Rasio Gini**	**Indeks**	**0,318**	**0,312-0,311**	**0,311-0,310**	**0,310-0,309**	**0,308-0,306**	**0,306-0,304**	**0,304-0,302**	**Seluruh OPD**
7	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Persen**	**78,67**	**79,52-79,12**	**80,36-79,96**	**81,21-80,81**	**82,05-81,65**	**82,90-82,50**	**83,75-83,35**	**Seluruh OPD**
8	**Usia Harapan Hidup**	**Tahun**	**74,45**	**74,75**	**75**	**75,35**	**75,7**	**76**	**76,25**	**Seluruh OPD**
9	**Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**	**poin**	63.31:63.8	63.8:64.2	64.2:64.6	64.6:65	65:65.2	65.2:66	66:66.2	**Dinas PPKB**
10	Prevalensi Stunting	Persen	22,3	18,2	17,2	16,2	15,2	14,4	14	Dinas Kesehatan
11	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,2	11,49	11,64	11,8	11,97	12,13	12,28	Dinas Pendidikan
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,18	14,27	14,35	14,43	14,52	14,61	14,69	Dinas Pendidikan
13	Kemampuan Literasi Berkategori Baik Tingkat SD	persen	n/a	59,16	60,25	61,34	62,44	63,54	64,63	Dinas Pendidikan
14	Kemampuan Literasi Berkategori Baik Tingkat SMP	persen								Dinas Pendidikan
15	Kemampuan Numerasi Berkategori Baik Tingkat SD	persen	n/a	48,23	49,26	50,29	51,33	52,37	53,4	Dinas Pendidikan
16	Kemampuan Numerasi Berkategori Baik Tingkat SMP	persen								Dinas Pendidikan
17	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Binjai	persen	n/a	68	69,93	71,87	73,81	75,75	77,68	Disnakerperindag
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	n/a	70	70	72	72	73	73	Bakesbangpol

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	54	54	54,2	54,4	54,6	54,8	55	Dinas Pariwisata
20	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	poin	91,38	91,4	91,42	91,44	91,45	91,7	91,48	DP3AM
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	n/a	49,3	49,4	49,5	49,6	49,7	49,8	DP3AM/ Disnakerperindag
22	Persentase Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar budaya (Benda dan Tak Benda)	Persen	96,77	96,77	96,77	98,38	98,38	98,38	100	Dinas Pariwisata
23	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	Persen	n/a	18,25	20,27	22,3	24,33	26,36	28,38	Disnakerperindag
24	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Jumlah Penyandang Disabilitas	5	6	7	8	9	10	11	Disnakerperindag
25	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kota	Unit	1	1	1	1	1	1	1	Disnakerperindag
26	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	95,76	98,6	98,6	98,6	99	99	99	Dinas Kesehatan
27	Cakupan UHC	Persen	n/a	87,41	88,07	88,73	89,39	90,05	90,71	Dinas Kesehatan
28	Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	n/a	90	90	90	90	90	90	Dinas Kesehatan

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
29	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	87	90	90	90	90	90	90	Dinas Kesehatan
30	Indeks Pembangunan Olahraga	Poin	n/a	n/a	0,4	0,405	0,41	0,415	0,42	Dinas Pemuda dan Olahraga
31	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	57,25	49,9	50	52	55	59	64	Dinas Perpustakaan
32	Nilai Tukar Petani	n/a	n/a	90	90,1	90,25	90,45	90,8	91,2	Dinas Ketapang dan Pertanian
34	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan	Poin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Ketapang dan Pertanian
35	Indeks Perlindungan Anak	Poin	67,59	n/a	69,59	70,59	71,59	72,59	73,59	Dinas P3AM
36	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59	Bagian Kesra Setdako
37	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	n/a	60,00	61,00	63,00	65,00	67,00	70,00	Dinas Sosial
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	**Tingkat Inflasi**	**Persen**	**2,12**	**2,00-4,00**	**2,00-4,00**	**2,00-4,00**	**2,00-4,00**	**2,00-4,00**	**2,00-4,00**	**Seluruh OPD**
2	**Indeks Ekonomi Hijau Daerah**	**Poin**	**n/a**	**n/a**	**50**	**52**	**54**	**56**	**58**	**Seluruh OPD**
3	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas (angkatan kerja) yang berkualifikasi pendidikan tinggi	persen	10	11	12,5	14,5	16,5	19	21	Dinas Pendidikan
4	Persentase lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja	persen	n/a	10	12,5	15	17,5	20	22,5	Dinas Pendidikan

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	di bidang keahlian menengah tinggi atau menjadi wirausaha									
5	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah	Persen	n/a	10	10	10	10	10	10	Disnakerperindag
6	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	11,47	11,7	12	12,3	12,63	12,93	13,23	Disnakerperindag
7	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	n/a	6	8	10	12	14	16	Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, Disnakerperindag
8	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Persen	96,51	96,4	96,3	96,2	96,1	96	95,9	Dinas Koperasi dan UKM
9	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian pada Level Kota Binjai	Persen	n/a	10,66	10,79	10,93	11,07	11,21	11,34	Dinas Koperasi dan UKM
10	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Level Kota Binjai	Persen	n/a	5,04	5,33	5,62	5,91	6,2	6,49	Disnakerperindag
11	Rasio kewirausahaan daerah	Persen	4,43	4,68	4,93	5,18	5,43	5,68	5,93	Dinas Koperasi dan UKM
12	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Persen	n/a	0,61	0,65	0,68	0,72	0,75	0,79	Dinas Koperasi dan UKM
13	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Memiliki HAKI	Jumlah	n/a	1	2	3	5	7	9	Dispar, Disnaker, Diskop, Bapperida
14	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	54,69	54,89	55,09	55,29	55,49	55,69	55,89	Disnakerperindag
15	Indeks Inovasi Daerah	Poin/Skor	37,93	52,35	53,07	53,79	54,5	55,22	55,94	Bapperida
16	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	Persen	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	DPMPTSP

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
17	Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persen	26,96	27,25	27,5	27,75	28,1	28,5	28,9	Disnakerperindag
18	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	40	40,05	40,1	40,15	40,2	40,25	40,3	Bagian Perekonomian/ BPKPD
19	Aset Dana Pensiun/PDRB	Persen	n/a	10	13	16	19	21	24	Bagian Perekonomian/ BPKPD
20	Inklusi Keuangan	Poin	3,5	3,54	3,58	3,62	3,66	3,7	3,74	Bagian Perekonomian/ BPKPD
21	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	n/a	91,59	92,11	92,63	93,16	93,69	94,21	Dinas Perkim
22	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	5,66	5,76	5,86	5,96	6,06	6,16	6,26	Dinas Pariwisata
23	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Pariwisata
24	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	3,94	4	4,2	4,4	4,6	4,8	5	Dinas Ketapang dan Pertanian
25	Belanja Riset	Rp. Milyar	0,47	0,51	0,55	0,58	0,61	0,65	0,68	Bapperida
26	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	n/a	6,79	6,91	7,03	7,15	7,27	7,39	Dinas Kominfo
27	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Poin	43,88	49,5	52,12	54,74	57,37	60	62,62	Dinas Kominfo
28	Return on Asset (ROA) BUMD	Persen	n/a	-10,23	-9,24	-8,25	-7,26	-6,27	-5,28	Bagian Perekonomian
29	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,47	0,5	0,53	0,56	0,59	0,62	0,65	BPKPD

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
30	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Poin	83,3	84	84,5	85	85,5	86	86,5	Dinas PUTR
31	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Poin	3,75	3,0	3,9	4	4,02	4,1	4,15	Bapperida
32	Rasio Konektivitas	persen	n/a	90	91	92	93	94	95	Dinas Perhubungan
33	Pertumbuhan nilai investasi total	Persen	n/a	3%	5%	7%	9%	9%	9%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Persen**	**66,48**	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**	**75**	**Seluruh OPD**
2	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen	57,5	58	59	60	61	62	63	Satpol PP
3	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,01	4,01	4,01	4,1	4,15	4,25	4,55	Seluruh Dinas
4	Indeks Reformasi Hukum	Poin	98,98	70,00	71,25	72,50	73,75	75,00	76,25	Bagian Hukum
5	Indeks Integritas Nasional	Poin	69,41	72,31	75,43	78,25	79,51	80,35	81,05	Inspektorat
6	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	n/a	70	74	78	82	86	90	Bakesbangpol
7	Jumlah Kerjasama Kota Binjai/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister City)	Jumlah Kerjasama	1	1	1	1	1	1	1	Bagian Pemerintahan Setdako Binjai
8	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Obudsman)	Poin	93,15	93,15	93,15	93,15	93,5	93,75	94	Bagian Organisasi Setda
9	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen	n/a	70	71,25	72,5	73,75	75	76,25	Bagian Hukum
10	**Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya**	**Persen**	**n/a**	**90**	**92**	**94**	**95**	**97**	**99**	**Seluruh OPD**

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Poin	n/a	80	82	84	86	88	90	Satpol PP dan BPBD
12	Indek Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	80%	85%	87%	90%	95%	98%	80%	Sekretariat DPRD
13	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Poin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Disdukcapil
14	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar pemerintah	Poin	n/a		43	50,00	55,00	60,00	65,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Obudsman)	Poin	93,15	93,15	93,15	93,15	93,5	93,75	94	Sekretariat Daerah
16	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	n/a	81	81	81	82	82	83	BKPSDM
INDIKATOR KINERJA KUNCI										
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar									
A	**Pendidikan**									
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,2	11,49	11,64	11,8	11,97	12,13	12,28	Dinas Pendidikan
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,18	14,27	14,35	14,43	14,52	14,61	14,69	Dinas Pendidikan
3	Kemampuan Literasi Berkategori Baik Tingkat SD	persen	n/a	59,16	60,25	61,34	62,44	63,54	64,63	Dinas Pendidikan
4	Kemampuan Literasi Berkategori Baik Tingkat SMP	persen	n/a	59,16	60,25	61,34	62,44	63,54	64,63	Dinas Pendidikan

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Kemampuan Numerasi Berkategori Baik Tingkat SD	persen	n/a	48,23	49,26	50,29	51,33	52,37	53,4	Dinas Pendidikan
6	Kemampuan Numerasi Berkategori Baik Tingkat SMP	persen	n/a	48,23	49,26	50,29	51,33	52,37	53,4	Dinas Pendidikan
7	Nilai AKIP Perangkat Daerah	nilai	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
8	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
9	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus (APS)	persen	100	79,86	79,88	79,90	79,92	79,94	79,96	Dinas Pendidikan
10	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
11	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	persen	n/a	99,02	99,04	99,06	99,08	99,1	99,12	Dinas Pendidikan
12	Indeks Pemerataan Guru	persen	n/a	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	Dinas Pendidikan
13	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	persen	n/a	87,70	88,80	89,90	90,00	91,10	92,20	
14	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	persen	n/a	90,11	90,22	90,33	90,44	90,55	90,66	Dinas Pendidikan
15	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	persen	n/a	70,52	70,54	70,56	70,58	70,60	70,02	Dinas Pendidikan
B	**Kesehatan**									

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Dinas Kesehatan									
1	Cakupan UHC	Persen	n/a	87,41	88,07	88,73	89,39	90,05	90,71	Dinas Kesehatan
2	Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	n/a	90	90	90	90	90	90	Dinas Kesehatan
3	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	87	90	90	90	90	90	90	Dinas Kesehatan
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	95,76	98,6	98,6	98,6	99	99	99	Dinas Kesehatan
5	Jumlah Kematian Ibu (Kasus)	Persen	1 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	1 Kasus	Dinas Kesehatan
6	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	22,3%	18.2%	17,2%	16,2%	15,2%	14,2%	14,0%	Dinas Kesehatan
7	Nilai AKIP	kategori / poin	BB (77,6)	BB 78	BB (78,4)	BB (79)	BB (79,6)	A (80,2)	A (81)	Dinas Kesehatan
8	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	85%	88%	89%	90%	91%	92%	93%	Dinas Kesehatan
9	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	Dinas Kesehatan
10	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang di Berdayakan	Persen	n/a	40%	45%	55%	60%	65%	70%	Dinas Kesehatan
	RSUD									

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Poin	70	70	73	74	76	80	81	RSUD
2	Presentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	Persen	80 %	80%	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	RSUD
3	Presentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	n/a	N/a	80 %	80 %	82 %	84 %	85 %	RSUD
C	**Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**									
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Poin	83,3	84	84,5	85	85,5	86	86,5	Dinas PUTR
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	n/a	0	2,5	5	7,5	10	12,5	Dinas PUTR
3	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	n/a	5	7,5	10	12,5	15	17,5	Dinas PUTR
4	Kapasitas Air Baku / Kapasitas Tampungan Air	M3/Detik	n/a	315,8	315,8	315,8	315,8	315,8	315,8	Dinas PUTR
5	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Poin	56,11%	61%	61%	65%	71%	72%	73%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen	45 %	75%	78 %	80 %	83 %	85 %	90 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Persen	27 %	28%	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi	Persen	50 %	50%	52 %	53 %	54 %	55 %	56 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(Air limbah Domestik Layak dan aman)									
9	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Persen	90 %	91%	92 %	93 %	94 %	95 %	96 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
10	Persentase Panjang jalan dalam kondisi Baik	Persen	92 %	92%	92,5 %	93 %	93,5 %	94 %	94,5 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
11	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi pada pelaksanaan kegiatan	Persen	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
12	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	32,87%	37%	37,37%	41,87%	46,37%	50,87%	55,37%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
13	Persentase Drainase dalam kondisi baik	Persen	85 %	85%	86 %	87 %	88 %	89 %	90 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
14	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Persen	n/a	n/a	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
D	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**									
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persen	n/a	91,59	92,11	92,63	93,16	93,69	94,21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Poin	53,06		55	60	65	70	75	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase Luas Kawasan Kurnuh di bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Ditangani	Persen	32,58		33,62	34,15	34,68	35,2	35,73	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	29,04		30,11	30,65	31,17	31,75	32,31	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
E	**Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**									
	Satpol PP									
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Poin	n/a	80	82	84	86	88	90	Satpol PP dan BPBD
2	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen	57,5	58	59	60	61	62	63	Satpol PP
3	Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan laporan	Persen	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP
4	Junlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan perda dan perkada	Persen	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP
	BPBD									
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Poin	n/a	80	82	84	86	88	90	Satpol PP dan BPBD
2	Indeks Risiko Bencana	Poin	103,2	103,18	103,16	103,14	103,12	103,1	103,08	BPBD
3	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
4	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
5	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	BPBD

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	BPBD
7	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	BPBD
8	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	BPBD
9	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	BPBD
F	**Sosial**									
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	n/a	60,00	61,00	63,00	65,00	67,00	70,00	Dinas Sosial
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Poin	55,11	60	65	68	70	72	75	Dinas Sosial
3	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Persen	n/a	65	68,5	71,4	82,2	89	91	Dinas Sosial
4	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Persen	n/a	80	80	85	90	95	100	Dinas Sosial
5	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	n/a	60	60	65	65	70	75	Dinas Sosial
6	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	80	80	80	80	80	80	80	Dinas Sosial
7	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	84	85	85	85	85	85	85	Dinas Sosial

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	80	85	85	85	85	85	85	Dinas Sosial
9	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	84	84	85	85	85	85	85	Dinas Sosial
10	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Poin	n/a	60	60	65	65	70	75	Dinas Sosial
11	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Poin	n/a	85	85	85	85	85	85	Dinas Sosial
12	Indeks Peranan Sosial	Poin	n/a	65	65	70	75	80	85	Dinas Sosial
13	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	99	99	99	99	99	100	100	Dinas Sosial
14	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Persen	99	99	99	99	99	100	100	Dinas Sosial
15	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	Persen	99	99	99	99	99	100	100	Dinas Sosial
16	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	Persen	n/a	62	65	70	70	75	80	Dinas Sosial
17	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	Persen	n/a	74	75	78	80	85	85	Dinas Sosial
18	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persen	0,4	1	1	1	1	1	1	Dinas Sosial

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
19	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	99,08	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
20	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	Persen	0	60	60	65	70	75	80	Dinas Sosial
21	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	Persen	0	60	60	65	70	75	80	Dinas Sosial
22	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
23	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	Orang	n/a	n/a	10	15	20	25	30	Dinas Sosial
24	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persen	n/a	n/a	10	15	20	25	30	Dinas Sosial
	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar									
A	**Tenaga Kerja**									
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Binjai	persen	n/a	68	69,93	71,87	73,81	75,75	77,68	Disnakerperindag
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	n/a	49,3	49,4	49,5	49,6	49,7	49,8	DP3AM / Disnakerperindag
3	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	Persen	n/a	18,25	20,27	22,3	24,33	26,36	28,38	Disnakerperindag

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Jumlah Penyandang Disabilitas	5	6	7	8	9	10	11	Disnakerperindag
5	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kota	Unit	1	1	1	1	1	1	1	Disnakerperindag
6	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	54,69	54,89	55,09	55,29	55,49	55,69	55,89	Disnakerperindag
7	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Poin	63,66	64,41	65,53	67,68	68,73	69,74	70,28	Disnakerperindag
8	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Persen	81,25%	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	Disnakerperindag
9	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Persen	n/a	1,50%	1,57%	1,67%	1,78%	1,84%	1,95%	Disnakerperindag
10	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persen	73,75	73,80	73,86	73,94	74,23	74,39	74,55	Disnakerperindag
11	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak - Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Orang	8.240	8.260	8.290	8.315	8.340	8.365	8.390	Disnakerperindag
B	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	poin	91,38	91,4	91,42	91,44	91,45	91,7	91,48	DP3AM
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	n/a	49,3	49,4	49,5	49,6	49,7	49,8	DP3AM/ Disnakerperindag
3	Indeks Perlindungan Anak	Poin	67,59	n/a	69,59	70,59	71,59	72,59	73,59	Dinas P3AM

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)*	poin	n,a	67,62	67,65	67,67	67,69	67,7	67,71	DP3AM
5	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)*	poin	0,299	0,295	0,291	0,288	0,285	0,282	0,28	DP3AM
6	Nilai AKIP Perangkat Daerah	nilai	64,16	70	70	70	71	71	72	Dinas P3AM
7	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	persen	0,019	0,016	0,015	0,014	0,013	0,012	0,011	Dinas P3AM
8	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	poin	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P3AM
9	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	persen	80	82	82	85	85	90	90	Dinas P3AM
10	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	poin	0	63,20	63,25	63,28	63,30	63,37	63,40	Dinas P3AM
11	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P3AM
C	**Pangan**									
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	7,63	7,48	7,33	7,18	7,03	6,88	6,73	Dinas Ketapang dan Pertanian
2	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	87,25	88,22	89,22	90,32	91,52	92,82	94,22	Dinas Ketapang dan Pertanian

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Skor	67,91	68	69	70	71	73	75	Dinas Ketapang dan Pertanian
2	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	Persen	5	5	10	10	10	10	10	Dinas Ketapang dan Pertanian
3	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	Nilai	90,4	92,4	93,6	95,2	96,08	98,4	100	Dinas Ketapang dan Pertanian
4	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	Persen	56,75	51,35	45,94	40,54	35,13	29,72	24,32	Dinas Ketapang dan Pertanian
5	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	Persen	24	43,31	52,5	52,5	53,23	53,23	60	Dinas Ketapang dan Pertanian
D	**Lingkungan Hidup**									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	60,81	74,19	74,36	74,53	74,7	74,88	75,05	DLH
2	Indeks Kualitas Air (Indeks)	Poin	53,33	82,89	83,09	83,29	83,49	83,69	83,89	DLH
3	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	Poin	88,51	80,82	81,02	81,22	81,42	81,62	81,82	DLH
4	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	Poin	22,4	46,99	47,06	47,13	47,2	47,27	47,34	DLH
5	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	n/a	72	73,75	75,5	77,25	79	80,75	DLH
6	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	n/a	60	65	70	75	80	85	DLH
7	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	66,71	70	73	75	77	79	81	DLH
8	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup	Persen	n/a	66,66	0	0	0	33,33	0	DLH

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	yang Ditindaklanjuti (Persentase)									
9	Persentase RTH (Persentase)	Persen	14,25	15,25	16,25	17,25	18,25	19,25	20,25	DLH
10	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS (Persentase)	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	DLH
11	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	Persen	n/a	45,45	63,64	72,73	81,82	90,91	100	DLH
12	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	DLH
13	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	DLH
14	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	Persen	n/a	1	2	3	5	7	10	DLH
15	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	DLH
16	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	DLH

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
17	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	Poin	n/a	30	30,5	31	31,5	32	32,5	DLH
18	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	Persen	n/a	60	65	70	75	80	85	DLH
E	**Pertanahan**									
1	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persen	0	-	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persen	0	-	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
F	**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Poin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Disdukcapil
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	97	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil
3	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	Persen	4,34	5	5,5	6,2	6,8	7,5	8,15	Disdukcapil
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	Persen	58,75	69,25	75,20	80	85	85,5	90,5	Disdukcapil
5	Rate Nett Recent Migrasi (Nilai)	Nilai	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	1	Disdukcapil
6	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	Persen	99,87	99,88	99,89	99,90	99,91	99,92	99,93	Disdukcapil

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	Persen	48,25	70,15	75,25	75,35	75,45	75,65	76	Disdukcapil
8	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	Persen	78	85,85	85,85	86	86,05	86,15	86,20	Disdukcapil
9	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	Persen	78,21	78,23	78,25	78,27	78.30.78	78,32	78,33	Disdukcapil
10	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil
11	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	Persen	1	1	1	1	1	1	1	Disdukcapil
G	**Pemberdayaan Masyarakat**									
1	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	Persen	90	92	95	98	98	98	100	DP3AM
2	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	Persen	0	15	20	21	25	27	30	DP3AM
H	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (Jiwa)	Persen	2,14	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	Dinas PPKB
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Skor	61,56	65,00	68,00	70,00	73,00	75,00	78,00	Dinas PPKB
3	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Persen	13.3-12.5	12.5-12	12-11.5	11.5-11	10.5-10	9.5-9	9-8.5	Dinas PPKB

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)									
4	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	Persen	9,9	9	8,5	8	7,5	7	6,5	Dinas PPKB
5	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	Persen	64,9	65,5	66	66,5	67	67,5	68	Dinas PPKB
6	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	Poin	46,6	47	47,5	48	48,5	49	49,5	Dinas PPKB
I	**Perhubungan**									
1	Rasio Konektivitas	persen	n/a	90	91	92	93	94	95	Dinas Perhubungan
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	61,01	63	65	67	69	71	73	Dinas Perhubungan
3	Konektivitas Darat (Persentase)	Persen	363	365	365	365	365	366	367	Dinas Perhubungan
4	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	Persen	86,15	86,15	87	87,20	87,55	88	88,40	Dinas Perhubungan
J	**Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian**									
1	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar pemerintah	Poin	n/a		43	50,00	55,00	60,00	65,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	Poin	3,12	3,14	1,8	1,8	1,9	1,9	2	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	n/a	6,79	6,91	7,03	7,15	7,27	7,39	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Poin	43,88	49,5	52,12	54,74	57,37	60	62,62	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarkat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	n/a		70,45	72,25	75	80	83,24	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	n/a		2	2,25	2,4	2,5	2,6	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	n/a		1,6	1,8	2	2,3	2,6	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	70,66	70,78	70,82	70,91	70,99	80,10	80,15	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	Persen	-	-	70,45	72,25	75	80	83,24	Dinas Komunikasi dan Informatika
K	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**									
1	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Persen	96,51	96,4	96,3	96,2	96,1	96	95,9	Dinas Koperasi dan UKM
2	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian pada Level Kota Binjai	Persen	n/a	10,66	10,79	10,93	11,07	11,21	11,34	Dinas Koperasi dan UKM

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Rasio kewirausahaan daerah	Persen	4,43	4,68	4,93	5,18	5,43	5,68	5,93	Dinas Koperasi dan UKM
4	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Persen	n/a	0,61	0,65	0,68	0,72	0,75	0,79	Dinas Koperasi dan UKM
5	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	66,91	66,92	66,93	66,94	66,95	66,96	66,97	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	Persen	10	15	15	15	15	15	15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	Persen	52	60	65	67	71	73	75	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	Persen	72	72	75	75	78	78	80	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	Persen	58	58	60	62	62	65	68	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	Persen	69	70	72	72	73	75	75	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	Persen	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	Persen	0,011	0,016	0,021	0,026	0,031	0,036	0,041	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	Persen	0,016	0,021	0,026	0,031	0,036	0,041	0,046	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
L	**Penanaman Modal**									
1	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	Persen	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	33,62	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Pertumbuhan nilai investasi total	Persen		3%	5%	7%	9%	9%	9%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	65,81	69,10	72,56	76,19	79,99	83,99	88,19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	Persen	97	97	98	98	99	99	99	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	Persen	61,44	66,44	71,44	76,44	81,44	86,44	91,44	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	Persen	65,67	72,23	79,45	87,40	87,40	87,40	96,14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	Persen	51,4	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	Persen	70	75	75	75	75	75	75	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
M	**Kepemudaan dan Olahraga**									
1	Indeks Pembangunan Olahraga	Poin	n/a	n/a	0,4	0,405	0,41	0,415	0,42	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Rasio Wirausaha pemuda	Persen	0,4		0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
3	Persentase Atlet yang masuk Pelatnas	Persen	1		2	2	3	3	5	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
4	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	Persen	2,1		2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
5	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	Persen	95	97	97	98	99	99	100	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
6	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	Persen	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
7	Peningkatan Prestasi Olahraga (% Indeks)	Poin	22	22	22	22	22	22	22	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
N	**Kebudayaan**									
1	Persentase Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar budaya (Benda dan Tak Benda)	Persen	96,77	96,77	96,77	98,38	98,38	98,38	100	Dinas Pariwisata
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persen	n/a	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	Dinas Pariwisata

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Nilai SAKIP	Skor	60	60	60	60	60	60	60	Dinas Pariwisata
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persen	n/a	0.15	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	Dinas Pariwisata
5	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pariwisata
6	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persen	96,77	96.77	96,77	98,38	98,38	98,38	100	Dinas Pariwisata
7	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persen	-	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	Dinas Pariwisata
8	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persen	77,27	77.27	77,27	77,27	77,27	80,30	80,3	Dinas Pariwisata
O	**Perpustakaan**									
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	57,25	49,9	50	52	55	59	64	Dinas Perpustakaan
2	Nilai SAKIP	Skor	70	72	75	77	79	81	82	Dinas Perpustakaan
3	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	Dinas Perpustakaan
4	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persen	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Dinas Perpustakaan
P	**Kearsipan**									
1	Nilai SAKIP	Skor	BB	BB	BB	BB	A	A	A	Dinas Perpustakaan
2	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	100%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Dinas Perpustakaan

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	0%	*20%*	*20%*	*20%*	*20%*	*20%*	*20%*	Dinas Perpustakaan
4	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persen	0%	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	Dinas Perpustakaan
	Urusan Pilihan									
A	**Kelautan Perikanan**									
1	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan	Poin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Ketapang dan Pertanian
2	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Ketapang dan Pertanian
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	3.800	3.900	4.000	4.050	4.100	4.150	4.200	Dinas Ketapang dan Pertanian
4	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	Kg/KAP/TH	29,4	28,4	27,5	26,5	25,6	24,7	23,7	Dinas Ketapang dan Pertanian
B	**Pariwisata**									
1	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	n/a	6	8	10	12	14	16	Dinas Pariwisata
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	5,66	5,76	5,86	5,96	6,06	6,16	6,26	Dinas Pariwisata
3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Pariwisata
4	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Memiliki HAKI	Jumlah	n/a	1	2	3	5	7	9	Dinas Pariwisata
5	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	65,96	65,97	65,98	65,99	66,00	66,10	66,15	Dinas Pariwisata

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	Persen	4,55	4,56	4,57	4,58	4,59	4,60	4,61	Dinas Pariwisata
7	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	Persen	75	14,28	5	5,5	6,5	6,8	7	Dinas Pariwisata
8	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	Persen	0	1	2	3	5	7	9	Dinas Pariwisata
9	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	Persen	1,15	1,18	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4	Dinas Pariwisata
C	**Pertanian**									
1	Nilai Tukar Petani	n/a	n/a	90	90,1	90,25	90,45	90,8	91,2	Dinas Ketapang dan Pertanian
2	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	3,94	4	4,2	4,4	4,6	4,8	5	Dinas Ketapang dan Pertanian
3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	Persen	3,94		4,2	4,4	4,6	4,8	5	Dinas Ketapang dan Pertanian
4	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	Persen	n/a		90,1	90,25	90,45	90,8	91,2	Dinas Ketapang dan Pertanian
5	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	Persen	5,92	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	Dinas Ketapang dan Pertanian
6	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	Ha	0,98	1,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	Dinas Ketapang dan Pertanian

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	Persen	0,96	1,92	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	Dinas Ketapang dan Pertanian
8	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	Persen	-	-	90,1	90,25	90,45	90,8	91,2	Dinas Ketapang dan Pertanian
9	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	Persen	0	0	50	50	70	80	100	Dinas Ketapang dan Pertanian
10	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	Persen	90	90	90	90	90	90	90	Dinas Ketapang dan Pertanian
11	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	Persen	0	0	90	90	90	90	90	Dinas Ketapang dan Pertanian
12	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	Persen	0	0	90	90	90	90	90	Dinas Ketapang dan Pertanian
13	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	Persen	90	90	90	90	90	90	90	Dinas Ketapang dan Pertanian
D	**Perdagangan**									
1	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah	Persen	n/a	10	10	10	10	10	10	Disnakerperindag
2	Kontribusi Sektor Perdagangan tehadap PDRB	Persen	30,25	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Disnakerperindag
3	Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persen	26,96	27,25	27,5	27,75	28,1	28,5	28,9	Disnakerperindag

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinakerperindag
5	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	Persen	10	10	10	10	10	10	10	Dinakerperindag
6	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	Persen	6,68	6,55	6,55	6,47	6,42	6,38	6,33	Dinakerperindag
7	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	Nilai	-	145	150	160	170	180	190	Dinakerperindag
8	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	Persen	-	40	50	60	70	85	100	Dinakerperindag
9	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinakerperindag
E	**Perindustrian**									
1	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	11,47	11,7	12	12,3	12,63	12,93	13,23	Disnakerperindag
2	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Level Kota Binjai	Persen	n/a	5,04	5,33	5,62	5,91	6,2	6,49	Disnakerperindag
3	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persen	n/a	6	7	7,2	7,3	7,4	7,5	Dinakerperindag
4	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinakerperindag
5	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	persen	12,31	15,00	18,57	22,50	25,55	28	30	Dinakerperindag
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A	**Sekretariat Daerah**									
1	Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Obudsman)	Poin	93,15	93,15	93,15	93,15	93,5	93,75	94	Sekretariat Daerah
2	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen	n/a	70	71,25	72,5	73,75	75	76,25	Sekretariat Daerah
3	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	40	40,05	40,1	40,15	40,2	40,25	40,3	Sekretariat Daerah
4	Aset Dana Pensiun/PDRB	Persen	n/a	10	13	16	19	21	24	Sekretariat Daerah
5	Inklusi Keuangan	Poin	3,5	3,54	3,58	3,62	3,66	3,7	3,74	Sekretariat Daerah
4	Return on Asset (ROA) BUMD	Persen	n/a	-10,23	-9,24	-8,25	-7,26	-6,27	-5,28	Sekretariat Daerah
5	Indeks Reformasi Hukum	Poin	98,98	70,00	71,25	72,50	73,75	75,00	76,25	Sekretariat Daerah
6	Jumlah Kerjasama Kota Binjai/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister City)	Jumlah Kerjasama	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
7	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,01	4,01	4,01	4,1	4,15	4,25	4,55	Sekretariat Daerah
8	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	73,56	75	76	77	78	79	80	Sekretariat Daerah
9	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	Persen	83	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
10	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	Persen	0	2,7767	2,7815	2,7905	2,8105	2,8217	2,8267	Sekretariat Daerah

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	Persen	70	70	75	75	80	80	80	Sekretariat Daerah
12	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	Angka	35,56	35,56	40	40	40	40	40	Sekretariat Daerah
13	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	Persen	80	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
14	Persentase Fasilitasi materi pimpinan	persen	75	75	77	77	79	79	80	Sekretariat Daerah
15	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama pemerintah daerah	persen	75	75	77	77	79	79	80	Sekretariat Daerah
16	Nilai capaian pelaporan kinerja	Predikat	B(60,19)	BB (70)	BB (71)	BB (72)	BB (73)	BB (74)	BB (75)	Sekretariat Daerah
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	88,50	88,55	88,60	88,65	88,70	88,75	88,80	Sekretariat Daerah
18	Indeks Berakhlak	Predikat	66,2	70	70	72	74	75	76	Sekretariat Daerah
19	Indeks Kematangan Organisasi	Poin	-	65	70	75	80	85	90	Sekretariat Daerah
20	Nilai Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Persen	73,15	75	77,5	80	82,5	85	87,5	Sekretariat Daerah
21	Persentase kerjasama yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
22	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Skor	52,56	60,56	69	70	75	80	85	Sekretariat Daerah
23	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor	11	16	19	20	23	25	28	Sekretariat Daerah
24	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Skor	6	9	10	10	12	15	17	Sekretariat Daerah
25	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan untuk pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
26	Persentase Realisasi Fisik dan Non Fisik pada Perangkat Daerah melalui Aplikasi PRP2SUMUT	persen	60	65	70	75	80	85	90	Sekretariat Daerah
27	Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
28	Persentase penyelesaian penyusunan rancangan produk hukum daerah tepat waktu	Persen		80.00	81.25	82.50	83.75	85.00	86.25	Sekretariat Daerah
29	Persentase penanganan perkara hukum di pengadilan	Persen		70,00	71,25	72,50	73,75	75,00	76,25	Sekretariat Daerah
30	Persentase penanganan sengketa di luar pengadilan dan perlindungan HAM	Persen		80,00	81,25	82,50	83,75	85,00	86,25	Sekretariat Daerah

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
31	Persentase kebijakan lingkup perekonomian yang diimplementasikan	Persen	4	4	4	4	4	5	6	Sekretariat Daerah
32	Persentase pembinaan tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
33	Persentase Usulan Dokumen UPTD untuk menjadi BLUD yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
34	Konsumsi listrik per kapita	kWh per kapita	n/a	800	850	900	1.000	1.102	1.200	Sekretariat Daerah
35	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan	Persen	93.02	60	60	60	60	60	60	Sekretariat Daerah
36	Persentase Proposal Hibah Yang ditindaklanjuti	Persen	59	65	65	70	70	75	75	Sekretariat Daerah
37	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	80,1	80	80	82	82	83	83	Sekretariat Daerah
B	**Sekretariat DPRD**									
1	Indek Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	80%	85%	87%	90%	95%	98%	80%	Sekretariat DPRD
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	64,61	65,50	67,50	68,50	69,50	70,50	80,00	Sekretariat DPRD

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
4	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	Persen	50	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
5	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
C	**Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**									
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Persen	n.a	95,9	75%	78%	79%	81%	82%	Bapperida
2	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Poin	3,75	3,0	3,9	4	4,02	4,1	4,15	Bapperida
3	Indeks Inovasi Daerah	Poin/Skor	37,93	52,35	53,07	53,79	54,5	55,22	55,94	Bapperida
4	Belanja Riset	Rp. Milyar	0,47	0,51	0,55	0,58	0,61	0,65	0,68	Bapperida
4	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Poin	n/a	2,7760	2,7815	2,7905	2,8105	2,8217	2,8267	Bapperida
5	Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD	Persen	76,97%	95,8%	100%	100%	100%	100%	100%	Bapperida
6	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	Persen	95,1	95,90	96	96,20	96,80	97	97,20	Bapperida
7	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Bapperida
8	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	Persen	95,29	95,80	96	96,20	96,80	97	97,20	Bapperida

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Persentase Capaian Aksi HAM (%)	Persen	0	70,00	71,25	72,50	73,75	75,00	76,25	Bapperida
10	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	Persen	95,29	95,80	96	96,20	96,80	97	97,20	Bapperida
11	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	Persen	95,29	95,8	96	96,20	96,80	97	97,20	Bapperida
12	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	Persen	21	50	50	55	57	60	65	Bapperida
13	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	Persen	55	60	65	70	75	80	85	Bapperida
14	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	Persen	80	90	95	95	97	98	100	Bapperida
15	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	Persen	0	60	65	70	75	80	85	Bapperida

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	Persen	0	50	60	65	70	75	80	Bapperida
17	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	Persen	0	50	60	65	70	75	80	Bapperida
18	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	Persen	0	50	60	65	70	75	80	Bapperida
19	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	Persen	80	90	95	95	97	98	100	Bapperida
D	**Keuangan**									
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,47	0.50	0.53	0,56	0,59	0,62	0,65	BPKPD
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPD
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,41	80	80	80	90	90	100	BPKPD
4	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persen	42,90	40,00	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00	BPKPD
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur pelayanan Publik	Persen	11,57	26,75	35	40	40	40	40	BPKPD

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Persentase Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD/ Perubahan APBD/ Pertanggungjawaban APBD Kabupaten / Kota	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPKPD
7	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	89,90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPKPD
8	Persentase Penurunan SILPA	Persen	1,22%	1,1%	1,00%	0,90%	0,80%	0,70%	0,60%	BPKPD
9	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPKPD
10	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	-2,16%	-1,75%	-1,50%	-0,50%	0,50%	1,00%	2,00%	BPKPD
11	Persentase Tanah Milik Pemko Binjai yang Disertifikasi	Persen	49,35%	51,51%	53,68%	55,84%	58,01%	60,18%	62,34%	BPKPD
13	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	12,14%	12,25%	12,50%	13,00%	13,50%	14,00%	14,50%	BPKPD
14	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	Persen	99,96%	100%%	100%	100%	100%	100%	100%	BPKPD
15	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangfan Berbasis Digital	Persen	100%	100%%	100%	100%	100%	100%	100%	BPKPD
E	**Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**									
1	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	n/a	81	81	81	82	82	83	BKPSDM
2	Indeks Sistem Merit	Poin	n/a	250	250	250	250	250	250	BKPSDM
3	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Poin	n/a	27	27	27	27	27	27	BKPSDM
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	73,20	74	75	76	77	78	79	BKPSDM

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Persen	22,04	23	23	23	23	23	23	BKPSDM
6	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	Persen	25	25	25	25	25	25	25	BKPSDM
7	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persen	5,07	6	6	6	6	6	6	BKPSDM
8	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen	5,01	6	6	6	6	6	6	BKPSDM
9	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persen	77,03	87	87	87	87	87	87	BKPSDM
10	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	Persen	16,1	17	17	18	18	19	19	BKPSDM
11	Persentase Pengembangaan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persen	13,08	14	15	16	17	18	19	BKPSDM
12	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persen	91	93	94	95	96	96	100	BKPSDM
F	**Pengawasan**									
1	Indeks Integritas Nasional	Poin	69,41	72,31	75,43	78,25	79,51	80,35	81,05	Inspektorat
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	71,91	71,91	71,91	71,95	71,95	72,00	72,00	Inspektorat
3	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	Persen	74,92	78	80	81	82	83	84	Inspektorat
4	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Level	3,048	3,05	3,06	3,07	3,08	3,09	3,1	Inspektorat

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Level	3,00	3,02	3,04	3,06	3,08	3,10	3,12	Inspektorat
G	**Pemerintahan Umum**									
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	n/a	70	70	72	72	73	73	Bakesbangpol
2	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	n/a	70	74	78	82	86	90	Bakesbangpol
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	68,66	68,66	69	70	71	72	73	Bakesbangpol
4	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	n/a	65%	67%	70%	72%	75%	77%	Bakesbangpol
5	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persen	n/a	50%	55%	60%	65%	70%	75%	Bakesbangpol
6	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	n/a	65%	67%	70%	72%	75%	77%	Bakesbangpol
7	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persen	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bakesbangpol
8	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bakesbangpol
H	**Kecamatan**									
	Kecamatan Binjai Kota									
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Skor	57,96	59	60	62	65	68	70	Kecamatan Binjai Kota

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Binjai Kota
3	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	Persen	98	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Binjai Kota
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Nilai	0	80	80	82	85	87	90	Kecamatan Binjai Kota
5	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	Persen	0	70	70	73	75	77	80	Kecamatan Binjai Kota
6	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Binjai Kota
7	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Binjai Kota
8	Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum (daerah)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Binjai Kota
	Kecamatan Binjai Selatan									
1	Kesesuaian Layanan dengan SOP (Persentase)	Persen	60	60	60	60	70	75	80	Kecamatan Binjai Selatan

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	Persen	60	60	60	60	70	75	80	Kecamatan Binjai Selatan
3	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	Persen	60	60	60	60	70	75	80	Kecamatan Binjai Selatan
4	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan (Program Penunjang)	Poin	n/a	n/a	12	12	12	12	12	Kecamatan Binjai Selatan
5	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan (Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik)	Poin	n/a	n/a	12	12	12	12	12	Kecamatan Binjai Selatan
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan (Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan)	Poin	n/a	n/a	159	159	159	159	159	Kecamatan Binjai Selatan
7	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan (Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum)	Poin	n/a	n/a	9	9	9	9	9	Kecamatan Binjai Selatan
	Kecamatan Binjai Timur									
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Skor	69,51	70,00	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50	Kecamatan Binjai Timur
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Nilai	0	80	80	82	85	87	90	Kecamatan Binjai Timur

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	Persen	0	70	70	73	75	77	80	Kecamatan Binjai Timur
4	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Binjai Timur
5	Persentase Penyelesaian Masalah di Bidang Pemerintahan	Persen	n/a	70	12	12	12	12	12	Kecamatan Binjai Timur
6	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	n/a	75	120	120	120	120	120	Kecamatan Binjai Timur
7	Persentase Tingkat Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persen	n/a	67	5	5	5	5	5	Kecamatan Binjai Timur
	Kecamatan Binjai Utara									
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	61,01	63	65	66	67	68	69	Kecamatan Binjai Utara
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Nilai	0	80	80	82	85	87	90	Kecamatan Binjai Utara
3	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	Persen	0	70	70	73	75	77	80	Kecamatan Binjai Utara
4	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Binjai Utara

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Binjai Utara
6	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	Persen	98	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Binjai Utara
7	Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum (daerah)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Binjai Utara
	Kecamatan Binjai Barat									
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	62,75	63,50	64,50	65,50	66,50	68,50	70	Kecamatan Binjai Barat
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Nilai	80	80	80	82	85	87	90	Kecamatan Binjai Barat
3	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	Persen	70	70	70	73	75	77	80	Kecamatan Binjai Barat
4	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Binjai Barat
5	Persentase Penyelesaian Masalah di Bidang Pemerintahan	Persen	n/a	n/a	82	82	83	83	84	Kecamatan Binjai Barat
6	Persentase cakupan kelompok masyarakat yang dibina dengan baik ditingkat kecamatan	Persen	n/a	n/a	82	83	83	84	84	Kecamatan Binjai Barat
7	Persentase tingkat penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persen	n/a	n/a	82	83	83	84	84	Kecamatan Binjai Barat

4.4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Kota Binjai merumuskan berbagai program strategis yang berfokus pada urusan pelayanan dasar. Program-program ini tidak hanya menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berperan sebagai tolok ukur akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah. Dukungan anggaran dialokasikan secara terarah pada sektor-sektor prioritas, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan ketertiban umum, hingga pelayanan sosial.

Melalui penguatan akses pendidikan menengah, peningkatan capaian kesehatan ibu dan anak, percepatan penurunan stunting, penyediaan air minum layak dan sanitasi aman, pengembangan perumahan terjangkau, serta penanganan masalah sosial dan kebencanaan, pemerintah berupaya memastikan pelayanan dasar dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Alokasi pagu indikatif yang ditetapkan untuk periode 2026–2030 mencerminkan komitmen nyata pemerintah dalam memenuhi SPM, sekaligus menjadi landasan penting bagi perencanaan pembangunan Kota Binjai yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 4. 6. Dukungan Program Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada Pelayanan Dasar

NO	PEMENUHAN PELAYANAN DASAR	SASARAN IKD	PROGRAM	INDIKATOR	PAGU INDIKATIF				
					2026	2027	2028	2029	2030
1	**Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan)**	- Indeks Pembangunan Manusia - Harapan Lama Sekolah - Kemampuan Literasi Berkategori Baik Tingkat SD - Kemampuan Literasi Berkategori Baik Tingkat SMP - Kemampuan Numerasi Berkategori Baik Tingkat SD - Kemampuan Numerasi Berkategori Baik Tingkat SMP - Persentase lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi atau menjadi wirausaha	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	39.231.775.200	41.193.363.960	43.253.032.158	45.415.683.766	47.686.467.954

NO	PEMENUHAN PELAYANAN DASAR	SASARAN IKD	PROGRAM	INDIKATOR	PAGU INDIKATIF				
					2026	2027	2028	2029	2030
2	**Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)**	- Indeks Pembangunan Manusia - Usia Harapan Hidup - Angka Kematian Ibu (per 100.000 KL) / Jumlah Kasus Kematian Ibu - Prevalensi Stunting -Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional - Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis (treatment coverage) - Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) Jumlah Kematian Ibu (Kasus) Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	98.910.878.904	104.112.240.782	111.252.791.370	117.987.849.121	123.787.242.644

NO	PEMENUHAN PELAYANAN DASAR	SASARAN IKD	PROGRAM	INDIKATOR	PAGU INDIKATIF				
					2026	2027	2028	2029	2030
3	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)**	- Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	6.000.000.000	6.100.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air limbah Domestik Layak dan aman)	6.300.000.000	4.800.000.000	6.400.000.000	4.800.000.000	6.400.000.000
4	**Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (dinas Perkim)**	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
5	**Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satpol PP)**	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	2.518.901.441	2.770.791.585	3.047.870.744	3.352.657.818	3.687.923.600
6	**Urusan Sosial (Dinas Sosial)**	Indeks Kesejahteraan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	505.000.000	520.000.000	535.000.000	545.000.000	560.000.000

NO	PEMENUHAN PELAYANAN DASAR	SASARAN IKD	PROGRAM	INDIKATOR	PAGU INDIKATIF				
					2026	2027	2028	2029	2030
				Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)					
				Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)					
				Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)					
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)					
				Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Poin)					
				Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Poin)					

NO	PEMENUHAN PELAYANAN DASAR	SASARAN IKD	PROGRAM	INDIKATOR	PAGU INDIKATIF				
					2026	2027	2028	2029	2030
				Indeks Peranan Sosial (Poin)					
			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	1.440.000.000	1.840.000.000	2.315.000.000	2.710.000.000	3.150.000.000
				Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya					
				Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial					
	Total Pagu Anggaran Urusan Pelayanan Dasar Wajib				156.406.555.545	162.836.396.327	174.303.694.272	182.311.190.705	192.771.634.198

4.5. Dukungan Pemerintah Kota Binjai terhadap PHTC dan Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara

Pemerintah Kota Binjai telah secara aktif mendukung pencapaian 17 program prioritas Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam RPJMD Provinsi, melalui penyusunan dan implementasi program prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Binjai. Program-program prioritas tersebut dirancang untuk mendukung kebijakan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara, dengan menyesuaikan kebutuhan dan potensi yang ada di Kota Binjai. Dalam hal ini, berbagai program pembangunan di Kota Binjai, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, sejalan dengan fokus utama RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya keterkaitan antara program prioritas daerah Kota Binjai dan program prioritas Provinsi Sumatera Utara, diharapkan dapat tercipta sinergi yang optimal dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional.

Tabel 4. 7. Dukungan Program Prioritas Daerah RPJMD Kota Binjai terhadap Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara

RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029	Catatan Penyelarasan
Program Prioritas	**Program Prioritas Daerah**	
1. Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal.	Peningkatan Akses Pendidikan / Sekolah Gratis SD dan SMP	
	Peningkatan Kesejahteraan Guru	
	Pengembangan Kurikulum Pendidikan untuk peningkatan literasi dan numerasi siswa	
	Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi dari Masyarakat Miskin, Rentan dan Disabel	
	Penguatan Pendidikan Karakter	
2. Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi	Jaminan Sosial Inklusif Terintegrasi untuk Lansia, Kelompok Rentan dan Disabilitas	
	Perlindungan Pekerja Informal	
	Wirausaha Rumah Tangga Produktif	
	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
	Dukungan Kuota Pekerjaan Disabilitas di Sektor Formal	
	Pemulihan psikologis dan kesehatan mental bagi korban kekerasan keluarga	
3. Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu.	Penguatan Infrastruktur dan Mutu Layanan Kesehatan (PIMULKES)	
	Gerakan Sinergi Terpadu Lintas Lembaga dan Masyarakat (GESIT LINMAS)	
	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	
	Penguatan Gerakan Hidup Sehat dan Deteksi Dini Penyakit	
	Pemenuhan Ketercukupan dan Kompetensi Tenaga Kesehatan	

RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029	Catatan Penyelarasan
Program Prioritas	**Program Prioritas Daerah**	
4. Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah.	Rekrutmen Tenaga Kerja melalui Job Fair dan Kerjasama Dunia Usaha	
	Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Penanaman Modal Asing dan Domestik	
	Penguatan Peran BUMD dalam Pembangunan dan Penerimaan Daerah	
	Efisiensi dalam Belanja Operasional dan Peningkatan Alokasi untuk Pembangunan	
	Optimalisasi Penerimaan Berkelanjutan melalui Kesadaran Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah	
5. Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru.	Pengembangan Infrastruktur Hijau Perkotaan	
	Pengelolaan Sampah Perkotaan melalui Pembangunan TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu)	
	Penghijauan DAS yang Mengalami Kerusakan	
	Kampanye pemanfaatan kendaraan listrik dan energi baru terbarukan	
6. Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal.	Kerjasama Antar Daerah untuk Ketercukupan Pangan	
	Pengendalian Inflasi Harga Bahan Pokok	
	Pasar Murah Bergerak	
7. Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal).	Dukungan Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Pekerja Pariwisata	
	Pekan Seni dan Budaya Kota Binjai	
	Revitalisasi dan Pelestarian Cagar Budaya	
	Pembangunan Water Front City Sungai Bingai yang Mendukung Pariwisata	
8. Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi.	Revitalisasi Koperasi dan UMKM PINTAR (Pendampingan, Inovasi, Networking, Teknologi, Akses dan Resiliensi)	
	UMKM Go Digital	
	Pasar UMKM dan Pertunjukkan Seni Budaya	
9. Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran.	Sinergi Vokasi-Usaha (Sivosa)	
	Peningkatan keterampilan wirausaha mandiri	
10. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi ASN	
	Kolaborasi Antar Lembaga dalam Penegakan Hukum	
	ASN Bebas Narkoba dan Judi Online	
	Reformasi Birokrasi dengan Manajemen Talenta, dan Rekrutment P3K Tanpa Pungli	
	Peningkatan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan	
11. Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat.	Penyediaan Layanan Wi-Fi Gratis di Ruang Publik	
	Penguatan Sistem Data Terpadu Kota Binjai (Binjai Satu Data)	
	Pengembangan platform e-government	
12. Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada	Konektivitas Infrastruktur Jalan Perkotaan	
	Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir yang lebih Adaptif terhadap Curah Hujan Ekstrem	

RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029	Catatan Penyelarasan
Program Prioritas	**Program Prioritas Daerah**	
Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal.	Peningkatan Akses Sanitasi Aman	
	Penyediaan Transportasi Kota Ramah Lingkungan	
	Perluangan Jaringan Distribusi Air Bersih Perkotaan	
	Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	
	Pengembangan Infrastruktur Energi Terbarukan	
13. Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing.	Pelatihan Ekspor UMKM	
	Fasilitasi Akses Pembiayaan UMKM	
	Perbaikan Tata Kelola Pasar yang dapat mewujudkan Pasar yang Nyaman, Bersih dan Sehat	
14. Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana.	Pemanfaatan Teknologi Pertanian Perkotaan	
	Penyediaan Bibit dan Varietas Unggul	
	Pengembangan ekonomi sirkular	
15. Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa.	-	
16. Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun.	Dukungan Penyediaan Rumah Murah bagi MBR, dan Generasi Muda	
	Program Bantuan Sosial Berbasis Data	
	Program SAGA (Semangat Gotong Royong Antarwarga)	
	Program Binjai Rumah Bersama bagi Semua Umat Beragama	
	Fasilitasi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Keagamaan	
17. Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib.	Program “GENTAR” (Generasi Tanpa Narkoba dan Kenakalan Remaja)	
	Penyelesaian Tindak Pidana yang Cepat dan Adil	
	Penguatan Integritas melalui Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Transparan	
	Implementasi Restorative Justice melalui Mediasi, dan Pemulihan Hubungan antara Pelaku, Korban, dan Masyarakat	
	Pembinaan dan Pengawasan Ormas	
	Peningkatan Sistem Keamanan Berbasis Teknologi	
	Kerjasama Seluruh Pemangku Kepentingan dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	
	Penindakan dan Pencegahan Terpadu Judi Online	
	Membangun Kampung Bebas Narkoba dalam Mendukung Program Penghentian Peredaran Narkoba	

Sebagai bagian dari daerah penyangga strategis di kawasan metropolitan, Pemerintah Kota Binjai menempatkan dukungan terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan program prioritas Provinsi Sumatera Utara sebagai agenda penting dalam pembangunan daerah. Penyelarasan arah pembangunan antara provinsi dan kota menjadi kunci untuk memastikan kebijakan yang dijalankan saling terintegrasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) merupakan instrumen percepatan pembangunan yang berfungsi mempertegas keterkaitan antara tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Binjai 2025–2029. PHTC tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi mekanisme operasional yang memastikan program prioritas dapat dilaksanakan secara efektif, terarah, dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui PHTC, tujuan pembangunan yang bersifat makro diterjemahkan ke dalam sasaran terukur yang dicapai melalui program prioritas, sehingga kesinambungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dapat terjamin.

Pelaksanaan PHTC didukung oleh Pemerintah Kota Binjai sebagai pengarah kebijakan, OPD sebagai pelaksana teknis, serta partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan dukungan lintas pemerintah. Dengan demikian, PHTC menjadi instrumen kunci dalam mempercepat pencapaian sasaran strategis dan menjamin bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kota Binjai berkomitmen mendukung pelaksanaan enam PHTC dan tujuh belas program prioritas Provinsi Sumatera Utara yang sebagian besar berlokasi di Kota Medan. Dukungan ini diwujudkan melalui penguatan sinergi kebijakan, pemanfaatan sumber daya secara optimal, serta koordinasi lintas sektor yang lebih solid. Dengan langkah tersebut, diharapkan implementasi PHTC dan program prioritas provinsi dapat berjalan efektif sekaligus selaras dengan arah pembangunan Kota Binjai. Adapun bentuk dukungan Pemerintah Kota Binjai dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4. 8. Dukungan Kota Binjai Terhadap PHTC Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
1. Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) Kepulauan Nias (2026), Kepulauan Nias dan Pantai Barat (2027), Kepulauan Nias, Pantai Barat dan Dataran Tinggi (2028), Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur (2029) **33 Kabupaten/Kota**	2025	Penyusunan kajian akademik tentang bersekolah gratis, Pembentukan Tim Pokja, Validasi data siswa SMA/SMK/SLB Negeri di zona kepulauan Nias, zona Pantai Barat, zona Dataran Tinggi, zona Pantai Timur • 33 Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan	Diskominfo (Publikasi Kegiatan)	1. Menyediakan basis data siswa SMP/SLTP kelas IX yang akan melanjut SLTA 2. Melakukan edukasi kepada siswa SLTP agar seluruhnya melanjut kepada jenjang SLTA
	2029	Implementasi Program Bersekolah Gratis • Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran tinggi, dan Pantai Timur			
	2030	Implementasi Program Bersekolah Gratis •Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran tinggi, dan Pantai Timur			
2. Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).	2025	Melakukan Launching UHC Penyusunan regulasi (Pergub/SK Gub UHC) MoU 33 Kabupaten/Kota Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara Triwulan IV dimulai Oktober 2025 • 33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1. Dinas Sosial (Pembinaan kepada Kabupaten/Kota untuk melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin	1. Dukungan penganggaran APBD Kabupaten/Kota untuk UHC/PBPU yaitu pada Tahun 2025 sebesar 80%, tahun 2026 sebesar 77,5%, tahun 2027 sebesar 75%, tahun 2028 sebesar 72,5%, tahun 2029 dan 2030 sebesar 70%. 2. Melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada
	2026-2030	Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara • 33 Kabupaten/Kota			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
				Kemensos setiap bulannya), 2. Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data kependudukan Provsu) 3. Diskominfo (Publikasi Kegiatan),	Pusdatin Kemensos setiap bulannya 3. Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data kependudukan Kabupaten/Kota)
4. Digitalisasi Pelayanan Publik "Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif" (CERDAS)	2025	Identifikasi dan pemetaan pelayanan publik yang akan di digitalisasi 1. Pemetaan layanan publik yang akan didigitalisasi, Audit kesiapan infrastruktur dan SDM dan kebijakan pendukung 2. Penyusunan *roadmap* dan desain awal sistem Layanan digital. Lokasi: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	Dinas Kominfo	DPMPTSP Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Bapenda Disperindag ESDM BPSDM Biro Adpem BUMD: PDAM, Bank Sumut	1. Penyiapan kebijakan/ regulasi di tingkat Provinsi/ Pemda Kabupaten/Kota. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/ kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota. 4. Penentuan lokasi

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Identifikasi Penetapan Lokasi 1. Pelaksanaan Survei lapangan untuk identifikasi kebutuhan dan potensi gangguan jaringan. 2. Integrasi Sistem (Layanan). 3. Pemetaan Lokasi Strategis. 4. Koordinasi kepada *Stakeholder* dan Penyusunan dokumen perencanaan Teknis dan Administratif. Lokasi Kegiatan: • 33 Kabupaten/Kota			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2026	Pembangunan integrasi portal aplikasi 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi 2. Integrasi Sistem (Layanan). 3. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 4. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat. Lokasi Kegiatan: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			1. Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Penentuan lokasi
		Pembangunan dan implementasi serta titik pemasangan jaringan internet 1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet. 2. Pemasangan Titik akses Wifi. 3. Sosialisasi Penggunaan.			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Monitoring. Lokasi: - 8 Kota (Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Tanjungbalai, Pematang Siantar, Padangsidimpuan, Sibolga, Gunungsitoli)			
	2027	Pengembangan dan penambahan 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Integrasi Sistem (Layanan). 3. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 4. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat. 5. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			1. Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Penentuan lokasi
	2028	Perluasan area layanan dan akses jaringan internet 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 3. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat. 4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi Kegiatan: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			1. Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Penentuan lokasi

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet. 2. Pemasangan Titik akses Wifi. 3. Sosialisasi Penggunaan. 4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Monitoring. Lokasi Perluasan Area Layanan: - 8 kota			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2029	Perluasan area layanan dan akses jaringan internet 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 3. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat. 4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi Kegiatan: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			1. Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Penentuan lokasi
	2030	Evaluasi dan Monitoring 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 3. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat. 4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur			1. Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota.

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Lokasi kegiatan: - 33 Kabupaten/Kota			3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota. 4. Penentuan lokasi
		1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet. 2. Pemasangan Titik akses Wifi. 3. Sosialisasi Penggunaan. 4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Monitoring. Lokasi Perluasan Area Layanan: - 33 Kabupaten/Kota			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan.
5 a. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI)	2025	1. Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2. Penyusunan Leger jalan 3. Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kota Gunungsitoli Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Padang Lawas Utara	Dinas PUPR	OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/ AMDAL, Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas Perhubungan terkait Fasilitas Keselamatan Jalan,	1. Dukungan penanganan akses jalan dalam koridor pembangunan jalan provinsi yang mendukung kawasan prioritas. 2. Dukungan penyediaan lahan pada rencana pelebaran yang tidak sesuai dengan Ruang Milik Jalan (RUMIJA).

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Serdang Bedagai, Kab. Dairi, Kab. Toba Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Utara, Kab. Nias, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan 4.Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Deli Serdang, Kab. Toba, Kota Gunungsitoli Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Barat, Kota Padangsidimpuan Target pembangunan tahun ini mencakup 49,92 km jalan dan 244,20 meter jembatan		Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi	
	2026	1. Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2. Penyusunan Leger jalan 3. Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kab. Batu Bara, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kab. Pakpak Bharat, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas,			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Barat 4. Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Simalungun, Kab. Samosir Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Asahan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Mandailing Natal Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat Target: jalan 202,84 km jembatan 202,90 m.			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2027	1. Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2. Penyusunan Leger jalan 3. Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kota Pematang Siantar, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Dairi, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Dairi, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Afirmasi: Kab. Nias, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat 4.Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Batu Bara, Kab. Deli Serdang Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Serdang Bedagai, Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Serdang Bedagai, Kab. Pakpak Bharat serta target: jalan 130,99 km & jembatan 708,45 m			
	2028	1. Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2. Penyusunan Leger jalan 3. Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Batu Bara, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang Hasundutan,Kab. Tapanuli Tengah, Kab Toba, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Padang Lawas Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab.			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Labuhanbatu, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Langkat Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana : Kab. Langkat 4. Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Dairi Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Pakpak Bharat serta target: jalan 135,10 km & jembatan 438,90 m			
	2029	1. Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2. Penyusunan Leger jalan 3. Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas Utara Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun,Kab. Deli Serdang, Kab. Toba, Kota Padangsidimpuan			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat 4. Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Samosir, Kab. Toba Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Nias Utara Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Mandailing Natal, Kab. Toba Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Barat serta target: jalan 87,60 km & jembatan 147,20 m			
	2030	1. Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2. Penyusunan Leger jalan 3. Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kab. Batu Bara, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Barat Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat 4. Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Deli Serdang Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu, Kab. Serdang Bedagai Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Serdang Bedagai serta target: jalan 126,20 km & jembatan 51 m			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
b. Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan	2025	Pelaksanaan awal di 4 DI prioritas dengan target 1.857 Ha Kab. Mandailing Natal - DI Roburan Maga, Kota Pematang Siantar/Simalungun - DI.Bah Kora II/Negeri Bosar, Kab. Serdang Bedagai - DI. Pekan Kemis, Kab. Karo - DI.Parit Lompaten	Dinas PUPR	OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/AMDAL, Dinas TPH melakukan pemataan terhadap kawasan swasembada dan dukungan terhadap irigasi tersier dan kuarter, benih, pupuk, alsintan, penyuluh pertanian. Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Dinas Kominfo untuk publikasi Media	- Dukungan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier - Sinergi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan BUMDes untuk pemeliharaan jaringan irigasi - Pembangunan embung, sumur bor, dan pompanisasi untuk sumber air cadangan. - Digitalisasi sistem irigasi (*smart irrigation*) berbasis sensor dan aplikasi. - Pemberdayaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) untuk pengelolaan irigasi. - Integrasi dengan program ketahanan pangan daerah.
	2026	Peningkatan jaringan irigasi sekunder di Kab. Batu Bara, Kab. Padang Lawas Utara, dan Kab. Simalungun; target 6.776 Ha. Kab. Batu Bara - DI.Cinta Maju/Cinta Damai, Kab. Batu Bara- DI. Purwodadi, Kota Pematang Siantar/Simalungun-. DI. Rambung Merah, Kab. Batu Bara- DI.Simodong, Kab. Batu Bara- DI.Tanjung Muda, Kab. Padang Lawas Utara- DI.Padang Garugur, Kab. Karo- DI.Parit			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Lompaten, Kab. Mandailing Natal- DI Roburan Maga, Kab. Serdang Bedagai- DI. Pekan Kemis			
	2027	Akselerasi cakupan layanan target 3.175 Ha. Kab. Langkat - D.I Secanggang, Kab. Mandailing Natal- DI. Terusan, Kab. Padang Lawas- DI. Balakka Sitongkon, Padang Lawas- DI.Sigorbus, Kab.Mandailing Natal- DI Roburan Maga, Kab. Simalungun- DI.Raja Maligas, Kab. Simalungun- DI.Javaconisasi, Kab. Dairi- D.I Buluh Duri, Kab. Toba- D.I Hinalang, Kab. Tapanuli Utara- D.I Aek Sigeaon,Kab. Tapanuli Utara- D.I Hasak I dan II, Kab. Tapanuli Tengah- D.I Mombangboru, Kab. Samosir- D.I Tele Harian Boho, Kab. Humbang Hasundutan- D.I Parmiahan/Hutapaung, Kab. Nias- D.I Gido Zebua, Kab. Simalungun- D.I Bah Tongguran I, Kab. Simalungun- DI Raja Hombang/ Tongah Mangaraja, Kab. Padang Lawas Utara- DI.Padang Garugur, Padang Lawas Utara- D.I Napa Tanjung Beringin, Kab. Labuhanbatu- D.I.R Cinta Makmur, Kab. Asahan- D.I.Serbangan, Kab. Batu Bara- D.I.Simodong, Kab. Padang Lawas Utara- D.I.Padang Garugur, Kab. Labuhanbatu- D.I.R. Sei Serdang/sei Rakyat, Kab. Mandailing Natal- D.I. Terusan, Kab. Deli Serdang-D.I. Namorambe, Kab. Mandailing Natal- D.I. Tapus			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2028	Penguatan jaringan teknis Kab. Batu Bara-(D.I.Simodong, D.I. Purwodadi,DI. Sei Balai,DI. Suka Makmur,DI. Sijambi), Kab. Simalungun-DI. Bah Horas Hulu/Tongah, Kab. Padang Lawas Utara-DI.Padang Garugur, Kab. Padang Lawas -DI.Sigorbus, Kab. Labuhanbatu- (D.I.R Cinta Makmur,D.I.R. Sei Serdang/sei Rakyat), Kab. Tapanuli Tengah- D.I Mombangboru, Kab. Mandailing Natal- DI Roburan Maga, Kab. Langkat- D.I.R Gebang,Kab. Tapanuli Tengah-D.I Pandurungan/Sitandiang, Kab. Karo-DI.Parit Lompaten, Kab. Toba- DI.Hinalang, Kab. Tapanuli Utara- DI.Sigeaon, Kab. Tapanuli Utara- (DI.Simok Mok,D.I Aek Sarulla), Kab. Deli Serdang- D.I Medan Krio, Kab. Mandailing Natal- D.I. Tapus, Kab. Dairi- D.I. Buluh Duri, Kab. Mandaling Natal-D.I. Siulang Aling,Kab. Tapanuli Tengah- D.I Badiri Lopian			
	2029	Penyempurnaan konektivitas saluran Kab. Batu Bara- D.I.Simodong, Kab. Tapanuli Selatan- D.I.Sipirok Komplek, Kab. Labuhanbatu- (D.I.R Cinta Makmur, D.I.R. Sei Serdang/sei Rakyat), Kab. Tapanuli Utara-DI.Simok Mok, Kab. Mandailing Natal- D.I. Tapus, Kab. Dairi-D.I. Buluh Duri, Kab. Mandailing Natal- D.I. Siulang-Aling, Kab.			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Tapanuli Tengah- D.I Mombangboru, Kab. Tapanuli Tengah- D.I Pandurungan/Sitandiang, Kab. Tapanuli Tengah- D.I Badiri Lopian, Kab. Toba- D.I Sijambur , Kab. Simalungun-D.I. Naga Sompah, Kab. Karo- DI.Parit Lompaten			
	2030	Kab. Dairi- D.I. Siulang-Aling, Kab. Tapanuli Selatan- D.I.Sipirok Komplek, Kab. Toba- D.I.Simangatasi II, Kab. Labuhanbatu- D.I.R Cinta Makmur, Kab. Tapanuli Tengah- D.I Badiri Lopian, K.P.Siantar/Simalungun-DI. Rambung Merah, Kota Pematangsiantar- DI. Sibatu-Batu, Kab. Simalungun- (DI. Panombean Pane,D.I. Naga Sompah), Kab. Deli Serdang- (D.I.R Sisir Gunting,D.I.R Percut, D.I Namorambe)			
c. Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta dukungan terhadap pelaksanaan program 3 juta rumah	2025	- Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survei Lokasi di setiap Kabupaten/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerja sama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Launching Pembangunan 15.000 unit rumah bagi MBR dan ASN	Dinas PKP	1. Dinas PUPR terkait dukungan terkait Tata Ruang,Jalan, dan Keciptakaryaan (sanitasi dan air minum), 2. BPBD koordinasi terhadap Rehab rumah akibat bencana	Bupati/Wali Kota 1. Pendataan dan Validasi Calon Penerima (BNBA = *by name by address*) 2. SK Kumuh yang dikeluarkan Bupati atau Wali Kota terkait wewenang Provinsi untuk luasan 10 – 15 Ha 3. SK Pokja Penanganan Kawasan Kumuh pada Kabupaten/Kota

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		- Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan Kab. Simalungun, Kab. Batu Bara, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Nias Utara, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Pematangsiantar dan Kota Padangsidimpuan		3. Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi 4. Biro Pemotda (memfasilitasi kerja sama antar Pemerintah Daerah) 5. Badan Kepegawaian dan BP Tapera untuk penyediaan data ASN yang belum memilik rumahDinas Kominfo untuk publikasi Media	. Melakukan sosialisasi kepada MBR dan ASN Dinas yang Membidangi Perumahan Rakyat (di Kabupaten/Kota): Pelaksana teknis utama di lapangan. Bertanggung jawab atas pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan langsung dari lokasi perbaikan. Dinas PUPR Kabupaten/Kota: Memberikan bantuan teknis konstruksi, menyusun RAB, dan memberikan supervisi teknis kepada pelaksana di lapangan. Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Membantu dalam pembaruan dan verifikasi data kemiskinan di tingkat lokal. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan: Ujung tombak identifikasi awal calon penerima, sosialisasi langsung kepada masyarakat, memfasilitasi gotong royong, dan membantu monitoring
	2029	- Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survei Lokasi di setiap Kabupaten/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerja sama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan, Kab. Batu Bara, Kab.			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Simalungun, Kota Tebing Tinggi, Kab. Humbang Hasundutan dan Kab. Toba			di lapangan. Badan Kepegawaian dan BP Tapera: Penyediaan data ASN yang belum memiliki rumah
6. Bantuan Hukum dan perlindungan rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE).	2025	- Penandatanganan Nota Kesepahaman Pemprovsu dengan Poldasu - Penetapan SK Tim Prestice Provinsi - Penyusunan panduan teknis pelaksanaan - Pembentukan kelembagaan Prestice dan Edukasi dan Sosialisasi Prestice di 8 kota (Medan, Tebing Tinggi, Binjai, Pematangsiantar, Sibolga, Tanjungbalai, Gunungsitoli, Padangsidimpuan) - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba	Biro Hukum	Dinas PMD Capil (memberikan data/pemetaan desa prioritas kegiatan PRESTICE yaitu desa dengan karakteristik konflik yang tinggi) Diskominfo (Publikasi),	1. Replikasi Kegiatan Prestice pada tingkat Kabupaten/Kota 2. Edukasi dan Sosialisasi Prestice di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan ke level Kecamatan dan Desa. 3. Pendampingan dari bagian hukum Kabupaten/Kota dari kasus tidak pidana ringan yang ditangani oleh PRESTICE

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2026-2030	- Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan)			

Tabel 4. 9. Dukungan Kota Binjai terhadap Program Prioritas/Proyek Strategis Daerah (PSD)

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
PP1. PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH UNGGULAN BERBASIS PENINGKATAN SKILL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN POTENSI WILAYAH DI TINGKAT LOKAL					
3. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah	2025	Pendataan valid rehab ruang kelas tahun 2026-2029 •Provinsi Sumatera Utara (Dokumen Aprasial)	Dinas Pendidikan	PUPR (Appraisal/Penilaian Kerusakan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	Pembangunan infrastruktur akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah yang akan dilakukan kegiatan rehabilitasi ruangan kelas rusak
	2026	Pelaksanaan Fisik Tahap I – 150 Ruang Kelas (2026) di 21 Kabupaten/Kota •Medan, Binjai, Langkat, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjung Balai, Labuhanbatu, Pematangsiantar, Samosir, Toba, Sibolga, Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Padang Lawas Utara, Nias, Nias Selatan, Gunungsitoli, Nias Utara, Nias Barat			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2027	Pelaksanaan Fisik Tahap II – 150 Ruang Kelas (2027) di 22 Kabupaten/Kota • Medan, Binjai, Langkat, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjung Balai, Labuhanbatu, Pematangsiantar, Samosir, Toba, Sibolga, Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Padang Lawas Utara, Nias, Nias Selatan, Gunungsitoli, Nias Utara, Nias Barat			
	2028	Pelaksanaan Fisik Tahap III – 190 Ruang Kelas (2028) di 28 Kabupaten/Kota •Medan, Binjai, Langkat, Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Dairi, Tebing Tinggi, Batu Bara, Asahan, Tanjung Balai, Labuhanbatu, Labura, Labusel, Simalungun, Pematangsiantar, Samosir, Toba, Humbahas, Taput, Tapsel, Tapteng, Sibolga, Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Padang Lawas			
	2029	Monitoring, Evaluasi & Pemutakhiran Data (2029)			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru	2026	Pembangunan RKB (mendesak) Tahap II (2026) sebanyak 80 RKB di 19 Kabupaten/Kota • Langkat, Binjai, Medan, Dairi, Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Simalungun, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padangsidimpuan, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 4 unit USB	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	Penyediaan atau hibah Lahan dari Kabupaten/Kota untuk lokasi Pembangunan RKB sesuai kebutuhan. Pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah.
05. Optimalisasi Sarana dan Prasarana BLK Provsu menuju BLK Tematik Bioindustri dan Pariwisata	2025	1. Penyusunan regulasi teknis, Tim Pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/488/KPTS/2025 mengenai Tim Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sumatera Utara, Penyusunan DED (tematik bioindustri dan pariwisata), MoU kerja sama pemagangan dan rekrutmen tenaga kerja lokal (Kek Sei	DISNAKER	1. Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral: Disperindag ESDM bersifat mendukung dan lintas sektor, bukan pelaksana utama pelatihan. Maka Disperindag ESDM mendukung proyek strategis BLK, sebagai berikut: •Menjadi penghubung antara	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara Kabupaten/Kota berperan dalam menyiapkan: 1. Dukungan sarana dan prasaran pendukung sesuai kewenangan kabupaten

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Mangke, KIM, Inalum dan Kuala Tanjung) Mou yang telah dilaksankan antara Pemrov dan Kek Sei Mangke rekrutmen tenaga kerja 12.000 tahun 2027 2. Melakukan pemetaan data jenis pelatihan dan peralatan melalui dokumen Rencana Tenga kerja Daerah (RTKD) dan MOU rekrutmen tenaga kerja (Kim Inalum dan Kuala Tanjung) akan di laksanakan di akhir tahun 2025-2030 Dilokasi UPTD BLK Dinas Ketenagakerjaan di Kab. Simalungun		pelaku industri/perusahaan dengan Disnaker dan BLK. •Memfasilitasi program magang industri dan penempatan lulus BKL ke industri lokal. 2. Disperindag ESDM dapat menjadi mitra dalam pengembangan program pelatihan vokasi di BLK melalui fasilitasi pelatihan berbasis proyek industri, penyediaan instruktur ahli dari sektor industri dan akses terhadap bantuan alat pelatihan. 3. Dinas Pendidikan: Dinas Pendidikan memiliki peran dalam proyek strategis ini dalam hal pelatihan kerja, sebagai berikut: •Mendorong sinkronisasi kurikulum SMK/vokasi dengan skema pelatihan BLK agar lulusan SMK lebih siap kerja. •Memastikan kompetensi lulusan SMK sejalan dengan kebutuhan industri dan program pelatihan BLK.	2. Memfasilitasi kerja sama antara BLK dan perusahaan lokal untuk program magang, pelatihan kerja, atau penyerapan tenaga kerja berbasis potensi daerah
	2026	1. Optimalisasi sarana prasarana dan pengadaan peralatan BLK 2. Revitalisasi BLK 3. Peningkatan Kompetensi SDM Instruktur dan Pengelola 4. *Launching New* BLK tematik 5. Perluasan jaringan kerja sama rekrutmen tenaga kerja, magang. Dilokasi UPTD BLK Dinas Ketenagakerjaan di Kab. Simalungun			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2027	1. Penyesuaian Kurikulum Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) berdasarkan tematik bioindustri dan pariwisata, Pelatihan & Sertifikasi Profesi, hal ini dilakukan dengan kerja sama pemprov dan balai besar pelatihan vokasi dan produktivitas (BBPVP) 2. Peningkatan kualitas/modernisasi/ upgrading Sarana dan Prasarana Pelatihan tematik bioindustri dan pariwisata 3. Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Indusrti (DUDI) dan Sektor Ekonomi Kreatif akan bekerjsama sama dengan KADIN 4. Pelaksanaan pelatihan di BLK dengan jumlah 1000 peserta/tahun dan setelah dilaksanakan pelatihan akan di Sertifikasi Profesi lalu rektrutmen ke perusahan yang telah di laksanakan MoU Dilokasi UPTD BLK Dinas Ketenagakerjaan di Kab. Simalungun		•Mengintegrasikan *teaching factory* di SMK dengan fasilitas pelatihan BLK untuk menciptakan ekosistem pelatihan *dual system*. •Mendorong peserta didik SMK mengikuti sertifikasi kompetensi melalui LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang terhubung dengan BLK. •Bersama Disnaker, mendata dan menyiapkan guru produktif/tenaga pelatih yang memenuhi standar pelatihan. 4. Dinas Koperasi dan UMKM: •Mengintegrasikan hasil pelatihan BLK dengan program inkubasi usaha UMKM •Membina lulusan BLK agar mampu mengembangkan usaha mandiri berbasis keahlian yang telah diperoleh •Menyediakan pendampingan usaha lanjutan bagi peserta pelatihan BLK yang ingin berwirausaha	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2028	1. *Upgrade* Peningkatan kualitas/modernisasi/ *upgrading* Sarana dan Prasarana Pelatihan sesuai pemetaan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) (diharapkan dukungan pembiayaan melalui dana CSR) 2. Peningkatan kualitas SDM Pelatih berkerjasama dengan balai besar pelatihan vokasi dan produktivitas (BBPVP) sesuai kebutuhan industri dunia kerja 3. Monitoring dan evaluasi penyerapan lulusan BLK yang di industri (KEK Sei Mangke, Inalum dan Kuala Tanjung) 4. Digitalisasi basis data penyerapan tenaga kerja BLK sebelum dan sesudah pelatihan		•Menyediakan ruang inkubasi bisnis di sentra-sentra UMKM daerah yang terhubung dengan BLK •Membantu lulusan BLK yang berwirausaha dalam promosi dan digitalisasi produk melalui *E-commerce* dan platform digital UMKM. 5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: •Menyediakan ruang promosi bagi hasil karya lulusan BLK di sektor kriya, kuliner, dan fesyen etnik melalui festival budaya, *event* pariwisata, serta platform pemasaran digital. • Menjalin kolaborasi dengan Disnaker untuk mendukung pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat dan budaya lokal melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. •Memberikan dukungan fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi bagi peserta pelatihan BLK untuk	
	2029-2030	1. Pelatihan 1000 peserta/tahun daan melakukan sertifikasi profesi dari hasil pelatihan di BLK Dinas Ketenagakerjaan di Kab. Simalungun akan di jadikan karyawan di perusahaan sesuai dengan MoU yang telah disepakati bersama. 2. *Upgrade* peningkatan kualitas/modernisasi/ *upgrading* Sarana dan Prasarana Pelatihan			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		sesuai pemetaan Rencana Tenaga kerja Daerah (RTKD) (diharapkan dukungan pembiayaan melalui dana CSR) 3. Monitoring dan evaluasi penyerapan lulusan BLK yang di industri (KEK Sei Mangke, Inalum dan Kuala Tanjung)		meningkatkan daya saing dan kesiapan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. •Bekerja sama dengan Disnaker dalam menyusun kurikulum pelatihan di BLK yang relevan dengan kebutuhan industri pariwisata dan subsektor ekonomi kreatif. Dinas Sosial: •Menjangkau dan Memberdayakan Kelompok Rentan Sosial. •Integrasi Program Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Kerja. •Bersinergi dengan Disnaker dalam memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan program pelatihan BLK tepat sasaran, terutama bagi warga miskin dan rentan sosial. •Melalui tenaga pekerja sosial, Dinas Sosial dapat melakukan pendampingan bagi peserta pelatihan selama dan setelah masa pelatihan, untuk memastikan mereka mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh, baik untuk bekerja	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
				maupun memulai usaha secara mandiri. Badan Kepegawaiaan Daerah: •BKD berperan dalam mendukung ketersediaan ASN dengan kompetensi teknis dan manajerial yang relevan, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BLK, baik sebagai instruktur, tenaga administrasi, maupun pengelola program pelatihan. •Melakukan pemetaan dan perencanaan kebutuhan SDM aparatur di bidang pelatihan vokasional agar sejalan dengan arah pengembangan BLK, termasuk dalam pengadaan, rotasi, dan pengembangan karier ASN yang ditempatkan di unit-unit pelatihan. •BKD dapat mengintegrasikan program pelatihan teknis fungsional dan manajerial bagi ASN yang bertugas di lingkungan BLK ke dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pelatihan.	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
				•Berperan dalam membangun sistem penilaian kinerja yang berbasis *output* dan dampak, termasuk mengawasi efektivitas kinerja ASN di BLK dalam menyelenggarakan pelatihan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja. Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan	
PP2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM BERKARYA DAN BERPRESTASI					
6. Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang Olahraga Sepak Bola dan Voli tahun 2026 - 2030	2025	1. Inisiasi dan konsolidasi melalui rapat rapat koordinasi tahun 2025 2. Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2025 • Provinsi Sumatera Utara	Dispora	Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan (pembinaan, edukasi dan sosialisasi kepada pelajar untuk dapat menjadi atlet pelajar) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	- Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan liga olahraga pelajar sumut untuk cabor sepak bola dan voli
	2026	- Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2026 - Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2026 • Provinsi Sumatera Utara			- Melaksanakan *side event* pada saat pelaksanaan liga olahraga (pameran UMKM) dan sejenisnya

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2027	- Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2027 - Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2027 • Provinsi Sumatera Utara			
	2028	- Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2028 - Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2028 • Provinsi Sumatera Utara			
	2029	- Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2029 - Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2029 • Provinsi Sumatera Utara			
	2030	- Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2030 - Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2030 - Penguatan *Legacy* & Keberlanjutan Tahun 2030 • Provinsi Sumatera Utara			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
7. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026 - 2030	2025	Inisiasi konsolidasi melalui pertemuan koordinasi Tahun 2025 • Kota Medan dan Kab Deli Serdang	Dispora	Dinas pendidikan / Cabang Dinas Pendidikan (Edukasi dan Sosialisasi bagi Pelajar Difabel untuk dapat mendata dan membina atlet sesuai potensi dan minat siswa) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	NPC Kabupaten/Kota dan Dispora Kabupaten/Kota memperkuat perekrutan dan pembinaan para atlet disabilitas pelajar di Kabupaten/Kota
	2026	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2026 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2026-2027 • Kota Medan dan Kab Deli Serdang			
	2027	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2027 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2027-2028 • Kota Medan dan Kab Deli Serdang			
	2028	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2028 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2028-2029 • Kota Medan dan Kab Deli Serdang			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2029	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2029 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2029-2030 •Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
	2030	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2030 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2030 •Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
PP 3 KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DI BEBERAPA TITIK KAWASAN YANG MENJADI SENTRA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TERPADU					

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
8. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi *(Sumut e-Health Integration system)*	2025	- Penyusunan Kajian dan Bisnis Proses Platform *e-Health Integration System* Tahun 2025 - Pembangunan Aplikasi Tahun 2025 *Launching* Aplikasi Sumut *e-Health Integration System* Tahun 2025 •33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo (Penyediaan Web,Server dan Publikasi Kegiatan)	- Penyediaan data kepesertaan JKN Kabupaten/Kota - Sosialisasi dan edukasi platform kepada faskes tingkat Kabupaten/Kota
	2026	- Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2026 - Pengembangan Aplikasi *Sumut e-Health Integration System* Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			
	2027	- Edukasi penggunaan Aplikasi ke - Masyarakat Tahun 2027 - Pengembangan Aplikasi *Sumut e-Health Integration System* Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			
	2028	- Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2028 - Pengembangan Aplikasi *Sumut e-Health Integration System* Tahun 2026-2029			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		33 Kabupaten/Kota			
	2029	- Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2029 - Pengembangan Aplikasi *Sumut e-Health Integration System* Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			
9. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan dokter spesialis residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025 – 2030)	2028	- Pemenuhan dokter spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM - Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan MedisMerata) Tahun 2025-2030 •RSUD Kab. Batu Bara, RSUD Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah Kab. Serdang Bedagai, RSUD Tuan Rondahaim di Kab. Simalungun, RSUD Salak di Kab. Pakpak Bharat, RSUD Parapat Kab. Simalungun, RSUD Kota Pinang Kab. Labusel,	Dinas Kesehatan	Badan Kepegawaian (Pelaksanaan assesmen kompetensi dokter spesialis sesuai kebutuhan, Pembinaan Monitoring kepada Badan Kepegawaian Kabupaten/Kota agar Dokter Spesialis yang sudah dididik tidak berpindah tempat kerja) Biro Pemotda (Fasilitasi Penyusunan Dokumen kerja sama dengan USU dan UGM) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	- Menyediakan data dokter umum yang memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh beasiswa dokter spesialis dan Mengidentifikasi jenis dan jumlah spesialis yang dibutuhkan di RSUD atau faskes daerah - Menyiapkan surat komitmen bersama dengan para Bupati/Wali Kota yang menyatakan bahwa peserta dokter spesialis akan kembali ke daerah asal dan RSUD setempat

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		RSUD Pandan Kab. Tapteng, RSUD Dolok Sanggul Kab. Humbahas, RSUD Tapanuli Selatan Kab. Tapsel, RSUD Dr. Djasamen Saragih Kota P. Siantar, RSUD Dr. FL Tobing Sibolga, RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai Kota Binjai, RSUD Pancur Batu Kab. Deli Serdang, Lanjutan 2027 : 9 Orang, Lanjutan 2026 : 8 Orang, Lanjutan 2022 : 21 orang			
	2030	- Pemenuhan dokter spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM - Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan MedisMerata) Tahun 2025-2030 •Kabupaten/Kota yang terintervensi pada tahun 2026, 2027, 2028 dan 2029			
PP4 PEMBERANTASAN KEMISKINAN MELALUI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RENTAN SECARA MENYELURUH DAN TEPAT SASARAN					

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
11. Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO).	2025	- Koordinasi program dengan pemangku kepentingan - Pendataan dan penetapan penerima manfaat (KK/KUBE) •Sebanyak 200 KK (40 KUBE) di Kabupaten : Serdang Bedagai dan Deli Serdang pada Tahun 2025 serta 150 KK (UEP) di 4 Kabupaten/Kota yaitu Medan, Binjai, Tebing Tinggi dan Langkat	Dinas Sosial	Disperindag dan Dinas Koperasi UMKM (Dukungan Pelatihan dan Pendampingan bagi sasaran kegiatan Mapro yaitu KUBe dan UEP, fasilitasi keikutsertaan Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif Mapro dalam pameran/expo yang dilaksanakan oleh Dinas) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Dukungan penjajakan calon penerima bantuan agar tepat sasaran. Dukungan koordinasi penyiapan kegiatan pelatihan bagi calon penerima bantuan di Kabupaten/Kota. Replikasi kegiatan serupa di Kabupaten/Kota masing-masing.
	2027	Penyaluran bantuan modal usaha dan Pelatihan keterampilan/pengembangan usaha Program Masyarakat Produktif Tahun 2026-2029 - Pendampingan dan monitoring serta Evaluasi lapangan Tahun 2026-2029 •Sebanyak 550KK (110 KUBE) di 5 (Lima) Kabupaten/Kota: Tapteng, Mandailing Natal, Labura, Toba, Simalungun serta 400 KK (UEP) di 5 Kabupaten/Kota: Binjai, Padang Lawas, Humbanghasundutan, Tapanuli Utara, Dairi.			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
12. Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB)	2025	Identifikasi kebutuhan dan lokasi sasaran (IHK, P3KE, desa rentan pangan, dan wilayah 3T); Penentuan komoditas & harga jual; Penyusunan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Pasar Murah Bergerak (PMB); Koordinasi dan Kemitraan dengan TPID, BULOG, CSR, Distributor, Pengusaha daerah/koperasi/bumdes, Pemerintah Kabupaten/Kota;Penentuan jadwal & titik lokasi; Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) Lokasi: Medan (kontributor inflasi), Pematangsiantar (kota IHK), Padangsidimpuan (akses terbatas), Gunungsitoli (kemiskinan ekstrem), Simalungun (penyangga distribusi), Labusel (wilayah miskin), Tapanuli Selatan (wilayah rawan harga), Langkat (rawan lonjakan harga dan distribusi), Tapanuli Utara (akses geografis sulit), Deli Serdang (wilayah IHK), Humbang Hasundutan (terpencil), Binjai (urban miskin), Toba (*hinterland*), Serdang Bedagai (penyangga pangan), Asahan (daerah padat penduduk)	DISPERINDAG ESDM	• Dinas TPH : Data pangan strategis dan penyediaan stok • Dinas Perhubungan : Transportasi logistik • Dinas Sosial : Data P3KE *by name by address* (untuk menentukan titik titik PMB dilakukan) • Dinas Koperasi & UMKM : Pelibatan UMKM dan Koperasi dalam penyediaan stok • Biro Perekonomian : pelibatan TPID untuk menghitung dampak terhadap pengendalian inflasi • Dinas Kominfo : Publikasi Pelaksanaan • Bappelitbang: Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Inspektorat : Pengawasan Pelaksanaan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara Kabupaten/Kota berperan dalam menyiapkan (Tahun 2025-2030): 1. Pendataan kecamatan dan jumlah penduduk miskin dan rawan miskin; 2. Pendataan jumlah KUMKM penyedia Bahan Kebutuhan Pokok; 3. Pengawasan distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok; 4. kerja sama antar kabupaten dalam penyediaan Bahan Kebutuhan Pokok 5. Penyediaan lokasi untuk pelaksanaan; 6. Monitoring dan evaluasi

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2029	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) • 15 Kabupaten/Kota Tebing Tinggi (kota IHK baru), Binjai (urban miskin), Toba (wilayah distribusi luas), Langkat (wilayah perbatasan), Samosir (akses logistik air), Pakpak Bharat (akses sangat terbatas), Humbahas (wilayah dataran tinggi), Tapanuli Tengah (harga fluktuatif), Mandailing Natal (kemiskinan struktural), Padang Lawas (akses distribusi sulit), Deli Serdang (wilayah IHK), Karo (rawan inflasi hortikultura), Nias Selatan (logistik laut), Simalungun (distribusi lintas kabupaten), Asahan (wilayah urban pertanian)			
13. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)	2025	1. Pendataan dan verifikasi 2. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan (Pekerja rentan yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar) sebanyak 21.000 (APBD dan DBH Sawit) 3. Penguatan peran dan komitmen Kabupaten/Kota dalam pembiayaan dan regulasi (MoU	DISNAKER	• Dinas Sosial • Dinas Sosial berperan dalam memberikan data dukung DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memastikan penerima termasuk dalam kategori penerima bantuan. • Pendataan dan Validasi Calon Penerima, Mengelola dan memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara Kabupaten/Kota berperan dalam menyiapkan: 1. Mendukung pelaksanaan agar bisa mencapai target *Universal Coverage Jamsostek* (UCJ) sebesar

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Pemprovsu dengan Kabupaten dan Kota) -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2)		sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran BPJS. • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil • Penyediaan dan Verifikasi Data Identitas • Menyediakan data kependudukan yang valid (NIK, KK, KTP) sebagai prasyarat utama pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan. • Melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan sistem BPJS, DTKS (Dinas Sosial), dan lembaga lain untuk memastikan data pekerja rentan terverifikasi secara administratif. • Dukungan Pemutakhiran Data DTKS, Bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan data identitas dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang digunakan untuk menetapkan penerima bantuan iuran BPJS. • Membantu mempercepat proses	60% sesuai RPJMD 2025-2029 2. Memberikan sosialisasi untuk masyarakat, khususnya untuk tenaga kerja rentan dan masyarakat yang berada di garis kemiskinan 3. Pengalokasian DBH sawit dan APBD dengan persentase pembagian 80 persen Kabupaten/Kota dan 20 persen provinsi utk perlindungan pekerja rent an miskin ekstrem desil 1 dan 2
	2026	Perluasan kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.645 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2			
	2027	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.646 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2			
	2028	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.647 dengan skema penganggaran			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2		registrasi atau koreksi data calon penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap. • BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan berperan menyelenggarakan perlindungan sosial bagi pekerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Perlindungan atas risiko kecelakaan selama bekerja. • Jaminan Kematian (JKm): Santunan kepada ahli waris pekerja yang meninggal. • Jaminan Hari Tua (JHT): Tabungan jangka panjang bagi pekerja saat pensiun. • Jaminan Pensiun (JP): Penghasilan berkala untuk pekerja setelah pensiun. • Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Bantuan uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK. • Kominfo: Publikasi Kegiatan	
	2029	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2			
	2030	1. Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota 2. Evaluasi menyeluruh dan pencapaian target cakupan 60% UCJ -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
14. Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi	2025	- Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti - Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi		PUPR (Dokumen appraisal, pendampingan, monitoring dan evaluasi untuk revitalisasi panti sosial) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, Disnaker (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan Kerja bagi sasaran Penghuni Panti) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	- Kabupaten/Kota mendukung pelaksanaan pelatihan bimbingan mental, dan pendidikan paket A/B/C bagi penerima manfaat yang dirujuk dari panti sosial provinsi khususnya panti anak dan remaja - Kabupaten/Kota bersama Provinsi melakukan pemantauan, evaluasi atas keberlanjutan penerima manfaat.
	2026	- Penyusunan dokumen *appraisal*/penilaian kerusakan bekerja sama dengan Dinas PUPR - Penyusunan dokumen perencanaan (jasa konsultan perencanaan) untuk 13 panti sosial - Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti - Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
	2027	- Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (4 unit) - Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti - Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
	2028	- Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (4 unit) - Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti - Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		yang akan memasuki masa terminasi			
	2029	- Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (5 unit) - Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti - Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
	2030	- Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti - Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
PP 5 PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH					
18. Pemanfaatan Aset barang milik daerah melalui kerja sama ekonomi	2025	- Inventarisasi Barang Milik Daerah yang belum optimal, serta potensi pemanfaatan - Penyusunan skema/proses bisnis pemanfaatan aset BMD	BKAD	Bapenda Provsu : Dukungan dalam proses bisnis pendapatan melalui pemafaatan aset BMD dengan kerja sama ekonomi Bappelitbang Provsu : Dukungan dalam penyusunan konsep dan	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota pada pelaksanaan pengamanan BMD dalam penerbitan SKT lahan (Surat Keterangan Kepemilikan Lahan) dari

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		- Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi - Proses digitalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah		perencanaan Diskominfo : Dukungan dalam penyediaan web aplikasi dan promosi OPD Pengguna BMD : Dukungan dalam inventarisir dan pengamanan aset serta pemeliharaan BMD	Pemerintah Setempat (Kelurahan atau Kepala Desa)
	2026	- Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) - Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi - Penyusunan Regulasi penggunaan web aplikasi pemanfaatan Barang Milik Daerah - Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM penilai barang			
	2027	- Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) - Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi - Pengembangan skema pemanfaatan Barang Milik Daerah - Pengembangan sistem informasi atau promosi			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2028	- Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) - Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi - Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk kerja sama dengan Platform lain			
	2029	- Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) - Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi - Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk kerja sama dengan Platform lain (kerja sama dengan 1 Platform) - Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah produktif berkelanjutan			
	2030	- Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan)			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		- Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi - Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui kerja sama ekonomi berkelanjutan			
PP 7 KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL					
27. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	2025	Fokus pada persiapan program, pembentukan Tim Pokja FPPS di provinsi dan Kabupaten/Kota, rekrutmen dan pelatihan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS), pemutakhiran data kelompok tani, koordinasi dengan lembaga keuangan, dan sosialisasi program. • 33 Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH bertindak sebagai penghubung antara kelompok tani dengan lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, serta lembaga	a) Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran sentral dalam penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pembinaan koperasi tani dan UMKM berbasis pertanian. Dinas ini dapat memfasilitasi akses permodalan bagi kelompok tani melalui penguatan koperasi simpan pinjam, pelatihan manajemen usaha tani, hingga menjembatani kerja sama antara koperasi dan lembaga keuangan.	Memetakan kelompok tani yang layak dan potensial untuk memperoleh akses permodalan, berdasarkan data luas lahan, komoditas yang diusahakan, serta rekam jejak kelembagaan kelompok

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
			penjaminan kredit. Melalui penyediaan data kelompok tani, pelatihan manajemen usaha tani, serta pembentukan kelembagaan petani yang kuat, dinas membantu petani memenuhi persyaratan administratif dan teknis agar layak mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan pertanian lainnya.	b) ESDM berkontribusi dalam mendorong hilirisasi produk pertanian dan menjaga stabilitas harga hasil tani. Melalui penguatan rantai nilai dan pasar hasil tani, dinas ini dapat membuka peluang tambahan pendapatan bagi petani yang dapat digunakan sebagai modal atau premi asuransi. c) Dinas Kominfo memainkan peran dalam penyebarluasan informasi terkait program bantuan iuran premi asuransi dan akses permodalan. Melalui berbagai saluran komunikasi digital dan non-digital, Kominfo dapat menjamin transparansi program, meningkatkan literasi digital kelompok tani, dan mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pengajuan permodalan dan asuransi pertanian. d) Dinas Pemdesdukcapil memiliki peran strategis dalam	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
				verifikasi dan validasi data kependudukan serta kelembagaan desa sebagai basis penyaluran bantuan. Melalui data kependudukan dan basis kelompok tani di desa, Pemdesdukcapil memastikan agar bantuan permodalan maupun iuran premi asuransi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil kelompok tani. e) Diskominfo (Publikasi	
27. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	2026	Mulai pelaksanaan Temu Pembiayaan tahap I dan II, pendampingan realisasi kredit, pelatihan manajemen keuangan bagi kelompok tani penerima pembiayaan, serta monitoring awal terhadap usaha penerima kredit. • 33 Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH bertindak sebagai penghubung antara kelompok tani dengan lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, serta	f) Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran sentral dalam penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pembinaan koperasi tani dan UMKM berbasis pertanian. Dinas ini dapat memfasilitasi akses permodalan bagi kelompok tani melalui penguatan koperasi simpan pinjam, pelatihan manajemen usaha tani, hingga menjembatani kerja sama antara koperasi dan lembaga keuangan.	Memetakan kelompok tani yang layak dan potensial untuk memperoleh akses permodalan, berdasarkan data luas lahan, komoditas yang diusahakan, serta rekam jejak kelembagaan kelompok
	2027	Memperluas cakupan penerima pembiayaan, memperkuat kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan swasta, serta memberikan pelatihan lanjutan kepada FPPS terkait negosiasi bisnis dan pemasaran.			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		• 33 Kabupaten/Kota	lembaga penjaminan kredit. Melalui penyediaan data kelompok tani, pelatihan manajemen usaha tani, serta pembentukan kelembagaan petani yang kuat, dinas membantu petani memenuhi persyaratan administratif dan teknis agar layak mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan pertanian lainnya.	g) ESDM berkontribusi dalam mendorong hilirisasi produk pertanian dan menjaga stabilitas harga hasil tani. Melalui penguatan rantai nilai dan pasar hasil tani, dinas ini dapat membuka peluang tambahan pendapatan bagi petani yang dapat digunakan sebagai modal atau premi asuransi. h) Dinas Kominfo memainkan peran dalam penyebarluasan informasi terkait program bantuan iuran premi asuransi dan akses permodalan. Melalui berbagai saluran komunikasi digital dan non-digital, Kominfo dapat menjamin transparansi program, meningkatkan literasi digital kelompok tani, dan mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pengajuan permodalan dan asuransi pertanian.	
	2028	Mengintegrasikan pemasaran digital dan *e-commerce*, mengembangkan sistem informasi pembiayaan pertanian berbasis aplikasi, serta melatih FPPS dan kelompok tani dalam penggunaannya • 33 Kabupaten/Kota			
	2029	Melakukan diversifikasi sumber pembiayaan melalui koperasi, CSR, dan investor. Mengembangkan usaha hilir di bidang pascapanen dan olahan, memberikan pelatihan manajemen usaha hilir, serta mendorong pemasaran produk hilir. • 33 Kabupaten/Kota			
	2030	Melaksanakan kajian dampak ekonomi program, menyusun model pendampingan berkelanjutan, dan melatih FPPS menjadi konsultan atau koperasi tani. • 33 Kabupaten/Kota			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
				i) Dinas Pemdesdukcapil memiliki peran strategis dalam verifikasi dan validasi data kependudukan serta kelembagaan desa sebagai basis penyaluran bantuan. Melalui data kependudukan dan basis kelompok tani di desa, Pemdesdukcapil memastikan agar bantuan permodalan maupun iuran premi asuransi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil kelompok tani. j) Diskominfo (Publikasi)	
PP 8 PARIWISATA YANG MENGGERAKKAN POTENSI ALAM LOKAL DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA LANGSUNG (KOMUNITAS, PEMERINTAH DAERAH/DESA/KELURAHAN DAN PENGUSAHA LOKAL)					

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
PP 9 EKONOMI KREATIF DAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI					
34. Sumut digital market dan galeri virtual produk UMKM kreatif	2025	Evaluasi *Platform e-commerce* yang sudah ada (SIMITRA)	DISKOP UMKM	KOMINFO : Publikasi Media	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM, sementara Kabupaten/Kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan UMKM binaan Kabupaten/Kota - Kurasi Produk UMKM - Klasterisasi UMKM yang dapat dimasukkan ke dalam Galeri *Capacity Building*
34. Sumut digital market dan galeri virtual produk UMKM kreatif PP 10 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	2026	Desain dan pengembangan platform e-commerce; Kurasi awal 100 produk UMKM; Kemitraan dengan *platform* logistik & *payment gateway*. Manajemen Operasional *platform e-commerce*; Promosi dan sosialisasi *platform e-commerce*; • PLUT		DISKOP UKM : Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan *Platform*; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM, sementara Kabupaten/Kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan UMKM binaan Kabupaten/Kota - Kurasi Produk UMKM
	2027	*Onboarding* UMKM; Pelatihan dan fasilitasi branding, dan manajemen toko *online*. Manajemen Operasional *platform e-commerce*; Promosi dan sosialisasi *platform e-*		KOMINFO : Publikasi Media	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		commerce; • PLUT			- Klasterisasi UMKM yang dapat dimasukkan ke dalam Galeri - *Capacity Building* -
	2028	Pengembangan *E-commerce* menjadi *Market Place;* Integrasi dengan katalog elektronik, Manajemen Operasional *platform e-commerce*; Promosi dan sosialisasi *platform e-commerce;* • PLUT		DISKOP UKM : Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan	
	2029	Galeri Virtual 3D; Kampanye digital nasional & regional, Manajemen Operasional *platform e-commerce*; Promosi dan sosialisasi *platform e-commerce;* • PLUT			
	2030	Kurasi produk ekspor; Promosi virtual di *event* internasional (*virtual expo, marketplace* ASEAN), Manajemen Operasional *platform e-commerce* dan Promosi dan sosialisasi *platform e-commerce* ; • PLUT			
35. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	2025	1. Penyusunan SK Tim Forum Pemangku Kepentingan SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030 2. Sosialisasi SK Tim forum dan *milestone* TPB SDGs 2025-2030	Bappelitbang	Seluruh Perangkat Daerah	1. Penyusunan dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Kabupaten/Kota se-Sumut tahun 2025-2030

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		3. *Updating* target capaian SDGs tahun 2025 disesuaikan dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 4. Penyusunan skema *Declaration and Registration System* 5. Pembangunan fitur aplikasi pendaftaran BRS SDGs 6. Replikasi, instalasi dan *Capacity Building* Aplikasi E-Monev SDGs (Inovasi) 7. Menyusun Draf Rancangan Awal RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030 8. *Launching* dan Pelaksanaan BRS *pilot project* sekaligus penyerahan sertifikat kepada 15 UMKM 9. *Workshop* Penyusunan *Voluntary Local Review* (VLR) Kabupaten/Kota 10. Modifikasi Aplikasi E-Monev SDGs 11. *Workshop E-Monev* dengan Bappeda/Bapperida/Bappelitbang Kabupaten/Kota Menyusun *draf Monev* capaian SDGs tahun 2025			2. Dukungan pelaksanaan skema BRS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs : identifikasi UMKM/IMK serta pelaku usaha 3. Dukungan pelaksanaan *North Sumatera SDGs Action Awards* 4. Dukungan proses penginputan E- Monev Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas untuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
	2026	1. Inovasi *Business Registration System Policy TPB/SDGs*			5. Penyusunan dokumen Tujuan Pembangunan

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		2. Diseminasi Skema BRS TPB/SDGs (Kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM pada acara FYP, BRS SDGs dijadikan kurikulum) 3. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2025 4. Finalisasi Draf RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 melalui desk per pilas TPB/SDGs 5. *Launching* Aplikasi e-Monev 6. Pelaksanaan skema *Declaration and Registration System BRS TPB/SDGs* 7. Diseminasi RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 8. Penyusunan Rancang Bangun aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI) 9. *Workshop* Penyusunan *Voluntary Local Review (VLR)* Kabupaten/Kota 10. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2026 12. Sosialisasi *North Sumatra SDGs Action Award 2027* (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev)			Berkelanjutan/SDGs Kabupaten/Kota se-Sumut tahun 2025-2030 6. Dukungan pelaksanaan skema BRS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs : identifikasi UMKM/IMK serta pelaku usaha 7. Dukungan pelaksanaan *North Sumatera SDGs Action Awards* 8. Dukungan proses penginputan E- Monev Kabupaten/Kota 9. Peningkatan Kapasitas untuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs 10. Inspektorat Kabupaten/Kota : Koordinasi Pengawasan dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan Proyek Strategis yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2027	1. Pembangunan aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI) 2. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2026 3. Forum *Business Registration System* (BRS) 4. *North Sumatra SDGs Action Award 2027* (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev) 5. *Desk* capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2026 6. *Workshop* Penyusunan *Voluntary Local Review* (VLR) Kabupaten/Kota 7. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2027 11. Sosialisasi penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI)			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2028	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2027 2. Finalisasi aplikasi e-Monev SDGs 3. Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI) 4. *North Sumatra SDGs Action Award 2028* 5. *Launching* aplikasi e-Monev SDGs 6. Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs 7. *Desk* capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2027 8. *Workshop* Penyusunan *Voluntary Local Review (VLR)* Kabupaten/Kota 8. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2028			
	2029	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2028 2. Pelaksanaan Skema BRS 3. Finalisasi integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA 4. *Launching* integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		5. Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs 6. *Desk* capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2028 7. Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI) 8. *North Sumatra SDGs Action Award 2029* 9. Pelaksanaan Skema BRS 9. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2029			
	2030	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2029 2. Desk capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs tahun 2029 3. *North Sumatra SDGs Action Award 2030* 4. Menyusun Draf Laporan Monev RAD TPB/SGDs Tahun 2026-2030 5. *Workshop* Penyusunan *Voluntary Local Review* (VLR) Kabupaten/Kota 10. Menyusun laporan akhir kegiatan SDGs			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
36 kerja sama APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan proyek strategis	2025	- Penyusunan MoU antara APIP dengan APH (Kejaksaan Tinggi, Kepolisian - Pendampingan Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah	Inspektorat	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan Perangkat Daerah yang memiliki Proyek Strategis)	
36 kerja sama APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan proyek strategis PP 11. TRANSFORMASI DIGITAL DAN INOVASI TEKNOLOGI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT	2026	- Reviu Perencanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pendampingan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara	Inspektorat	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan Perangkat Daerah yang memiliki Proyek Strategis)	Inspektorat Kabupaten/Kota : Koordinasi Pengawasan dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan Proyek Strategis yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota
	2027	- Reviu Perencanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pendampingan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara			
	2028	- Reviu Perencanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pendampingan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2029	- Reviu Perencanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pendampingan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara			
	2030	- Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
		-			
37. Pemanfaatan Satu Data SUMUT pusat data dan informasi pembangunan	2025	- Tindak lanjut MoU terkait kerja sama teknis dengan BPS dan Diskominfo dalam pembangunan aplikasi Satu Data (SADAINA *reborn*) - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - *Launching* SADAINA *reborn* di Konreg PDRB ISEI (BPS dan Diskominfo) - *Updating* SK Tim Pelaksana SADAINA Diseminasi aplikasi dan tupoksi tim SADAINA	Dinas Kominfo	Seluruh OPD menginput data statistik sektoral	Replikasi aplikasi, menyediakan SDM, menyiapkan regulasi terkait

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2026	- Pemanfaatan SADAINA *reborn* - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu Data tingkat Daerah - Proses integrasi Satu Data dengan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Provsu - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data Geospasial - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data SDGs			
	2027	- Pemanfaatan SADAINA *reborn* - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu Data tingkat Daerah - Proses integrasi Satu Data dengan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Provsu - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data Geospasial - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data SDGs			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2028	- Pemanfaatan SADAINA *reborn* - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu Data tingkat Daerah - Proses integrasi Satu Data dengan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Provsu - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data Geospasial - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data SDGs			
	2029	- Pemanfaatan SADAINA *reborn* - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu Data tingkat Daerah - Proses integrasi Satu Data dengan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Provsu - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data Geospasial - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data SDGs			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2030	- Menyediakan API (*Application Programming Interface*) - Pemanfaatan SADAINA *reborn* - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu data tingkat Daerah - Monitoring dan Evaluasi			
PP13. PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAN TRANSPORTASI YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN DAYA SAING		-			
40. Dukungan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Melalui Pembangunan BRT dan Peningkatan Kereta *Commuter*	2025	Perhitungan Nilai Aset Lahan oleh Konsultan *Appraisal* Pengadaan Lahan Depo BRT Mebidang	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, Biro Organisasi membentuk kelembagaan (BLUD) BRT Mebidang, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Pelaksana operasional harian, koordinator lapangan. Kota Binjai: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT Kab. Deli Serdang: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2026	Pengadaan lahan di Jl Makalona Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai seluas 12.000 M2 dan Pengadaan lahan di Desa Tanjung Garbus I Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang seluas 4.970 M2 - Pembentukan BLUD/UPT Pengelola Sistem Angkutan Umum Massal BRT - Penyediaan Bus Koridor Terminal Binjai – Medan Mall sejumlah 16 unit - Penyediaan biaya *operational* dan m*aintenance*, biaya pengelolaan dan manajemen serta biaya sistem *ticketing* untuk koridor Terminal Ikan Paus Binjai – Medan Mall - Pembangunan 61 Halte terdiri dari 44 Bus Pole, 16 Halte kecil dan 1 Halte besar Medan, Deli Serdang dan Binjai			
	2027	- Penyediaan biaya OM untuk Koridor Terminal Ikan Puas Kota Binjai – Medan Mall - Penyediaan biaya o*perational* dan *maintenance*, biaya pengelolaan dan manajemen			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		serta biaya sistem *ticketing* untuk koridor Terminal Ikan Paus Binjai – Medan Mall dan koridor Terminal Lubuk Pakam – Amplas - Kebutuhan Bus Koridor Terminal Lubuk Pakam – Amplas sejumlah 15 unit - Halte bus di luar koridor Terminal Lubuk Pakam 46 Halte, terdiri dari 36 Bus Pole, 9 Halte kecil dan 1 Halte besar Medan, Deli Serdang dan Binjai			
	2028	Penyediaan biaya *operational* & *maintenance*, biaya pengelolaan dan manajemen serta biaya sistem *ticketing* untuk Koridor Terminal Ikan Paus Binjai – Medan Mall dan Koridor Terminal Lubuk Pakam – Amplas Medan, Deli Serdang dan Binjai			
	2029	Penyediaan biaya *operational* & *maintenance*, biaya pengelolaan dan manajemen serta biaya sistem *ticketing* untuk Koridor Terminal Ikan Paus Binjai			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		– Medan Mall dan Koridor Terminal Lubuk Pakam – Amplas Medan, Deli Serdang dan Binjai			
	2030	Penyediaan biaya *operational* & *maintenance*, biaya pengelolaan dan manajemen serta biaya sistem *ticketing* untuk Koridor Terminal Ikan Paus Binjai – Medan Mall dan Koridor Terminal Lubuk Pakam – Amplas Medan, Deli Serdang dan Binjai			
PP 14. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA					
43. Pembangunan TPST Regional	2025	- Identifikasi lokasi potensial pembangunan TPST regional	Dinas PUPR : pelaksana	PUPR: -Penyiapan dokumen Lingkungan, -Dalam pembuatan FS dan DED, dan pembangunan infrastruktur serta pendukungnya, Dinas LHK : - Dukungan dalam proses	1. Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah 2. Penyediaan dan penentuan lokasi

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
				penyusunan dokumen lingkungan hidup -Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, -Dinas Kominfo untuk publikasi media	3. Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan 6. Dukungan SDM
	2026	- Penyusunan Studi kelayakan TPST Regional Mebidang dan FGD dengan Kabupaten/Kota - Pengadaan lahan dan persiapan lokasi *(clean and clear)* - Dokumen peta jalan pengelolaan persampahan TPST Regional	Dinas PUPR : pelaksana	PUPR: -Penyiapan dokumen Lingkungan, -Dalam pembuatan FS dan DED, dan pembangunan infrastruktur serta pendukungnya, Dinas LHK : - Dukungan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup -Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, -Dinas Kominfo untuk publikasi media	4. Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah 5. Penyediaan dan penentuan lokasi 6. Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 7. Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan 6. Dukungan SDM
	2027	- Penyusunan FS DED Lingkungan Hidup (AMDAL) TPST Regional Mebidang			
	2028	- Pembangunan infrastruktur			
	2029	- Operasional dan Pelatihan SDM Pengelola TPST			
	2030	- *Monitoring* dan Evaluasi serta Pengembangan			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
44. Pembangunan PLTSa	2025	1. Inventarisir potensi kerja sama antara Pemprov dan DUDI potensial untuk menyediakan infrastruktur teknologi Koordinasi teknis lintas OPD (PUPR dan LHK) dan Kabupaten/Kota (Medan dan Deli Serdang) - Kawasan Perkotaan (STM Hilir) atau dekat dengan TPST dari tahun 2025-2030	DISPERINDAG ESDM	• PUPR : Pembangunan TPST • LHK: Pengelolaan Sampah • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara Kabupaten/Kota berperan dalam menyiapkan: Lahan dan wilayah untuk pembangunan PLTSa, Penerapan Sistem Persampahan Terpilah Perizinan 1. Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah 2. Penyediaan dan penentuan lokasi 3. Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan 5. Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
					Dukungan SDM
	2026	2. Kajian Potensi PLTSa -Kawasan Perkotaan (STM Hilir) atau dekat dengan TPST dari tahun 2025-2030		• PUPR : Pembangunan TPST • LHK: Pengelolaan Sampah • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara Kabupaten/Kota berperan dalam menyiapkan: Lahan dan wilayah untuk pembangunan PLTSa, Penerapan Sistem Persampahan Terpilah Perizinan 6. Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah 7. Penyediaan dan penentuan lokasi 8. Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 9. Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan
	2027	Pra FS Pembangunan PLTSa - Kawasan Perkotaan (STM Hilir) atau dekat dengan TPST dari tahun 2025-2030			
	2028	Penyusunan FS Pembangunan PLTSa - Kawasan Perkotaan (STM Hilir) atau dekat dengan TPST dari tahun 2025-2030			
	2029	Penjajakan pembiayaan (Investor, KPBU, Hibah, dsb) dan MoU dengan PLN terkait pembelian daya listrik - Kawasan Perkotaan (STM Hilir) atau dekat dengan TPST dari tahun 2025-2030			
	2030	Pembangunan PLTSa serta pengelolaan pemanfaatan residu - Kawasan Perkotaan (STM Hilir) atau dekat dengan TPST dari tahun 2025-2030			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
					10. Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan 11. Dukungan SDM
PP 16. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG MENDUKUNG SUASANA YANG HARMONIS, TOLERAN DAN RUKUN					
49. Bantuan Hibah Rumah Ibadah di 33 Kabupaten/Kota	2025	- Penyusunan perubahan Pergub Hibah Rumah Ibadah dengan mekanisme penyaluran hibah yang memuat alokasi terhadap biaya operasional pengelola dan sarpras rumah ibadah Tahun 2025 - Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	Biro KESRA	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Inspektorat (pendampingan menyeluruh dan tinjauan terhadap tata kelola pemberian bantuan hibah rumah ibadah)	-

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
49. Bantuan Hibah Rumah Ibadah di 33 Kabupaten/Kota 51. Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat	2026	- Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Inspektorat (pendampingan menyeluruh dan tinjauan terhadap tata kelola pemberian bantuan hibah rumah ibadah) Dinas Pendidikan (Koordinasi rekomendasi satuan pendidikan yang membutuhkan pembekalan terhadap edukasi wawasan kebangsaan) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	- Replikasi pelaksanaan kegiatan Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat di Kabupaten/Kota
	2027	- Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2028	- Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2029	- Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2030	- Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
51. Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat	2025	- Pendataan Sasaran Ormas dan Kelompok masyarakat pada daerah rawan konfilk di Sumatera Utara di Tahun 2025 - Penyusunan Modul pembekalan pelatihan wawasan kebangsaan dan Solidaritas Tahun 2025 - Pelaksanaan Kegiatan edukasi wawasan kebangsaan dan Solidaritas bagi Ormas Tahun 2025 -Monitoring dan Evaluasi Tahun 2025 Asahan, Pematang Siantar			
	2026	- Pendataan Sasaran Ormas dan Kelompok masyarakat pada daerah rawan konfilk di Sumatera Utara di Tahun 2026 - Pelaksanaan Kegiatan edukasi wawasan kebangsaan dan Solidaritas bagi Ormas Tahun 2026 -*Monitoring* dan Evaluasi Tahun 2026		Dinas Pendidikan (Koordinasi rekomendasi satuan pendidikan yang membutuhkan pembekalan terhadap edukasi wawasan kebangsaan) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Replikasi pelaksanaan kegiatan Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat di Kabupaten/Kota

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		•Kota Medan, Kab. Batu Bara, Toba, Tanjungbalai, Serdang Bedagai			
	2027	- Pendataan Sasaran Ormas dan Kelompok masyarakat pada daerah rawan konfilk di Sumatera Utara di Tahun 2027 - Pelaksanaan Kegiatan edukasi wawasan kebangsaan dan Solidaritas bagi Ormas Tahun 2027 -*Monitoring* dan Evaluasi Tahun 2027 •Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Humbahas, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Samosir, Tapanuli Selatan dan Padangsidempuan			
	2028	- Pendataan Sasaran Ormas dan Kelompok masyarakat pada daerah rawan konfilk di Sumatera Utara di Tahun 2028 - Pelaksanaan Kegiatan edukasi wawasan kebangsaan dan Solidaritas bagi Ormas Tahun 2028			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		-*Monitoring* dan Evaluasi Tahun 2028 •Kabupaten Medan, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Binjai			
	2029	- Pendataan Sasaran Ormas dan Kelompok masyarakat pada daerah rawan konfilk di Sumatera Utara di Tahun 2029 - Pelaksanaan Kegiatan edukasi wawasan kebangsaan dan Solidaritas bagi Ormas Tahun 2029 -*Monitoring* dan Evaluasi Tahun 2029 •Kabupaten Langkat, Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Medan, Simalungun, Pematang Siantar, Serdang Bedagai, Tanjungbalai, Karo			
	2030	- Pendataan Sasaran Ormas dan Kelompok masyarakat pada daerah rawan konfilk di Sumatera Utara di Tahun 2030			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
		- Pelaksanaan Kegiatan edukasi wawasan kebangsaan dan Solidaritas bagi Ormas Tahun 2030 - *Monitoring* dan Evaluasi Tahun 2030 •Kota Medan, Deli Serdang, Tanjungbalai, Binjai, Karo, Langkat, Mandailing Natal, Kab. Batu Bara, Serdang Bedagai, Padangsidempuan			
PP 17. TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG LEBIH AMAN DAN TERTIB					
52. Patroli Gabungan untuk Narkoba di Pintu Masuk Narkoba dan Kawasan-Kawasan Kenakalan Remaja (Genk Motor).	2025	- Pembentukan SK Gubernur tentang Tim Patroli Gabungan Tahun 2025 - Pelaksanaan Rapat Teknis terkait Pelaksanaan Patroli gabungan dengan *Stakeholder* terkait Tahun 2025 - Pelaksanaan Patroli Gabungan geng motor dan Pencegahan Pengedaran Narkoba di Pintu Masuk Narkoba Tahun 2025 • Medan, Binjai, Deli Serdang, Tanjungbalai , Asahan, dan Langkat	Satpol PP	Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota terkait dukungan personel dalam pelaksanaan kegiatan. Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba di Kabupaten/Kota)

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
52. Patroli Gabungan untuk Narkoba di Pintu Masuk Narkoba dan Kawasan-Kawasan Kenakalan Remaja (Genk Motor).	2026	- Pelaksanaan Patroli Gabungan geng motor dan Pencegahan Pengedaran Narkoba di Pintu Masuk Narkoba Tahun 2026 - Pembinaan hasil Patroli Gabungan Tahun 2026 • Medan, Binjai, Deli Serdang, Tanjungbalai , Asahan, dan Langkat		Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota terkait dukungan personel dalam pelaksanaan kegiatan. Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba di Kabupaten/Kota)
	2027	- Pelaksanaan Patroli Gabungan geng motor dan Pencegahan Pengedaran Narkoba di Pintu Masuk Narkoba Tahun 2027 - Pembinaan hasil Patroli Gabungan Tahun 2027 •Medan, Binjai, Deli Serdang, Tanjungbalai , Asahan, dan Langkat			
	2028	- Pelaksanaan Patroli Gabungan geng motor dan Pencegahan Pengedaran Narkoba di Pintu Masuk Narkoba Tahun 2028 - Pembinaan hasil Patroli Gabungan Tahun 2028 •Medan, Binjai, Deli Serdang, Tanjungbalai, Asahan, dan Langkat			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KOTA BINJAI
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2029	- Pelaksanaan Patroli Gabungan geng motor dan Pencegahan Pengedaran Narkoba di Pintu Masuk Narkoba Tahun 2029 - Pembinaan hasil Patroli Gabungan Tahun 2029 •Medan, Binjai, Deli Serdang, Tanjungbalai , Asahan, dan Langkat			
	2030	- Pelaksanaan Patroli Gabungan geng motor dan Pencegahan Pengedaran Narkoba di Pintu Masuk Narkoba Tahun 2030 - Pembinaan hasil Patroli Gabungan Tahun 2030 •Medan, Binjai, Deli Serdang, Tanjungbalai , Asahan, dan Langkat			
53. Pemberantasan Pengguna dan Bandar Narkoba melalui Pemindahan Gembong Narkoba dari Lapas ke Nusakambangan	2025-2030	Tidak ada		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Dinas Perhubungan (pengaturan lalu lintas untuk pemindahan gembong narkoba) Satpol PP (pendampingan saat pemindahan gerbong narkoba)	Penguatan pencegahan narkoba di pemerintahan daerah

BAB 5 – PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025-2029 memuat strategi transformasi pembangunan sebagai manifestasi dari Visi yang ingin dituju dalam lima tahun pembangunan kedepan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat dideteksi melalui target yang telah ditetapkan dari beragam indikator per tahun sebagai bahan monitor, pengendalian dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja pembangunan yang dilaksanakan. Dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi seluruh pihak yang beraktivitas di Kota Binjai, agar saling berkomitmen untuk berkontribusi dalam mewujudkan Kota Binjai yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

Dokumen RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 memerlukan kaidah pelaksanaan untuk menciptakan koordinasi, sinergi, dan konsistensi. Kaidah pelaksanaan yang dimaksud mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. Kaidah pelaksanaan menjadi instrumen pengaman untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029.

5.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Untuk mewujudkan Visi Misi Kota Binjai ke depannya, diperlukan konsistensi dalam perencanaan dan pendanaan. Dokumen RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu RPJMN dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan Kota Binjai. Penyusunan juga diselaraskan dengan RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040 dan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029.

Dokumen RPJMD Kota Binjai akan menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD Kota Binjai, yang akan diturunkan melalui berbagai program dan kegiatan dari masing-masing OPD yang senafas dengan Visi Misi Kota Binjai. Berbagai program dan kegiatan tersebut tentunya perlu didukung dengan pendanaan, baik dengan APBD maupun non APBD yang pembagiannya didasarkan skala prioritas dan kebutuhan pada setiap momen pelaksanaan. Sehingga pengaplikasiannya, Rencana Anggaran dan Belanja Daerah Kota Binjai setiap tahun harus senyawa dengan semangat yang tertuang dalam RPJMD Kota Binjai.

Keterkaitan RPJMD Kota Binjai dengan Perencanaan Pembangunan Lainnya

Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Binjai berkaitan dengan dokumen perencanaan Nasional, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota. Gambaran hubungan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek pada struktur pemerintahan adalah sebagai berikut:

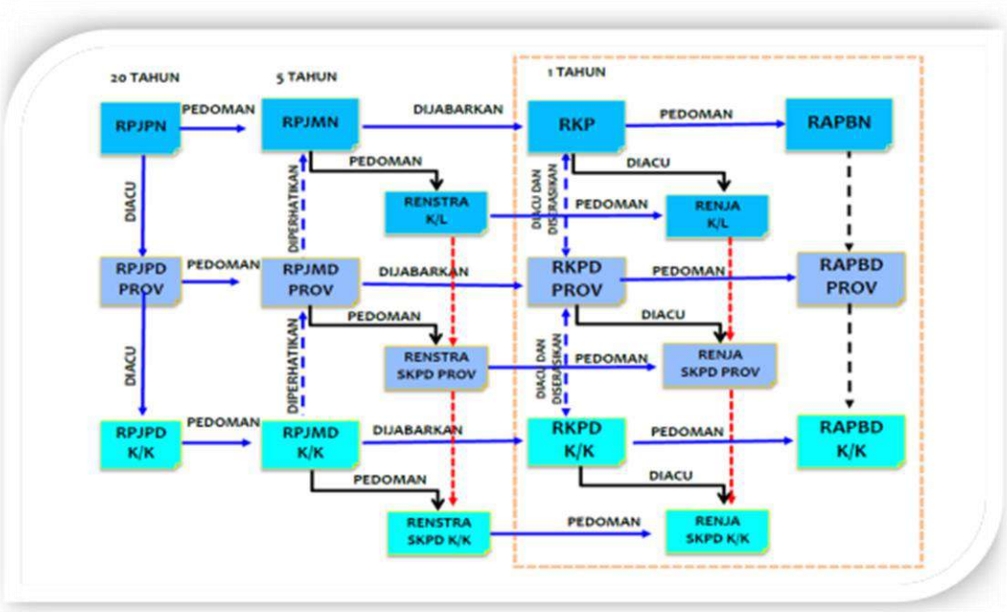

Gambar 5. 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan pada Skala Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Keterkaitan dokumen perencanaan yang ditampilkan pada gambar 9.1. diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai periode 2025-2029 memiliki keterkaitan dan integrasi dengan beberapa dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJPD Kota Binjai, RTRW, KLHS hingga RPJMD wilayah sekitar.
b. Dokumen RPJMD Kota Binjai merupakan implementasi RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kondisi, kebutuhan serta tantangan yang ada di Kota Binjai.
c. Dokumen RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 merupakan pedoman umum dalam penyusunan Renstra OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai pada periode yang sama (lima tahunan).
d. RPJMD Kota Binjai memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun.

e. Dokumen RPJMD Kota Binjai menjadi dasar untuk penjabaran operasional tahunan yang dilakukan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai.

Skema Pendanaan dan Penganggaran

Sinkronisasi perencanaan dengan pendanaan diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Berbagai kebutuhan pembangunan kedepannya yang tergambar dari arah belanja daerah memerlukan dukungan pembiayaan yang mampu memenuhi kebutuhannya baik secara mandiri maupun dengan bersinergi terhadap pelaku pembangunan lainnya. Kebutuhan belanja setiap tahunnya yang dipengaruhi oleh berbagai tantangan kedepan, harus bermuara menuju pencapaian sasaran pokok yang dapat dideteksi dari target-target indikator pembangunan yang sudah ditetapkan. Efisiensi dan efektivitas belanja menjadi kunci untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis kedepannya.

Kebutuhan belanja ini memerlukan dukungan dari pendapatan daerah Kota Binjai, sehingga kemandirian fiskal menjadi satu hal yang harus dipenuhi. Kemandirian ini direalisasikan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang semakin membaik dan penyerapan dana bagi hasil untuk Kota Binjai yang semakin menguat. Penerimaan daerah yang semakin berkualitas tersebut dapat terpenuhi melalui dukungan dalam membentuk perekonomian kota yang mampu menciptakan nilai tambah produksi berlipat serta iklim investasi yang sehat. Selain itu, Pemerintah Kota Binjai memerlukan alternatif serta inovasi pembiayaan, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan kota, baik melalui pemanfaatan obligasi daerah, dana abadi daerah, KPBU, pengelolaan aset daerah maupun mekanisme pembiayaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kota Binjai, yang merupakan salah satu bagian yang berkepentingan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 memerlukan pembiayaan daerah yang berkesinambungan, baik dengan cara meningkatkan kapasitas pembiayaan sektor publik dan pembiayaan sektor non publik. Selain itu, diperlukan manajemen investasi yang berkualitas, yang mampu mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

5.1.2. Kerangka Pengendalian

Pengendalian perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara RPJMD Kota Binjai dengan RPJMN dan RTRW Nasional, konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah, serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, mengungkap bahwa Wali Kota merupakan aktor pengendalian terhadap perencanaan pembangunan di Kota Binjai.

Diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Adapun pengendalian perencanaan pembangunan yang dimaksud meliputi:

1. Pengendalian perencanaan

   Pengendalian pada tahap perencanaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian perencanaan pembangunan, kesesuaian program dengan sasaran, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

2. Pengendalian pelaksanaan

   Pengendalian terhadap pelaksanaan dilakukan untuk memastikan implementasi pembangunan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tahapan ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek.

Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung dengan sistem elektronik terpadu yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik tersebut diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

Manajemen Risiko Pembangunan Nasional atau MRPN merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya efek dari ketidakpastian pada sasaran Pembangunan Nasional. Pengendalian dan pengelolaan risiko dilakukan pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan dan/atau jenis risiko tertentu yang bersifat lintas sektor yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Hasil dari manajemen risiko ini akan digunakan sebagai penilaian kinerja salah satunya terhadap Pemerintah Daerah. MRPN mengkolaborasikan eksisting Manajemen Risiko Organisasi ke dalam sebuah Pengendalian Manajemen Risiko Lintas Sektor yang secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2023. Kerangka Kerja MRPN dapat dilihat pada Gambar 6.1 berikut.

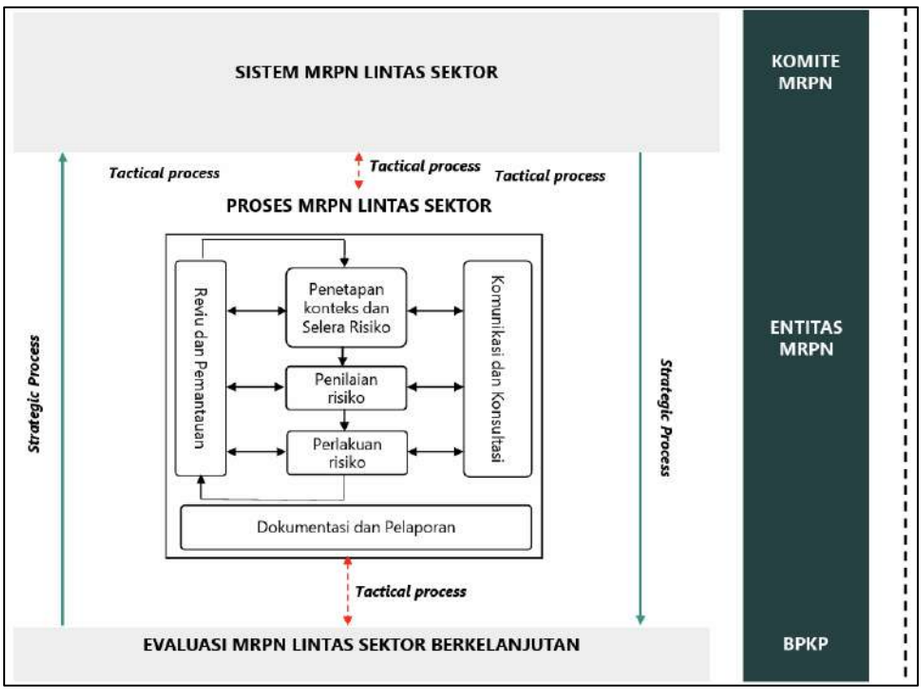

Gambar 5. 2. Kerangka Kerja MRPN
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP (2024)

Pemerintah Daerah, sebagai salah satu entitas MRPN, perlu menerapkan MRPN sejak tahap perencanaan pembangunan daerah. Penerapan MRPN di daerah dilakukan dengan pembentukan komite manajemen risiko dan penyusunan kebijakan manajemen risiko. Proses yang dilakukan untuk menerapkan MRPN antara lain perencanaan kinerja prioritas pembangunan, penentuan objek dan entitas MRPN, dan proses asesmen risiko. Proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan dari manajemen risiko sangat diperlukan dalam meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan dan mengurangi dampak merugikan pada suatu kejadian bagi entitas MRPN. Penerapan MRPN merupakan ikhtiar untuk meningkatkan capaian pembangunan, kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, serta efektivitas sistem pengendalian internal dan berkembangnya inovasi pelayanan publik.

Penyusunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 harus berkesinambungan serta menjaga sinkronisasi antar periodisasi dan substansi yang mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional. Dalam rangka percepatan pembangunan di berbagai sektor sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan, diperlukan tahapan dan integrasi manajemen risiko yang menyeluruh serta pembentukan dasar hukum yang memastikan integrasi tersebut dalam penyelenggaraan manajemen risiko.

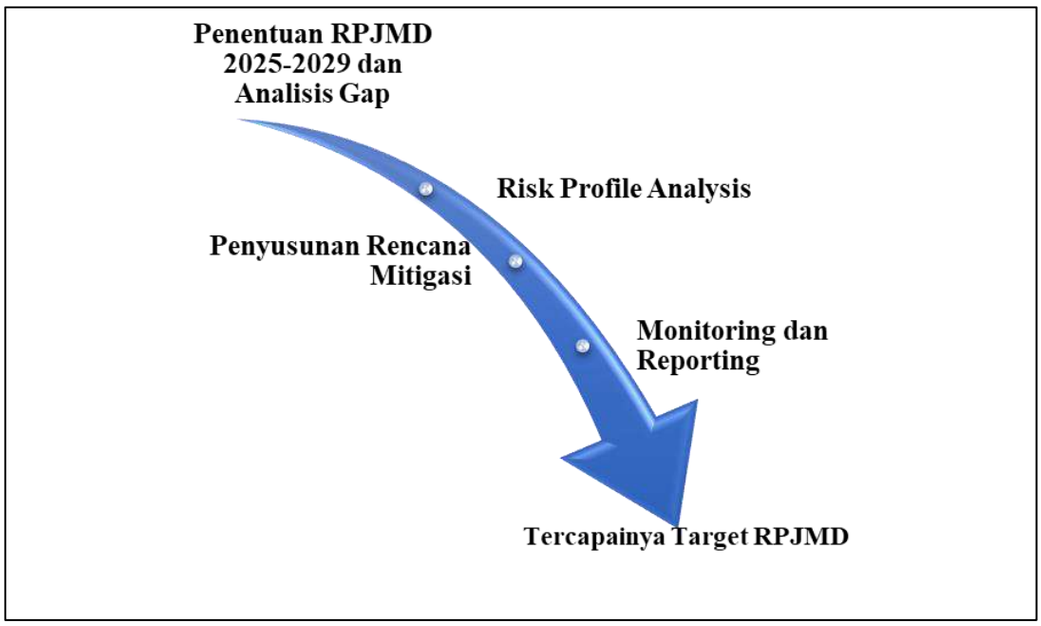

Gambar 5. 3. Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJMD
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

Tahapan manajemen risiko untuk membantu tercapainya target RPJMD dapat dijabarkan sebagai berikut.

1) Penentuan RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menetapkan arah kebijakan dan target yang akan dicapai pada tahun 2029. Penentuan ini mencakup penetapan visi, misi, serta sasaran pembangunan jangka menengah yang diharapkan dapat membawa Kota Binjai berkontribusi dalam pencapaian Visi Kota Binjai yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Hal tersebut perlu dilakukan melalui *gap analysis* terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode sebelumnya. *Gap analysis* dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja dengan harapannya, sehingga upaya strategis dapat ditentukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dalam RPJMD.
2) *Risk Profile Analysis* dilakukan dengan proses identifikasi dan *assesment* risiko. Proses identifikasi risiko mencakup pengenalan dan penilaian terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin timbul, baik dari internal maupun eksternal, yang dapat menghambat pencapaian target dalam RPJMD periode 2025-2029. Selanjutnya, dilakukan *assessment* risiko untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak serius dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Penilaian ini membantu untuk memahami tingkat urgensi dan tingkat risiko yang harus dihadapi, sehingga tindakan pencegahan dan mitigasi yang sesuai dapat diambil dalam penyusunan RPJMD.
3) Penyusunan Rencana Mitigasi (*Mitigation Plan Formulation*) yang dilakukan bersama dengan Kementerian/ Lembaga/ Daerah terkait dalam proses perumusan rencana mitigasi. Proses ini mencakup identifikasi risiko yang diprioritaskan untuk

ditangani dan menetapkan jadwal yang jelas untuk pelaksanaan rencana mitigasi. Dengan demikian, rencana mitigasi dapat disusun secara sistematis dan efektif untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam penyusunan RPJMD periode 2025-2029.

4) Melakukan *monitoring & reporting* untuk memastikan bahwa implementasi RPJMD berjalan dengan baik, memungkinkan evaluasi berkala terhadap pencapaian target, serta memastikan partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembangunan daerah. Proses tersebut mencakup pemantauan secara internal terhadap implementasi RPJMD Kota Binjai periode 2025-2029 dan mengikutsertakan pihak eksternal, seperti lembaga pengawas, organisasi masyarakat, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan RPJMD, sekaligus mendapatkan masukan yang diperlukan dari berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan implementasi RPJMD.

Identifikasi risiko yang dilakukan terhadap misi atau tujuan pembangunan yang telah ditetapkan RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 antara lain:

1) Dalam mengidentifikasi risiko yang berfokus pada transformasi sosial, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama yaitu dari sisi kesehatan melalui peningkatan upaya kesehatan promotif dan preventif, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, penurunan penyakit menular dan tidak menular, penguatan kesehatan mental masyarakat serta peningkatan kesejahteraan dan kompetensi tenaga kesehatan. Isu yang disebutkan tersebut berhubungan erat dengan pencapaian target pada aspek kesehatan untuk semua. Keberhasilan dalam upaya penanganan isu-isu tersebut berkorelasi dengan pencapaian target dari indikator-indikator kesehatan yang ditetapkan.
2) Dari sisi pendidikan meliputi penciptaan transformasi pendidikan unggul dan merata dilakukan melalui percepatan wajib belajar, pemerataan dan peningkatan akses pendidikan usia dini dan dasar, peningkatan kesejahteraan, kualitas dan kompetensi tenaga pendidik, penurunan jumlah anak tidak sekolah dan putus sekolah serta peningkatan pendidikan karakter dan budi pekerti. Kelemahan dan atau perlambatan kinerja atas salah satu aspek tersebut dapat mengakibatkan tidak tercapainya target indikator pendidikan yang sudah ditetapkan.

   Kemudian, beberapa isu utama yang mendukung aspek masyarakat yang sejahtera dan terlindungi antara lain mengenai peningkatan sarana, prasarana dan akses perlindungan sosial serta penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas dan peningkatan ekonomi

masyarakat miskin yang merata dan inklusif. Isu yang disuarakan tersebut penanganannya masih belum berkinerja optimal, sehingga upaya-upaya terarah dan berkesinambungan kedepannya diperlukan untuk menancapkan proses transformasi sosial di Kota Binjai secara kokoh.

3) Dalam mengidentifikasi risiko yang berfokus pada transformasi ekonomi, beberapa aspek menjadi perhatian utama. Pada aspek IPTEK, inovasi, dan produktivitas ekonomi perlu diupayakan penguatan modernisasi pertanian dan implementasi teknologi, pengembangan industri berteknologi menengah-tinggi, industri barang konsumsi berkelanjutan, bioekonomi, dan industri kreatif, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang holistik, peningkatan kapasitas, akses informasi petani dalam peningkatan produktivitas, metode pengembangbiakan, perawatan, pengendalian hama, pemupukan, teknologi pascapanen dan pemasaran pertanian lewat digital *marketplace/platform*, akselerasi investasi pada sektor teknologi maju dan inovasi tinggi, perluasan akses pembiayaan kredit bagi usaha pertanian, peningkatan peran BUMD, UMKM dan Koperasi, peningkatan kualitas SDM dan pelaku usaha ekonomi kreatif, penguatan industri sektor padat karya berorientasi ekspor dan bernilai tambah, peningkatan riset dan inovasi keberagaman produk ekonomi kreatif, penguatan sistem investasi / permodalan usaha ekonomi kreatif, penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI daerah yang berdaya saing di tataran global, serta peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri melalui peningkatan akses sumber daya, teknologi dan kemitraan usaha. Isu utama tersebut menjadi tantangan kedepannya untuk pencapaian target indikator yang sudah ditetapkan.

   Selanjutnya, pada aspek penerapan ekonomi hijau, mengangkat isu penerapan prinsip *green economy* dan *circular economy* di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan bioekonomi, percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan, pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy*, serta pengembangan industri manufaktur terpadu ramah lingkungan pada kawasan strategis industri. Seluruh isu tersebut berhubungan dengan target indeks ekonomi hijau, porsi EBT dalam bauran energi primer, dan menyinggung beberapa target dari indikator transformasi ekonomi lainnya.

   Pada aspek transformasi digital, isu yang menjadi perhatian yaitu mengenai konsep digitalisasi dan green industri, pemanfaatan teknologi, integrasi pertanian dan tata niaga, pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital melalui

penguatan struktur ekonomi kreatif dan ekonomi digital, peningkatan *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area *weak coverage* di kawasan perkotaan, pemanfaatan platform digitalisasi *one stop service* untuk kemudahan wisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam promosi ekonomi kreatif, penguatan proses bisnis UMKM melalui peran ekosistem digital, ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis. Beberapa isu terkait berhubungan dengan pencapaian indeks daya saing digital.

4) Pada aspek integrasi ekonomi domestik dan global, memuat isu mengenai penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, perluasan peluang investasi pada sektor ekonomi digital dan teknologi serta perluasan ke luar daerah, pengembangan peluang investasi di dalam dan luar negeri, memperluas *network* dengan lembaga penanaman modal di dalam negeri dan luar negeri melalui perwakilan negara luar, peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis ekonomi kreatif, pengelolaan jalan kota, pembangunan jalan arteri lingkar kawasan perkotaan terutama menuju jalan tol intraregional, serta pengembangan sarana dan prasarana yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan sentra produksi. Beberapa isu tersebut perlu mendapat perhatian kedepannya untuk mencapai target dari koefisien variasi harga antar wilayah, *share* PMTB, dan *share* eskpor Kota Binjai terhadap PDRBnya.

   Kemudian, aspek perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi memerlukan penanganan dalam hal Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik, pengembangan wilayah Metropolitan Binjai, Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan pada kawasan perkotaan, penyediaan infrastruktur air baku dan air minum, pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal, peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, *city beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan, penguatan pengelolaan jalan kota dan drainase lingkungan, serta penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan. Beragam isu tersebut diharapkan bermuara kepada pencapaian target mengenai indikator share PDRB wilayah metropolitan terhadap provinsi serta indikator rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

5) Dalam mengidentifikasi risiko yang berfokus pada transformasi tata kelola, aspek regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif membutuhkan perhatian dalam hal percepatan kinerja atas penyederhanaan regulasi dan berkualitas, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat, tata kelola kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif, digitalisasi layanan publik, pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi berdasarkan capaian kinerja, penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan penguatan pendidikan politik. Beberapa isu tersebut berkaitan erat dengan pencapaian target pada indeks reformasi hukum, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, indeks pelayanan publik, dan indeks integritas nasional.
6) Dalam mengidentifikasi risiko yang berfokus pada transformasi masyarakat demokratis dengan penciptaan lingkungan aman dan stabilitas ekonomi makro, maka beberapa aspek kunci perlu dipertimbangkan. Pertama, mengenai pemahaman wawasan kebangsaan, idiologi Pancasila dan Trantibunlinmas. Aspek ini perlu didukung dengan penguatan keamanan dan ketertiban, serta penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Kemudian pada aspek stabilitas ekonomi makro, isu yang menjadi perhatian adalah mengenai pengendalian inflasi daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, penguatan kualitas belanja daerah, dan penguatan kesempatan kerja. Keempat isu tersebut berhubungan erat dengan tercapainya stabilitas ekonomi makro di Kota Binjai. Selanjutnya pada aspek ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan perlu diupayakan penguatan keamanan dan ketertiban lingkungan yang mendukung stabilitas sosial. Percepatan kinerja atas berbagai isu tersebut diharapkan dapat bermuara kepada pemenuhan target dari indikator yang telah ditetapkan.
7) Dalam mengidentifikasi risiko yang berfokus pada transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi, maka beberapa aspek kunci perlu dipertimbangkan. Pertama, mengenai aspek beragama maslahat dan berkebudayaan maju. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian kedepannya yaitu mengenai penguatan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, penguatan kehidupan beragama yang inklusif, rukun dan toleran. Isu ini berkaitan dengan pencapaian target dari indeks kerukunan umat beragama. Kedua, mengenai aspek keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif. Isu penting pada aspek ini yaitu mengenai penguatan ketangguhan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan, perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia,

kemudian isu tentang kemandirian dan kemampuan dalam pengambilan keputusan, peningkatan partisipasi anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia di berbagai bidang pembangunan, serta pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan dalam pembangunan. Seluruh kinerja dari penanganan isu tersebut dapat bermuara pada ketercapaian target dari indeks pembangunan kualitas keluarga dan indeks ketimpangan gender. Ketiga, mengenai aspek lingkungan hidup berkualitas. Isu yang diangkat pada aspek ini antara lain mengenai tata ruang berbasis ekologis, pengelolaan sampah terpadu, dan kurikulum pendidikan kebencanaan Keempat, aspek tentang berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan. Isu yang mendapat perhatian pada aspek ini yaitu mengenai ketangguhan kota dalam menyediakan air, ketahanan energi serta kemandirian pangan perkotaan. Kelima yaitu aspek mengenai resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Aspek ini perlu didukung dengan penguatan ketangguhan kota terhadap bencana banjir dan penguatan pengelolaan sampah terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan *circular economy*.

Agar pelaksanaan pengendalian pembangunan dapat berjalan secara efektif, dibutuhkan dukungan melalui tatanan regulasi yang memadai. Regulasi ini harus mampu menyinergikan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, serta manajemen kinerja. Sinergi antar regulasi tersebut penting untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaan pengendalian, sejalan dengan kinerja Pemerintah Daerah dan perangkat daerah terkait, yang juga akan menjadi salah satu dasar dalam pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintahan. Selain itu, diperlukan pula kerangka kelembagaan pengendalian yang menyeluruh agar proses pelaksanaan dapat berlangsung secara optimal. Dalam konteks ini, dibutuhkan kelembagaan yang mampu mengoordinasikan upaya pengendalian baik secara lintas sektor maupun internal antara Pemerintah Daerah dan OPD. Rincian mengenai evaluasi tahunan dan lima tahunan disampaikan sebagai berikut:

Jadwal Evaluasi	Pelaksana	Metode Evaluasi	Output Evaluasi
Tahunan			
3 bulan sekali	Bapperida (bersama akademisi) untuk seluruh proses evaluasi	1. Laporan dari seluruh OPD 2. Analisis gap antara target dengan Capaian IKU dan IKD 3. Survei Kepuasan Pelayanan Publik berdasarkan kinerja IKU dan atau IKD.	Rekomendasi atas hasil evaluasi dan dibahas pada Rapat Koordinasi antar OPD. Hasil Evaluasi ditindaklanjuti pada RKPD tahun berjalan dan RKPD berikutnya.

Jadwal Evaluasi	Pelaksana	Metode Evaluasi	Output Evaluasi
Setiap tahun dan atau sewaktu-waktu dibutuhkan	Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Binjai	Dengar Pendapat	Rekomendasi dari DPRD Kota Binjai dan tindak lanjut oleh Pemerintah Kota Binjai.
5 Tahunan			
5 tahun sekali	Bapperida (bersama akademisi) untuk seluruh proses evaluasi	1. Laporan 5 tahunan oleh seluruh OPD. 2. Analisis gap antara target dengan Capaian IKU dan IKD, yang dikaitkan dengan RPJPD Kota Binjai. 3. Survei Kepuasan Pelayanan Publik Berdasarkan kinerja IKU dan atau IKD.	1. Rekomendasi atas hasil evaluasi dan dibahas pada Rapat Koordinasi antar OPD.
	Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Binjai	Dengar Pendapat	2. Sebagai Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota di DPRD Kota Binjai.
	Bapperida dan Seluruh OPD	1. Laporan 5 tahunan oleh seluruh OPD. 2. Analisis gap antara target dengan Capaian IKU dan IKD, yang dikaitkan dengan RPJPD Kota Binjai. 3. Survei Kepuasan Pelayanan Publik Berdasarkan kinerja IKU dan atau IKD.	3. Tindak lanjut untuk penyusunan RPJMD dan Renstra berikutnya.

Pelaksanaan evaluasi kinerja RPJMD Kota Binjai, baik secara tahunan maupun pada akhir periode RPJMD, dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi dengan pihak akademisi yang ditunjuk dan diangkat secara resmi melalui Surat Keputusan Wali Kota Binjai. Surat Keputusan tersebut menetapkan pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan RPJMD Kota Binjai Tahun 2025–2029, yang berfungsi untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan secara terarah dan terukur.

Dalam upaya mencapai misi dan tujuan pembangunan daerah, telah dilakukan pemetaan terhadap sejumlah risiko strategis yang dapat memengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan. Ragam risiko yang diperkirakan muncul di masa mendatang mencakup keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, pengelolaan waktu yang tidak optimal, dampak aktivitas terhadap lingkungan, bonus demografi, serta tantangan dalam koordinasi dan kolaborasi lintas pihak. Hubungan antara risiko, dampaknya, tingkat probabilitas, serta langkah mitigasi yang direncanakan dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut:

Misi	Risiko	Dampak	Probabilitas (Skala 1-4)	Rencana Mitigasi	OPD Pelaksana
Misi 1. Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan Serta Mendukung Program Makan Bergizi Gratis Bagi Anak Didik TK, SD dan SMP Misi 2. Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan Misi 3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan Misi 4. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kreatif	1. Anggaran yang terbatas	Kurang optimalnya pelaksanaan program / kegiatan	4	Kolaborasi dengan pihak swasta, terkait fasilitasi pendanaan (KPBU)	DPMPTSP, BPKPAD
				Konsultasi yang intens dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat	Bapperida
				Inovasi pembiayaan baru (obligasi daerah, pemanfaatan CSR yang optimal)	Bapperida bersama seluruh OPD
				Menggali potensi sumber-sumber penerimaan diluar pajak, seperti penguatan BUMD	Bapperida, Bagian Perekonomian Setdako Binjai, Direksi dan Komisaris BUMD
	2. Koordinasi dan Kolaborasi antar OPD terkait dan pihak eksternal	Sasaran tidak tercapai	3	Pengendalian atas pelaksanaan RPJMD terkait koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan antar sektor dan pihak eksternal	Bapperida bersama akademisi
	3. Integritas ASN	Inefisiensi dan tidak efektifnya program kegiatan dalam mencapai sasaran	3	Penguatan pendidikan dan pelatihan ASN yang berbasis integritas dan profesionalisme pekerjaan	Badan Kepegawaian
				Memperkuat pengawasan kinerja ASN	Inspektorat dan pengawasan melekat dari atasan langsung
	4. Ketepatan jadwal pelaksanaan program/kegiatan	Kecepatan dalam pencapaian sasaran	3	Membuat roadmap dan alokasi jadwal kegiatan	Seluruh OPD
	5. Aktivitas ekonomi terhadap kerusakan lingkungan	Kualitas lingkungan hidup yang menurun	3	Memperkuat proses AMDAL bagi usaha-usaha berisiko tinggi dan melaksanakan monitoring usaha secara kontinu	Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP
	6. Bonus demografi	Beban demografi	4	Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif melalui: 1. Membuat satuan tugas anti premanisme dan pungli 2. Dukungan modal bagi usaha mikro 3. Menyederhanakan Perizinan bagi usaha mikro 4. Dukungan pemasaran produk ekonomi kreatif	Bapperida, Dinas Koperasi UMKM, DPMPTSP

5.1.3. Sistem Insentif

Peran aktif dari para pelaku pembangunan diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan di Kota Binjai. Pelaku pembangunan yang dimaksud bukan hanya pemerintah, namun juga diharapkan adanya keterlibatan dan komitmen penuh dari pelaku pembangunan non pemerintah seperti lembaga penelitian, dunia usaha, filantropi, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat lainnya.

Melihat pentingnya peran dari seluruh pelaku pembangunan dalam mewujudkan sasaran pokok yang ditetapkan, maka perlu adanya sistem insentif. Harapannya, sistem insentif ini dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja dari setiap perangkat daerah Pemerintah Kota Binjai terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat dan daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan nonpemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

5.1.4. Mekanisme Perubahan

Berangkat dari adanya beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan, maka dokumen perencanaan memerlukan ruang penyesuaian agar adatif dengan keadaan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan lagi sasaran pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dapat tercapai, maka target RPJMD Kota Binjai dapat dimutakhirkan melalui RKPD Kota Binjai. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

5.1.5. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 berprinsip “tidak ada yang tertinggal” (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat. Komunikasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan melalui Forum OPD agar OPD dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora/perantau, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

5.2. Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi Kota Binjai Tahun 2029 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumbersumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi daerah dan pembentukan kelembagaan daerah yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam

proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*); (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerjasama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri daerah dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*asset value capture*).

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik dilakukan melalui: (i) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang (antara lain: dana pensiun, asuransi, instrumen di pasar modal, dan dana abadi daerah), (ii) inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa-menyewa, jual beli, dan bagi hasil, (iii) inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pembiayaan hijau, biru dan sirkular, (iv) produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya, (v) serta penguatan bauran pendanaan (*blended financing*) melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalitik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan, yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non publik dalam pembangunan daerah.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan nonpublik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup: (i) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (ii) penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (iii) penyelarasan prioritas investasi publik skala daerah; (iii) modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (iv) pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (v) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan (vi) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.

5.3 Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025-2029 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan daerah serta indikator kinerja dan program prioritas merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Binjai selama kurun waktu 5 tahun yang akan datang. RPJMD ini merupakan manifestasi dari visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang diselaraskan dengan Arah Kebijakan Tahap I RPJPD Kota Binjai.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kota Binjai dalam mewujudkan visi "***KOTA BINJAI YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN***" perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Binjai, serta (5) komitmen dalam menjaga keseimbangan pembangunan dan kesinambungan rencana.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH